



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.1-3483 Tahun 2025 serta disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, TambahanLembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas
 - g. catatan atas laporan keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD PT. Gorontalo Fitrah Mandiri

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	1.930.340.243.69
	.	6,23
b. Belanja	Rp	1.983.441.271.72
	.	4,61
Surplus/(Defisit)	Rp	(53.101.028.028,38)
c. Pembiayaan Daerah :		
1. Penerimaan	Rp	170.905.894.812,69
	.	
2. Pengeluaran	Rp	18.217.735.912,00
	.	
Pembiayaan Netto	Rp	152.688.158.900,69
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	99.587.130.872,31

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp5.934.278.178,23 dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran pendapatan sebelum perubahan	Rp	1.892.294.926.12 0,00
2. penambahan setelah APBDP	Rp	32.111.039.398,0 0
3. anggaran Pendapatan Daerah setelah penambahan APBDP	Rp	1.924.405.965.51 8,00
4. realisasi	Rp	1.930.340.243.69 6,23
Selisih lebih/(kurang)	Rp	5.934.278.178,23
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp94.935.205.362,39)dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran belanja sebelum perubahan	Rp	1.972.605.147.76 3,00
2. penambahan setelah APBDP	Rp	105.771.329.324, 00
3. anggaran Belanja Daerah Setelah Penambahan APBDP	Rp	2.078.376.477.08 7,00
4. realisasi	Rp	1.983.441.271.72 4,61
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(94.935.205.362, 39)
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp100.869.483.540,62 dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran surplus/defisit Setelah perubahan	Rp	(153.970.511.569 ,00)
2. realisasi	Rp	(53.101.028.028, 38)
Selisih lebih/(kurang)	Rp	100.869.483.540, 62
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,31 dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran penerimaan pembiayaan Setelah perubahan	Rp	170.905.894.813, 00
2. realisasi	Rp	170.905.894.812, 69
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,31

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp1.282.352.668,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran	pengeluaran	Rp	16.935.383.244,0
	pembiayaan Setelah perubahan	.	0
2. realisasi		Rp	18.217.735.912,0
		.	0
Selisih lebih/(kurang)		Rp	(1.282.352.668,0)
		.	0)

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp1.282.352.668,31 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan neto	Rp	153.970.511.569,
Setelah perubahan	.	00
2. realisasi	Rp	152.688.158.900,
	.	69
Selisih lebih/(kurang)	Rp	1.282.352.668,31

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	170.905.894.812,
	.	69
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan-pembiayaan tahun berjalan	Rp	170.905.894.812,
	.	69
sub total	Rp	0,00
	.	
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp	99.587.130.872,3
	.	1
d. koreksi kesalahan, dan lain-lain	Rp	0,00
	.	
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp	99.587.130.872,3
	.	1

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp	2.390.427.662.10
	.	3,80
b. jumlah kewajiban	Rp	154.641.404.936,
	.	74
c. jumlah ekuitas	Rp	2.235.786.257.16
	.	7,06

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. pendapatan - LO	Rp	2.001.542.165.31
	.	3,09
b. beban	Rp	2.085.068.300.32
	.	8,98
c. surplus/defisit dari operasi	Rp	(83.526.135.015,
	.	89)
d. surplus/defisit dari kegiatan-non operasional	Rp	(267.664.677,86)
	.	
e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp	(83.793.799.693,
	.	75)
f. surplus/defisit dari pos luar biasa	Rp	(4.701.497.713,0
	.	0)
g. surplus/defisit - LO	Rp	(88.495.297.406,
	.	75)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2024	Rp	170.971.636.669,
	.	69
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	166.466.143.373,
	.	07
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(219.567.171.401
	.	,45)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	(18.217.735.912,
	.	00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	(58.788.245,00)
	.	
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2024	Rp	99.594.084.484,3
	.	1

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	2.368.190.518.07
	.	7,99
b. surplus/defisit - LO	Rp	(88.495.297.406,
	.	75)
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp	(43.908.963.504,
	.	18)
d. ekuitas akhir	Rp	2.235.786.257.16
	.	7,06

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - Lampiran III : laporan operasional;
 - Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
 - Lampiran V : neraca;
 - Lampiran VI : laporan arus kas;
 - Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
 - Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang daerah;
 - Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
 - Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
 - Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
 - Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
 - Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;

Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Gubernur Gorontalo menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 September 2025
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 15 September 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO : (4/125/2025)

DAFTAR ISI		Hal
Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran	1
Lampiran I. 1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	3
Lampiran I. 2	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,Belanja, dan Pembiayaan	21
Lampiran I. 3	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	37
Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (<i>Bidang Pendidikan</i>)	37
2	Dinas Kesehatan	41
3	Rumah Sakit Umum dr. Hasri Aiunun Habibie	48
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (<i>Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>).....	51
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (<i>Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman</i>)	59
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	61
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64
8	Dinas Sosial	66
Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (<i>Bidang Kebudayaan</i>)	71
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (<i>Bidang Pertanahan</i>)	73
11	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi (<i>Bidang Tenaga Kerja</i>)	74
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	76
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (<i>Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i>)	78
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (<i>Bidang Pemberdayaan dan Masyarakat Desa</i>).....	80
15	Dinas Ketahanan Pangan.....	82
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	84
17	Dinas Perhubungan.....	86
18	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika (<i>Bidang Komunikasi dan Informatika</i>)	88
19	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika (<i>Bidang Statistik</i>)	90
20	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika (<i>Bidang Persandian</i>)	91
21	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.....	92
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	94
23	Dinas Pemuda dan Olahraga.....	97

DAFTAR ISI	Hal
24 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (<i>Bidang Kearsipan</i>)	99
25 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (<i>Bidang Perpustakaan</i>)	100
Urusan Pemerintah Pilihan	
26 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi (<i>Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</i>)	102
27 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Tenaga Kerja (<i>Bidang Transmigrasi</i>)	193
28 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	104
29 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.....	113
30 Dinas Kelautan dan Perikanan.....	116
31 Dinas Pariwisata.....	125
32 Dinas Pertanian.....	127
Unsur Pendukung Urusan Pemerintah	
33 Sekretariat Daerah.....	136
34 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.....	140
35 Biro Hukum.....	142
36 Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan.....	144
37 Biro Pengadaan Barang dan Jasa.....	146
38 Biro Organisasi.....	148
39 Biro Umum.....	150
40 Sekretariat DPRD.....	152
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	
41 Badan Penghubung.....	154
42 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (<i>Bidang Perencanaan</i>)	156
43 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (<i>Bidang Penelitian Dan Pengembangan</i>)	159
44 Badan Keuangan.....	160
45 Badan Kepegawaian.....	170
46 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	172
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	
47 Inspektorat.....	174
Unsur Pemerintahan Umum	
48 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	177

	DAFTAR ISI	Hal
Lampiran I. 4	Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Organisasi, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	180
Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	231
Lampiran III	Laporan Operasional	232
Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas	234
Lampiran V	Neraca	235
Lampiran VI	Laporan Arus Kas	237
Lampiran VII	Catatan Atas Laporan Keuangan	239
Lampiran VII.1	CaLK Penpadapatan - LRA	346
Lampiran VII.2	CaLK Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	409
Lampiran VII.3	CaLK Neraca	411
Lampiran VII.4	CaLK Laporan Operasional	447
Lampiran VII.5	CaLK Laporan Arus Kas	486
Lampiran VII.6	CaLK Laporan Perubahan Ekuitas	492
Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah	500
Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	501
Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir	502
Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	503
Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah	504
Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap	506
Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan	507
Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya	508
Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah	510
Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek	511
Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang	513
Lampiran XIX	Daftar Subkegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya	512
Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Terdiri Atas	
Lampiran XX.1	Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Sadan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah	514
Lampiran XX.2	Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah	515

DAFTAR ISI

Hal

Kebutuhan Informasi Lainnya

Lainnya 1)	Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara	516
Lainnya 2. A)	Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Mandatory Spending Bidang Pendidikan)	518
Lainnya 2. B)	Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Mandatory Spending Bidang Kesehatan)	520
Lainnya 2. C)	Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Mandatory Spending Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik)	521
Lainnya 3)	Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	522
Lainnya 4)	Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	524
Lainnya 5)	Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri	545
Lainnya 6)	Realisasi Belanja Daerah untuk Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah	546
Lainnya 7)	Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting	549
Lainnya 8)	Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	559
Lainnya 9)	Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (Pbj) Melalui E-Purchasing	581
Lainnya 10)	Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)	584
Lainnya 11)	Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Hibah Untuk Pendanaan Pemilihan Gubernur yang Bersumber Dari APBD	586



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.924.405.965.518,00	1.930.340.243.696,23	100,31	1.872.487.105.528,68
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	516.532.987.548,00	538.193.288.200,23	104,19	511.931.921.680,68
4.1.01	Pajak Daerah	437.626.291.107,00	457.233.185.366,00	104,48	432.906.096.022,00
4.1.02	Retribusi Daerah	49.085.884.000,00	54.310.658.591,00	110,64	4.232.976.524,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.219.035.031,00	11.580.368.337,00	113,32	11.012.325.878,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.601.777.410,00	15.069.075.906,23	76,88	63.780.523.256,68
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	516.532.987.548,00	538.193.288.200,23	104,19	511.931.921.680,68
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.406.269.839.970,00	1.385.451.449.664,00	98,52	1.350.262.842.740,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	30.445.345.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.398.586.957.970,00	1.377.768.567.664,00	98,51	1.319.817.497.740,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	20.476.158.970,00	24.972.779.787,00	121,96	23.449.484.007,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.022.379.872.000,00	1.022.379.872.000,00	100,00	979.869.891.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	167.802.393.000,00	144.159.157.866,00	85,91	140.281.348.223,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	187.928.534.000,00	186.256.758.011,00	99,11	176.216.774.510,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.398.586.957.970,00	1.377.768.567.664,00	98,51	1.319.817.497.740,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.682.882.000,00	7.682.882.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.682.882.000,00	7.682.882.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.406.269.839.970,00	1.385.451.449.664,00	98,52	1.350.262.842.740,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.603.138.000,00	6.695.505.832,00	417,65	10.292.341.108,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.103.138.000,00	6.231.945.832,00	564,93	9.707.761.108,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000,00	463.560.000,00	92,71	584.580.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.603.138.000,00	6.695.505.832,00	417,65	10.292.341.108,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.924.405.965.518,00	1.930.340.243.696,23	100,31	1.872.487.105.528,68
5	BELANJA DAERAH	2.078.376.477.087,00	1.983.441.271.724,61	95,43	1.900.595.987.883,66
5.1	BELANJA OPERASI	1.605.785.176.582,00	1.556.182.022.343,16	96,91	1.475.863.473.693,15
5.1.01	Belanja Pegawai	782.146.327.136,00	764.595.004.643,00	97,76	657.826.026.577,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	673.525.499.630,00	641.715.150.644,16	95,28	700.268.455.177,15
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.012.047,00	6.439.282.345,00	101,42	7.093.341.745,00
5.1.05	Belanja Hibah	132.481.124.769,00	132.240.736.851,00	99,82	85.797.138.870,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.283.213.000,00	11.191.847.860,00	99,19	24.878.511.324,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.605.785.176.582,00	1.556.182.022.343,16	96,91	1.475.863.473.693,15
5.2	BELANJA MODAL	257.490.295.402,00	220.354.238.401,45	85,58	230.302.490.856,51
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.466.898.227,00	73.194.098.495,00	96,99	57.681.672.265,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.486.591.071,00	68.302.416.338,45	71,53	42.838.898.903,91
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.641.009.156,00	70.394.263.930,00	89,51	121.110.943.553,60
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.895.796.948,00	8.463.459.638,00	107,19	8.670.976.134,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	257.490.295.402,00	220.354.238.401,45	85,58	230.302.490.856,51
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53	991.984.875,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53	991.984.875,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53	991.984.875,00
5.4	BELANJA TRANSFER	209.604.098.485,00	202.203.513.267,00	96,47	193.438.038.459,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	206.629.098.485,00	199.603.513.267,00	96,60	191.718.038.459,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2.925.000.000,00	2.600.000.000,00	88,89	1.210.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	510.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	209.604.098.485,00	202.203.513.267,00	96,47	193.438.038.459,00
	JUMLAH BELANJA	2.078.376.477.087,00	1.983.441.271.724,61	95,43	1.900.595.987.883,66
	SURPLUS/DEFISIT	(153.970.511.569,00)	(53.101.028.028,38)	34,49	(28.108.882.354,98)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	153.970.511.569,00	152.688.158.900,69	99,17	199.014.777.167,67
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	170.905.894.813,00	170.905.894.812,69	100,00	228.765.815.327,67
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	170.905.894.813,00	170.905.894.812,69	100,00	228.765.815.327,67
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	170.905.894.813,00	170.905.894.812,69	100,00	228.765.815.327,67
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57	29.751.038.160,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57	19.751.038.160,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57	29.751.038.160,00
	PEMBIAYAAN NETTO	153.970.511.569,00	152.688.158.900,69	99,17	199.014.777.167,67
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	99.587.130.872,31	0,00	170.905.894.812,69



PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024



Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	1.924.405.965.518	1.930.340.243.696,23	5.934.278.178	100,31
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	46.998.924.000	58.867.880.695,00	11.868.956.695	125,25
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0	5.473.443.543,00	5.473.443.543	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	5.473.443.543,00	5.473.443.543	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	0	5.473.443.543,00	5.473.443.543	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	157.337.163,00	157.337.163	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	157.337.163,00	157.337.163	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	5.316.106.380,00	5.316.106.380	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	4.3.01	Pendapatan Hibah	0	5.316.106.380,00	5.316.106.380	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	46.098.924.000	51.142.155.344,00	5.043.231.344	110,94
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000		Dinas Kesehatan	600.000.000	740.348.000,00	140.348.000	123,39
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	600.000.000	740.348.000,00	140.348.000	123,39
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.000.000	740.348.000,00	140.348.000	123,39
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	600.000.000	740.348.000,00	140.348.000	123,39
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001		RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	45.498.924.000	50.401.807.344,00	4.902.883.344	110,78
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	45.498.924.000	50.401.807.344,00	4.902.883.344	110,78
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45.498.924.000	50.401.807.344,00	4.902.883.344	110,78
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	45.498.924.000	50.401.807.344,00	4.902.883.344	110,78
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	900.000.000	2.252.281.808,00	1.352.281.808	250,25
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	900.000.000	2.252.281.808,00	1.352.281.808	250,25
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	900.000.000	2.252.281.808,00	1.352.281.808	250,25
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	900.000.000	2.252.281.808,00	1.352.281.808	250,25
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	900.000.000	2.252.281.808,00	1.352.281.808	250,25
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0	75.665.176,00	75.665.176	0,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	75.665.176,00	75.665.176	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000		Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	0	75.665.176,00	75.665.176	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	0	75.665.176,00	75.665.176	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	75.665.176,00	75.665.176	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	0	75.665.176,00	75.665.176	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.216.960.000	952.628.944,00	(1.264.331.056)	42,97
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.366.960.000	654.910.594,00	(712.049.406)	47,91
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	1.366.960.000	654.910.594,00	(712.049.406)	47,91
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.366.960.000	654.910.594,00	(712.049.406)	47,91
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.366.960.000	654.910.594,00	(712.049.406)	47,91
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.216.960.000	491.674.850,00	(725.285.150)	40,40
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	150.000.000	163.235.744,00	13.235.744	108,82
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	850.000.000	297.718.350,00	(552.281.650)	35,03
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000		Dinas Pertanian	850.000.000	297.718.350,00	(552.281.650)	35,03
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	850.000.000	297.718.350,00	(552.281.650)	35,03
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	850.000.000	297.718.350,00	(552.281.650)	35,03
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	850.000.000	297.718.350,00	(552.281.650)	35,03
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.875.190.081.518	1.870.444.068.881,23	(4.746.012.636)	99,75
5.02			KEUANGAN	1.875.170.081.518	1.870.392.905.818,23	(4.777.175.699)	99,75
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000		Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	1.875.170.081.518	1.870.392.905.818,23	(4.777.175.699)	99,75
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.875.170.081.518	1.870.392.905.818,23	(4.777.175.699)	99,75
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	467.297.103.548	483.562.056.702,23	16.264.953.154	103,48
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	4.1.01	Pajak Daerah	437.626.291.107	457.233.185.366,00	19.606.894.259	104,48
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.219.035.031	11.580.368.337,00	1.361.333.306	113,32
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.451.777.410	14.748.502.999,23	(4.703.274.410)	75,82
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.406.269.839.970	1.385.451.449.664,00	(20.818.390.306)	98,52
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.406.269.839.970	1.385.451.449.664,00	(20.818.390.306)	98,52
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.603.138.000	1.379.399.452,00	(223.738.548)	86,04
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	4.3.01	Pendapatan Hibah	1.103.138.000	915.839.452,00	(187.298.548)	83,02
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	500.000.000	463.560.000,00	(36.440.000)	92,71

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	20.000.000	51.163.063,00	31.163.063	255,82
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.000.000	51.163.063,00	31.163.063	255,82
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	20.000.000	51.163.063,00	31.163.063	255,82
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000	51.163.063,00	31.163.063	255,82
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	20.000.000	51.163.063,00	31.163.063	255,82
		5	Belanja	2.078.376.477.087	1.983.441.271.724,61	(94.935.205.362)	95,43
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.031.507.974.549	973.722.120.722,23	(57.785.853.826)	94,40
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	556.155.658.188	547.301.402.008,00	(8.854.256.180)	98,41
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	556.155.658.188	547.301.402.008,00	(8.854.256.180)	98,41
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	556.155.658.188	547.301.402.008,00	(8.854.256.180)	98,41
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	494.666.686.847	486.057.129.075,00	(8.609.557.772)	98,26
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	374.958.952.632	367.680.745.697,00	(7.278.206.935)	98,06
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.707.734.215	118.376.383.378,00	(1.331.350.837)	98,89
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	61.488.971.341	61.244.272.933,00	(244.698.408)	99,60
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.020.954.364	26.974.637.853,00	1.953.683.489	107,81
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.175.906.029	25.575.742.363,00	(2.600.163.666)	90,77
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	633.000.000	465.873.079,00	(167.126.921)	73,60
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.659.110.948	8.228.019.638,00	568.908.690	107,43
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	282.659.704.840	244.808.206.034,23	(37.851.498.805)	86,61
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000		Dinas Kesehatan	98.036.047.873	96.277.948.736,00	(1.758.099.137)	98,21
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	98.036.047.873	96.277.948.736,00	(1.758.099.137)	98,21
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	97.849.111.373	96.091.273.736,00	(1.757.837.637)	98,20
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	20.725.882.663	20.643.570.279,00	(82.312.384)	99,60
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.273.228.710	72.597.703.457,00	(1.675.525.253)	97,74
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	5.1.05	Belanja Hibah	2.850.000.000	2.850.000.000,00	0	100,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	186.936.500	186.675.000,00	(261.500)	99,86
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.936.500	186.675.000,00	(261.500)	99,86
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001		RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	169.959.070.667	137.063.833.293,23	(32.895.237.373)	80,65
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	5	BELANJA DAERAH	169.959.070.667	137.063.833.293,23	(32.895.237.373)	80,65
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	97.791.760.253	89.297.860.216,26	(8.493.900.036)	91,31
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	21.877.030.833	21.113.256.946,00	(763.773.887)	96,51
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.914.729.420	68.184.603.270,26	(7.730.126.149)	89,82
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	72.167.310.414	47.765.973.076,97	(24.401.337.337)	66,19
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.908.581.566	25.198.699.756,00	(3.709.881.810)	87,17
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.648.790.550	18.967.905.672,97	(20.680.884.877)	47,84

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.609.938.298	3.599.367.648,00	(10.570.650)	99,71
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002		Laboratorium Kesehatan Daerah	14.664.586.300	11.466.424.005,00	(3.198.162.295)	78,19
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	5	BELANJA DAERAH	14.664.586.300	11.466.424.005,00	(3.198.162.295)	78,19
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.838.484.300	1.649.786.448,00	(188.697.852)	89,74
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	392.000.000	380.651.200,00	(11.348.800)	97,10
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.446.484.300	1.269.135.248,00	(177.349.052)	87,74
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	12.826.102.000	9.816.637.557,00	(3.009.464.443)	76,54
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.461.236.000	1.446.319.327,00	(14.916.673)	98,98
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.000.000.000	8.287.668.230,00	(2.712.331.770)	75,34
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	364.866.000	82.650.000,00	(282.216.000)	22,65
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	139.436.132.061	129.947.087.066,00	(9.489.044.995)	93,19
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	138.092.073.236	128.772.828.741,00	(9.319.244.495)	93,25
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	5	BELANJA DAERAH	138.092.073.236	128.772.828.741,00	(9.319.244.495)	93,25
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	59.593.021.058	58.398.660.554,00	(1.194.360.504)	98,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	25.736.265.069	25.592.398.525,00	(143.866.544)	99,44
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.856.755.989	32.806.262.029,00	(1.050.493.960)	96,90
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	78.499.052.178	70.374.168.187,00	(8.124.883.991)	89,65
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	467.335.820	460.000.500,00	(7.335.320)	98,43
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.920.000.000	7.547.544.213,00	(372.455.787)	95,30
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.111.716.358	62.366.623.474,00	(7.745.092.884)	88,95
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001		UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan	1.344.058.825	1.174.258.325,00	(169.800.500)	87,37
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	5	BELANJA DAERAH	1.344.058.825	1.174.258.325,00	(169.800.500)	87,37
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.319.558.825	1.149.758.325,00	(169.800.500)	87,13
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.319.558.825	1.149.758.325,00	(169.800.500)	87,13
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	5.2	BELANJA MODAL	24.500.000	24.500.000,00	0	100,00
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.500.000	24.500.000,00	0	100,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.458.029.401	4.446.848.604,00	(11.180.797)	99,75
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.458.029.401	4.446.848.604,00	(11.180.797)	99,75
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	5	BELANJA DAERAH	4.458.029.401	4.446.848.604,00	(11.180.797)	99,75
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.888.029.401	3.879.062.256,00	(8.967.145)	99,77
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.718.029.401	2.709.062.256,00	(8.967.145)	99,67

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.170.000.000	1.170.000.000,00	0	100,00
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	570.000.000	567.786.348,00	(2.213.652)	99,61
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	570.000.000	567.786.348,00	(2.213.652)	99,61
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.206.432.042	21.706.723.560,00	(499.708.482)	97,75
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	12.088.677.615	11.785.438.679,00	(303.238.936)	97,49
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	12.088.677.615	11.785.438.679,00	(303.238.936)	97,49
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	12.012.733.615	11.709.494.679,00	(303.238.936)	97,48
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.662.277.757	4.609.921.260,00	(52.356.497)	98,88
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.350.455.858	7.099.573.419,00	(250.882.439)	96,59
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	5.2	BELANJA MODAL	75.944.000	75.944.000,00	0	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.944.000	75.944.000,00	0	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.117.754.427	9.921.284.881,00	(196.469.546)	98,06
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	10.117.754.427	9.921.284.881,00	(196.469.546)	98,06
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.097.754.427	9.901.334.881,00	(196.419.546)	98,05
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.114.431.635	6.038.191.845,00	(76.239.790)	98,75
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.983.322.792	3.863.143.036,00	(120.179.756)	96,98
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000	19.950.000,00	(50.000)	99,75
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	19.950.000,00	(50.000)	99,75
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	26.592.018.017	25.511.853.450,00	(1.080.164.567)	95,94
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000		Dinas Sosial	26.592.018.017	25.511.853.450,00	(1.080.164.567)	95,94
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	5	BELANJA DAERAH	26.592.018.017	25.511.853.450,00	(1.080.164.567)	95,94
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	5.1	BELANJA OPERASI	26.026.119.547	25.082.653.050,00	(943.466.497)	96,37
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.307.739.661	8.209.659.330,00	(98.080.331)	98,82
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.124.566.886	8.358.145.860,00	(766.421.026)	91,60
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	5.1.05	Belanja Hibah	580.000.000	580.000.000,00	0	100,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.013.813.000	7.934.847.860,00	(78.965.140)	99,01
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	5.2	BELANJA MODAL	565.898.470	429.200.400,00	(136.698.070)	75,84
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	565.898.470	429.200.400,00	(136.698.070)	75,84
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	210.747.468.024	207.558.651.700,38	(3.188.816.323)	98,49
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	15.775.940.243	15.463.176.082,00	(312.764.161)	98,02
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0001		UPTD Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas	388.042.000	273.329.596,00	(114.712.404)	70,44
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0001	5	BELANJA DAERAH	388.042.000	273.329.596,00	(114.712.404)	70,44
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	388.042.000	273.329.596,00	(114.712.404)	70,44
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.042.000	273.329.596,00	(114.712.404)	70,44
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000		Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	15.387.898.243	15.189.846.486,00	(198.051.757)	98,71

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	5	BELANJA DAERAH	15.387.898.243	15.189.846.486,00	(198.051.757)	98,71
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.294.940.743	15.097.096.486,00	(197.844.257)	98,71
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	12.199.191.319	11.962.808.540,00	(236.382.779)	98,06
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.095.749.424	3.134.287.946,00	38.538.522	101,24
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	92.957.500	92.750.000,00	(207.500)	99,78
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.957.500	92.750.000,00	(207.500)	99,78
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.814.117.841	7.749.165.852,00	(64.951.989)	99,17
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.814.117.841	7.749.165.852,00	(64.951.989)	99,17
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.814.117.841	7.749.165.852,00	(64.951.989)	99,17
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.762.752.891	7.698.865.852,00	(63.887.039)	99,18
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.661.226.770	3.638.608.722,00	(22.618.048)	99,38
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.601.526.121	2.560.257.130,00	(41.268.991)	98,41
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.500.000.000	1.500.000.000,00	0	100,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	51.364.950	50.300.000,00	(1.064.950)	97,93
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.364.950	50.300.000,00	(1.064.950)	97,93
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	12.188.019.824	12.037.615.911,00	(150.403.913)	98,77
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000		Dinas Ketahanan Pangan	12.188.019.824	12.037.615.911,00	(150.403.913)	98,77
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	5	BELANJA DAERAH	12.188.019.824	12.037.615.911,00	(150.403.913)	98,77
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.581.719.824	11.432.635.911,00	(149.083.913)	98,71
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.419.739.224	7.330.110.654,00	(89.628.570)	98,79
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.161.980.600	4.102.525.257,00	(59.455.343)	98,57
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	5.2	BELANJA MODAL	606.300.000	604.980.000,00	(1.320.000)	99,78
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	598.800.000	597.480.000,00	(1.320.000)	99,78
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.500.000	7.500.000,00	0	100,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	4.196.528.220	3.732.786.531,00	(463.741.689)	88,95
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.196.528.220	3.732.786.531,00	(463.741.689)	88,95
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	5	BELANJA DAERAH	4.196.528.220	3.732.786.531,00	(463.741.689)	88,95
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.196.528.220	3.732.786.531,00	(463.741.689)	88,95
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.096.528.220	1.632.786.531,00	(463.741.689)	77,88
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	5.1.05	Belanja Hibah	2.100.000.000	2.100.000.000,00	0	100,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	27.617.167.298	27.441.664.510,00	(175.502.788)	99,36
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	27.617.167.298	27.441.664.510,00	(175.502.788)	99,36
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	5	BELANJA DAERAH	27.617.167.298	27.441.664.510,00	(175.502.788)	99,36
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	5.1	BELANJA OPERASI	27.510.755.174	27.337.926.510,00	(172.828.664)	99,37
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	23.491.638.078	23.394.427.706,00	(97.210.372)	99,59

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.019.117.096	3.943.498.804,00	(75.618.292)	98,12
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	5.2	BELANJA MODAL	106.412.124	103.738.000,00	(2.674.124)	97,49
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.412.124	103.738.000,00	(2.674.124)	97,49
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.684.962.392	8.531.337.314,00	(153.625.078)	98,23
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.684.962.392	8.531.337.314,00	(153.625.078)	98,23
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	5	BELANJA DAERAH	8.684.962.392	8.531.337.314,00	(153.625.078)	98,23
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.493.499.792	8.341.004.734,00	(152.495.058)	98,20
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.831.236.517	5.812.669.681,00	(18.566.836)	99,68
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.662.263.275	2.528.335.053,00	(133.928.222)	94,97
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	5.2	BELANJA MODAL	191.462.600	190.332.580,00	(1.130.020)	99,41
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	191.462.600	190.332.580,00	(1.130.020)	99,41
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.330.634.240	4.294.206.069,00	(36.428.171)	99,16
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.330.634.240	4.294.206.069,00	(36.428.171)	99,16
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	5	BELANJA DAERAH	4.330.634.240	4.294.206.069,00	(36.428.171)	99,16
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.301.845.740	4.267.119.829,00	(34.725.911)	99,19
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.301.845.740	4.267.119.829,00	(34.725.911)	99,19
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	5.2	BELANJA MODAL	28.788.500	27.086.240,00	(1.702.260)	94,09
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.788.500	27.086.240,00	(1.702.260)	94,09
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	150.970.000	149.058.218,00	(1.911.782)	98,73
2.14	1.02.2.14.0.00.03.0000		Dinas Kesehatan	150.970.000	149.058.218,00	(1.911.782)	98,73
2.14	1.02.2.14.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	150.970.000	149.058.218,00	(1.911.782)	98,73
2.14	1.02.2.14.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	150.970.000	149.058.218,00	(1.911.782)	98,73
2.14	1.02.2.14.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.970.000	149.058.218,00	(1.911.782)	98,73
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	15.756.883.780	15.056.856.361,38	(700.027.418)	95,56
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000		Dinas Perhubungan	15.756.883.780	15.056.856.361,38	(700.027.418)	95,56
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	5	BELANJA DAERAH	15.756.883.780	15.056.856.361,38	(700.027.418)	95,56
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.160.625.165	11.061.666.074,90	(98.959.090)	99,11
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.383.725.790	6.349.155.393,00	(34.570.397)	99,46
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.776.899.375	4.712.510.681,90	(64.388.693)	98,65
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	5.2	BELANJA MODAL	4.596.258.615	3.995.190.286,48	(601.068.328)	86,92
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.991.913	142.607.680,00	(1.384.233)	99,04

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.452.266.702	3.852.582.606,48	(599.684.095)	86,53
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.970.218.614	15.809.055.579,00	(161.163.035)	98,99
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000		Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	15.970.218.614	15.809.055.579,00	(161.163.035)	98,99
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	5	BELANJA DAERAH	15.970.218.614	15.809.055.579,00	(161.163.035)	98,99
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.870.218.614	15.709.117.779,00	(161.100.835)	98,98
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.024.109.333	5.008.017.598,00	(16.091.735)	99,68
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.396.109.281	9.251.100.181,00	(145.009.100)	98,46
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.450.000.000	1.450.000.000,00	0	100,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000	99.937.800,00	(62.200)	99,94
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000	99.937.800,00	(62.200)	99,94
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	31.200.339.016	31.055.710.021,00	(144.628.995)	99,54
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000		Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	31.200.339.016	31.055.710.021,00	(144.628.995)	99,54
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	5	BELANJA DAERAH	31.200.339.016	31.055.710.021,00	(144.628.995)	99,54
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	5.1	BELANJA OPERASI	31.200.339.016	31.055.710.021,00	(144.628.995)	99,54
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.691.630.216	9.659.965.973,00	(31.664.243)	99,67
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.908.708.800	20.795.744.048,00	(112.964.752)	99,46
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	5.1.05	Belanja Hibah	600.000.000	600.000.000,00	0	100,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.930.199.349	9.719.802.849,00	(210.396.500)	97,88
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9.930.199.349	9.719.802.849,00	(210.396.500)	97,88
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.930.199.349	9.719.802.849,00	(210.396.500)	97,88
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.830.369.549	9.620.115.849,00	(210.253.700)	97,86
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.550.859.109	5.456.845.300,00	(94.013.809)	98,31
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.279.510.440	4.163.270.549,00	(116.239.891)	97,28
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	99.829.800	99.687.000,00	(142.800)	99,86
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.829.800	99.687.000,00	(142.800)	99,86
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	41.417.771.672	41.153.215.286,00	(264.556.386)	99,36
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemuda dan Olahraga	41.417.771.672	41.153.215.286,00	(264.556.386)	99,36
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	41.417.771.672	41.153.215.286,00	(264.556.386)	99,36
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	41.347.771.672	41.088.026.786,00	(259.744.886)	99,37
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.035.571.672	4.987.580.393,00	(47.991.279)	99,05
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.757.200.000	7.585.446.393,00	(171.753.607)	97,79
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	28.555.000.000	28.515.000.000,00	(40.000.000)	99,86
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	70.000.000	65.188.500,00	(4.811.500)	93,13
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000	65.188.500,00	(4.811.500)	93,13
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	518.299.850	508.655.343,00	(9.644.507)	98,14

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000		Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	518.299.850	508.655.343,00	(9.644.507)	98,14
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000	5	BELANJA DAERAH	518.299.850	508.655.343,00	(9.644.507)	98,14
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000	5.1	BELANJA OPERASI	518.299.850	508.655.343,00	(9.644.507)	98,14
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	518.299.850	508.655.343,00	(9.644.507)	98,14
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	122.090.000	121.725.605,00	(364.395)	99,70
2.21	2.16.2.20.2.21.26.0000		Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	122.090.000	121.725.605,00	(364.395)	99,70
2.21	2.16.2.20.2.21.26.0000	5	BELANJA DAERAH	122.090.000	121.725.605,00	(364.395)	99,70
2.21	2.16.2.20.2.21.26.0000	5.1	BELANJA OPERASI	122.090.000	121.725.605,00	(364.395)	99,70
2.21	2.16.2.20.2.21.26.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.090.000	121.725.605,00	(364.395)	99,70
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5.047.423.163	4.827.169.384,00	(220.253.779)	95,64
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.047.423.163	4.827.169.384,00	(220.253.779)	95,64
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.047.423.163	4.827.169.384,00	(220.253.779)	95,64
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.777.101.163	4.560.534.884,00	(216.566.279)	95,47
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.777.101.163	4.560.534.884,00	(216.566.279)	95,47
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	270.322.000	266.634.500,00	(3.687.500)	98,64
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.277.000	175.777.000,00	(1.500.000)	99,15
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.000.000	37.857.500,00	(2.142.500)	94,64
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	53.045.000	53.000.000,00	(45.000)	99,92
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	9.514.459.822	9.411.890.000,00	(102.569.822)	98,92
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.514.459.822	9.411.890.000,00	(102.569.822)	98,92
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	5	BELANJA DAERAH	9.514.459.822	9.411.890.000,00	(102.569.822)	98,92
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.377.418.322	9.279.990.000,00	(97.428.322)	98,96
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.339.171.983	7.252.655.166,00	(86.516.817)	98,82
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.038.246.339	2.027.334.834,00	(10.911.505)	99,46
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	5.2	BELANJA MODAL	137.041.500	131.900.000,00	(5.141.500)	96,25
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.413.500	63.400.000,00	(4.013.500)	94,05
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	69.628.000	68.500.000,00	(1.128.000)	98,38
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	511.442.700	495.560.785,00	(15.881.915)	96,89
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	511.442.700	495.560.785,00	(15.881.915)	96,89
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	5	BELANJA DAERAH	511.442.700	495.560.785,00	(15.881.915)	96,89
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	5.1	BELANJA OPERASI	511.442.700	495.560.785,00	(15.881.915)	96,89
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	511.442.700	495.560.785,00	(15.881.915)	96,89
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	138.505.728.358	135.519.236.833,00	(2.986.491.525)	97,84
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	38.484.456.600	37.452.202.782,00	(1.032.253.818)	97,32
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	28.401.752.183	28.389.910.406,00	(11.841.777)	99,96

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	5	BELANJA DAERAH	28.401.752.183	28.389.910.406,00	(11.841.777)	99,96
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	5.1	BELANJA OPERASI	23.917.057.683	23.884.071.581,00	(32.986.102)	99,86
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	11.267.778.110	11.109.700.809,00	(158.077.301)	98,60
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.649.279.573	12.774.370.772,00	125.091.199	100,99
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	5.2	BELANJA MODAL	4.484.694.500	4.505.838.825,00	21.144.325	100,47
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.880.694.500	2.848.418.822,00	(32.275.678)	98,88
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.350.700.000	1.404.121.303,00	53.421.303	103,96
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	253.300.000	253.298.700,00	(1.300)	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001		UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP)	1.645.984.727	1.425.501.440,00	(220.483.287)	86,60
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	5	BELANJA DAERAH	1.645.984.727	1.425.501.440,00	(220.483.287)	86,60
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.412.119.127	1.201.544.016,00	(210.575.111)	85,09
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.412.119.127	1.201.544.016,00	(210.575.111)	85,09
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	5.2	BELANJA MODAL	233.865.600	223.957.424,00	(9.908.176)	95,76
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	224.000.000	223.957.424,00	(42.576)	99,98
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.865.600	0,00	(9.865.600)	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002		UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPI Tenda)	3.227.567.822	2.919.533.969,00	(308.033.853)	90,46
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	5	BELANJA DAERAH	3.227.567.822	2.919.533.969,00	(308.033.853)	90,46
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.228.336.319	978.184.521,00	(250.151.798)	79,63
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.228.336.319	978.184.521,00	(250.151.798)	79,63
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.999.231.503	1.941.349.448,00	(57.882.055)	97,10
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	602.232.000	601.473.803,00	(758.197)	99,87
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	252.999.503	208.846.000,00	(44.153.503)	82,55
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.144.000.000	1.131.029.645,00	(12.970.355)	98,87
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004		UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma	3.010.774.332	2.724.652.523,00	(286.121.809)	90,50
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	5	BELANJA DAERAH	3.010.774.332	2.724.652.523,00	(286.121.809)	90,50
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	5.1	BELANJA OPERASI	639.874.145	569.602.839,00	(70.271.306)	89,02
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	639.874.145	569.602.839,00	(70.271.306)	89,02
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	5.2	BELANJA MODAL	2.370.900.187	2.155.049.684,00	(215.850.503)	90,90
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000	199.778.000,00	(222.000)	99,89
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.242.900.187	1.038.347.500,00	(204.552.687)	83,54
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	928.000.000	916.924.184,00	(11.075.816)	98,81
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003		UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta (PPI Tilamuta)	1.933.058.136	1.776.175.510,00	(156.882.626)	91,88
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	5	BELANJA DAERAH	1.933.058.136	1.776.175.510,00	(156.882.626)	91,88
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	5.1	BELANJA OPERASI	736.466.136	604.653.708,00	(131.812.428)	82,10
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	736.466.136	604.653.708,00	(131.812.428)	82,10
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.196.592.000	1.171.521.802,00	(25.070.198)	97,90

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.741.000	29.700.000,00	(41.000)	99,86
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	448.162.500	438.410.950,00	(9.751.550)	97,82
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	718.688.500	703.410.852,00	(15.277.648)	97,87
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005		Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP)	265.319.400	216.428.934,00	(48.890.466)	81,57
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	5	BELANJA DAERAH	265.319.400	216.428.934,00	(48.890.466)	81,57
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	5.1	BELANJA OPERASI	265.319.400	216.428.934,00	(48.890.466)	81,57
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.319.400	216.428.934,00	(48.890.466)	81,57
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	12.688.655.464	12.410.166.521,00	(278.488.943)	97,81
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000		Dinas Pariwisata	12.688.655.464	12.410.166.521,00	(278.488.943)	97,81
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	5	BELANJA DAERAH	12.688.655.464	12.410.166.521,00	(278.488.943)	97,81
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.860.997.464	11.586.649.725,00	(274.347.739)	97,69
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.269.279.464	6.118.947.315,00	(150.332.149)	97,60
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.591.718.000	5.467.702.410,00	(124.015.590)	97,78
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	5.2	BELANJA MODAL	827.658.000	823.516.796,00	(4.141.204)	99,50
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	262.658.000	259.916.796,00	(2.741.204)	98,96
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	465.000.000	463.650.000,00	(1.350.000)	99,71
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000	99.950.000,00	(50.000)	99,95
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	68.554.327.744	67.050.289.941,00	(1.504.037.803)	97,81
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000		Dinas Pertanian	58.407.232.569	57.598.145.058,00	(809.087.511)	98,61
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	5	BELANJA DAERAH	58.407.232.569	57.598.145.058,00	(809.087.511)	98,61
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	5.1	BELANJA OPERASI	55.044.957.569	54.273.808.158,00	(771.149.411)	98,60
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	34.507.925.448	34.176.401.929,00	(331.523.519)	99,04
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.537.032.121	20.097.406.229,00	(439.625.892)	97,86
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.362.275.000	3.324.336.900,00	(37.938.100)	98,87
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.177.275.000	3.139.446.900,00	(37.828.100)	98,81
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000	179.900.000,00	(100.000)	99,94
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000	4.990.000,00	(10.000)	99,80
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001		UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	5.127.374.000	4.994.071.704,00	(133.302.296)	97,40
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	5	BELANJA DAERAH	5.127.374.000	4.994.071.704,00	(133.302.296)	97,40
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.519.698.200	3.402.883.704,00	(116.814.496)	96,68
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.519.698.200	3.402.883.704,00	(116.814.496)	96,68
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.607.675.800	1.591.188.000,00	(16.487.800)	98,97
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.307.675.800	1.291.388.000,00	(16.287.800)	98,75
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000	299.800.000,00	(200.000)	99,93

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002		UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian	1.087.852.500	920.379.186,00	(167.473.314)	84,61
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	5	BELANJA DAERAH	1.087.852.500	920.379.186,00	(167.473.314)	84,61
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.087.852.500	920.379.186,00	(167.473.314)	84,61
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.087.852.500	920.379.186,00	(167.473.314)	84,61
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003		UPTD Laboratorium Veteriner	1.006.223.000	968.777.273,00	(37.445.727)	96,28
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	5	BELANJA DAERAH	1.006.223.000	968.777.273,00	(37.445.727)	96,28
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	5.1	BELANJA OPERASI	495.939.000	458.522.973,00	(37.416.027)	92,46
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.939.000	458.522.973,00	(37.416.027)	92,46
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	5.2	BELANJA MODAL	510.284.000	510.254.300,00	(29.700)	99,99
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	510.284.000	510.254.300,00	(29.700)	99,99
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004		UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian	341.668.000	310.771.300,00	(30.896.700)	90,96
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	5	BELANJA DAERAH	341.668.000	310.771.300,00	(30.896.700)	90,96
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	5.1	BELANJA OPERASI	330.611.000	299.744.300,00	(30.866.700)	90,66
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.611.000	299.744.300,00	(30.866.700)	90,66
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	5.2	BELANJA MODAL	11.057.000	11.027.000,00	(30.000)	99,73
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.057.000	11.027.000,00	(30.000)	99,73
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005		UPTD Balai Perbibitan Ternak	2.583.977.675	2.258.145.420,00	(325.832.255)	87,39
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	5	BELANJA DAERAH	2.583.977.675	2.258.145.420,00	(325.832.255)	87,39
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.283.977.675	1.958.305.420,00	(325.672.255)	85,74
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.283.977.675	1.958.305.420,00	(325.672.255)	85,74
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	5.2	BELANJA MODAL	300.000.000	299.840.000,00	(160.000)	99,95
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000	299.840.000,00	(160.000)	99,95
3.28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	7.729.528.818	7.675.210.743,00	(54.318.075)	99,30
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.656.980.000	3.879.435.463,00	222.455.463	106,08
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	5	BELANJA DAERAH	3.656.980.000	3.879.435.463,00	222.455.463	106,08
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.656.980.000	3.879.435.463,00	222.455.463	106,08
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.656.980.000	3.879.435.463,00	222.455.463	106,08
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001		UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat	1.081.876.689	1.033.006.380,00	(48.870.309)	95,48
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	5	BELANJA DAERAH	1.081.876.689	1.033.006.380,00	(48.870.309)	95,48
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	5.1	BELANJA OPERASI	340.486.689	299.776.380,00	(40.710.309)	88,04
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.486.689	299.776.380,00	(40.710.309)	88,04
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	5.2	BELANJA MODAL	741.390.000	733.230.000,00	(8.160.000)	98,90
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	741.390.000	733.230.000,00	(8.160.000)	98,90
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002		UPTD KPH Wilayah III Pohuwato	358.508.626	320.888.340,00	(37.620.286)	89,51
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	5	BELANJA DAERAH	358.508.626	320.888.340,00	(37.620.286)	89,51
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	5.1	BELANJA OPERASI	317.316.626	279.714.340,00	(37.602.286)	88,15
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.316.626	279.714.340,00	(37.602.286)	88,15
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	5.2	BELANJA MODAL	41.192.000	41.174.000,00	(18.000)	99,96
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.192.000	41.174.000,00	(18.000)	99,96

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003		UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara	509.948.580	455.177.136,00	(54.771.444)	89,26
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	5	BELANJA DAERAH	509.948.580	455.177.136,00	(54.771.444)	89,26
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	5.1	BELANJA OPERASI	343.125.610	293.227.136,00	(49.898.474)	85,46
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.125.610	293.227.136,00	(49.898.474)	85,46
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	5.2	BELANJA MODAL	166.822.970	161.950.000,00	(4.872.970)	97,08
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.822.970	161.950.000,00	(4.872.970)	97,08
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004		UPTD KPH Wilayah V Boalemo	459.073.700	410.325.120,00	(48.748.580)	89,38
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	5	BELANJA DAERAH	459.073.700	410.325.120,00	(48.748.580)	89,38
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	5.1	BELANJA OPERASI	431.028.200	382.280.120,00	(48.748.080)	88,69
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.028.200	382.280.120,00	(48.748.080)	88,69
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	5.2	BELANJA MODAL	28.045.500	28.045.000,00	(500)	100,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.045.500	28.045.000,00	(500)	100,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005		UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo	1.311.427.157	1.257.860.214,00	(53.566.943)	95,92
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	5	BELANJA DAERAH	1.311.427.157	1.257.860.214,00	(53.566.943)	95,92
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	5.1	BELANJA OPERASI	303.287.157	264.411.214,00	(38.875.943)	87,18
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.287.157	264.411.214,00	(38.875.943)	87,18
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	5.2	BELANJA MODAL	1.008.140.000	993.449.000,00	(14.691.000)	98,54
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.008.140.000	993.449.000,00	(14.691.000)	98,54
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006		UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo	351.714.066	318.518.090,00	(33.195.976)	90,56
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	5	BELANJA DAERAH	351.714.066	318.518.090,00	(33.195.976)	90,56
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	5.1	BELANJA OPERASI	246.654.766	213.633.090,00	(33.021.676)	86,61
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.654.766	213.633.090,00	(33.021.676)	86,61
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	5.2	BELANJA MODAL	105.059.300	104.885.000,00	(174.300)	99,83
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.059.300	104.885.000,00	(174.300)	99,83
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	811.445.500	804.820.449,00	(6.625.051)	99,18
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000		Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	811.445.500	804.820.449,00	(6.625.051)	99,18
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	5	BELANJA DAERAH	811.445.500	804.820.449,00	(6.625.051)	99,18
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	811.445.500	804.820.449,00	(6.625.051)	99,18
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	811.445.500	804.820.449,00	(6.625.051)	99,18
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7.720.000.982	7.622.759.003,00	(97.241.979)	98,74
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000		Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	7.720.000.982	7.622.759.003,00	(97.241.979)	98,74
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	5	BELANJA DAERAH	7.720.000.982	7.622.759.003,00	(97.241.979)	98,74
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.720.000.982	7.622.759.003,00	(97.241.979)	98,74
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.720.000.982	7.622.759.003,00	(97.241.979)	98,74
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.143.053.250	2.138.595.744,00	(4.457.506)	99,79

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000		Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	2.143.053.250	2.138.595.744,00	(4.457.506)	99,79
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	5	BELANJA DAERAH	2.143.053.250	2.138.595.744,00	(4.457.506)	99,79
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.143.053.250	2.138.595.744,00	(4.457.506)	99,79
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.843.053.250	1.838.595.744,00	(4.457.506)	99,76
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000	300.000.000,00	0	100,00
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	374.260.000	365.191.650,00	(9.068.350)	97,58
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000		Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	374.260.000	365.191.650,00	(9.068.350)	97,58
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	5	BELANJA DAERAH	374.260.000	365.191.650,00	(9.068.350)	97,58
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	374.260.000	365.191.650,00	(9.068.350)	97,58
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.260.000	365.191.650,00	(9.068.350)	97,58
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	222.063.894.413	208.191.536.530,00	(13.872.357.883)	93,75
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	105.981.571.183	99.290.897.052,00	(6.690.674.131)	93,69
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000		Sekretariat Daerah	28.850.960.954	29.965.765.228,00	1.114.804.274	103,86
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	5	BELANJA DAERAH	28.850.960.954	29.965.765.228,00	1.114.804.274	103,86
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	5.1	BELANJA OPERASI	28.611.998.254	29.755.705.015,00	1.143.706.761	104,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.814.107.880	6.438.846.689,00	2.624.738.809	168,82
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.797.890.374	23.316.858.326,00	(1.481.032.048)	94,03
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	5.2	BELANJA MODAL	238.962.700	210.060.213,00	(28.902.487)	87,91
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	238.962.700	210.060.213,00	(28.902.487)	87,91
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042		Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	35.915.702.370	35.409.159.311,00	(506.543.059)	98,59
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	5	BELANJA DAERAH	35.915.702.370	35.409.159.311,00	(506.543.059)	98,59
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	5.1	BELANJA OPERASI	35.842.381.370	35.337.734.311,00	(504.647.059)	98,59
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	5.1.01	Belanja Pegawai	3.992.385.461	3.772.150.546,00	(220.234.915)	94,48
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.918.645.909	18.822.133.765,00	(96.512.144)	99,49
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	5.1.05	Belanja Hibah	10.831.950.000	10.656.450.000,00	(175.500.000)	98,38
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.099.400.000	2.087.000.000,00	(12.400.000)	99,41
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	5.2	BELANJA MODAL	73.321.000	71.425.000,00	(1.896.000)	97,41
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.321.000	71.425.000,00	(1.896.000)	97,41
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044		Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	5.065.668.513	4.233.640.252,00	(832.028.261)	83,58
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	5	BELANJA DAERAH	5.065.668.513	4.233.640.252,00	(832.028.261)	83,58
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.230.513	4.168.740.252,00	(831.490.261)	83,37
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	5.1.01	Belanja Pegawai	2.558.298.480	2.138.131.899,00	(420.166.581)	83,58
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.441.932.033	2.030.608.353,00	(411.323.680)	83,16
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	5.2	BELANJA MODAL	65.438.000	64.900.000,00	(538.000)	99,18
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.438.000	64.900.000,00	(538.000)	99,18
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043		Biro Hukum	6.872.877.278	5.855.043.415,00	(1.017.833.863)	85,19
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	5	BELANJA DAERAH	6.872.877.278	5.855.043.415,00	(1.017.833.863)	85,19
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	5.1	BELANJA OPERASI	6.712.097.278	5.694.877.415,00	(1.017.219.863)	84,84
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	5.1.01	Belanja Pegawai	3.239.487.328	2.724.812.452,00	(514.674.876)	84,11

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.472.609.950	2.970.064.963,00	(502.544.987)	85,53
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	5.2	BELANJA MODAL	160.780.000	160.166.000,00	(614.000)	99,62
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.780.000	160.166.000,00	(614.000)	99,62
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.250.312.410	6.790.757.226,00	(1.459.555.184)	82,31
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	5	BELANJA DAERAH	8.250.312.410	6.790.757.226,00	(1.459.555.184)	82,31
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	5.1	BELANJA OPERASI	8.194.722.410	6.736.007.226,00	(1.458.715.184)	82,20
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	5.1.01	Belanja Pegawai	6.013.900.210	5.095.323.090,00	(918.577.120)	84,73
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.180.822.200	1.640.684.136,00	(540.138.064)	75,23
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	5.2	BELANJA MODAL	55.590.000	54.750.000,00	(840.000)	98,49
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.590.000	54.750.000,00	(840.000)	98,49
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047		Biro Umum	15.155.138.548	12.271.391.158,00	(2.883.747.390)	80,97
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	5	BELANJA DAERAH	15.155.138.548	12.271.391.158,00	(2.883.747.390)	80,97
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	5.1	BELANJA OPERASI	14.651.054.398	11.811.753.764,00	(2.839.300.634)	80,62
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	5.1.01	Belanja Pegawai	6.614.965.018	5.355.278.047,00	(1.259.686.971)	80,96
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.036.089.380	6.456.475.717,00	(1.579.613.663)	80,34
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	5.2	BELANJA MODAL	504.084.150	459.637.394,00	(44.446.756)	91,18
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	504.084.150	459.637.394,00	(44.446.756)	91,18
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046		Biro Organisasi	5.870.911.110	4.765.140.462,00	(1.105.770.648)	81,17
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	5	BELANJA DAERAH	5.870.911.110	4.765.140.462,00	(1.105.770.648)	81,17
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	5.1	BELANJA OPERASI	5.741.185.110	4.635.731.735,00	(1.105.453.375)	80,75
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	5.1.01	Belanja Pegawai	3.526.096.454	2.859.786.226,00	(666.310.228)	81,10
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.215.088.656	1.775.945.509,00	(439.143.147)	80,17
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	5.2	BELANJA MODAL	129.726.000	129.408.727,00	(317.273)	99,76
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.726.000	129.408.727,00	(317.273)	99,76
4.02			SEKRETARIAT DPRD	116.082.323.230	108.900.639.478,00	(7.181.683.752)	93,81
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000		Sekretariat DPRD	116.082.323.230	108.900.639.478,00	(7.181.683.752)	93,81
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	5	BELANJA DAERAH	116.082.323.230	108.900.639.478,00	(7.181.683.752)	93,81
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	5.1	BELANJA OPERASI	113.822.426.030	106.692.237.898,00	(7.130.188.132)	93,74
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	34.397.252.579	34.135.723.391,00	(261.529.188)	99,24
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.425.173.451	72.556.514.507,00	(6.868.658.944)	91,35
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.259.897.200	2.208.401.580,00	(51.495.620)	97,72
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.250.884.200	2.199.401.580,00	(51.482.620)	97,71
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.013.000	9.000.000,00	(13.000)	99,86
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	354.246.615.147	337.895.394.662,00	(16.351.220.485)	95,38
5.01			PERENCANAAN	17.520.586.991	17.174.002.755,00	(346.584.236)	98,02
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	17.520.586.991	17.174.002.755,00	(346.584.236)	98,02
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5	BELANJA DAERAH	17.520.586.991	17.174.002.755,00	(346.584.236)	98,02
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.1	BELANJA OPERASI	17.103.591.491	16.790.479.755,00	(313.111.736)	98,17
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.616.683.835	9.558.213.850,00	(58.469.985)	99,39
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.486.907.656	7.232.265.905,00	(254.641.751)	96,60
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.2	BELANJA MODAL	416.995.500	383.523.000,00	(33.472.500)	91,97
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	416.995.500	383.523.000,00	(33.472.500)	91,97

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02			KEUANGAN	303.429.246.726	288.469.092.387,00	(14.960.154.339)	95,07
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000		Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	296.216.225.347	282.652.308.260,00	(13.563.917.087)	95,42
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5	BELANJA DAERAH	296.216.225.347	282.652.308.260,00	(13.563.917.087)	95,42
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.1	BELANJA OPERASI	80.699.300.244	75.360.297.280,00	(5.339.002.964)	93,38
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	62.766.591.753	57.634.105.279,00	(5.132.486.474)	91,82
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.583.696.444	11.286.909.656,00	(296.786.788)	97,44
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.1.03	Belanja Bunga	6.349.012.047	6.439.282.345,00	90.270.298	101,42
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.2	BELANJA MODAL	415.920.000	387.000.000,00	(28.920.000)	93,05
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	415.920.000	387.000.000,00	(28.920.000)	93,05
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.496.906.618	4.701.497.713,00	(795.408.905)	85,53
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.496.906.618	4.701.497.713,00	(795.408.905)	85,53
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	209.604.098.485	202.203.513.267,00	(7.400.585.218)	96,47
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	206.629.098.485	199.603.513.267,00	(7.025.585.218)	96,60
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.975.000.000	2.600.000.000,00	(375.000.000)	87,39
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001		UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kota Gorontalo	1.492.037.775	1.284.981.788,00	(207.055.987)	86,12
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5	BELANJA DAERAH	1.492.037.775	1.284.981.788,00	(207.055.987)	86,12
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.492.037.775	1.284.981.788,00	(207.055.987)	86,12
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.492.037.775	1.284.981.788,00	(207.055.987)	86,12
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002		UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo	1.722.245.329	1.444.608.646,00	(277.636.683)	83,88
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5	BELANJA DAERAH	1.722.245.329	1.444.608.646,00	(277.636.683)	83,88
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.722.245.329	1.444.608.646,00	(277.636.683)	83,88
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.722.245.329	1.444.608.646,00	(277.636.683)	83,88
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003		UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo	927.744.450	694.316.717,00	(233.427.733)	74,84
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5	BELANJA DAERAH	927.744.450	694.316.717,00	(233.427.733)	74,84
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.1	BELANJA OPERASI	927.744.450	694.316.717,00	(233.427.733)	74,84
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.1.02	Belanja Barang dan jasa	927.744.450	694.316.717,00	(233.427.733)	74,84
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004		UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango	957.935.475	761.231.483,00	(196.703.992)	79,47
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5	BELANJA DAERAH	957.935.475	761.231.483,00	(196.703.992)	79,47
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.1	BELANJA OPERASI	957.935.475	761.231.483,00	(196.703.992)	79,47
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	957.935.475	761.231.483,00	(196.703.992)	79,47
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005		UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	957.426.125	822.354.865,00	(135.071.260)	85,89
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5	BELANJA DAERAH	957.426.125	822.354.865,00	(135.071.260)	85,89
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.1	BELANJA OPERASI	957.426.125	822.354.865,00	(135.071.260)	85,89
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	957.426.125	822.354.865,00	(135.071.260)	85,89
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006		UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pohuwato	1.155.632.225	809.290.628,00	(346.341.597)	70,03
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5	BELANJA DAERAH	1.155.632.225	809.290.628,00	(346.341.597)	70,03
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.155.632.225	809.290.628,00	(346.341.597)	70,03

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.155.632.225	809.290.628,00	(346.341.597)	70,03
5.03			KEPEGAWAIAN	10.400.858.222	10.305.954.574,00	(94.903.648)	99,09
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000		Badan Kepegawaian Daerah	10.400.858.222	10.305.954.574,00	(94.903.648)	99,09
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5	BELANJA DAERAH	10.400.858.222	10.305.954.574,00	(94.903.648)	99,09
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.280.578.222	10.186.754.574,00	(93.823.648)	99,09
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.977.117.994	7.923.657.279,00	(53.460.715)	99,33
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.303.460.228	2.263.097.295,00	(40.362.933)	98,25
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.2	BELANJA MODAL	120.280.000	119.200.000,00	(1.080.000)	99,10
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.280.000	119.200.000,00	(1.080.000)	99,10
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	12.656.920.419	12.325.620.864,00	(331.299.555)	97,38
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.656.920.419	12.325.620.864,00	(331.299.555)	97,38
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5	BELANJA DAERAH	12.656.920.419	12.325.620.864,00	(331.299.555)	97,38
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.1	BELANJA OPERASI	12.656.920.419	12.325.620.864,00	(331.299.555)	97,38
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.217.198.966	7.900.153.725,00	(317.045.241)	96,14
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.439.721.453	4.425.467.139,00	(14.254.314)	99,68
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	832.735.184	812.245.372,00	(20.489.812)	97,54
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	832.735.184	812.245.372,00	(20.489.812)	97,54
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5	BELANJA DAERAH	832.735.184	812.245.372,00	(20.489.812)	97,54
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.1	BELANJA OPERASI	832.735.184	812.245.372,00	(20.489.812)	97,54
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	832.735.184	812.245.372,00	(20.489.812)	97,54
5.07			PENGELOLAAN PENGHUBUNG	9.406.267.605	8.808.478.710,00	(597.788.895)	93,64
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000		Badan Penghubung	9.406.267.605	8.808.478.710,00	(597.788.895)	93,64
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5	BELANJA DAERAH	9.406.267.605	8.808.478.710,00	(597.788.895)	93,64
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.104.312.605	8.511.453.710,00	(592.858.895)	93,49
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.974.014.227	2.845.754.459,00	(128.259.768)	95,69
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.130.298.378	5.665.699.251,00	(464.599.127)	92,42
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.2	BELANJA MODAL	301.955.000	297.025.000,00	(4.930.000)	98,37
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	301.955.000	297.025.000,00	(4.930.000)	98,37
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	23.103.771.324	22.700.375.885,00	(403.395.439)	98,25
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	23.103.771.324	22.700.375.885,00	(403.395.439)	98,25
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000		Inspektorat	23.103.771.324	22.700.375.885,00	(403.395.439)	98,25
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	5	BELANJA DAERAH	23.103.771.324	22.700.375.885,00	(403.395.439)	98,25
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	5.1	BELANJA OPERASI	22.346.735.324	21.964.475.885,00	(382.259.439)	98,29
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	15.835.664.161	15.545.127.130,00	(290.537.031)	98,17
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.511.071.163	6.419.348.755,00	(91.722.408)	98,59
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	5.2	BELANJA MODAL	757.036.000	735.900.000,00	(21.136.000)	97,21
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	757.036.000	735.900.000,00	(21.136.000)	97,21
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	98.201.025.272	97.853.955.392,00	(347.069.880)	99,65
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	98.201.025.272	97.853.955.392,00	(347.069.880)	99,65

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	98.201.025.272	97.853.955.392,00	(347.069.880)	99,65
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	98.201.025.272	97.853.955.392,00	(347.069.880)	99,65
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	97.981.051.272	97.634.559.492,00	(346.491.780)	99,65
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.154.899.507	4.141.650.320,00	(13.249.187)	99,68
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.111.976.996	9.803.622.321,00	(308.354.675)	96,95
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	83.714.174.769	83.689.286.851,00	(24.887.918)	99,97
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	219.974.000	219.395.900,00	(578.100)	99,74
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	219.974.000	219.395.900,00	(578.100)	99,74
			Jumlah	(153.970.511.569)	(53.101.028.028,38)	100.869.483.540	34,49



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.924.405.965.518,00	1.930.340.243.696,23	100,31	1.872.487.105.528,68
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	516.532.987.548,00	538.193.288.200,23	104,19	511.931.921.680,68
4.1.01	Pajak Daerah	437.626.291.107,00	457.233.185.366,00	104,48	432.906.096.022,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	126.769.436.557,00	147.267.347.662,00	116,17	133.786.845.075,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.137.042.138,00	1.002.380.383,00	88,16	772.882.645,00
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	1.056.220.915,00	929.546.476,00	88,01	728.661.915,00
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	500.000,00	701.590,00	140,32	0,00
4.1.01.01.01.0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	49.251.271,00	35.508.690,00	72,10	25.658.390,00
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	31.069.952,00	36.623.627,00	117,87	18.562.340,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	6.221.655.605,00	5.599.331.369,00	90,00	5.198.346.759,00
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	6.040.454.943,00	5.402.381.465,00	89,44	5.000.939.009,00
4.1.01.01.02.0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.02.0003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	85.334.350,00	129.546.927,00	151,81	129.646.260,00
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	95.366.312,00	67.402.977,00	70,68	67.761.490,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	33.981.995.374,00	62.750.644.906,00	184,66	57.274.608.061,00
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	32.332.811.650,00	61.604.395.187,00	190,53	56.272.195.017,00
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	251.891.240,00	103.928.695,00	41,26	98.904.560,00
4.1.01.01.03.0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	699.646.241,00	722.204.483,00	103,22	642.671.330,00
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	697.646.243,00	320.116.541,00	45,89	260.837.154,00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	5.541.943,00	120.500,00	2,17	0,00
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	1.483.442,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	1.243.645,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.04.0003	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	1.507.426,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	1.307.430,00	120.500,00	9,22	0,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	304.760.118,00	193.687.527,00	63,55	175.944.880,00
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	191.901.622,00	85.184.789,00	44,39	89.791.245,00
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	31.243.644,00	29.423.850,00	94,18	33.481.730,00
4.1.01.01.05.0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	45.307.426,00	47.768.868,00	105,43	32.402.865,00
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	36.307.426,00	31.310.020,00	86,24	20.269.040,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	26.247.326.683,00	21.536.182.158,00	82,05	19.791.800.937,00
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	25.728.756.564,00	21.076.506.252,00	81,92	19.410.881.345,00
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	134.127.280,00	109.071.482,00	81,32	112.310.534,00
4.1.01.01.06.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	178.417.950,00	256.272.966,00	143,64	176.824.488,00
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	206.024.889,00	94.331.458,00	45,79	91.784.570,00
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	11.491.427.434,00	9.077.543.604,00	78,99	9.359.649.727,00
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	10.189.273.281,00	7.398.048.077,00	72,61	7.889.435.980,00
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	1.207.280.878,00	1.596.618.739,00	132,25	1.385.347.547,00
4.1.01.01.07.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	62.432.135,00	51.167.246,00	81,96	58.733.530,00
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	32.441.140,00	31.709.542,00	97,74	26.132.670,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.562.588.872,00	2.162.817.506,00	60,71	2.419.646.750,00
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	2.931.901.630,00	1.519.670.227,00	51,83	1.755.162.440,00
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	579.605.864,00	606.930.744,00	104,71	621.147.700,00
4.1.01.01.08.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	35.140.255,00	18.890.370,00	53,76	23.415.470,00
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	15.941.123,00	17.326.165,00	108,69	19.921.140,00
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	255.625.717,00	231.688.908,00	90,64	219.402.073,00
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	252.513.235,00	227.830.028,00	90,22	216.904.683,00
4.1.01.01.09.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	500.000,00	354.330,00	70,87	354.330,00
4.1.01.01.09.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	1.966.241,00	2.522.800,00	128,31	1.199.100,00
4.1.01.01.09.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	646.241,00	981.750,00	151,92	943.960,00
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	43.468.541.173,00	44.627.830.856,00	102,67	38.499.815.633,00
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	43.140.454.685,00	44.379.864.259,00	102,87	38.246.035.628,00
4.1.01.01.10.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	500.000,00	0,00	0,00	177.000,00
4.1.01.01.10.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	187.725.225,00	173.431.231,00	92,39	181.242.675,00
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	139.861.263,00	74.535.366,00	53,29	72.360.330,00
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	90.931.500,00	84.727.945,00	93,18	71.782.860,00
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	79.856.000,00	74.869.745,00	93,76	61.538.210,00
4.1.01.01.11.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	500.000,00	0,00	0,00	82.000,00
4.1.01.01.11.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	8.789.000,00	5.035.850,00	57,30	6.317.050,00
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	1.786.500,00	4.822.350,00	269,93	3.845.600,00
4.1.01.01.14	PKB-Mobil Roda Tiga	2.000.000,00	392.000,00	19,60	2.964.750,00
4.1.01.01.14.0001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	500.000,00	282.000,00	56,40	2.386.500,00
4.1.01.01.14.0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	500.000,00	0,00	0,00	82.000,00
4.1.01.01.14.0003	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat	500.000,00	110.000,00	22,00	496.250,00
4.1.01.01.14.0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	119.439.094.715,00	113.408.639.305,00	94,95	112.032.844.226,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	180.279.337,00	369.125.000,00	204,75	113.084.200,00
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	180.279.337,00	369.125.000,00	204,75	113.084.200,00
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	10.090.380.273,00	3.504.468.750,00	34,73	2.960.555.276,00
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	10.090.380.273,00	3.504.468.750,00	34,73	2.960.555.276,00
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	37.301.224.843,00	36.867.068.770,00	98,84	35.319.678.270,00
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	37.301.224.843,00	36.867.068.770,00	98,84	35.319.678.270,00
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	139.353.553,00	215.237.500,00	154,45	158.184.550,00
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	139.353.553,00	215.237.500,00	154,45	158.184.550,00
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	13.073.879.223,00	14.443.585.890,00	110,48	15.781.845.500,00
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	13.073.879.223,00	14.443.585.890,00	110,48	15.781.845.500,00
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	4.687.918.125,00	1.440.413.820,00	30,73	2.155.577.920,00
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	4.687.918.125,00	1.440.413.820,00	30,73	2.155.577.920,00
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1.012.813.299,00	1.293.100.000,00	127,67	3.599.321.840,00
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1.012.813.299,00	1.293.100.000,00	127,67	3.599.321.840,00
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	181.574.180,00	245.375.000,00	135,14	42.750.000,00
4.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	181.574.180,00	245.375.000,00	135,14	42.750.000,00
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	52.293.171.882,00	54.730.987.075,00	104,66	51.478.584.170,00
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	52.293.171.882,00	54.730.987.075,00	104,66	51.478.584.170,00
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	477.500.000,00	297.502.500,00	62,30	418.300.000,00
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	477.500.000,00	297.502.500,00	62,30	418.300.000,00
4.1.01.02.14	BBNKB-Mobil Roda Tiga	500.000,00	1.775.000,00	355,00	4.962.500,00
4.1.01.02.14.0001	BBNKB-Mobil Roda Tiga	500.000,00	1.775.000,00	355,00	4.962.500,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	91.018.442.069,00	100.997.569.265,00	110,96	96.470.314.759,00
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.01.0001	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.02.0001	PBBKB-Bahan Bakar Solar	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.03	PBBKB-Bahan Bakar Gas	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.03.0001	PBBKB-Bahan Bakar Gas	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.04	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	91.016.942.069,00	100.997.569.265,00	110,97	96.470.314.759,00
4.1.01.03.04.0001	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	91.016.942.069,00	100.997.569.265,00	110,97	96.470.314.759,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	223.492.231,00	224.487.221,00	100,45	149.942.801,00
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	223.492.231,00	224.487.221,00	100,45	149.942.801,00
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	223.492.231,00	224.487.221,00	100,45	149.942.801,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	100.175.825.535,00	95.335.141.913,00	95,17	90.466.149.161,00
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	100.175.825.535,00	95.335.141.913,00	95,17	90.466.149.161,00
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	100.175.825.535,00	95.335.141.913,00	95,17	90.466.149.161,00
4.1.02	Retribusi Daerah	49.085.884.000,00	54.310.658.591,00	110,64	4.232.976.524,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	46.148.924.000,00	52.950.824.152,00	114,74	2.564.050.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	46.098.924.000,00	51.142.155.344,00	110,94	674.702.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	45.498.924.000,00	50.401.807.344,00	110,78	0,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	600.000.000,00	740.348.000,00	123,39	674.702.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	50.000.000,00	1.808.668.808,00	3.617,34	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	50.000.000,00	1.808.668.808,00	3.617,34	0,00
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	1.889.348.000,00
4.1.02.01.12.0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0,00	0,00	0,00	1.889.348.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.936.960.000,00	1.359.834.439,00	46,30	1.668.926.524,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	920.000.000,00	515.012.063,00	55,98	509.593.374,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	20.000.000,00	51.163.063,00	255,82	32.450.874,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	600.000.000,00	463.849.000,00	77,31	477.142.500,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	616.960.000,00	343.091.350,00	55,61	400.147.150,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	616.960.000,00	343.091.350,00	55,61	400.147.150,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	950.000.000,00	283.967.000,00	29,89	759.186.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	150.000.000,00	61.595.000,00	41,06	308.594.000,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	300.000.000,00	105.252.000,00	35,08	380.332.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	500.000.000,00	117.120.000,00	23,42	70.260.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	57.000.000,00	31.811.350,00	55,81	0,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	57.000.000,00	31.811.350,00	55,81	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	393.000.000,00	185.952.676,00	47,32	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	393.000.000,00	185.952.676,00	47,32	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.219.035.031,00	11.580.368.337,00	113,32	11.012.325.878,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	10.219.035.031,00	11.580.368.337,00	113,32	11.012.325.878,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	10.219.035.031,00	11.580.368.337,00	113,32	11.012.325.878,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	10.219.035.031,00	11.580.368.337,00	113,32	11.012.325.878,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.601.777.410,00	15.069.075.906,23	76,88	63.780.523.256,68
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	787.067.000,00	0,00	0,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	787.067.000,00	0,00	0,00
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	787.067.000,00	0,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	499.250.044,00	249,63	370.421.084,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	50.000.000,00	336.014.300,00	672,03	370.421.084,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	50.000.000,00	336.014.300,00	672,03	370.421.084,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	150.000.000,00	163.235.744,00	108,82	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	150.000.000,00	163.235.744,00	108,82	0,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	2.012.548.943,00
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	2.012.548.943,00
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	2.012.548.943,00
4.1.04.05	Jasa Giro	6.750.000.000,00	1.762.371.257,00	26,11	2.969.255.235,20
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	1.762.181.971,00	35,24	2.967.321.910,20
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	1.762.181.971,00	35,24	2.967.321.910,20
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.650.000.000,00	189.286,00	0,01	1.933.325,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.650.000.000,00	189.286,00	0,01	1.933.325,00
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.077.777.410,00	3.504.794.630,00	69,02	5.794.880.704,80
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.077.777.410,00	3.504.794.630,00	69,02	5.794.880.704,80
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.077.777.410,00	3.504.794.630,00	69,02	5.794.880.704,80
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.000.000.000,00	3.497.486.209,23	349,75	4.429.427.948,68
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000,00	3.497.486.209,23	699,50	4.419.427.948,68
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000,00	3.497.486.209,23	699,50	4.419.427.948,68
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000,00	0,00	0,00	77.976.269,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000,00	0,00	0,00	77.976.269,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000,00	0,00	0,00	77.976.269,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.464.000.000,00	5.018.106.766,00	203,66	1.488.643.469,00
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.788.000.000,00	4.687.598.356,00	262,17	1.255.561.869,00
4.1.04.12.01.0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	10.000.000,00	21.695.100,00	216,95	7.738.520,00
4.1.04.12.01.0016	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0017	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	5.000.000,00	404.460,00	8,09	14.240,00
4.1.04.12.01.0018	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	4.500.000,00	0,00	0,00	134.780,00
4.1.04.12.01.0019	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	70.000.000,00	162.675.440,00	232,39	40.751.163,00
4.1.04.12.01.0020	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0021	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	500.000,00	1.059.560,00	211,91	804.520,00
4.1.04.12.01.0022	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	5.000.000,00	62.160,00	1,24	0,00
4.1.04.12.01.0023	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	300.000.000,00	1.835.186.719,00	611,73	504.161.351,00
4.1.04.12.01.0024	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	75.000.000,00	615.080,00	0,82	753.790,00
4.1.04.12.01.0025	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	50.000.000,00	1.938.430,00	3,88	13.020,00
4.1.04.12.01.0026	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	75.000.000,00	96.810,00	0,13	3.550.420,00
4.1.04.12.01.0027	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	20.000.000,00	0,00	0,00	1.031.180,00
4.1.04.12.01.0028	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	10.000.000,00	0,00	0,00	445.330,00
4.1.04.12.01.0029	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0030	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0031	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	20.000.000,00	5.012.200,00	25,06	291.094,00
4.1.04.12.01.0032	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	10.000.000,00	1.037.290,00	10,37	196.280,00
4.1.04.12.01.0033	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	10.000.000,00	2.065.310,00	20,65	231.110,00
4.1.04.12.01.0034	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	10.000.000,00	68.630,00	0,69	184.920,00
4.1.04.12.01.0035	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	150.000.000,00	698.308.465,00	465,54	193.834.884,00
4.1.04.12.01.0036	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	50.000.000,00	807.810,00	1,62	151.820,00
4.1.04.12.01.0037	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	50.000.000,00	244.700,00	0,49	0,00
4.1.04.12.01.0038	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	50.000.000,00	24.410,00	0,05	2.910.860,00
4.1.04.12.01.0039	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	82.500.000,00	330.940.340,00	401,14	94.185.330,00
4.1.04.12.01.0040	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	70.000.000,00	32.976.680,00	47,11	12.099.860,00
4.1.04.12.01.0041	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	50.000.000,00	1.314.670,00	2,63	0,00
4.1.04.12.01.0042	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	50.000.000,00	336.890,00	0,67	2.451.340,00
4.1.04.12.01.0043	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	0,00	0,00	0,00	16.343.560,00
4.1.04.12.01.0044	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	7.500.000,00	49.037.700,00	653,84	1.523.030,00
4.1.04.12.01.0045	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	7.500.000,00	818.830,00	10,92	2.921.260,00
4.1.04.12.01.0046	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	7.500.000,00	0,00	0,00	9.567.514,00
4.1.04.12.01.0047	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	2.000.000,00	3.497.390,00	174,87	1.550.634,00
4.1.04.12.01.0048	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	1.000.000,00	7.090,00	0,71	0,00
4.1.04.12.01.0049	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	1.000.000,00	0,00	0,00	14.322,00
4.1.04.12.01.0050	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0051	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	350.000.000,00	1.532.859.332,00	437,96	354.302.172,00
4.1.04.12.01.0052	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0053	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	50.000.000,00	572.150,00	1,14	77.390,00
4.1.04.12.01.0054	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	50.000.000,00	314.750,00	0,63	2.128.715,00
4.1.04.12.01.0055	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	500.000,00	3.374.460,00	674,89	1.148.110,00
4.1.04.12.01.0056	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0057	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	500.000,00	245.500,00	49,10	0,00
4.1.04.12.01.0058	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	500.000,00	0,00	0,00	35.710,00
4.1.04.12.01.0067	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	150.000,00	0,00	0,00	13.640,00
4.1.04.12.01.0068	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0069	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0070	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	676.000.000,00	330.508.410,00	48,89	233.081.600,00
4.1.04.12.02.0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	15.000.000,00	1.120.000,00	7,47	8.320.000,00
4.1.04.12.02.0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	15.000.000,00	14.250.000,00	95,00	2.969.690,00
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	300.000.000,00	83.346.420,00	27,78	78.223.840,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.04.12.02.0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.02.0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	5.000.000,00	0,00	0,00	43.460,00
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	10.000.000,00	25.442.620,00	254,43	6.736.400,00
4.1.04.12.02.0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	10.000.000,00	2.298.500,00	22,99	7.570.770,00
4.1.04.12.02.0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.000.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
4.1.04.12.02.0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	500.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	300.000.000,00	200.041.370,00	66,68	118.830.440,00
4.1.04.12.02.0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	10.000.000,00	3.965.500,00	39,66	436.000,00
4.1.04.12.02.0014	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga	500.000,00	44.000,00	8,80	171.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.01.0019	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	4.058.000.000,00	0,00	0,00	944.311.869,00
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	908.094.369,00
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	908.094.369,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	40.000.000,00	0,00	0,00	36.217.500,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.127.000,00
4.1.04.15.04.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Tetap	5.000.000,00	0,00	0,00	19.690.500,00
4.1.04.15.04.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00
4.1.04.15.04.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.04.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.000.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.018.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	900.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PPPK	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PPPK	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	45.693.057.734,00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	45.693.057.734,00
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	45.693.057.734,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	516.532.987.548,00	538.193.288.200,23	104,19	511.931.921.680,68
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.406.269.839.970,00	1.385.451.449.664,00	98,52	1.350.262.842.740,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.406.269.839.970,00	1.385.451.449.664,00	98,52	1.350.262.842.740,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	30.445.345.000,00
4.2.01.02.01	DID	0,00	0,00	0,00	30.445.345.000,00
4.2.01.02.01.0001	DID	0,00	0,00	0,00	30.445.345.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.398.586.957.970,00	1.377.768.567.664,00	98,51	1.319.817.497.740,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	20.476.158.970,00	24.972.779.787,00	121,96	23.449.484.007,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.399.651.000,00	2.199.263.000,00	157,13	1.415.510.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	15.086.001.000,00	17.451.897.587,00	115,68	17.340.769.687,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	0,00	607.113.200,00	0,00	1.223.017.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	577.000,00	14.000,00	2,43	33.320,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	153.997.000,00	221.033.000,00	143,53	110.448.800,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	90.367.200,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	31.136.000,00	412.643.000,00	1.325,29	2.221.632.000,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	1.755.988.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	2.048.808.970,00	2.324.828.000,00	113,47	1.047.706.000,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	0,00	1.755.988.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.022.379.872.000,00	1.022.379.872.000,00	100,00	979.869.891.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	850.100.923.000,00	850.163.916.967,00	100,01	979.869.891.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	519.984.000,00	456.990.033,00	87,89	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	126.049.532.000,00	126.049.532.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	21.570.965.000,00	21.570.965.000,00	100,00	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	24.138.468.000,00	24.138.468.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	167.802.393.000,00	144.159.157.866,00	85,91	140.281.348.223,00
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	10.318.839.000,00	9.540.285.092,00	92,46	24.106.664.789,00
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	22.967.767.000,00	21.135.607.043,00	92,02	27.773.480.808,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	304.858.000,00
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	76.268.133.000,00	60.534.414.321,00	79,37	0,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.706.764.000,00	3.674.786.681,00	99,14	7.937.823.936,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	10.079.501.000,00	9.990.177.697,00	99,11	10.014.699.871,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	29.037.850.000,00	28.923.698.630,00	99,61	50.788.646.900,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	15.423.539.000,00	10.360.188.402,00	67,17	19.355.173.919,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	187.928.534.000,00	186.256.758.011,00	99,11	176.216.774.510,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	81.590.190.000,00	80.991.487.346,00	99,27	82.008.413.462,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.672.500.000,00	2.672.500.000,00	100,00	3.398.750.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	91.603.199.000,00	91.603.199.000,00	100,00	79.378.947.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.245.424.000,00	2.245.424.000,00	100,00	2.655.976.234,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	154.757.000,00	154.756.456,00	100,00	164.573.000,00
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.800.000.000,00	1.636.583.074,00	90,92	1.691.013.608,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.503.067.000,00	2.639.542.773,00	75,35	3.748.440.665,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.675.525.000,00	2.650.714.065,00	99,07	1.984.249.995,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	1.683.872.000,00	1.662.551.297,00	98,73	894.694.204,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	291.716.342,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.398.586.957.970,00	1.377.768.567.664,00	98,51	1.319.817.497.740,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.682.882.000,00	7.682.882.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	7.682.882.000,00	7.682.882.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	7.682.882.000,00	7.682.882.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.682.882.000,00	7.682.882.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.406.269.839.970,00	1.385.451.449.664,00	98,52	1.350.262.842.740,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.603.138.000,00	6.695.505.832,00	417,65	10.292.341.108,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.103.138.000,00	6.231.945.832,00	564,93	9.707.761.108,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.103.138.000,00	6.231.945.832,00	564,93	7.552.741.108,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.103.138.000,00	6.231.945.832,00	564,93	7.552.741.108,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.103.138.000,00	6.231.945.832,00	564,93	7.552.741.108,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00	2.155.020.000,00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00	2.155.020.000,00
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00	2.155.020.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000,00	463.560.000,00	92,71	584.580.000,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	500.000.000,00	463.560.000,00	92,71	584.580.000,00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	500.000.000,00	463.560.000,00	92,71	584.580.000,00
4.3.03.01.02.0001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00
4.3.03.01.02.0003	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN	500.000.000,00	463.560.000,00	92,71	419.580.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.603.138.000,00	6.695.505.832,00	417,65	10.292.341.108,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.924.405.965.518,00	1.930.340.243.696,23	100,31	1.872.487.105.528,68
5	BELANJA DAERAH	2.078.376.477.087,00	1.983.441.271.724,61	95,43	1.900.595.987.883,66
5.1	BELANJA OPERASI	1.605.785.176.582,00	1.556.182.022.343,16	96,91	1.475.863.473.693,15
5.1.01	Belanja Pegawai	782.146.327.136,00	764.595.004.643,00	97,76	657.826.026.577,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	461.293.925.150,00	448.637.439.116,00	97,26	388.757.960.090,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	349.242.403.138,00	343.212.541.132,00	98,27	294.289.056.838,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	289.272.074.898,80	284.740.157.732,00	98,43	268.641.020.338,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	59.970.328.240,00	58.472.383.400,00	97,50	25.648.036.500,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	32.378.995.544,00	31.022.665.736,00	95,81	26.945.903.591,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	27.231.508.981,00	26.451.146.630,00	97,13	24.965.852.037,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.147.486.563,00	4.571.519.106,00	88,81	1.980.051.554,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.907.376.218,00	5.600.987.548,00	94,81	6.202.845.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.907.376.218,00	5.600.987.548,00	94,81	6.202.845.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	19.318.948.306,00	18.643.035.000,00	96,50	20.229.866.234,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.866.446.538,00	18.209.875.000,00	96,52	18.539.316.234,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	452.501.768,00	433.160.000,00	95,73	1.690.550.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.659.714.763,00	8.003.410.000,00	92,42	4.965.632.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.129.217.237,00	4.858.040.000,00	94,71	4.965.632.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.530.497.526,00	3.145.370.000,00	89,09	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	18.790.660.864,00	17.850.878.220,00	95,00	16.593.160.260,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.171.063.904,00	14.621.235.900,00	96,38	15.078.858.060,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.619.596.960,00	3.229.642.320,00	89,23	1.514.302.200,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	614.048.678,34	474.755.365,00	77,32	684.728.945,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	614.048.678,34	474.755.365,00	77,32	684.728.945,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.055.324,86	5.181.444,00	30,38	4.209.625,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.518.187,86	3.973.799,00	25,61	3.883.591,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.537.137,00	1.207.645,00	78,56	326.034,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	23.186.771.896,00	21.102.928.339,00	91,01	16.473.841.792,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	21.436.198.688,00	19.369.524.480,00	90,36	16.473.841.792,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.750.573.208,00	1.733.403.859,00	99,02	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	794.487.604,00	639.318.432,00	80,47	592.178.643,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	693.885.541,00	539.194.068,00	77,71	592.178.643,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	100.602.063,00	100.124.364,00	99,53	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.383.462.813,00	2.081.737.900,00	87,34	1.776.537.162,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.062.656.623,00	1.781.377.454,00	86,36	1.776.537.162,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	320.806.190,00	300.360.446,00	93,63	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	159.939.804.931,00	158.731.757.293,00	99,24	146.902.233.296,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	39.577.520.478,00	39.340.394.217,00	99,40	37.396.699.438,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	39.577.520.478,00	39.340.394.217,00	99,40	37.396.699.438,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.378.769.329,15	4.133.818.341,00	94,41	3.677.000.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.378.769.329,15	4.133.818.341,00	94,41	3.677.000.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	90.187.120,00	80.970.672,00	89,78	75.187.120,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	90.187.120,00	80.970.672,00	89,78	75.187.120,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	115.893.328.003,85	115.176.574.063,00	99,38	105.753.346.738,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	109.666.488.006,85	109.374.495.963,00	99,73	103.532.537.338,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	6.226.839.997,00	5.802.078.100,00	93,18	2.220.809.400,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	133.211.726.521,00	130.082.006.039,00	97,65	94.840.001.768,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	8.944.405.600,00	8.112.119.283,00	90,69	7.763.473.466,00
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	3.245.300.329,00	3.241.839.706,00	99,89	3.107.292.484,00
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.062.784.686,00	2.957.364.630,00	96,56	2.653.082.512,00
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.629.615.818,00	1.912.914.947,00	72,75	2.003.098.470,00
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	6.704.767,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	113.279.423.819,00	113.271.188.688,00	99,99	78.327.156.400,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	113.279.423.819,00	113.271.188.688,00	99,99	78.327.156.400,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	165.517.500,00	165.517.500,00	100,00	114.971.900,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	165.517.500,00	165.517.500,00	100,00	114.971.900,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.546.850.234,00	1.714.250.000,00	67,31	2.494.650.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.546.850.234,00	1.714.250.000,00	67,31	2.494.650.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	367.000.000,00	357.291.200,00	97,35	0,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	367.000.000,00	357.291.200,00	97,35	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.118.529.368,00	4.730.639.368,00	92,42	4.408.000.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.093.529.368,00	4.707.279.368,00	92,42	4.408.000.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	25.000.000,00	23.360.000,00	93,44	0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	2.790.000.000,00	1.731.000.000,00	62,04	1.731.750.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.790.000.000,00	1.731.000.000,00	62,04	1.731.750.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.056.244.168,00	25.865.922.867,00	99,27	25.732.222.449,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	2.024.250.000,00	2.024.250.000,00	100,00	1.432.050.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	2.024.250.000,00	2.024.250.000,00	100,00	1.432.050.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	254.958.000,00	242.414.000,00	95,08	96.284.004,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	254.958.000,00	242.414.000,00	95,08	96.284.004,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	210.512.919,00	155.558.160,00	73,89	94.146.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	210.512.919,00	155.558.160,00	73,89	94.146.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	143.430.000,00	122.250.000,00	85,23	122.715.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	143.430.000,00	122.250.000,00	85,23	122.715.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.310.241.500,00	2.303.899.000,00	99,73	2.079.735.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.310.241.500,00	2.303.899.000,00	99,73	2.079.735.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.860.000.000,00	4.842.000.000,00	99,63	4.851.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.860.000.000,00	4.842.000.000,00	99,63	4.851.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	810.000.000,00	810.000.000,00	100,00	1.215.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	810.000.000,00	810.000.000,00	100,00	1.215.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	300.243.412,00	279.969.562,00	93,25	164.000.004,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	300.243.412,00	279.969.562,00	93,25	164.000.004,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	2.062.477,00	39.545,00	1,92	289.444.081,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	2.062.477,00	39.545,00	1,92	289.444.081,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.760.545.860,00	7.705.542.600,00	99,29	7.707.848.360,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	153.979.980,00	123.942.600,00	80,49	123.648.360,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.629.340,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.536.540,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	7.598.400.000,00	7.581.600.000,00	99,78	7.584.200.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.380.000.000,00	7.380.000.000,00	100,00	7.680.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.380.000.000,00	7.380.000.000,00	100,00	7.680.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	193.026.366,00	0,00	0,00	285.033.240,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.576.806,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.576.806,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.999.994,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.999.994,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	89.556.866,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	89.556.866,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.039.234,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.039.234,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	25.191,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	25.191,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.965.347,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.965.347,00	0,00	0,00	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	181.464,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	181.464,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	181.464,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	181.464,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	285.033.240,00
5.1.01.05.10.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	95.011.080,00
5.1.01.05.10.0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	95.011.080,00
5.1.01.05.10.0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	95.011.080,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.451.600.000,00	1.277.879.328,00	88,03	1.308.575.736,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	168.000.000,00	83,33	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	168.000.000,00	83,33	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.250.000.000,00	1.109.879.328,00	88,79	1.106.975.736,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.250.000.000,00	1.109.879.328,00	88,79	1.106.975.736,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	673.525.499.630,00	641.715.150.644,16	95,28	700.268.455.177,15
5.1.02.01	Belanja Barang	136.019.787.123,00	129.372.276.614,00	95,11	165.873.917.204,02
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	135.976.783.723,00	129.333.871.498,00	95,11	165.856.595.969,02
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.518.516.063,00	1.300.855.876,00	85,67	1.521.352.507,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	821.591.250,00	813.404.968,00	99,00	1.007.599.077,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.086.621.557,00	11.904.007.005,00	90,96	13.086.194.653,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	30.705.400,00	30.560.600,00	99,53	188.747.300,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.583.373.800,00	4.528.259.951,00	98,80	3.749.240.022,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	104.415.000,00	101.680.480,00	97,38	85.546.850,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	76.911.471,00	71.531.177,00	93,00	33.733.200,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	214.500.000,00	214.100.000,00	99,81	213.302.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.593.408.722,00	1.415.441.790,00	88,83	1.675.712.181,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	849.026.725,00	798.540.333,00	94,05	1.109.117.280,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	772.052.917,00	770.199.323,00	99,76	387.198.986,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	745.720,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	292.562.500,00	291.870.000,00	99,76	450.557.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	7.721.000,00	7.700.000,00	99,73	9.243.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	10.000.000,00	9.899.350,00	98,99	13.800.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.256.762.030,00	2.192.604.345,00	97,16	2.690.612.308,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.497.827.329,00	1.390.145.695,00	92,81	1.720.047.379,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.156.862.015,00	3.849.193.341,00	92,60	5.888.185.316,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	799.428.709,00	768.307.005,00	96,11	869.760.050,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	25.187.800,00	20.496.749,00	81,38	59.403.794,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.700.853.863,00	1.617.394.834,00	95,09	1.761.385.528,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	683.026.904,00	636.501.575,00	93,19	715.160.246,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	883.565.820,00	789.138.345,00	89,31	1.000.736.935,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	78.857.500,00	78.054.827,00	98,98	613.658.852,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	314.427.400,00	314.197.700,00	99,93	381.205.900,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.516.485.826,00	1.225.978.571,00	80,84	1.218.780.274,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	827.976.643,00	793.709.580,00	95,86	913.744.422,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	81.460.200,00	73.212.898,00	89,88	1.589.506.718,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.587.943.868,00	2.518.985.712,00	97,34	932.085.865,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	40.884.717.950,00	40.278.389.710,00	98,52	50.227.515.668,02
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	7.294.929.609,00	6.109.501.650,00	83,75	19.739.281.903,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.916.250,00	1.907.200,00	99,53	0,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.570.156.300,00	1.533.182.200,00	97,65	1.919.465.951,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	4.696.800,00	4.695.900,00	99,98	80.122.439,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.216.670.202,00	10.830.723.588,00	96,56	9.775.127.074,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.783.097.691,00	6.407.505.021,00	94,46	7.366.694.725,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	2.324.910.000,00	2.324.649.310,00	99,99	3.359.688.095,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	950.018.176,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	490.870.000,00	242.532.199,00	49,41	271.449.426,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.958.059.000,00	19.095.639.373,00	95,68	24.886.833.892,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	21.200.000,00	19.960.000,00	94,15	31.800.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.123.550.000,00	1.112.580.000,00	99,02	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	23.320.000,00	23.100.000,00	99,06	302.100.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	53.000.000,00	52.800.000,00	99,62	37.050.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	620.300.014,00	589.011.000,00	94,96	442.225.145,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	111.450.000,00	110.244.000,00	98,92	478.634.080,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	35.200.000,00	34.800.000,00	98,86	205.589.210,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	85.500.000,00	85.500.000,00	100,00	45.881.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	0,00	0,00	0,00	91.250.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	5.000.000,00	4.675.000,00	93,50	98.899.834,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	5.500.000,00	5.450.000,00	99,09	3.800.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	817.600.000,00	806.119.800,00	98,60	883.382.158,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	237.500.000,00	237.233.900,00	99,89	30.400.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	754.821.875,00	751.182.617,00	99,52	541.569.700,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	180.000.000,00	146.517.000,00	81,40	202.199.850,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	43.003.400,00	38.405.116,00	89,31	17.321.235,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	37.300.000,00	36.081.116,00	96,73	17.321.235,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	5.703.400,00	2.324.000,00	40,75	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	246.806.235.080,00	233.533.064.217,00	94,62	243.904.651.856,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	156.453.480.256,00	146.329.977.411,00	93,53	166.169.570.682,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.799.119.970,00	7.891.952.250,00	89,69	10.547.715.150,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.377.860.000,00	1.934.167.000,00	81,34	2.214.370.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	311.000.000,00	243.200.000,00	78,20	276.770.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	567.200.000,00	536.750.000,00	94,63	953.600.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan	12.000.000,00	6.980.000,00	58,17	6.600.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	17.352.762,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	630.000.000,00	605.600.000,00	96,13	603.700.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	21.309.000.000,00	20.751.140.859,00	97,38	33.208.103.418,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	14.102.580.000,00	12.525.353.804,00	88,82	12.866.925.588,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	92.568.000,00	92.471.697,00	99,90	379.450.963,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.992.260.000,00	1.815.655.000,00	91,14	1.732.998.500,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.645.600.000,00	3.558.230.000,00	97,60	3.597.040.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	369.600.000,00	363.200.000,00	98,27	271.500.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.547.625.750,00	1.497.825.000,00	96,78	1.293.390.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	4.794.476.000,00	4.707.781.300,00	98,19	5.100.812.900,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	80.000.000,00	79.910.000,00	99,89	71.970.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	29.800.000,00	29.500.000,00	98,99	37.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.987.862.000,00	8.189.753.340,00	91,12	8.531.702.832,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.342.890.000,00	1.320.195.000,00	98,31	1.434.870.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	37.923.518.000,00	35.995.973.547,00	94,92	35.052.075.025,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.279.693.000,00	6.740.457.401,00	92,59	7.068.490.350,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.550.804.000,00	8.511.165.036,00	99,54	8.105.265.646,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.218.779.000,00	6.125.524.216,00	98,50	5.398.458.528,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	83.424.000,00	83.424.000,00	100,00	104.280.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	348.400.000,00	343.712.478,00	98,65	322.839.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	43.200.000,00	43.200.000,00	100,00	45.600.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	150.000.000,00	148.300.000,00	98,87	11.999.215,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	147.287.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	357.700.000,00	329.950.000,00	92,24	195.444.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	29.750.000,00	24.480.000,00	82,29	34.500.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	26.600.000,00	25.000.000,00	93,98	133.680.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	273.356.715,00	214.046.200,00	78,30	133.755.682,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	177.917.559,00	176.521.682,00	99,22	389.334.879,00
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	309.725.000,00	307.660.201,00	99,33	592.039.380,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	915.206.500,00	913.468.850,00	99,81	3.541.382.081,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	81.908.000,00	81.908.000,00	100,00	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	24.205.900,00	23.476.900,00	96,99	32.422.775,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	4.300.000,00	4.000.000,00	93,02	51.946.480,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	12.800.000,00	11.212.000,00	87,59	88.586.150,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	152.578.278,00	152.574.894,00	100,00	216.047.994,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.798.882.000,00	3.680.540.665,00	96,88	4.908.832.684,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	366.812.964,00	253.424.044,00	69,09	291.537.121,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.331.386.117,00	1.008.247.841,00	75,73	1.369.463.984,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	12.801.053.249,00	11.400.830.040,00	89,06	10.996.139.905,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	72.100.000,00	57.370.000,00	79,57	111.129.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.686.054.185,00	2.609.557.174,00	97,15	2.824.346.652,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	90.480.000,00	72.244.990,00	79,85	119.773.095,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	32.299.689,00	32.271.000,00	99,91	0,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	46.285.000,00	46.091.605,00	99,58	64.568.525,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	892.569.380,00	587.454.397,00	65,82	616.101.671,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	3.574.200,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	325.000.000,00	129.225.000,00	39,76	0,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	2.597.547,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	61.102.901.992,00	59.906.700.044,00	98,04	48.362.209.709,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	18.625.112.000,00	18.575.640.800,00	99,73	14.382.128.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	37.733.150.000,00	36.911.322.407,00	97,82	28.884.042.593,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	3.244.976.000,00	3.179.290.693,00	97,98	2.310.726.407,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	32.400.000,00	2.470.020,00	7,62	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	384.827.968,00	343.855.686,00	89,35	378.791.576,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	356.836.024,00	335.085.453,00	93,90	338.728.389,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	415.600.000,00	408.519.199,00	98,30	488.086.569,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	310.000.000,00	150.515.786,00	48,55	1.579.706.175,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	283.920.000,00	272.240.000,00	95,89	576.826.666,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	252.420.000,00	252.340.000,00	99,97	548.326.666,00
5.1.02.02.03.0005	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	8.500.000,00	6.000.000,00	70,59	0,00
5.1.02.02.03.0014	Belanja Sewa Tanah Pertanian	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	23.000.000,00	13.900.000,00	60,43	0,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.864.417.001,00	16.073.935.593,00	95,31	12.603.443.130,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	75.246.572,00
5.1.02.02.04.0031	Belanja Sewa Peralatan Selam	850.000,00	850.000,00	100,00	1.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00	64.150.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.587.972.001,00	3.120.732.120,00	86,98	2.308.736.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.000.000,00	4.750.000,00	95,00	33.700.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	20.000.000,00	4.000.000,00	20,00	8.000.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.231.100.000,00	1.230.556.000,00	99,96	1.380.901.158,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	4.000.000,00	3.500.000,00	87,50	8.360.000,00
5.1.02.02.04.0057	Belanja Sewa Kapal Terbang	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	100,00	6.003.309.900,00
5.1.02.02.04.0062	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00	0,00	12.190.000,00
5.1.02.02.04.0116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.400.000,00	2.000.000,00	83,33	1.750.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.454.345.000,00	2.198.922.973,00	89,59	2.391.994.500,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	15.000.000,00	13.500.000,00	90,00	17.625.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	60.000.000,00	44.500.000,00	74,17	8.500.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	500.000,00
5.1.02.02.04.0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	155.000.000,00	132.904.500,00	85,74	97.350.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	42.000.000,00	36.870.000,00	87,79	45.730.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	69.500.000,00	66.000.000,00	94,96	9.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	58.750.000,00	56.350.000,00	95,91	64.400.000,00
5.1.02.02.04.0459	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.197.890.000,00	2.068.547.200,00	94,12	2.363.614.701,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	787.650.000,00	785.112.000,00	99,68	640.562.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	35.100.000,00	35.000.000,00	99,72	32.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	210.750.000,00	203.610.000,00	96,61	287.125.451,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	65.000.000,00	60.000.000,00	92,31	0,00
5.1.02.02.05.0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	283.090.000,00	221.024.400,00	78,08	436.165.400,00
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	7.000.000,00	6.000.000,00	85,71	60.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	461.300.000,00	417.850.800,00	90,58	310.138.850,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	348.000.000,00	339.950.000,00	97,69	0,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	597.123.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00	10.000.000,00
5.1.02.02.06.0103	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.02.06.0130	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	312.500.000,00
5.1.02.02.07.0017	Belanja Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	12.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.137.886.571,00	6.421.612.909,00	89,97	9.150.531.249,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	100.000.000,00	99.790.000,00	99,79	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	938.798.206,00	863.249.227,00	91,95	871.408.760,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	627.500.000,00	626.873.980,00	99,90	1.412.258.775,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	300.000.000,00	299.695.000,00	99,90	949.134.410,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.729.000.000,00	2.452.764.140,00	89,88	3.730.590.590,00
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	0,00	0,00	0,00	98.423.700,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	800.000.000,00	758.629.500,00	94,83	434.968.485,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	15.000.000,00	14.957.250,00	99,72	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	466.600.865,00	165.394.000,00	35,45	427.945.200,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	243.987.500,00	239.509.192,00	98,16	397.013.815,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	887.000.000,00	870.800.620,00	98,17	377.839.387,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	30.000.000,00	29.950.000,00	99,83	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	36.934.500,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	188.322.600,00
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	0,00	0,00	0,00	225.691.027,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	660.000.000,00	638.973.440,00	96,81	2.001.586.170,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	185.000.000,00	184.772.000,00	99,85	470.238.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	150.000.000,00	129.870.000,00	86,58	0,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	155.000.000,00	154.987.000,00	99,99	816.674.000,00
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	0,00	0,00	499.726.850,00
5.1.02.02.09.0017	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95	114.947.320,00
5.1.02.02.09.0018	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataa	10.000.000,00	9.500.000,00	95,00	100.000.000,00
5.1.02.02.09.0022	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataa	60.000.000,00	59.944.440,00	99,91	0,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	295.038.000,00	286.929.534,00	97,25	183.831.997,00
5.1.02.02.10.0003	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	75.235.800,00	75.019.350,00	99,71	67.632.300,00
5.1.02.02.10.0006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	23.643.000,00	15.762.000,00	66,67	13.791.750,00
5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	196.159.200,00	196.148.184,00	99,99	102.407.947,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	143.310.000,00	128.510.000,00	89,67	189.292.516,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	56.000.000,00	41.200.000,00	73,57	50.482.516,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	57.310.000,00	57.310.000,00	100,00	63.810.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	75.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.325.660.660,00	1.085.406.550,00	81,88	1.797.062.131,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	43.320.000,00	36.300.000,00	83,80	96.321.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.250.697.660,00	1.049.106.550,00	83,88	1.564.636.131,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	31.643.000,00	0,00	0,00	136.105.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	7.224.000,00	6.274.000,00	86,85	7.550.000,00
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.224.000,00	6.274.000,00	86,85	7.550.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	311.006.600,00	300.457.536,00	96,61	176.632.905,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	266.906.600,00	266.752.319,00	99,94	145.871.741,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	44.100.000,00	33.705.217,00	76,43	30.761.164,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	25.211.518.796,00	23.676.035.473,53	93,91	30.476.679.378,48
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	318.636.300,00	318.356.840,00	99,91	505.479.240,00
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	93.636.300,00	93.495.500,00	99,85	118.511.240,00
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00	286.968.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	100.000.000,00
5.1.02.03.01.0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	200.000.000,00	199.861.340,00	99,93	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.249.223.473,00	6.180.848.093,00	85,26	6.458.921.257,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	42.500.000,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	75.000.000,00	53.912.342,00	71,88	0,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	92.000.000,00	68.433.892,00	74,38	0,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	64.389.500,00	64.190.993,00	99,69	35.567.579,00
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	21.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	31.400.000,00	27.565.313,00	87,79	55.965.174,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	106.000.000,00	101.493.717,00	95,75	85.839.763,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	900.000.000,00	792.330.212,00	88,04	737.856.154,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.732.974.124,00	2.304.112.471,00	84,31	2.065.993.278,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	42.000.000,00	25.868.981,00	61,59	20.053.130,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	765.500.000,00	613.251.785,00	80,11	591.610.672,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	42.500.000,00	33.429.445,00	78,66	53.025.951,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	10.500.000,00	10.450.000,00	99,52	12.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	555.664.000,00	474.441.801,00	85,38	758.622.738,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	13.400.000,00	8.856.000,00	66,09	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	68.843.216,00	61.469.560,00	89,29	144.007.045,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	691.175.340,00	612.547.446,00	88,62	710.460.759,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.820.000,00	22.079.659,00	96,76	22.861.007,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	72.643.720,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	53.488.983,00	25.250.000,00	47,21	0,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	35.000.000,00	26.995.000,00	77,13	0,00
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	63.750.000,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	12.538.500,00
5.1.02.03.02.0250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	187.900.000,00	182.850.500,00	97,31	161.258.200,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	11.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	479.394.000,00	421.236.562,00	87,87	508.372.422,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	121.774.310,00	93.150.675,00	76,49	117.559.986,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.500.000,00	8.306.739,00	97,73	8.230.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	30.349.378,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	100.000.000,00	99.625.000,00	99,63	102.355.801,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.421.430.619,00	9.974.990.033,53	95,72	13.220.471.309,48
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.065.736.789,00	6.999.477.799,04	99,06	9.674.654.565,48
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	52.000.000,00	51.910.000,00	99,83	174.931.100,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	562.800.000,00	546.690.642,49	97,14	0,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.741.455.980,00	1.626.468.327,00	93,40	1.627.187.219,00
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	30.000.000,00	29.975.000,00	99,92	75.000.000,00
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	30.000.000,00	29.975.000,00	99,92	0,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	9.997.850,00	9.997.850,00	100,00	9.999.400,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	94.442.000,00	91.796.000,00	97,20	37.400.000,00
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	200.000.000,00	83.389.329,00	41,69	870.604.039,00
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	580.000.000,00	455.410.086,00	78,52	555.902.986,00
5.1.02.03.03.0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80	99.830.000,00
5.1.02.03.03.0060	Belanja Pemeliharaan Tugu Tiuk Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	4.998.000,00	0,00	0,00	94.962.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.172.228.404,00	7.151.840.507,00	99,72	10.266.807.572,00
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	1.826.614.161,00	1.825.765.000,00	99,95	3.673.095.800,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.000.000.000,00	991.947.072,00	99,19	3.006.790.460,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.227.614.243,00	4.216.530.040,00	99,74	3.426.768.992,00
5.1.02.03.04.0067	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	50.000.000,00	49.839.000,00	99,68	0,00
5.1.02.03.04.0078	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	0,00	0,00	0,00	24.798.500,00
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	50.000.000,00	49.961.100,00	99,92	0,00
5.1.02.03.04.0105	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	0,00	0,00	0,00	2.055.100,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	18.000.000,00	17.798.295,00	98,88	108.298.720,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	135.841.043.221,00	130.022.545.391,00	95,72	146.620.887.915,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	135.755.473.221,00	129.939.072.691,00	95,72	146.154.767.278,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	128.460.115.721,00	122.714.288.691,00	95,53	137.266.324.238,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.579.600.000,00	1.561.812.300,00	98,87	1.759.250.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.715.757.500,00	5.662.971.700,00	99,08	7.129.193.040,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	85.570.000,00	83.472.700,00	97,55	466.120.637,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa“Luar Negeri	85.570.000,00	83.472.700,00	97,55	466.120.637,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.758.459.750,00	8.614.558.181,00	98,36	12.257.803.450,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.175.463.750,00	6.126.874.000,00	99,21	9.946.506.976,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	970.150.000,00	930.104.000,00	95,87	765.766.976,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	207.500.000,00	201.000.000,00	96,87	437.990.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	4.762.780.000,00	4.760.770.000,00	99,96	8.680.800.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	235.033.750,00	235.000.000,00	99,99	0,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	61.950.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.582.996.000,00	2.487.684.181,00	96,31	2.311.296.474,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.582.996.000,00	2.487.684.181,00	96,31	2.091.296.474,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.210.747.983,00	69.142.728.716,00	101,37	64.564.991.944,60
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.210.747.983,00	69.142.728.716,00	101,37	64.564.991.944,60
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.210.747.983,00	69.142.728.716,00	101,37	64.564.991.944,60
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.677.707.677,00	47.353.942.051,63	89,89	36.569.523.429,05
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.677.707.677,00	47.353.942.051,63	89,89	36.569.523.429,05
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.677.707.677,00	47.353.942.051,63	89,89	36.569.523.429,05
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.012.047,00	6.439.282.345,00	101,42	7.093.341.745,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	6.349.012.047,00	6.439.282.345,00	101,42	7.093.341.745,00
5.1.03.04.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	6.349.012.047,00	6.439.282.345,00	101,42	7.093.341.745,00
5.1.03.04.01.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	6.349.012.047,00	6.439.282.345,00	101,42	7.093.341.745,00
5.1.05	Belanja Hibah	132.481.124.769,00	132.240.736.851,00	99,82	85.797.138.870,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	108.889.565.622,00	108.887.795.122,00	100,00	55.083.190.800,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	108.889.565.622,00	108.887.795.122,00	100,00	55.083.190.800,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	108.889.565.622,00	108.887.795.122,00	100,00	55.083.190.800,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.476.950.000,00	22.261.450.000,00	99,04	22.971.199.992,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.115.000.000,00	11.967.450.000,00	98,78	8.994.199.992,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.115.000.000,00	11.967.450.000,00	98,78	8.949.283.992,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	44.916.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	100,00	1.647.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	100,00	1.647.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.131.950.000,00	7.064.000.000,00	99,05	11.205.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.131.950.000,00	7.064.000.000,00	99,05	11.205.000.000,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	300.000.000,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	300.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	100,00	825.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	100,00	825.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	6.670.615.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	0,00	0,00	6.670.615.000,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	0,00	0,00	6.670.615.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.114.609.147,00	1.091.491.729,00	97,93	1.072.133.078,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.114.609.147,00	1.091.491.729,00	97,93	1.072.133.078,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.114.609.147,00	1.091.491.729,00	97,93	1.072.133.078,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.283.213.000,00	11.191.847.860,00	99,19	24.878.511.324,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00	88.261.574,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00	10.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00	10.000.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	78.261.574,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	78.261.574,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	7.868.163.000,00	7.807.738.560,00	99,23	19.546.500.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.750.962.000,00	2.750.958.560,00	100,00	7.881.500.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.750.962.000,00	2.750.958.560,00	100,00	7.881.500.000,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.117.201.000,00	5.056.780.000,00	98,82	11.665.000.000,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.117.201.000,00	5.056.780.000,00	98,82	11.665.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.295.650.000,00	1.292.109.300,00	99,73	1.585.749.750,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	765.500.000,00	765.500.000,00	100,00	1.058.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	765.500.000,00	765.500.000,00	100,00	1.058.000.000,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	530.150.000,00	526.609.300,00	99,33	527.749.750,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	530.150.000,00	526.609.300,00	99,33	527.749.750,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.099.400.000,00	2.087.000.000,00	99,41	3.658.000.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.099.400.000,00	2.087.000.000,00	99,41	3.658.000.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.099.400.000,00	2.087.000.000,00	99,41	3.658.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.605.785.176.582,00	1.556.182.022.343,16	96,91	1.475.863.473.693,15
5.2	BELANJA MODAL	257.490.295.402,00	220.354.238.401,45	85,58	230.302.490.856,51
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.466.898.227,00	73.194.098.495,00	96,99	57.681.672.265,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	5.288.454.220,00	5.229.426.100,00	98,88	57.586.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	200.000.000,00	199.500.000,00	99,75	0,00
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Tractor	200.000.000,00	199.500.000,00	99,75	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	5.088.454.220,00	5.029.926.100,00	98,85	57.586.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	1.995.500.000,00	1.984.000.000,00	99,42	28.600.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	33.614.300,00	23.703.500,00	70,52	28.986.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	3.015.000.000,00	3.011.500.000,00	99,88	0,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	44.339.920,00	10.722.600,00	24,18	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	7.275.352.961,00	7.108.827.446,00	97,71	10.498.167.946,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.677.112.961,00	5.540.248.924,00	97,59	7.558.620.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.806.702.000,00	1.736.200.000,00	96,10	2.559.840.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.407.500.000,00	1.362.400.000,00	96,80	3.122.600.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	659.612.000,00	659.000.000,00	99,91	1.572.400.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	763.298.961,00	747.818.924,00	97,97	303.780.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	90.000.000,00	84.830.000,00	94,26	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	950.000.000,00	950.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.598.240.000,00	1.568.578.522,00	98,14	2.939.547.946,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	2.939.547.946,00
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	1.598.240.000,00	1.568.578.522,00	98,14	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	516.120.000,00	512.931.500,00	99,38	353.882.999,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	510.700.000,00	507.631.500,00	99,40	323.632.999,00
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0,00	0,00	0,00	120.199.999,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00	203.433.000,00
5.2.02.03.01.0009	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	400.000.000,00	399.371.500,00	99,84	0,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	110.700.000,00	108.260.000,00	97,80	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	5.420.000,00	5.300.000,00	97,79	30.250.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	5.420.000,00	5.300.000,00	97,79	11.100.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.450.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	4.473.180.800,00	4.447.991.324,00	99,44	1.763.692.192,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	4.473.180.800,00	4.447.991.324,00	99,44	1.763.692.192,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	3.371.505.000,00	3.348.454.900,00	99,32	1.358.873.992,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	612.675.800,00	612.299.000,00	99,94	0,00
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	265.000.000,00	263.280.000,00	99,35	0,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	224.000.000,00	223.957.424,00	99,98	0,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00	404.818.200,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.611.500.874,00	7.848.734.017,00	103,12	8.760.646.101,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.527.694.024,00	2.789.199.837,00	110,35	2.319.713.514,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	65.599.999,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.267.124,00	6.260.000,00	99,89	175.214.750,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.521.426.900,00	2.782.939.837,00	110,37	2.078.898.765,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.486.236.700,00	4.469.413.193,00	99,62	5.396.256.027,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.326.628.700,00	2.349.781.750,00	101,00	2.364.459.769,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	7.582.000,00	7.312.500,00	96,45	33.154.010,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.114.655.700,00	1.114.854.400,00	100,02	1.176.508.592,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	23.920.400,00	19.755.400,00	82,59	11.429.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.008.299.900,00	972.709.143,00	96,47	1.781.961.656,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.150.000,00	5.000.000,00	97,09	28.743.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	597.570.150,00	590.120.987,00	98,75	1.044.676.560,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	169.234.000,00	164.199.460,00	97,03	417.606.459,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	47.518.650,00	43.781.000,00	92,13	173.858.280,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	219.588.000,00	221.178.800,00	100,72	176.597.799,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	63.087.500,00	62.905.000,00	99,71	82.410.293,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	20.226.000,00	20.208.727,00	99,91	0,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangkan Pejabat	62.466.000,00	62.413.000,00	99,92	72.207.500,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	15.450.000,00	15.435.000,00	99,90	121.996.229,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.953.152.670,00	1.962.608.009,00	100,48	1.566.613.353,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.792.957.670,00	1.808.220.000,00	100,85	619.567.353,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	165.907.850,00	160.885.000,00	96,97	144.983.706,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.590.757.500,00	1.612.835.000,00	101,39	199.654.350,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	6.335.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	36.292.320,00	34.500.000,00	95,06	268.594.297,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	160.195.000,00	154.388.009,00	96,38	947.046.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	94.275.000,00	90.388.009,00	95,88	164.647.000,00
5.2.02.06.02.0006	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	0,00	0,00	0,00	2.399.000,00
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	65.920.000,00	64.000.000,00	97,09	780.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.496.657.450,00	13.243.745.270,00	98,13	6.892.887.504,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.811.949.510,00	10.626.446.270,00	98,28	5.940.313.800,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.698.000,00	0,00	0,00	36.204.366,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	2.912.078.000,00	2.898.174.000,00	99,52	0,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	305.272.000,00	287.270.000,00	94,10	310.271.000,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	200.750.000,00	198.000.000,00	98,63	0,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	5.349.329.260,00	5.295.500.000,00	98,99	0,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00	4.601.432.000,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	2.000.000.000,00	1.905.982.943,00	95,30	0,00
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	0,00	0,00	0,00	992.406.434,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	42.822.250,00	41.519.327,00	96,96	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.684.707.940,00	2.617.299.000,00	97,49	952.573.704,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.684.707.940,00	2.617.299.000,00	97,49	952.573.704,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	14.321.144.000,00	14.701.653.080,00	102,66	10.962.419.200,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.218.326.234,00	1.850.129.178,00	83,40	3.029.943.450,00
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	2.218.326.234,00	1.850.129.178,00	83,40	64.333.000,00
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.870.610.450,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	12.102.817.766,00	12.851.523.902,00	106,19	7.892.821.000,00
5.2.02.08.03.0006	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	0,00	0,00	0,00	1.887.820.000,00
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	100.000.000,00	99.796.500,00	99,80	0,00
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	11.700.000.000,00	11.645.088.200,00	99,53	6.005.001.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	21.218.000,00	21.000.000,00	98,97	0,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	281.599.766,00	1.085.639.202,00	385,53	0,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	39.654.750,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	39.654.750,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.601.201.909,00	3.426.701.313,00	95,15	15.163.732.174,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.069.671.909,00	2.908.325.324,00	94,74	14.011.730.018,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	57.325.000,00	41.134.500,00	71,76	263.136.500,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.880.619.909,00	1.793.544.339,00	95,37	12.603.118.050,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.131.727.000,00	1.073.646.485,00	94,87	1.145.475.468,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	531.530.000,00	518.375.989,00	97,53	1.152.002.156,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	28.640.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	169.871.000,00	163.891.498,00	96,48	734.223.205,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	852.000,00	852.000,00	100,00	218.973.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	360.807.000,00	353.632.491,00	98,01	170.165.951,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	31.827.000,00	31.825.000,00	99,99	110.760.995,00
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	0,00	0,00	0,00	9.879.000,00
5.2.02.15.01.0002	Belanja Modal Suara	0,00	0,00	0,00	9.879.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	69.159.967,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	10.499.976,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	58.659.991,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	31.827.000,00	31.825.000,00	99,99	31.722.028,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	31.827.000,00	31.825.000,00	99,99	31.722.028,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	41.200.000,00	45.308.000,00	109,97	54.020.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	41.200.000,00	45.308.000,00	109,97	54.020.000,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	4.120.000,00
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	41.200.000,00	45.308.000,00	109,97	49.900.000,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	25.000.000,00	18.100.000,00	72,40	0,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	25.000.000,00	18.100.000,00	72,40	0,00
5.2.02.17.01.0024	Belanja Modal Mechanical Process	25.000.000,00	18.100.000,00	72,40	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	187.402.913,00	186.807.680,00	99,68	1.318.771.351,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	187.402.913,00	186.807.680,00	99,68	1.318.771.351,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	187.402.913,00	186.807.680,00	99,68	1.318.771.351,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.000.000,00	14.900.000,00	99,33	178.492.450,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.000.000,00	14.900.000,00	99,33	178.492.450,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	15.000.000,00	14.900.000,00	99,33	0,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	178.492.450,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.123.286.098,00	9.985.100.321,00	109,45	0,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.123.286.098,00	9.985.100.321,00	109,45	0,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.123.286.098,00	9.985.100.321,00	109,45	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.506.417.332,00	4.429.439.435,00	59,01	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.506.417.332,00	4.429.439.435,00	59,01	0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.506.417.332,00	4.429.439.435,00	59,01	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.486.591.071,00	68.302.416.338,45	71,53	42.838.898.903,91
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	89.553.652.069,00	62.915.416.398,45	70,25	39.486.957.685,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	89.544.752.069,00	62.906.516.398,45	70,25	39.018.851.220,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	19.285.000.000,00	16.193.569.942,00	83,97	31.592.228.387,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	39.248.790.550,00	18.623.454.672,97	47,45	4.994.435,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80	149.150.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	22.634.067.027,00	20.528.652.724,00	90,70	31.507.832.079,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	365.749.503,00	364.549.003,00	99,67	26.674.516,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	14.976.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	5.671.954.389,00	4.867.278.606,48	85,81	702.850.577,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	199.792.238,00
5.2.03.01.01.0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00	0,00	0,00	662.749.529,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	300.000.000,00	299.840.000,00	99,95	901.508.706,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.205.565.600,00	1.204.237.500,00	99,89	793.615.200,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	224.873.121,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	160.000.000,00	159.900.000,00	99,94	170.829.432,00
5.2.03.01.01.0034	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik	358.625.000,00	350.358.950,00	97,70	99.888.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	125.000.000,00	124.925.000,00	99,94	399.889.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	90.000.000,00	89.900.000,00	99,89	0,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00	468.106.465,00
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00	468.106.465,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.532.939.002,00	5.042.548.940,00	91,14	3.351.941.218,91
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	5.532.939.002,00	5.042.548.940,00	91,14	3.351.941.218,91
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	375.000.000,00	274.943.300,00	73,32	16.983.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	4.997.939.002,00	4.607.764.640,00	92,19	3.030.971.362,91
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	160.000.000,00	159.841.000,00	99,90	303.986.856,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	344.451.000,00	86,11	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	344.451.000,00	86,11	0,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	344.451.000,00	86,11	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.641.009.156,00	70.394.263.930,00	89,51	121.110.943.553,60
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	48.852.448.293,00	46.870.369.161,00	95,94	87.699.355.621,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	47.885.101.958,00	46.003.022.826,00	96,07	79.382.119.743,00
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	35.101.612.250,00	33.567.066.433,00	95,63	61.029.864.820,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	570.000.000,00	567.786.348,00	99,61	1.480.880.800,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	2.341.638.500,00	2.307.005.731,00	98,52	0,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	9.871.851.208,00	9.561.164.314,00	96,85	16.871.374.123,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	967.346.335,00	867.346.335,00	89,66	8.317.235.878,00
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	967.346.335,00	867.346.335,00	89,66	8.222.297.698,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	94.938.180,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	26.123.694.863,00	20.141.344.769,00	77,10	33.284.295.752,60
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	16.043.521.350,00	10.282.954.752,00	64,09	20.446.605.215,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	16.043.521.350,00	10.282.954.752,00	64,09	20.446.605.215,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	7.395.236.207,00	7.387.485.401,00	99,90	5.486.774.902,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	7.395.236.207,00	7.387.485.401,00	99,90	5.486.774.902,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	639.000.000,00	634.308.050,00	99,27	175.961.000,00
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	175.961.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	639.000.000,00	634.308.050,00	99,27	0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.045.937.306,00	1.836.596.566,00	89,77	7.174.954.635,60
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	0,00	0,00	207.411.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	70.850.000,00	70.849.600,00	100,00	0,00
5.2.04.02.07.0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	0,00	0,00	0,00	4.641.523.417,60
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.975.087.306,00	1.765.746.966,00	89,40	2.326.020.218,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	3.664.866.000,00	3.382.550.000,00	92,30	15.000.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.577.800.000,00	3.299.900.000,00	92,23	15.000.000,00
5.2.04.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	0,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.477.800.000,00	3.200.000.000,00	92,01	15.000.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	87.066.000,00	82.650.000,00	94,93	0,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	87.066.000,00	82.650.000,00	94,93	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	112.292.180,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	112.292.180,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	112.292.180,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.895.796.948,00	8.463.459.638,00	107,19	8.670.976.134,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	136.686.000,00	135.490.000,00	99,13	242.042.006,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	69.628.000,00	68.500.000,00	98,38	233.092.908,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	69.628.000,00	68.500.000,00	98,38	233.092.908,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	67.058.000,00	66.990.000,00	99,90	8.949.098,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	67.058.000,00	66.990.000,00	99,90	8.949.098,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	29.939.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	29.939.000,00
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	29.939.000,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95	0,00
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95	0,00
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	8.398.995.128,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	8.398.995.128,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	232.089.900,00
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.166.905.228,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.659.110.948,00	8.228.019.638,00	107,43	0,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.659.110.948,00	8.228.019.638,00	107,43	0,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.659.110.948,00	8.228.019.638,00	107,43	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	257.490.295.402,00	220.354.238.401,45	85,58	230.302.490.856,51
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53	991.984.875,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53	991.984.875,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53	991.984.875,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53	991.984.875,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53	991.984.875,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53	991.984.875,00
5.4	BELANJA TRANSFER	209.604.098.485,00	202.203.513.267,00	96,47	193.438.038.459,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	206.629.098.485,00	199.603.513.267,00	96,60	191.718.038.459,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	206.629.098.485,00	199.603.513.267,00	96,60	191.718.038.459,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	154.940.416.815,00	154.825.155.276,00	99,93	157.745.778.886,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	154.940.416.815,00	154.825.155.276,00	99,93	157.745.778.886,00
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	51.688.681.670,00	44.778.357.991,00	86,63	33.972.259.573,00
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	51.688.681.670,00	44.778.357.991,00	86,63	33.972.259.573,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.975.000.000,00	2.600.000.000,00	87,39	1.720.000.000,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2.925.000.000,00	2.600.000.000,00	88,89	1.210.000.000,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2.925.000.000,00	2.600.000.000,00	88,89	1.210.000.000,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2.925.000.000,00	2.600.000.000,00	88,89	1.210.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	510.000.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	510.000.000,00
5.4.02.05.02.0002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	510.000.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	209.604.098.485,00	202.203.513.267,00	96,47	193.438.038.459,00
	JUMLAH BELANJA	2.078.376.477.087,00	1.983.441.271.724,61	95,43	1.900.595.987.883,66
	SURPLUS/DEFISIT	(153.970.511.569,00)	(53.101.028.028,38)	34,49	(28.108.882.354,98)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	153.970.511.569,00	152.688.158.900,69	99,17	199.014.777.167,67
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	170.905.894.813,00	170.905.894.812,69	100,00	228.765.815.327,67
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	170.905.894.813,00	170.905.894.812,69	100,00	228.765.815.327,67
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	69.622.263.343,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	64.398.120.001,00
6.1.01.01.01.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	0,00	0,00	17.457.796.195,00
6.1.01.01.01.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	0,00	0,00	22.349.905.729,00
6.1.01.01.01.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	0,00	0,00	14.218.671.395,00
6.1.01.01.01.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	10.371.746.682,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	5.224.143.342,00
6.1.01.01.04.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	3.252.670.877,00
6.1.01.01.04.0004	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	1.971.472.465,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	501.721.917,40	501.721.917,40	100,00	0,00
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	501.721.917,40	501.721.917,40	100,00	0,00
6.1.01.03.01.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	500.681.138,40	500.681.138,40	100,00	0,00
6.1.01.03.01.0005	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.040.779,00	1.040.779,00	100,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	153.833.000.058,15	153.833.000.057,84	100,00	143.396.195.775,67
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	11.248.720.865,21	11.248.720.865,21	100,00	76.257.512.714,67
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00	0,00	31.994.848.577,67
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	0,00	0,00	0,00	2.262.664.137,00
6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	673.421.651,00	673.421.651,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	97.295.035,00	97.295.035,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	122.997.310,00	122.997.310,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	0,00	0,00	0,00	22.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	2.539.432.835,21	2.539.432.835,21	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	1.665.930.880,00	1.665.930.880,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0015	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	95.281.129,00	95.281.129,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	617.661.025,00	617.661.025,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0028	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga	5.165.201.000,00	5.165.201.000,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0030	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	271.500.000,00	271.500.000,00	100,00	0,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	132.329.157.067,94	132.329.157.067,63	100,00	66.901.497.652,00
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	0,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00
6.1.01.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	11.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	597.804.634,00	597.804.634,00	100,00	1.200.000.000,00
6.1.01.05.02.0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	985.226.244,00	985.226.244,00	100,00	5.900.000.000,00
6.1.01.05.02.0009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	278.462.239,00	278.462.239,00	100,00	0,00
6.1.01.05.02.0010	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	8.583.288.655,00	8.583.288.655,00	100,00	19.601.497.652,00
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	489.079.772,09	489.079.772,09	100,00	0,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	14.198.519.736,00	14.198.519.736,00	100,00	26.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	107.172.180.884,00	107.172.180.884,00	100,00	0,00
6.1.01.05.02.0028	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	24.594.903,85	24.594.903,54	100,00	0,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	10.030.122.125,00	10.030.122.125,00	100,00	0,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	10.030.122.125,00	10.030.122.125,00	100,00	0,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	237.185.409,00
6.1.01.05.04.0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00	0,00	237.185.409,00
6.1.01.05.04.0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	16.571.172.837,45	16.571.172.837,45	100,00	15.747.356.209,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	15.085.201.009,45	15.085.201.009,45	100,00	14.090.678.958,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	15.085.201.009,45	15.085.201.009,45	100,00	14.090.678.958,00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	1.485.971.828,00	1.485.971.828,00	100,00	1.656.677.251,00
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	1.485.971.828,00	1.485.971.828,00	100,00	1.656.677.251,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	170.905.894.813,00	170.905.894.812,69	100,00	228.765.815.327,67
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57	29.751.038.160,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57	19.751.038.160,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57	19.751.038.160,00
6.2.03.04.01	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57	19.751.038.160,00
6.2.03.04.01.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57	19.751.038.160,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57	29.751.038.160,00
	PEMBIAYAAN NETTO	153.970.511.569,00	152.688.158.900,69	99,17	199.014.777.167,67
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	99.587.130.872,31	0,00	170.905.894.812,69

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**
Organisasi : **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01.2.22.0.00.01.0000		4		PENDAPATAN DAERAH	0,00	5.473.443.543,00	5.473.443.543,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000		4.1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	157.337.163,00	157.337.163,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000		4.1.04		Lain-lain PAD yang Sah	0,00	157.337.163,00	157.337.163,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000		4.3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	5.316.106.380,00	5.316.106.380,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000		4.3.01		Pendapatan Hibah	0,00	5.316.106.380,00	5.316.106.380,00	0,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000		5		BELANJA DAERAH	556.155.658.188,00	547.301.402.008,00	(8.854.256.180,00)	98,40	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	168.958.049.222,00	167.667.094.415,00	(1.290.954.807,00)	99,23	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	85.966.151.161,00	83.226.138.075,00	(2.740.013.086,00)	96,81	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.953.095.292,00	2.320.489.134,00	(632.606.158,00)	78,57	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0003	5.1		BELANJA OPERASI	304.411.292,00	250.317.327,00	(54.093.965,00)	82,22	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	304.411.292,00	250.317.327,00	(54.093.965,00)	82,22	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0003	5.2		BELANJA MODAL	2.648.684.000,00	2.070.171.807,00	(578.512.193,00)	78,15	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0003	5.2.03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.648.684.000,00	2.070.171.807,00	(578.512.193,00)	78,15	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0011			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	430.282.000,00	344.214.994,00	(86.067.006,00)	79,99	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0011	5.2		BELANJA MODAL	430.282.000,00	344.214.994,00	(86.067.006,00)	79,99	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0011	5.2.03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	430.282.000,00	344.214.994,00	(86.067.006,00)	79,99	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0012			Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	600.000.000,00	589.226.331,00	(10.773.669,00)	98,20	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0012	5.2		BELANJA MODAL	600.000.000,00	589.226.331,00	(10.773.669,00)	98,20	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0012	5.2.03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	600.000.000,00	589.226.331,00	(10.773.669,00)	98,20	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11.795.034.170,00	11.621.504.818,00	(173.529.352,00)	98,52	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	5.1		BELANJA OPERASI	2.066.129.785,00	2.024.670.631,00	(41.459.154,00)	97,99	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	2.066.129.785,00	2.024.670.631,00	(41.459.154,00)	97,99	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	5.2		BELANJA MODAL	9.728.904.385,00	9.596.834.187,00	(132.070.198,00)	98,64	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.092.012.500,00	1.083.385.000,00	(8.627.500,00)	99,20	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	5.2.03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.503.891.885,00	8.339.726.801,00	(164.165.084,00)	98,06	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	5.2.04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	133.000.000,00	173.722.386,00	40.722.386,00	130,61	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	376.962.000,00	366.427.653,00	(10.534.347,00)	97,20	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0019	5.1		BELANJA OPERASI	376.962.000,00	366.427.653,00	(10.534.347,00)	97,20	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0019	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	376.962.000,00	366.427.653,00	(10.534.347,00)	97,20	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	182.280.000,00	181.958.027,00	(321.973,00)	99,82	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0020	5.1		BELANJA OPERASI	182.280.000,00	181.958.027,00	(321.973,00)	99,82	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0020	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	182.280.000,00	181.958.027,00	(321.973,00)	99,82	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	322.569.000,00	258.046.747,00	(64.522.253,00)	79,99	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0023	5.1		BELANJA OPERASI	322.569.000,00	258.046.747,00	(64.522.253,00)	79,99	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0023	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	322.569.000,00	258.046.747,00	(64.522.253,00)	79,99	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	155.000.000,00	154.876.342,00	(123.658,00)	99,92	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0027	5.1		BELANJA OPERASI	155.000.000,00	154.876.342,00	(123.658,00)	99,92	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0027	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	154.876.342,00	(123.658,00)	99,92	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0045			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	557.277.000,00	555.302.600,00	(1.974.400,00)	99,64	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0045	5.1		BELANJA OPERASI	557.277.000,00	555.302.600,00	(1.974.400,00)	99,64	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0045	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	557.277.000,00	555.302.600,00	(1.974.400,00)	99,64	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0046			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	300.000.000,00	299.776.500,00	(223.500,00)	99,92	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0046	5.1		BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.990.000,00	(10.000,00)	99,98	
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0046	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.990.000,00	(10.000,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0046	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.786.500,00	(213.500,00)	99,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0046	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	199.786.500,00	(213.500,00)	99,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0049		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	692.320.050,00	654.372.493,00	(37.947.557,00)	94,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0049	5.1	BELANJA OPERASI	692.320.050,00	654.372.493,00	(37.947.557,00)	94,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.320.050,00	654.372.493,00	(37.947.557,00)	94,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0050		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	9.832.184.184,00	9.572.317.552,00	(259.866.632,00)	97,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	9.832.184.184,00	9.572.317.552,00	(259.866.632,00)	97,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.832.184.184,00	9.572.317.552,00	(259.866.632,00)	97,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0051		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	199.262.000,00	187.062.712,00	(12.199.288,00)	93,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	199.262.000,00	187.062.712,00	(12.199.288,00)	93,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.262.000,00	187.062.712,00	(12.199.288,00)	93,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0052		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1.002.018.900,00	979.785.205,00	(22.233.695,00)	97,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0052	5.1	BELANJA OPERASI	1.002.018.900,00	979.785.205,00	(22.233.695,00)	97,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0052	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.002.018.900,00	979.785.205,00	(22.233.695,00)	97,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	51.981.375.345,00	51.230.594.793,00	(750.780.552,00)	98,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.1	BELANJA OPERASI	40.316.026.031,00	38.740.181.223,00	(1.575.844.808,00)	96,09	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.316.026.031,00	38.740.181.223,00	(1.575.844.808,00)	96,09	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.2	BELANJA MODAL	11.665.349.314,00	12.490.413.570,00	825.064.256,00	107,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.726.117.814,00	6.099.056.332,00	372.938.518,00	106,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.939.231.500,00	6.391.357.238,00	452.125.738,00	107,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0067		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	485.901.713,00	479.124.878,00	(6.776.835,00)	98,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0067	5.2	BELANJA MODAL	485.901.713,00	479.124.878,00	(6.776.835,00)	98,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0067	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	485.901.713,00	479.124.878,00	(6.776.835,00)	98,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0068		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	701.938.480,00	691.013.600,00	(10.924.880,00)	98,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0068	5.1	BELANJA OPERASI	701.938.480,00	691.013.600,00	(10.924.880,00)	98,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0068	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	701.938.480,00	691.013.600,00	(10.924.880,00)	98,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0070		Pembangunan Ruang Laboratorium	703.650.027,00	596.121.939,00	(107.528.088,00)	84,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0070	5.1	BELANJA OPERASI	134.872.589,00	134.872.589,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0070	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.872.589,00	134.872.589,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0070	5.2	BELANJA MODAL	568.777.438,00	461.249.350,00	(107.528.088,00)	81,09	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0070	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	568.777.438,00	461.249.350,00	(107.528.088,00)	81,09	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072		Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.695.001.000,00	2.143.921.757,00	(551.079.243,00)	79,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072	5.2	BELANJA MODAL	2.695.001.000,00	2.143.921.757,00	(551.079.243,00)	79,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.695.001.000,00	2.143.921.757,00	(551.079.243,00)	79,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	71.481.097.940,00	73.375.851.691,00	1.894.753.751,00	102,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0004		Pembangunan Ruang Praktik Siswa	1.022.570.550,00	1.009.952.196,00	(12.618.354,00)	98,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	31.840.350,00	(3.159.650,00)	90,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	31.840.350,00	(3.159.650,00)	90,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	987.570.550,00	978.111.846,00	(9.458.704,00)	99,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	987.570.550,00	978.111.846,00	(9.458.704,00)	99,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0005		Pembangunan Ruang Laboratorium	9.892.911.548,00	8.126.528.850,00	(1.766.382.698,00)	82,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.437.996.916,00	1.259.017.657,00	(178.979.259,00)	87,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.437.996.916,00	1.259.017.657,00	(178.979.259,00)	87,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0005	5.2	BELANJA MODAL	8.454.914.632,00	6.867.511.193,00	(1.587.403.439,00)	81,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.454.914.632,00	6.867.511.193,00	(1.587.403.439,00)	81,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0006		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	141.350.000,00	141.233.554,00	(116.446,00)	99,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	133.500.000,00	133.383.554,00	(116.446,00)	99,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.500.000,00	133.383.554,00	(116.446,00)	99,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.805.824.991,00	4.696.865.887,00	891.040.896,00	123,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	822.792.180,00	821.288.787,00	(1.503.393,00)	99,81	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	822.792.180,00	821.288.787,00	(1.503.393,00)	99,81	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	5.2	BELANJA MODAL	2.983.032.811,00	3.875.577.100,00	892.544.289,00	129,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	450.000.000,00	1.035.808.000,00	585.808.000,00	230,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.183.032.811,00	2.689.378.407,00	506.345.596,00	123,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000,00	142.390.693,00	(207.609.307,00)	40,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	14.386.749.416,00	14.931.983.895,00	545.234.479,00	103,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	2.250.149.650,00	2.197.595.695,00	(52.553.955,00)	97,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.149.650,00	2.197.595.695,00	(52.553.955,00)	97,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	12.136.599.766,00	12.734.388.200,00	597.788.434,00	104,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.136.599.766,00	12.734.388.200,00	597.788.434,00	104,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0037		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	2.348.506.050,00	2.347.304.654,00	(1.201.396,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0037	5.1	BELANJA OPERASI	2.348.506.050,00	2.347.304.654,00	(1.201.396,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.348.506.050,00	2.347.304.654,00	(1.201.396,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0041		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	980.732.150,00	978.793.116,00	(1.939.034,00)	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	980.732.150,00	978.793.116,00	(1.939.034,00)	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	980.732.150,00	978.793.116,00	(1.939.034,00)	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0042		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	8.564.192.276,00	8.332.329.350,00	(231.862.926,00)	97,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	8.564.192.276,00	8.332.329.350,00	(231.862.926,00)	97,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.564.192.276,00	8.332.329.350,00	(231.862.926,00)	97,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0043		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	127.780.900,00	112.592.275,00	(15.188.625,00)	88,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0043	5.1	BELANJA OPERASI	127.780.900,00	112.592.275,00	(15.188.625,00)	88,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.780.900,00	112.592.275,00	(15.188.625,00)	88,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	29.760.480.059,00	32.339.497.137,00	2.579.017.078,00	108,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	25.084.696.432,00	27.088.903.049,00	2.004.206.617,00	107,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.084.696.432,00	27.088.903.049,00	2.004.206.617,00	107,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.2	BELANJA MODAL	4.675.783.627,00	5.250.594.088,00	574.810.461,00	112,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.972.854.179,00	3.427.881.688,00	455.027.509,00	115,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.702.929.448,00	1.822.712.400,00	119.782.952,00	107,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0069		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	450.000.000,00	358.770.777,00	(91.229.223,00)	79,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0069	5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000,00	358.770.777,00	(91.229.223,00)	79,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0069	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	358.770.777,00	(91.229.223,00)	79,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	11.510.800.121,00	11.065.104.649,00	(445.695.472,00)	96,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0037		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	100.000.000,00	98.605.740,00	(1.394.260,00)	98,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0037	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.605.740,00	(1.394.260,00)	98,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.605.740,00	(1.394.260,00)	98,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0044		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	2.229.948.000,00	2.228.661.810,00	(1.286.190,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0044	5.1	BELANJA OPERASI	2.229.948.000,00	2.228.661.810,00	(1.286.190,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.229.948.000,00	2.228.661.810,00	(1.286.190,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0048		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	544.831.000,00	518.023.000,00	(26.808.000,00)	95,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0048	5.1	BELANJA OPERASI	544.831.000,00	518.023.000,00	(26.808.000,00)	95,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.831.000,00	518.023.000,00	(26.808.000,00)	95,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0049		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	4.382.992.306,00	4.254.873.823,00	(128.118.483,00)	97,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0049	5.1	BELANJA OPERASI	4.382.992.306,00	4.254.873.823,00	(128.118.483,00)	97,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.382.992.306,00	4.254.873.823,00	(128.118.483,00)	97,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	4.253.028.815,00	3.964.940.276,00	(288.088.539,00)	93,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.1	BELANJA OPERASI	3.811.764.710,00	3.500.827.975,00	(310.936.735,00)	91,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.811.764.710,00	3.500.827.975,00	(310.936.735,00)	91,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.2	BELANJA MODAL	441.264.105,00	464.112.301,00	22.848.196,00	105,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	424.314.105,00	458.162.301,00	33.848.196,00	107,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.950.000,00	5.950.000,00	(11.000.000,00)	35,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	252.898.950,00	244.273.754,00	(8.625.196,00)	96,58	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	252.898.950,00	244.273.754,00	(8.625.196,00)	96,58	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.1.01.0003		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	102.899.700,00	102.383.000,00	(516.700,00)	99,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	102.899.700,00	102.383.000,00	(516.700,00)	99,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.899.700,00	102.383.000,00	(516.700,00)	99,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.1.01.0004		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	149.999.250,00	141.890.754,00	(8.108.496,00)	94,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	149.999.250,00	141.890.754,00	(8.108.496,00)	94,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.999.250,00	141.890.754,00	(8.108.496,00)	94,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	386.944.710.016,00	379.390.033.839,00	(7.554.676.177,00)	98,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.760.777.234,00	1.759.418.356,00	(1.358.878,00)	99,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.760.777.234,00	1.759.418.356,00	(1.358.878,00)	99,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.760.777.234,00	1.759.418.356,00	(1.358.878,00)	99,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.760.777.234,00	1.759.418.356,00	(1.358.878,00)	99,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	375.041.272.632,00	367.762.922.894,00	(7.278.349.738,00)	98,05	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	374.958.952.632,00	367.680.745.697,00	(7.278.206.935,00)	98,05	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	374.958.952.632,00	367.680.745.697,00	(7.278.206.935,00)	98,05	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	374.958.952.632,00	367.680.745.697,00	(7.278.206.935,00)	98,05	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	82.320.000,00	82.177.197,00	(142.803,00)	99,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	82.320.000,00	82.177.197,00	(142.803,00)	99,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.320.000,00	82.177.197,00	(142.803,00)	99,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	839.756.000,00	839.406.361,00	(349.639,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	839.756.000,00	839.406.361,00	(349.639,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	839.756.000,00	839.406.361,00	(349.639,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	839.756.000,00	839.406.361,00	(349.639,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.381.687.250,00	3.292.751.946,00	(88.935.304,00)	97,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.381.687.250,00	3.292.751.946,00	(88.935.304,00)	97,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	602.631.250,00	601.567.115,00	(1.064.135,00)	99,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	602.631.250,00	601.567.115,00	(1.064.135,00)	99,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.779.056.000,00	2.691.184.831,00	(87.871.169,00)	96,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.019.056.000,00	1.936.169.832,00	(82.886.168,00)	95,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	610.000.000,00	605.254.999,00	(4.745.001,00)	99,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000,00	149.760.000,00	(240.000,00)	99,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.921.216.900,00	5.735.534.282,00	(185.682.618,00)	96,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.921.216.900,00	5.735.534.282,00	(185.682.618,00)	96,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.921.216.900,00	5.735.534.282,00	(185.682.618,00)	96,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.921.216.900,00	5.735.534.282,00	(185.682.618,00)	96,86	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	1.986.652.966,40	1.986.652.966,40	0,00	100,00	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.986.652.966,40	1.986.652.966,40	0,00	100,00	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.986.652.966,40	1.986.652.966,40	0,00	100,00	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Dinas Kesehatan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.2.14.0.00.03.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	740.348.000,00	140.348.000,00	123,39	
	1.02.2.14.0.00.03.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.000.000,00	740.348.000,00	140.348.000,00	123,39	
	1.02.2.14.0.00.03.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	600.000.000,00	740.348.000,00	140.348.000,00	123,39	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	98.036.047.873,00	96.277.948.736,00	(1.758.099.137,00)	98,20	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	71.903.214.700,00	70.453.782.237,00	(1.449.432.463,00)	97,98	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.615.489.000,00	2.537.540.920,00	(77.948.080,00)	97,01	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.01.0025		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	340.815.382,00	325.064.705,00	(15.750.677,00)	95,37	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	340.815.382,00	325.064.705,00	(15.750.677,00)	95,37	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.815.382,00	325.064.705,00	(15.750.677,00)	95,37	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.01.0027		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.274.673.618,00	2.212.476.215,00	(62.197.403,00)	97,26	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	2.274.673.618,00	2.212.476.215,00	(62.197.403,00)	97,26	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.274.673.618,00	2.212.476.215,00	(62.197.403,00)	97,26	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	69.274.125.700,00	67.902.772.318,00	(1.371.353.382,00)	98,02	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	991.895.350,00	971.319.219,00	(20.576.131,00)	97,92	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	991.895.350,00	971.319.219,00	(20.576.131,00)	97,92	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	991.895.350,00	971.319.219,00	(20.576.131,00)	97,92	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	484.229.800,00	468.350.000,00	(15.879.800,00)	96,72	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	484.229.800,00	468.350.000,00	(15.879.800,00)	96,72	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	484.229.800,00	468.350.000,00	(15.879.800,00)	96,72	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2.342.565.750,00	2.263.169.628,00	(79.396.122,00)	96,61	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.342.565.750,00	2.263.169.628,00	(79.396.122,00)	96,61	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.342.565.750,00	2.263.169.628,00	(79.396.122,00)	96,61	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	107.290.500,00	102.408.000,00	(4.882.500,00)	95,44	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	107.290.500,00	102.408.000,00	(4.882.500,00)	95,44	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.290.500,00	102.408.000,00	(4.882.500,00)	95,44	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	112.589.100,00	110.639.880,00	(1.949.220,00)	98,26	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	112.589.100,00	110.639.880,00	(1.949.220,00)	98,26	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.589.100,00	110.639.880,00	(1.949.220,00)	98,26	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	743.596.000,00	724.552.840,00	(19.043.160,00)	97,43	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	743.596.000,00	724.552.840,00	(19.043.160,00)	97,43	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.596.000,00	224.552.840,00	(19.043.160,00)	92,18	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0011	5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	31.968.000,00	31.152.800,00	(815.200,00)	97,44	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	31.968.000,00	31.152.800,00	(815.200,00)	97,44	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.968.000,00	31.152.800,00	(815.200,00)	97,44	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	59.952.000,00	59.395.100,00	(556.900,00)	99,07	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	59.952.000,00	59.395.100,00	(556.900,00)	99,07	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.952.000,00	59.395.100,00	(556.900,00)	99,07	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0014	5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0016		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	61.609.319.200,00	60.395.093.401,00	(1.214.225.799,00)	98,02	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	61.501.755.700,00	60.287.718.401,00	(1.214.037.299,00)	98,02	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.501.755.700,00	60.287.718.401,00	(1.214.037.299,00)	98,02	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0016	5.2	BELANJA MODAL	107.563.500,00	107.375.000,00	(188.500,00)	99,82	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.563.500,00	107.375.000,00	(188.500,00)	99,82	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0017		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	356.480.000,00	346.535.900,00	(9.944.100,00)	97,21	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	356.480.000,00	346.535.900,00	(9.944.100,00)	97,21	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.480.000,00	346.535.900,00	(9.944.100,00)	97,21	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0019		Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2.215.680.000,00	2.215.665.550,00	(14.450,00)	99,99	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0019	5.1	BELANJA OPERASI	2.215.680.000,00	2.215.665.550,00	(14.450,00)	99,99	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.680.000,00	15.665.550,00	(14.450,00)	99,90	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0019	5.1.05	Belanja Hibah	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0023		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	68.560.000,00	64.490.000,00	(4.070.000,00)	94,06	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0023	5.1	BELANJA OPERASI	68.560.000,00	64.490.000,00	(4.070.000,00)	94,06	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.560.000,00	64.490.000,00	(4.070.000,00)	94,06	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13.600.000,00	13.468.999,00	(131.001,00)	99,03	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	13.600.000,00	13.468.999,00	(131.001,00)	99,03	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	13.468.999,00	(131.001,00)	99,03	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.468.999,00	(131.001,00)	99,03	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	356.432.000,00	338.968.741,00	(17.463.259,00)	95,10	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	356.432.000,00	338.968.741,00	(17.463.259,00)	95,10	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.03.1.02.0002		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	356.432.000,00	338.968.741,00	(17.463.259,00)	95,10	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.03.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	356.432.000,00	338.968.741,00	(17.463.259,00)	95,10	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.03.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.432.000,00	338.968.741,00	(17.463.259,00)	95,10	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	121.063.500,00	109.626.322,00	(11.437.178,00)	90,55	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.04.1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	121.063.500,00	109.626.322,00	(11.437.178,00)	90,55	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.04.1.01.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	121.063.500,00	109.626.322,00	(11.437.178,00)	90,55	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	121.063.500,00	109.626.322,00	(11.437.178,00)	90,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.063.500,00	109.626.322,00	(11.437.178,00)	90,55	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	195.418.000,00	194.589.600,00	(828.400,00)	99,57	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	131.482.000,00	130.769.500,00	(712.500,00)	99,45	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.05.1.01.0001		Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	131.482.000,00	130.769.500,00	(712.500,00)	99,45	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	131.482.000,00	130.769.500,00	(712.500,00)	99,45	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.482.000,00	130.769.500,00	(712.500,00)	99,45	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.05.1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	63.936.000,00	63.820.100,00	(115.900,00)	99,81	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.05.1.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	63.936.000,00	63.820.100,00	(115.900,00)	99,81	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.05.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	63.936.000,00	63.820.100,00	(115.900,00)	99,81	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.05.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.936.000,00	63.820.100,00	(115.900,00)	99,81	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.459.919.673,00	25.180.981.836,00	(278.937.837,00)	98,90	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.530.090.200,00	1.479.638.974,00	(50.451.226,00)	96,70	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.085.219.200,00	1.061.239.167,00	(23.980.033,00)	97,79	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.085.219.200,00	1.061.239.167,00	(23.980.033,00)	97,79	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.085.219.200,00	1.061.239.167,00	(23.980.033,00)	97,79	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	444.871.000,00	418.399.807,00	(26.471.193,00)	94,04	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	444.871.000,00	418.399.807,00	(26.471.193,00)	94,04	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.871.000,00	418.399.807,00	(26.471.193,00)	94,04	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.845.906.663,00	20.763.398.279,00	(82.508.384,00)	99,60	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.725.882.663,00	20.643.570.279,00	(82.312.384,00)	99,60	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.725.882.663,00	20.643.570.279,00	(82.312.384,00)	99,60	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	20.725.882.663,00	20.643.570.279,00	(82.312.384,00)	99,60	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.040.000,00	104.005.500,00	(34.500,00)	99,96	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	104.040.000,00	104.005.500,00	(34.500,00)	99,96	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.040.000,00	104.005.500,00	(34.500,00)	99,96	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.984.000,00	15.822.500,00	(161.500,00)	98,98	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.984.000,00	15.822.500,00	(161.500,00)	98,98	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.984.000,00	15.822.500,00	(161.500,00)	98,98	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.730.000,00	67.501.750,00	(228.250,00)	99,66	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67.730.000,00	67.501.750,00	(228.250,00)	99,66	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	67.730.000,00	67.501.750,00	(228.250,00)	99,66	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.730.000,00	67.501.750,00	(228.250,00)	99,66	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	889.100.610,00	877.937.614,00	(11.162.996,00)	98,74	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	849.100.610,00	838.131.701,00	(10.968.909,00)	98,70	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	849.100.610,00	838.131.701,00	(10.968.909,00)	98,70	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	849.100.610,00	838.131.701,00	(10.968.909,00)	98,70	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000,00	39.805.913,00	(194.087,00)	99,51	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.805.913,00	(194.087,00)	99,51	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.805.913,00	(194.087,00)	99,51	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.373.000,00	79.300.000,00	(73.000,00)	99,90	

KODE REKENING				URAIAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		79.373.000,00	79.300.000,00	(73.000,00)	99,90	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL		79.373.000,00	79.300.000,00	(73.000,00)	99,90	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		79.373.000,00	79.300.000,00	(73.000,00)	99,90	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.433.619.200,00	1.317.455.288,00	(116.163.912,00)	91,89	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		566.459.200,00	475.683.288,00	(90.775.912,00)	83,97	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI		566.459.200,00	475.683.288,00	(90.775.912,00)	83,97	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		566.459.200,00	475.683.288,00	(90.775.912,00)	83,97	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		867.160.000,00	841.772.000,00	(25.388.000,00)	97,07	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI		867.160.000,00	841.772.000,00	(25.388.000,00)	97,07	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		867.160.000,00	841.772.000,00	(25.388.000,00)	97,07	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		614.100.000,00	595.749.931,00	(18.350.069,00)	97,01	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		44.000.000,00	30.742.570,00	(13.257.430,00)	69,86	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI		44.000.000,00	30.742.570,00	(13.257.430,00)	69,86	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		44.000.000,00	30.742.570,00	(13.257.430,00)	69,86	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		239.100.000,00	238.512.415,00	(587.585,00)	99,75	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI		239.100.000,00	238.512.415,00	(587.585,00)	99,75	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		239.100.000,00	238.512.415,00	(587.585,00)	99,75	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		331.000.000,00	326.494.946,00	(4.505.054,00)	98,63	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI		331.000.000,00	326.494.946,00	(4.505.054,00)	98,63	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		331.000.000,00	326.494.946,00	(4.505.054,00)	98,63	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Laboratorium Kesehatan Daerah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002		5	BELANJA DAERAH	14.664.586.300,00	11.466.424.005,00	(3.198.162.295,00)	78,19	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	13.331.664.600,00	10.263.490.929,00	(3.068.173.671,00)	76,98	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	13.331.664.600,00	10.263.490.929,00	(3.068.173.671,00)	76,98	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.02.1.01.0002		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12.839.228.600,00	9.775.118.230,00	(3.064.110.370,00)	76,13	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	55.562.600,00	0,00	(55.562.600,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.562.600,00	0,00	(55.562.600,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.02.1.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	12.783.666.000,00	9.775.118.230,00	(3.008.547.770,00)	76,46	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.02.1.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.418.800.000,00	1.404.800.000,00	(14.000.000,00)	99,01	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.02.1.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.000.000.000,00	8.287.668.230,00	(2.712.331.770,00)	75,34	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.02.1.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	364.866.000,00	82.650.000,00	(282.216.000,00)	22,65	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.02.1.01.0010		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	42.436.000,00	41.519.327,00	(916.673,00)	97,83	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.02.1.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	42.436.000,00	41.519.327,00	(916.673,00)	97,83	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.02.1.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.436.000,00	41.519.327,00	(916.673,00)	97,83	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.02.1.01.0016		Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	450.000.000,00	446.853.372,00	(3.146.628,00)	99,30	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.02.1.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000,00	446.853.372,00	(3.146.628,00)	99,30	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.02.1.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	446.853.372,00	(3.146.628,00)	99,30	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.332.921.700,00	1.202.933.076,00	(129.988.624,00)	90,24	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.760.000,00	50.252.912,00	(3.507.088,00)	93,47	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	53.760.000,00	50.252.912,00	(3.507.088,00)	93,47	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	53.760.000,00	50.252.912,00	(3.507.088,00)	93,47	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.760.000,00	50.252.912,00	(3.507.088,00)	93,47	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.987.300,00	82.593.745,00	(4.393.555,00)	94,94	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.987.300,00	77.617.245,00	(4.370.055,00)	94,66	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	81.987.300,00	77.617.245,00	(4.370.055,00)	94,66	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.987.300,00	77.617.245,00	(4.370.055,00)	94,66	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	4.976.500,00	(23.500,00)	99,53	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.976.500,00	(23.500,00)	99,53	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.976.500,00	(23.500,00)	99,53	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.131.924.400,00	1.016.334.079,00	(115.590.321,00)	89,78	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.224.400,00	108.905.671,00	(74.318.729,00)	59,43	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	183.224.400,00	108.905.671,00	(74.318.729,00)	59,43	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.224.400,00	108.905.671,00	(74.318.729,00)	59,43	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	948.700.000,00	907.428.408,00	(41.271.592,00)	95,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	948.700.000,00	907.428.408,00	(41.271.592,00)	95,64	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	392.000.000,00	380.651.200,00	(11.348.800,00)	97,10	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	556.700.000,00	526.777.208,00	(29.922.792,00)	94,62	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.250.000,00	53.752.340,00	(6.497.660,00)	89,21	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.000,00	566.340,00	(183.660,00)	75,51	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	566.340,00	(183.660,00)	75,51	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	566.340,00	(183.660,00)	75,51	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.500.000,00	53.186.000,00	(6.314.000,00)	89,38	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	59.500.000,00	53.186.000,00	(6.314.000,00)	89,38	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.500.000,00	53.186.000,00	(6.314.000,00)	89,38	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **RSUD dr. Hasri Ainun Habibie**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.2.14.0.00.03.0001		4	PENDAPATAN DAERAH	45.498.924.000,00	50.401.807.344,00	4.902.883.344,00	110,77	
	1.02.2.14.0.00.03.0001		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45.498.924.000,00	50.401.807.344,00	4.902.883.344,00	110,77	
	1.02.2.14.0.00.03.0001		4.1.02	Retribusi Daerah	45.498.924.000,00	50.401.807.344,00	4.902.883.344,00	110,77	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001		5	BELANJA DAERAH	169.959.070.667,00	137.063.833.293,23	(32.895.237.373,77)	80,64	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	66.142.817.925,00	44.487.538.285,60	(21.655.279.639,40)	67,25	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	65.965.417.925,00	44.310.427.485,60	(21.654.990.439,40)	67,17	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0008		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	358.398.000,00	349.429.534,00	(8.968.466,00)	97,49	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	358.398.000,00	349.429.534,00	(8.968.466,00)	97,49	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.398.000,00	349.429.534,00	(8.968.466,00)	97,49	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.511.575.691,00	1.475.574.030,63	(36.001.660,37)	97,61	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	941.646.843,00	916.295.832,63	(25.351.010,37)	97,30	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	941.646.843,00	916.295.832,63	(25.351.010,37)	97,30	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	569.928.848,00	559.278.198,00	(10.650.650,00)	98,13	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	149.920.000,00	(80.000,00)	99,94	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.990.550,00	9.990.550,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0009	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	409.938.298,00	399.367.648,00	(10.570.650,00)	97,42	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0010		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	24.145.664.234,00	23.522.454.321,00	(623.209.913,00)	97,41	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	24.145.664.234,00	23.522.454.321,00	(623.209.913,00)	97,41	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.945.664.234,00	20.322.454.321,00	(623.209.913,00)	97,02	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0026		Pengembangan Rumah Sakit	39.338.800.000,00	18.424.034.122,97	(20.914.765.877,03)	46,83	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0026	5.2	BELANJA MODAL	39.038.800.000,00	18.424.034.122,97	(20.614.765.877,03)	47,19	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0026	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.038.800.000,00	18.424.034.122,97	(20.614.765.877,03)	47,19	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0027		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	610.980.000,00	538.935.477,00	(72.044.523,00)	88,20	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	610.980.000,00	538.935.477,00	(72.044.523,00)	88,20	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	610.980.000,00	538.935.477,00	(72.044.523,00)	88,20	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	177.400.000,00	177.110.800,00	(289.200,00)	99,83	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	177.400.000,00	177.110.800,00	(289.200,00)	99,83	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	177.400.000,00	177.110.800,00	(289.200,00)	99,83	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.400.000,00	177.110.800,00	(289.200,00)	99,83	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	14.348.100.000,00	12.758.763.804,00	(1.589.336.196,00)	88,92	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.03.1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	14.348.100.000,00	12.758.763.804,00	(1.589.336.196,00)	88,92	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.03.1.01.0001		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	14.348.100.000,00	12.758.763.804,00	(1.589.336.196,00)	88,92	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.348.100.000,00	12.758.763.804,00	(1.589.336.196,00)	88,92	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.348.100.000,00	12.758.763.804,00	(1.589.336.196,00)	88,92	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	89.468.152.742,00	79.817.531.203,63	(9.650.621.538,37)	89,21	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.880.000,00	122.205.000,00	(24.675.000,00)	83,20	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	83.520.000,00	63.360.000,00	(20.160.000,00)	75,86	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	83.520.000,00	63.360.000,00	(20.160.000,00)	75,86	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.520.000,00	63.360.000,00	(20.160.000,00)	75,86	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	31.680.000,00	30.245.000,00	(1.435.000,00)	95,47	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	31.680.000,00	30.245.000,00	(1.435.000,00)	95,47	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.680.000,00	30.245.000,00	(1.435.000,00)	95,47	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.680.000,00	28.600.000,00	(3.080.000,00)	90,27	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.680.000,00	28.600.000,00	(3.080.000,00)	90,27	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.680.000,00	28.600.000,00	(3.080.000,00)	90,27	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.035.430.833,00	21.271.656.946,00	(763.773.887,00)	96,53	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.877.030.833,00	21.113.256.946,00	(763.773.887,00)	96,50	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.877.030.833,00	21.113.256.946,00	(763.773.887,00)	96,50	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	21.877.030.833,00	21.113.256.946,00	(763.773.887,00)	96,50	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	63.360.000,00	63.360.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.360.000,00	63.360.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	63.360.000,00	63.360.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.360.000,00	63.360.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	440.367.200,00	427.584.481,00	(12.782.719,00)	97,09	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	440.367.200,00	427.584.481,00	(12.782.719,00)	97,09	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	440.367.200,00	427.584.481,00	(12.782.719,00)	97,09	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.367.200,00	427.584.481,00	(12.782.719,00)	97,09	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.347.200,00	348.619.302,00	(138.727.898,00)	71,53	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	42.377.075,00	(7.622.925,00)	84,75	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	42.377.075,00	(7.622.925,00)	84,75	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	42.377.075,00	(7.622.925,00)	84,75	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	323.456.700,00	216.811.716,00	(106.644.984,00)	67,02	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	323.456.700,00	216.811.716,00	(106.644.984,00)	67,02	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.456.700,00	216.811.716,00	(106.644.984,00)	67,02	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	74.890.500,00	50.469.760,00	(24.420.740,00)	67,39	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	74.890.500,00	50.469.760,00	(24.420.740,00)	67,39	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.890.500,00	50.469.760,00	(24.420.740,00)	67,39	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.000.000,00	38.960.751,00	(39.249,00)	99,89	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	39.000.000,00	38.960.751,00	(39.249,00)	99,89	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	38.960.751,00	(39.249,00)	99,89	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.500.000,00	486.316.000,00	(20.184.000,00)	96,01	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	506.500.000,00	486.316.000,00	(20.184.000,00)	96,01	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	506.500.000,00	486.316.000,00	(20.184.000,00)	96,01	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	306.500.000,00	296.886.000,00	(9.614.000,00)	96,86	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.07.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	189.430.000,00	(10.570.000,00)	94,71	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.121.246.800,00	4.965.710.094,00	(155.536.706,00)	96,96	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.764.826.800,00	1.718.092.498,00	(46.734.302,00)	97,35	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.764.826.800,00	1.718.092.498,00	(46.734.302,00)	97,35	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.764.826.800,00	1.718.092.498,00	(46.734.302,00)	97,35	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.100.000,00	16.038.000,00	(62.000,00)	99,61	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.100.000,00	16.038.000,00	(62.000,00)	99,61	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.100.000,00	16.038.000,00	(62.000,00)	99,61	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.340.320.000,00	3.231.579.596,00	(108.740.404,00)	96,74	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.340.320.000,00	3.231.579.596,00	(108.740.404,00)	96,74	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.340.320.000,00	3.231.579.596,00	(108.740.404,00)	96,74	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.255.700,00	67.606.894,00	(78.648.806,00)	46,22	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	5.946.750,00	(9.053.250,00)	39,64	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	5.946.750,00	(9.053.250,00)	39,64	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	5.946.750,00	(9.053.250,00)	39,64	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.900.000,00	13.965.960,00	(44.934.040,00)	23,71	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	58.900.000,00	13.965.960,00	(44.934.040,00)	23,71	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.900.000,00	13.965.960,00	(44.934.040,00)	23,71	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.355.700,00	47.694.184,00	(24.661.516,00)	65,91	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	72.355.700,00	47.694.184,00	(24.661.516,00)	65,91	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.355.700,00	47.694.184,00	(24.661.516,00)	65,91	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	60.584.125.009,00	52.127.832.486,63	(8.456.292.522,37)	86,04	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	60.584.125.009,00	52.127.832.486,63	(8.456.292.522,37)	86,04	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.677.707.677,00	47.353.942.051,63	(5.323.765.625,37)	89,89	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.677.707.677,00	47.353.942.051,63	(5.323.765.625,37)	89,89	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	7.906.417.332,00	4.773.890.435,00	(3.132.526.897,00)	60,37	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.506.417.332,00	4.429.439.435,00	(3.076.977.897,00)	59,00	
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.10.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	344.451.000,00	(55.549.000,00)	86,11	
	1.02.2.14.0.00.03.0001		6	PEMBIAYAAN DAERAH	15.085.201.009,45	15.085.201.009,45	0,00	100,00	
	1.02.2.14.0.00.03.0001		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.085.201.009,45	15.085.201.009,45	0,00	100,00	
	1.02.2.14.0.00.03.0001		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.085.201.009,45	15.085.201.009,45	0,00	100,00	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Organisasi : **Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.1.04.2.10.05.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	900.000.000,00	2.252.281.808,00	1.352.281.808,00	250,25	
	1.03.1.04.2.10.05.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	900.000.000,00	2.252.281.808,00	1.352.281.808,00	250,25	
	1.03.1.04.2.10.05.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	900.000.000,00	2.252.281.808,00	1.352.281.808,00	250,25	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000		5	BELANJA DAERAH	138.092.073.236,00	128.772.828.741,00	(9.319.244.495,00)	93,25	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	33.730.847.975,00	27.759.479.272,00	(5.971.368.703,00)	82,29	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	13.253.669.225,00	13.179.658.271,00	(74.010.954,00)	99,44	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0055		Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	458.347.500,00	414.273.564,00	(44.073.936,00)	90,38	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0055	5.1	BELANJA OPERASI	458.347.500,00	414.273.564,00	(44.073.936,00)	90,38	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0055	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.347.500,00	414.273.564,00	(44.073.936,00)	90,38	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0075		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	30.776.000,00	30.472.885,00	(303.115,00)	99,01	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0075	5.1	BELANJA OPERASI	30.776.000,00	30.472.885,00	(303.115,00)	99,01	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0075	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.776.000,00	30.472.885,00	(303.115,00)	99,01	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0079		Normalisasi/Restorasi Sungai	2.277.783.114,00	2.268.697.612,00	(9.085.502,00)	99,60	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0079	5.1	BELANJA OPERASI	243.813.500,00	235.289.998,00	(8.523.502,00)	96,50	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0079	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.813.500,00	235.289.998,00	(8.523.502,00)	96,50	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0079	5.2	BELANJA MODAL	2.033.969.614,00	2.033.407.614,00	(562.000,00)	99,97	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0079	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.033.969.614,00	2.033.407.614,00	(562.000,00)	99,97	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0082		Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	47.017.000,00	46.920.000,00	(97.000,00)	99,79	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0082	5.1	BELANJA OPERASI	47.017.000,00	46.920.000,00	(97.000,00)	99,79	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0082	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.017.000,00	46.920.000,00	(97.000,00)	99,79	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0096		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	428.121.500,00	427.452.400,00	(669.100,00)	99,84	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0096	5.1	BELANJA OPERASI	20.630.000,00	20.046.900,00	(583.100,00)	97,17	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0096	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.630.000,00	20.046.900,00	(583.100,00)	97,17	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0096	5.2	BELANJA MODAL	407.491.500,00	407.405.500,00	(86.000,00)	99,97	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0096	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	407.491.500,00	407.405.500,00	(86.000,00)	99,97	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0097		Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0097	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0097	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0098		Pembangunan Kanal Banjir	4.953.775.093,00	4.946.672.287,00	(7.102.806,00)	99,85	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0098	5.2	BELANJA MODAL	4.953.775.093,00	4.946.672.287,00	(7.102.806,00)	99,85	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0098	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.953.775.093,00	4.946.672.287,00	(7.102.806,00)	99,85	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0107		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	4.434.628.468,00	4.433.398.780,00	(1.229.688,00)	99,97	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0107	5.1	BELANJA OPERASI	4.434.628.468,00	4.433.398.780,00	(1.229.688,00)	99,97	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0107	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.434.628.468,00	4.433.398.780,00	(1.229.688,00)	99,97	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0122		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	613.220.550,00	611.770.743,00	(1.449.807,00)	99,76	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0122	5.1	BELANJA OPERASI	613.220.550,00	611.770.743,00	(1.449.807,00)	99,76	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0122	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	613.220.550,00	611.770.743,00	(1.449.807,00)	99,76	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.477.178.750,00	14.579.821.001,00	(5.897.357.749,00)	71,20	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0008		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10.000.000,00	9.795.000,00	(205.000,00)	97,95	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.795.000,00	(205.000,00)	97,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.795.000,00	(205.000,00)	97,95	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0014		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	15.423.539.000,00	9.663.279.402,00	(5.760.259.598,00)	62,65	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	15.423.539.000,00	9.663.279.402,00	(5.760.259.598,00)	62,65	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0014	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.423.539.000,00	9.663.279.402,00	(5.760.259.598,00)	62,65	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0015		Rehabilitasi Bendung Irigasi	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,5	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,5	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,5	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0021		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.957.973.450,00	3.833.168.796,00	(124.804.654,00)	96,84	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	3.537.991.100,00	3.413.393.446,00	(124.597.654,00)	96,47	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.537.991.100,00	3.413.393.446,00	(124.597.654,00)	96,47	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0021	5.2	BELANJA MODAL	419.982.350,00	419.775.350,00	(207.000,00)	99,95	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0021	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	419.982.350,00	419.775.350,00	(207.000,00)	99,95	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0022		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	573.401.000,00	571.803.996,00	(1.597.004,00)	99,72	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0022	5.1	BELANJA OPERASI	573.401.000,00	571.803.996,00	(1.597.004,00)	99,72	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	573.401.000,00	571.803.996,00	(1.597.004,00)	99,72	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0032		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	502.265.300,00	491.823.807,00	(10.441.493,00)	97,92	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	502.265.300,00	491.823.807,00	(10.441.493,00)	97,92	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.265.300,00	491.823.807,00	(10.441.493,00)	97,92	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.107.910.700,00	1.006.168.220,00	(101.742.480,00)	90,81	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.03.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.107.910.700,00	1.006.168.220,00	(101.742.480,00)	90,81	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.03.1.01.0013		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	953.948.475,00	906.565.692,00	(47.382.783,00)	95,03	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.03.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	953.948.475,00	906.565.692,00	(47.382.783,00)	95,03	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.03.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	953.948.475,00	906.565.692,00	(47.382.783,00)	95,03	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.03.1.01.0021		Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	153.962.225,00	99.602.528,00	(54.359.697,00)	64,69	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.03.1.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	153.962.225,00	99.602.528,00	(54.359.697,00)	64,69	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.03.1.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.962.225,00	99.602.528,00	(54.359.697,00)	64,69	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	3.279.654.967,00	3.139.211.877,00	(140.443.090,00)	95,71	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.04.1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.279.654.967,00	3.139.211.877,00	(140.443.090,00)	95,71	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.04.1.01.0014		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	237.606.550,00	233.712.670,00	(3.893.880,00)	98,36	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.04.1.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	237.606.550,00	233.712.670,00	(3.893.880,00)	98,36	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.04.1.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.606.550,00	233.712.670,00	(3.893.880,00)	98,36	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.04.1.01.0016		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1.299.288.000,00	1.171.990.512,00	(127.297.488,00)	90,20	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.04.1.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	1.299.288.000,00	1.171.990.512,00	(127.297.488,00)	90,20	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.04.1.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.299.288.000,00	1.171.990.512,00	(127.297.488,00)	90,20	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.04.1.01.0017		Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	1.742.760.417,00	1.733.508.695,00	(9.251.722,00)	99,46	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.04.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	1.705.253.917,00	1.696.303.695,00	(8.950.222,00)	99,47	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.04.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.705.253.917,00	1.696.303.695,00	(8.950.222,00)	99,47	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.04.1.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	37.506.500,00	37.205.000,00	(301.500,00)	99,19	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.04.1.01.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.506.500,00	17.235.000,00	(271.500,00)	98,44	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.04.1.01.0017	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	19.970.000,00	(30.000,00)	99,85	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	667.695.450,00	632.137.717,00	(35.557.733,00)	94,67	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.05.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	667.695.450,00	632.137.717,00	(35.557.733,00)	94,67	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.05.1.01.0014		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	102.093.450,00	95.140.741,00	(6.952.709,00)	93,18	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.05.1.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	102.093.450,00	95.140.741,00	(6.952.709,00)	93,18	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.05.1.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.093.450,00	95.140.741,00	(6.952.709,00)	93,18	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.05.1.01.0015		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	565.602.000,00	536.996.976,00	(28.605.024,00)	94,94	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.05.1.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	565.602.000,00	536.996.976,00	(28.605.024,00)	94,94	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.05.1.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.602.000,00	536.996.976,00	(28.605.024,00)	94,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.076.126.256,00	1.863.568.589,00	(212.557.667,00)	89,76	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.06.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	2.076.126.256,00	1.863.568.589,00	(212.557.667,00)	89,76	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.06.1.01.0008		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2.076.126.256,00	1.863.568.589,00	(212.557.667,00)	89,76	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.06.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	101.038.950,00	97.821.623,00	(3.217.327,00)	96,81	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.06.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.038.950,00	97.821.623,00	(3.217.327,00)	96,81	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.06.1.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	1.975.087.306,00	1.765.746.966,00	(209.340.340,00)	89,40	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.06.1.01.0008	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.975.087.306,00	1.765.746.966,00	(209.340.340,00)	89,40	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	305.001.500,00	288.903.450,00	(16.098.050,00)	94,72	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.07.1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	305.001.500,00	288.903.450,00	(16.098.050,00)	94,72	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.07.1.01.0020		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	5.001.500,00	4.749.000,00	(252.500,00)	94,95	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.07.1.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	5.001.500,00	4.749.000,00	(252.500,00)	94,95	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.07.1.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.001.500,00	4.749.000,00	(252.500,00)	94,95	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.07.1.01.0026		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	300.000.000,00	284.154.450,00	(15.845.550,00)	94,71	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.07.1.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	284.154.450,00	(15.845.550,00)	94,71	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.07.1.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	284.154.450,00	(15.845.550,00)	94,71	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.045.603.550,00	7.641.561.076,00	(404.042.474,00)	94,97	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	8.045.603.550,00	7.641.561.076,00	(404.042.474,00)	94,97	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01.0012		Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	61.834.200,00	61.366.083,00	(468.117,00)	99,24	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	61.834.200,00	61.366.083,00	(468.117,00)	99,24	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.834.200,00	61.366.083,00	(468.117,00)	99,24	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01.0016		Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	434.999.850,00	432.963.936,00	(2.035.914,00)	99,53	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	34.999.850,00	33.219.983,00	(1.779.867,00)	94,91	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.999.850,00	33.219.983,00	(1.779.867,00)	94,91	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01.0016	5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	399.743.953,00	(256.047,00)	99,93	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01.0016	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	399.743.953,00	(256.047,00)	99,93	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01.0017		Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	9.998.500,00	9.904.084,00	(94.416,00)	99,05	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	9.998.500,00	9.904.084,00	(94.416,00)	99,05	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.998.500,00	9.904.084,00	(94.416,00)	99,05	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01.0019		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	7.538.771.000,00	7.137.326.973,00	(401.444.027,00)	94,67	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	38.771.000,00	9.496.713,00	(29.274.287,00)	24,49	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.771.000,00	9.496.713,00	(29.274.287,00)	24,49	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01.0019	5.2	BELANJA MODAL	7.500.000.000,00	7.127.830.260,00	(372.169.740,00)	95,03	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01.0019	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.500.000.000,00	7.127.830.260,00	(372.169.740,00)	95,03	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	11.161.795.285,00	11.004.995.763,00	(156.799.522,00)	98,59	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09.1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11.161.795.285,00	11.004.995.763,00	(156.799.522,00)	98,59	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09.1.01.0008		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	9.471.319.585,00	9.336.470.398,00	(134.849.187,00)	98,57	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	642.406.675,00	640.546.811,00	(1.859.864,00)	99,71	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	642.406.675,00	640.546.811,00	(1.859.864,00)	99,71	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09.1.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	8.828.912.910,00	8.695.923.587,00	(132.989.323,00)	98,49	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09.1.01.0008	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.828.912.910,00	8.695.923.587,00	(132.989.323,00)	98,49	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09.1.01.0009		Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.992.200,00	8.312.834,00	(1.679.366,00)	83,19	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	9.992.200,00	8.312.834,00	(1.679.366,00)	83,19	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.992.200,00	8.312.834,00	(1.679.366,00)	83,19	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09.1.01.0010		Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.474.275.850,00	1.472.975.465,00	(1.300.385,00)	99,91	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.474.275.850,00	1.472.975.465,00	(1.300.385,00)	99,91	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.474.275.850,00	1.472.975.465,00	(1.300.385,00)	99,91	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09.1.01.0012		Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	206.207.650,00	187.237.066,00	(18.970.584,00)	90,80	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	206.207.650,00	187.237.066,00	(18.970.584,00)	90,80	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.207.650,00	187.237.066,00	(18.970.584,00)	90,80	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	43.405.715.496,00	41.393.515.765,00	(2.012.199.731,00)	95,36	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	43.405.715.496,00	41.393.515.765,00	(2.012.199.731,00)	95,36	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0024		Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	384.461.000,00	368.851.320,00	(15.609.680,00)	95,93	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	384.461.000,00	368.851.320,00	(15.609.680,00)	95,93	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.461.000,00	368.851.320,00	(15.609.680,00)	95,93	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0026		Pemeliharaan Rutin Jembatan	669.002.300,00	668.462.257,00	(540.043,00)	99,91	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	669.002.300,00	668.462.257,00	(540.043,00)	99,91	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	669.002.300,00	668.462.257,00	(540.043,00)	99,91	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0028		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	46.712.000,00	46.336.100,00	(375.900,00)	99,19	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	46.712.000,00	46.336.100,00	(375.900,00)	99,19	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.712.000,00	46.336.100,00	(375.900,00)	99,19	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0031		Rekonstruksi Jalan	7.265.316.050,00	6.893.355.405,00	(371.960.645,00)	94,88	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0031	5.1	BELANJA OPERASI	215.911.050,00	203.515.607,00	(12.395.443,00)	94,25	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.911.050,00	203.515.607,00	(12.395.443,00)	94,25	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0031	5.2	BELANJA MODAL	7.049.405.000,00	6.689.839.798,00	(359.565.202,00)	94,89	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0031	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.049.405.000,00	6.689.839.798,00	(359.565.202,00)	94,89	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0032		Pembangunan Jembatan	114.886.000,00	5.832.500,00	(109.053.500,00)	5,07	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	14.886.000,00	5.832.500,00	(9.053.500,00)	39,18	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.886.000,00	5.832.500,00	(9.053.500,00)	39,18	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0033		Pemeliharaan Rutin Jalan	1.991.491.511,00	1.986.613.157,00	(4.878.354,00)	99,75	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	1.991.491.511,00	1.986.613.157,00	(4.878.354,00)	99,75	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.991.491.511,00	1.986.613.157,00	(4.878.354,00)	99,75	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0036		Penggantian Jembatan	1.395.032.185,00	1.389.255.261,00	(5.776.924,00)	99,58	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0036	5.1	BELANJA OPERASI	527.685.850,00	521.908.926,00	(5.776.924,00)	98,90	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	527.685.850,00	521.908.926,00	(5.776.924,00)	98,90	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0036	5.2	BELANJA MODAL	867.346.335,00	867.346.335,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0036	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	867.346.335,00	867.346.335,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0038		Pemeliharaan Berkala Jalan	27.827.840.800,00	26.652.168.605,00	(1.175.672.195,00)	95,77	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	156.512.000,00	155.820.420,00	(691.580,00)	99,55	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.512.000,00	155.820.420,00	(691.580,00)	99,55	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0038	5.2	BELANJA MODAL	27.671.328.800,00	26.496.348.185,00	(1.174.980.615,00)	95,75	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0038	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.671.328.800,00	26.496.348.185,00	(1.174.980.615,00)	95,75	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0040		Pelebaran Jalan Menuju Standar	14.886.000,00	0,00	(14.886.000,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0040	5.1	BELANJA OPERASI	14.886.000,00	0,00	(14.886.000,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.886.000,00	0,00	(14.886.000,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0041		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.597.982.000,00	2.371.285.458,00	(226.696.542,00)	91,27	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0041	5.1	BELANJA OPERASI	2.597.982.000,00	2.371.285.458,00	(226.696.542,00)	91,27	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.597.982.000,00	2.371.285.458,00	(226.696.542,00)	91,27	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0042		Pembangunan Jalan	395.764.450,00	393.210.550,00	(2.553.900,00)	99,35	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0042	5.1	BELANJA OPERASI	14.886.000,00	12.332.100,00	(2.553.900,00)	82,84	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.886.000,00	12.332.100,00	(2.553.900,00)	82,84	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0042	5.2	BELANJA MODAL	380.878.450,00	380.878.450,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0042	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	380.878.450,00	380.878.450,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0043		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	702.341.200,00	618.145.152,00	(84.196.048,00)	88,01	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0043	5.1	BELANJA OPERASI	702.341.200,00	618.145.152,00	(84.196.048,00)	88,01	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	702.341.200,00	618.145.152,00	(84.196.048,00)	88,01	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	495.145.000,00	491.878.218,00	(3.266.782,00)	99,34	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.11.1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	198.112.000,00	195.320.291,00	(2.791.709,00)	98,59	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.11.1.01.0011		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	156.510.000,00	154.431.181,00	(2.078.819,00)	98,67	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.11.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	156.510.000,00	154.431.181,00	(2.078.819,00)	98,67	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.11.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.510.000,00	154.431.181,00	(2.078.819,00)	98,67	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.11.1.01.0012		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	41.602.000,00	40.889.110,00	(712.890,00)	98,28	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.11.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	41.602.000,00	40.889.110,00	(712.890,00)	98,28	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.11.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.602.000,00	40.889.110,00	(712.890,00)	98,28	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.11.1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	297.033.000,00	296.557.927,00	(475.073,00)	99,84	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.11.1.02.0009		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	297.033.000,00	296.557.927,00	(475.073,00)	99,84	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.11.1.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	297.033.000,00	296.557.927,00	(475.073,00)	99,84	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.11.1.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.033.000,00	296.557.927,00	(475.073,00)	99,84	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.207.221.300,00	1.135.442.599,00	(71.778.701,00)	94,05	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	599.271.300,00	575.758.927,00	(23.512.373,00)	96,07	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.01.0007		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	185.441.000,00	183.711.710,00	(1.729.290,00)	99,06	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	185.441.000,00	183.711.710,00	(1.729.290,00)	99,06	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.441.000,00	183.711.710,00	(1.729.290,00)	99,06	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.01.0009		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	413.830.300,00	392.047.217,00	(21.783.083,00)	94,73	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	413.830.300,00	392.047.217,00	(21.783.083,00)	94,73	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	413.830.300,00	392.047.217,00	(21.783.083,00)	94,73	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	46.450.000,00	44.834.636,00	(1.615.364,00)	96,52	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.02.0004		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	31.450.000,00	31.272.136,00	(177.864,00)	99,43	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	31.450.000,00	31.272.136,00	(177.864,00)	99,43	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.450.000,00	31.272.136,00	(177.864,00)	99,43	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.02.0009		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	15.000.000,00	13.562.500,00	(1.437.500,00)	90,41	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.562.500,00	(1.437.500,00)	90,41	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.562.500,00	(1.437.500,00)	90,41	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	246.500.000,00	200.847.164,00	(45.652.836,00)	81,47	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.03.0004		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	246.500.000,00	200.847.164,00	(45.652.836,00)	81,47	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	246.500.000,00	200.847.164,00	(45.652.836,00)	81,47	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.500.000,00	200.847.164,00	(45.652.836,00)	81,47	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	315.000.000,00	314.001.872,00	(998.128,00)	99,68	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.04.0003		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	315.000.000,00	314.001.872,00	(998.128,00)	99,68	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	315.000.000,00	314.001.872,00	(998.128,00)	99,68	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.000.000,00	314.001.872,00	(998.128,00)	99,68	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.609.355.757,00	32.415.966.195,00	(193.389.562,00)	99,40	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.596.374.851,00	1.587.993.032,00	(8.381.819,00)	99,47	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	877.285.200,00	872.321.873,00	(4.963.327,00)	99,43	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	877.285.200,00	872.321.873,00	(4.963.327,00)	99,43	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	877.285.200,00	872.321.873,00	(4.963.327,00)	99,43	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	719.089.651,00	715.671.159,00	(3.418.492,00)	99,52	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	719.089.651,00	715.671.159,00	(3.418.492,00)	99,52	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	719.089.651,00	715.671.159,00	(3.418.492,00)	99,52	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.935.805.619,00	25.790.482.101,00	(145.323.518,00)	99,43	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.736.265.069,00	25.592.398.525,00	(143.866.544,00)	99,44	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.736.265.069,00	25.592.398.525,00	(143.866.544,00)	99,44	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	25.736.265.069,00	25.592.398.525,00	(143.866.544,00)	99,44	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	199.540.550,00	198.083.576,00	(1.456.974,00)	99,26	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	199.540.550,00	198.083.576,00	(1.456.974,00)	99,26	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.540.550,00	198.083.576,00	(1.456.974,00)	99,26	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0,00	49.368.210,00	49.368.210,00	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.04.0007		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0,00	49.368.210,00	49.368.210,00	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	49.368.210,00	49.368.210,00	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	49.368.210,00	49.368.210,00	0,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	831.917.500,00	817.696.031,00	(14.221.469,00)	98,29	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	831.917.500,00	817.696.031,00	(14.221.469,00)	98,29	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	831.917.500,00	817.696.031,00	(14.221.469,00)	98,29	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	831.917.500,00	817.696.031,00	(14.221.469,00)	98,29	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	549.829.320,00	558.533.312,00	8.703.992,00	101,58	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	549.829.320,00	558.533.312,00	8.703.992,00	101,58	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	115.767.812,00	15.767.812,00	115,76	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	115.767.812,00	15.767.812,00	115,76	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	449.829.320,00	442.765.500,00	(7.063.820,00)	98,42	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	449.829.320,00	442.765.500,00	(7.063.820,00)	98,42	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.695.428.467,00	3.611.893.509,00	(83.534.958,00)	97,73	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.695.428.467,00	3.611.893.509,00	(83.534.958,00)	97,73	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.695.428.467,00	3.611.893.509,00	(83.534.958,00)	97,73	
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.695.428.467,00	3.611.893.509,00	(83.534.958,00)	97,73	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Organisasi : **UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001		5	BELANJA DAERAH	1.344.058.825,00	1.174.258.325,00	(169.800.500,00)	87,36	
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.344.058.825,00	1.174.258.325,00	(169.800.500,00)	87,36	
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	638.563.250,00	564.865.013,00	(73.698.237,00)	88,45	
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01.1.04.0007		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	638.563.250,00	564.865.013,00	(73.698.237,00)	88,45	
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01.1.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	638.563.250,00	564.865.013,00	(73.698.237,00)	88,45	
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01.1.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	638.563.250,00	564.865.013,00	(73.698.237,00)	88,45	
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.000.575,00	111.089.888,00	(18.910.687,00)	85,45	
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.000.575,00	111.089.888,00	(18.910.687,00)	85,45	
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.575,00	111.089.888,00	(18.910.687,00)	85,45	
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.575,00	111.089.888,00	(18.910.687,00)	85,45	
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.495.000,00	498.303.424,00	(77.191.576,00)	86,58	
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	575.495.000,00	498.303.424,00	(77.191.576,00)	86,58	
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	550.995.000,00	473.803.424,00	(77.191.576,00)	85,99	
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.995.000,00	473.803.424,00	(77.191.576,00)	85,99	
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01.1.08.0003	5.2	BELANJA MODAL	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01.1.08.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.1.04.2.10.05.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	900.000.000,00	2.252.281.808,00	1.352.281.808,00	250,25	
	1.03.1.04.2.10.05.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	900.000.000,00	2.252.281.808,00	1.352.281.808,00	250,25	
	1.03.1.04.2.10.05.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	900.000.000,00	2.252.281.808,00	1.352.281.808,00	250,25	
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000		5	BELANJA DAERAH	4.196.528.220,00	3.732.786.531,00	(463.741.689,00)	88,94	
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.03		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1.130.155.120,00	1.024.737.787,00	(105.417.333,00)	90,67	
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.03.1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	1.130.155.120,00	1.024.737.787,00	(105.417.333,00)	90,67	
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.03.1.01.0001		Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1.130.155.120,00	1.024.737.787,00	(105.417.333,00)	90,67	
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.130.155.120,00	1.024.737.787,00	(105.417.333,00)	90,67	
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.130.155.120,00	1.024.737.787,00	(105.417.333,00)	90,67	
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	87.628.100,00	74.174.585,00	(13.453.515,00)	84,64	
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.04.1.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	87.628.100,00	74.174.585,00	(13.453.515,00)	84,64	
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.04.1.01.0001		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	87.628.100,00	74.174.585,00	(13.453.515,00)	84,64	
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	87.628.100,00	74.174.585,00	(13.453.515,00)	84,64	
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.628.100,00	74.174.585,00	(13.453.515,00)	84,64	
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.978.745.000,00	2.633.874.159,00	(344.870.841,00)	88,42	
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.05.1.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.978.745.000,00	2.633.874.159,00	(344.870.841,00)	88,42	
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.05.1.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.978.745.000,00	2.633.874.159,00	(344.870.841,00)	88,42	
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.978.745.000,00	2.633.874.159,00	(344.870.841,00)	88,42	
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	878.745.000,00	533.874.159,00	(344.870.841,00)	60,75	
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.05.1.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	100,00	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
Organisasi : **Satuan Polisi Pamong Praja**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000		5	BELANJA DAERAH	12.088.677.615,00	11.785.438.679,00	(303.238.936,00)	97,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.172.881.235,00	5.077.855.859,00	(95.025.376,00)	98,16	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4.443.110.570,00	4.363.160.122,00	(79.950.448,00)	98,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0006		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	105.720.661,00	104.316.146,00	(1.404.515,00)	98,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	105.720.661,00	104.316.146,00	(1.404.515,00)	98,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.720.661,00	104.316.146,00	(1.404.515,00)	98,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0010		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	165.293.191,00	159.731.065,00	(5.562.126,00)	96,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	165.293.191,00	159.731.065,00	(5.562.126,00)	96,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.293.191,00	159.731.065,00	(5.562.126,00)	96,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0014		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	10.834.371,00	9.477.400,00	(1.356.971,00)	87,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	10.834.371,00	9.477.400,00	(1.356.971,00)	87,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.834.371,00	9.477.400,00	(1.356.971,00)	87,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0015		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24.061.937,00	13.067.300,00	(10.994.637,00)	54,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	24.061.937,00	13.067.300,00	(10.994.637,00)	54,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.061.937,00	13.067.300,00	(10.994.637,00)	54,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0016		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	137.070.425,00	127.358.200,00	(9.712.225,00)	92,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	137.070.425,00	127.358.200,00	(9.712.225,00)	92,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.070.425,00	127.358.200,00	(9.712.225,00)	92,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0017		Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	3.457.244.052,00	3.417.055.181,00	(40.188.871,00)	98,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	3.457.244.052,00	3.417.055.181,00	(40.188.871,00)	98,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.457.244.052,00	3.417.055.181,00	(40.188.871,00)	98,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0019		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	542.885.933,00	532.154.830,00	(10.731.103,00)	98,02	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	542.885.933,00	532.154.830,00	(10.731.103,00)	98,02	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	542.885.933,00	532.154.830,00	(10.731.103,00)	98,02	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	632.328.116,00	620.954.357,00	(11.373.759,00)	98,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.02.0002		Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	459.215.439,00	458.516.617,00	(698.822,00)	99,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	459.215.439,00	458.516.617,00	(698.822,00)	99,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	459.215.439,00	458.516.617,00	(698.822,00)	99,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.02.0003		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	143.016.309,00	142.600.400,00	(415.909,00)	99,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	143.016.309,00	142.600.400,00	(415.909,00)	99,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.016.309,00	142.600.400,00	(415.909,00)	99,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.02.0009		Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	30.096.368,00	19.837.340,00	(10.259.028,00)	65,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.096.368,00	19.837.340,00	(10.259.028,00)	65,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.096.368,00	19.837.340,00	(10.259.028,00)	65,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	97.442.549,00	93.741.380,00	(3.701.169,00)	96,20	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.03.0001		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	97.442.549,00	93.741.380,00	(3.701.169,00)	96,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	97.442.549,00	93.741.380,00	(3.701.169,00)	96,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.442.549,00	93.741.380,00	(3.701.169,00)	96,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	455.153.848,00	444.678.080,00	(10.475.768,00)	97,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.04.1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	400.338.600,00	391.972.880,00	(8.365.720,00)	97,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.04.1.01.0004		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	369.596.000,00	362.423.900,00	(7.172.100,00)	98,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.04.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	369.596.000,00	362.423.900,00	(7.172.100,00)	98,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.04.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.596.000,00	362.423.900,00	(7.172.100,00)	98,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.04.1.01.0009		Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	30.742.600,00	29.548.980,00	(1.193.620,00)	96,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.04.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.742.600,00	29.548.980,00	(1.193.620,00)	96,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.04.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.742.600,00	29.548.980,00	(1.193.620,00)	96,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.04.1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	54.815.248,00	52.705.200,00	(2.110.048,00)	96,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.04.1.02.0002		Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	54.815.248,00	52.705.200,00	(2.110.048,00)	96,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.04.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.815.248,00	52.705.200,00	(2.110.048,00)	96,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.04.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.815.248,00	52.705.200,00	(2.110.048,00)	96,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.460.642.532,00	6.262.904.740,00	(197.737.792,00)	96,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.227.100,00	72.130.700,00	(96.400,00)	99,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.653.450,00	37.601.179,00	(52.271,00)	99,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.653.450,00	37.601.179,00	(52.271,00)	99,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.653.450,00	37.601.179,00	(52.271,00)	99,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.573.650,00	34.529.521,00	(44.129,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	34.573.650,00	34.529.521,00	(44.129,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.573.650,00	34.529.521,00	(44.129,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.791.651.707,00	4.738.909.415,00	(52.742.292,00)	98,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.662.277.757,00	4.609.921.260,00	(52.356.497,00)	98,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.662.277.757,00	4.609.921.260,00	(52.356.497,00)	98,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.662.277.757,00	4.609.921.260,00	(52.356.497,00)	98,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	129.373.950,00	128.988.155,00	(385.795,00)	99,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	129.373.950,00	128.988.155,00	(385.795,00)	99,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.373.950,00	128.988.155,00	(385.795,00)	99,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.213.000,00	180.209.776,00	(3.224,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.213.000,00	180.209.776,00	(3.224,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	180.213.000,00	180.209.776,00	(3.224,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.213.000,00	180.209.776,00	(3.224,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	490.016.375,00	416.226.697,00	(73.789.678,00)	84,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	490.016.375,00	416.226.697,00	(73.789.678,00)	84,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	414.072.375,00	340.282.697,00	(73.789.678,00)	82,17	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.072.375,00	340.282.697,00	(73.789.678,00)	82,17	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	75.944.000,00	75.944.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.944.000,00	75.944.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	926.534.350,00	855.428.152,00	(71.106.198,00)	92,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	926.534.350,00	855.428.152,00	(71.106.198,00)	92,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	926.534.350,00	855.428.152,00	(71.106.198,00)	92,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	926.534.350,00	855.428.152,00	(71.106.198,00)	92,32	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
Organisasi : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000		5	BELANJA DAERAH	10.117.754.427,00	9.921.284.881,00	(196.469.546,00)	98,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.000.000.000,00	996.050.733,00	(3.949.267,00)	99,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	400.000.000,00	397.523.743,00	(2.476.257,00)	99,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.02.0016		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	230.000.000,00	228.924.419,00	(1.075.581,00)	99,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	230.000.000,00	228.924.419,00	(1.075.581,00)	99,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	228.924.419,00	(1.075.581,00)	99,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.02.0019		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	170.000.000,00	168.599.324,00	(1.400.676,00)	99,17	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.02.0019	5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	168.599.324,00	(1.400.676,00)	99,17	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.02.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	168.599.324,00	(1.400.676,00)	99,17	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	350.000.000,00	348.832.830,00	(1.167.170,00)	99,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.03.0002		Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	125.000.000,00	124.845.650,00	(154.350,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	124.845.650,00	(154.350,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	124.845.650,00	(154.350,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.03.0004		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	125.000.000,00	124.712.500,00	(287.500,00)	99,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	124.712.500,00	(287.500,00)	99,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	124.712.500,00	(287.500,00)	99,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.03.0005		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100.000.000,00	99.274.680,00	(725.320,00)	99,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.274.680,00	(725.320,00)	99,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.274.680,00	(725.320,00)	99,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	250.000.000,00	249.694.160,00	(305.840,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.04.0007		Penanganan Pasca Bencana Provinsi	150.000.000,00	149.786.980,00	(213.020,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.786.980,00	(213.020,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.786.980,00	(213.020,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.04.0019		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	100.000.000,00	99.907.180,00	(92.820,00)	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.04.0019	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.907.180,00	(92.820,00)	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.04.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.907.180,00	(92.820,00)	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.117.754.427,00	8.925.234.148,00	(192.520.279,00)	97,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	354.896.092,00	354.540.635,00	(355.457,00)	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	354.896.092,00	354.540.635,00	(355.457,00)	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	354.896.092,00	354.540.635,00	(355.457,00)	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.896.092,00	354.540.635,00	(355.457,00)	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.164.431.635,00	6.088.110.931,00	(76.320.704,00)	98,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.114.431.635,00	6.038.191.845,00	(76.239.790,00)	98,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.114.431.635,00	6.038.191.845,00	(76.239.790,00)	98,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.114.431.635,00	6.038.191.845,00	(76.239.790,00)	98,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000,00	49.919.086,00	(80.914,00)	99,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.919.086,00	(80.914,00)	99,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.919.086,00	(80.914,00)	99,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.757.574.800,00	1.651.591.399,00	(105.983.401,00)	93,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.757.574.800,00	1.651.591.399,00	(105.983.401,00)	93,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.737.574.800,00	1.631.641.399,00	(105.933.401,00)	93,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.737.574.800,00	1.631.641.399,00	(105.933.401,00)	93,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	840.851.900,00	830.991.183,00	(9.860.717,00)	98,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	840.851.900,00	830.991.183,00	(9.860.717,00)	98,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	840.851.900,00	830.991.183,00	(9.860.717,00)	98,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.851.900,00	830.991.183,00	(9.860.717,00)	98,82	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**
Organisasi : **Dinas Sosial**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000		5	BELANJA DAERAH	26.592.018.017,00	25.511.853.450,00	(1.080.164.567,00)	95,93	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.801.075.135,00	1.791.395.615,00	(9.679.520,00)	99,46	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	110.598.275,00	107.896.594,00	(2.701.681,00)	97,55	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	110.598.275,00	107.896.594,00	(2.701.681,00)	97,55	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	110.598.275,00	107.896.594,00	(2.701.681,00)	97,55	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.598.275,00	107.896.594,00	(2.701.681,00)	97,55	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.690.476.860,00	1.683.499.021,00	(6.977.839,00)	99,58	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.02.0001		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	74.290.240,00	74.275.428,00	(14.812,00)	99,98	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	74.290.240,00	74.275.428,00	(14.812,00)	99,98	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.290.240,00	74.275.428,00	(14.812,00)	99,98	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.02.0002		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	556.419.986,00	549.974.208,00	(6.445.778,00)	98,84	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	556.419.986,00	549.974.208,00	(6.445.778,00)	98,84	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	556.419.986,00	549.974.208,00	(6.445.778,00)	98,84	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.02.0004		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.059.766.634,00	1.059.249.385,00	(517.249,00)	99,95	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.059.766.634,00	1.059.249.385,00	(517.249,00)	99,95	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.266.634,00	313.749.385,00	(517.249,00)	99,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.02.0004	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	745.500.000,00	745.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	128.602.000,00	119.102.510,00	(9.499.490,00)	92,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.03.1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	128.602.000,00	119.102.510,00	(9.499.490,00)	92,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.03.1.01.0001		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	128.602.000,00	119.102.510,00	(9.499.490,00)	92,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	128.602.000,00	119.102.510,00	(9.499.490,00)	92,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.602.000,00	119.102.510,00	(9.499.490,00)	92,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.305.663.720,00	2.922.495.993,00	(383.167.727,00)	88,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	589.668.800,00	370.858.678,00	(218.810.122,00)	62,89	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0001		Penyediaan Permakanan	188.326.000,00	17.839.200,00	(170.486.800,00)	9,47	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	188.326.000,00	17.839.200,00	(170.486.800,00)	9,47	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.326.000,00	17.839.200,00	(170.486.800,00)	9,47	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0002		Penyediaan Sandang	40.000.000,00	39.992.150,00	(7.850,00)	99,98	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.992.150,00	(7.850,00)	99,98	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.992.150,00	(7.850,00)	99,98	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0003		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	200.422.800,00	185.237.800,00	(15.185.000,00)	92,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	200.422.800,00	185.237.800,00	(15.185.000,00)	92,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.422.800,00	185.237.800,00	(15.185.000,00)	92,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0005		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0007		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	98.878.000,00	71.806.800,00	(27.071.200,00)	72,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	98.878.000,00	71.806.800,00	(27.071.200,00)	72,62	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.878.000,00	71.806.800,00	(27.071.200,00)	72,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0012		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	60.042.000,00	55.982.728,00	(4.059.272,00)	93,23	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	60.042.000,00	55.982.728,00	(4.059.272,00)	93,23	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.042.000,00	55.982.728,00	(4.059.272,00)	93,23	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.094.369.700,00	1.087.609.329,00	(6.760.371,00)	99,38	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.02.0002		Penyediaan Makanan	573.350.000,00	569.809.300,00	(3.540.700,00)	99,38	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	573.350.000,00	569.809.300,00	(3.540.700,00)	99,38	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.02.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	530.150.000,00	526.609.300,00	(3.540.700,00)	99,33	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.02.0009		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	40.054.000,00	37.729.125,00	(2.324.875,00)	94,19	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	40.054.000,00	37.729.125,00	(2.324.875,00)	94,19	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.054.000,00	37.729.125,00	(2.324.875,00)	94,19	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.02.0012		Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	51.800.000,00	51.485.548,00	(314.452,00)	99,39	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	51.800.000,00	51.485.548,00	(314.452,00)	99,39	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.800.000,00	51.485.548,00	(314.452,00)	99,39	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.02.0013		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	429.165.700,00	428.585.356,00	(580.344,00)	99,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	429.165.700,00	428.585.356,00	(580.344,00)	99,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.165.700,00	198.585.356,00	(580.344,00)	99,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.02.0013	5.1.05	Belanja Hibah	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.282.103.220,00	1.128.066.538,00	(154.036.682,00)	87,98	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0001		Penyediaan Permakanan	300.000.000,00	224.692.999,00	(75.307.001,00)	74,89	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	224.692.999,00	(75.307.001,00)	74,89	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	224.692.999,00	(75.307.001,00)	74,89	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0002		Penyediaan Sandang	100.000.000,00	86.601.304,00	(13.398.696,00)	86,60	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	86.601.304,00	(13.398.696,00)	86,60	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	86.601.304,00	(13.398.696,00)	86,60	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0003		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	135.000.000,00	129.092.920,00	(5.907.080,00)	95,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	135.000.000,00	129.092.920,00	(5.907.080,00)	95,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	129.092.920,00	(5.907.080,00)	95,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0005		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	34.745.720,00	3.999.948,00	(30.745.772,00)	11,51	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	34.745.720,00	3.999.948,00	(30.745.772,00)	11,51	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.745.720,00	3.999.948,00	(30.745.772,00)	11,51	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0006		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	302.460.000,00	294.473.130,00	(7.986.870,00)	97,35	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	302.460.000,00	294.473.130,00	(7.986.870,00)	97,35	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.460.000,00	124.473.130,00	(7.986.870,00)	93,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0006	5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0006	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0007		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	289.457.500,00	288.610.586,00	(846.914,00)	99,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	289.457.500,00	288.610.586,00	(846.914,00)	99,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.457.500,00	288.610.586,00	(846.914,00)	99,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0010		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	19.540.000,00	17.992.900,00	(1.547.100,00)	92,08	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0010	5.1	BELANJA OPERASI	19.540.000,00	17.992.900,00	(1.547.100,00)	92,08	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.540.000,00	17.992.900,00	(1.547.100,00)	92,08	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0012		Pemulasaraan	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	25,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	25,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0012	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	25,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0013		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	80.900.000,00	77.602.751,00	(3.297.249,00)	95,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	80.900.000,00	77.602.751,00	(3.297.249,00)	95,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.900.000,00	77.602.751,00	(3.297.249,00)	95,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	339.522.000,00	335.961.448,00	(3.560.552,00)	98,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.05.0011		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	339.522.000,00	335.961.448,00	(3.560.552,00)	98,95	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	339.522.000,00	335.961.448,00	(3.560.552,00)	98,95	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.522.000,00	135.961.448,00	(3.560.552,00)	97,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.05.0011	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	8.080.394.875,00	8.001.348.674,00	(79.046.201,00)	99,02	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	50.000.000,00	48.342.100,00	(1.657.900,00)	96,68	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.01.0001		Pengangkatan Anak antar WNI	50.000.000,00	48.342.100,00	(1.657.900,00)	96,68	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.342.100,00	(1.657.900,00)	96,68	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.342.100,00	(1.657.900,00)	96,68	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	8.030.394.875,00	7.953.006.574,00	(77.388.301,00)	99,03	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.02.0001		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.848.081.500,00	5.775.191.091,00	(72.890.409,00)	98,75	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.848.081.500,00	5.775.191.091,00	(72.890.409,00)	98,75	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	730.880.500,00	718.411.091,00	(12.469.409,00)	98,29	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.02.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.117.201.000,00	5.056.780.000,00	(60.421.000,00)	98,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.02.0002		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.034.899.375,00	2.030.474.113,00	(4.425.262,00)	99,78	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.034.899.375,00	2.030.474.113,00	(4.425.262,00)	99,78	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	704.899.375,00	700.474.113,00	(4.425.262,00)	99,37	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.02.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.02.0003		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	147.414.000,00	147.341.370,00	(72.630,00)	99,95	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	147.414.000,00	147.341.370,00	(72.630,00)	99,95	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.452.000,00	30.382.810,00	(69.190,00)	99,77	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.02.0003	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	116.962.000,00	116.958.560,00	(3.440,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.087.432.140,00	1.016.931.963,00	(70.500.177,00)	93,51	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.087.432.140,00	1.016.931.963,00	(70.500.177,00)	93,51	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01.0001		Penyediaan Permakanan	842.235.000,00	823.449.363,00	(18.785.637,00)	97,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	842.235.000,00	823.449.363,00	(18.785.637,00)	97,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	842.235.000,00	823.449.363,00	(18.785.637,00)	97,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01.0002		Penyediaan Sandang	120.000.000,00	119.850.000,00	(150.000,00)	99,87	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	119.850.000,00	(150.000,00)	99,87	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	119.850.000,00	(150.000,00)	99,87	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01.0003		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	70.197.140,00	67.531.200,00	(2.665.940,00)	96,20	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	70.197.140,00	67.531.200,00	(2.665.940,00)	96,20	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.197.140,00	67.531.200,00	(2.665.940,00)	96,20	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01.0004		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	25.000.000,00	6.101.400,00	(18.898.600,00)	24,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	6.101.400,00	(18.898.600,00)	24,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	6.101.400,00	(18.898.600,00)	24,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01.0005		Pelayanan Dukungan Psikososial	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	600.791.350,00	598.948.680,00	(1.842.670,00)	99,69	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.07.1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	600.791.350,00	598.948.680,00	(1.842.670,00)	99,69	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.07.1.01.0002		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	600.791.350,00	598.948.680,00	(1.842.670,00)	99,69	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.07.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	600.791.350,00	598.948.680,00	(1.842.670,00)	99,69	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.07.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.791.350,00	464.948.680,00	(1.842.670,00)	99,60	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.07.1.01.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.588.058.797,00	11.061.630.015,00	(526.428.782,00)	95,45	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	827.877.012,00	826.099.820,00	(1.777.192,00)	99,78	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	603.414.862,00	602.214.800,00	(1.200.062,00)	99,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	603.414.862,00	602.214.800,00	(1.200.062,00)	99,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	603.414.862,00	602.214.800,00	(1.200.062,00)	99,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	11.437.100,00	11.051.071,00	(386.029,00)	96,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.437.100,00	11.051.071,00	(386.029,00)	96,62	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.437.100,00	11.051.071,00	(386.029,00)	96,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.078.150,00	50.039.600,00	(38.550,00)	99,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	50.078.150,00	50.039.600,00	(38.550,00)	99,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.078.150,00	50.039.600,00	(38.550,00)	99,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.946.900,00	162.794.349,00	(152.551,00)	99,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	162.946.900,00	162.794.349,00	(152.551,00)	99,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.946.900,00	162.794.349,00	(152.551,00)	99,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.442.289.661,00	8.343.594.471,00	(98.695.190,00)	98,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.307.739.661,00	8.209.659.330,00	(98.080.331,00)	98,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.307.739.661,00	8.209.659.330,00	(98.080.331,00)	98,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.307.739.661,00	8.209.659.330,00	(98.080.331,00)	98,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.550.000,00	110.125.911,00	(424.089,00)	99,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	110.550.000,00	110.125.911,00	(424.089,00)	99,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.550.000,00	110.125.911,00	(424.089,00)	99,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.000.000,00	23.809.230,00	(190.770,00)	99,20	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.809.230,00	(190.770,00)	99,20	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.809.230,00	(190.770,00)	99,20	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	212.040.000,00	211.836.946,00	(203.054,00)	99,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.100.000,00	44.020.000,00	(80.000,00)	99,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.100.000,00	44.020.000,00	(80.000,00)	99,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.100.000,00	44.020.000,00	(80.000,00)	99,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	111.180.000,00	111.069.721,00	(110.279,00)	99,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	111.180.000,00	111.069.721,00	(110.279,00)	99,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.180.000,00	111.069.721,00	(110.279,00)	99,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56.760.000,00	56.747.225,00	(12.775,00)	99,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	56.760.000,00	56.747.225,00	(12.775,00)	99,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.760.000,00	56.747.225,00	(12.775,00)	99,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	625.030.900,00	478.946.554,00	(146.084.346,00)	76,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.200.000,00	13.842.510,00	(7.357.490,00)	65,29	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.200.000,00	13.842.510,00	(7.357.490,00)	65,29	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	13.842.510,00	(7.357.490,00)	65,29	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	282.169.730,00	157.890.000,00	(124.279.730,00)	55,95	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.688.810,00	1.680.000,00	(8.810,00)	99,47	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.688.810,00	1.680.000,00	(8.810,00)	99,47	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	280.480.920,00	156.210.000,00	(124.270.920,00)	55,69	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280.480.920,00	156.210.000,00	(124.270.920,00)	55,69	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	192.468.100,00	183.549.400,00	(8.918.700,00)	95,36	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	192.468.100,00	183.549.400,00	(8.918.700,00)	95,36	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	192.468.100,00	183.549.400,00	(8.918.700,00)	95,36	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.557.420,00	36.463.752,00	(93.668,00)	99,74	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	36.557.420,00	36.463.752,00	(93.668,00)	99,74	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.557.420,00	36.463.752,00	(93.668,00)	99,74	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.856.200,00	16.512.100,00	(2.344.100,00)	87,56	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.856.200,00	16.512.100,00	(2.344.100,00)	87,56	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.856.200,00	16.512.100,00	(2.344.100,00)	87,56	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	9.129.450,00	6.149.000,00	(2.980.450,00)	67,35	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.180.000,00	6.149.000,00	(31.000,00)	99,49	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.180.000,00	6.149.000,00	(31.000,00)	99,49	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0007	5.2	BELANJA MODAL	2.949.450,00	0,00	(2.949.450,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.949.450,00	0,00	(2.949.450,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.500.000,00	47.465.992,00	(34.008,00)	99,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	47.500.000,00	47.465.992,00	(34.008,00)	99,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	47.465.992,00	(34.008,00)	99,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.150.000,00	17.073.800,00	(76.200,00)	99,55	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	17.150.000,00	17.073.800,00	(76.200,00)	99,55	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.150.000,00	17.073.800,00	(76.200,00)	99,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	782.700.000,00	715.615.523,00	(67.084.477,00)	91,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.000.000,00	172.915.523,00	(67.084.477,00)	72,04	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000,00	172.915.523,00	(67.084.477,00)	72,04	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	172.915.523,00	(67.084.477,00)	72,04	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	542.700.000,00	542.700.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	542.700.000,00	542.700.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	698.121.224,00	485.536.701,00	(212.584.523,00)	69,54	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.267.600,00	45.911.200,00	(12.356.400,00)	78,79	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.267.600,00	45.911.200,00	(12.356.400,00)	78,79	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.267.600,00	45.911.200,00	(12.356.400,00)	78,79	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.738.000,00	229.278.981,00	(133.459.019,00)	63,20	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	362.738.000,00	229.278.981,00	(133.459.019,00)	63,20	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.738.000,00	229.278.981,00	(133.459.019,00)	63,20	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	167.673.624,00	101.505.420,00	(66.168.204,00)	60,53	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	167.673.624,00	101.505.420,00	(66.168.204,00)	60,53	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.673.624,00	101.505.420,00	(66.168.204,00)	60,53	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.442.000,00	108.841.100,00	(600.900,00)	99,45	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	19.442.000,00	19.400.100,00	(41.900,00)	99,78	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.442.000,00	19.400.100,00	(41.900,00)	99,78	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	90.000.000,00	89.441.000,00	(559.000,00)	99,37	
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.09.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.000.000,00	89.441.000,00	(559.000,00)	99,37	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**
Organisasi : **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	5.473.443.543,00	5.473.443.543,00	0,00	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	157.337.163,00	157.337.163,00	0,00	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	157.337.163,00	157.337.163,00	0,00	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	5.316.106.380,00	5.316.106.380,00	0,00	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	5.316.106.380,00	5.316.106.380,00	0,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.047.423.163,00	4.827.169.384,00	(220.253.779,00)	95,63	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	300.023.300,00	299.847.265,00	(176.035,00)	99,94	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	300.023.300,00	299.847.265,00	(176.035,00)	99,94	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.1.02.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	150.023.400,00	149.999.610,00	(23.790,00)	99,98	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	150.023.400,00	149.999.610,00	(23.790,00)	99,98	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.023.400,00	149.999.610,00	(23.790,00)	99,98	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.1.02.0002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	149.999.900,00	149.847.655,00	(152.245,00)	99,89	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	149.999.900,00	149.847.655,00	(152.245,00)	99,89	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.999.900,00	149.847.655,00	(152.245,00)	99,89	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.081.905.950,00	1.081.588.798,00	(317.152,00)	99,97	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.081.905.950,00	1.081.588.798,00	(317.152,00)	99,97	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.1.01.0003		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.081.905.950,00	1.081.588.798,00	(317.152,00)	99,97	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.081.905.950,00	1.081.588.798,00	(317.152,00)	99,97	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.081.905.950,00	1.081.588.798,00	(317.152,00)	99,97	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	399.979.250,00	399.311.864,00	(667.386,00)	99,83	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	199.979.350,00	199.860.248,00	(119.102,00)	99,94	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.01.0001		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	99.990.900,00	99.900.067,00	(90.833,00)	99,90	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	99.990.900,00	99.900.067,00	(90.833,00)	99,90	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.990.900,00	99.900.067,00	(90.833,00)	99,90	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.01.0002		Penetapan Cagar Budaya	99.988.450,00	99.960.181,00	(28.269,00)	99,97	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	99.988.450,00	99.960.181,00	(28.269,00)	99,97	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.988.450,00	99.960.181,00	(28.269,00)	99,97	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	199.999.900,00	199.451.616,00	(548.284,00)	99,72	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0001		Pelindungan Cagar Budaya	100.000.000,00	99.686.380,00	(313.620,00)	99,68	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.686.380,00	(313.620,00)	99,68	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.686.380,00	(313.620,00)	99,68	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0004		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	99.999.900,00	99.765.236,00	(234.664,00)	99,76	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	99.999.900,00	99.765.236,00	(234.664,00)	99,76	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.900,00	99.765.236,00	(234.664,00)	99,76	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.265.514.663,00	3.046.421.457,00	(219.093.206,00)	93,29	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	3.265.514.663,00	3.046.421.457,00	(219.093.206,00)	93,29	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0001		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	699.595.500,00	607.994.911,00	(91.600.589,00)	86,90	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	658.395.500,00	567.994.911,00	(90.400.589,00)	86,26	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	658.395.500,00	567.994.911,00	(90.400.589,00)	86,26	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	41.200.000,00	40.000.000,00	(1.200.000,00)	97,08	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.200.000,00	40.000.000,00	(1.200.000,00)	97,08	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0002		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	756.067.400,00	712.712.033,00	(43.355.367,00)	94,26	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	756.067.400,00	712.712.033,00	(43.355.367,00)	94,26	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	756.067.400,00	712.712.033,00	(43.355.367,00)	94,26	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0003		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.114.688.500,00	1.083.950.547,00	(30.737.953,00)	97,24	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.114.688.500,00	1.083.950.547,00	(30.737.953,00)	97,24	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.114.688.500,00	1.083.950.547,00	(30.737.953,00)	97,24	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0004		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	695.163.263,00	641.763.966,00	(53.399.297,00)	92,31	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	466.041.263,00	415.129.466,00	(50.911.797,00)	89,07	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.041.263,00	415.129.466,00	(50.911.797,00)	89,07	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	229.122.000,00	226.634.500,00	(2.487.500,00)	98,91	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.077.000,00	135.777.000,00	(300.000,00)	99,77	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	37.857.500,00	(2.142.500,00)	94,64	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0004	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	53.045.000,00	53.000.000,00	(45.000,00)	99,91	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	1.986.652.966,40	1.986.652.966,40	0,00	100,00	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.986.652.966,40	1.986.652.966,40	0,00	100,00	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.986.652.966,40	1.986.652.966,40	0,00	100,00	

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.1.04.2.10.05.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	900.000.000,00	2.252.281.808,00	1.352.281.808,00	250,25	
	1.03.1.04.2.10.05.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	900.000.000,00	2.252.281.808,00	1.352.281.808,00	250,25	
	1.03.1.04.2.10.05.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	900.000.000,00	2.252.281.808,00	1.352.281.808,00	250,25	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000		5	BELANJA DAERAH	4.458.029.401,00	4.446.848.604,00	(11.180.797,00)	99,74	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	967.000.600,00	960.960.347,00	(6.040.253,00)	99,37	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	97.732.050,00	97.354.780,00	(377.270,00)	99,61	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.01.0008		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	97.732.050,00	97.354.780,00	(377.270,00)	99,61	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	97.732.050,00	97.354.780,00	(377.270,00)	99,61	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.732.050,00	97.354.780,00	(377.270,00)	99,61	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	401.712.350,00	396.711.147,00	(5.001.203,00)	98,75	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.02.0001		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	297.187.850,00	292.951.737,00	(4.236.113,00)	98,57	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	297.187.850,00	292.951.737,00	(4.236.113,00)	98,57	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.187.850,00	292.951.737,00	(4.236.113,00)	98,57	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.02.0006		Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	94.541.000,00	94.190.084,00	(350.916,00)	99,62	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	94.541.000,00	94.190.084,00	(350.916,00)	99,62	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.541.000,00	94.190.084,00	(350.916,00)	99,62	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.02.0009		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	9.983.500,00	9.569.326,00	(414.174,00)	95,85	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	9.983.500,00	9.569.326,00	(414.174,00)	95,85	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.983.500,00	9.569.326,00	(414.174,00)	95,85	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	467.556.200,00	466.894.420,00	(661.780,00)	99,85	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.03.0012		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	467.556.200,00	466.894.420,00	(661.780,00)	99,85	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	467.556.200,00	466.894.420,00	(661.780,00)	99,85	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.556.200,00	196.894.420,00	(661.780,00)	99,66	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.03.0012	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.491.028.801,00	3.485.888.257,00	(5.140.544,00)	99,85	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	189.999.425,00	189.448.574,00	(550.851,00)	99,71	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.01.0017		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	24.999.875,00	24.723.500,00	(276.375,00)	98,89	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	24.999.875,00	24.723.500,00	(276.375,00)	98,89	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.875,00	24.723.500,00	(276.375,00)	98,89	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.01.0018		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	164.999.550,00	164.725.074,00	(274.476,00)	99,83	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	164.999.550,00	164.725.074,00	(274.476,00)	99,83	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.999.550,00	164.725.074,00	(274.476,00)	99,83	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3.301.029.376,00	3.296.439.683,00	(4.589.693,00)	99,86	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.02.0011		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.021.475.475,00	2.020.480.895,00	(994.580,00)	99,95	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	2.021.475.475,00	2.020.480.895,00	(994.580,00)	99,95	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.121.475.475,00	1.120.480.895,00	(994.580,00)	99,91	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.02.0011	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.02.0014		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.279.553.901,00	1.275.958.788,00	(3.595.113,00)	99,71	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	709.553.901,00	708.172.440,00	(1.381.461,00)	99,80	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	709.553.901,00	708.172.440,00	(1.381.461,00)	99,80	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	570.000.000,00	567.786.348,00	(2.213.652,00)	99,61	
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.02.0014	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	570.000.000,00	567.786.348,00	(2.213.652,00)	99,61	

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**
Organisasi : **Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000		5	BELANJA DAERAH	15.387.898.243,00	15.189.846.486,00	(198.051.757,00)	98,71	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	372.220.000,00	365.638.540,00	(6.581.460,00)	98,23	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	372.220.000,00	365.638.540,00	(6.581.460,00)	98,23	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.03.1.01.0001		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	372.220.000,00	365.638.540,00	(6.581.460,00)	98,23	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	372.220.000,00	365.638.540,00	(6.581.460,00)	98,23	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.220.000,00	365.638.540,00	(6.581.460,00)	98,23	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	314.100.350,00	313.156.040,00	(944.310,00)	99,69	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04.1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	314.100.350,00	313.156.040,00	(944.310,00)	99,69	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04.1.03.0002		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	314.100.350,00	313.156.040,00	(944.310,00)	99,69	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	314.100.350,00	313.156.040,00	(944.310,00)	99,69	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.100.350,00	313.156.040,00	(944.310,00)	99,69	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	859.016.276,00	849.203.708,00	(9.812.568,00)	98,85	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	99.987.425,00	(12.575,00)	99,98	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.02.0002		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	99.987.425,00	(12.575,00)	99,98	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.987.425,00	(12.575,00)	99,98	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.987.425,00	(12.575,00)	99,98	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)	759.016.276,00	749.216.283,00	(9.799.993,00)	98,70	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03.0001		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	341.440.000,00	341.330.330,00	(109.670,00)	99,96	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	341.440.000,00	341.330.330,00	(109.670,00)	99,96	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.440.000,00	341.330.330,00	(109.670,00)	99,96	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03.0005		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	417.576.276,00	407.885.953,00	(9.690.323,00)	97,67	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	417.576.276,00	407.885.953,00	(9.690.323,00)	97,67	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.576.276,00	407.885.953,00	(9.690.323,00)	97,67	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	161.960.000,00	161.941.637,00	(18.363,00)	99,98	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.06.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	161.960.000,00	161.941.637,00	(18.363,00)	99,98	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.06.1.01.0001		Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	161.960.000,00	161.941.637,00	(18.363,00)	99,98	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.06.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	161.960.000,00	161.941.637,00	(18.363,00)	99,98	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.06.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.960.000,00	161.941.637,00	(18.363,00)	99,98	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.680.601.617,00	13.499.906.561,00	(180.695.056,00)	98,67	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	466.712.650,00	463.615.724,00	(3.096.926,00)	99,33	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	191.551.400,00	188.541.826,00	(3.009.574,00)	98,42	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	191.551.400,00	188.541.826,00	(3.009.574,00)	98,42	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.551.400,00	188.541.826,00	(3.009.574,00)	98,42	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	275.161.250,00	275.073.898,00	(87.352,00)	99,96	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	275.161.250,00	275.073.898,00	(87.352,00)	99,96	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.161.250,00	275.073.898,00	(87.352,00)	99,96	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.287.591.319,00	12.050.589.758,00	(237.001.561,00)	98,07	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.199.191.319,00	11.962.808.540,00	(236.382.779,00)	98,06	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.199.191.319,00	11.962.808.540,00	(236.382.779,00)	98,06	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	12.199.191.319,00	11.962.808.540,00	(236.382.779,00)	98,06	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	88.400.000,00	87.781.218,00	(618.782,00)	99,30	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	88.400.000,00	87.781.218,00	(618.782,00)	99,30	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.400.000,00	87.781.218,00	(618.782,00)	99,30	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	425.323.498,00	408.530.920,00	(16.792.578,00)	96,05	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	425.323.498,00	408.530.920,00	(16.792.578,00)	96,05	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	332.365.998,00	315.780.920,00	(16.585.078,00)	95,00	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.365.998,00	315.780.920,00	(16.585.078,00)	95,00	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	92.957.500,00	92.750.000,00	(207.500,00)	99,77	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.957.500,00	92.750.000,00	(207.500,00)	99,77	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.974.150,00	577.170.159,00	76.196.009,00	115,20	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.974.150,00	577.170.159,00	76.196.009,00	115,20	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	500.974.150,00	577.170.159,00	76.196.009,00	115,20	
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.974.150,00	577.170.159,00	76.196.009,00	115,20	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.814.117.841,00	7.749.165.852,00	(64.951.989,00)	99,16	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.893.942.777,00	1.893.158.305,00	(784.472,00)	99,95	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	393.942.777,00	393.158.305,00	(784.472,00)	99,80	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.1.01.0007		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	266.620.327,00	266.285.145,00	(335.182,00)	99,87	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	266.620.327,00	266.285.145,00	(335.182,00)	99,87	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.620.327,00	266.285.145,00	(335.182,00)	99,87	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.1.01.0008		Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	127.322.450,00	126.873.160,00	(449.290,00)	99,64	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	127.322.450,00	126.873.160,00	(449.290,00)	99,64	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.322.450,00	126.873.160,00	(449.290,00)	99,64	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.1.02.0004	5.1.05	Belanja Hibah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	190.328.000,00	189.846.944,00	(481.056,00)	99,74	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	190.328.000,00	189.846.944,00	(481.056,00)	99,74	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.1.01.0002		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	190.328.000,00	189.846.944,00	(481.056,00)	99,74	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	190.328.000,00	189.846.944,00	(481.056,00)	99,74	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.328.000,00	189.846.944,00	(481.056,00)	99,74	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	106.323.014,00	105.977.691,00	(345.323,00)	99,67	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	106.323.014,00	105.977.691,00	(345.323,00)	99,67	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.1.02.0001		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	106.323.014,00	105.977.691,00	(345.323,00)	99,67	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	106.323.014,00	105.977.691,00	(345.323,00)	99,67	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.323.014,00	105.977.691,00	(345.323,00)	99,67	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	150.745.980,00	149.405.404,00	(1.340.576,00)	99,11	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	150.745.980,00	149.405.404,00	(1.340.576,00)	99,11	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.1.02.0006		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	150.745.980,00	149.405.404,00	(1.340.576,00)	99,11	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	150.745.980,00	149.405.404,00	(1.340.576,00)	99,11	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.745.980,00	149.405.404,00	(1.340.576,00)	99,11	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	446.842.600,00	445.931.320,00	(911.280,00)	99,79	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	446.842.600,00	445.931.320,00	(911.280,00)	99,79	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.1.01.0003		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	446.842.600,00	445.931.320,00	(911.280,00)	99,79	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	446.842.600,00	445.931.320,00	(911.280,00)	99,79	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.842.600,00	445.931.320,00	(911.280,00)	99,79	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.025.935.470,00	4.964.846.188,00	(61.089.282,00)	98,78	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	246.986.750,00	245.702.735,00	(1.284.015,00)	99,48	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	246.986.750,00	245.702.735,00	(1.284.015,00)	99,48	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	246.986.750,00	245.702.735,00	(1.284.015,00)	99,48	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.986.750,00	245.702.735,00	(1.284.015,00)	99,48	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.661.226.770,00	3.638.608.722,00	(22.618.048,00)	99,38	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.661.226.770,00	3.638.608.722,00	(22.618.048,00)	99,38	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.661.226.770,00	3.638.608.722,00	(22.618.048,00)	99,38	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.661.226.770,00	3.638.608.722,00	(22.618.048,00)	99,38	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.583.000,00	119.969.050,00	(613.950,00)	99,49	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.583.000,00	119.969.050,00	(613.950,00)	99,49	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	120.583.000,00	119.969.050,00	(613.950,00)	99,49	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.583.000,00	119.969.050,00	(613.950,00)	99,49	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.564.750,00	252.588.882,00	(2.975.868,00)	98,83	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	65.845.750,00	64.485.970,00	(1.359.780,00)	97,93	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	14.480.800,00	14.185.970,00	(294.830,00)	97,96	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.480.800,00	14.185.970,00	(294.830,00)	97,96	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.06.0007	5.2	BELANJA MODAL	51.364.950,00	50.300.000,00	(1.064.950,00)	97,92	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.06.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.364.950,00	50.300.000,00	(1.064.950,00)	97,92	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	14.997.405,00	(2.595,00)	99,98	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.997.405,00	(2.595,00)	99,98	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.997.405,00	(2.595,00)	99,98	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.719.000,00	173.105.507,00	(1.613.493,00)	99,07	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	174.719.000,00	173.105.507,00	(1.613.493,00)	99,07	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.719.000,00	173.105.507,00	(1.613.493,00)	99,07	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	651.210.000,00	619.612.858,00	(31.597.142,00)	95,14	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000,00	111.733.258,00	(20.266.742,00)	84,64	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	132.000.000,00	111.733.258,00	(20.266.742,00)	84,64	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	111.733.258,00	(20.266.742,00)	84,64	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519.210.000,00	507.879.600,00	(11.330.400,00)	97,81	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	519.210.000,00	507.879.600,00	(11.330.400,00)	97,81	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	519.210.000,00	507.879.600,00	(11.330.400,00)	97,81	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.364.200,00	88.363.941,00	(2.000.259,00)	97,78	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.364.200,00	88.363.941,00	(2.000.259,00)	97,78	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	90.364.200,00	88.363.941,00	(2.000.259,00)	97,78	
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.364.200,00	88.363.941,00	(2.000.259,00)	97,78	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000		5	BELANJA DAERAH	8.684.962.392,00	8.531.337.314,00	(153.625.078,00)	98,23	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	113.892.500,00	113.780.200,00	(112.300,00)	99,90	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.02.1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	113.892.500,00	113.780.200,00	(112.300,00)	99,90	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.02.1.02.0004		Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	113.892.500,00	113.780.200,00	(112.300,00)	99,90	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	113.892.500,00	113.780.200,00	(112.300,00)	99,90	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.892.500,00	113.780.200,00	(112.300,00)	99,90	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	139.788.750,00	139.677.891,00	(110.859,00)	99,92	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.03.1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	139.788.750,00	139.677.891,00	(110.859,00)	99,92	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.03.1.03.0001		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	139.788.750,00	139.677.891,00	(110.859,00)	99,92	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.03.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	139.788.750,00	139.677.891,00	(110.859,00)	99,92	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.03.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.788.750,00	139.677.891,00	(110.859,00)	99,92	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	328.931.250,00	325.890.717,00	(3.040.533,00)	99,07	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.04.1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	175.856.700,00	173.201.420,00	(2.655.280,00)	98,49	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.04.1.02.0002		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	175.856.700,00	173.201.420,00	(2.655.280,00)	98,49	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.04.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	175.856.700,00	173.201.420,00	(2.655.280,00)	98,49	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.04.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.856.700,00	173.201.420,00	(2.655.280,00)	98,49	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.04.1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	153.074.550,00	152.689.297,00	(385.253,00)	99,74	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.04.1.03.0002		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	153.074.550,00	152.689.297,00	(385.253,00)	99,74	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.04.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	153.074.550,00	152.689.297,00	(385.253,00)	99,74	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.04.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.074.550,00	152.689.297,00	(385.253,00)	99,74	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.102.349.892,00	7.951.988.506,00	(150.361.386,00)	98,14	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	395.543.400,00	395.177.674,00	(365.726,00)	99,90	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	395.543.400,00	395.177.674,00	(365.726,00)	99,90	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	395.543.400,00	395.177.674,00	(365.726,00)	99,90	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.543.400,00	395.177.674,00	(365.726,00)	99,90	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.909.631.517,00	5.891.048.419,00	(18.583.098,00)	99,68	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.831.236.517,00	5.812.669.681,00	(18.566.836,00)	99,68	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.831.236.517,00	5.812.669.681,00	(18.566.836,00)	99,68	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.831.236.517,00	5.812.669.681,00	(18.566.836,00)	99,68	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	78.395.000,00	78.378.738,00	(16.262,00)	99,97	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	78.395.000,00	78.378.738,00	(16.262,00)	99,97	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.395.000,00	78.378.738,00	(16.262,00)	99,97	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.495.075,00	74.593.760,00	(901.315,00)	98,80	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.495.075,00	74.593.760,00	(901.315,00)	98,80	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	75.495.075,00	74.593.760,00	(901.315,00)	98,80	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.495.075,00	74.593.760,00	(901.315,00)	98,80	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	683.519.700,00	618.340.877,00	(65.178.823,00)	90,46	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	683.519.700,00	618.340.877,00	(65.178.823,00)	90,46	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	492.057.100,00	428.008.297,00	(64.048.803,00)	86,98	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.057.100,00	428.008.297,00	(64.048.803,00)	86,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	191.462.600,00	190.332.580,00	(1.130.020,00)	99,40	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	191.462.600,00	190.332.580,00	(1.130.020,00)	99,40	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.038.160.200,00	972.827.776,00	(65.332.424,00)	93,70	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.038.160.200,00	972.827.776,00	(65.332.424,00)	93,70	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.038.160.200,00	972.827.776,00	(65.332.424,00)	93,70	
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.038.160.200,00	972.827.776,00	(65.332.424,00)	93,70	

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000		5		BELANJA DAERAH	4.330.634.240,00	4.294.206.069,00	(36.428.171,00)	99,15	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	986.274.790,00	979.414.415,00	(6.860.375,00)	99,30	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	986.274.790,00	979.414.415,00	(6.860.375,00)	99,30	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0008			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	294.907.390,00	294.585.357,00	(322.033,00)	99,89	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0008	5.1		BELANJA OPERASI	293.516.890,00	293.349.117,00	(167.773,00)	99,94	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0008	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	293.516.890,00	293.349.117,00	(167.773,00)	99,94	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0008	5.2		BELANJA MODAL	1.390.500,00	1.236.240,00	(154.260,00)	88,90	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0008	5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.390.500,00	1.236.240,00	(154.260,00)	88,90	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0009			Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	224.787.450,00	224.053.023,00	(734.427,00)	99,67	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0009	5.1		BELANJA OPERASI	224.787.450,00	224.053.023,00	(734.427,00)	99,67	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0009	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	224.787.450,00	224.053.023,00	(734.427,00)	99,67	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0011			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	64.280.900,00	63.758.390,00	(522.510,00)	99,18	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0011	5.1		BELANJA OPERASI	64.280.900,00	63.758.390,00	(522.510,00)	99,18	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0011	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	64.280.900,00	63.758.390,00	(522.510,00)	99,18	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0012			Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	302.295.000,00	301.024.000,00	(1.271.000,00)	99,57	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0012	5.1		BELANJA OPERASI	302.295.000,00	301.024.000,00	(1.271.000,00)	99,57	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0012	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	302.295.000,00	301.024.000,00	(1.271.000,00)	99,57	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0022			Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	100.004.050,00	95.993.645,00	(4.010.405,00)	95,98	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0022	5.1		BELANJA OPERASI	100.004.050,00	95.993.645,00	(4.010.405,00)	95,98	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0022	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	100.004.050,00	95.993.645,00	(4.010.405,00)	95,98	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.344.359.450,00	3.314.791.654,00	(29.567.796,00)	99,11	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05.1.01			Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.344.359.450,00	3.314.791.654,00	(29.567.796,00)	99,11	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05.1.01.0002			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	101.821.200,00	101.818.373,00	(2.827,00)	99,99	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05.1.01.0002	5.1		BELANJA OPERASI	101.821.200,00	101.818.373,00	(2.827,00)	99,99	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05.1.01.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	101.821.200,00	101.818.373,00	(2.827,00)	99,99	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05.1.01.0003			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	278.351.550,00	273.748.601,00	(4.602.949,00)	98,34	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05.1.01.0003	5.1		BELANJA OPERASI	250.953.550,00	247.898.601,00	(3.054.949,00)	98,78	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.953.550,00	247.898.601,00	(3.054.949,00)	98,78	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05.1.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	27.398.000,00	25.850.000,00	(1.548.000,00)	94,34	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05.1.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.398.000,00	25.850.000,00	(1.548.000,00)	94,34	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05.1.01.0006		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	101.823.400,00	101.810.600,00	(12.800,00)	99,98	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	101.823.400,00	101.810.600,00	(12.800,00)	99,98	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.823.400,00	101.810.600,00	(12.800,00)	99,98	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05.1.01.0009		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.862.363.300,00	2.837.414.080,00	(24.949.220,00)	99,12	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.862.363.300,00	2.837.414.080,00	(24.949.220,00)	99,12	
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.862.363.300,00	2.837.414.080,00	(24.949.220,00)	99,12	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000		5	BELANJA DAERAH	12.188.019.824,00	12.037.615.911,00	(150.403.913,00)	98,76	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	740.060.150,00	734.076.575,00	(5.983.575,00)	99,19	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	134.984.150,00	132.864.230,00	(2.119.920,00)	98,42	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.01.0008		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	79.387.950,00	79.146.600,00	(241.350,00)	99,69	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	79.387.950,00	79.146.600,00	(241.350,00)	99,69	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.387.950,00	79.146.600,00	(241.350,00)	99,69	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.01.0010		Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	55.596.200,00	53.717.630,00	(1.878.570,00)	96,62	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	55.596.200,00	53.717.630,00	(1.878.570,00)	96,62	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.596.200,00	53.717.630,00	(1.878.570,00)	96,62	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	127.540.000,00	126.955.760,00	(584.240,00)	99,54	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.02.0008		Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	127.540.000,00	126.955.760,00	(584.240,00)	99,54	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	127.540.000,00	126.955.760,00	(584.240,00)	99,54	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.540.000,00	126.955.760,00	(584.240,00)	99,54	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	477.536.000,00	474.256.585,00	(3.279.415,00)	99,31	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.04.0001		Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	282.856.000,00	280.058.750,00	(2.797.250,00)	99,01	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	282.856.000,00	280.058.750,00	(2.797.250,00)	99,01	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.856.000,00	280.058.750,00	(2.797.250,00)	99,01	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.04.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	194.680.000,00	194.197.835,00	(482.165,00)	99,75	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	194.680.000,00	194.197.835,00	(482.165,00)	99,75	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.680.000,00	194.197.835,00	(482.165,00)	99,75	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.508.830.300,00	1.506.033.360,00	(2.796.940,00)	99,81	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.04.1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	45.680.000,00	45.499.200,00	(180.800,00)	99,60	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.04.1.01.0001		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	45.680.000,00	45.499.200,00	(180.800,00)	99,60	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.680.000,00	45.499.200,00	(180.800,00)	99,60	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.680.000,00	45.499.200,00	(180.800,00)	99,60	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.04.1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	1.463.150.300,00	1.460.534.160,00	(2.616.140,00)	99,82	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.04.1.02.0002		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.396.396.000,00	1.394.020.800,00	(2.375.200,00)	99,82	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.04.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.396.396.000,00	1.394.020.800,00	(2.375.200,00)	99,82	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.04.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.396.396.000,00	1.394.020.800,00	(2.375.200,00)	99,82	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.04.1.02.0004		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	66.754.300,00	66.513.360,00	(240.940,00)	99,63	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.04.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	66.754.300,00	66.513.360,00	(240.940,00)	99,63	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.04.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.754.300,00	66.513.360,00	(240.940,00)	99,63	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	238.995.150,00	238.467.933,00	(527.217,00)	99,77	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.05.1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	238.995.150,00	238.467.933,00	(527.217,00)	99,77	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.05.1.01.0006		Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	189.738.150,00	189.328.132,00	(410.018,00)	99,78	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.05.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	189.738.150,00	189.328.132,00	(410.018,00)	99,78	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.05.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.738.150,00	189.328.132,00	(410.018,00)	99,78	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.05.1.01.0011		Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	49.257.000,00	49.139.801,00	(117.199,00)	99,76	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.05.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	49.257.000,00	49.139.801,00	(117.199,00)	99,76	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.05.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.257.000,00	49.139.801,00	(117.199,00)	99,76	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.700.134.224,00	9.559.038.043,00	(141.096.181,00)	98,54	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	485.366.450,00	484.041.558,00	(1.324.892,00)	99,72	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	485.366.450,00	484.041.558,00	(1.324.892,00)	99,72	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	485.366.450,00	484.041.558,00	(1.324.892,00)	99,72	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.366.450,00	484.041.558,00	(1.324.892,00)	99,72	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.528.491.974,00	7.438.706.354,00	(89.785.620,00)	98,80	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.419.739.224,00	7.330.110.654,00	(89.628.570,00)	98,79	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.419.739.224,00	7.330.110.654,00	(89.628.570,00)	98,79	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.419.739.224,00	7.330.110.654,00	(89.628.570,00)	98,79	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	108.752.750,00	108.595.700,00	(157.050,00)	99,85	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	108.752.750,00	108.595.700,00	(157.050,00)	99,85	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.752.750,00	108.595.700,00	(157.050,00)	99,85	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.445.000,00	54.806.700,00	(638.300,00)	98,84	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.445.000,00	54.806.700,00	(638.300,00)	98,84	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	55.445.000,00	54.806.700,00	(638.300,00)	98,84	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.445.000,00	54.806.700,00	(638.300,00)	98,84	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	952.433.100,00	937.236.525,00	(15.196.575,00)	98,40	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	952.433.100,00	937.236.525,00	(15.196.575,00)	98,40	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	346.133.100,00	332.256.525,00	(13.876.575,00)	95,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.133.100,00	332.256.525,00	(13.876.575,00)	95,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	606.300.000,00	604.980.000,00	(1.320.000,00)	99,78	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	598.800.000,00	597.480.000,00	(1.320.000,00)	99,77	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.06.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	678.397.700,00	644.246.906,00	(34.150.794,00)	94,96	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	678.397.700,00	644.246.906,00	(34.150.794,00)	94,96	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	678.397.700,00	644.246.906,00	(34.150.794,00)	94,96	
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	678.397.700,00	644.246.906,00	(34.150.794,00)	94,96	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000		5	BELANJA DAERAH	27.617.167.298,00	27.441.664.510,00	(175.502.788,00)	99,36	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	63.360.000,00	63.360.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.360.000,00	63.360.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.06.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.06.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.042.280.000,00	1.031.743.140,00	(10.536.860,00)	98,98	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.08.1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	1.042.280.000,00	1.031.743.140,00	(10.536.860,00)	98,98	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.08.1.01.0002		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1.042.280.000,00	1.031.743.140,00	(10.536.860,00)	98,98	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.08.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.042.280.000,00	1.031.743.140,00	(10.536.860,00)	98,98	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.08.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.042.280.000,00	1.031.743.140,00	(10.536.860,00)	98,98	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.09.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.09.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.390.087.298,00	26.225.121.370,00	(164.965.928,00)	99,37	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	698.344.547,00	695.661.686,00	(2.682.861,00)	99,61	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	416.184.252,00	415.822.911,00	(361.341,00)	99,91	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	416.184.252,00	415.822.911,00	(361.341,00)	99,91	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.184.252,00	415.822.911,00	(361.341,00)	99,91	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	282.160.295,00	279.838.775,00	(2.321.520,00)	99,17	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	239.415.295,00	239.288.775,00	(126.520,00)	99,94	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.415.295,00	239.288.775,00	(126.520,00)	99,94	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	42.745.000,00	40.550.000,00	(2.195.000,00)	94,86	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.745.000,00	40.550.000,00	(2.195.000,00)	94,86	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.657.038.078,00	23.559.779.730,00	(97.258.348,00)	99,58	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.491.638.078,00	23.394.427.706,00	(97.210.372,00)	99,58	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.491.638.078,00	23.394.427.706,00	(97.210.372,00)	99,58	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	23.491.638.078,00	23.394.427.706,00	(97.210.372,00)	99,58	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	165.400.000,00	165.352.024,00	(47.976,00)	99,97	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	165.400.000,00	165.352.024,00	(47.976,00)	99,97	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.400.000,00	165.352.024,00	(47.976,00)	99,97	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	516.841.173,00	514.497.564,00	(2.343.609,00)	99,54	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.863.923,00	129.194.265,00	(1.669.658,00)	98,72	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	67.196.799,00	66.006.265,00	(1.190.534,00)	98,22	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.196.799,00	66.006.265,00	(1.190.534,00)	98,22	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	63.667.124,00	63.188.000,00	(479.124,00)	99,24	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.667.124,00	63.188.000,00	(479.124,00)	99,24	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.177.257,00	31.177.025,00	(232,00)	99,99	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	31.177.257,00	31.177.025,00	(232,00)	99,99	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.177.257,00	31.177.025,00	(232,00)	99,99	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	104.100.000,00	104.099.274,00	(726,00)	99,99	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	104.100.000,00	104.099.274,00	(726,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.100.000,00	104.099.274,00	(726,00)	99,99	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.699.993,00	250.027.000,00	(672.993,00)	99,73	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	250.699.993,00	250.027.000,00	(672.993,00)	99,73	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.699.993,00	250.027.000,00	(672.993,00)	99,73	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	731.903.500,00	693.896.815,00	(38.006.685,00)	94,80	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.103.500,00	149.186.815,00	(37.916.685,00)	79,73	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	187.103.500,00	149.186.815,00	(37.916.685,00)	79,73	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.103.500,00	149.186.815,00	(37.916.685,00)	79,73	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	544.800.000,00	544.710.000,00	(90.000,00)	99,98	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	544.800.000,00	544.710.000,00	(90.000,00)	99,98	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.800.000,00	544.710.000,00	(90.000,00)	99,98	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	785.960.000,00	761.285.575,00	(24.674.425,00)	96,86	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	773.970.000,00	749.295.575,00	(24.674.425,00)	96,81	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	773.970.000,00	749.295.575,00	(24.674.425,00)	96,81	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	773.970.000,00	749.295.575,00	(24.674.425,00)	96,81	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.990.000,00	11.990.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.990.000,00	11.990.000,00	0,00	100,00	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**
Organisasi : **Dinas Perhubungan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000		5	BELANJA DAERAH	15.756.883.780,00	15.056.856.361,38	(700.027.418,62)	95,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.232.012.615,00	6.596.428.469,48	(635.584.145,52)	91,21	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	155.086.000,00	132.517.173,00	(22.568.827,00)	85,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.02.0002		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	155.086.000,00	132.517.173,00	(22.568.827,00)	85,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	155.086.000,00	132.517.173,00	(22.568.827,00)	85,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.086.000,00	132.517.173,00	(22.568.827,00)	85,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	4.661.766.702,00	4.061.842.606,48	(599.924.095,52)	87,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.03.0010		Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	4.661.766.702,00	4.061.842.606,48	(599.924.095,52)	87,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.03.0010	5.1	BELANJA OPERASI	209.500.000,00	209.260.000,00	(240.000,00)	99,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.03.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.500.000,00	209.260.000,00	(240.000,00)	99,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.03.0010	5.2	BELANJA MODAL	4.452.266.702,00	3.852.582.606,48	(599.684.095,52)	86,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.03.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.452.266.702,00	3.852.582.606,48	(599.684.095,52)	86,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	848.074.913,00	845.955.480,00	(2.119.433,00)	99,75	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.05.0001		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	487.942.000,00	486.692.800,00	(1.249.200,00)	99,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	487.942.000,00	486.692.800,00	(1.249.200,00)	99,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.942.000,00	486.692.800,00	(1.249.200,00)	99,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.05.0007		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	360.132.913,00	359.262.680,00	(870.233,00)	99,75	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.05.0007	5.1	BELANJA OPERASI	232.730.000,00	232.355.000,00	(375.000,00)	99,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.05.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.730.000,00	232.355.000,00	(375.000,00)	99,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.05.0007	5.2	BELANJA MODAL	127.402.913,00	126.907.680,00	(495.233,00)	99,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.05.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.402.913,00	126.907.680,00	(495.233,00)	99,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.552.085.000,00	1.541.131.210,00	(10.953.790,00)	99,29	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.08.0002		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	138.490.000,00	138.486.000,00	(4.000,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	138.490.000,00	138.486.000,00	(4.000,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.490.000,00	138.486.000,00	(4.000,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.08.0003		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.413.595.000,00	1.402.645.210,00	(10.949.790,00)	99,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.413.595.000,00	1.402.645.210,00	(10.949.790,00)	99,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.413.595.000,00	1.402.645.210,00	(10.949.790,00)	99,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	15.000.000,00	14.982.000,00	(18.000,00)	99,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.13.0001		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.000.000,00	14.982.000,00	(18.000,00)	99,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.982.000,00	(18.000,00)	99,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.982.000,00	(18.000,00)	99,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	138.168.400,00	137.818.200,00	(350.200,00)	99,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.03.1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	138.168.400,00	137.818.200,00	(350.200,00)	99,74	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.03.1.06.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	138.168.400,00	137.818.200,00	(350.200,00)	99,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.03.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	138.168.400,00	137.818.200,00	(350.200,00)	99,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.03.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.168.400,00	137.818.200,00	(350.200,00)	99,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.386.702.765,00	8.322.609.691,90	(64.093.073,10)	99,23	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	709.042.000,00	706.832.581,00	(2.209.419,00)	99,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	709.042.000,00	706.832.581,00	(2.209.419,00)	99,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	709.042.000,00	706.832.581,00	(2.209.419,00)	99,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	709.042.000,00	706.832.581,00	(2.209.419,00)	99,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.460.410.790,00	6.425.828.868,00	(34.581.922,00)	99,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.383.725.790,00	6.349.155.393,00	(34.570.397,00)	99,45	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.383.725.790,00	6.349.155.393,00	(34.570.397,00)	99,45	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.383.725.790,00	6.349.155.393,00	(34.570.397,00)	99,45	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	76.685.000,00	76.673.475,00	(11.525,00)	99,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	76.685.000,00	76.673.475,00	(11.525,00)	99,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.685.000,00	76.673.475,00	(11.525,00)	99,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	176.289.000,00	173.854.452,00	(2.434.548,00)	98,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	176.289.000,00	173.854.452,00	(2.434.548,00)	98,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	176.289.000,00	173.854.452,00	(2.434.548,00)	98,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.289.000,00	173.854.452,00	(2.434.548,00)	98,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	567.566.000,00	552.433.984,90	(15.132.015,10)	97,33	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	567.566.000,00	552.433.984,90	(15.132.015,10)	97,33	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	550.977.000,00	536.733.984,90	(14.243.015,10)	97,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.977.000,00	536.733.984,90	(14.243.015,10)	97,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	16.589.000,00	15.700.000,00	(889.000,00)	94,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.589.000,00	15.700.000,00	(889.000,00)	94,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.394.975,00	463.659.806,00	(9.735.169,00)	97,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	473.394.975,00	463.659.806,00	(9.735.169,00)	97,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	473.394.975,00	463.659.806,00	(9.735.169,00)	97,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.394.975,00	463.659.806,00	(9.735.169,00)	97,94	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.16.2.20.2.21.26.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	75.665.176,00	75.665.176,00	0,00	
	2.16.2.20.2.21.26.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	75.665.176,00	75.665.176,00	0,00	
	2.16.2.20.2.21.26.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	75.665.176,00	75.665.176,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000		5	BELANJA DAERAH	15.970.218.614,00	15.809.055.579,00	(161.163.035,00)	98,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.855.742.500,00	4.829.812.479,00	(25.930.021,00)	99,46	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02.1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	4.855.742.500,00	4.829.812.479,00	(25.930.021,00)	99,46	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02.1.01.0004		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	587.752.000,00	587.662.000,00	(90.000,00)	99,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	587.752.000,00	587.662.000,00	(90.000,00)	99,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	587.752.000,00	587.662.000,00	(90.000,00)	99,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02.1.01.0005		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	740.331.950,00	735.859.452,00	(4.472.498,00)	99,39	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	740.331.950,00	735.859.452,00	(4.472.498,00)	99,39	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.331.950,00	735.859.452,00	(4.472.498,00)	99,39	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02.1.01.0011		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.661.074.000,00	1.660.059.830,00	(1.014.170,00)	99,93	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.661.074.000,00	1.660.059.830,00	(1.014.170,00)	99,93	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.074.000,00	210.059.830,00	(1.014.170,00)	99,51	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02.1.01.0011	5.1.05	Belanja Hibah	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02.1.01.0012		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.866.584.550,00	1.846.231.197,00	(20.353.353,00)	98,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.866.584.550,00	1.846.231.197,00	(20.353.353,00)	98,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.866.584.550,00	1.846.231.197,00	(20.353.353,00)	98,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.781.373.200,00	2.768.264.214,00	(13.108.986,00)	99,52	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.03.1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	186.000.000,00	175.954.240,00	(10.045.760,00)	94,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.03.1.01.0002		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	186.000.000,00	175.954.240,00	(10.045.760,00)	94,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	186.000.000,00	175.954.240,00	(10.045.760,00)	94,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.000.000,00	175.954.240,00	(10.045.760,00)	94,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.03.1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.595.373.200,00	2.592.309.974,00	(3.063.226,00)	99,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.03.1.02.0001		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	184.800.100,00	181.929.317,00	(2.870.783,00)	98,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	184.800.100,00	181.929.317,00	(2.870.783,00)	98,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.800.100,00	181.929.317,00	(2.870.783,00)	98,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.03.1.02.0010		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2.410.573.100,00	2.410.380.657,00	(192.443,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.03.1.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.350.573.100,00	2.350.380.657,00	(192.443,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.03.1.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.350.573.100,00	2.350.380.657,00	(192.443,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.03.1.02.0010	5.2	BELANJA MODAL	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.03.1.02.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.333.102.914,00	8.210.978.886,00	(122.124.028,00)	98,53	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	488.930.200,00	488.524.856,00	(405.344,00)	99,91	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	339.676.100,00	339.446.773,00	(229.327,00)	99,93	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	339.676.100,00	339.446.773,00	(229.327,00)	99,93	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.676.100,00	339.446.773,00	(229.327,00)	99,93	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.254.100,00	149.078.083,00	(176.017,00)	99,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	149.254.100,00	149.078.083,00	(176.017,00)	99,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.254.100,00	149.078.083,00	(176.017,00)	99,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.221.126.333,00	5.204.852.689,00	(16.273.644,00)	99,68	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.024.109.333,00	5.008.017.598,00	(16.091.735,00)	99,67	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.024.109.333,00	5.008.017.598,00	(16.091.735,00)	99,67	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.024.109.333,00	5.008.017.598,00	(16.091.735,00)	99,67	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	197.017.000,00	196.835.091,00	(181.909,00)	99,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	197.017.000,00	196.835.091,00	(181.909,00)	99,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.017.000,00	196.835.091,00	(181.909,00)	99,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.421.320,00	89.386.146,00	(10.035.174,00)	89,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.421.320,00	89.386.146,00	(10.035.174,00)	89,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	99.421.320,00	89.386.146,00	(10.035.174,00)	89,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.421.320,00	89.386.146,00	(10.035.174,00)	89,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.184.991.740,00	1.145.239.593,00	(39.752.147,00)	96,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.184.991.740,00	1.145.239.593,00	(39.752.147,00)	96,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.144.991.740,00	1.105.301.793,00	(39.689.947,00)	96,53	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.144.991.740,00	1.105.301.793,00	(39.689.947,00)	96,53	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	40.000.000,00	39.937.800,00	(62.200,00)	99,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	39.937.800,00	(62.200,00)	99,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.338.633.321,00	1.282.975.602,00	(55.657.719,00)	95,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.338.633.321,00	1.282.975.602,00	(55.657.719,00)	95,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.338.633.321,00	1.282.975.602,00	(55.657.719,00)	95,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.338.633.321,00	1.282.975.602,00	(55.657.719,00)	95,84	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**
Organisasi : **Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.16.2.20.2.21.26.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	75.665.176,00	75.665.176,00	0,00	
	2.16.2.20.2.21.26.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	75.665.176,00	75.665.176,00	0,00	
	2.16.2.20.2.21.26.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	75.665.176,00	75.665.176,00	0,00	
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000		5	BELANJA DAERAH	518.299.850,00	508.655.343,00	(9.644.507,00)	98,13	
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	518.299.850,00	508.655.343,00	(9.644.507,00)	98,13	
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.20.02.1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	518.299.850,00	508.655.343,00	(9.644.507,00)	98,13	
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.20.02.1.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	332.556.550,00	332.149.484,00	(407.066,00)	99,87	
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.20.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	332.556.550,00	332.149.484,00	(407.066,00)	99,87	
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.20.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.556.550,00	332.149.484,00	(407.066,00)	99,87	
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.20.02.1.01.0003		Membangun Metadata Statistik Sektoral	82.937.800,00	73.802.509,00	(9.135.291,00)	88,98	
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.20.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	82.937.800,00	73.802.509,00	(9.135.291,00)	88,98	
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.20.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.937.800,00	73.802.509,00	(9.135.291,00)	88,98	
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.20.02.1.01.0004		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	102.805.500,00	102.703.350,00	(102.150,00)	99,90	
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.20.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	102.805.500,00	102.703.350,00	(102.150,00)	99,90	
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.20.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.805.500,00	102.703.350,00	(102.150,00)	99,90	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Organisasi : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.16.2.20.2.21.26.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	75.665.176,00	75.665.176,00	0,00	
	2.16.2.20.2.21.26.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	75.665.176,00	75.665.176,00	0,00	
	2.16.2.20.2.21.26.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	75.665.176,00	75.665.176,00	0,00	
2.21	2.16.2.20.2.21.26.0000		5	BELANJA DAERAH	122.090.000,00	121.725.605,00	(364.395,00)	99,70	
2.21	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	122.090.000,00	121.725.605,00	(364.395,00)	99,70	
2.21	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.21.02.1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	122.090.000,00	121.725.605,00	(364.395,00)	99,70	
2.21	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.21.02.1.01.0003		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	122.090.000,00	121.725.605,00	(364.395,00)	99,70	
2.21	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.21.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	122.090.000,00	121.725.605,00	(364.395,00)	99,70	
2.21	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.21.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.090.000,00	121.725.605,00	(364.395,00)	99,70	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000		5		BELANJA DAERAH	31.200.339.016,00	31.055.710.021,00	(144.628.995,00)	99,53	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	77.755.475,00	77.523.325,00	(232.150,00)	99,70	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.03.1.02			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	77.755.475,00	77.523.325,00	(232.150,00)	99,70	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.03.1.02.0002			Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	77.755.475,00	77.523.325,00	(232.150,00)	99,70	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.03.1.02.0002	5.1		BELANJA OPERASI	77.755.475,00	77.523.325,00	(232.150,00)	99,70	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.03.1.02.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	77.755.475,00	77.523.325,00	(232.150,00)	99,70	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.649.855.250,00	1.574.724.942,00	(75.130.308,00)	95,44	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.05.1.01			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.649.855.250,00	1.574.724.942,00	(75.130.308,00)	95,44	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.05.1.01.0001			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.649.855.250,00	1.574.724.942,00	(75.130.308,00)	95,44	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.05.1.01.0001	5.1		BELANJA OPERASI	1.649.855.250,00	1.574.724.942,00	(75.130.308,00)	95,44	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.05.1.01.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	1.649.855.250,00	1.574.724.942,00	(75.130.308,00)	95,44	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	675.696.750,00	674.952.700,00	(744.050,00)	99,88	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.06.1.01			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	675.696.750,00	674.952.700,00	(744.050,00)	99,88	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.06.1.01.0002			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	675.696.750,00	674.952.700,00	(744.050,00)	99,88	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.06.1.01.0002	5.1		BELANJA OPERASI	675.696.750,00	674.952.700,00	(744.050,00)	99,88	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.06.1.01.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	75.696.750,00	74.952.700,00	(744.050,00)	99,01	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.06.1.01.0002	5.1.05		Belanja Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.293.583.250,00	1.275.335.035,00	(18.248.215,00)	98,58	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.07.1.01			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1.293.583.250,00	1.275.335.035,00	(18.248.215,00)	98,58	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.07.1.01.0001			Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	158.400.000,00	157.908.000,00	(492.000,00)	99,68	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.07.1.01.0001	5.1		BELANJA OPERASI	158.400.000,00	157.908.000,00	(492.000,00)	99,68	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.07.1.01.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	158.400.000,00	157.908.000,00	(492.000,00)	99,68	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.07.1.01.0002			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	1.135.183.250,00	1.117.427.035,00	(17.756.215,00)	98,43	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.07.1.01.0002	5.1		BELANJA OPERASI	1.135.183.250,00	1.117.427.035,00	(17.756.215,00)	98,43	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.07.1.01.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	1.135.183.250,00	1.117.427.035,00	(17.756.215,00)	98,43	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	15.115.145.000,00	15.114.181.261,00	(963.739,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.08.1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	15.115.145.000,00	15.114.181.261,00	(963.739,00)	99,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.08.1.01.0001		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	15.115.145.000,00	15.114.181.261,00	(963.739,00)	99,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.08.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.115.145.000,00	15.114.181.261,00	(963.739,00)	99,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.08.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.115.145.000,00	15.114.181.261,00	(963.739,00)	99,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.388.303.291,00	12.338.992.758,00	(49.310.533,00)	99,60	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	489.736.075,00	488.758.974,00	(977.101,00)	99,80	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	271.551.075,00	270.838.678,00	(712.397,00)	99,73	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	271.551.075,00	270.838.678,00	(712.397,00)	99,73	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.551.075,00	270.838.678,00	(712.397,00)	99,73	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	218.185.000,00	217.920.296,00	(264.704,00)	99,87	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	218.185.000,00	217.920.296,00	(264.704,00)	99,87	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.185.000,00	217.920.296,00	(264.704,00)	99,87	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.753.272.966,00	9.721.559.062,00	(31.713.904,00)	99,67	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.691.630.216,00	9.659.965.973,00	(31.664.243,00)	99,67	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.691.630.216,00	9.659.965.973,00	(31.664.243,00)	99,67	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.691.630.216,00	9.659.965.973,00	(31.664.243,00)	99,67	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	61.642.750,00	61.593.089,00	(49.661,00)	99,91	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	61.642.750,00	61.593.089,00	(49.661,00)	99,91	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.642.750,00	61.593.089,00	(49.661,00)	99,91	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	469.510.000,00	468.234.790,00	(1.275.210,00)	99,72	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	469.510.000,00	468.234.790,00	(1.275.210,00)	99,72	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	469.510.000,00	468.234.790,00	(1.275.210,00)	99,72	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.510.000,00	468.234.790,00	(1.275.210,00)	99,72	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.675.784.250,00	1.660.439.932,00	(15.344.318,00)	99,08	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.675.784.250,00	1.660.439.932,00	(15.344.318,00)	99,08	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.675.784.250,00	1.660.439.932,00	(15.344.318,00)	99,08	
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.675.784.250,00	1.660.439.932,00	(15.344.318,00)	99,08	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	9.930.199.349,00	9.719.802.849,00	(210.396.500,00)	97,88	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	391.922.000,00	369.154.482,00	(22.767.518,00)	94,19	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	391.922.000,00	369.154.482,00	(22.767.518,00)	94,19	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.1.02.0005		Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	391.922.000,00	369.154.482,00	(22.767.518,00)	94,19	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	391.922.000,00	369.154.482,00	(22.767.518,00)	94,19	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.922.000,00	369.154.482,00	(22.767.518,00)	94,19	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	199.999.775,00	198.115.544,00	(1.884.231,00)	99,05	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	199.999.775,00	198.115.544,00	(1.884.231,00)	99,05	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.1.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	199.999.775,00	198.115.544,00	(1.884.231,00)	99,05	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	199.999.775,00	198.115.544,00	(1.884.231,00)	99,05	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.775,00	198.115.544,00	(1.884.231,00)	99,05	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	388.497.600,00	388.384.972,00	(112.628,00)	99,97	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	388.497.600,00	388.384.972,00	(112.628,00)	99,97	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.01.0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	261.311.400,00	261.233.480,00	(77.920,00)	99,97	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	261.311.400,00	261.233.480,00	(77.920,00)	99,97	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.311.400,00	261.233.480,00	(77.920,00)	99,97	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.01.0007		Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	127.186.200,00	127.151.492,00	(34.708,00)	99,97	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	127.186.200,00	127.151.492,00	(34.708,00)	99,97	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.186.200,00	127.151.492,00	(34.708,00)	99,97	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.561.629.650,00	1.518.074.534,00	(43.555.116,00)	97,21	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.561.629.650,00	1.518.074.534,00	(43.555.116,00)	97,21	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0004		Pengawasan Penanaman Modal	557.780.650,00	553.715.624,00	(4.065.026,00)	99,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	557.780.650,00	553.715.624,00	(4.065.026,00)	99,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	557.780.650,00	553.715.624,00	(4.065.026,00)	99,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0005		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	214.938.000,00	213.629.208,00	(1.308.792,00)	99,39	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	214.938.000,00	213.629.208,00	(1.308.792,00)	99,39	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.938.000,00	213.629.208,00	(1.308.792,00)	99,39	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0006		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	788.911.000,00	750.729.702,00	(38.181.298,00)	95,16	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	788.911.000,00	750.729.702,00	(38.181.298,00)	95,16	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	788.911.000,00	750.729.702,00	(38.181.298,00)	95,16	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	196.679.600,00	196.419.820,00	(259.780,00)	99,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	196.679.600,00	196.419.820,00	(259.780,00)	99,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.1.01.0002		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	196.679.600,00	196.419.820,00	(259.780,00)	99,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	196.679.600,00	196.419.820,00	(259.780,00)	99,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.679.600,00	196.419.820,00	(259.780,00)	99,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.191.470.724,00	7.049.653.497,00	(141.817.227,00)	98,02	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	464.154.800,00	453.529.328,00	(10.625.472,00)	97,71	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	174.106.000,00	164.444.570,00	(9.661.430,00)	94,45	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	174.106.000,00	164.444.570,00	(9.661.430,00)	94,45	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.106.000,00	164.444.570,00	(9.661.430,00)	94,45	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	290.048.800,00	289.084.758,00	(964.042,00)	99,66	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	290.048.800,00	289.084.758,00	(964.042,00)	99,66	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.048.800,00	289.084.758,00	(964.042,00)	99,66	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.606.123.109,00	5.511.686.241,00	(94.436.868,00)	98,31	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.550.859.109,00	5.456.845.300,00	(94.013.809,00)	98,30	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.550.859.109,00	5.456.845.300,00	(94.013.809,00)	98,30	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.550.859.109,00	5.456.845.300,00	(94.013.809,00)	98,30	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.264.000,00	54.840.941,00	(423.059,00)	99,23	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	55.264.000,00	54.840.941,00	(423.059,00)	99,23	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.264.000,00	54.840.941,00	(423.059,00)	99,23	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.736.000,00	42.545.886,00	(2.190.114,00)	95,10	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44.736.000,00	42.545.886,00	(2.190.114,00)	95,10	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	44.736.000,00	42.545.886,00	(2.190.114,00)	95,10	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.736.000,00	42.545.886,00	(2.190.114,00)	95,10	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	359.316.115,00	353.086.062,00	(6.230.053,00)	98,26	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	359.316.115,00	353.086.062,00	(6.230.053,00)	98,26	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	259.486.315,00	253.399.062,00	(6.087.253,00)	97,65	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.486.315,00	253.399.062,00	(6.087.253,00)	97,65	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	99.829.800,00	99.687.000,00	(142.800,00)	99,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.829.800,00	99.687.000,00	(142.800,00)	99,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	717.140.700,00	688.805.980,00	(28.334.720,00)	96,04	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	717.140.700,00	688.805.980,00	(28.334.720,00)	96,04	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	717.140.700,00	688.805.980,00	(28.334.720,00)	96,04	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	717.140.700,00	688.805.980,00	(28.334.720,00)	96,04	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
Organisasi : **Dinas Pemuda dan Olahraga**

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		5		BELANJA DAERAH	41.417.771.672,00	41.153.215.286,00	(264.556.386,00)	99,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.091.149.121,00	2.050.731.319,00	(40.417.802,00)	98,06	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.1.02			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	2.091.149.121,00	2.050.731.319,00	(40.417.802,00)	98,06	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.1.02.0004			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	2.091.149.121,00	2.050.731.319,00	(40.417.802,00)	98,06	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.1.02.0004	5.1		BELANJA OPERASI	2.091.149.121,00	2.050.731.319,00	(40.417.802,00)	98,06	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.1.02.0004	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	651.149.121,00	650.731.319,00	(417.802,00)	99,93	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.1.02.0004	5.1.05		Belanja Hibah	1.440.000.000,00	1.400.000.000,00	(40.000.000,00)	97,22	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	32.280.887.455,00	32.144.998.167,00	(135.889.288,00)	99,57	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.01			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	310.729.748,00	301.730.229,00	(8.999.519,00)	97,10	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.01.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	310.729.748,00	301.730.229,00	(8.999.519,00)	97,10	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.01.0001	5.1		BELANJA OPERASI	310.729.748,00	301.730.229,00	(8.999.519,00)	97,10	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.01.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	310.729.748,00	301.730.229,00	(8.999.519,00)	97,10	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.03			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	4.538.851.407,00	4.418.775.323,00	(120.076.084,00)	97,35	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.03.0009			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	4.538.851.407,00	4.418.775.323,00	(120.076.084,00)	97,35	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.03.0009	5.1		BELANJA OPERASI	4.538.851.407,00	4.418.775.323,00	(120.076.084,00)	97,35	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.03.0009	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	4.538.851.407,00	4.418.775.323,00	(120.076.084,00)	97,35	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.04			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	27.431.306.300,00	27.424.492.615,00	(6.813.685,00)	99,97	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.04.0003			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	27.431.306.300,00	27.424.492.615,00	(6.813.685,00)	99,97	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.04.0003	5.1		BELANJA OPERASI	27.431.306.300,00	27.424.492.615,00	(6.813.685,00)	99,97	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.04.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	316.306.300,00	309.492.615,00	(6.813.685,00)	97,84	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.04.0003	5.1.05		Belanja Hibah	27.115.000.000,00	27.115.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.045.735.096,00	6.957.485.800,00	(88.249.296,00)	98,74	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	401.878.800,00	401.584.432,00	(294.368,00)	99,92	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	401.878.800,00	401.584.432,00	(294.368,00)	99,92	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.01.0001	5.1		BELANJA OPERASI	401.878.800,00	401.584.432,00	(294.368,00)	99,92	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.01.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	401.878.800,00	401.584.432,00	(294.368,00)	99,92	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.051.282.296,00	5.003.291.017,00	(47.991.279,00)	99,04	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.035.571.672,00	4.987.580.393,00	(47.991.279,00)	99,04	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	5.035.571.672,00	4.987.580.393,00	(47.991.279,00)	99,04	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.035.571.672,00	4.987.580.393,00	(47.991.279,00)	99,04	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.710.624,00	15.710.624,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.710.624,00	15.710.624,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.000.000,00	223.410.500,00	(6.589.500,00)	97,13	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	230.000.000,00	223.410.500,00	(6.589.500,00)	97,13	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	158.222.000,00	(1.778.000,00)	98,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	158.222.000,00	(1.778.000,00)	98,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	70.000.000,00	65.188.500,00	(4.811.500,00)	93,12	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	65.188.500,00	(4.811.500,00)	93,12	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.362.574.000,00	1.329.199.851,00	(33.374.149,00)	97,55	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.362.574.000,00	1.329.199.851,00	(33.374.149,00)	97,55	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.362.574.000,00	1.329.199.851,00	(33.374.149,00)	97,55	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.362.574.000,00	1.329.199.851,00	(33.374.149,00)	97,55	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**
Organisasi : **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000		5	BELANJA DAERAH	511.442.700,00	495.560.785,00	(15.881.915,00)	96,89	
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	413.011.100,00	398.830.165,00	(14.180.935,00)	96,56	
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.02.1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	319.456.425,00	309.646.650,00	(9.809.775,00)	96,92	
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.02.1.01.0003		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	319.456.425,00	309.646.650,00	(9.809.775,00)	96,92	
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	319.456.425,00	309.646.650,00	(9.809.775,00)	96,92	
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.456.425,00	309.646.650,00	(9.809.775,00)	96,92	
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.02.1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	93.554.675,00	89.183.515,00	(4.371.160,00)	95,32	
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.02.1.02.0005		Akuisisi Arsip Statis	93.554.675,00	89.183.515,00	(4.371.160,00)	95,32	
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	93.554.675,00	89.183.515,00	(4.371.160,00)	95,32	
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.554.675,00	89.183.515,00	(4.371.160,00)	95,32	
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	98.431.600,00	96.730.620,00	(1.700.980,00)	98,27	
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.03.1.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	58.837.500,00	58.567.220,00	(270.280,00)	99,54	
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.03.1.02.0001		Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	58.837.500,00	58.567.220,00	(270.280,00)	99,54	
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.837.500,00	58.567.220,00	(270.280,00)	99,54	
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.837.500,00	58.567.220,00	(270.280,00)	99,54	
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.03.1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	39.594.100,00	38.163.400,00	(1.430.700,00)	96,38	
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.03.1.03.0001		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	39.594.100,00	38.163.400,00	(1.430.700,00)	96,38	
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.03.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.594.100,00	38.163.400,00	(1.430.700,00)	96,38	
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.03.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.594.100,00	38.163.400,00	(1.430.700,00)	96,38	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**
Organisasi : **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000		5	BELANJA DAERAH	9.514.459.822,00	9.411.890.000,00	(102.569.822,00)	98,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	354.742.800,00	354.004.261,00	(738.539,00)	99,79	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.02.1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	74.975.050,00	74.959.870,00	(15.180,00)	99,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.02.1.01.0006		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	74.975.050,00	74.959.870,00	(15.180,00)	99,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	74.975.050,00	74.959.870,00	(15.180,00)	99,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.975.050,00	74.959.870,00	(15.180,00)	99,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.02.1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	279.767.750,00	279.044.391,00	(723.359,00)	99,74	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.02.1.02.0004		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	279.767.750,00	279.044.391,00	(723.359,00)	99,74	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	279.767.750,00	279.044.391,00	(723.359,00)	99,74	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.767.750,00	279.044.391,00	(723.359,00)	99,74	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	152.630.675,00	151.192.848,00	(1.437.827,00)	99,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.03.1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	152.630.675,00	151.192.848,00	(1.437.827,00)	99,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.03.1.02.0001		Penerbitan Katalog Induk Daerah	152.630.675,00	151.192.848,00	(1.437.827,00)	99,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	83.002.675,00	82.692.848,00	(309.827,00)	99,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.002.675,00	82.692.848,00	(309.827,00)	99,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.03.1.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	69.628.000,00	68.500.000,00	(1.128.000,00)	98,37	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.03.1.02.0001	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	69.628.000,00	68.500.000,00	(1.128.000,00)	98,37	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.007.086.347,00	8.906.692.891,00	(100.393.456,00)	98,88	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	231.398.850,00	230.897.578,00	(501.272,00)	99,78	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	231.398.850,00	230.897.578,00	(501.272,00)	99,78	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	231.398.850,00	230.897.578,00	(501.272,00)	99,78	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.398.850,00	230.897.578,00	(501.272,00)	99,78	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.389.171.933,00	7.301.778.388,00	(87.393.545,00)	98,81	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.339.171.983,00	7.252.655.166,00	(86.516.817,00)	98,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.339.171.983,00	7.252.655.166,00	(86.516.817,00)	98,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.339.171.983,00	7.252.655.166,00	(86.516.817,00)	98,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	49.999.950,00	49.123.222,00	(876.728,00)	98,24	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	49.999.950,00	49.123.222,00	(876.728,00)	98,24	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.950,00	49.123.222,00	(876.728,00)	98,24	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.913.500,00	182.892.700,00	(5.020.800,00)	97,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	187.913.500,00	182.892.700,00	(5.020.800,00)	97,32	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	120.500.000,00	119.492.700,00	(1.007.300,00)	99,16	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.500.000,00	119.492.700,00	(1.007.300,00)	99,16	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	67.413.500,00	63.400.000,00	(4.013.500,00)	94,04	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.413.500,00	63.400.000,00	(4.013.500,00)	94,04	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.198.602.064,00	1.191.124.225,00	(7.477.839,00)	99,37	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.198.602.064,00	1.191.124.225,00	(7.477.839,00)	99,37	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.198.602.064,00	1.191.124.225,00	(7.477.839,00)	99,37	
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.198.602.064,00	1.191.124.225,00	(7.477.839,00)	99,37	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
Organisasi : **Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000		5	BELANJA DAERAH	811.445.500,00	804.820.449,00	(6.625.051,00)	99,18	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	105.750.000,00	105.708.200,00	(41.800,00)	99,96	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	105.750.000,00	105.708.200,00	(41.800,00)	99,96	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.02.1.03.0003		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	105.750.000,00	105.708.200,00	(41.800,00)	99,96	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.02.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	105.750.000,00	105.708.200,00	(41.800,00)	99,96	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.02.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.750.000,00	105.708.200,00	(41.800,00)	99,96	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	161.960.000,00	161.919.967,00	(40.033,00)	99,97	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.03.1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	161.960.000,00	161.919.967,00	(40.033,00)	99,97	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.03.1.01.0003		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	161.960.000,00	161.919.967,00	(40.033,00)	99,97	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	161.960.000,00	161.919.967,00	(40.033,00)	99,97	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.960.000,00	161.919.967,00	(40.033,00)	99,97	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	146.089.300,00	144.893.099,00	(1.196.201,00)	99,18	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	90.815.300,00	89.855.700,00	(959.600,00)	98,94	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05.1.07.0002		Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	90.815.300,00	89.855.700,00	(959.600,00)	98,94	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05.1.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	90.815.300,00	89.855.700,00	(959.600,00)	98,94	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05.1.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.815.300,00	89.855.700,00	(959.600,00)	98,94	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05.1.08		Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	55.274.000,00	55.037.399,00	(236.601,00)	99,57	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05.1.08.0005		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	55.274.000,00	55.037.399,00	(236.601,00)	99,57	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05.1.08.0005	5.1	BELANJA OPERASI	55.274.000,00	55.037.399,00	(236.601,00)	99,57	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05.1.08.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.274.000,00	55.037.399,00	(236.601,00)	99,57	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	397.646.200,00	392.299.183,00	(5.347.017,00)	98,65	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	56.065.800,00	56.065.500,00	(300,00)	99,99	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.06.1.02.0001		Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	56.065.800,00	56.065.500,00	(300,00)	99,99	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.06.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	56.065.800,00	56.065.500,00	(300,00)	99,99	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.06.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.065.800,00	56.065.500,00	(300,00)	99,99	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	341.580.400,00	336.233.683,00	(5.346.717,00)	98,43	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.06.1.06.0002		Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	341.580.400,00	336.233.683,00	(5.346.717,00)	98,43	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.06.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	341.580.400,00	336.233.683,00	(5.346.717,00)	98,43	
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.06.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.580.400,00	336.233.683,00	(5.346.717,00)	98,43	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**
Organisasi : **Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000		5	BELANJA DAERAH	374.260.000,00	365.191.650,00	(9.068.350,00)	97,57	
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	135.360.000,00	135.110.860,00	(249.140,00)	99,81	
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.03.1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	135.360.000,00	135.110.860,00	(249.140,00)	99,81	
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.03.1.01.0017		Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	135.360.000,00	135.110.860,00	(249.140,00)	99,81	
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.03.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	135.360.000,00	135.110.860,00	(249.140,00)	99,81	
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.03.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.360.000,00	135.110.860,00	(249.140,00)	99,81	
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	238.900.000,00	230.080.790,00	(8.819.210,00)	96,30	
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.04.1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan	238.900.000,00	230.080.790,00	(8.819.210,00)	96,30	
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.04.1.01.0002		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pematapan Satuan Permukiman	238.900.000,00	230.080.790,00	(8.819.210,00)	96,30	
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.04.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	238.900.000,00	230.080.790,00	(8.819.210,00)	96,30	
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.04.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.900.000,00	230.080.790,00	(8.819.210,00)	96,30	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**
Organisasi : **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000		5	BELANJA DAERAH	3.656.980.000,00	3.879.435.463,00	222.455.463,00	106,08	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.534.220.000,00	3.537.626.822,00	3.406.822,00	100,09	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	39.480.000,00	39.480.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.480.000,00	39.480.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.720.000,00	60.720.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.720.000,00	60.720.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.287.500.000,00	3.277.406.822,00	(10.093.178,00)	99,69	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.04.0002		Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	3.287.500.000,00	3.277.406.822,00	(10.093.178,00)	99,69	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.287.500.000,00	3.277.406.822,00	(10.093.178,00)	99,69	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.287.500.000,00	3.277.406.822,00	(10.093.178,00)	99,69	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	30.360.000,00	30.360.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.360.000,00	30.360.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	58.080.000,00	58.080.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.080.000,00	58.080.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.06.0003		Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.080.000,00	58.080.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.080.000,00	58.080.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	29.040.000,00	28.160.000,00	(880.000,00)	96,96	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	29.040.000,00	28.160.000,00	(880.000,00)	96,96	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.05.1.01.0003		Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	29.040.000,00	28.160.000,00	(880.000,00)	96,96	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.05.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.040.000,00	28.160.000,00	(880.000,00)	96,96	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.05.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.040.000,00	28.160.000,00	(880.000,00)	96,96	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	93.720.000,00	93.720.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.720.000,00	93.720.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	219.928.641,00	219.928.641,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	71.411.880,00	71.411.880,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	29.004.880,00	29.004.880,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	29.004.880,00	29.004.880,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	29.004.880,00	29.004.880,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	40.287.000,00	40.287.000,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	40.287.000,00	40.287.000,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	40.287.000,00	40.287.000,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	114.558.796,00	114.558.796,00	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	17.018.796,00	17.018.796,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	17.018.796,00	17.018.796,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.018.796,00	17.018.796,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	97.540.000,00	97.540.000,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	97.540.000,00	97.540.000,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	97.540.000,00	97.540.000,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	33.957.965,00	33.957.965,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	33.957.965,00	33.957.965,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	33.957.965,00	33.957.965,00	0,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	33.957.965,00	33.957.965,00	0,00	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**
Organisasi : **UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001		5	BELANJA DAERAH	1.081.876.689,00	1.033.006.380,00	(48.870.309,00)	95,48	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	843.031.061,00	834.405.480,00	(8.625.581,00)	98,97	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.03.1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	843.031.061,00	834.405.480,00	(8.625.581,00)	98,97	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.03.1.01.0003		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	843.031.061,00	834.405.480,00	(8.625.581,00)	98,97	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	101.641.061,00	101.175.480,00	(465.581,00)	99,54	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.641.061,00	101.175.480,00	(465.581,00)	99,54	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.03.1.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	741.390.000,00	733.230.000,00	(8.160.000,00)	98,89	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.03.1.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	741.390.000,00	733.230.000,00	(8.160.000,00)	98,89	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	238.845.628,00	198.600.900,00	(40.244.728,00)	83,15	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.065.628,00	37.904.458,00	(12.161.170,00)	75,70	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.933.350,00	5.252.900,00	(8.680.450,00)	37,70	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.933.350,00	5.252.900,00	(8.680.450,00)	37,70	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.933.350,00	5.252.900,00	(8.680.450,00)	37,70	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.289.778,00	1.289.778,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.289.778,00	1.289.778,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.842.500,00	31.361.780,00	(3.480.720,00)	90,01	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	34.842.500,00	31.361.780,00	(3.480.720,00)	90,01	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.842.500,00	31.361.780,00	(3.480.720,00)	90,01	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.820.000,00	115.815.600,00	(24.004.400,00)	82,83	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.020.000,00	16.005.600,00	(5.014.400,00)	76,14	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.020.000,00	16.005.600,00	(5.014.400,00)	76,14	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.020.000,00	16.005.600,00	(5.014.400,00)	76,14	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.800.000,00	99.810.000,00	(18.990.000,00)	84,01	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	118.800.000,00	99.810.000,00	(18.990.000,00)	84,01	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.800.000,00	99.810.000,00	(18.990.000,00)	84,01	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.960.000,00	44.880.842,00	(4.079.158,00)	91,66	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.960.000,00	44.880.842,00	(4.079.158,00)	91,66	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	48.960.000,00	44.880.842,00	(4.079.158,00)	91,66	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.960.000,00	44.880.842,00	(4.079.158,00)	91,66	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**
Organisasi : **UPTD KPH Wilayah III Pohuwato**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002		5	BELANJA DAERAH	358.508.626,00	320.888.340,00	(37.620.286,00)	89,50	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	358.508.626,00	320.888.340,00	(37.620.286,00)	89,50	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.117.926,00	185.450.100,00	(9.667.826,00)	95,04	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.852.926,00	149.776.500,00	(76.426,00)	99,94	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	108.660.926,00	108.602.500,00	(58.426,00)	99,94	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.660.926,00	108.602.500,00	(58.426,00)	99,94	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	41.192.000,00	41.174.000,00	(18.000,00)	99,95	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.192.000,00	41.174.000,00	(18.000,00)	99,95	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.875.000,00	6.844.500,00	(30.500,00)	99,55	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.875.000,00	6.844.500,00	(30.500,00)	99,55	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.875.000,00	6.844.500,00	(30.500,00)	99,55	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.290.000,00	27.729.100,00	(9.560.900,00)	74,36	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	37.290.000,00	27.729.100,00	(9.560.900,00)	74,36	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.290.000,00	27.729.100,00	(9.560.900,00)	74,36	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.885.700,00	89.970.200,00	(17.915.500,00)	83,39	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.125.700,00	15.100.200,00	(3.025.500,00)	83,30	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.125.700,00	15.100.200,00	(3.025.500,00)	83,30	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.125.700,00	15.100.200,00	(3.025.500,00)	83,30	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.760.000,00	74.870.000,00	(14.890.000,00)	83,41	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	89.760.000,00	74.870.000,00	(14.890.000,00)	83,41	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.760.000,00	74.870.000,00	(14.890.000,00)	83,41	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.505.000,00	45.468.040,00	(10.036.960,00)	81,91	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.065.000,00	43.068.040,00	(9.996.960,00)	81,16	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.065.000,00	43.068.040,00	(9.996.960,00)	81,16	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.065.000,00	43.068.040,00	(9.996.960,00)	81,16	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.440.000,00	2.400.000,00	(40.000,00)	98,36	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.440.000,00	2.400.000,00	(40.000,00)	98,36	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.440.000,00	2.400.000,00	(40.000,00)	98,36	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**
Organisasi : **UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003		5	BELANJA DAERAH	509.948.580,00	455.177.136,00	(54.771.444,00)	89,25	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	272.132.970,00	253.756.256,00	(18.376.714,00)	93,24	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.03.1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	202.132.970,00	197.259.056,00	(4.873.914,00)	97,58	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.03.1.01.0003		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	202.132.970,00	197.259.056,00	(4.873.914,00)	97,58	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.460.000,00	40.459.056,00	(944,00)	99,99	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.460.000,00	40.459.056,00	(944,00)	99,99	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.03.1.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	161.672.970,00	156.800.000,00	(4.872.970,00)	96,98	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.03.1.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.672.970,00	156.800.000,00	(4.872.970,00)	96,98	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	70.000.000,00	56.497.200,00	(13.502.800,00)	80,71	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.03.1.06.0003		Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	70.000.000,00	56.497.200,00	(13.502.800,00)	80,71	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.03.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	56.497.200,00	(13.502.800,00)	80,71	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.03.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	56.497.200,00	(13.502.800,00)	80,71	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	237.815.610,00	201.420.880,00	(36.394.730,00)	84,69	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.771.425,00	38.899.000,00	(14.872.425,00)	72,34	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.791.425,00	22.788.000,00	(1.003.425,00)	95,78	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.641.425,00	17.638.000,00	(1.003.425,00)	94,61	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.641.425,00	17.638.000,00	(1.003.425,00)	94,61	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	836.000,00	836.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	836.000,00	836.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.144.000,00	15.275.000,00	(13.869.000,00)	52,41	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	29.144.000,00	15.275.000,00	(13.869.000,00)	52,41	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.144.000,00	15.275.000,00	(13.869.000,00)	52,41	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.883.500,00	109.860.600,00	(18.022.900,00)	85,90	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.763.500,00	36.600.600,00	(4.162.900,00)	89,78	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.763.500,00	36.600.600,00	(4.162.900,00)	89,78	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.763.500,00	36.600.600,00	(4.162.900,00)	89,78	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.120.000,00	73.260.000,00	(13.860.000,00)	84,09	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	87.120.000,00	73.260.000,00	(13.860.000,00)	84,09	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.120.000,00	73.260.000,00	(13.860.000,00)	84,09	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.160.685,00	52.661.280,00	(3.499.405,00)	93,76	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.300.685,00	48.801.280,00	(3.499.405,00)	93,30	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.300.685,00	48.801.280,00	(3.499.405,00)	93,30	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.300.685,00	48.801.280,00	(3.499.405,00)	93,30	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	100,00	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**
Organisasi : **UPTD KPH Wilayah V Boalemo**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004		5	BELANJA DAERAH	459.073.700,00	410.325.120,00	(48.748.580,00)	89,38	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	149.995.000,00	149.906.175,00	(88.825,00)	99,94	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	149.995.000,00	149.906.175,00	(88.825,00)	99,94	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.03.1.06.0003		Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	149.995.000,00	149.906.175,00	(88.825,00)	99,94	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.03.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	149.995.000,00	149.906.175,00	(88.825,00)	99,94	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.03.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.995.000,00	149.906.175,00	(88.825,00)	99,94	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	309.078.700,00	260.418.945,00	(48.659.755,00)	84,25	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.063.039,00	70.564.000,00	(11.499.039,00)	85,98	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.878.039,00	36.219.000,00	(2.659.039,00)	93,16	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.832.539,00	8.174.000,00	(2.658.539,00)	75,45	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.832.539,00	8.174.000,00	(2.658.539,00)	75,45	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	28.045.500,00	28.045.000,00	(500,00)	99,99	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.045.500,00	28.045.000,00	(500,00)	99,99	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	810.000,00	810.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	810.000,00	810.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000,00	31.160.000,00	(8.840.000,00)	77,90	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	31.160.000,00	(8.840.000,00)	77,90	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	31.160.000,00	(8.840.000,00)	77,90	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.554.986,00	145.755.277,00	(30.799.709,00)	82,55	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.354.986,00	26.295.277,00	(5.059.709,00)	83,86	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.354.986,00	26.295.277,00	(5.059.709,00)	83,86	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.354.986,00	26.295.277,00	(5.059.709,00)	83,86	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.200.000,00	119.460.000,00	(25.740.000,00)	82,27	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	145.200.000,00	119.460.000,00	(25.740.000,00)	82,27	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.200.000,00	119.460.000,00	(25.740.000,00)	82,27	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.460.675,00	44.099.668,00	(6.361.007,00)	87,39	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.630.675,00	42.279.668,00	(6.351.007,00)	86,94	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	48.630.675,00	42.279.668,00	(6.351.007,00)	86,94	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.630.675,00	42.279.668,00	(6.351.007,00)	86,94	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.830.000,00	1.820.000,00	(10.000,00)	99,45	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.830.000,00	1.820.000,00	(10.000,00)	99,45	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.830.000,00	1.820.000,00	(10.000,00)	99,45	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**
Organisasi : **UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005		5	BELANJA DAERAH	1.311.427.157,00	1.257.860.214,00	(53.566.943,00)	95,91	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.061.640.000,00	1.046.756.650,00	(14.883.350,00)	98,59	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.03.1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.001.640.000,00	986.949.000,00	(14.691.000,00)	98,53	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.03.1.01.0003		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.001.640.000,00	986.949.000,00	(14.691.000,00)	98,53	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.03.1.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.001.640.000,00	986.949.000,00	(14.691.000,00)	98,53	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.03.1.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.001.640.000,00	986.949.000,00	(14.691.000,00)	98,53	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	60.000.000,00	59.807.650,00	(192.350,00)	99,67	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.03.1.06.0003		Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	60.000.000,00	59.807.650,00	(192.350,00)	99,67	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.03.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.807.650,00	(192.350,00)	99,67	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.03.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.807.650,00	(192.350,00)	99,67	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	249.787.157,00	211.103.564,00	(38.683.593,00)	84,51	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.811.747,00	21.505.400,00	(14.306.347,00)	60,05	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.345.181,00	7.588.500,00	(9.756.681,00)	43,74	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.845.181,00	1.088.500,00	(9.756.681,00)	10,03	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.845.181,00	1.088.500,00	(9.756.681,00)	10,03	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	916.566,00	416.400,00	(500.166,00)	45,43	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	916.566,00	416.400,00	(500.166,00)	45,43	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	916.566,00	416.400,00	(500.166,00)	45,43	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	3.378.000,00	(1.622.000,00)	67,56	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	3.378.000,00	(1.622.000,00)	67,56	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.378.000,00	(1.622.000,00)	67,56	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.550.000,00	10.122.500,00	(2.427.500,00)	80,65	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	12.550.000,00	10.122.500,00	(2.427.500,00)	80,65	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	10.122.500,00	(2.427.500,00)	80,65	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.215.410,00	110.625.045,00	(18.590.365,00)	85,61	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.455.410,00	35.485.045,00	(3.970.365,00)	89,93	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.455.410,00	35.485.045,00	(3.970.365,00)	89,93	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.455.410,00	35.485.045,00	(3.970.365,00)	89,93	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.760.000,00	75.140.000,00	(14.620.000,00)	83,71	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	89.760.000,00	75.140.000,00	(14.620.000,00)	83,71	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.760.000,00	75.140.000,00	(14.620.000,00)	83,71	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.760.000,00	78.973.119,00	(5.786.881,00)	93,17	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.480.000,00	73.693.119,00	(5.786.881,00)	92,71	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	79.480.000,00	73.693.119,00	(5.786.881,00)	92,71	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.480.000,00	73.693.119,00	(5.786.881,00)	92,71	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**
Organisasi : **UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006		5	BELANJA DAERAH	351.714.066,00	318.518.090,00	(33.195.976,00)	90,56	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	351.714.066,00	318.518.090,00	(33.195.976,00)	90,56	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.041.066,00	192.639.090,00	(9.401.976,00)	95,34	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.397.566,00	136.228.546,00	(7.169.020,00)	95,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.338.266,00	31.343.546,00	(6.994.720,00)	81,75	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.338.266,00	31.343.546,00	(6.994.720,00)	81,75	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	105.059.300,00	104.885.000,00	(174.300,00)	99,83	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.059.300,00	104.885.000,00	(174.300,00)	99,83	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.233.500,00	1.233.500,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.233.500,00	1.233.500,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	4.990.335,00	(9.665,00)	99,80	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.990.335,00	(9.665,00)	99,80	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.990.335,00	(9.665,00)	99,80	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.410.000,00	50.186.709,00	(2.223.291,00)	95,75	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	52.410.000,00	50.186.709,00	(2.223.291,00)	95,75	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.410.000,00	50.186.709,00	(2.223.291,00)	95,75	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.861.000,00	97.067.000,00	(15.794.000,00)	86,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.741.000,00	23.807.000,00	(1.934.000,00)	92,48	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.741.000,00	23.807.000,00	(1.934.000,00)	92,48	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.741.000,00	23.807.000,00	(1.934.000,00)	92,48	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.120.000,00	73.260.000,00	(13.860.000,00)	84,09	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	87.120.000,00	73.260.000,00	(13.860.000,00)	84,09	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.120.000,00	73.260.000,00	(13.860.000,00)	84,09	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.812.000,00	28.812.000,00	(8.000.000,00)	78,26	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.982.000,00	26.982.000,00	(8.000.000,00)	77,13	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.982.000,00	26.982.000,00	(8.000.000,00)	77,13	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.982.000,00	26.982.000,00	(8.000.000,00)	77,13	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	100,00	
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	100,00	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**
Organisasi : **Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000		5	BELANJA DAERAH	7.720.000.982,00	7.622.759.003,00	(97.241.979,00)	98,74	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	29.616.750,00	29.467.120,00	(149.630,00)	99,49	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.02.1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	29.616.750,00	29.467.120,00	(149.630,00)	99,49	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.02.1.04.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	29.616.750,00	29.467.120,00	(149.630,00)	99,49	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.02.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.616.750,00	29.467.120,00	(149.630,00)	99,49	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.02.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.616.750,00	29.467.120,00	(149.630,00)	99,49	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	5.718.663.982,00	5.652.890.227,00	(65.773.755,00)	98,84	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.04.1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	5.718.663.982,00	5.652.890.227,00	(65.773.755,00)	98,84	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.04.1.02.0001		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	124.080.000,00	123.978.000,00	(102.000,00)	99,91	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.04.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	124.080.000,00	123.978.000,00	(102.000,00)	99,91	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.04.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.080.000,00	123.978.000,00	(102.000,00)	99,91	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.04.1.02.0002		Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.594.583.982,00	5.528.912.227,00	(65.671.755,00)	98,82	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.04.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.594.583.982,00	5.528.912.227,00	(65.671.755,00)	98,82	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.04.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.594.583.982,00	5.528.912.227,00	(65.671.755,00)	98,82	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.971.720.250,00	1.940.401.656,00	(31.318.594,00)	98,41	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.809.116.750,00	1.778.113.248,00	(31.003.502,00)	98,28	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.01.0001		Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1.809.116.750,00	1.778.113.248,00	(31.003.502,00)	98,28	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.809.116.750,00	1.778.113.248,00	(31.003.502,00)	98,28	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.809.116.750,00	1.778.113.248,00	(31.003.502,00)	98,28	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	123.166.750,00	122.853.360,00	(313.390,00)	99,74	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.02.0005		Pengembangan Layanan Pengujian	53.322.000,00	53.134.150,00	(187.850,00)	99,64	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	53.322.000,00	53.134.150,00	(187.850,00)	99,64	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.322.000,00	53.134.150,00	(187.850,00)	99,64	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.02.0007		Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	69.844.750,00	69.719.210,00	(125.540,00)	99,82	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	69.844.750,00	69.719.210,00	(125.540,00)	99,82	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.844.750,00	69.719.210,00	(125.540,00)	99,82	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	39.436.750,00	39.435.048,00	(1.702,00)	99,99	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.03.0003		Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	39.436.750,00	39.435.048,00	(1.702,00)	99,99	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.436.750,00	39.435.048,00	(1.702,00)	99,99	
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.436.750,00	39.435.048,00	(1.702,00)	99,99	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**
Organisasi : **Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000		5	BELANJA DAERAH	2.143.053.250,00	2.138.595.744,00	(4.457.506,00)	99,79	
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.31.02		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.143.053.250,00	2.138.595.744,00	(4.457.506,00)	99,79	
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.31.02.1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2.143.053.250,00	2.138.595.744,00	(4.457.506,00)	99,79	
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.31.02.1.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	728.251.750,00	727.654.648,00	(597.102,00)	99,91	
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.31.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	728.251.750,00	727.654.648,00	(597.102,00)	99,91	
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.31.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	728.251.750,00	727.654.648,00	(597.102,00)	99,91	
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.31.02.1.01.0005		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.292.784.750,00	1.289.055.716,00	(3.729.034,00)	99,71	
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.31.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.292.784.750,00	1.289.055.716,00	(3.729.034,00)	99,71	
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.31.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	992.784.750,00	989.055.716,00	(3.729.034,00)	99,62	
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.31.02.1.01.0005	5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.31.02.1.01.0006		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	122.016.750,00	121.885.380,00	(131.370,00)	99,89	
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.31.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	122.016.750,00	121.885.380,00	(131.370,00)	99,89	
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.31.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.016.750,00	121.885.380,00	(131.370,00)	99,89	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Organisasi : **Dinas Kelautan dan Perikanan**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.25.0.00.0.00.30.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.366.960.000,00	654.910.594,00	(712.049.406,00)	47,91	
	3.25.0.00.0.00.30.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.366.960.000,00	654.910.594,00	(712.049.406,00)	47,91	
	3.25.0.00.0.00.30.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.216.960.000,00	491.674.850,00	(725.285.150,00)	40,40	
	3.25.0.00.0.00.30.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	150.000.000,00	163.235.744,00	13.235.744,00	108,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000		5	BELANJA DAERAH	28.401.752.183,00	28.389.910.406,00	(11.841.777,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	4.107.988.550,00	4.071.765.686,00	(36.222.864,00)	99,11	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.02.1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	2.922.868.550,00	2.891.199.186,00	(31.669.364,00)	98,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.02.1.01.0002		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	2.922.868.550,00	2.891.199.186,00	(31.669.364,00)	98,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	324.628.550,00	323.195.264,00	(1.433.286,00)	99,55	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.628.550,00	323.195.264,00	(1.433.286,00)	99,55	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.02.1.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.598.240.000,00	2.568.003.922,00	(30.236.078,00)	98,83	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.02.1.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.946.240.000,00	1.916.270.522,00	(29.969.478,00)	98,46	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.02.1.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	652.000.000,00	651.733.400,00	(266.600,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.02.1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.185.120.000,00	1.180.566.500,00	(4.553.500,00)	99,61	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.02.1.03.0002		Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.185.120.000,00	1.180.566.500,00	(4.553.500,00)	99,61	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.185.120.000,00	1.180.566.500,00	(4.553.500,00)	99,61	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.185.120.000,00	1.180.566.500,00	(4.553.500,00)	99,61	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.146.904.200,00	4.164.266.523,00	17.362.323,00	100,41	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	4.017.472.000,00	3.979.067.040,00	(38.404.960,00)	99,04	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.01.0001		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	139.304.000,00	138.224.700,00	(1.079.300,00)	99,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	139.304.000,00	138.224.700,00	(1.079.300,00)	99,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.304.000,00	138.224.700,00	(1.079.300,00)	99,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.01.0003		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.878.168.000,00	3.840.842.340,00	(37.325.660,00)	99,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.878.168.000,00	3.840.842.340,00	(37.325.660,00)	99,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.878.168.000,00	3.840.842.340,00	(37.325.660,00)	99,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	129.432.200,00	128.894.180,00	(538.020,00)	99,58	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.03.0001		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	52.716.200,00	52.306.680,00	(409.520,00)	99,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.716.200,00	52.306.680,00	(409.520,00)	99,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.716.200,00	52.306.680,00	(409.520,00)	99,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.03.0003		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	76.716.000,00	76.587.500,00	(128.500,00)	99,83	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	76.716.000,00	76.587.500,00	(128.500,00)	99,83	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.716.000,00	76.587.500,00	(128.500,00)	99,83	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	0,00	56.305.303,00	56.305.303,00	0,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.06.0002		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	0,00	56.305.303,00	56.305.303,00	0,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	12.305.800,00	12.305.800,00	0,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.305.800,00	12.305.800,00	0,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	0,00	43.999.503,00	43.999.503,00	0,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	43.999.503,00	43.999.503,00	0,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.202.636.789,00	1.234.066.600,00	31.429.811,00	102,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	69.804.600,00	69.587.500,00	(217.100,00)	99,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.05.0004		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	69.804.600,00	69.587.500,00	(217.100,00)	99,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.277.100,00	60.060.500,00	(216.600,00)	99,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.277.100,00	60.060.500,00	(216.600,00)	99,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.05.0004	5.2	BELANJA MODAL	9.527.500,00	9.527.000,00	(500,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.05.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.527.500,00	9.527.000,00	(500,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1.132.832.189,00	1.164.479.100,00	31.646.911,00	102,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.06.0001		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.075.979.689,00	1.068.836.100,00	(7.143.589,00)	99,33	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	123.979.689,00	107.149.000,00	(16.830.689,00)	86,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.979.689,00	107.149.000,00	(16.830.689,00)	86,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.06.0001	5.2	BELANJA MODAL	952.000.000,00	961.687.100,00	9.687.100,00	101,01	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.06.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	698.700.000,00	708.388.400,00	9.688.400,00	101,38	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.06.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	253.300.000,00	253.298.700,00	(1.300,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.06.0002		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	56.852.500,00	95.643.000,00	38.790.500,00	168,23	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	56.852.500,00	95.643.000,00	38.790.500,00	168,23	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.852.500,00	95.643.000,00	38.790.500,00	168,23	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	781.628.350,00	730.206.440,00	(51.421.910,00)	93,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.05.1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	781.628.350,00	730.206.440,00	(51.421.910,00)	93,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.05.1.01.0001		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	105.409.350,00	104.196.340,00	(1.213.010,00)	98,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	105.409.350,00	104.196.340,00	(1.213.010,00)	98,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.409.350,00	104.196.340,00	(1.213.010,00)	98,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.05.1.01.0002		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	134.038.000,00	130.318.600,00	(3.719.400,00)	97,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	134.038.000,00	130.318.600,00	(3.719.400,00)	97,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.038.000,00	130.318.600,00	(3.719.400,00)	97,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.05.1.01.0004		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	542.181.000,00	495.691.500,00	(46.489.500,00)	91,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	542.181.000,00	495.691.500,00	(46.489.500,00)	91,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	542.181.000,00	495.691.500,00	(46.489.500,00)	91,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.616.701.850,00	2.603.546.215,00	(13.155.635,00)	99,49	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.06.1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	48.707.950,00	48.593.380,00	(114.570,00)	99,76	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.06.1.01.0002		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	48.707.950,00	48.593.380,00	(114.570,00)	99,76	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.707.950,00	48.593.380,00	(114.570,00)	99,76	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.707.950,00	48.593.380,00	(114.570,00)	99,76	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.06.1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	497.997.000,00	504.273.890,00	6.276.890,00	101,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.06.1.02.0002		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	497.997.000,00	504.273.890,00	6.276.890,00	101,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.06.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	497.997.000,00	504.273.890,00	6.276.890,00	101,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.06.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	497.997.000,00	504.273.890,00	6.276.890,00	101,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.06.1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.069.996.900,00	2.050.678.945,00	(19.317.955,00)	99,06	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.06.1.03.0002		Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.069.996.900,00	2.050.678.945,00	(19.317.955,00)	99,06	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.06.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.069.996.900,00	2.050.678.945,00	(19.317.955,00)	99,06	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.06.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.069.996.900,00	2.050.678.945,00	(19.317.955,00)	99,06	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.545.892.444,00	15.586.058.942,00	40.166.498,00	100,25	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	972.145.474,00	969.610.973,00	(2.534.501,00)	99,73	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	664.560.324,00	663.660.870,00	(899.454,00)	99,86	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	590.915.324,00	590.020.870,00	(894.454,00)	99,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.915.324,00	590.020.870,00	(894.454,00)	99,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	73.645.000,00	73.640.000,00	(5.000,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.645.000,00	73.640.000,00	(5.000,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	307.585.150,00	305.950.103,00	(1.635.047,00)	99,46	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	303.871.150,00	302.250.103,00	(1.621.047,00)	99,46	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.871.150,00	302.250.103,00	(1.621.047,00)	99,46	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	3.714.000,00	3.700.000,00	(14.000,00)	99,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.714.000,00	3.700.000,00	(14.000,00)	99,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.694.408.510,00	11.535.626.738,00	(158.781.772,00)	98,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.267.778.110,00	11.109.700.809,00	(158.077.301,00)	98,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.267.778.110,00	11.109.700.809,00	(158.077.301,00)	98,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	11.267.778.110,00	11.109.700.809,00	(158.077.301,00)	98,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	426.630.400,00	425.925.929,00	(704.471,00)	99,83	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	364.830.400,00	364.515.429,00	(314.971,00)	99,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.830.400,00	364.515.429,00	(314.971,00)	99,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.02.0007	5.2	BELANJA MODAL	61.800.000,00	61.410.500,00	(389.500,00)	99,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.02.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.800.000,00	61.410.500,00	(389.500,00)	99,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	281.199.000,00	279.677.000,00	(1.522.000,00)	99,45	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	281.199.000,00	279.677.000,00	(1.522.000,00)	99,45	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	281.199.000,00	279.677.000,00	(1.522.000,00)	99,45	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.199.000,00	279.677.000,00	(1.522.000,00)	99,45	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	816.457.675,00	848.339.322,00	31.881.647,00	103,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	816.457.675,00	848.339.322,00	31.881.647,00	103,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.603.675,00	80.358.522,00	33.754.847,00	172,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.603.675,00	80.358.522,00	33.754.847,00	172,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	769.854.000,00	767.980.800,00	(1.873.200,00)	99,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	769.854.000,00	767.980.800,00	(1.873.200,00)	99,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.781.681.785,00	1.952.804.909,00	171.123.124,00	109,60	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.781.681.785,00	1.952.804.909,00	171.123.124,00	109,60	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.765.767.785,00	1.936.914.909,00	171.147.124,00	109,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.765.767.785,00	1.936.914.909,00	171.147.124,00	109,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.08.0003	5.2	BELANJA MODAL	15.914.000,00	15.890.000,00	(24.000,00)	99,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.08.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.914.000,00	15.890.000,00	(24.000,00)	99,84	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Organisasi : **UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP)**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001		5	BELANJA DAERAH	1.645.984.727,00	1.425.501.440,00	(220.483.287,00)	86,60	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.174.753.400,00	1.124.906.117,00	(49.847.283,00)	95,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.04.1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1.174.753.400,00	1.124.906.117,00	(49.847.283,00)	95,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.04.1.06.0001		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	642.752.600,00	632.073.117,00	(10.679.483,00)	98,33	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.04.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	408.887.000,00	408.115.693,00	(771.307,00)	99,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.04.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.887.000,00	408.115.693,00	(771.307,00)	99,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.04.1.06.0001	5.2	BELANJA MODAL	233.865.600,00	223.957.424,00	(9.908.176,00)	95,76	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.04.1.06.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	224.000.000,00	223.957.424,00	(42.576,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.04.1.06.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.865.600,00	0,00	(9.865.600,00)	0,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.04.1.06.0002		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	532.000.800,00	492.833.000,00	(39.167.800,00)	92,63	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.04.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	532.000.800,00	492.833.000,00	(39.167.800,00)	92,63	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.04.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.000.800,00	492.833.000,00	(39.167.800,00)	92,63	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	471.231.327,00	300.595.323,00	(170.636.004,00)	63,78	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.753.700,00	34.656.000,00	(16.097.700,00)	68,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.753.700,00	34.656.000,00	(16.097.700,00)	68,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.753.700,00	34.656.000,00	(16.097.700,00)	68,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.753.700,00	34.656.000,00	(16.097.700,00)	68,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.477.627,00	265.939.323,00	(154.538.304,00)	63,24	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	420.477.627,00	265.939.323,00	(154.538.304,00)	63,24	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	420.477.627,00	265.939.323,00	(154.538.304,00)	63,24	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.477.627,00	265.939.323,00	(154.538.304,00)	63,24	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Organisasi : **UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPI Tenda)**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002		5	BELANJA DAERAH	3.227.567.822,00	2.919.533.969,00	(308.033.853,00)	90,45	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.336.547.072,00	2.217.929.132,00	(118.617.940,00)	94,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	2.336.547.072,00	2.217.929.132,00	(118.617.940,00)	94,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.03.1.06.0002		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	2.073.838.157,00	2.015.683.495,00	(58.154.662,00)	97,19	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.03.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	76.838.654,00	76.550.350,00	(288.304,00)	99,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.03.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.838.654,00	76.550.350,00	(288.304,00)	99,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.03.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.996.999.503,00	1.939.133.145,00	(57.866.358,00)	97,10	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.03.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.000.000,00	599.257.500,00	(742.500,00)	99,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.03.1.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	252.999.503,00	208.846.000,00	(44.153.503,00)	82,54	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.03.1.06.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.144.000.000,00	1.131.029.645,00	(12.970.355,00)	98,86	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.03.1.06.0003		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	262.708.915,00	202.245.637,00	(60.463.278,00)	76,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.03.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	262.708.915,00	202.245.637,00	(60.463.278,00)	76,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.03.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.708.915,00	202.245.637,00	(60.463.278,00)	76,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	891.020.750,00	701.604.837,00	(189.415.913,00)	78,74	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.389.750,00	43.776.903,00	(6.612.847,00)	86,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.389.750,00	43.776.903,00	(6.612.847,00)	86,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.157.750,00	41.560.600,00	(6.597.150,00)	86,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.157.750,00	41.560.600,00	(6.597.150,00)	86,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.232.000,00	2.216.303,00	(15.697,00)	99,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.232.000,00	2.216.303,00	(15.697,00)	99,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	840.631.000,00	657.827.934,00	(182.803.066,00)	78,25	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	840.631.000,00	657.827.934,00	(182.803.066,00)	78,25	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	840.631.000,00	657.827.934,00	(182.803.066,00)	78,25	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.631.000,00	657.827.934,00	(182.803.066,00)	78,25	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Organisasi : **UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta (PPI Tilamuta)**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003		5	BELANJA DAERAH	1.933.058.136,00	1.776.175.510,00	(156.882.626,00)	91,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.364.996.876,00	1.327.540.002,00	(37.456.874,00)	97,25	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1.364.996.876,00	1.327.540.002,00	(37.456.874,00)	97,25	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.03.1.06.0002		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1.294.363.000,00	1.257.028.002,00	(37.334.998,00)	97,11	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.03.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	127.512.000,00	115.206.200,00	(12.305.800,00)	90,34	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.03.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.512.000,00	115.206.200,00	(12.305.800,00)	90,34	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.03.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.166.851.000,00	1.141.821.802,00	(25.029.198,00)	97,85	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.03.1.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	448.162.500,00	438.410.950,00	(9.751.550,00)	97,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.03.1.06.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	718.688.500,00	703.410.852,00	(15.277.648,00)	97,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.03.1.06.0003		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	70.633.876,00	70.512.000,00	(121.876,00)	99,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.03.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	70.633.876,00	70.512.000,00	(121.876,00)	99,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.03.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.633.876,00	70.512.000,00	(121.876,00)	99,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	568.061.260,00	448.635.508,00	(119.425.752,00)	78,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.764.200,00	66.395.464,00	(2.368.736,00)	96,55	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.764.200,00	66.395.464,00	(2.368.736,00)	96,55	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.023.200,00	36.695.464,00	(2.327.736,00)	94,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.023.200,00	36.695.464,00	(2.327.736,00)	94,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	29.741.000,00	29.700.000,00	(41.000,00)	99,86	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.741.000,00	29.700.000,00	(41.000,00)	99,86	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.297.060,00	382.240.044,00	(117.057.016,00)	76,55	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	499.297.060,00	382.240.044,00	(117.057.016,00)	76,55	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	499.297.060,00	382.240.044,00	(117.057.016,00)	76,55	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.297.060,00	382.240.044,00	(117.057.016,00)	76,55	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Organisasi : **UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004		5	BELANJA DAERAH	3.010.774.332,00	2.724.652.523,00	(286.121.809,00)	90,49	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.610.661.032,00	2.392.049.470,00	(218.611.562,00)	91,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	2.610.661.032,00	2.392.049.470,00	(218.611.562,00)	91,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.03.1.06.0002		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	2.550.194.832,00	2.332.337.320,00	(217.857.512,00)	91,45	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.03.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	179.294.645,00	177.287.636,00	(2.007.009,00)	98,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.03.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.294.645,00	177.287.636,00	(2.007.009,00)	98,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.03.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.370.900.187,00	2.155.049.684,00	(215.850.503,00)	90,89	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.03.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	199.778.000,00	(222.000,00)	99,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.03.1.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.242.900.187,00	1.038.347.500,00	(204.552.687,00)	83,54	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.03.1.06.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	928.000.000,00	916.924.184,00	(11.075.816,00)	98,80	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.03.1.06.0003		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	60.466.200,00	59.712.150,00	(754.050,00)	98,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.03.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.466.200,00	59.712.150,00	(754.050,00)	98,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.03.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.466.200,00	59.712.150,00	(754.050,00)	98,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	400.113.300,00	332.603.053,00	(67.510.247,00)	83,12	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.277.600,00	102.483.830,00	(16.793.770,00)	85,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.277.600,00	102.483.830,00	(16.793.770,00)	85,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	119.277.600,00	102.483.830,00	(16.793.770,00)	85,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.277.600,00	102.483.830,00	(16.793.770,00)	85,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.835.700,00	230.119.223,00	(50.716.477,00)	81,94	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	280.835.700,00	230.119.223,00	(50.716.477,00)	81,94	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	280.835.700,00	230.119.223,00	(50.716.477,00)	81,94	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.835.700,00	230.119.223,00	(50.716.477,00)	81,94	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Organisasi : **Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP)**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005		5	BELANJA DAERAH	265.319.400,00	216.428.934,00	(48.890.466,00)	81,57	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	53.584.800,00	46.154.878,00	(7.429.922,00)	86,13	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.06.1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	53.584.800,00	46.154.878,00	(7.429.922,00)	86,13	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.06.1.02.0002		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	53.584.800,00	46.154.878,00	(7.429.922,00)	86,13	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.06.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.584.800,00	46.154.878,00	(7.429.922,00)	86,13	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.06.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.584.800,00	46.154.878,00	(7.429.922,00)	86,13	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	211.734.600,00	170.274.056,00	(41.460.544,00)	80,41	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.068.600,00	48.540.126,00	(9.528.474,00)	83,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.068.600,00	48.540.126,00	(9.528.474,00)	83,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	58.068.600,00	48.540.126,00	(9.528.474,00)	83,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.068.600,00	48.540.126,00	(9.528.474,00)	83,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.666.000,00	121.733.930,00	(31.932.070,00)	79,21	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153.666.000,00	121.733.930,00	(31.932.070,00)	79,21	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	153.666.000,00	121.733.930,00	(31.932.070,00)	79,21	
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.666.000,00	121.733.930,00	(31.932.070,00)	79,21	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**
Organisasi : **Dinas Pariwisata**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000		5	BELANJA DAERAH	12.688.655.464,00	12.410.166.521,00	(278.488.943,00)	97,80	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.345.366.200,00	1.335.775.656,00	(9.590.544,00)	99,28	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	728.134.350,00	720.478.400,00	(7.655.950,00)	98,94	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.01.0005		Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	728.134.350,00	720.478.400,00	(7.655.950,00)	98,94	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	328.134.350,00	320.828.400,00	(7.305.950,00)	97,77	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.134.350,00	320.828.400,00	(7.305.950,00)	97,77	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	399.650.000,00	(350.000,00)	99,91	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	59.900.000,00	(100.000,00)	99,83	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	240.000.000,00	239.800.000,00	(200.000,00)	99,91	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.01.0005	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	99.950.000,00	(50.000,00)	99,95	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	400.454.300,00	399.268.837,00	(1.185.463,00)	99,70	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.02.0007		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	400.454.300,00	399.268.837,00	(1.185.463,00)	99,70	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	400.454.300,00	399.268.837,00	(1.185.463,00)	99,70	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.454.300,00	399.268.837,00	(1.185.463,00)	99,70	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	122.254.000,00	122.210.050,00	(43.950,00)	99,96	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.03.0011		Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	122.254.000,00	122.210.050,00	(43.950,00)	99,96	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	122.254.000,00	122.210.050,00	(43.950,00)	99,96	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.254.000,00	122.210.050,00	(43.950,00)	99,96	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	94.523.550,00	93.818.369,00	(705.181,00)	99,25	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.04.0010		Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	94.523.550,00	93.818.369,00	(705.181,00)	99,25	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	94.523.550,00	93.818.369,00	(705.181,00)	99,25	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.523.550,00	93.818.369,00	(705.181,00)	99,25	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.769.778.500,00	1.772.107.860,00	2.329.360,00	100,13	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.03.1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.769.778.500,00	1.772.107.860,00	2.329.360,00	100,13	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.03.1.01.0001		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	466.095.800,00	470.009.885,00	3.914.085,00	100,83	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	466.095.800,00	470.009.885,00	3.914.085,00	100,83	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.095.800,00	470.009.885,00	3.914.085,00	100,83	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.03.1.01.0005		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	283.003.900,00	282.320.817,00	(683.083,00)	99,75	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.03.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	283.003.900,00	282.320.817,00	(683.083,00)	99,75	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.03.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.003.900,00	282.320.817,00	(683.083,00)	99,75	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.03.1.01.0006		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.020.678.800,00	1.019.777.158,00	(901.642,00)	99,91	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.03.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.020.678.800,00	1.019.777.158,00	(901.642,00)	99,91	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.03.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.678.800,00	1.019.777.158,00	(901.642,00)	99,91	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	334.036.550,00	330.407.108,00	(3.629.442,00)	98,91	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.04.1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	334.036.550,00	330.407.108,00	(3.629.442,00)	98,91	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.04.1.01.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	334.036.550,00	330.407.108,00	(3.629.442,00)	98,91	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.04.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	334.036.550,00	330.407.108,00	(3.629.442,00)	98,91	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.04.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.036.550,00	330.407.108,00	(3.629.442,00)	98,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	225.000.000,00	222.162.609,00	(2.837.391,00)	98,73	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.05.1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	225.000.000,00	222.162.609,00	(2.837.391,00)	98,73	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.05.1.01.0014		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	75.000.000,00	72.615.180,00	(2.384.820,00)	96,82	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.05.1.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	72.615.180,00	(2.384.820,00)	96,82	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.05.1.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	72.615.180,00	(2.384.820,00)	96,82	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.05.1.01.0017		Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	150.000.000,00	149.547.429,00	(452.571,00)	99,69	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.05.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.547.429,00	(452.571,00)	99,69	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.05.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.547.429,00	(452.571,00)	99,69	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.014.474.214,00	8.749.713.288,00	(264.760.926,00)	97,06	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	288.256.000,00	277.356.285,00	(10.899.715,00)	96,21	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	288.256.000,00	277.356.285,00	(10.899.715,00)	96,21	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	288.256.000,00	277.356.285,00	(10.899.715,00)	96,21	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.256.000,00	277.356.285,00	(10.899.715,00)	96,21	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.343.079.464,00	6.190.204.034,00	(152.875.430,00)	97,58	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.269.279.464,00	6.118.947.315,00	(150.332.149,00)	97,60	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.269.279.464,00	6.118.947.315,00	(150.332.149,00)	97,60	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.269.279.464,00	6.118.947.315,00	(150.332.149,00)	97,60	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	73.800.000,00	71.256.719,00	(2.543.281,00)	96,55	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	73.800.000,00	71.256.719,00	(2.543.281,00)	96,55	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.800.000,00	71.256.719,00	(2.543.281,00)	96,55	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	129.872.000,00	108.206.424,00	(21.665.576,00)	83,31	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	129.872.000,00	108.206.424,00	(21.665.576,00)	83,31	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	129.872.000,00	108.206.424,00	(21.665.576,00)	83,31	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.872.000,00	108.206.424,00	(21.665.576,00)	83,31	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.191.065.700,00	1.128.999.548,00	(62.066.152,00)	94,78	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.191.065.700,00	1.128.999.548,00	(62.066.152,00)	94,78	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	763.407.700,00	705.132.752,00	(58.274.948,00)	92,36	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	763.407.700,00	705.132.752,00	(58.274.948,00)	92,36	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	427.658.000,00	423.866.796,00	(3.791.204,00)	99,11	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.658.000,00	200.016.796,00	(2.641.204,00)	98,69	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	225.000.000,00	223.850.000,00	(1.150.000,00)	99,48	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.062.201.050,00	1.044.946.997,00	(17.254.053,00)	98,37	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.062.201.050,00	1.044.946.997,00	(17.254.053,00)	98,37	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.062.201.050,00	1.044.946.997,00	(17.254.053,00)	98,37	
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.062.201.050,00	1.044.946.997,00	(17.254.053,00)	98,37	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**
Organisasi : **Dinas Pertanian**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.0.00.0.00.35.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	850.000.000,00	297.718.350,00	(552.281.650,00)	35,02	
	3.27.0.00.0.00.35.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	850.000.000,00	297.718.350,00	(552.281.650,00)	35,02	
	3.27.0.00.0.00.35.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	850.000.000,00	297.718.350,00	(552.281.650,00)	35,02	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000		5	BELANJA DAERAH	58.407.232.569,00	57.598.145.058,00	(809.087.511,00)	98,61	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	16.779.724.100,00	16.553.739.722,00	(225.984.378,00)	98,65	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	8.206.028.000,00	7.835.535.895,00	(370.492.105,00)	95,48	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.01.0001		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	8.105.960.000,00	7.736.232.395,00	(369.727.605,00)	95,43	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.049.455.000,00	4.715.281.995,00	(334.173.005,00)	93,38	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.049.455.000,00	4.715.281.995,00	(334.173.005,00)	93,38	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.056.505.000,00	3.020.950.400,00	(35.554.600,00)	98,83	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.056.505.000,00	3.020.950.400,00	(35.554.600,00)	98,83	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	100.068.000,00	99.303.500,00	(764.500,00)	99,23	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.068.000,00	99.303.500,00	(764.500,00)	99,23	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.068.000,00	99.303.500,00	(764.500,00)	99,23	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.636.949.600,00	3.627.300.508,00	(9.649.092,00)	99,73	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.02.0001		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	0,00	10.428.000,00	10.428.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	10.428.000,00	10.428.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.428.000,00	10.428.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.02.0005		Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	3.636.949.600,00	3.616.872.508,00	(20.077.092,00)	99,44	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.636.949.600,00	3.616.872.508,00	(20.077.092,00)	99,44	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.636.949.600,00	3.616.872.508,00	(20.077.092,00)	99,44	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	0,00	12.166.000,00	12.166.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.03.0002		Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	0,00	12.166.000,00	12.166.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	12.166.000,00	12.166.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.166.000,00	12.166.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	0,00	210.740.000,00	210.740.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.05.0004		Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0,00	210.740.000,00	210.740.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	210.740.000,00	210.740.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	210.740.000,00	210.740.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	4.936.746.500,00	4.867.997.319,00	(68.749.181,00)	98,60	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.07.0002		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	430.424.500,00	429.958.679,00	(465.821,00)	99,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	430.424.500,00	429.958.679,00	(465.821,00)	99,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.424.500,00	429.958.679,00	(465.821,00)	99,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.07.0004		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	4.506.322.000,00	4.438.038.640,00	(68.283.360,00)	98,48	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.07.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.506.322.000,00	4.438.038.640,00	(68.283.360,00)	98,48	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.07.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.506.322.000,00	4.438.038.640,00	(68.283.360,00)	98,48	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	100.068.000,00	87.667.500,00	(12.400.500,00)	87,60	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.03.1.01		Penataan Prasarana Pertanian	100.068.000,00	87.667.500,00	(12.400.500,00)	87,60	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.03.1.01.0004		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	100.068.000,00	87.667.500,00	(12.400.500,00)	87,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.03.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	100.068.000,00	87.667.500,00	(12.400.500,00)	87,60	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.03.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.068.000,00	87.667.500,00	(12.400.500,00)	87,60	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	609.187.500,00	596.962.432,00	(12.225.068,00)	97,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.04.1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	609.187.500,00	591.748.432,00	(17.439.068,00)	97,13	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.04.1.01.0004		Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	0,00	8.690.000,00	8.690.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.04.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	8.690.000,00	8.690.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.04.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.690.000,00	8.690.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.04.1.01.0007		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	609.187.500,00	583.058.432,00	(26.129.068,00)	95,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.04.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	595.537.500,00	569.411.932,00	(26.125.568,00)	95,61	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.04.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	595.537.500,00	569.411.932,00	(26.125.568,00)	95,61	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.04.1.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	13.650.000,00	13.646.500,00	(3.500,00)	99,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.04.1.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.650.000,00	13.646.500,00	(3.500,00)	99,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.04.1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	0,00	5.214.000,00	5.214.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.04.1.03.0003		Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0,00	5.214.000,00	5.214.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.04.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	5.214.000,00	5.214.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.04.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.214.000,00	5.214.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0,00	38.405.380,00	38.405.380,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.05.1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	0,00	38.405.380,00	38.405.380,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.05.1.01.0001		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	33.191.380,00	33.191.380,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	33.191.380,00	33.191.380,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	33.191.380,00	33.191.380,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.05.1.01.0002		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	5.214.000,00	5.214.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	5.214.000,00	5.214.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.214.000,00	5.214.000,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.804.331.750,00	1.623.538.997,00	(180.792.753,00)	89,98	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	202.568.000,00	202.289.610,00	(278.390,00)	99,86	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.01.0004		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	202.568.000,00	202.289.610,00	(278.390,00)	99,86	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	202.568.000,00	202.289.610,00	(278.390,00)	99,86	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.568.000,00	202.289.610,00	(278.390,00)	99,86	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.164.850.000,00	984.347.872,00	(180.502.128,00)	84,50	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.02.0001		Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	61.712.000,00	68.508.420,00	6.796.420,00	111,01	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	61.712.000,00	68.508.420,00	6.796.420,00	111,01	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.712.000,00	68.508.420,00	6.796.420,00	111,01	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.02.0002		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1.103.138.000,00	915.839.452,00	(187.298.548,00)	83,02	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.103.138.000,00	915.839.452,00	(187.298.548,00)	83,02	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.103.138.000,00	915.839.452,00	(187.298.548,00)	83,02	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	436.913.750,00	436.901.515,00	(12.235,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.03.0006		Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	436.913.750,00	436.901.515,00	(12.235,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	436.913.750,00	436.901.515,00	(12.235,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.913.750,00	436.901.515,00	(12.235,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.113.921.219,00	38.697.831.027,00	(416.090.192,00)	98,93	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.243.835.960,00	1.187.835.243,00	(56.000.717,00)	95,49	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	623.936.163,00	573.131.436,00	(50.804.727,00)	91,85	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	623.936.163,00	573.131.436,00	(50.804.727,00)	91,85	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	623.936.163,00	573.131.436,00	(50.804.727,00)	91,85	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	619.899.797,00	614.703.807,00	(5.195.990,00)	99,16	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	619.899.797,00	614.703.807,00	(5.195.990,00)	99,16	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	619.899.797,00	614.703.807,00	(5.195.990,00)	99,16	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.668.353.448,00	34.336.157.160,00	(332.196.288,00)	99,04	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.507.925.448,00	34.176.401.929,00	(331.523.519,00)	99,03	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.507.925.448,00	34.176.401.929,00	(331.523.519,00)	99,03	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	34.507.925.448,00	34.176.401.929,00	(331.523.519,00)	99,03	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	160.428.000,00	159.755.231,00	(672.769,00)	99,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	160.428.000,00	159.755.231,00	(672.769,00)	99,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.428.000,00	159.755.231,00	(672.769,00)	99,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	458.277.000,00	458.267.500,00	(9.500,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	458.277.000,00	458.267.500,00	(9.500,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	458.277.000,00	458.267.500,00	(9.500,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.277.000,00	458.267.500,00	(9.500,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	708.620.200,00	703.839.918,00	(4.780.282,00)	99,32	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	708.620.200,00	703.839.918,00	(4.780.282,00)	99,32	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	416.500.200,00	414.099.918,00	(2.400.282,00)	99,42	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.500.200,00	414.099.918,00	(2.400.282,00)	99,42	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	292.120.000,00	289.740.000,00	(2.380.000,00)	99,18	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.120.000,00	104.850.000,00	(2.270.000,00)	97,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	179.900.000,00	(100.000,00)	99,94	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.06.0002	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	4.990.000,00	(10.000,00)	99,79	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.034.834.611,00	2.011.731.206,00	(23.103.405,00)	98,86	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.034.834.611,00	2.011.731.206,00	(23.103.405,00)	98,86	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.034.834.611,00	2.011.731.206,00	(23.103.405,00)	98,86	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.034.834.611,00	2.011.731.206,00	(23.103.405,00)	98,86	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**
Organisasi : **UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001		5	BELANJA DAERAH	5.127.374.000,00	4.994.071.704,00	(133.302.296,00)	97,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.014.684.000,00	952.991.370,00	(61.692.630,00)	93,92	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	842.862.000,00	793.809.370,00	(49.052.630,00)	94,18	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.02.1.02.0001		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	150.966.000,00	140.500.800,00	(10.465.200,00)	93,06	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	150.966.000,00	140.500.800,00	(10.465.200,00)	93,06	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.966.000,00	140.500.800,00	(10.465.200,00)	93,06	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.02.1.02.0005		Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	691.896.000,00	653.308.570,00	(38.587.430,00)	94,42	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	691.896.000,00	653.308.570,00	(38.587.430,00)	94,42	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	691.896.000,00	653.308.570,00	(38.587.430,00)	94,42	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.02.1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	171.822.000,00	159.182.000,00	(12.640.000,00)	92,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.02.1.03.0002		Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	171.822.000,00	159.182.000,00	(12.640.000,00)	92,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	171.822.000,00	159.182.000,00	(12.640.000,00)	92,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.822.000,00	159.182.000,00	(12.640.000,00)	92,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.706.764.000,00	3.674.550.031,00	(32.213.969,00)	99,13	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.03.1.01		Penataan Prasarana Pertanian	3.706.764.000,00	3.674.550.031,00	(32.213.969,00)	99,13	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.03.1.01.0010		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	3.706.764.000,00	3.674.550.031,00	(32.213.969,00)	99,13	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.03.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.099.088.200,00	2.083.362.031,00	(15.726.169,00)	99,25	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.03.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.099.088.200,00	2.083.362.031,00	(15.726.169,00)	99,25	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.03.1.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	1.607.675.800,00	1.591.188.000,00	(16.487.800,00)	98,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.03.1.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.307.675.800,00	1.291.388.000,00	(16.287.800,00)	98,75	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.03.1.01.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000,00	299.800.000,00	(200.000,00)	99,93	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	405.926.000,00	366.530.303,00	(39.395.697,00)	90,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.926.000,00	366.530.303,00	(39.395.697,00)	90,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	405.926.000,00	366.530.303,00	(39.395.697,00)	90,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	405.926.000,00	366.530.303,00	(39.395.697,00)	90,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.926.000,00	366.530.303,00	(39.395.697,00)	90,29	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**
Organisasi : **UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002		5	BELANJA DAERAH	1.087.852.500,00	920.379.186,00	(167.473.314,00)	84,60	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	659.552.000,00	592.818.740,00	(66.733.260,00)	89,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	3.27.05.1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	659.552.000,00	592.818.740,00	(66.733.260,00)	89,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	3.27.05.1.01.0001		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	531.984.000,00	472.720.540,00	(59.263.460,00)	88,85	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	3.27.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	531.984.000,00	472.720.540,00	(59.263.460,00)	88,85	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	3.27.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.984.000,00	472.720.540,00	(59.263.460,00)	88,85	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	3.27.05.1.01.0002		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	127.568.000,00	120.098.200,00	(7.469.800,00)	94,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	3.27.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	127.568.000,00	120.098.200,00	(7.469.800,00)	94,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	3.27.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.568.000,00	120.098.200,00	(7.469.800,00)	94,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	428.300.500,00	327.560.446,00	(100.740.054,00)	76,47	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	3.27.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.300.500,00	327.560.446,00	(100.740.054,00)	76,47	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	3.27.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	428.300.500,00	327.560.446,00	(100.740.054,00)	76,47	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	3.27.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	428.300.500,00	327.560.446,00	(100.740.054,00)	76,47	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	3.27.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.300.500,00	327.560.446,00	(100.740.054,00)	76,47	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**
Organisasi : **UPTD Laboratorium Veteriner**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003		5	BELANJA DAERAH	1.006.223.000,00	968.777.273,00	(37.445.727,00)	96,27	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	814.548.500,00	800.165.400,00	(14.383.100,00)	98,23	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.04.1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	184.608.000,00	175.740.900,00	(8.867.100,00)	95,19	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.04.1.01.0004		Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	184.608.000,00	175.740.900,00	(8.867.100,00)	95,19	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.04.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	111.608.000,00	102.756.600,00	(8.851.400,00)	92,06	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.04.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.608.000,00	102.756.600,00	(8.851.400,00)	92,06	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.04.1.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	73.000.000,00	72.984.300,00	(15.700,00)	99,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.04.1.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.000.000,00	72.984.300,00	(15.700,00)	99,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.04.1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	629.940.500,00	624.424.500,00	(5.516.000,00)	99,12	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.04.1.03.0003		Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	629.940.500,00	624.424.500,00	(5.516.000,00)	99,12	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.04.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	192.656.500,00	187.154.500,00	(5.502.000,00)	97,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.04.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.656.500,00	187.154.500,00	(5.502.000,00)	97,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.04.1.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	437.284.000,00	437.270.000,00	(14.000,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.04.1.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	437.284.000,00	437.270.000,00	(14.000,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	191.674.500,00	168.611.873,00	(23.062.627,00)	87,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.674.500,00	168.611.873,00	(23.062.627,00)	87,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.674.500,00	168.611.873,00	(23.062.627,00)	87,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	191.674.500,00	168.611.873,00	(23.062.627,00)	87,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.674.500,00	168.611.873,00	(23.062.627,00)	87,96	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**
Organisasi : **UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004		5	BELANJA DAERAH	341.668.000,00	310.771.300,00	(30.896.700,00)	90,95	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	134.254.000,00	121.951.908,00	(12.302.092,00)	90,83	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	3.27.07.1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	134.254.000,00	121.951.908,00	(12.302.092,00)	90,83	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	3.27.07.1.02.0001		Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	134.254.000,00	121.951.908,00	(12.302.092,00)	90,83	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	3.27.07.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	123.197.000,00	110.924.908,00	(12.272.092,00)	90,03	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	3.27.07.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.197.000,00	110.924.908,00	(12.272.092,00)	90,03	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	3.27.07.1.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	11.057.000,00	11.027.000,00	(30.000,00)	99,72	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	3.27.07.1.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.057.000,00	11.027.000,00	(30.000,00)	99,72	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	207.414.000,00	188.819.392,00	(18.594.608,00)	91,03	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	3.27.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.414.000,00	188.819.392,00	(18.594.608,00)	91,03	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	3.27.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207.414.000,00	188.819.392,00	(18.594.608,00)	91,03	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	3.27.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	207.414.000,00	188.819.392,00	(18.594.608,00)	91,03	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	3.27.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.414.000,00	188.819.392,00	(18.594.608,00)	91,03	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**
Organisasi : **UPTD Balai Perbibitan Ternak**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005		5	BELANJA DAERAH	2.583.977.675,00	2.258.145.420,00	(325.832.255,00)	87,39	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.142.625.000,00	1.869.789.417,00	(272.835.583,00)	87,26	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	3.27.02.1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.142.625.000,00	1.869.789.417,00	(272.835.583,00)	87,26	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	3.27.02.1.05.0004		Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.142.625.000,00	1.869.789.417,00	(272.835.583,00)	87,26	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	3.27.02.1.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.842.625.000,00	1.569.949.417,00	(272.675.583,00)	85,20	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	3.27.02.1.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.842.625.000,00	1.569.949.417,00	(272.675.583,00)	85,20	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	3.27.02.1.05.0004	5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	299.840.000,00	(160.000,00)	99,94	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	3.27.02.1.05.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	299.840.000,00	(160.000,00)	99,94	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	441.352.675,00	388.356.003,00	(52.996.672,00)	87,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	3.27.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	441.352.675,00	388.356.003,00	(52.996.672,00)	87,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	3.27.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	441.352.675,00	388.356.003,00	(52.996.672,00)	87,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	3.27.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	441.352.675,00	388.356.003,00	(52.996.672,00)	87,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	3.27.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.352.675,00	388.356.003,00	(52.996.672,00)	87,99	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DAERAH**
Organisasi : **Sekretariat Daerah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000		5	BELANJA DAERAH	28.850.960.954,00	29.965.765.228,00	1.114.804.274,00	103,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	0,00	143.521.598,00	143.521.598,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	0,00	21.796.742,00	21.796.742,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.01.0001		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	0,00	20.856.742,00	20.856.742,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	20.856.742,00	20.856.742,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.856.742,00	20.856.742,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.01.0003		Penataan Analisis Jabatan	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	0,00	121.724.856,00	121.724.856,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.02.0001		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0,00	34.916.980,00	34.916.980,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	34.916.980,00	34.916.980,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	34.916.980,00	34.916.980,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.02.0002		Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	0,00	24.625.826,00	24.625.826,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	24.625.826,00	24.625.826,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.625.826,00	24.625.826,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.02.0004		Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	0,00	29.140.000,00	29.140.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	29.140.000,00	29.140.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	29.140.000,00	29.140.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.02.0005		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	0,00	33.042.050,00	33.042.050,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	33.042.050,00	33.042.050,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	33.042.050,00	33.042.050,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	0,00	128.603.553,00	128.603.553,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	0,00	66.726.900,00	66.726.900,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.01.0001		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	0,00	12.092.300,00	12.092.300,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	12.092.300,00	12.092.300,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.092.300,00	12.092.300,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.01.0002		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	0,00	13.443.600,00	13.443.600,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	13.443.600,00	13.443.600,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	13.443.600,00	13.443.600,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.01.0003		Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	0,00	11.037.000,00	11.037.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	11.037.000,00	11.037.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.037.000,00	11.037.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.01.0004		Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	0,00	30.154.000,00	30.154.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	30.154.000,00	30.154.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	30.154.000,00	30.154.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	0,00	61.876.653,00	61.876.653,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.02.0001		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	0,00	61.876.653,00	61.876.653,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	61.876.653,00	61.876.653,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	61.876.653,00	61.876.653,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0,00	40.378.500,00	40.378.500,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06.1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	0,00	22.115.400,00	22.115.400,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06.1.01.0001		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	0,00	6.985.000,00	6.985.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	6.985.000,00	6.985.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.985.000,00	6.985.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06.1.01.0002		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	0,00	15.130.400,00	15.130.400,00	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	15.130.400,00	15.130.400,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.130.400,00	15.130.400,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06.1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	0,00	18.263.100,00	18.263.100,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06.1.03.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	0,00	11.097.900,00	11.097.900,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	11.097.900,00	11.097.900,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.097.900,00	11.097.900,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06.1.03.0005		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	0,00	7.165.200,00	7.165.200,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	7.165.200,00	7.165.200,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.165.200,00	7.165.200,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	384.067.999,00	384.067.999,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	110.377.359,00	110.377.359,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.01.0001		Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	14.123.159,00	14.123.159,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	14.123.159,00	14.123.159,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.123.159,00	14.123.159,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.01.0002		Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	81.654.200,00	81.654.200,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	81.654.200,00	81.654.200,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	81.654.200,00	81.654.200,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.01.0003		Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	0,00	97.140.650,00	97.140.650,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.02.0001		Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	0,00	42.274.215,00	42.274.215,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	42.274.215,00	42.274.215,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	42.274.215,00	42.274.215,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.02.0002		Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	30.910.760,00	30.910.760,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	30.910.760,00	30.910.760,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	30.910.760,00	30.910.760,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.02.0003		Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	23.955.675,00	23.955.675,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	23.955.675,00	23.955.675,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	23.955.675,00	23.955.675,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	176.549.990,00	176.549.990,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.03.0001		Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	110.798.622,00	110.798.622,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	110.798.622,00	110.798.622,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	110.798.622,00	110.798.622,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.03.0002		Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	45.365.498,00	45.365.498,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	45.365.498,00	45.365.498,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	45.365.498,00	45.365.498,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.03.0003		Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	20.385.870,00	20.385.870,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	20.385.870,00	20.385.870,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.385.870,00	20.385.870,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0,00	91.099.522,00	91.099.522,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.08.1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	0,00	91.099.522,00	91.099.522,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.08.1.01.0001		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	0,00	91.099.522,00	91.099.522,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.08.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	91.099.522,00	91.099.522,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.08.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	91.099.522,00	91.099.522,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.850.960.954,00	29.178.094.056,00	327.133.102,00	101,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	294.568.176,00	294.568.176,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	255.583.266,00	255.583.266,00	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	255.583.266,00	255.583.266,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	255.583.266,00	255.583.266,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0,00	13.901.200,00	13.901.200,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	13.901.200,00	13.901.200,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	13.901.200,00	13.901.200,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	25.083.710,00	25.083.710,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	25.083.710,00	25.083.710,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.083.710,00	25.083.710,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.378.409.789,00	5.361.378.301,00	2.982.968.512,00	225,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.378.409.789,00	5.328.967.361,00	2.950.557.572,00	224,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.378.409.789,00	5.328.967.361,00	2.950.557.572,00	224,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.378.409.789,00	5.328.967.361,00	2.950.557.572,00	224,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00	32.410.940,00	32.410.940,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	32.410.940,00	32.410.940,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	32.410.940,00	32.410.940,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	7.222.218,00	7.222.218,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	7.222.218,00	7.222.218,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	7.222.218,00	7.222.218,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.222.218,00	7.222.218,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	79.131.807,00	79.131.807,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	79.131.807,00	79.131.807,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	79.131.807,00	79.131.807,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	79.131.807,00	79.131.807,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	99.481.741,00	99.481.741,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	18.308.553,00	18.308.553,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	18.308.553,00	18.308.553,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	18.308.553,00	18.308.553,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	81.173.188,00	81.173.188,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	81.173.188,00	81.173.188,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	81.173.188,00	81.173.188,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	556.349.281,00	556.349.281,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	488.419.281,00	488.419.281,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	488.419.281,00	488.419.281,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	488.419.281,00	488.419.281,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	67.930.000,00	67.930.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	67.930.000,00	67.930.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	67.930.000,00	67.930.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	348.359.771,00	348.359.771,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	39.755.000,00	39.755.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	39.755.000,00	39.755.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	39.755.000,00	39.755.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	82.093.771,00	82.093.771,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	82.093.771,00	82.093.771,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	82.093.771,00	82.093.771,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	401.100,00	401.100,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	401.100,00	401.100,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	401.100,00	401.100,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	226.109.900,00	226.109.900,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	226.109.900,00	226.109.900,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	226.109.900,00	226.109.900,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.715.098.091,00	1.288.039.328,00	(427.058.763,00)	75,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.11.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	185.698.091,00	0,00	(185.698.091,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	185.698.091,00	0,00	(185.698.091,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	185.698.091,00	0,00	(185.698.091,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.11.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	179.400.000,00	178.160.000,00	(1.240.000,00)	99,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	179.400.000,00	178.160.000,00	(1.240.000,00)	99,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.400.000,00	178.160.000,00	(1.240.000,00)	99,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.11.0003		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.11.0004		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.250.000.000,00	1.109.879.328,00	(140.120.672,00)	88,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000.000,00	1.109.879.328,00	(140.120.672,00)	88,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.11.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000.000,00	1.109.879.328,00	(140.120.672,00)	88,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.12		Fasilitasi Kerumahantagaan Sekretariat Daerah	24.757.453.074,00	21.011.501.993,00	(3.745.951.081,00)	84,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.12.0001		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	6.610.776.000,00	5.703.218.078,00	(907.557.922,00)	86,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.521.323.550,00	5.626.011.578,00	(895.311.972,00)	86,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.521.323.550,00	5.626.011.578,00	(895.311.972,00)	86,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.12.0001	5.2	BELANJA MODAL	89.452.450,00	77.206.500,00	(12.245.950,00)	86,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.12.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.452.450,00	77.206.500,00	(12.245.950,00)	86,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.12.0003		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	18.146.677.074,00	15.308.283.915,00	(2.838.393.159,00)	84,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.997.166.824,00	15.175.430.202,00	(2.821.736.622,00)	84,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.997.166.824,00	15.175.430.202,00	(2.821.736.622,00)	84,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.12.0003	5.2	BELANJA MODAL	149.510.250,00	132.853.713,00	(16.656.537,00)	88,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.12.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.510.250,00	132.853.713,00	(16.656.537,00)	88,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.14		Fasilitasi Keprotokolan	0,00	132.061.440,00	132.061.440,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.14.0001		Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	7.052.600,00	7.052.600,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	7.052.600,00	7.052.600,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.052.600,00	7.052.600,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.14.0002		Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	57.908.227,00	57.908.227,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	57.908.227,00	57.908.227,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	57.908.227,00	57.908.227,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.14.0003		Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	0,00	67.100.613,00	67.100.613,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	67.100.613,00	67.100.613,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	67.100.613,00	67.100.613,00	0,00	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042		5	BELANJA DAERAH	35.915.702.370,00	35.409.159.311,00	(506.543.059,00)	98,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	949.513.270,00	920.233.655,00	(29.279.615,00)	96,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	275.707.688,00	268.164.322,00	(7.543.366,00)	97,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.01.0001		Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	60.000.000,00	57.918.994,00	(2.081.006,00)	96,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	57.918.994,00	(2.081.006,00)	96,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	57.918.994,00	(2.081.006,00)	96,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.01.0002		Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	113.169.688,00	108.581.349,00	(4.588.339,00)	95,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	113.169.688,00	108.581.349,00	(4.588.339,00)	95,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.169.688,00	108.581.349,00	(4.588.339,00)	95,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.01.0003		Fasilitasi Penataan Wilayah	102.538.000,00	101.663.979,00	(874.021,00)	99,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	102.538.000,00	101.663.979,00	(874.021,00)	99,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.538.000,00	101.663.979,00	(874.021,00)	99,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	337.685.532,00	330.532.869,00	(7.152.663,00)	97,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.02.0001		Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	233.645.956,00	229.956.867,00	(3.689.089,00)	98,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	233.645.956,00	229.956.867,00	(3.689.089,00)	98,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.645.956,00	229.956.867,00	(3.689.089,00)	98,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.02.0003		Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	104.039.576,00	100.576.002,00	(3.463.574,00)	96,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	104.039.576,00	100.576.002,00	(3.463.574,00)	96,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.039.576,00	100.576.002,00	(3.463.574,00)	96,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	336.120.050,00	321.536.464,00	(14.583.586,00)	95,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.03.0001		Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	104.454.600,00	101.047.876,00	(3.406.724,00)	96,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	104.454.600,00	101.047.876,00	(3.406.724,00)	96,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.454.600,00	101.047.876,00	(3.406.724,00)	96,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.03.0002		Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	104.059.200,00	96.021.584,00	(8.037.616,00)	92,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	104.059.200,00	96.021.584,00	(8.037.616,00)	92,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.059.200,00	96.021.584,00	(8.037.616,00)	92,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.03.0003		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	127.606.250,00	124.467.004,00	(3.139.246,00)	97,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	127.606.250,00	124.467.004,00	(3.139.246,00)	97,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.606.250,00	124.467.004,00	(3.139.246,00)	97,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	29.503.456.368,00	29.274.426.441,00	(229.029.927,00)	99,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	24.590.800.274,00	24.365.856.185,00	(224.944.089,00)	99,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.01.0001		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	374.767.700,00	368.370.182,00	(6.397.518,00)	98,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	374.767.700,00	368.370.182,00	(6.397.518,00)	98,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.767.700,00	368.370.182,00	(6.397.518,00)	98,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.01.0002		Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	24.216.032.574,00	23.997.486.003,00	(218.546.571,00)	99,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.216.032.574,00	23.997.486.003,00	(218.546.571,00)	99,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.284.682.574,00	11.254.036.003,00	(30.646.571,00)	99,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	10.831.950.000,00	10.656.450.000,00	(175.500.000,00)	98,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.01.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.099.400.000,00	2.087.000.000,00	(12.400.000,00)	99,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.826.656.094,00	4.824.526.917,00	(2.129.177,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.02.0001		Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4.826.656.094,00	4.824.526.917,00	(2.129.177,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.826.656.094,00	4.824.526.917,00	(2.129.177,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.826.656.094,00	4.824.526.917,00	(2.129.177,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	86.000.000,00	84.043.339,00	(1.956.661,00)	97,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.03.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	86.000.000,00	84.043.339,00	(1.956.661,00)	97,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	86.000.000,00	84.043.339,00	(1.956.661,00)	97,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	84.043.339,00	(1.956.661,00)	97,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.462.732.732,00	5.214.499.215,00	(248.233.517,00)	95,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	161.678.437,00	155.520.482,00	(6.157.955,00)	96,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	161.678.437,00	155.520.482,00	(6.157.955,00)	96,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	161.678.437,00	155.520.482,00	(6.157.955,00)	96,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.678.437,00	155.520.482,00	(6.157.955,00)	96,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.992.385.461,00	3.772.150.546,00	(220.234.915,00)	94,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.992.385.461,00	3.772.150.546,00	(220.234.915,00)	94,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.992.385.461,00	3.772.150.546,00	(220.234.915,00)	94,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.992.385.461,00	3.772.150.546,00	(220.234.915,00)	94,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.117.000,00	247.606.571,00	(7.510.429,00)	97,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	255.117.000,00	247.606.571,00	(7.510.429,00)	97,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	255.117.000,00	247.606.571,00	(7.510.429,00)	97,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.117.000,00	247.606.571,00	(7.510.429,00)	97,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.203.000,00	524.602.209,00	(8.600.791,00)	98,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	533.203.000,00	524.602.209,00	(8.600.791,00)	98,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	459.882.000,00	453.177.209,00	(6.704.791,00)	98,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	459.882.000,00	453.177.209,00	(6.704.791,00)	98,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	73.321.000,00	71.425.000,00	(1.896.000,00)	97,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.321.000,00	71.425.000,00	(1.896.000,00)	97,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.348.834,00	514.619.407,00	(5.729.427,00)	98,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	520.348.834,00	514.619.407,00	(5.729.427,00)	98,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	520.348.834,00	514.619.407,00	(5.729.427,00)	98,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.348.834,00	514.619.407,00	(5.729.427,00)	98,89	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Biro Hukum

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043		5	BELANJA DAERAH	6.872.877.278,00	5.855.043.415,00	(1.017.833.863,00)	85,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.247.257.850,00	1.989.967.140,00	(257.290.710,00)	88,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.167.232.050,00	1.095.836.821,00	(71.395.229,00)	93,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.01.0001		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	378.714.300,00	365.956.260,00	(12.758.040,00)	96,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	378.714.300,00	365.956.260,00	(12.758.040,00)	96,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.714.300,00	365.956.260,00	(12.758.040,00)	96,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.01.0002		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	117.936.450,00	104.417.048,00	(13.519.402,00)	88,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	117.936.450,00	104.417.048,00	(13.519.402,00)	88,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.936.450,00	104.417.048,00	(13.519.402,00)	88,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.01.0003		Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	161.100.100,00	149.619.550,00	(11.480.550,00)	92,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	161.100.100,00	149.619.550,00	(11.480.550,00)	92,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.100.100,00	149.619.550,00	(11.480.550,00)	92,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.01.0004		Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	509.481.200,00	475.843.963,00	(33.637.237,00)	93,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	509.481.200,00	475.843.963,00	(33.637.237,00)	93,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.481.200,00	475.843.963,00	(33.637.237,00)	93,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	1.080.025.800,00	894.130.319,00	(185.895.481,00)	82,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.02.0001		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	719.369.100,00	534.543.406,00	(184.825.694,00)	74,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	719.369.100,00	534.543.406,00	(184.825.694,00)	74,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	719.369.100,00	534.543.406,00	(184.825.694,00)	74,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.02.0002		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	360.656.700,00	359.586.913,00	(1.069.787,00)	99,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	360.656.700,00	359.586.913,00	(1.069.787,00)	99,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.656.700,00	359.586.913,00	(1.069.787,00)	99,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.625.619.428,00	3.865.076.275,00	(760.543.153,00)	83,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	267.367.400,00	202.964.095,00	(64.403.305,00)	75,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.148.900,00	68.715.005,00	(19.433.895,00)	77,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	88.148.900,00	68.715.005,00	(19.433.895,00)	77,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.148.900,00	68.715.005,00	(19.433.895,00)	77,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	73.508.600,00	58.365.392,00	(15.143.208,00)	79,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	73.508.600,00	58.365.392,00	(15.143.208,00)	79,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.508.600,00	58.365.392,00	(15.143.208,00)	79,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.709.900,00	75.883.698,00	(29.826.202,00)	71,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	105.709.900,00	75.883.698,00	(29.826.202,00)	71,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.709.900,00	75.883.698,00	(29.826.202,00)	71,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.335.613.028,00	2.815.136.233,00	(520.476.795,00)	84,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.239.487.328,00	2.724.812.452,00	(514.674.876,00)	84,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.239.487.328,00	2.724.812.452,00	(514.674.876,00)	84,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.239.487.328,00	2.724.812.452,00	(514.674.876,00)	84,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	96.125.700,00	90.323.781,00	(5.801.919,00)	93,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	96.125.700,00	90.323.781,00	(5.801.919,00)	93,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.125.700,00	90.323.781,00	(5.801.919,00)	93,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.367.600,00	97.325.065,00	(33.042.535,00)	74,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.730.000,00	25.600.000,00	(130.000,00)	99,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.730.000,00	25.600.000,00	(130.000,00)	99,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.730.000,00	25.600.000,00	(130.000,00)	99,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	104.637.600,00	71.725.065,00	(32.912.535,00)	68,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	104.637.600,00	71.725.065,00	(32.912.535,00)	68,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.637.600,00	71.725.065,00	(32.912.535,00)	68,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	470.882.900,00	381.933.250,00	(88.949.650,00)	81,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.678.900,00	17.025.331,00	(6.653.569,00)	71,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.678.900,00	17.025.331,00	(6.653.569,00)	71,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.678.900,00	17.025.331,00	(6.653.569,00)	71,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	447.204.000,00	364.907.919,00	(82.296.081,00)	81,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	447.204.000,00	364.907.919,00	(82.296.081,00)	81,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.204.000,00	364.907.919,00	(82.296.081,00)	81,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.780.000,00	160.166.000,00	(614.000,00)	99,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.780.000,00	160.166.000,00	(614.000,00)	99,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	160.780.000,00	160.166.000,00	(614.000,00)	99,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.780.000,00	160.166.000,00	(614.000,00)	99,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.960.000,00	97.780.402,00	(17.179.598,00)	85,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.960.000,00	97.780.402,00	(17.179.598,00)	85,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	114.960.000,00	97.780.402,00	(17.179.598,00)	85,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.960.000,00	97.780.402,00	(17.179.598,00)	85,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.648.500,00	109.771.230,00	(35.877.270,00)	75,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.288.500,00	83.012.930,00	(33.275.570,00)	71,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	116.288.500,00	83.012.930,00	(33.275.570,00)	71,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.288.500,00	83.012.930,00	(33.275.570,00)	71,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.360.000,00	26.758.300,00	(2.601.700,00)	91,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	29.360.000,00	26.758.300,00	(2.601.700,00)	91,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.360.000,00	26.758.300,00	(2.601.700,00)	91,13	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044		5	BELANJA DAERAH	5.065.668.513,00	4.233.640.252,00	(832.028.261,00)	83,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.337.903.500,00	1.171.212.718,00	(166.690.782,00)	87,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	899.635.500,00	753.475.240,00	(146.160.260,00)	83,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.01.0001		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	649.635.500,00	523.192.969,00	(126.442.531,00)	80,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	649.635.500,00	523.192.969,00	(126.442.531,00)	80,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	649.635.500,00	523.192.969,00	(126.442.531,00)	80,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.01.0002		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	250.000.000,00	230.282.271,00	(19.717.729,00)	92,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	230.282.271,00	(19.717.729,00)	92,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	230.282.271,00	(19.717.729,00)	92,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	30.092.000,00	29.999.538,00	(92.462,00)	99,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.02.0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	30.092.000,00	29.999.538,00	(92.462,00)	99,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.092.000,00	29.999.538,00	(92.462,00)	99,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.092.000,00	29.999.538,00	(92.462,00)	99,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	408.176.000,00	387.737.940,00	(20.438.060,00)	94,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.03.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	155.899.450,00	144.563.040,00	(11.336.410,00)	92,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	155.899.450,00	144.563.040,00	(11.336.410,00)	92,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.899.450,00	144.563.040,00	(11.336.410,00)	92,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.03.0005		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	252.276.550,00	243.174.900,00	(9.101.650,00)	96,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	252.276.550,00	243.174.900,00	(9.101.650,00)	96,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.276.550,00	243.174.900,00	(9.101.650,00)	96,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	357.868.200,00	264.888.020,00	(92.980.180,00)	74,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08.1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	344.126.700,00	251.183.774,00	(92.942.926,00)	72,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08.1.01.0001		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	204.020.000,00	111.454.389,00	(92.565.611,00)	54,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	204.020.000,00	111.454.389,00	(92.565.611,00)	54,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.020.000,00	111.454.389,00	(92.565.611,00)	54,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08.1.01.0002		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	52.804.000,00	52.546.025,00	(257.975,00)	99,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.804.000,00	52.546.025,00	(257.975,00)	99,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.804.000,00	52.546.025,00	(257.975,00)	99,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08.1.01.0003		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	87.302.700,00	87.183.360,00	(119.340,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	87.302.700,00	87.183.360,00	(119.340,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.302.700,00	87.183.360,00	(119.340,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08.1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	13.741.500,00	13.704.246,00	(37.254,00)	99,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08.1.02.0003		Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	13.741.500,00	13.704.246,00	(37.254,00)	99,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.741.500,00	13.704.246,00	(37.254,00)	99,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.741.500,00	13.704.246,00	(37.254,00)	99,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.369.896.813,00	2.797.539.514,00	(572.357.299,00)	83,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.178.408,00	112.439.425,00	(51.738.983,00)	68,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	157.914.408,00	106.316.325,00	(51.598.083,00)	67,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	157.914.408,00	106.316.325,00	(51.598.083,00)	67,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.914.408,00	106.316.325,00	(51.598.083,00)	67,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.088.000,00	2.000.000,00	(88.000,00)	95,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.088.000,00	2.000.000,00	(88.000,00)	95,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.088.000,00	2.000.000,00	(88.000,00)	95,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.176.000,00	4.123.100,00	(52.900,00)	98,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.176.000,00	4.123.100,00	(52.900,00)	98,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.176.000,00	4.123.100,00	(52.900,00)	98,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.560.386.480,00	2.140.211.899,00	(420.174.581,00)	83,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.558.298.480,00	2.138.131.899,00	(420.166.581,00)	83,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.558.298.480,00	2.138.131.899,00	(420.166.581,00)	83,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.558.298.480,00	2.138.131.899,00	(420.166.581,00)	83,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.088.000,00	2.080.000,00	(8.000,00)	99,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.088.000,00	2.080.000,00	(8.000,00)	99,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.088.000,00	2.080.000,00	(8.000,00)	99,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.182.000,00	1.236.500,00	(25.945.500,00)	4,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.182.000,00	1.236.500,00	(25.945.500,00)	4,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	27.182.000,00	1.236.500,00	(25.945.500,00)	4,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.182.000,00	1.236.500,00	(25.945.500,00)	4,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.823.500,00	72.990.531,00	(2.832.969,00)	96,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.163.500,00	10.017.238,00	(146.262,00)	98,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.163.500,00	10.017.238,00	(146.262,00)	98,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.163.500,00	10.017.238,00	(146.262,00)	98,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.860.000,00	49.173.293,00	(2.686.707,00)	94,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	51.860.000,00	49.173.293,00	(2.686.707,00)	94,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.860.000,00	49.173.293,00	(2.686.707,00)	94,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.438.000,00	64.900.000,00	(538.000,00)	99,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.438.000,00	64.900.000,00	(538.000,00)	99,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	65.438.000,00	64.900.000,00	(538.000,00)	99,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.438.000,00	64.900.000,00	(538.000,00)	99,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.702.025,00	313.987.699,00	(51.714.326,00)	85,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.002.025,00	43.492.699,00	(509.326,00)	98,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	44.002.025,00	43.492.699,00	(509.326,00)	98,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.002.025,00	43.492.699,00	(509.326,00)	98,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321.700.000,00	270.495.000,00	(51.205.000,00)	84,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	321.700.000,00	270.495.000,00	(51.205.000,00)	84,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.700.000,00	270.495.000,00	(51.205.000,00)	84,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.186.400,00	91.773.460,00	(19.412.940,00)	82,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.836.400,00	75.593.000,00	(12.243.400,00)	86,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	87.836.400,00	75.593.000,00	(12.243.400,00)	86,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.836.400,00	75.593.000,00	(12.243.400,00)	86,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.500.000,00	3.330.460,00	(7.169.540,00)	31,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	3.330.460,00	(7.169.540,00)	31,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	3.330.460,00	(7.169.540,00)	31,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	100,00	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DAERAH**
Organisasi : **Biro Pengadaan Barang dan Jasa**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045		5	BELANJA DAERAH	8.250.312.410,00	6.790.757.226,00	(1.459.555.184,00)	82,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.395.871.990,00	985.500.143,00	(410.371.847,00)	70,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	881.431.500,00	750.755.362,00	(130.676.138,00)	85,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.01.0001		Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	320.604.200,00	299.059.417,00	(21.544.783,00)	93,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	320.604.200,00	299.059.417,00	(21.544.783,00)	93,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.604.200,00	299.059.417,00	(21.544.783,00)	93,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.01.0002		Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	427.232.800,00	334.993.450,00	(92.239.350,00)	78,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	427.232.800,00	334.993.450,00	(92.239.350,00)	78,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.232.800,00	334.993.450,00	(92.239.350,00)	78,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.01.0003		Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	133.594.500,00	116.702.495,00	(16.892.005,00)	87,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	133.594.500,00	116.702.495,00	(16.892.005,00)	87,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.594.500,00	116.702.495,00	(16.892.005,00)	87,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	187.047.240,00	86.206.557,00	(100.840.683,00)	46,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.02.0001		Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	62.965.265,00	18.542.450,00	(44.422.815,00)	29,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	62.965.265,00	18.542.450,00	(44.422.815,00)	29,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.965.265,00	18.542.450,00	(44.422.815,00)	29,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.02.0002		Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	85.664.600,00	53.353.900,00	(32.310.700,00)	62,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	85.664.600,00	53.353.900,00	(32.310.700,00)	62,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.664.600,00	53.353.900,00	(32.310.700,00)	62,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.02.0003		Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	38.417.375,00	14.310.207,00	(24.107.168,00)	37,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	38.417.375,00	14.310.207,00	(24.107.168,00)	37,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.417.375,00	14.310.207,00	(24.107.168,00)	37,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	327.393.250,00	148.538.224,00	(178.855.026,00)	45,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.03.0001		Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	118.864.322,00	7.976.700,00	(110.887.622,00)	6,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	118.864.322,00	7.976.700,00	(110.887.622,00)	6,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.864.322,00	7.976.700,00	(110.887.622,00)	6,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.03.0002		Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	147.661.002,00	101.044.404,00	(46.616.598,00)	68,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	147.661.002,00	101.044.404,00	(46.616.598,00)	68,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.661.002,00	101.044.404,00	(46.616.598,00)	68,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.03.0003		Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	60.867.926,00	39.517.120,00	(21.350.806,00)	64,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.867.926,00	39.517.120,00	(21.350.806,00)	64,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.867.926,00	39.517.120,00	(21.350.806,00)	64,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.854.440.420,00	5.805.257.083,00	(1.049.183.337,00)	84,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	308.080.000,00	260.538.987,00	(47.541.013,00)	84,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	308.080.000,00	260.538.987,00	(47.541.013,00)	84,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	308.080.000,00	260.538.987,00	(47.541.013,00)	84,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.080.000,00	260.538.987,00	(47.541.013,00)	84,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.013.900.210,00	5.095.323.090,00	(918.577.120,00)	84,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.013.900.210,00	5.095.323.090,00	(918.577.120,00)	84,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.013.900.210,00	5.095.323.090,00	(918.577.120,00)	84,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.013.900.210,00	5.095.323.090,00	(918.577.120,00)	84,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.590.000,00	54.750.000,00	(840.000,00)	98,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.590.000,00	54.750.000,00	(840.000,00)	98,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	55.590.000,00	54.750.000,00	(840.000,00)	98,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.590.000,00	54.750.000,00	(840.000,00)	98,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.870.210,00	394.645.006,00	(82.225.204,00)	82,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	476.870.210,00	394.645.006,00	(82.225.204,00)	82,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	476.870.210,00	394.645.006,00	(82.225.204,00)	82,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.870.210,00	394.645.006,00	(82.225.204,00)	82,75	

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Biro Organisasi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046		5	BELANJA DAERAH	5.870.911.110,00	4.765.140.462,00	(1.105.770.648,00)	81,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.075.402.806,00	929.510.289,00	(145.892.517,00)	86,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	438.871.175,00	416.353.708,00	(22.517.467,00)	94,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.01.0001		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	212.740.000,00	191.661.044,00	(21.078.956,00)	90,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	212.740.000,00	191.661.044,00	(21.078.956,00)	90,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.740.000,00	191.661.044,00	(21.078.956,00)	90,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.01.0003		Penataan Analisis Jabatan	226.131.175,00	224.692.664,00	(1.438.511,00)	99,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	226.131.175,00	224.692.664,00	(1.438.511,00)	99,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.131.175,00	224.692.664,00	(1.438.511,00)	99,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	636.531.631,00	513.156.581,00	(123.375.050,00)	80,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.02.0001		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	172.153.900,00	136.987.406,00	(35.166.494,00)	79,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	172.153.900,00	136.987.406,00	(35.166.494,00)	79,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.153.900,00	136.987.406,00	(35.166.494,00)	79,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.02.0002		Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	185.729.200,00	160.684.252,00	(25.044.948,00)	86,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	185.729.200,00	160.684.252,00	(25.044.948,00)	86,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.729.200,00	160.684.252,00	(25.044.948,00)	86,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.02.0004		Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	108.669.398,00	78.992.822,00	(29.676.576,00)	72,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	108.669.398,00	78.992.822,00	(29.676.576,00)	72,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.669.398,00	78.992.822,00	(29.676.576,00)	72,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.02.0005		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	169.979.133,00	136.492.101,00	(33.487.032,00)	80,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	169.979.133,00	136.492.101,00	(33.487.032,00)	80,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.979.133,00	136.492.101,00	(33.487.032,00)	80,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.795.508.304,00	3.835.630.173,00	(959.878.131,00)	79,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	226.757.800,00	104.899.782,00	(121.858.018,00)	46,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	226.757.800,00	104.899.782,00	(121.858.018,00)	46,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	226.757.800,00	104.899.782,00	(121.858.018,00)	46,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.757.800,00	104.899.782,00	(121.858.018,00)	46,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.607.084.354,00	2.915.065.106,00	(692.019.248,00)	80,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.526.096.454,00	2.859.786.226,00	(666.310.228,00)	81,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.526.096.454,00	2.859.786.226,00	(666.310.228,00)	81,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.526.096.454,00	2.859.786.226,00	(666.310.228,00)	81,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	80.987.900,00	55.278.880,00	(25.709.020,00)	68,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	80.987.900,00	55.278.880,00	(25.709.020,00)	68,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.987.900,00	55.278.880,00	(25.709.020,00)	68,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.134.700,00	224.686.547,00	(18.448.153,00)	92,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	243.134.700,00	224.686.547,00	(18.448.153,00)	92,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	113.408.700,00	95.277.820,00	(18.130.880,00)	84,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.408.700,00	95.277.820,00	(18.130.880,00)	84,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	129.726.000,00	129.408.727,00	(317.273,00)	99,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.726.000,00	129.408.727,00	(317.273,00)	99,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.531.450,00	590.978.738,00	(127.552.712,00)	82,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	718.531.450,00	590.978.738,00	(127.552.712,00)	82,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	718.531.450,00	590.978.738,00	(127.552.712,00)	82,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	718.531.450,00	590.978.738,00	(127.552.712,00)	82,24	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Biro Umum

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047		5	BELANJA DAERAH	15.155.138.548,00	12.271.391.158,00	(2.883.747.390,00)	80,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.155.138.548,00	12.271.391.158,00	(2.883.747.390,00)	80,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.944.675,00	114.795.793,00	(24.148.882,00)	82,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	107.456.675,00	85.356.482,00	(22.100.193,00)	79,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	107.456.675,00	85.356.482,00	(22.100.193,00)	79,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.456.675,00	85.356.482,00	(22.100.193,00)	79,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.488.000,00	29.439.311,00	(2.048.689,00)	93,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	31.488.000,00	29.439.311,00	(2.048.689,00)	93,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.488.000,00	29.439.311,00	(2.048.689,00)	93,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.739.005.643,00	5.476.169.887,00	(1.262.835.756,00)	81,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.614.965.018,00	5.355.278.047,00	(1.259.686.971,00)	80,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.614.965.018,00	5.355.278.047,00	(1.259.686.971,00)	80,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.614.965.018,00	5.355.278.047,00	(1.259.686.971,00)	80,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	124.040.625,00	120.891.840,00	(3.148.785,00)	97,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	124.040.625,00	120.891.840,00	(3.148.785,00)	97,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.040.625,00	120.891.840,00	(3.148.785,00)	97,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	114.746.000,00	106.056.080,00	(8.689.920,00)	92,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	114.746.000,00	106.056.080,00	(8.689.920,00)	92,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	114.746.000,00	106.056.080,00	(8.689.920,00)	92,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.746.000,00	106.056.080,00	(8.689.920,00)	92,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.148.000,00	52.680.560,00	(26.467.440,00)	66,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.148.000,00	52.680.560,00	(26.467.440,00)	66,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	79.148.000,00	52.680.560,00	(26.467.440,00)	66,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.148.000,00	52.680.560,00	(26.467.440,00)	66,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.390.364.150,00	1.201.011.794,00	(189.352.356,00)	86,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.390.364.150,00	1.201.011.794,00	(189.352.356,00)	86,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	886.280.000,00	741.374.400,00	(144.905.600,00)	83,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	886.280.000,00	741.374.400,00	(144.905.600,00)	83,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	504.084.150,00	459.637.394,00	(44.446.756,00)	91,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	504.084.150,00	459.637.394,00	(44.446.756,00)	91,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.394.591.060,00	1.748.219.543,00	(646.371.517,00)	73,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.394.591.060,00	1.748.219.543,00	(646.371.517,00)	73,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.394.591.060,00	1.748.219.543,00	(646.371.517,00)	73,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.394.591.060,00	1.748.219.543,00	(646.371.517,00)	73,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.491.910.220,00	2.928.889.839,00	(563.020.381,00)	83,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	752.651.200,00	637.367.441,00	(115.283.759,00)	84,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	752.651.200,00	637.367.441,00	(115.283.759,00)	84,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	752.651.200,00	637.367.441,00	(115.283.759,00)	84,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.739.259.020,00	2.291.522.398,00	(447.736.622,00)	83,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.739.259.020,00	2.291.522.398,00	(447.736.622,00)	83,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.739.259.020,00	2.291.522.398,00	(447.736.622,00)	83,65	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.14		Fasilitasi Keprotokolan	806.428.800,00	643.567.662,00	(162.861.138,00)	79,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.14.0001		Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	205.539.100,00	171.939.317,00	(33.599.783,00)	83,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	205.539.100,00	171.939.317,00	(33.599.783,00)	83,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.539.100,00	171.939.317,00	(33.599.783,00)	83,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.14.0002		Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	390.200.000,00	329.344.358,00	(60.855.642,00)	84,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	390.200.000,00	329.344.358,00	(60.855.642,00)	84,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.200.000,00	329.344.358,00	(60.855.642,00)	84,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.14.0003		Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	210.689.700,00	142.283.987,00	(68.405.713,00)	67,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	210.689.700,00	142.283.987,00	(68.405.713,00)	67,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.689.700,00	142.283.987,00	(68.405.713,00)	67,53	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DPRD**
Organisasi : **Sekretariat DPRD**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000		5	BELANJA DAERAH	116.082.323.230,00	108.900.639.478,00	(7.181.683.752,00)	93,81	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	66.560.275.350,00	60.586.041.758,00	(5.974.233.592,00)	91,02	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	7.046.379.050,00	6.100.090.597,00	(946.288.453,00)	86,57	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.01.0002		Pembahasan Rancangan Perda	7.046.379.050,00	6.100.090.597,00	(946.288.453,00)	86,57	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.046.379.050,00	6.100.090.597,00	(946.288.453,00)	86,57	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.046.379.050,00	6.100.090.597,00	(946.288.453,00)	86,57	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	22.172.161.199,00	21.627.200.691,00	(544.960.508,00)	97,54	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.04.0001		Orientasi DPRD	18.874.261.599,00	18.409.795.255,00	(464.466.344,00)	97,53	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.874.261.599,00	18.409.795.255,00	(464.466.344,00)	97,53	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.874.261.599,00	18.409.795.255,00	(464.466.344,00)	97,53	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.04.0006		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3.297.899.600,00	3.217.405.436,00	(80.494.164,00)	97,55	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.297.899.600,00	3.217.405.436,00	(80.494.164,00)	97,55	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.297.899.600,00	3.217.405.436,00	(80.494.164,00)	97,55	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	35.773.312.912,00	31.612.962.126,00	(4.160.350.786,00)	88,37	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.05.0001		Kunjungan Kerja dalam Daerah	21.092.620.229,00	17.459.418.638,00	(3.633.201.591,00)	82,77	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.092.620.229,00	17.459.418.638,00	(3.633.201.591,00)	82,77	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.092.620.229,00	17.459.418.638,00	(3.633.201.591,00)	82,77	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.05.0003		Pelaksanaan Reses	14.680.692.683,00	14.153.543.488,00	(527.149.195,00)	96,40	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.680.692.683,00	14.153.543.488,00	(527.149.195,00)	96,40	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.680.692.683,00	14.153.543.488,00	(527.149.195,00)	96,40	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	1.568.422.189,00	1.245.788.344,00	(322.633.845,00)	79,42	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.08.0001		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.568.422.189,00	1.245.788.344,00	(322.633.845,00)	79,42	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.568.422.189,00	1.245.788.344,00	(322.633.845,00)	79,42	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.568.422.189,00	1.245.788.344,00	(322.633.845,00)	79,42	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	49.522.047.880,00	48.314.597.720,00	(1.207.450.160,00)	97,56	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	360.416.950,00	332.019.475,00	(28.397.475,00)	92,12	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	360.416.950,00	332.019.475,00	(28.397.475,00)	92,12	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	360.416.950,00	332.019.475,00	(28.397.475,00)	92,12	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.416.950,00	332.019.475,00	(28.397.475,00)	92,12	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.584.236.501,00	8.508.086.464,00	(76.150.037,00)	99,11	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.301.554.271,00	8.225.743.124,00	(75.811.147,00)	99,08	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.301.554.271,00	8.225.743.124,00	(75.811.147,00)	99,08	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.301.554.271,00	8.225.743.124,00	(75.811.147,00)	99,08	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	282.682.230,00	282.343.340,00	(338.890,00)	99,88	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	282.682.230,00	282.343.340,00	(338.890,00)	99,88	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.682.230,00	282.343.340,00	(338.890,00)	99,88	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.022.134.400,00	936.555.928,00	(85.578.472,00)	91,62	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.022.134.400,00	936.555.928,00	(85.578.472,00)	91,62	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.022.134.400,00	936.555.928,00	(85.578.472,00)	91,62	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.022.134.400,00	936.555.928,00	(85.578.472,00)	91,62	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.704.297.451,00	6.454.053.045,00	(250.244.406,00)	96,26	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.704.297.451,00	6.454.053.045,00	(250.244.406,00)	96,26	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.444.400.251,00	4.245.651.465,00	(198.748.786,00)	95,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.444.400.251,00	4.245.651.465,00	(198.748.786,00)	95,52	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.259.897.200,00	2.208.401.580,00	(51.495.620,00)	97,72	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.250.884.200,00	2.199.401.580,00	(51.482.620,00)	97,71	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.06.0002	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.013.000,00	9.000.000,00	(13.000,00)	99,85	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.947.355.520,00	4.573.517.305,00	(373.838.215,00)	92,44	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.947.355.520,00	4.573.517.305,00	(373.838.215,00)	92,44	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.947.355.520,00	4.573.517.305,00	(373.838.215,00)	92,44	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.947.355.520,00	4.573.517.305,00	(373.838.215,00)	92,44	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	26.320.698.308,00	26.039.205.267,00	(281.493.041,00)	98,93	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.15.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26.320.698.308,00	26.039.205.267,00	(281.493.041,00)	98,93	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.320.698.308,00	26.039.205.267,00	(281.493.041,00)	98,93	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	26.095.698.308,00	25.909.980.267,00	(185.718.041,00)	99,28	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.15.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	129.225.000,00	(95.775.000,00)	57,43	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.16		Layanan Administrasi DPRD	1.582.908.750,00	1.471.160.236,00	(111.748.514,00)	92,94	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.16.0003		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.582.908.750,00	1.471.160.236,00	(111.748.514,00)	92,94	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.16.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.582.908.750,00	1.471.160.236,00	(111.748.514,00)	92,94	
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.582.908.750,00	1.471.160.236,00	(111.748.514,00)	92,94	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **PENGLOLAAN PENGHUBUNG**
Organisasi : **Badan Penghubung**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000		5	BELANJA DAERAH	9.406.267.605,00	8.808.478.710,00	(597.788.895,00)	93,64	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.02		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.415.253.654,00	1.370.627.066,00	(44.626.588,00)	96,84	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.02.1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.415.253.654,00	1.370.627.066,00	(44.626.588,00)	96,84	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.02.1.01.0002		Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	449.990.000,00	437.930.000,00	(12.060.000,00)	97,31	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	449.990.000,00	437.930.000,00	(12.060.000,00)	97,31	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.990.000,00	437.930.000,00	(12.060.000,00)	97,31	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.02.1.01.0004		Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	115.084.480,00	110.552.076,00	(4.532.404,00)	96,06	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	115.084.480,00	110.552.076,00	(4.532.404,00)	96,06	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.084.480,00	110.552.076,00	(4.532.404,00)	96,06	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.02.1.01.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	850.179.174,00	822.144.990,00	(28.034.184,00)	96,70	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	764.429.174,00	736.644.990,00	(27.784.184,00)	96,36	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	764.429.174,00	736.644.990,00	(27.784.184,00)	96,36	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.02.1.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	85.750.000,00	85.500.000,00	(250.000,00)	99,70	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.02.1.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.750.000,00	85.500.000,00	(250.000,00)	99,70	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.991.013.951,00	7.437.851.644,00	(553.162.307,00)	93,07	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.685.565.451,00	5.143.325.176,00	(542.240.275,00)	90,46	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.974.014.227,00	2.845.754.459,00	(128.259.768,00)	95,68	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.974.014.227,00	2.845.754.459,00	(128.259.768,00)	95,68	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.974.014.227,00	2.845.754.459,00	(128.259.768,00)	95,68	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.679.491.224,00	2.266.975.897,00	(412.515.327,00)	84,60	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.679.491.224,00	2.266.975.897,00	(412.515.327,00)	84,60	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.679.491.224,00	2.266.975.897,00	(412.515.327,00)	84,60	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	32.060.000,00	30.594.820,00	(1.465.180,00)	95,42	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	32.060.000,00	30.594.820,00	(1.465.180,00)	95,42	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.060.000,00	30.594.820,00	(1.465.180,00)	95,42	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.175.028.500,00	1.170.258.162,00	(4.770.338,00)	99,59	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	973.892.500,00	969.192.987,00	(4.699.513,00)	99,51	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	757.687.500,00	757.667.987,00	(19.513,00)	99,99	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	757.687.500,00	757.667.987,00	(19.513,00)	99,99	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	216.205.000,00	211.525.000,00	(4.680.000,00)	97,83	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	216.205.000,00	211.525.000,00	(4.680.000,00)	97,83	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.136.000,00	201.065.175,00	(70.825,00)	99,96	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	201.136.000,00	201.065.175,00	(70.825,00)	99,96	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.136.000,00	201.065.175,00	(70.825,00)	99,96	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.130.420.000,00	1.124.268.306,00	(6.151.694,00)	99,45	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.130.420.000,00	1.124.268.306,00	(6.151.694,00)	99,45	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.130.420.000,00	1.124.268.306,00	(6.151.694,00)	99,45	
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.130.420.000,00	1.124.268.306,00	(6.151.694,00)	99,45	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **PERENCANAAN**
Organisasi : **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000		5	BELANJA DAERAH	17.520.586.991,00	17.174.002.755,00	(346.584.236,00)	98,02	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	971.992.000,00	953.051.149,00	(18.940.851,00)	98,05	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	560.761.500,00	554.698.357,00	(6.063.143,00)	98,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.01.0006		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	560.761.500,00	554.698.357,00	(6.063.143,00)	98,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	560.761.500,00	554.698.357,00	(6.063.143,00)	98,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.761.500,00	554.698.357,00	(6.063.143,00)	98,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	167.439.800,00	155.595.508,00	(11.844.292,00)	92,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.02.0001		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	167.439.800,00	155.595.508,00	(11.844.292,00)	92,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	167.439.800,00	155.595.508,00	(11.844.292,00)	92,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.439.800,00	155.595.508,00	(11.844.292,00)	92,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	243.790.700,00	242.757.284,00	(1.033.416,00)	99,57	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.03.0001		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	70.554.500,00	70.246.320,00	(308.180,00)	99,56	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	70.554.500,00	70.246.320,00	(308.180,00)	99,56	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.554.500,00	70.246.320,00	(308.180,00)	99,56	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.03.0003		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	173.236.200,00	172.510.964,00	(725.236,00)	99,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	173.236.200,00	172.510.964,00	(725.236,00)	99,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.236.200,00	172.510.964,00	(725.236,00)	99,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.430.801.050,00	2.418.781.567,00	(12.019.483,00)	99,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	727.752.250,00	723.706.627,00	(4.045.623,00)	99,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	146.199.900,00	143.331.688,00	(2.868.212,00)	98,03	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	146.199.900,00	143.331.688,00	(2.868.212,00)	98,03	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.199.900,00	143.331.688,00	(2.868.212,00)	98,03	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	59.120.000,00	58.789.020,00	(330.980,00)	99,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	59.120.000,00	58.789.020,00	(330.980,00)	99,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.120.000,00	58.789.020,00	(330.980,00)	99,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	18.500.000,00	18.169.484,00	(330.516,00)	98,21	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.500.000,00	18.169.484,00	(330.516,00)	98,21	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	18.169.484,00	(330.516,00)	98,21	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	213.079.900,00	212.877.174,00	(202.726,00)	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	213.079.900,00	212.877.174,00	(202.726,00)	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.079.900,00	212.877.174,00	(202.726,00)	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01.0007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	290.852.450,00	290.539.261,00	(313.189,00)	99,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	290.852.450,00	290.539.261,00	(313.189,00)	99,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.852.450,00	290.539.261,00	(313.189,00)	99,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	995.336.325,00	988.588.846,00	(6.747.479,00)	99,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.02.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	215.345.600,00	215.126.242,00	(219.358,00)	99,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	215.345.600,00	215.126.242,00	(219.358,00)	99,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.345.600,00	215.126.242,00	(219.358,00)	99,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.02.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	215.413.250,00	213.467.819,00	(1.945.431,00)	99,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	215.413.250,00	213.467.819,00	(1.945.431,00)	99,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.413.250,00	213.467.819,00	(1.945.431,00)	99,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.02.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	564.577.475,00	559.994.785,00	(4.582.690,00)	99,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	564.577.475,00	559.994.785,00	(4.582.690,00)	99,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	564.577.475,00	559.994.785,00	(4.582.690,00)	99,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	707.712.475,00	706.486.094,00	(1.226.381,00)	99,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	121.160.475,00	120.808.559,00	(351.916,00)	99,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	121.160.475,00	120.808.559,00	(351.916,00)	99,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.160.475,00	120.808.559,00	(351.916,00)	99,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03.0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	113.074.000,00	112.936.895,00	(137.105,00)	99,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	113.074.000,00	112.936.895,00	(137.105,00)	99,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.074.000,00	112.936.895,00	(137.105,00)	99,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	97.112.000,00	96.904.012,00	(207.988,00)	99,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	97.112.000,00	96.904.012,00	(207.988,00)	99,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.112.000,00	96.904.012,00	(207.988,00)	99,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	252.390.000,00	252.188.131,00	(201.869,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	252.390.000,00	252.188.131,00	(201.869,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.390.000,00	252.188.131,00	(201.869,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	123.976.000,00	123.648.497,00	(327.503,00)	99,73	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	123.976.000,00	123.648.497,00	(327.503,00)	99,73	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.976.000,00	123.648.497,00	(327.503,00)	99,73	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.117.793.941,00	13.802.170.039,00	(315.623.902,00)	97,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.502.626.756,00	1.475.149.682,00	(27.477.074,00)	98,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	971.355.756,00	954.933.763,00	(16.421.993,00)	98,30	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	971.355.756,00	954.933.763,00	(16.421.993,00)	98,30	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	971.355.756,00	954.933.763,00	(16.421.993,00)	98,30	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	531.271.000,00	520.215.919,00	(11.055.081,00)	97,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	531.271.000,00	520.215.919,00	(11.055.081,00)	97,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.271.000,00	520.215.919,00	(11.055.081,00)	97,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.716.683.835,00	9.657.526.690,00	(59.157.145,00)	99,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.616.683.835,00	9.558.213.850,00	(58.469.985,00)	99,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.616.683.835,00	9.558.213.850,00	(58.469.985,00)	99,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.616.683.835,00	9.558.213.850,00	(58.469.985,00)	99,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000,00	99.312.840,00	(687.160,00)	99,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.312.840,00	(687.160,00)	99,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.312.840,00	(687.160,00)	99,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.413.550,00	178.831.100,00	(21.582.450,00)	89,23	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.413.550,00	178.831.100,00	(21.582.450,00)	89,23	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	200.413.550,00	178.831.100,00	(21.582.450,00)	89,23	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.413.550,00	178.831.100,00	(21.582.450,00)	89,23	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.500.593.700,00	1.365.539.076,00	(135.054.624,00)	90,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.593.700,00	1.365.539.076,00	(135.054.624,00)	90,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.083.598.200,00	982.016.076,00	(101.582.124,00)	90,62	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.083.598.200,00	982.016.076,00	(101.582.124,00)	90,62	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	416.995.500,00	383.523.000,00	(33.472.500,00)	91,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	416.995.500,00	383.523.000,00	(33.472.500,00)	91,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.197.476.100,00	1.125.123.491,00	(72.352.609,00)	93,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.197.476.100,00	1.125.123.491,00	(72.352.609,00)	93,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.197.476.100,00	1.125.123.491,00	(72.352.609,00)	93,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.197.476.100,00	1.125.123.491,00	(72.352.609,00)	93,95	

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
Organisasi : **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000		5	BELANJA DAERAH	832.735.184,00	812.245.372,00	(20.489.812,00)	97,53	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	832.735.184,00	812.245.372,00	(20.489.812,00)	97,53	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	324.868.534,00	308.499.701,00	(16.368.833,00)	94,96	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.01.0012		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	324.868.534,00	308.499.701,00	(16.368.833,00)	94,96	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	324.868.534,00	308.499.701,00	(16.368.833,00)	94,96	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.868.534,00	308.499.701,00	(16.368.833,00)	94,96	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	113.248.000,00	113.058.083,00	(189.917,00)	99,83	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.02.0001		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	113.248.000,00	113.058.083,00	(189.917,00)	99,83	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	113.248.000,00	113.058.083,00	(189.917,00)	99,83	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.248.000,00	113.058.083,00	(189.917,00)	99,83	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	201.444.050,00	200.236.362,00	(1.207.688,00)	99,40	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.03.0001		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	119.690.250,00	118.795.860,00	(894.390,00)	99,25	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	119.690.250,00	118.795.860,00	(894.390,00)	99,25	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.690.250,00	118.795.860,00	(894.390,00)	99,25	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.03.0007		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	81.753.800,00	81.440.502,00	(313.298,00)	99,61	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	81.753.800,00	81.440.502,00	(313.298,00)	99,61	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.753.800,00	81.440.502,00	(313.298,00)	99,61	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	193.174.600,00	190.451.226,00	(2.723.374,00)	98,59	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.04.0001		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	93.434.900,00	93.127.650,00	(307.250,00)	99,67	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	93.434.900,00	93.127.650,00	(307.250,00)	99,67	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.434.900,00	93.127.650,00	(307.250,00)	99,67	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.04.0004		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	99.739.700,00	97.323.576,00	(2.416.124,00)	97,57	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	99.739.700,00	97.323.576,00	(2.416.124,00)	97,57	
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.739.700,00	97.323.576,00	(2.416.124,00)	97,57	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **KEUANGAN**
Organisasi : **Badan Keuangan Provinsi Gorontalo**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.53.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.875.170.081.518,00	1.870.392.905.818,23	(4.777.175.699,77)	99,74	
	5.02.0.00.0.00.53.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	467.297.103.548,00	483.562.056.702,23	16.264.953.154,23	103,48	
	5.02.0.00.0.00.53.0000		4.1.01	Pajak Daerah	437.626.291.107,00	457.233.185.366,00	19.606.894.259,00	104,48	
	5.02.0.00.0.00.53.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.219.035.031,00	11.580.368.337,00	1.361.333.306,00	113,32	
	5.02.0.00.0.00.53.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.451.777.410,00	14.748.502.999,23	(4.703.274.410,77)	75,82	
	5.02.0.00.0.00.53.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.406.269.839.970,00	1.385.451.449.664,00	(20.818.390.306,00)	98,51	
	5.02.0.00.0.00.53.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.406.269.839.970,00	1.385.451.449.664,00	(20.818.390.306,00)	98,51	
	5.02.0.00.0.00.53.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.603.138.000,00	1.379.399.452,00	(223.738.548,00)	86,04	
	5.02.0.00.0.00.53.0000		4.3.01	Pendapatan Hibah	1.103.138.000,00	915.839.452,00	(187.298.548,00)	83,02	
	5.02.0.00.0.00.53.0000		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000,00	463.560.000,00	(36.440.000,00)	92,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000		5	BELANJA DAERAH	296.216.225.347,00	282.652.308.260,00	(13.563.917.087,00)	95,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	224.955.150.209,00	216.720.352.167,00	(8.234.798.042,00)	96,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	454.951.000,00	437.702.793,00	(17.248.207,00)	96,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.01.0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	91.039.450,00	89.752.884,00	(1.286.566,00)	98,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	91.039.450,00	89.752.884,00	(1.286.566,00)	98,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.039.450,00	89.752.884,00	(1.286.566,00)	98,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	64.474.500,00	59.293.999,00	(5.180.501,00)	91,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	64.474.500,00	59.293.999,00	(5.180.501,00)	91,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.474.500,00	59.293.999,00	(5.180.501,00)	91,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.01.0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	199.436.250,00	194.890.568,00	(4.545.682,00)	97,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	199.436.250,00	194.890.568,00	(4.545.682,00)	97,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.436.250,00	194.890.568,00	(4.545.682,00)	97,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.01.0008		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100.000.800,00	93.765.342,00	(6.235.458,00)	93,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.800,00	93.765.342,00	(6.235.458,00)	93,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.800,00	93.765.342,00	(6.235.458,00)	93,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	284.564.800,00	266.171.224,00	(18.393.576,00)	93,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.02.0008		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	284.564.800,00	266.171.224,00	(18.393.576,00)	93,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	284.564.800,00	266.171.224,00	(18.393.576,00)	93,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.564.800,00	266.171.224,00	(18.393.576,00)	93,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	7.724.083.556,00	7.788.776.798,00	64.693.242,00	100,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.03.0001		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	351.829.300,00	348.246.730,00	(3.582.570,00)	98,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	351.829.300,00	348.246.730,00	(3.582.570,00)	98,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.829.300,00	348.246.730,00	(3.582.570,00)	98,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.03.0003		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	199.959.250,00	189.253.127,00	(10.706.123,00)	94,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	199.959.250,00	189.253.127,00	(10.706.123,00)	94,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.959.250,00	189.253.127,00	(10.706.123,00)	94,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.03.0004		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	6.707.443.806,00	6.797.331.898,00	89.888.092,00	101,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.707.443.806,00	6.797.331.898,00	89.888.092,00	101,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.431.759,00	358.049.553,00	(382.206,00)	99,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.03.0004	5.1.03	Belanja Bunga	6.349.012.047,00	6.439.282.345,00	90.270.298,00	101,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.03.0006		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	464.851.200,00	453.945.043,00	(10.906.157,00)	97,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	464.851.200,00	453.945.043,00	(10.906.157,00)	97,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	464.851.200,00	453.945.043,00	(10.906.157,00)	97,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	878.745.850,00	854.637.583,00	(24.108.267,00)	97,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.04.0001		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	259.932.800,00	249.587.832,00	(10.344.968,00)	96,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	259.932.800,00	249.587.832,00	(10.344.968,00)	96,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.932.800,00	249.587.832,00	(10.344.968,00)	96,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.04.0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	425.412.300,00	418.277.829,00	(7.134.471,00)	98,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	425.412.300,00	418.277.829,00	(7.134.471,00)	98,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.412.300,00	418.277.829,00	(7.134.471,00)	98,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.04.0009		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	193.400.750,00	186.771.922,00	(6.628.828,00)	96,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	193.400.750,00	186.771.922,00	(6.628.828,00)	96,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.400.750,00	186.771.922,00	(6.628.828,00)	96,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	215.101.005.103,00	206.905.010.980,00	(8.195.994.123,00)	96,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.05.0008		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	8.471.906.618,00	7.301.497.713,00	(1.170.408.905,00)	86,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.05.0008	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	(795.408.905,00)	85,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.05.0008	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	(795.408.905,00)	85,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.05.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	2.975.000.000,00	2.600.000.000,00	(375.000.000,00)	87,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.05.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.975.000.000,00	2.600.000.000,00	(375.000.000,00)	87,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.05.0010		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	206.629.098.485,00	199.603.513.267,00	(7.025.585.218,00)	96,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.05.0010	5.4	BELANJA TRANSFER	206.629.098.485,00	199.603.513.267,00	(7.025.585.218,00)	96,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.05.0010	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	206.629.098.485,00	199.603.513.267,00	(7.025.585.218,00)	96,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Lingkup Keuangan Daerah	511.799.900,00	468.052.789,00	(43.747.111,00)	91,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.06.0002		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	511.799.900,00	468.052.789,00	(43.747.111,00)	91,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	511.799.900,00	468.052.789,00	(43.747.111,00)	91,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	511.799.900,00	468.052.789,00	(43.747.111,00)	91,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.241.847.275,00	1.199.447.882,00	(42.399.393,00)	96,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.241.847.275,00	1.199.447.882,00	(42.399.393,00)	96,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.03.1.01.0001		Penyusunan Standar Harga	353.424.450,00	339.875.036,00	(13.549.414,00)	96,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	353.424.450,00	339.875.036,00	(13.549.414,00)	96,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.424.450,00	339.875.036,00	(13.549.414,00)	96,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.03.1.01.0004		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	241.272.700,00	230.880.516,00	(10.392.184,00)	95,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.03.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	241.272.700,00	230.880.516,00	(10.392.184,00)	95,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.03.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.272.700,00	230.880.516,00	(10.392.184,00)	95,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.03.1.01.0005		Penatausahaan Barang Milik Daerah	647.150.125,00	628.692.330,00	(18.457.795,00)	97,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.03.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	647.150.125,00	628.692.330,00	(18.457.795,00)	97,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.03.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	647.150.125,00	628.692.330,00	(18.457.795,00)	97,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.991.638.980,00	2.314.723.504,00	323.084.524,00	116,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.991.638.980,00	2.314.723.504,00	323.084.524,00	116,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0001		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	536.144.080,00	473.361.465,00	(62.782.615,00)	88,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	536.144.080,00	473.361.465,00	(62.782.615,00)	88,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	536.144.080,00	473.361.465,00	(62.782.615,00)	88,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0002		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	338.423.800,00	316.629.890,00	(21.793.910,00)	93,56	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	338.423.800,00	316.629.890,00	(21.793.910,00)	93,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.423.800,00	316.629.890,00	(21.793.910,00)	93,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0004		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	629.900.000,00	618.208.085,00	(11.691.915,00)	98,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	629.900.000,00	618.208.085,00	(11.691.915,00)	98,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.900.000,00	618.208.085,00	(11.691.915,00)	98,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0005		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	322.121.700,00	319.973.178,00	(2.148.522,00)	99,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	322.121.700,00	319.973.178,00	(2.148.522,00)	99,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.121.700,00	319.973.178,00	(2.148.522,00)	99,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0007		Penetapan Wajib Pajak Daerah	0,00	313.512.942,00	313.512.942,00	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	313.512.942,00	313.512.942,00	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	313.512.942,00	313.512.942,00	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0010		Penagihan Pajak Daerah	0,00	109.264.150,00	109.264.150,00	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	109.264.150,00	109.264.150,00	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	109.264.150,00	109.264.150,00	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0013		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	165.049.400,00	163.773.794,00	(1.275.606,00)	99,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	165.049.400,00	163.773.794,00	(1.275.606,00)	99,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.049.400,00	163.773.794,00	(1.275.606,00)	99,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	68.027.588.883,00	62.417.784.707,00	(5.609.804.176,00)	91,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	829.404.550,00	814.849.783,00	(14.554.767,00)	98,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	394.988.450,00	389.657.531,00	(5.330.919,00)	98,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	394.988.450,00	389.657.531,00	(5.330.919,00)	98,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.988.450,00	389.657.531,00	(5.330.919,00)	98,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	434.416.100,00	425.192.252,00	(9.223.848,00)	97,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	434.416.100,00	425.192.252,00	(9.223.848,00)	97,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434.416.100,00	425.192.252,00	(9.223.848,00)	97,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.447.531.253,00	58.290.295.520,00	(5.157.235.733,00)	91,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63.396.591.753,00	58.239.705.279,00	(5.156.886.474,00)	91,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	63.396.591.753,00	58.239.705.279,00	(5.156.886.474,00)	91,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	62.766.591.753,00	57.634.105.279,00	(5.132.486.474,00)	91,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	630.000.000,00	605.600.000,00	(24.400.000,00)	96,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.939.500,00	50.590.241,00	(349.259,00)	99,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	50.939.500,00	50.590.241,00	(349.259,00)	99,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.939.500,00	50.590.241,00	(349.259,00)	99,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	356.094.900,00	259.336.672,00	(96.758.228,00)	72,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	356.094.900,00	259.336.672,00	(96.758.228,00)	72,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	356.094.900,00	259.336.672,00	(96.758.228,00)	72,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.094.900,00	259.336.672,00	(96.758.228,00)	72,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.043.947.080,00	1.688.323.307,00	(355.623.773,00)	82,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.043.947.080,00	1.688.323.307,00	(355.623.773,00)	82,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.628.027.080,00	1.301.323.307,00	(326.703.773,00)	79,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.628.027.080,00	1.301.323.307,00	(326.703.773,00)	79,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	415.920.000,00	387.000.000,00	(28.920.000,00)	93,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	415.920.000,00	387.000.000,00	(28.920.000,00)	93,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.350.611.100,00	1.364.979.425,00	14.368.325,00	101,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.350.611.100,00	1.364.979.425,00	14.368.325,00	101,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.350.611.100,00	1.364.979.425,00	14.368.325,00	101,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.611.100,00	1.364.979.425,00	14.368.325,00	101,06	
	5.02.0.00.0.00.53.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	136.898.657.593,15	135.616.304.924,84	(1.282.352.668,31)	99,06	
	5.02.0.00.0.00.53.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	153.834.040.837,15	153.834.040.836,84	(0,31)	99,99	
	5.02.0.00.0.00.53.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	153.834.040.837,15	153.834.040.836,84	(0,31)	99,99	
	5.02.0.00.0.00.53.0000		6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	1.282.352.668,00	107,57	
	5.02.0.00.0.00.53.0000		6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	1.282.352.668,00	107,57	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **KEUANGAN**
Organisasi : **UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kota Gorontalo**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001		5	BELANJA DAERAH	1.492.037.775,00	1.284.981.788,00	(207.055.987,00)	86,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	683.636.000,00	567.937.519,00	(115.698.481,00)	83,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	683.636.000,00	567.937.519,00	(115.698.481,00)	83,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.04.1.01.0007		Penetapan Wajib Pajak Daerah	443.636.000,00	342.637.519,00	(100.998.481,00)	77,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.04.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	443.636.000,00	342.637.519,00	(100.998.481,00)	77,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.04.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	443.636.000,00	342.637.519,00	(100.998.481,00)	77,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.04.1.01.0010		Penagihan Pajak Daerah	240.000.000,00	225.300.000,00	(14.700.000,00)	93,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.04.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000,00	225.300.000,00	(14.700.000,00)	93,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.04.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	225.300.000,00	(14.700.000,00)	93,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	808.401.775,00	717.044.269,00	(91.357.506,00)	88,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.729.875,00	260.149.053,00	(4.580.822,00)	98,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264.729.875,00	260.149.053,00	(4.580.822,00)	98,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	264.729.875,00	260.149.053,00	(4.580.822,00)	98,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.729.875,00	260.149.053,00	(4.580.822,00)	98,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.671.900,00	456.895.216,00	(86.776.684,00)	84,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	543.671.900,00	456.895.216,00	(86.776.684,00)	84,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	543.671.900,00	456.895.216,00	(86.776.684,00)	84,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.671.900,00	456.895.216,00	(86.776.684,00)	84,03	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **KEUANGAN**
Organisasi : **UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002		5	BELANJA DAERAH	1.722.245.329,00	1.444.608.646,00	(277.636.683,00)	83,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.081.460.000,00	900.496.104,00	(180.963.896,00)	83,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.081.460.000,00	900.496.104,00	(180.963.896,00)	83,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.04.1.01.0007		Penetapan Wajib Pajak Daerah	665.960.000,00	521.258.715,00	(144.701.285,00)	78,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.04.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	665.960.000,00	521.258.715,00	(144.701.285,00)	78,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.04.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	665.960.000,00	521.258.715,00	(144.701.285,00)	78,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.04.1.01.0010		Penagihan Pajak Daerah	415.500.000,00	379.237.389,00	(36.262.611,00)	91,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.04.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	415.500.000,00	379.237.389,00	(36.262.611,00)	91,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.04.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.500.000,00	379.237.389,00	(36.262.611,00)	91,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	640.785.329,00	544.112.542,00	(96.672.787,00)	84,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.605.358,00	244.148.580,00	(11.456.778,00)	95,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	255.605.358,00	244.148.580,00	(11.456.778,00)	95,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	255.605.358,00	244.148.580,00	(11.456.778,00)	95,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.605.358,00	244.148.580,00	(11.456.778,00)	95,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.179.971,00	299.963.962,00	(85.216.009,00)	77,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	385.179.971,00	299.963.962,00	(85.216.009,00)	77,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	385.179.971,00	299.963.962,00	(85.216.009,00)	77,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.179.971,00	299.963.962,00	(85.216.009,00)	77,87	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **KEUANGAN**
Organisasi : **UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003		5	BELANJA DAERAH	927.744.450,00	694.316.717,00	(233.427.733,00)	74,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	533.470.000,00	351.461.787,00	(182.008.213,00)	65,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	533.470.000,00	351.461.787,00	(182.008.213,00)	65,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.04.1.01.0007		Penetapan Wajib Pajak Daerah	344.470.000,00	181.211.787,00	(163.258.213,00)	52,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.04.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	344.470.000,00	181.211.787,00	(163.258.213,00)	52,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.04.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.470.000,00	181.211.787,00	(163.258.213,00)	52,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.04.1.01.0010		Penagihan Pajak Daerah	189.000.000,00	170.250.000,00	(18.750.000,00)	90,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.04.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	189.000.000,00	170.250.000,00	(18.750.000,00)	90,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.04.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.000.000,00	170.250.000,00	(18.750.000,00)	90,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	394.274.450,00	342.854.930,00	(51.419.520,00)	86,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.222.100,00	156.060.050,00	(7.162.050,00)	95,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.222.100,00	156.060.050,00	(7.162.050,00)	95,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	163.222.100,00	156.060.050,00	(7.162.050,00)	95,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.222.100,00	156.060.050,00	(7.162.050,00)	95,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.052.350,00	186.794.880,00	(44.257.470,00)	80,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	231.052.350,00	186.794.880,00	(44.257.470,00)	80,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	231.052.350,00	186.794.880,00	(44.257.470,00)	80,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.052.350,00	186.794.880,00	(44.257.470,00)	80,84	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **KEUANGAN**
Organisasi : **UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004		5	BELANJA DAERAH	957.935.475,00	761.231.483,00	(196.703.992,00)	79,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	463.808.000,00	393.384.601,00	(70.423.399,00)	84,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	463.808.000,00	393.384.601,00	(70.423.399,00)	84,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.04.1.01.0007		Penetapan Wajib Pajak Daerah	336.308.000,00	266.034.601,00	(70.273.399,00)	79,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.04.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	336.308.000,00	266.034.601,00	(70.273.399,00)	79,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.04.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.308.000,00	266.034.601,00	(70.273.399,00)	79,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.04.1.01.0010		Penagihan Pajak Daerah	127.500.000,00	127.350.000,00	(150.000,00)	99,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.04.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	127.500.000,00	127.350.000,00	(150.000,00)	99,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.04.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.500.000,00	127.350.000,00	(150.000,00)	99,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	494.127.475,00	367.846.882,00	(126.280.593,00)	74,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.541.675,00	143.702.000,00	(37.839.675,00)	79,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.541.675,00	143.702.000,00	(37.839.675,00)	79,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	181.541.675,00	143.702.000,00	(37.839.675,00)	79,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.541.675,00	143.702.000,00	(37.839.675,00)	79,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.585.800,00	224.144.882,00	(88.440.918,00)	71,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.585.800,00	224.144.882,00	(88.440.918,00)	71,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	312.585.800,00	224.144.882,00	(88.440.918,00)	71,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.585.800,00	224.144.882,00	(88.440.918,00)	71,70	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **KEUANGAN**
Organisasi : **UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Utara**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005		5	BELANJA DAERAH	957.426.125,00	822.354.865,00	(135.071.260,00)	85,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	464.175.000,00	382.548.084,00	(81.626.916,00)	82,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	464.175.000,00	382.548.084,00	(81.626.916,00)	82,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.04.1.01.0007		Penetapan Wajib Pajak Daerah	327.200.000,00	264.096.584,00	(63.103.416,00)	80,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.04.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	327.200.000,00	264.096.584,00	(63.103.416,00)	80,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.04.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.200.000,00	264.096.584,00	(63.103.416,00)	80,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.04.1.01.0010		Penagihan Pajak Daerah	136.975.000,00	118.451.500,00	(18.523.500,00)	86,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.04.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	136.975.000,00	118.451.500,00	(18.523.500,00)	86,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.04.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.975.000,00	118.451.500,00	(18.523.500,00)	86,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	493.251.125,00	439.806.781,00	(53.444.344,00)	89,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	223.451.225,00	218.213.511,00	(5.237.714,00)	97,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.451.225,00	218.213.511,00	(5.237.714,00)	97,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	223.451.225,00	218.213.511,00	(5.237.714,00)	97,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.451.225,00	218.213.511,00	(5.237.714,00)	97,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.799.900,00	221.593.270,00	(48.206.630,00)	82,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	269.799.900,00	221.593.270,00	(48.206.630,00)	82,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	269.799.900,00	221.593.270,00	(48.206.630,00)	82,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.799.900,00	221.593.270,00	(48.206.630,00)	82,13	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **KEUANGAN**
Organisasi : **UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pohuwato**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006		5	BELANJA DAERAH	1.155.632.225,00	809.290.628,00	(346.341.597,00)	70,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	591.961.500,00	430.193.260,00	(161.768.240,00)	72,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	591.961.500,00	430.193.260,00	(161.768.240,00)	72,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.04.1.01.0007		Penetapan Wajib Pajak Daerah	383.754.000,00	248.265.060,00	(135.488.940,00)	64,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.04.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	383.754.000,00	248.265.060,00	(135.488.940,00)	64,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.04.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	383.754.000,00	248.265.060,00	(135.488.940,00)	64,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.04.1.01.0010		Penagihan Pajak Daerah	208.207.500,00	181.928.200,00	(26.279.300,00)	87,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.04.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	208.207.500,00	181.928.200,00	(26.279.300,00)	87,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.04.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.207.500,00	181.928.200,00	(26.279.300,00)	87,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	563.670.725,00	379.097.368,00	(184.573.357,00)	67,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.866.000,00	131.625.900,00	(97.240.100,00)	57,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.866.000,00	131.625.900,00	(97.240.100,00)	57,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	228.866.000,00	131.625.900,00	(97.240.100,00)	57,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.866.000,00	131.625.900,00	(97.240.100,00)	57,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.804.725,00	247.471.468,00	(87.333.257,00)	73,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	334.804.725,00	247.471.468,00	(87.333.257,00)	73,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	334.804.725,00	247.471.468,00	(87.333.257,00)	73,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.804.725,00	247.471.468,00	(87.333.257,00)	73,91	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : Badan Kepegawaian Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000		5	BELANJA DAERAH	10.400.858.222,00	10.305.954.574,00	(94.903.648,00)	99,08	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.110.266.175,00	1.096.352.109,00	(13.914.066,00)	98,74	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	360.648.700,00	356.928.142,00	(3.720.558,00)	98,96	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.01.0003		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	53.584.200,00	50.850.829,00	(2.733.371,00)	94,89	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	53.584.200,00	50.850.829,00	(2.733.371,00)	94,89	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.584.200,00	50.850.829,00	(2.733.371,00)	94,89	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.01.0008		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	104.002.600,00	103.158.430,00	(844.170,00)	99,18	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	104.002.600,00	103.158.430,00	(844.170,00)	99,18	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.002.600,00	103.158.430,00	(844.170,00)	99,18	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.01.0010		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	157.299.700,00	157.236.283,00	(63.417,00)	99,95	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	157.299.700,00	157.236.283,00	(63.417,00)	99,95	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.299.700,00	157.236.283,00	(63.417,00)	99,95	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.01.0011		Pengelolaan Data Kepegawaian	45.762.200,00	45.682.600,00	(79.600,00)	99,82	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	45.762.200,00	45.682.600,00	(79.600,00)	99,82	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.762.200,00	45.682.600,00	(79.600,00)	99,82	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.02		Mutasi dan Promosi ASN	524.737.250,00	515.024.743,00	(9.712.507,00)	98,14	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.02.0001		Pengelolaan Mutasi ASN	111.149.950,00	104.265.493,00	(6.884.457,00)	93,80	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	111.149.950,00	104.265.493,00	(6.884.457,00)	93,80	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.149.950,00	104.265.493,00	(6.884.457,00)	93,80	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.02.0002		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	52.867.400,00	52.087.762,00	(779.638,00)	98,52	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.867.400,00	52.087.762,00	(779.638,00)	98,52	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.867.400,00	52.087.762,00	(779.638,00)	98,52	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.02.0003		Pengelolaan Promosi ASN	360.719.900,00	358.671.488,00	(2.048.412,00)	99,43	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	360.719.900,00	358.671.488,00	(2.048.412,00)	99,43	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.719.900,00	358.671.488,00	(2.048.412,00)	99,43	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	130.817.825,00	130.689.930,00	(127.895,00)	99,90	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.03.0004		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	130.817.825,00	130.689.930,00	(127.895,00)	99,90	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	130.817.825,00	130.689.930,00	(127.895,00)	99,90	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.817.825,00	130.689.930,00	(127.895,00)	99,90	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	94.062.400,00	93.709.294,00	(353.106,00)	99,62	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.04.0002		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	31.191.000,00	31.102.114,00	(88.886,00)	99,71	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.191.000,00	31.102.114,00	(88.886,00)	99,71	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.191.000,00	31.102.114,00	(88.886,00)	99,71	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.04.0007		Pembinaan Disiplin ASN	62.871.400,00	62.607.180,00	(264.220,00)	99,57	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	62.871.400,00	62.607.180,00	(264.220,00)	99,57	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.871.400,00	62.607.180,00	(264.220,00)	99,57	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.290.592.047,00	9.209.602.465,00	(80.989.582,00)	99,12	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	287.943.725,00	287.360.202,00	(583.523,00)	99,79	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	287.943.725,00	287.360.202,00	(583.523,00)	99,79	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	287.943.725,00	287.360.202,00	(583.523,00)	99,79	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.943.725,00	287.360.202,00	(583.523,00)	99,79	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.067.378.572,00	8.013.651.389,00	(53.727.183,00)	99,33	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.977.117.994,00	7.923.657.279,00	(53.460.715,00)	99,32	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.977.117.994,00	7.923.657.279,00	(53.460.715,00)	99,32	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.977.117.994,00	7.923.657.279,00	(53.460.715,00)	99,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	90.260.578,00	89.994.110,00	(266.468,00)	99,70	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	90.260.578,00	89.994.110,00	(266.468,00)	99,70	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.260.578,00	89.994.110,00	(266.468,00)	99,70	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	436.668.300,00	430.343.465,00	(6.324.835,00)	98,55	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	436.668.300,00	430.343.465,00	(6.324.835,00)	98,55	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	316.388.300,00	311.143.465,00	(5.244.835,00)	98,34	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.388.300,00	311.143.465,00	(5.244.835,00)	98,34	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	120.280.000,00	119.200.000,00	(1.080.000,00)	99,10	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.280.000,00	119.200.000,00	(1.080.000,00)	99,10	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	498.601.450,00	478.247.409,00	(20.354.041,00)	95,91	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	498.601.450,00	478.247.409,00	(20.354.041,00)	95,91	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	498.601.450,00	478.247.409,00	(20.354.041,00)	95,91	
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.601.450,00	478.247.409,00	(20.354.041,00)	95,91	

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
Organisasi : **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.04.0.00.0.00.58.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	20.000.000,00	51.163.063,00	31.163.063,00	255,81	
	5.04.0.00.0.00.58.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000,00	51.163.063,00	31.163.063,00	255,81	
	5.04.0.00.0.00.58.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	20.000.000,00	51.163.063,00	31.163.063,00	255,81	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000		5	BELANJA DAERAH	12.656.920.419,00	12.325.620.864,00	(331.299.555,00)	97,38	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.366.525.165,00	1.359.623.192,00	(6.901.973,00)	99,49	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	238.513.750,00	233.733.266,00	(4.780.484,00)	97,99	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.01.0003		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	238.513.750,00	233.733.266,00	(4.780.484,00)	97,99	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	238.513.750,00	233.733.266,00	(4.780.484,00)	97,99	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.513.750,00	233.733.266,00	(4.780.484,00)	97,99	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.128.011.415,00	1.125.889.926,00	(2.121.489,00)	99,81	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02.0001		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	76.378.625,00	75.859.450,00	(519.175,00)	99,32	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	76.378.625,00	75.859.450,00	(519.175,00)	99,32	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.378.625,00	75.859.450,00	(519.175,00)	99,32	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02.0003		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	58.356.450,00	58.345.790,00	(10.660,00)	99,98	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	58.356.450,00	58.345.790,00	(10.660,00)	99,98	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.356.450,00	58.345.790,00	(10.660,00)	99,98	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02.0004		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	199.382.165,00	198.629.425,00	(752.740,00)	99,62	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	199.382.165,00	198.629.425,00	(752.740,00)	99,62	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.382.165,00	198.629.425,00	(752.740,00)	99,62	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02.0005		Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	40.011.450,00	39.802.837,00	(208.613,00)	99,47	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	40.011.450,00	39.802.837,00	(208.613,00)	99,47	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.011.450,00	39.802.837,00	(208.613,00)	99,47	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02.0007		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	753.882.725,00	753.252.424,00	(630.301,00)	99,91	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	753.882.725,00	753.252.424,00	(630.301,00)	99,91	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	753.882.725,00	753.252.424,00	(630.301,00)	99,91	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.290.395.254,00	10.965.997.672,00	(324.397.582,00)	97,12	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	431.653.050,00	430.951.490,00	(701.560,00)	99,83	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	210.424.600,00	209.945.504,00	(479.096,00)	99,77	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	210.424.600,00	209.945.504,00	(479.096,00)	99,77	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.424.600,00	209.945.504,00	(479.096,00)	99,77	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	221.228.450,00	221.005.986,00	(222.464,00)	99,89	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	221.228.450,00	221.005.986,00	(222.464,00)	99,89	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.228.450,00	221.005.986,00	(222.464,00)	99,89	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.357.106.816,00	8.039.820.839,00	(317.285.977,00)	96,20	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.217.198.966,00	7.900.153.725,00	(317.045.241,00)	96,14	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.217.198.966,00	7.900.153.725,00	(317.045.241,00)	96,14	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.217.198.966,00	7.900.153.725,00	(317.045.241,00)	96,14	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	139.907.850,00	139.667.114,00	(240.736,00)	99,82	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	139.907.850,00	139.667.114,00	(240.736,00)	99,82	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.907.850,00	139.667.114,00	(240.736,00)	99,82	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	415.628.000,00	414.585.156,00	(1.042.844,00)	99,74	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	415.628.000,00	414.585.156,00	(1.042.844,00)	99,74	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	415.628.000,00	414.585.156,00	(1.042.844,00)	99,74	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.628.000,00	414.585.156,00	(1.042.844,00)	99,74	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	629.501.300,00	628.850.382,00	(650.918,00)	99,89	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	629.501.300,00	628.850.382,00	(650.918,00)	99,89	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	629.501.300,00	628.850.382,00	(650.918,00)	99,89	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.501.300,00	628.850.382,00	(650.918,00)	99,89	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.456.506.088,00	1.451.789.805,00	(4.716.283,00)	99,67	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.456.506.088,00	1.451.789.805,00	(4.716.283,00)	99,67	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.456.506.088,00	1.451.789.805,00	(4.716.283,00)	99,67	
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.456.506.088,00	1.451.789.805,00	(4.716.283,00)	99,67	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **INSPEKTORAT DAERAH**
Organisasi : **Inspektorat**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000		5	BELANJA DAERAH	23.103.771.324,00	22.700.375.885,00	(403.395.439,00)	98,25	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.662.816.900,00	2.638.132.340,00	(24.684.560,00)	99,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.199.894.025,00	2.178.698.089,00	(21.195.936,00)	99,03	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	453.699.400,00	453.698.300,00	(1.100,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	453.699.400,00	453.698.300,00	(1.100,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	453.699.400,00	453.698.300,00	(1.100,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	219.528.200,00	218.920.488,00	(607.712,00)	99,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	219.528.200,00	218.920.488,00	(607.712,00)	99,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.528.200,00	218.920.488,00	(607.712,00)	99,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0003		Reviu Laporan Kinerja	528.940.000,00	528.304.015,00	(635.985,00)	99,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	528.940.000,00	528.304.015,00	(635.985,00)	99,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.940.000,00	528.304.015,00	(635.985,00)	99,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0005		Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	222.280.100,00	222.114.718,00	(165.382,00)	99,92	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	222.280.100,00	222.114.718,00	(165.382,00)	99,92	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.280.100,00	222.114.718,00	(165.382,00)	99,92	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0006		Kerjasama Pengawasan Internal	400.000.000,00	398.831.647,00	(1.168.353,00)	99,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	398.831.647,00	(1.168.353,00)	99,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	398.831.647,00	(1.168.353,00)	99,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	375.446.325,00	356.828.921,00	(18.617.404,00)	95,04	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	375.446.325,00	356.828.921,00	(18.617.404,00)	95,04	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.446.325,00	356.828.921,00	(18.617.404,00)	95,04	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	462.922.875,00	459.434.251,00	(3.488.624,00)	99,24	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.02.0002		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	462.922.875,00	459.434.251,00	(3.488.624,00)	99,24	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	462.922.875,00	459.434.251,00	(3.488.624,00)	99,24	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.922.875,00	459.434.251,00	(3.488.624,00)	99,24	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.428.352.000,00	1.396.477.634,00	(31.874.366,00)	97,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	209.790.000,00	209.173.445,00	(616.555,00)	99,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.01.0001		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	209.790.000,00	209.173.445,00	(616.555,00)	99,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	209.790.000,00	209.173.445,00	(616.555,00)	99,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.790.000,00	209.173.445,00	(616.555,00)	99,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.02		Pendampingan dan Asistensi	1.218.562.000,00	1.187.304.189,00	(31.257.811,00)	97,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.02.0001		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	381.282.650,00	360.854.980,00	(20.427.670,00)	94,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	381.282.650,00	360.854.980,00	(20.427.670,00)	94,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.282.650,00	360.854.980,00	(20.427.670,00)	94,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.02.0002		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	140.138.000,00	139.884.441,00	(253.559,00)	99,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	140.138.000,00	139.884.441,00	(253.559,00)	99,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.138.000,00	139.884.441,00	(253.559,00)	99,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.02.0003		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	380.994.600,00	371.447.657,00	(9.546.943,00)	97,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	380.994.600,00	371.447.657,00	(9.546.943,00)	97,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.994.600,00	371.447.657,00	(9.546.943,00)	97,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.02.0004		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	316.146.750,00	315.117.111,00	(1.029.639,00)	99,67	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	316.146.750,00	315.117.111,00	(1.029.639,00)	99,67	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.146.750,00	315.117.111,00	(1.029.639,00)	99,67	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.012.602.424,00	18.665.765.911,00	(346.836.513,00)	98,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	259.098.775,00	255.914.298,00	(3.184.477,00)	98,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	186.785.350,00	183.610.221,00	(3.175.129,00)	98,30	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	186.785.350,00	183.610.221,00	(3.175.129,00)	98,30	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.785.350,00	183.610.221,00	(3.175.129,00)	98,30	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.313.425,00	72.304.077,00	(9.348,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	72.313.425,00	72.304.077,00	(9.348,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.313.425,00	72.304.077,00	(9.348,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.924.734.461,00	15.634.052.649,00	(290.681.812,00)	98,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.835.664.161,00	15.545.127.130,00	(290.537.031,00)	98,16	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.835.664.161,00	15.545.127.130,00	(290.537.031,00)	98,16	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	15.835.664.161,00	15.545.127.130,00	(290.537.031,00)	98,16	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.754.300,00	52.722.159,00	(32.141,00)	99,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	52.754.300,00	52.722.159,00	(32.141,00)	99,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.754.300,00	52.722.159,00	(32.141,00)	99,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.316.000,00	36.203.360,00	(112.640,00)	99,68	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	36.316.000,00	36.203.360,00	(112.640,00)	99,68	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.316.000,00	36.203.360,00	(112.640,00)	99,68	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	415.060.550,00	397.239.018,00	(17.821.532,00)	95,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	415.060.550,00	397.239.018,00	(17.821.532,00)	95,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	415.060.550,00	397.239.018,00	(17.821.532,00)	95,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.060.550,00	397.239.018,00	(17.821.532,00)	95,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	947.291.600,00	926.087.000,00	(21.204.600,00)	97,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	947.291.600,00	926.087.000,00	(21.204.600,00)	97,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	190.255.600,00	190.187.000,00	(68.600,00)	99,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.255.600,00	190.187.000,00	(68.600,00)	99,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	757.036.000,00	735.900.000,00	(21.136.000,00)	97,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	757.036.000,00	735.900.000,00	(21.136.000,00)	97,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.119.811.950,00	1.112.320.916,00	(7.491.034,00)	99,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248.248.650,00	244.881.565,00	(3.367.085,00)	98,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	248.248.650,00	244.881.565,00	(3.367.085,00)	98,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.248.650,00	244.881.565,00	(3.367.085,00)	98,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	352.548.300,00	351.706.886,00	(841.414,00)	99,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	352.548.300,00	351.706.886,00	(841.414,00)	99,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.548.300,00	351.706.886,00	(841.414,00)	99,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519.015.000,00	515.732.465,00	(3.282.535,00)	99,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	519.015.000,00	515.732.465,00	(3.282.535,00)	99,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	519.015.000,00	515.732.465,00	(3.282.535,00)	99,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.605.088,00	340.152.030,00	(6.453.058,00)	98,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.750.000,00	58.427.630,00	(6.322.370,00)	90,23	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	64.750.000,00	58.427.630,00	(6.322.370,00)	90,23	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.750.000,00	58.427.630,00	(6.322.370,00)	90,23	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.410.000,00	44.316.000,00	(94.000,00)	99,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	44.410.000,00	44.316.000,00	(94.000,00)	99,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.410.000,00	44.316.000,00	(94.000,00)	99,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	237.445.088,00	237.408.400,00	(36.688,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	237.445.088,00	237.408.400,00	(36.688,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.445.088,00	237.408.400,00	(36.688,00)	99,98	



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan : **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**
Bidang Urusan : **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Organisasi : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	98.201.025.272,00	97.853.955.392,00	(347.069.880,00)	99,64	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	945.500.000,00	933.598.951,00	(11.901.049,00)	98,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	945.500.000,00	933.598.951,00	(11.901.049,00)	98,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	145.500.000,00	140.965.931,00	(4.534.069,00)	96,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	145.500.000,00	140.965.931,00	(4.534.069,00)	96,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.500.000,00	140.965.931,00	(4.534.069,00)	96,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0009		Pelaksanaan tugas Paskibraka	800.000.000,00	792.633.020,00	(7.366.980,00)	99,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	800.000.000,00	792.633.020,00	(7.366.980,00)	99,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	792.633.020,00	(7.366.980,00)	99,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	85.197.652.778,00	84.927.877.045,00	(269.775.733,00)	99,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	85.197.652.778,00	84.927.877.045,00	(269.775.733,00)	99,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	280.000.000,00	213.558.657,00	(66.441.343,00)	76,27	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	280.000.000,00	213.558.657,00	(66.441.343,00)	76,27	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	213.558.657,00	(66.441.343,00)	76,27	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	73.822.309.347,00	73.626.334.113,00	(195.975.234,00)	99,73	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	73.822.309.347,00	73.626.334.113,00	(195.975.234,00)	99,73	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.709.021.000,00	1.536.163.184,00	(172.857.816,00)	89,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	72.113.288.347,00	72.090.170.929,00	(23.117.418,00)	99,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11.095.343.431,00	11.087.984.275,00	(7.359.156,00)	99,93	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.095.343.431,00	11.087.984.275,00	(7.359.156,00)	99,93	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.422.323.931,00	1.416.735.275,00	(5.588.656,00)	99,60	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0005	5.1.05	Belanja Hibah	9.673.019.500,00	9.671.249.000,00	(1.770.500,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.102.872.492,00	3.100.991.414,00	(1.881.078,00)	99,93	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3.102.872.492,00	3.100.991.414,00	(1.881.078,00)	99,93	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0001		Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.102.872.492,00	3.100.991.414,00	(1.881.078,00)	99,93	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.102.872.492,00	3.100.991.414,00	(1.881.078,00)	99,93	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.175.005.570,00	1.173.124.492,00	(1.881.078,00)	99,83	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	1.927.866.922,00	1.927.866.922,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	836.840.000,00	835.750.381,00	(1.089.619,00)	99,86	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	836.840.000,00	835.750.381,00	(1.089.619,00)	99,86	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	511.840.000,00	510.786.481,00	(1.053.519,00)	99,79	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	511.840.000,00	510.786.481,00	(1.053.519,00)	99,79	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	511.840.000,00	510.786.481,00	(1.053.519,00)	99,79	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	325.000.000,00	324.963.900,00	(36.100,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	325.000.000,00	324.963.900,00	(36.100,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	324.963.900,00	(36.100,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.643.120.000,00	2.615.898.042,00	(27.221.958,00)	98,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.643.120.000,00	2.615.898.042,00	(27.221.958,00)	98,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0001		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	414.320.000,00	409.343.427,00	(4.976.573,00)	98,79	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	414.320.000,00	409.343.427,00	(4.976.573,00)	98,79	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.320.000,00	409.343.427,00	(4.976.573,00)	98,79	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	671.480.000,00	662.889.889,00	(8.590.111,00)	98,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	671.480.000,00	662.889.889,00	(8.590.111,00)	98,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	671.480.000,00	662.889.889,00	(8.590.111,00)	98,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0006		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.557.320.000,00	1.543.664.726,00	(13.655.274,00)	99,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.557.320.000,00	1.543.664.726,00	(13.655.274,00)	99,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.557.320.000,00	1.543.664.726,00	(13.655.274,00)	99,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.475.040.002,00	5.439.839.559,00	(35.200.443,00)	99,35	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.068.180,00	90.019.899,00	(48.281,00)	99,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.068.180,00	90.019.899,00	(48.281,00)	99,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	90.068.180,00	90.019.899,00	(48.281,00)	99,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.068.180,00	90.019.899,00	(48.281,00)	99,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.250.662.157,00	4.237.389.569,00	(13.272.588,00)	99,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.154.899.507,00	4.141.650.320,00	(13.249.187,00)	99,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.154.899.507,00	4.141.650.320,00	(13.249.187,00)	99,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.154.899.507,00	4.141.650.320,00	(13.249.187,00)	99,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	95.762.650,00	95.739.249,00	(23.401,00)	99,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	95.762.650,00	95.739.249,00	(23.401,00)	99,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.762.650,00	95.739.249,00	(23.401,00)	99,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	509.415.140,00	507.008.250,00	(2.406.890,00)	99,52	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	509.415.140,00	507.008.250,00	(2.406.890,00)	99,52	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	289.441.140,00	287.612.350,00	(1.828.790,00)	99,36	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.441.140,00	287.612.350,00	(1.828.790,00)	99,36	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	219.974.000,00	219.395.900,00	(578.100,00)	99,73	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	219.974.000,00	219.395.900,00	(578.100,00)	99,73	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.894.525,00	605.421.841,00	(19.472.684,00)	96,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	624.894.525,00	605.421.841,00	(19.472.684,00)	96,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	624.894.525,00	605.421.841,00	(19.472.684,00)	96,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	624.894.525,00	605.421.841,00	(19.472.684,00)	96,88	



PROVINSI GORONTALO

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2024



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	805.083.259.646	783.217.013.220	226.424.714.903	190.505.107.501	0	0	0	0
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	494.666.686.847	486.057.129.075	61.488.971.341	61.244.272.933	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	494.666.686.847	486.057.129.075	61.488.971.341	61.244.272.933	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	384.165.654.016	376.698.849.008,00	2.779.056.000	2.691.184.831,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.760.777.234	1.759.418.356,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.760.777.234	1.759.418.356,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	375.041.272.632	367.762.922.894,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	374.958.952.632	367.680.745.697,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	82.320.000	82.177.197,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	839.756.000	839.406.361,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	839.756.000	839.406.361,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	602.631.250	601.567.115,00	2.779.056.000	2.691.184.831,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	602.631.250	601.567.115,00	2.779.056.000	2.691.184.831,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.921.216.900	5.735.534.282,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.921.216.900	5.735.534.282,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	110.248.133.881	109.114.006.313,00	58.709.915.341	58.553.088.102,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	56.943.251.311	54.851.194.701,00	29.022.899.850	28.374.943.374,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	304.411.292	250.317.327,00	2.648.684.000	2.070.171.807,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	0,00	430.282.000	344.214.994,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	0	0,00	600.000.000	589.226.331,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.066.129.785	2.024.670.631,00	9.728.904.385	9.596.834.187,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	376.962.000	366.427.653,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	182.280.000	181.958.027,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	322.569.000	258.046.747,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	155.000.000	154.876.342,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	557.277.000	555.302.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100.000.000	99.990.000,00	200.000.000	199.786.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	692.320.050	654.372.493,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	9.832.184.184	9.572.317.552,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	199.262.000	187.062.712,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1.002.018.900	979.785.205,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	40.316.026.031	38.740.181.223,00	11.665.349.314	12.490.413.570,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0	0,00	485.901.713	479.124.878,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	701.938.480	691.013.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	134.872.589	134.872.589,00	568.777.438	461.249.350,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0,00	2.695.001.000	2.143.921.757,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	42.235.346.554	43.661.819.264,00	29.245.751.386	29.714.032.427,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	35.000.000	31.840.350,00	987.570.550	978.111.846,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	1.437.996.916	1.259.017.657,00	8.454.914.632	6.867.511.193,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	133.500.000	133.383.554,00	7.850.000	7.850.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	822.792.180	821.288.787,00	2.983.032.811	3.875.577.100,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.250.149.650	2.197.595.695,00	12.136.599.766	12.734.388.200,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	2.348.506.050	2.347.304.654,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	980.732.150	978.793.116,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	8.564.192.276	8.332.329.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	127.780.900	112.592.275,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	25.084.696.432	27.088.903.049,00	4.675.783.627	5.250.594.088,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	450.000.000	358.770.777,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	11.069.536.016	10.600.992.348,00	441.264.105	464.112.301,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	100.000.000	98.605.740,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	2.229.948.000	2.228.661.810,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	544.831.000	518.023.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	4.382.992.306	4.254.873.823,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	3.811.764.710	3.500.827.975,00	441.264.105	464.112.301,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	252.898.950	244.273.754,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	252.898.950	244.273.754,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	102.899.700	102.383.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	149.999.250	141.890.754,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	197.479.355.926	187.038.920.400	85.180.348.914	57.769.285.633	0	0	0	0
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000		Dinas Kesehatan	97.849.111.373	96.091.273.736	186.936.500	186.675.000	0	0	0	0
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.380.546.673	25.101.681.836,00	79.373.000	79.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.530.090.200	1.479.638.974,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.085.219.200	1.061.239.167,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	444.871.000	418.399.807,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.845.906.663	20.763.398.279,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.725.882.663	20.643.570.279,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.040.000	104.005.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.984.000	15.822.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.730.000	67.501.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67.730.000	67.501.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	889.100.610	877.937.614,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	849.100.610	838.131.701,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	39.805.913,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	79.373.000	79.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	79.373.000	79.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.433.619.200	1.317.455.288,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	566.459.200	475.683.288,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	867.160.000	841.772.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	614.100.000	595.749.931,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.000.000	30.742.570,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	239.100.000	238.512.415,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	331.000.000	326.494.946,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	71.795.651.200	70.346.407.237,00	107.563.500	107.375.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.615.489.000	2.537.540.920,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	340.815.382	325.064.705,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.274.673.618	2.212.476.215,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	69.166.562.200	67.795.397.318,00	107.563.500	107.375.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	991.895.350	971.319.219,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	484.229.800	468.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2.342.565.750	2.263.169.628,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	107.290.500	102.408.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	112.589.100	110.639.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	743.596.000	724.552.840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	31.968.000	31.152.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	59.952.000	59.395.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	150.000.000	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	61.501.755.700	60.287.718.401,00	107.563.500	107.375.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	356.480.000	346.535.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2.215.680.000	2.215.665.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	68.560.000	64.490.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13.600.000	13.468.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	13.600.000	13.468.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	356.432.000	338.968.741,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	356.432.000	338.968.741,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	356.432.000	338.968.741,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	121.063.500	109.626.322,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	121.063.500	109.626.322,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	121.063.500	109.626.322,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	195.418.000	194.589.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	131.482.000	130.769.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	131.482.000	130.769.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	63.936.000	63.820.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0000	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	63.936.000	63.820.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001		RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	97.791.760.253	89.297.860.216	72.167.310.414	47.765.973.076	0	0	0	0
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	81.055.235.410	74.557.324.768,63	8.412.917.332	5.260.206.435,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.880.000	122.205.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	83.520.000	63.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	31.680.000	30.245.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.680.000	28.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.035.430.833	21.271.656.946,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.877.030.833	21.113.256.946,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.360.000	63.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	63.360.000	63.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	31.680.000	31.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	440.367.200	427.584.481,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	440.367.200	427.584.481,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.347.200	348.619.302,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	42.377.075,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	323.456.700	216.811.716,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	74.890.500	50.469.760,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	39.000.000	38.960.751,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	506.500.000	486.316.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	506.500.000	486.316.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.121.246.800	4.965.710.094,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.764.826.800	1.718.092.498,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.100.000	16.038.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.340.320.000	3.231.579.596,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.255.700	67.606.894,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	5.946.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.900.000	13.965.960,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.355.700	47.694.184,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	52.677.707.677	47.353.942.051,63	7.906.417.332	4.773.890.435,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	52.677.707.677	47.353.942.051,63	7.906.417.332	4.773.890.435,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.388.424.843	1.981.771.643,63	63.754.393.082	42.505.766.641,97	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.211.024.843	1.804.660.843,63	63.754.393.082	42.505.766.641,97	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	358.398.000	349.429.534,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	941.646.843	916.295.832,63	569.928.848	559.278.198,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0	0,00	24.145.664.234	23.522.454.321,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	300.000.000	0,00	39.038.800.000	18.424.034.122,97	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	610.980.000	538.935.477,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	177.400.000	177.110.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	177.400.000	177.110.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	14.348.100.000	12.758.763.804,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	14.348.100.000	12.758.763.804,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0001	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	14.348.100.000	12.758.763.804,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002		Laboratorium Kesehatan Daerah	1.838.484.300	1.649.786.448	12.826.102.000	9.816.637.557	0	0	0	0
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.332.921.700	1.202.933.076,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.760.000	50.252.912,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	53.760.000	50.252.912,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.987.300	82.593.745,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.987.300	77.617.245,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	4.976.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.131.924.400	1.016.334.079,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.224.400	108.905.671,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	948.700.000	907.428.408,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.250.000	53.752.340,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.000	566.340,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.500.000	53.186.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	505.562.600	446.853.372,00	12.826.102.000	9.816.637.557,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	505.562.600	446.853.372,00	12.826.102.000	9.816.637.557,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	55.562.600	0,00	12.783.666.000	9.775.118.230,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0	0,00	42.436.000	41.519.327,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.2.14.0.00.03.0002	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	450.000.000	446.853.372,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	60.912.579.883	59.548.418.879	78.523.552.178	70.398.668.187	0	0	0	0
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	59.593.021.058	58.398.660.554	78.499.052.178	70.374.168.187	0	0	0	0
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.159.526.437	31.973.200.695,00	449.829.320	442.765.500,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.596.374.851	1.587.993.032,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	877.285.200	872.321.873,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	719.089.651	715.671.159,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.935.805.619	25.790.482.101,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.736.265.069	25.592.398.525,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	199.540.550	198.083.576,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0	49.368.210,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	49.368.210,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	831.917.500	817.696.031,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	831.917.500	817.696.031,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.000.000	115.767.812,00	449.829.320	442.765.500,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	115.767.812,00	449.829.320	442.765.500,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.695.428.467	3.611.893.509,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.695.428.467	3.611.893.509,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.492.090.418	10.288.939.119,00	23.238.757.557	17.470.540.153,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.858.433.018	5.792.172.870,00	7.395.236.207	7.387.485.401,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0055	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	458.347.500	414.273.564,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	30.776.000	30.472.885,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	243.813.500	235.289.998,00	2.033.969.614	2.033.407.614,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	47.017.000	46.920.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	20.630.000	20.046.900,00	407.491.500	407.405.500,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0097	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	10.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0098	Pembangunan Kanal Banjir	0	0,00	4.953.775.093	4.946.672.287,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	4.434.628.468	4.433.398.780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	613.220.550	611.770.743,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.633.657.400	4.496.766.249,00	15.843.521.350	10.083.054.752,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10.000.000	9.795.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0	0,00	15.423.539.000	9.663.279.402,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	10.000.000	9.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.537.991.100	3.413.393.446,00	419.982.350	419.775.350,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	573.401.000	571.803.996,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	502.265.300	491.823.807,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.107.910.700	1.006.168.220,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.107.910.700	1.006.168.220,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.03.1.01.0013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	953.948.475	906.565.692,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	153.962.225	99.602.528,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	3.242.148.467	3.102.006.877,00	37.506.500	37.205.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.242.148.467	3.102.006.877,00	37.506.500	37.205.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	237.606.550	233.712.670,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1.299.288.000	1.171.990.512,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.04.1.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	1.705.253.917	1.696.303.695,00	37.506.500	37.205.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	667.695.450	632.137.717,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	667.695.450	632.137.717,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	102.093.450	95.140.741,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	565.602.000	536.996.976,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	101.038.950	97.821.623,00	1.975.087.306	1.765.746.966,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	101.038.950	97.821.623,00	1.975.087.306	1.765.746.966,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	101.038.950	97.821.623,00	1.975.087.306	1.765.746.966,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	305.001.500	288.903.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	305.001.500	288.903.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.07.1.01.0020	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	5.001.500	4.749.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.07.1.01.0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	300.000.000	284.154.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	145.603.550	113.986.863,00	7.900.000.000	7.527.574.213,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	145.603.550	113.986.863,00	7.900.000.000	7.527.574.213,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	61.834.200	61.366.083,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	34.999.850	33.219.983,00	400.000.000	399.743.953,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01.0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	9.998.500	9.904.084,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	38.771.000	9.496.713,00	7.500.000.000	7.127.830.260,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.332.882.375	2.309.072.176,00	8.828.912.910	8.695.923.587,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.332.882.375	2.309.072.176,00	8.828.912.910	8.695.923.587,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	642.406.675	640.546.811,00	8.828.912.910	8.695.923.587,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.992.200	8.312.834,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.474.275.850	1.472.975.465,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	206.207.650	187.237.066,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	7.336.756.911	6.959.102.997,00	36.068.958.585	34.434.412.768,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	7.336.756.911	6.959.102.997,00	36.068.958.585	34.434.412.768,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	384.461.000	368.851.320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	669.002.300	668.462.257,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	46.712.000	46.336.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	215.911.050	203.515.607,00	7.049.405.000	6.689.839.798,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	14.886.000	5.832.500,00	100.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.991.491.511	1.986.613.157,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan	527.685.850	521.908.926,00	867.346.335	867.346.335,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	156.512.000	155.820.420,00	27.671.328.800	26.496.348.185,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	14.886.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.597.982.000	2.371.285.458,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	14.886.000	12.332.100,00	380.878.450	380.878.450,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	702.341.200	618.145.152,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	495.145.000	491.878.218,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	198.112.000	195.320.291,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	156.510.000	154.431.181,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	41.602.000	40.889.110,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPIJAK) Cakupan Daerah Provinsi	297.033.000	296.557.927,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPIJAKI	297.033.000	296.557.927,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.207.221.300	1.135.442.599,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	599.271.300	575.758.927,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.01.0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	185.441.000	183.711.710,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	413.830.300	392.047.217,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	46.450.000	44.834.636,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	31.450.000	31.272.136,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.02.0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	15.000.000	13.562.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	246.500.000	200.847.164,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	246.500.000	200.847.164,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	315.000.000	314.001.872,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	315.000.000	314.001.872,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001		UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan	1.319.558.825	1.149.758.325	24.500.000	24.500.000	0	0	0	0
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.319.558.825	1.149.758.325,00	24.500.000	24.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	638.563.250	564.865.013,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	638.563.250	564.865.013,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.000.575	111.089.888,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.000.575	111.089.888,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.995.000	473.803.424,00	24.500.000	24.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.05.0001	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	550.995.000	473.803.424,00	24.500.000	24.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.888.029.401	3.879.062.256	570.000.000	567.786.348	0	0	0	0
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.888.029.401	3.879.062.256	570.000.000	567.786.348	0	0	0	0
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	967.000.600	960.960.347,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	97.732.050	97.354.780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	97.732.050	97.354.780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	401.712.350	396.711.147,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	297.187.850	292.951.737,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan jenis Pelayanan	94.541.000	94.190.084,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	9.983.500	9.569.326,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	467.556.200	466.894.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.02.1.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	467.556.200	466.894.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.921.028.801	2.918.101.909,00	570.000.000	567.786.348,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	189.999.425	189.448.574,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	24.999.875	24.723.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	164.999.550	164.725.074,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.731.029.376	2.728.653.335,00	570.000.000	567.786.348,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.021.475.475	2.020.480.895,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.05.0000	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	709.553.901	708.172.440,00	570.000.000	567.786.348,00	0	0,00	0	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.110.488.042	21.610.829.560	95.944.000	95.894.000	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	12.012.733.615	11.709.494.679	75.944.000	75.944.000	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.384.698.532	6.186.960.740,00	75.944.000	75.944.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.227.100	72.130.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.653.450	37.601.179,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.573.650	34.529.521,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.791.651.707	4.738.909.415,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.662.277.757	4.609.921.260,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	129.373.950	128.988.155,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.213.000	180.209.776,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.213.000	180.209.776,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	414.072.375	340.282.697,00	75.944.000	75.944.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	414.072.375	340.282.697,00	75.944.000	75.944.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	926.534.350	855.428.152,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	926.534.350	855.428.152,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.172.881.235	5.077.855.859,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4.443.110.570	4.363.160.122,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	105.720.661	104.316.146,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	165.293.191	159.731.065,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	10.834.371	9.477.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24.061.937	13.067.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	137.070.425	127.358.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	3.457.244.052	3.417.055.181,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	542.885.933	532.154.830,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	632.328.116	620.954.357,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	459.215.439	458.516.617,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	143.016.309	142.600.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	30.096.368	19.837.340,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	97.442.549	93.741.380,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	97.442.549	93.741.380,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	455.153.848	444.678.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	400.338.600	391.972.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	369.596.000	362.423.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	30.742.600	29.548.980,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	54.815.248	52.705.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.10.0000	1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	54.815.248	52.705.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.097.754.427	9.901.334.881	20.000.000	19.950.000	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.097.754.427	8.905.284.148,00	20.000.000	19.950.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	354.896.092	354.540.635,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	354.896.092	354.540.635,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.164.431.635	6.088.110.931,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.114.431.635	6.038.191.845,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	49.919.086,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.737.574.800	1.631.641.399,00	20.000.000	19.950.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.737.574.800	1.631.641.399,00	20.000.000	19.950.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	840.851.900	830.991.183,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	840.851.900	830.991.183,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.000.000.000	996.050.733,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	400.000.000	397.523.743,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	230.000.000	228.924.419,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	170.000.000	168.599.324,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	350.000.000	348.832.830,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	125.000.000	124.845.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	125.000.000	124.712.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.03.0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100.000.000	99.274.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	250.000.000	249.694.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	150.000.000	149.786.980,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.11.0000	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	100.000.000	99.907.180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	26.026.119.547	25.082.653.050	565.898.470	429.200.400	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000		Dinas Sosial	26.026.119.547	25.082.653.050	565.898.470	429.200.400	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.022.160.327	10.632.429.615,00	565.898.470	429.200.400,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	827.877.012	826.099.820,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	603.414.862	602.214.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	11.437.100	11.051.071,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.078.150	50.039.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.946.900	162.794.349,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.442.289.661	8.343.594.471,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.307.739.661	8.209.659.330,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.550.000	110.125.911,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.000.000	23.809.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	212.040.000	211.836.946,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.100.000	44.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	111.180.000	111.069.721,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56.760.000	56.747.225,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.132.430	139.187.154,00	475.898.470	339.759.400,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.200.000	13.842.510,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.688.810	1.680.000,00	280.480.920	156.210.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0,00	192.468.100	183.549.400,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.557.420	36.463.752,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.856.200	16.512.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	6.180.000	6.149.000,00	2.949.450	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.500.000	47.465.992,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.150.000	17.073.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	782.700.000	715.615.523,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.000.000	172.915.523,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	542.700.000	542.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608.121.224	396.095.701,00	90.000.000	89.441.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.267.600	45.911.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.738.000	229.278.981,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	167.673.624	101.505.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.442.000	19.400.100,00	90.000.000	89.441.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.801.075.135	1.791.395.615,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	110.598.275	107.896.594,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	110.598.275	107.896.594,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.690.476.860	1.683.499.021,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	74.290.240	74.275.428,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	556.419.986	549.974.208,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.059.766.634	1.059.249.385,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	128.602.000	119.102.510,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	128.602.000	119.102.510,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	128.602.000	119.102.510,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.305.663.720	2.922.495.993,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TeriAntar di dalam Panti	589.668.800	370.858.678,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	188.326.000	17.839.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	40.000.000	39.992.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	200.422.800	185.237.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	98.878.000	71.806.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar	60.042.000	55.982.728,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerAntar di dalam Panti	1.094.369.700	1.087.609.329,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	573.350.000	569.809.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	40.054.000	37.729.125,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	51.800.000	51.485.548,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerAntar di dalam Panti	429.165.700	428.585.356,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.282.103.220	1.128.066.538,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	300.000.000	224.692.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	100.000.000	86.601.304,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	135.000.000	129.092.920,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	34.745.720	3.999.948,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	302.460.000	294.473.130,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	289.457.500	288.610.586,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	19.540.000	17.992.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	20.000.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	80.900.000	77.602.751,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	339.522.000	335.961.448,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	339.522.000	335.961.448,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	8.080.394.875	8.001.348.674,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	50.000.000	48.342.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	50.000.000	48.342.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	8.030.394.875	7.953.006.574,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.848.081.500	5.775.191.091,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.034.899.375	2.030.474.113,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	147.414.000	147.341.370,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.087.432.140	1.016.931.963,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.087.432.140	1.016.931.963,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	842.235.000	823.449.363,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	120.000.000	119.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	70.197.140	67.531.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	25.000.000	6.101.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	30.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	600.791.350	598.948.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	600.791.350	598.948.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.12.0000	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	600.791.350	598.948.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	204.396.730.435	201.830.926.793	6.350.737.589	5.727.724.906	0	0	0	0
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	15.682.982.743	15.370.426.082	92.957.500	92.750.000	0	0	0	0
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000		Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	15.294.940.743	15.097.096.486	92.957.500	92.750.000	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.587.644.117	13.407.156.561,00	92.957.500	92.750.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	466.712.650	463.615.724,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	191.551.400	188.541.826,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	275.161.250	275.073.898,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.287.591.319	12.050.589.758,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.199.191.319	11.962.808.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	88.400.000	87.781.218,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	332.365.998	315.780.920,00	92.957.500	92.750.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	332.365.998	315.780.920,00	92.957.500	92.750.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.974.150	577.170.159,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.974.150	577.170.159,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	372.220.000	365.638.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	372.220.000	365.638.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	372.220.000	365.638.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	314.100.350	313.156.040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	314.100.350	313.156.040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	314.100.350	313.156.040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	859.016.276	849.203.708,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000	99.987.425,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000	99.987.425,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	759.016.276	749.216.283,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	341.440.000	341.330.330,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	417.576.276	407.885.953,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	161.960.000	161.941.637,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	161.960.000	161.941.637,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0000	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	161.960.000	161.941.637,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0001		UPTD Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas	388.042.000	273.329.596	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0001	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	210.292.000	96.250.315,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0001	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.292.000	96.250.315,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0001	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.292.000	96.250.315,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0001	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	177.750.000	177.079.281,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0001	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	177.750.000	177.079.281,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.29.3.32.01.0001	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	177.750.000	177.079.281,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.762.752.891	7.698.865.852	51.364.950	50.300.000	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.762.752.891	7.698.865.852	51.364.950	50.300.000	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.974.570.520	4.914.546.188,00	51.364.950	50.300.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	246.986.750	245.702.735,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	246.986.750	245.702.735,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.661.226.770	3.638.608.722,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.661.226.770	3.638.608.722,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.583.000	119.969.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.583.000	119.969.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.199.800	202.288.882,00	51.364.950	50.300.000,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	14.480.800	14.185.970,00	51.364.950	50.300.000,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	14.997.405,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.719.000	173.105.507,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	651.210.000	619.612.858,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000	111.733.258,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519.210.000	507.879.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.364.200	88.363.941,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.364.200	88.363.941,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.893.942.777	1.893.158.305,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	393.942.777	393.158.305,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	266.620.327	266.285.145,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	127.322.450	126.873.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	1.500.000.000	1.500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1.500.000.000	1.500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	190.328.000	189.846.944,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	190.328.000	189.846.944,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	190.328.000	189.846.944,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	106.323.014	105.977.691,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	106.323.014	105.977.691,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.1.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	106.323.014	105.977.691,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	150.745.980	149.405.404,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	150.745.980	149.405.404,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	150.745.980	149.405.404,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	446.842.600	445.931.320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	446.842.600	445.931.320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.1.01.0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	446.842.600	445.931.320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	11.581.719.824	11.432.635.911	606.300.000	604.980.000	0	0	0	0
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000		Dinas Ketahanan Pangan	11.581.719.824	11.432.635.911	606.300.000	604.980.000	0	0	0	0
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.093.834.224	8.954.058.043,00	606.300.000	604.980.000,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	485.366.450	484.041.558,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	485.366.450	484.041.558,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.528.491.974	7.438.706.354,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.419.739.224	7.330.110.654,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	108.752.750	108.595.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.445.000	54.806.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.445.000	54.806.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.133.100	332.256.525,00	606.300.000	604.980.000,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	346.133.100	332.256.525,00	606.300.000	604.980.000,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	678.397.700	644.246.906,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	678.397.700	644.246.906,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	740.060.150	734.076.575,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	134.984.150	132.864.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	79.387.950	79.146.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	55.596.200	53.717.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	127.540.000	126.955.760,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	127.540.000	126.955.760,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	477.536.000	474.256.585,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.04.0001	Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	282.856.000	280.058.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	194.680.000	194.197.835,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.508.830.300	1.506.033.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	45.680.000	45.499.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	45.680.000	45.499.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	1.463.150.300	1.460.534.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.396.396.000	1.394.020.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	66.754.300	66.513.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	238.995.150	238.467.933,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	238.995.150	238.467.933,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	189.738.150	189.328.132,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.15.0000	2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	49.257.000	49.139.801,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	4.196.528.220	3.732.786.531	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.196.528.220	3.732.786.531	0	0	0	0	0	0
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1.130.155.120	1.024.737.787,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	1.130.155.120	1.024.737.787,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1.130.155.120	1.024.737.787,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	87.628.100	74.174.585,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	87.628.100	74.174.585,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.04.1.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	87.628.100	74.174.585,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.978.745.000	2.633.874.159,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.978.745.000	2.633.874.159,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.03.1.04.2.10.05.0000	2.10.05.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.978.745.000	2.633.874.159,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	27.510.755.174	27.337.926.510	106.412.124	103.738.000	0	0	0	0
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	27.510.755.174	27.337.926.510	106.412.124	103.738.000	0	0	0	0
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.283.675.174	26.121.383.370,00	106.412.124	103.738.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	655.599.547	655.111.686,00	42.745.000	40.550.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	416.184.252	415.822.911,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239.415.295	239.288.775,00	42.745.000	40.550.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.657.038.078	23.559.779.730,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.491.638.078	23.394.427.706,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	165.400.000	165.352.024,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	453.174.049	451.309.564,00	63.667.124	63.188.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.196.799	66.006.265,00	63.667.124	63.188.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.177.257	31.177.025,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	104.100.000	104.099.274,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.699.993	250.027.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	731.903.500	693.896.815,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.103.500	149.186.815,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	544.800.000	544.710.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	785.960.000	761.285.575,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	773.970.000	749.295.575,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.990.000	11.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	95.040.000	95.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	31.680.000	31.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	31.680.000	31.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	63.360.000	63.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	63.360.000	63.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	29.040.000	29.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	29.040.000	29.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	29.040.000	29.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	29.040.000	29.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	29.040.000	29.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	29.040.000	29.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.042.280.000	1.031.743.140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	1.042.280.000	1.031.743.140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1.042.280.000	1.031.743.140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	31.680.000	31.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	31.680.000	31.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.17.0000	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	31.680.000	31.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	8.493.499.792	8.341.004.734	191.462.600	190.332.580	0	0	0	0
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.493.499.792	8.341.004.734	191.462.600	190.332.580	0	0	0	0
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.910.887.292	7.761.655.926,00	191.462.600	190.332.580,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	395.543.400	395.177.674,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	395.543.400	395.177.674,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.909.631.517	5.891.048.419,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.831.236.517	5.812.669.681,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	78.395.000	78.378.738,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.495.075	74.593.760,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.495.075	74.593.760,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	492.057.100	428.008.297,00	191.462.600	190.332.580,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	492.057.100	428.008.297,00	191.462.600	190.332.580,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.038.160.200	972.827.776,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.038.160.200	972.827.776,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	113.892.500	113.780.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	113.892.500	113.780.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	113.892.500	113.780.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.03	PROGRAM PENDATANGAN SIPIL	139.788.750	139.677.891,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	139.788.750	139.677.891,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	139.788.750	139.677.891,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	328.931.250	325.890.717,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	175.856.700	173.201.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	175.856.700	173.201.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	153.074.550	152.689.297,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	153.074.550	152.689.297,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.301.845.740	4.267.119.829	28.788.500	27.086.240	0	0	0	0
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.301.845.740	4.267.119.829	28.788.500	27.086.240	0	0	0	0
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	984.884.290	978.178.175,00	1.390.500	1.236.240,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	984.884.290	978.178.175,00	1.390.500	1.236.240,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	293.516.890	293.349.117,00	1.390.500	1.236.240,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	224.787.450	224.053.023,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	64.280.900	63.758.390,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	302.295.000	301.024.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.04.1.01.0022	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	100.004.050	95.993.645,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.316.961.450	3.288.941.654,00	27.398.000	25.850.000,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.316.961.450	3.288.941.654,00	27.398.000	25.850.000,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	101.821.200	101.818.373,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	250.953.550	247.898.601,00	27.398.000	25.850.000,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	101.823.400	101.810.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.08.2.12.2.13.24.0000	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.862.363.300	2.837.414.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	150.970.000	149.058.218	0	0	0	0	0	0
2.14	1.02.2.14.0.00.03.0000		Dinas Kesehatan	150.970.000	149.058.218	0	0	0	0	0	0
2.14	1.02.2.14.0.00.03.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	59.610.000	59.506.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.03.0000	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	59.610.000	59.506.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.03.0000	2.14.02.1.01.0017	Penyerasan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	59.610.000	59.506.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.03.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	91.360.000	89.552.218,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	1.02.2.14.0.00.03.0000	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	91.360.000	89.552.218,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.02.2.14.0.00.03.0000	2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	91.360.000	89.552.218,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	11.160.625.165	11.061.666.074	4.596.258.615	3.995.190.286	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000		Dinas Perhubungan	11.160.625.165	11.061.666.074	4.596.258.615	3.995.190.286	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.370.113.765	8.306.909.691,90	16.589.000	15.700.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	709.042.000	706.832.581,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	709.042.000	706.832.581,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.460.410.790	6.425.828.868,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.383.725.790	6.349.155.393,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	76.685.000	76.673.475,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	176.289.000	173.854.452,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	176.289.000	173.854.452,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	550.977.000	536.733.984,90	16.589.000	15.700.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	550.977.000	536.733.984,90	16.589.000	15.700.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.394.975	463.659.806,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	473.394.975	463.659.806,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.652.343.000	2.616.938.183,00	4.579.669.615	3.979.490.286,48	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	155.086.000	132.517.173,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	155.086.000	132.517.173,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	209.500.000	209.260.000,00	4.452.266.702	3.852.582.606,48	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	209.500.000	209.260.000,00	4.452.266.702	3.852.582.606,48	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	720.672.000	719.047.800,00	127.402.913	126.907.680,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	487.942.000	486.692.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	232.730.000	232.355.000,00	127.402.913	126.907.680,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.552.085.000	1.541.131.210,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	138.490.000	138.486.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.413.595.000	1.402.645.210,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	15.000.000	14.982.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.000.000	14.982.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	138.168.400	137.818.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	138.168.400	137.818.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.25.0000	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Peraliran Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	138.168.400	137.818.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.870.218.614	15.709.117.779	100.000.000	99.937.800	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000		Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	15.870.218.614	15.709.117.779	100.000.000	99.937.800	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.293.102.914	8.171.041.086,00	40.000.000	39.937.800,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	488.930.200	488.524.856,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	339.676.100	339.446.773,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.254.100	149.078.083,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.221.126.333	5.204.852.689,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.024.109.333	5.008.017.598,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	197.017.000	196.835.091,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.421.320	89.386.146,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.421.320	89.386.146,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.144.991.740	1.105.301.793,00	40.000.000	39.937.800,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.144.991.740	1.105.301.793,00	40.000.000	39.937.800,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.338.633.321	1.282.975.602,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.338.633.321	1.282.975.602,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.855.742.500	4.829.812.479,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	4.855.742.500	4.829.812.479,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	587.752.000	587.662.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	740.331.950	735.859.452,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.661.074.000	1.660.059.830,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.866.584.550	1.846.231.197,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.721.373.200	2.708.264.214,00	60.000.000	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	186.000.000	175.954.240,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.03.1.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	186.000.000	175.954.240,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.535.373.200	2.532.309.974,00	60.000.000	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	184.800.100	181.929.317,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2.350.573.100	2.350.380.657,00	60.000.000	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	31.200.339.016	31.055.710.021	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000		Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	31.200.339.016	31.055.710.021	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.388.303.291	12.338.992.758,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	489.736.075	488.758.974,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	271.551.075	270.838.678,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	218.185.000	217.920.296,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.753.272.966	9.721.559.062,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.691.630.216	9.659.965.973,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	61.642.750	61.593.089,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	469.510.000	468.234.790,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	469.510.000	468.234.790,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.675.784.250	1.660.439.932,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.675.784.250	1.660.439.932,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	77.755.475	77.523.325,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	77.755.475	77.523.325,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	77.755.475	77.523.325,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.649.855.250	1.574.724.942,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.649.855.250	1.574.724.942,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.649.855.250	1.574.724.942,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	675.696.750	674.952.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	675.696.750	674.952.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	675.696.750	674.952.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.293.583.250	1.275.335.035,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1.293.583.250	1.275.335.035,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	158.400.000	157.908.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	1.135.183.250	1.117.427.035,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	15.115.145.000	15.114.181.261,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	15.115.145.000	15.114.181.261,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.27.0000	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	15.115.145.000	15.114.181.261,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.830.369.549	9.620.115.849	99.829.800	99.687.000	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9.830.369.549	9.620.115.849	99.829.800	99.687.000	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.091.640.924	6.949.966.497,00	99.829.800	99.687.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	464.154.800	453.529.328,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	174.106.000	164.444.570,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	290.048.800	289.084.758,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.606.123.109	5.511.686.241,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.550.859.109	5.456.845.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.264.000	54.840.941,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.736.000	42.545.886,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44.736.000	42.545.886,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.486.315	253.399.062,00	99.829.800	99.687.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	259.486.315	253.399.062,00	99.829.800	99.687.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	717.140.700	688.805.980,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	717.140.700	688.805.980,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	391.922.000	369.154.482,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	391.922.000	369.154.482,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	391.922.000	369.154.482,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	199.999.775	198.115.544,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	199.999.775	198.115.544,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	199.999.775	198.115.544,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	388.497.600	388.384.972,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	388.497.600	388.384.972,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	261.311.400	261.233.480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.01.0007	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	127.186.200	127.151.492,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.561.629.650	1.518.074.534,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.561.629.650	1.518.074.534,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	557.780.650	553.715.624,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	214.938.000	213.629.208,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	788.911.000	750.729.702,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	196.679.600	196.419.820,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	196.679.600	196.419.820,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	196.679.600	196.419.820,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	41.347.771.672	41.088.026.786	70.000.000	65.188.500	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemuda dan Olahraga	41.347.771.672	41.088.026.786	70.000.000	65.188.500	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.975.735.096	6.892.297.300,00	70.000.000	65.188.500,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	401.878.800	401.584.432,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	401.878.800	401.584.432,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.051.282.296	5.003.291.017,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.035.571.672	4.987.580.393,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.710.624	15.710.624,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.000.000	158.222.000,00	70.000.000	65.188.500,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.000.000	158.222.000,00	70.000.000	65.188.500,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.362.574.000	1.329.199.851,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.362.574.000	1.329.199.851,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.091.149.121	2.050.731.319,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	2.091.149.121	2.050.731.319,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	2.091.149.121	2.050.731.319,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	32.280.887.455	32.144.998.167,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	310.729.748	301.730.229,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	310.729.748	301.730.229,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	4.538.851.407	4.418.775.323,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	4.538.851.407	4.418.775.323,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	27.431.306.300	27.424.492.615,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	27.431.306.300	27.424.492.615,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	518.299.850	508.655.343	0	0	0	0	0	0
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000		Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	518.299.850	508.655.343	0	0	0	0	0	0
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	518.299.850	508.655.343,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	518.299.850	508.655.343,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	332.556.550	332.149.484,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	82.937.800	73.802.509,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.20.02.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	102.805.500	102.703.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	122.090.000	121.725.605	0	0	0	0	0	0
2.21	2.16.2.20.2.21.26.0000		Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	122.090.000	121.725.605	0	0	0	0	0	0
2.21	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	122.090.000	121.725.605,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	122.090.000	121.725.605,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.26.0000	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	122.090.000	121.725.605,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.777.101.163	4.560.534.884	270.322.000	266.634.500	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.777.101.163	4.560.534.884	270.322.000	266.634.500	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	300.023.300	299.847.265,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	300.023.300	299.847.265,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	150.023.400	149.999.610,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	149.999.900	149.847.655,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.081.905.950	1.081.588.798,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.081.905.950	1.081.588.798,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.081.905.950	1.081.588.798,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	399.979.250	399.311.864,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	199.979.350	199.860.248,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	99.990.900	99.900.067,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	99.988.450	99.960.181,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	199.999.900	199.451.616,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	100.000.000	99.686.380,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	99.999.900	99.765.236,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.995.192.663	2.779.786.957,00	270.322.000	266.634.500,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	2.995.192.663	2.779.786.957,00	270.322.000	266.634.500,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	658.395.500	567.994.911,00	41.200.000	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	756.067.400	712.712.033,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.114.688.500	1.083.950.547,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	466.041.263	415.129.466,00	229.122.000	226.634.500,00	0	0,00	0	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	9.377.418.322	9.279.990.000	137.041.500	131.900.000	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.377.418.322	9.279.990.000	137.041.500	131.900.000	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.939.672.847	8.843.292.891,00	67.413.500	63.400.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	231.398.850	230.897.578,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	231.398.850	230.897.578,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.389.171.933	7.301.778.388,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.339.171.983	7.252.655.166,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	49.999.950	49.123.222,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.500.000	119.492.700,00	67.413.500	63.400.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.500.000	119.492.700,00	67.413.500	63.400.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.198.602.064	1.191.124.225,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.198.602.064	1.191.124.225,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	354.742.800	354.004.261,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	74.975.050	74.959.870,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	74.975.050	74.959.870,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	279.767.750	279.044.391,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	279.767.750	279.044.391,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	83.002.675	82.692.848,00	69.628.000	68.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	83.002.675	82.692.848,00	69.628.000	68.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	83.002.675	82.692.848,00	69.628.000	68.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	511.442.700	495.560.785	0	0	0	0	0	0
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	511.442.700	495.560.785	0	0	0	0	0	0
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	413.011.100	398.830.165,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	319.456.425	309.646.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	319.456.425	309.646.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	93.554.675	89.183.515,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	93.554.675	89.183.515,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	98.431.600	96.730.620,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	58.837.500	58.567.220,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	58.837.500	58.567.220,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	39.594.100	38.163.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.29.0000	2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	39.594.100	38.163.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	119.510.844.998	116.898.623.654	18.994.883.360	18.620.613.179	0	0	0	0
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	28.199.172.810	27.454.485.599	10.285.283.790	9.997.717.183	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	23.917.057.683	23.884.071.581	4.484.694.500	4.505.838.825	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.620.965.444	14.663.437.642,00	924.927.000	922.621.300,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	894.786.474	892.270.973,00	77.359.000	77.340.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	590.915.324	590.020.870,00	73.645.000	73.640.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	303.871.150	302.250.103,00	3.714.000	3.700.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.632.608.510	11.474.216.238,00	61.800.000	61.410.500,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.267.778.110	11.109.700.809,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	364.830.400	364.515.429,00	61.800.000	61.410.500,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	281.199.000	279.677.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	281.199.000	279.677.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.603.675	80.358.522,00	769.854.000	767.980.800,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.603.675	80.358.522,00	769.854.000	767.980.800,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.765.767.785	1.936.914.909,00	15.914.000	15.890.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.765.767.785	1.936.914.909,00	15.914.000	15.890.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.509.748.550	1.503.761.764,00	2.598.240.000	2.568.003.922,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	324.628.550	323.195.264,00	2.598.240.000	2.568.003.922,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat.	324.628.550	323.195.264,00	2.598.240.000	2.568.003.922,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.185.120.000	1.180.566.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.185.120.000	1.180.566.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.146.904.200	4.120.267.020,00	0	43.999.503,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	4.017.472.000	3.979.067.040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	139.304.000	138.224.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.878.168.000	3.840.842.340,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	129.432.200	128.894.180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	52.716.200	52.306.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.03.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	76.716.000	76.587.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	0	12.305.800,00	0	43.999.503,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	0	12.305.800,00	0	43.999.503,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	241.109.289	262.852.500,00	961.527.500	971.214.100,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	60.277.100	60.060.500,00	9.527.500	9.527.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	60.277.100	60.060.500,00	9.527.500	9.527.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	180.832.189	202.792.000,00	952.000.000	961.687.100,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	123.979.689	107.149.000,00	952.000.000	961.687.100,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	56.852.500	95.643.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	781.628.350	730.206.440,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	781.628.350	730.206.440,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	105.409.350	104.196.340,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	134.038.000	130.318.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	542.181.000	495.691.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.616.701.850	2.603.546.215,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	48.707.950	48.593.380,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.06.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	48.707.950	48.593.380,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	497.997.000	504.273.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	497.997.000	504.273.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.069.996.900	2.050.678.945,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0000	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.069.996.900	2.050.678.945,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001		UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP)	1.412.119.127	1.201.544.016	233.865.600	223.957.424	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	471.231.327	300.595.323,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.753.700	34.656.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.753.700	34.656.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.477.627	265.939.323,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	420.477.627	265.939.323,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	940.887.800	900.948.693,00	233.865.600	223.957.424,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	940.887.800	900.948.693,00	233.865.600	223.957.424,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	408.887.000	408.115.693,00	233.865.600	223.957.424,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0001	3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	532.000.800	492.833.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002		UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPI Tenda)	1.228.336.319	978.184.521	1.999.231.503	1.941.349.448	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	888.788.750	699.388.534,00	2.232.000	2.216.303,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.157.750	41.560.600,00	2.232.000	2.216.303,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.157.750	41.560.600,00	2.232.000	2.216.303,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	840.631.000	657.827.934,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	840.631.000	657.827.934,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	339.547.569	278.795.987,00	1.996.999.503	1.939.133.145,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	339.547.569	278.795.987,00	1.996.999.503	1.939.133.145,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	76.838.654	76.550.350,00	1.996.999.503	1.939.133.145,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0002	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	262.708.915	202.245.637,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003		UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta (PPI Tilamuta)	736.466.136	604.653.708	1.196.592.000	1.171.521.802	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	538.320.260	418.935.508,00	29.741.000	29.700.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.023.200	36.695.464,00	29.741.000	29.700.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.023.200	36.695.464,00	29.741.000	29.700.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.297.060	382.240.044,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	499.297.060	382.240.044,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	198.145.876	185.718.200,00	1.166.851.000	1.141.821.802,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	198.145.876	185.718.200,00	1.166.851.000	1.141.821.802,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	127.512.000	115.206.200,00	1.166.851.000	1.141.821.802,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0003	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	70.633.876	70.512.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004		UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma	639.874.145	569.602.839	2.370.900.187	2.155.049.684	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	400.113.300	332.603.053,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.277.600	102.483.830,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.277.600	102.483.830,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.835.700	230.119.223,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	280.835.700	230.119.223,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	239.760.845	236.999.786,00	2.370.900.187	2.155.049.684,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	239.760.845	236.999.786,00	2.370.900.187	2.155.049.684,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	179.294.645	177.287.636,00	2.370.900.187	2.155.049.684,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0004	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	60.466.200	59.712.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005		Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP)	265.319.400	216.428.934	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	211.734.600	170.274.056,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.068.600	48.540.126,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.068.600	48.540.126,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.666.000	121.733.930,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153.666.000	121.733.930,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	53.584.800	46.154.878,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	53.584.800	46.154.878,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.30.0005	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	53.584.800	46.154.878,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	11.860.997.464	11.586.649.725	827.658.000	823.516.796	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000		Dinas Pariwisata	11.860.997.464	11.586.649.725	827.658.000	823.516.796	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.586.816.214	8.325.846.492,00	427.658.000	423.866.796,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	288.256.000	277.356.285,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	288.256.000	277.356.285,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.343.079.464	6.190.204.034,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.269.279.464	6.118.947.315,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	73.800.000	71.256.719,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	129.872.000	108.206.424,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	129.872.000	108.206.424,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	763.407.700	705.132.752,00	427.658.000	423.866.796,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	763.407.700	705.132.752,00	427.658.000	423.866.796,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.062.201.050	1.044.946.997,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.062.201.050	1.044.946.997,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	945.366.200	936.125.656,00	400.000.000	399.650.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	328.134.350	320.828.400,00	400.000.000	399.650.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	328.134.350	320.828.400,00	400.000.000	399.650.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	400.454.300	399.268.837,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	400.454.300	399.268.837,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	122.254.000	122.210.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.03.0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	122.254.000	122.210.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	94.523.550	93.818.369,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	94.523.550	93.818.369,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.769.778.500	1.772.107.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.769.778.500	1.772.107.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	466.095.800	470.009.885,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	283.003.900	282.320.817,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.020.678.800	1.019.777.158,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	334.036.550	330.407.108,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	334.036.550	330.407.108,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	334.036.550	330.407.108,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	225.000.000	222.162.609,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	225.000.000	222.162.609,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	75.000.000	72.615.180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.34.0000	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	150.000.000	149.547.429,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	62.763.035.944	61.313.643.741	5.791.291.800	5.736.646.200	0	0	0	0
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000		Dinas Pertanian	55.044.957.569	54.273.808.158	3.362.275.000	3.324.336.900	0	0	0	0
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.821.801.219	38.408.091.027,00	292.120.000	289.740.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.243.835.960	1.187.835.243,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	623.936.163	573.131.436,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	619.899.797	614.703.807,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.668.353.448	34.336.157.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.507.925.448	34.176.401.929,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	160.428.000	159.755.231,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	458.277.000	458.267.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	458.277.000	458.267.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	416.500.200	414.099.918,00	292.120.000	289.740.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	416.500.200	414.099.918,00	292.120.000	289.740.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.034.834.611	2.011.731.206,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.034.834.611	2.011.731.206,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13.723.219.100	13.532.789.322,00	3.056.505.000	3.020.950.400,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	5.149.523.000	4.814.585.495,00	3.056.505.000	3.020.950.400,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	5.049.455.000	4.715.281.995,00	3.056.505.000	3.020.950.400,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	100.068.000	99.303.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.636.949.600	3.627.300.508,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	0	10.428.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	3.636.949.600	3.616.872.508,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	0	12.166.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	0	12.166.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	0	210.740.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0	210.740.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	4.936.746.500	4.867.997.319,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.07.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	430.424.500	429.958.679,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	4.506.322.000	4.438.038.640,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	100.068.000	87.667.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	100.068.000	87.667.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	100.068.000	87.667.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	595.537.500	583.315.932,00	13.650.000	13.646.500,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	595.537.500	578.101.932,00	13.650.000	13.646.500,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	0	8.690.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	595.537.500	569.411.932,00	13.650.000	13.646.500,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	0	5.214.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0	5.214.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0	38.405.380,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	0	38.405.380,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0	33.191.380,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0	5.214.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.804.331.750	1.623.538.997,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	202.568.000	202.289.610,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	202.568.000	202.289.610,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.164.850.000	984.347.872,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	61.712.000	68.508.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1.103.138.000	915.839.452,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	436.913.750	436.901.515,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0000	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	436.913.750	436.901.515,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001		UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	3.519.698.200	3.402.883.704	1.607.675.800	1.591.188.000	0	0	0	0
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	405.926.000	366.530.303,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.926.000	366.530.303,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	405.926.000	366.530.303,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.014.684.000	952.991.370,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	842.862.000	793.809.370,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	150.966.000	140.500.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	691.896.000	653.308.570,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	171.822.000	159.182.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	171.822.000	159.182.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.099.088.200	2.083.362.031,00	1.607.675.800	1.591.188.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	2.099.088.200	2.083.362.031,00	1.607.675.800	1.591.188.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0001	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	2.099.088.200	2.083.362.031,00	1.607.675.800	1.591.188.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002		UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian	1.087.852.500	920.379.186	0	0	0	0	0	0
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	428.300.500	327.560.446,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.300.500	327.560.446,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	428.300.500	327.560.446,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	659.552.000	592.818.740,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	659.552.000	592.818.740,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	531.984.000	472.720.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0002	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	127.568.000	120.098.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003		UPTD Laboratorium Veteriner	495.939.000	458.522.973	510.284.000	510.254.300	0	0	0	0
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	191.674.500	168.611.873,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.674.500	168.611.873,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.674.500	168.611.873,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	304.264.500	289.911.100,00	510.284.000	510.254.300,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	111.608.000	102.756.600,00	73.000.000	72.984.300,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	111.608.000	102.756.600,00	73.000.000	72.984.300,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	192.656.500	187.154.500,00	437.284.000	437.270.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0003	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	192.656.500	187.154.500,00	437.284.000	437.270.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004		UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian	330.611.000	299.744.300	11.057.000	11.027.000	0	0	0	0
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	207.414.000	188.819.392,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.414.000	188.819.392,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207.414.000	188.819.392,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	123.197.000	110.924.908,00	11.057.000	11.027.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	123.197.000	110.924.908,00	11.057.000	11.027.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0004	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	123.197.000	110.924.908,00	11.057.000	11.027.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005		UPTD Balai Perbibitan Ternak	2.283.977.675	1.958.305.420	300.000.000	299.840.000	0	0	0	0
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	441.352.675	388.356.003,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	441.352.675	388.356.003,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	441.352.675	388.356.003,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.842.625.000	1.569.949.417,00	300.000.000	299.840.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.842.625.000	1.569.949.417,00	300.000.000	299.840.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.35.0005	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1.842.625.000	1.569.949.417,00	300.000.000	299.840.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	5.638.879.048	5.612.477.743	2.090.649.770	2.062.733.000	0	0	0	0
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.656.980.000	3.879.435.463	0	0	0	0	0	0
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	219.928.641,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	71.411.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	29.004.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	1.620.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	40.287.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	114.558.796,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	17.018.796,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	97.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	33.957.965,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	33.957.965,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.534.220.000	3.537.626.822,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	39.480.000	39.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	39.480.000	39.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	60.720.000	60.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.03.0003	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	60.720.000	60.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.287.500.000	3.277.406.822,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	3.287.500.000	3.277.406.822,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	88.440.000	88.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	30.360.000	30.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	58.080.000	58.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	0	13.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	0	13.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	58.080.000	58.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	58.080.000	58.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	29.040.000	28.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	29.040.000	28.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	29.040.000	28.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	93.720.000	93.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	93.720.000	93.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0000	3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	93.720.000	93.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001		UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat	340.486.689	299.776.380	741.390.000	733.230.000	0	0	0	0
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	238.845.628	198.600.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.065.628	37.904.458,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.933.350	5.252.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.289.778	1.289.778,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.842.500	31.361.780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.820.000	115.815.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.020.000	16.005.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.800.000	99.810.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.960.000	44.880.842,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.960.000	44.880.842,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	101.641.061	101.175.480,00	741.390.000	733.230.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	101.641.061	101.175.480,00	741.390.000	733.230.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0001	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	101.641.061	101.175.480,00	741.390.000	733.230.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002		UPTD KPH Wilayah III Pohuwato	317.316.626	279.714.340	41.192.000	41.174.000	0	0	0	0
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	317.316.626	279.714.340,00	41.192.000	41.174.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.925.926	144.276.100,00	41.192.000	41.174.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.660.926	108.602.500,00	41.192.000	41.174.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.100.000	1.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.875.000	6.844.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.290.000	27.729.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.885.700	89.970.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.125.700	15.100.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.760.000	74.870.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.505.000	45.468.040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.065.000	43.068.040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0002	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.440.000	2.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003		UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara	343.125.610	293.227.136	166.822.970	161.950.000	0	0	0	0
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	232.665.610	196.270.880,00	5.150.000	5.150.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.621.425	33.749.000,00	5.150.000	5.150.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.641.425	17.638.000,00	5.150.000	5.150.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	836.000	836.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.144.000	15.275.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.883.500	109.860.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.763.500	36.600.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.120.000	73.260.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.160.685	52.661.280,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.300.685	48.801.280,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.860.000	3.860.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	110.460.000	96.956.256,00	161.672.970	156.800.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	40.460.000	40.459.056,00	161.672.970	156.800.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	40.460.000	40.459.056,00	161.672.970	156.800.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	70.000.000	56.497.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0003	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	70.000.000	56.497.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004		UPTD KPH Wilayah V Boalemo	431.028.200	382.280.120	28.045.500	28.045.000	0	0	0	0
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	281.033.200	232.373.945,00	28.045.500	28.045.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.017.539	42.519.000,00	28.045.500	28.045.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.832.539	8.174.000,00	28.045.500	28.045.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	810.000	810.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.375.000	2.375.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	31.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.554.986	145.755.277,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.354.986	26.295.277,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.200.000	119.460.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.460.675	44.099.668,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.630.675	42.279.668,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.830.000	1.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	149.995.000	149.906.175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	149.995.000	149.906.175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0004	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	149.995.000	149.906.175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005		UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo	303.287.157	264.411.214	1.008.140.000	993.449.000	0	0	0	0
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	243.287.157	204.603.564,00	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.311.747	15.005.400,00	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.845.181	1.088.500,00	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	916.566	416.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	3.378.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.550.000	10.122.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.215.410	110.625.045,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.455.410	35.485.045,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.760.000	75.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.760.000	78.973.119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.480.000	73.693.119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.280.000	5.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	60.000.000	59.807.650,00	1.001.640.000	986.949.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	0,00	1.001.640.000	986.949.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	0,00	1.001.640.000	986.949.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	60.000.000	59.807.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0005	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	60.000.000	59.807.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006		UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo	246.654.766	213.633.090	105.059.300	104.885.000	0	0	0	0
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	246.654.766	213.633.090,00	105.059.300	104.885.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.981.766	87.754.090,00	105.059.300	104.885.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.338.266	31.343.546,00	105.059.300	104.885.000,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.233.500	1.233.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	4.990.335,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.410.000	50.186.709,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.861.000	97.067.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.741.000	23.807.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.120.000	73.260.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.812.000	28.812.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.982.000	26.982.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.17.0006	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.830.000	1.830.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	811.445.500	804.820.449	0	0	0	0	0	0
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000		Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	811.445.500	804.820.449	0	0	0	0	0	0
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	105.750.000	105.708.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	105.750.000	105.708.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	105.750.000	105.708.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	161.960.000	161.919.967,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	161.960.000	161.919.967,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	161.960.000	161.919.967,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	146.089.300	144.893.099,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	90.815.300	89.855.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	90.815.300	89.855.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	55.274.000	55.037.399,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	55.274.000	55.037.399,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	397.646.200	392.299.183,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	56.065.800	56.065.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	56.065.800	56.065.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	341.580.400	336.233.683,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.29	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	341.580.400	336.233.683,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7.720.000.982	7.622.759.003	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000		Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	7.720.000.982	7.622.759.003	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	29.616.750	29.467.120,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	29.616.750	29.467.120,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	29.616.750	29.467.120,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	5.718.663.982	5.652.890.227,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	5.718.663.982	5.652.890.227,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	124.080.000	123.978.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.594.583.982	5.528.912.227,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.971.720.250	1.940.401.656,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.809.116.750	1.778.113.248,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1.809.116.750	1.778.113.248,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	123.166.750	122.853.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	53.322.000	53.134.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	69.844.750	69.719.210,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	39.436.750	39.435.048,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	39.436.750	39.435.048,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.143.053.250	2.138.595.744	0	0	0	0	0	0
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000		Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	2.143.053.250	2.138.595.744	0	0	0	0	0	0
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.143.053.250	2.138.595.744,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2.143.053.250	2.138.595.744,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	728.251.750	727.654.648,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.292.784.750	1.289.055.716,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.27.0000	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	122.016.750	121.885.380,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	374.260.000	365.191.650	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000		Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	374.260.000	365.191.650	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	135.360.000	135.110.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	135.360.000	135.110.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.03.1.01.0017	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	135.360.000	135.110.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	238.900.000	230.080.790,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	238.900.000	230.080.790,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.29.3.32.01.0000	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	238.900.000	230.080.790,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	218.576.095.363	204.832.787.616	3.487.799.050	3.358.748.914	0	0	0	0
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	104.753.669.333	98.140.549.718	1.227.901.850	1.150.347.334	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000		Sekretariat Daerah	28.611.998.254	29.755.705.015	238.962.700	210.060.213	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.611.998.254	28.968.033.843,00	238.962.700	210.060.213,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	294.568.176,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	255.583.266,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0	13.901.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	25.083.710,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.378.409.789	5.361.378.301,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.378.409.789	5.328.967.361,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	0	32.410.940,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	7.222.218,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	7.222.218,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	79.131.807,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	79.131.807,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	99.481.741,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	18.308.553,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	81.173.188,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	556.349.281,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	488.419.281,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	67.930.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	348.359.771,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	39.755.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	82.093.771,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	401.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	226.109.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.715.098.091	1.288.039.328,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	185.698.091	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	179.400.000	178.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.250.000.000	1.109.879.328,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	24.518.490.374	20.801.441.780,00	238.962.700	210.060.213,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	6.521.323.550	5.626.011.578,00	89.452.450	77.206.500,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	17.997.166.824	15.175.430.202,00	149.510.250	132.853.713,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0	132.061.440,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0	7.052.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	57.908.227,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	0	67.100.613,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	0	143.521.598,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	0	21.796.742,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	0	20.856.742,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	0	940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	0	121.724.856,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	34.916.980,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	0	24.625.826,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	0	29.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	0	33.042.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	0	128.603.553,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	0	66.726.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	0	12.092.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	0	13.443.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	0	11.037.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	0	30.154.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	0	61.876.653,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	0	61.876.653,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0	40.378.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	0	22.115.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	0	6.985.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	0	15.130.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	0	18.263.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	0	11.097.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	0	7.165.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0	384.067.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0	110.377.359,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	0	14.123.159,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	0	81.654.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	14.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	0	97.140.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	0	42.274.215,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	30.910.760,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	23.955.675,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	176.549.990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	0	110.798.622,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	0	45.365.498,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	0	20.385.870,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0	91.099.522,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	0	91.099.522,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0000	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	0	91.099.522,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042		Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	35.842.381.370	35.337.734.311	73.321.000	71.425.000	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.389.411.732	5.143.074.215,00	73.321.000	71.425.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	161.678.437	155.520.482,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	161.678.437	155.520.482,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.992.385.461	3.772.150.546,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.992.385.461	3.772.150.546,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.117.000	247.606.571,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	255.117.000	247.606.571,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	459.882.000	453.177.209,00	73.321.000	71.425.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	459.882.000	453.177.209,00	73.321.000	71.425.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.348.834	514.619.407,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	520.348.834	514.619.407,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	949.513.270	920.233.655,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	275.707.688	268.164.322,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	60.000.000	57.918.994,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	113.169.688	108.581.349,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	102.538.000	101.663.979,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	337.685.532	330.532.869,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	233.645.956	229.956.867,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	104.039.576	100.576.002,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	336.120.050	321.536.464,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	104.454.600	101.047.876,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	104.059.200	96.021.584,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	127.606.250	124.467.004,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	29.503.456.368	29.274.426.441,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	24.590.800.274	24.365.856.185,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	374.767.700	368.370.182,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	24.216.032.574	23.997.486.003,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.826.656.094	4.824.526.917,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4.826.656.094	4.824.526.917,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	86.000.000	84.043.339,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0042	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	86.000.000	84.043.339,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043		Biro Hukum	6.712.097.278	5.694.877.415	160.780.000	160.166.000	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.464.839.428	3.704.910.275,00	160.780.000	160.166.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	267.367.400	202.964.095,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.148.900	68.715.005,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	73.508.600	58.365.392,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.709.900	75.883.698,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.335.613.028	2.815.136.233,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.239.487.328	2.724.812.452,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	96.125.700	90.323.781,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.367.600	97.325.065,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.730.000	25.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	104.637.600	71.725.065,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	470.882.900	381.933.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.678.900	17.025.331,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	447.204.000	364.907.919,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	160.780.000	160.166.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	160.780.000	160.166.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.960.000	97.780.402,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.960.000	97.780.402,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.648.500	109.771.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.288.500	83.012.930,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.360.000	26.758.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.247.257.850	1.989.967.140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.167.232.050	1.095.836.821,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	378.714.300	365.956.260,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	117.936.450	104.417.048,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	161.100.100	149.619.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	509.481.200	475.843.963,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.080.025.800	894.130.319,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	719.369.100	534.543.406,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0043	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	360.656.700	359.586.913,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044		Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	5.000.230.513	4.168.740.252	65.438.000	64.900.000	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.304.458.813	2.732.639.514,00	65.438.000	64.900.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.178.408	112.439.425,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	157.914.408	106.316.325,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.088.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.176.000	4.123.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.560.386.480	2.140.211.899,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.558.298.480	2.138.131.899,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	2.088.000	2.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	27.182.000	1.236.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.182.000	1.236.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.823.500	72.990.531,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.163.500	10.017.238,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.860.000	49.173.293,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.800.000	13.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	65.438.000	64.900.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	65.438.000	64.900.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.702.025	313.987.699,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.002.025	43.492.699,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321.700.000	270.495.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.186.400	91.773.460,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.836.400	75.593.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.500.000	3.330.460,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.850.000	12.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.337.903.500	1.171.212.718,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	899.635.500	753.475.240,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	649.635.500	523.192.969,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	250.000.000	230.282.271,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	30.092.000	29.999.538,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	30.092.000	29.999.538,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	408.176.000	387.737.940,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	155.899.450	144.563.040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	252.276.550	243.174.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	357.868.200	264.888.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	344.126.700	251.183.774,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	204.020.000	111.454.389,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	52.804.000	52.546.025,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	87.302.700	87.183.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	13.741.500	13.704.246,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0044	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	13.741.500	13.704.246,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.194.722.410	6.736.007.226	55.590.000	54.750.000	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.798.850.420	5.750.507.083,00	55.590.000	54.750.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	308.080.000	260.538.987,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	308.080.000	260.538.987,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.013.900.210	5.095.323.090,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.013.900.210	5.095.323.090,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0,00	55.590.000	54.750.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	55.590.000	54.750.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.870.210	394.645.006,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	476.870.210	394.645.006,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.395.871.990	985.500.143,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	881.431.500	750.755.362,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	320.604.200	299.059.417,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	427.232.800	334.993.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	133.594.500	116.702.495,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	187.047.240	86.206.557,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	62.965.265	18.542.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	85.664.600	53.353.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	38.417.375	14.310.207,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	327.393.250	148.538.224,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	118.864.322	7.976.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	147.661.002	101.044.404,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0045	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	60.867.926	39.517.120,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046		Biro Organisasi	5.741.185.110	4.635.731.735	129.726.000	129.408.727	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.665.782.304	3.706.221.446,00	129.726.000	129.408.727,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	226.757.800	104.899.782,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	226.757.800	104.899.782,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.607.084.354	2.915.065.106,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.526.096.454	2.859.786.226,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	80.987.900	55.278.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.408.700	95.277.820,00	129.726.000	129.408.727,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.408.700	95.277.820,00	129.726.000	129.408.727,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.531.450	590.978.738,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	718.531.450	590.978.738,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.075.402.806	929.510.289,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	438.871.175	416.353.708,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	212.740.000	191.661.044,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	226.131.175	224.692.664,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	636.531.631	513.156.581,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	172.153.900	136.987.406,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	185.729.200	160.684.252,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	108.669.398	78.992.822,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0046	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	169.979.133	136.492.101,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047		Biro Umum	14.651.054.398	11.811.753.764	504.084.150	459.637.394	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.651.054.398	11.811.753.764,00	504.084.150	459.637.394,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.944.675	114.795.793,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	107.456.675	85.356.482,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.488.000	29.439.311,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.739.005.643	5.476.169.887,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.614.965.018	5.355.278.047,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	124.040.625	120.891.840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	114.746.000	106.056.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	114.746.000	106.056.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.148.000	52.680.560,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.148.000	52.680.560,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	886.280.000	741.374.400,00	504.084.150	459.637.394,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	886.280.000	741.374.400,00	504.084.150	459.637.394,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.394.591.060	1.748.219.543,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.394.591.060	1.748.219.543,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.491.910.220	2.928.889.839,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	752.651.200	637.367.441,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.739.259.020	2.291.522.398,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	806.428.800	643.567.662,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	205.539.100	171.939.317,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	390.200.000	329.344.358,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.48.0047	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	210.689.700	142.283.987,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	113.822.426.030	106.692.237.898	2.259.897.200	2.208.401.580	0	0	0	0
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000		Sekretariat DPRD	113.822.426.030	106.692.237.898	2.259.897.200	2.208.401.580	0	0	0	0
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.262.150.680	46.106.196.140,00	2.259.897.200	2.208.401.580,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	360.416.950	332.019.475,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	360.416.950	332.019.475,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.584.236.501	8.508.086.464,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.301.554.271	8.225.743.124,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	282.682.230	282.343.340,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.022.134.400	936.555.928,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.022.134.400	936.555.928,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.444.400.251	4.245.651.465,00	2.259.897.200	2.208.401.580,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.444.400.251	4.245.651.465,00	2.259.897.200	2.208.401.580,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.947.355.520	4.573.517.305,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.947.355.520	4.573.517.305,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	26.320.698.308	26.039.205.267,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26.320.698.308	26.039.205.267,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	1.582.908.750	1.471.160.236,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.01.1.16.0003	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.582.908.750	1.471.160.236,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	66.560.275.350	60.586.041.758,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	7.046.379.050	6.100.090.597,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	7.046.379.050	6.100.090.597,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	22.172.161.199	21.627.200.691,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD	18.874.261.599	18.409.795.255,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3.297.899.600	3.217.405.436,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	35.773.312.912	31.612.962.126,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	21.092.620.229	17.459.418.638,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	14.680.692.683	14.153.543.488,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.08	Facilitasi Tugas DPRD	1.568.422.189	1.245.788.344,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.4.01.0.00.50.0000	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.568.422.189	1.245.788.344,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	137.890.459.544	129.803.635.682	1.255.150.500	1.186.748.000	5.496.906.618	4.701.497.713	209.604.098.485	202.203.513.267
5.01			PERENCANAAN	17.103.591.491	16.790.479.755	416.995.500	383.523.000	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000		Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Daerah	17.103.591.491	16.790.479.755	416.995.500	383.523.000	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.700.798.441	13.418.647.039,00	416.995.500	383.523.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.502.626.756	1.475.149.682,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	971.355.756	954.933.763,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	531.271.000	520.215.919,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.716.683.835	9.657.526.690,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.616.683.835	9.558.213.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000	99.312.840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.413.550	178.831.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.413.550	178.831.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.083.598.200	982.016.076,00	416.995.500	383.523.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.083.598.200	982.016.076,00	416.995.500	383.523.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.197.476.100	1.125.123.491,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.197.476.100	1.125.123.491,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	971.992.000	953.051.149,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	560.761.500	554.698.357,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	560.761.500	554.698.357,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	167.439.800	155.595.508,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	167.439.800	155.595.508,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	243.790.700	242.757.284,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	70.554.500	70.246.320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	173.236.200	172.510.964,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.430.801.050	2.418.781.567,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	727.752.250	723.706.627,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	146.199.900	143.331.688,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	59.120.000	58.789.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	18.500.000	18.169.484,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	213.079.900	212.877.174,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	290.852.450	290.539.261,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	995.336.325	988.588.846,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	215.345.600	215.126.242,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	215.413.250	213.467.819,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	564.577.475	559.994.785,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	707.712.475	706.486.094,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	121.160.475	120.808.559,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	113.074.000	112.936.895,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	97.112.000	96.904.012,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	252.390.000	252.188.131,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	123.976.000	123.648.497,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02			KEUANGAN	87.912.321.623	81.177.081.407	415.920.000	387.000.000	5.496.906.618	4.701.497.713	209.604.098.485	202.203.513.267
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000		Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	80.699.300.244	75.360.297.280	415.920.000	387.000.000	5.496.906.618	4.701.497.713	209.604.098.485	202.203.513.267
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	67.611.668.883	62.030.784.707,00	415.920.000	387.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	829.404.550	814.849.783,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	394.988.450	389.657.531,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	434.416.100	425.192.252,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.447.531.253	58.290.295.520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63.396.591.753	58.239.705.279,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	50.939.500	50.590.241,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	356.094.900	259.336.672,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	356.094.900	259.336.672,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.628.027.080	1.301.323.307,00	415.920.000	387.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.628.027.080	1.301.323.307,00	415.920.000	387.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.350.611.100	1.364.979.425,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.350.611.100	1.364.979.425,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.854.145.106	9.815.341.187,00	0	0,00	5.496.906.618	4.701.497.713,00	209.604.098.485	202.203.513.267,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	454.951.000	437.702.793,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	91.039.450	89.752.884,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	64.474.500	59.293.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	199.436.250	194.890.568,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100.000.800	93.765.342,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	284.564.800	266.171.224,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	284.564.800	266.171.224,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	7.724.083.556	7.788.776.798,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	351.829.300	348.246.730,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.03.0003	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	199.959.250	189.253.127,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	6.707.443.806	6.797.331.898,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	464.851.200	453.945.043,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	878.745.850	854.637.583,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penimnaan dan Pengeluaran Kas Daerah	259.932.800	249.587.832,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	425.412.300	418.277.829,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	193.400.750	186.771.922,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0,00	0	0,00	5.496.906.618	4.701.497.713,00	209.604.098.485	202.203.513.267,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0,00	0	0,00	5.496.906.618	4.701.497.713,00	2.975.000.000	2.600.000.000,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	206.629.098.485	199.603.513.267,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	511.799.900	468.052.789,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	511.799.900	468.052.789,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.241.847.275	1.199.447.882,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.241.847.275	1.199.447.882,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	353.424.450	339.875.036,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	241.272.700	230.880.516,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	647.150.125	628.692.330,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.991.638.980	2.314.723.504,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.991.638.980	2.314.723.504,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	536.144.080	473.361.465,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	338.423.800	316.629.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	629.900.000	618.208.085,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	322.121.700	319.973.178,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	0	313.512.942,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	0	109.264.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0000	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	165.049.400	163.773.794,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001		UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kota Gorontalo	1.492.037.775	1.284.981.788	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	808.401.775	717.044.269,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.729.875	260.149.053,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264.729.875	260.149.053,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.671.900	456.895.216,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	543.671.900	456.895.216,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	683.636.000	567.937.519,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	683.636.000	567.937.519,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	443.636.000	342.637.519,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0001	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	240.000.000	225.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002		UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo	1.722.245.329	1.444.608.646	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	640.785.329	544.112.542,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.605.358	244.148.580,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	255.605.358	244.148.580,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.179.971	299.963.962,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	385.179.971	299.963.962,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.081.460.000	900.496.104,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.081.460.000	900.496.104,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	665.960.000	521.258.715,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0002	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	415.500.000	379.237.389,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003		UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo	927.744.450	694.316.717	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	394.274.450	342.854.930,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.222.100	156.060.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.222.100	156.060.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.052.350	186.794.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	231.052.350	186.794.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	533.470.000	351.461.787,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	533.470.000	351.461.787,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	344.470.000	181.211.787,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0003	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	189.000.000	170.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004		UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango	957.935.475	761.231.483	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	494.127.475	367.846.882,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.541.675	143.702.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.541.675	143.702.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.585.800	224.144.882,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.585.800	224.144.882,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	463.808.000	393.384.601,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	463.808.000	393.384.601,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	336.308.000	266.034.601,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0004	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	127.500.000	127.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005		UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	957.426.125	822.354.865	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	493.251.125	439.806.781,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
			Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10

5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	223.451.225	218.213.511,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.451.225	218.213.511,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.799.900	221.593.270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	269.799.900	221.593.270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	464.175.000	382.548.084,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	464.175.000	382.548.084,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	327.200.000	264.096.584,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0005	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	136.975.000	118.451.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006		UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pohuwato	1.155.632.225	809.290.628	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	563.670.725	379.097.368,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.866.000	131.625.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.866.000	131.625.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.804.725	247.471.468,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	334.804.725	247.471.468,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	591.961.500	430.193.260,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	591.961.500	430.193.260,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	383.754.000	248.265.060,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.53.0006	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	208.207.500	181.928.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	10.280.578.222	10.186.754.574	120.280.000	119.200.000	0	0	0	0
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000		Badan Kepegawaian Daerah	10.280.578.222	10.186.754.574	120.280.000	119.200.000	0	0	0	0
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.170.312.047	9.090.402.465,00	120.280.000	119.200.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	287.943.725	287.360.202,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	287.943.725	287.360.202,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.067.378.572	8.013.651.389,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.977.117.994	7.923.657.279,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	90.260.578	89.994.110,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.388.300	311.143.465,00	120.280.000	119.200.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	316.388.300	311.143.465,00	120.280.000	119.200.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	498.601.450	478.247.409,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	498.601.450	478.247.409,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.110.266.175	1.096.352.109,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	360.648.700	356.928.142,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	53.584.200	50.850.829,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	104.002.600	103.158.430,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	157.299.700	157.236.283,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	45.762.200	45.682.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	524.737.250	515.024.743,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	111.149.950	104.265.493,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	52.867.400	52.087.762,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	360.719.900	358.671.488,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	130.817.825	130.689.930,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	130.817.825	130.689.930,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	94.062.400	93.709.294,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	31.191.000	31.102.114,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.4.01.0.00.57.0000	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	62.871.400	62.607.180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	12.656.920.419	12.325.620.864	0	0	0	0	0	0
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.656.920.419	12.325.620.864	0	0	0	0	0	0
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.290.395.254	10.965.997.672,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	431.653.050	430.951.490,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	210.424.600	209.945.504,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	221.228.450	221.005.986,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.357.106.816	8.039.820.839,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.217.198.966	7.900.153.725,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	139.907.850	139.667.114,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	415.628.000	414.585.156,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	415.628.000	414.585.156,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	629.501.300	628.850.382,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	629.501.300	628.850.382,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.456.506.088	1.451.789.805,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.456.506.088	1.451.789.805,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.366.525.165	1.359.623.192,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	238.513.750	233.733.266,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	238.513.750	233.733.266,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.128.011.415	1.125.889.926,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	76.378.625	75.859.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	58.356.450	58.345.790,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	199.382.165	198.629.425,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	40.011.450	39.802.837,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.58.0000	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	753.882.725	753.252.424,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	832.735.184	812.245.372	0	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	832.735.184	812.245.372	0	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	832.735.184	812.245.372,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	324.868.534	308.499.701,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	324.868.534	308.499.701,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	113.248.000	113.058.083,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	113.248.000	113.058.083,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	201.444.050	200.236.362,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	119.690.250	118.795.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	81.753.800	81.440.502,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	193.174.600	190.451.226,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	93.434.900	93.127.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.52.0000	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	99.739.700	97.323.576,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07			PENGLOLAAN PENGHUBUNG	9.104.312.605	8.511.453.710	301.955.000	297.025.000	0	0	0	0
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000		Badan Penghubung	9.104.312.605	8.511.453.710	301.955.000	297.025.000	0	0	0	0
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.774.808.951	7.226.326.644,00	216.205.000	211.525.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.685.565.451	5.143.325.176,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.974.014.227	2.845.754.459,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.679.491.224	2.266.975.897,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	32.060.000	30.594.820,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	958.823.500	958.733.162,00	216.205.000	211.525.000,00	0	0,00	0	0,00
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	757.687.500	757.667.987,00	216.205.000	211.525.000,00	0	0,00	0	0,00
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.136.000	201.065.175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.130.420.000	1.124.268.306,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.130.420.000	1.124.268.306,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.329.503.654	1.285.127.066,00	85.750.000	85.500.000,00	0	0,00	0	0,00
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.329.503.654	1.285.127.066,00	85.750.000	85.500.000,00	0	0,00	0	0,00
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	449.990.000	437.930.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	115.084.480	110.552.076,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	4.01.5.07.0.00.49.0000	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	764.429.174	736.644.990,00	85.750.000	85.500.000,00	0	0,00	0	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	22.346.735.324	21.964.475.885	757.036.000	735.900.000	0	0	0	0
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	22.346.735.324	21.964.475.885	757.036.000	735.900.000	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000		Inspektorat	22.346.735.324	21.964.475.885	757.036.000	735.900.000	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.255.566.424	17.929.865.911,00	757.036.000	735.900.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	259.098.775	255.914.298,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	186.785.350	183.610.221,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.313.425	72.304.077,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.924.734.461	15.634.052.649,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.835.664.161	15.545.127.130,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.754.300	52.722.159,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.316.000	36.203.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	415.060.550	397.239.018,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	415.060.550	397.239.018,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.255.600	190.187.000,00	757.036.000	735.900.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190.255.600	190.187.000,00	757.036.000	735.900.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.119.811.950	1.112.320.916,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248.248.650	244.881.565,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	352.548.300	351.706.886,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519.015.000	515.732.465,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.605.088	340.152.030,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.750.000	58.427.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.410.000	44.316.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	237.445.088	237.408.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.662.816.900	2.638.132.340,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.199.894.025	2.178.698.089,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	453.699.400	453.698.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	219.528.200	218.920.488,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	528.940.000	528.304.015,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	222.280.100	222.114.718,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	400.000.000	398.831.647,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	375.446.325	356.828.921,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	462.922.875	459.434.251,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	462.922.875	459.434.251,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.428.352.000	1.396.477.634,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	209.790.000	209.173.445,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	209.790.000	209.173.445,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	1.218.562.000	1.187.304.189,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	381.282.650	360.854.980,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	140.138.000	139.884.441,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	380.994.600	371.447.657,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.51.0000	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	316.146.750	315.117.111,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	97.981.051.272	97.634.559.492	219.974.000	219.395.900	0	0	0	0
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	97.981.051.272	97.634.559.492	219.974.000	219.395.900	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	97.981.051.272	97.634.559.492	219.974.000	219.395.900	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.255.066.002	5.220.443.659,00	219.974.000	219.395.900,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.068.180	90.019.899,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.068.180	90.019.899,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.250.662.157	4.237.389.569,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.154.899.507	4.141.650.320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	95.762.650	95.739.249,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	289.441.140	287.612.350,00	219.974.000	219.395.900,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	289.441.140	287.612.350,00	219.974.000	219.395.900,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.894.525	605.421.841,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	624.894.525	605.421.841,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	945.500.000	933.598.951,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	945.500.000	933.598.951,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	145.500.000	140.965.931,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	800.000.000	792.633.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	85.197.652.778	84.927.877.045,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	85.197.652.778	84.927.877.045,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	280.000.000	213.558.657,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	73.822.309.347	73.626.334.113,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11.095.343.431	11.087.984.275,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.102.872.492	3.100.991.414,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3.102.872.492	3.100.991.414,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.102.872.492	3.100.991.414,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	836.840.000	835.750.381,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	836.840.000	835.750.381,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	511.840.000	510.786.481,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	325.000.000	324.963.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.643.120.000	2.615.898.042,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.643.120.000	2.615.898.042,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	414.320.000	409.343.427,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	671.480.000	662.889.889,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.557.320.000	1.543.1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah				1.605.785.176.582	1.556.182.022.343,16	257.490.295.402	220.354.238.401,45	5.496.906.618	4.701.497.713,00	209.604.098.485	202.203.513.267,00



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	170,905,894,812.69	228,765,815,327.67
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	170,905,894,812.69	228,765,815,327.67
Sub Total		0.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	99,587,130,872.31	170,905,894,812.69
Sub Total		99,587,130,872.31	170,905,894,812.69
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0.00	0.00
Lain-lain	5.2.5	0.00	0.00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.6	99,587,130,872.31	170,905,894,812.69

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

GUBERNUR GORONTALO,

GUSNAR ISMAIL



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL	5.4				
PENDAPATAN - LO	5.4.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	458,079,825,082.00	431,985,426,310.00	26,094,398,772.00	6.04
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	54,561,129,425.00	4,333,088,112.00	50,228,041,313.00	1,159.17
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	11,580,368,337.00	11,012,325,878.00	568,042,459.00	5.16
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	16,419,228,529.09	65,886,722,978.42	(49,467,494,449.33)	(75.08)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		540,640,551,373.09	513,217,563,278.42	27,422,988,094.67	5.34
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LO	5.4.1.2.1				
Dana Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.1.1	19,301,957,787.00	26,530,401,320.00	(7,228,443,533.00)	(27.25)
Dana Alokasi Umum - LO	5.4.1.2.1.2	1,022,379,872,000.00	979,869,891,000.00	42,509,981,000.00	4.34
Dana Alokasi Khusus - Fisik - LO	5.4.1.2.1.3	144,159,157,866.00	140,281,348,223.00	3,877,809,643.00	2.76
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik - LO	5.4.1.2.1.4	186,256,758,011.00	176,216,774,510.00	10,039,983,501.00	5.70
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO	5.4.1.2.2				
Dana Insentif Fiskal - LO	5.4.1.2.2.1	7,682,882,000.00	30,445,345,000.00	(22,762,463,000.00)	(74.77)
Jumlah Pendapatan Transfer - LO		1,379,780,627,664.00	1,353,343,760,053.00	26,436,867,611.00	1.95
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	5.4.1.3				
Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	80,657,426,276.00	48,164,502,576.00	32,492,923,700.00	67.46
Pendapatan Lainnya - LO	5.4.1.3.2	463,560,000.00	584,580,000.00	(121,020,000.00)	(20.70)
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO		81,120,986,276.00	48,749,082,576.00	32,371,903,700.00	66.41
JUMLAH PENDAPATAN - LO		2,001,542,165,313.09	1,915,310,405,907.42	86,231,759,405.67	4.50
BEBAN	5.4.2				
Beban Pegawai	5.4.2.1	758,440,777,553.00	670,746,579,580.00	87,694,197,973.00	13.07
Beban Persediaan	5.4.2.2	202,633,341,866.79	192,789,322,746.75	9,844,019,120.04	5.11
Beban Jasa	5.4.2.3	348,316,292,234.92	360,358,291,578.98	(12,041,999,344.06)	(3.34)
Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	21,845,530,047.73	29,507,738,764.22	(7,662,208,716.49)	(25.97)
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	131,038,004,554.00	148,300,243,111.00	(17,262,238,557.00)	(11.64)
Beban Bunga	5.4.2.6	6,349,012,047.00	7,188,622,874.00	(839,610,827.00)	(11.68)
Beban Hibah	5.4.2.7	120,277,306,062.00	106,289,323,327.00	13,987,982,735.00	13.16
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.8	11,191,847,860.00	24,878,511,324.00	(13,686,663,464.00)	(55.01)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.9	259,726,661,703.71	223,566,627,995.55	36,160,033,708.16	16.17
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.10	288,988,872.83	359,600,687.41	(70,611,814.58)	(19.64)
Beban Lain-Lain	5.4.2.11	0.00	0.00	-	0.00
Beban Transfer	5.4.2.12	224,960,537,527.00	204,415,281,931.00	20,545,255,596.00	10.05
JUMLAH BEBAN		2,085,068,300,328.98	1,968,400,143,919.91	116,668,156,409.07	5.93
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(83,526,135,015.89)	(53,089,738,012.49)	(30,436,397,003.40)	57.33
KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0.00	0.00	0.00	0.00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0.00	0.00	0.00	0.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(267,664,677.86)	(8,750,257,867.12)	8,482,593,189.26	100.0

Jumlah Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional 5.4.3.1		(267,664,677.86)	(8,750,257,867.12)	8,482,593,189.26	0.00
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(83,793,799,693.75)	(61,839,995,879.61)	(21,953,803,814.14)	35.50
Pos Luar Biasa 5.4.4					
Pendapatan Luar Biasa 5.4.4.1		0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Luar Biasa 5.4.4.2		4,701,497,713.00	991,984,875.00	3,709,512,838.00	373.95
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		(4,701,497,713.00)	(991,984,875.00)	(3,709,512,838.00)	373.95
Surplus/Defisit-LO 5.4.5		(88,495,297,406.75)	(62,831,980,754.61)	(25,663,316,652.14)	40.84

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

GUBERNUR GORONTALO,



GUSNAR ISMAIL



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun 2024	Tahun 2023
EKUITAS AWAL	5.6.1	2,368,190,518,077.99	2,511,279,322,055.31
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	(88,495,297,406.75)	(62,831,980,754.61)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	(43,908,963,504.18)	(80,256,823,222.71)
Koreksi Ekuitas Aset Lancar	5.6.3.1	4,805,062,949.15	3,725,820,799.69
Koreksi Ekuitas Investasi	5.6.3.2	0.00	0.00
Koreksi Ekuitas Aset Tetap	5.6.3.3	(47,098,459,749.78)	(88,304,479,447.73)
Koreksi Ekuitas Aset Lainnya	5.6.3.4	(526,742,934.00)	(4,252,266.67)
Koreksi Ekuitas Kewajiban	5.6.3.5	(1,088,823,769.55)	4,326,087,692.00
Koreksi Ekuitas Lainnya	5.6.3.6	0.00	0.00
EKUITAS AKHIR		2,235,786,257,167.06	2,368,190,518,077.99

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

GUBERNUR GORONTALO,

GUSNAR ISMAIL



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	84,696,315,973.09	153,839,933,323.84
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.2	0.00	0.00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.3	0.00	0.00
Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.1.4	13,359,175,866.82	15,085,201,009.45
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.5	1,428,549,160.00	1,544,780,419.00
Kas Lainnya	5.3.1.1.6	110,043,484.40	501,721,917.40
Setara Kas	5.3.1.1.7	0.00	0.00
Piutang Pajak	5.3.1.1.8	34,933,037,245.04	34,096,555,899.04
Piutang Retribusi	5.3.1.1.9	5,316,427,193.00	5,316,427,193.00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.10	0.00	0.00
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	5.3.1.1.11	16,891,595,996.95	15,362,861,290.50
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.3.1.1.12	8,191,138,816.00	1,950,426,816.00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.13	3,891,151,848.14	0.00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.14	(37,322,874,565.51)	(37,117,190,761.83)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.15	12,311,139,863.00	371,966,954.00
Persediaan	5.3.1.1.16	24,009,502,641.49	23,089,091,713.44
Jumlah Aset Lancar		167,815,203,522.42	214,041,775,773.84
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Nonpermanen	5.3.1.2.1	0.00	0.00
Investasi Permanen	5.3.1.2.2	84,600,798,820.77	84,868,463,498.63
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	84,600,798,820.77	84,868,463,498.63
Investasi Permanen Lainnya		0.00	0.00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		84,600,798,820.77	84,868,463,498.63
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	384,141,104,847.30	378,558,233,660.30
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	887,303,438,723.66	810,729,044,002.92
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1,079,303,014,434.30	1,063,163,484,634.85
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	2,040,456,030,364.33	1,931,972,967,759.31
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	113,258,257,474.22	92,064,554,210.22
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	44,568,320,918.30	57,646,960,635.14
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2,455,726,693,267.34)	(2,157,985,267,689.35)
Jumlah Aset Tetap		2,093,303,473,494.77	2,176,149,977,213.39
DANA CADANGAN	5.3.1.4		
Dana Cadangan	5.3.1.4.1	0.00	0.00
Jumlah Dana Cadangan		0.00	0.00

ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.5.1	860,635,042.46	0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	120,923,233.33	120,923,233.33
Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.3	418,677,299.20	631,181,569.00
Aset Lain-lain	5.3.1.5.4	34,305,024,904.05	34,831,767,838.05
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	5.3.1.5.5	0.00	4,173,559,000.00
Jumlah Aset Lainnya		35,705,260,479.04	39,757,431,640.38
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.6		
Properti Investasi Tanah	5.3.1.6.1	680,062,500.00	680,062,500.00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan (neto)	5.3.1.6.2	8,322,863,286.80	9,964,230,486.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	5.3.1.6.3	0.00	0.00
Jumlah Properti Investasi		9,002,925,786.80	10,644,292,986.00
JUMLAH ASET		2,390,427,662,103.80	2,525,461,941,112.24
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	6,953,612.00	65,741,857.00
Utang Pinjaman	5.3.2.1.2	0.00	1,282,352,668.00
Utang Bunga	5.3.2.1.3	496,486,731.00	586,757,029.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.4	16,935,383,244.00	18,346,665,181.00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.5	189,200,000.00	283,800,000.00
Utang Belanja	5.3.2.1.6	57,899,390,918.74	42,336,649,749.55
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.7	3,033,676,623.00	2,636,112,165.70
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		78,561,091,128.74	65,538,078,650.25
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang Dalam Negeri - Pinjaman PEN	5.3.2.2.1	76,080,313,808.00	91,733,344,384.00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		76,080,313,808.00	91,733,344,384.00
JUMLAH KEWAJIBAN		154,641,404,936.74	157,271,423,034.25
EKUITAS	5.3.3	2,235,786,257,167.06	2,368,190,518,077.99
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2,390,427,662,103.80	2,525,461,941,112.24

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

GUBERNUR GORONTALO,

GUSNAR ISMAIL



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah		457,233,185,366.00	432,906,096,022.00
Pendapatan Retribusi Daerah		54,310,658,591.00	4,232,976,524.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11,580,368,337.00	11,012,325,878.00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya		14,282,008,906.23	63,410,102,172.68
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat		24,972,779,787.00	19,979,330,007.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat		0.00	3,470,154,000.00
Dana Alokasi Umum		1,022,379,872,000.00	979,869,891,000.00
Dana Alokasi Khusus		330,415,915,877.00	316,498,122,733.00
Pendapatan Hibah		6,231,945,832.00	9,707,761,108.00
Pendapatan Lainnya		463,560,000.00	584,580,000.00
Dana Insentif Fiskal		7,682,882,000.00	30,445,345,000.00
Jumlah Arus Masuk Kas		1,929,553,176,696.23	1,872,116,684,444.68
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Belanja Pegawai		764,595,004,643.00	657,826,026,577.00
Belanja Barang dan Jasa		641,715,150,644.16	700,268,455,177.15
Bunga Pinjaman		6,439,282,345.00	7,093,341,745.00
Subsidi		0.00	0.00
Hibah		132,240,736,851.00	85,797,138,870.00
Bantuan Sosial		11,191,847,860.00	24,878,511,324.00
Belanja Tak Terduga		4,701,497,713.00	991,984,875.00
Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		199,603,513,267.00	191,718,038,459.00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		2,600,000,000.00	1,720,000,000.00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0.00	0.00
Jumlah Arus Keluar Kas		1,763,087,033,323.16	1,670,293,497,027.15
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	166,466,143,373.07	201,823,187,417.53
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Pendapatan Penjualan atas Tanah		0.00	0.00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		787,067,000.00	370,421,084.00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0.00	0.00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0.00	0.00
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00
Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya		0.00	0.00
Jumlah Arus Masuk Kas		787,067,000.00	370,421,084.00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Belanja Tanah		0.00	0.00
Belanja Peralatan dan Mesin		73,194,098,495.00	57,681,672,265.00
Belanja Gedung dan Bangunan		68,302,416,338.45	42,838,898,903.91
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		70,394,263,930.00	121,110,943,553.60
Belanja Aset Tetap Lainnya		8,463,459,638.00	8,670,976,134.00
Belanja Aset Lainnya		0.00	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0.00	10,000,000,000.00
Jumlah Arus Keluar Kas		220,354,238,401.45	240,302,490,856.51
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(219,567,171,401.45)	(239,932,069,772.51)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Pencairan Dana Cadangan		0.00	0.00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00
Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat		0.00	0.00
Jumlah Arus Masuk Kas		0.00	0.00
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0.00	0.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		18,217,735,912.00	19,751,038,160.00
Jumlah Arus Keluar Kas		18,217,735,912.00	19,751,038,160.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3	(18,217,735,912.00)	(19,751,038,160.00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		69,551,601,765.00	95,137,665,862.07
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran		0.00	0.00
Kiriman Uang Masuk		0.00	0.00
Jumlah Arus Masuk Kas		69,551,601,765.00	95,137,665,862.07
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		69,610,390,010.00	95,198,618,421.07
Pemberian Uang Persediaan Kepada Bendahara Pengeluaran		0.00	0.00
Kirim Uang Keluar		0.00	0.00
Jumlah Arus Keluar Kas		69,610,390,010.00	95,198,618,421.07
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	(58,788,245.00)	(60,952,559.00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	(71,377,552,185.38)	(57,920,873,073.98)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Bendahara Pengeluaran, Kas Bendahara BOS dan Kas Lainnya	5.5.6	170,971,636,669.69	235,848,844,060.04
Koreksi SILPA		0.00	0.00
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Bendahara Pengeluaran, Kas Bendahara BOS dan Kas Lainnya	5.5.7	99,594,084,484.31	177,927,970,986.06
Terdiri dari:			
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		84,696,315,973.09	153,839,933,323.84
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0.00	0.00
Saldo Akhir Kas BLUD		13,359,175,866.82	15,085,201,009.45
Saldo Akhir Kas Dana BOSP		1,428,549,160.00	1,544,780,419.00
Saldo Akhir Kas Lainnya		110,043,484.40	501,721,917.40

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR GORONTALO



GUSNAR ISMAIL



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Disamping itu, LKPD juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, dan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah itu sendiri, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan yang transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu syarat untuk tercapainya *good governance*. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah bentuk transparansi dan akuntabilitas tercermin dalam pemenuhan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Substansi laporan keuangan adalah penyediaan informasi tentang aktivitas pengelolaan sumber daya termasuk keluaran maupun hasil yang diperoleh. Pemenuhan aspek akuntabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara sumber daya yang digunakan dengan keluaran dan hasil yang diperoleh.

Penyusunan Laporan Keuangan wajib dilakukan oleh seluruh entitas termasuk pemerintah daerah. Jika satuan kerja merupakan entitas akuntansi maka pemerintah daerah merupakan entitas pelaporan. Pelaporan dalam bentuk penyajian laporan keuangan merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang digunakan sebagai media untuk mengakses pengelolaan sumber daya yang dikuasai oleh sebuah entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, diwujudkan dalam APBD yang merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Selanjutnya dalam rangka pemenuhan asas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah setelah pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah diwajibkan menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 194. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penjelasan akun demi akun yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah sangat dibutuhkan terkait keputusan-keputusan fiskal daerah. Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik



dengan menyediakan beberapa informasi sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- e. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; dan
- g. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

Untuk dapat menghasilkan informasi tersebut di atas maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. **Relevan**, apabila informasi yang termuat di dalamnya sesuai kebutuhan pengguna, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna, khususnya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyajikan informasi yang handal adalah memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap.
- b. **Andal**, informasi yang andal (dapat dipercaya) dalam laporan keuangan pemerintah berarti bahwa bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah mungkin saja relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat merugikan pengguna laporan keuangan.
- c. **Dapat dibandingkan**, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
- d. **Dapat dipahami**, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan dapat dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi-informasi yang disajikan dan mampu menginterpretasikannya. Hal ini dapat terlihat dari manfaat informasi yang disajikan tersebut terhadap pengambilan keputusan. Untuk itu, penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus menggunakan format/bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengguna harus diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo penyusunan laporan keuangan sangat berfungsi dalam penetapan kebijakan di tahun-tahun selanjutnya. Adapun beberapa tujuan disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

- a. Memberikan informasi guna pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
- b. Memberikan informasi guna mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
- c. Membantu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya.
- d. Membantu dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.
- e. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode – periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain.
- f. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.
- g. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - m. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03, Seri E.);
 - n. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024;
 - o. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - p. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - q. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
 - r. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan;



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan; dan
 3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
1. Ekonomi Makro;
 2. Inflasi Daerah; dan
 3. Ketenagakerjaan, Kesejahteraan dan Kemiskinan
- Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan;
 2. Program Pembangunan Prioritas Daerah;
 3. *Mandatory Spending*;
 4. *Stunting*;
 5. Strategi Pencapaian; dan
 6. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.
- Bab IV. Kebijakan Akuntansi
1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah;
 2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
 3. Kebijakan Akuntansi;
 4. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi;
 5. Perubahan Kebijakan Akuntansi; dan
 6. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
1. Rincian dan Penjelasan akun Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan;
 - b. Belanja;
 - c. Pembiayaan.
 2. Rincian dan Penjelasan akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 3. Rincian dan penjelasan akun Neraca
 - a. Aset;
 - b. Kewajiban;
 - c. Ekuitas.
 4. Rincian dan penjelasan akun Laporan Operasional
 - a. Pendapatan – LO;
 - b. Beban.
 5. Rincian dan penjelasan akun Laporan Arus Kas
 6. Rincian dan Penjelasan akun Laporan Ekuitas
- Bab VI. Penjelasan atas informasi-informasi *non* keuangan
- Bab VII. Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

a. PDRB Menurut Lapangan Usaha

1) Pertumbuhan Kumulatif Triwulan IV

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, yaitu (minimal):

- a) Tingkat kemiskinan sebesar 13,87%;
- b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,13%;
- c) Indeks Gini Ratio sebesar 0,414;
- d) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,01 poin;
- e) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,13%;
- f) Tingkat Inflasi sebesar 0,57%; dan
- g) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) sebesar Rp54.555 Miliar.

Pertumbuhan ekonomi kumulatif Gorontalo selama tahun 2024 tumbuh sebesar 4,13%. Pertumbuhan kumulatif tertinggi dicapai oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,48%. Pertumbuhan kumulatif tertinggi selanjutnya adalah Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,42%, serta Kategori Konstruksi sebesar 6,41%.

Struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 masih didominasi oleh ketiga lapangan usaha utama yakni Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (37,29%), Kategori Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,22%), serta Kategori Konstruksi (11,34%).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2024 (c-to-c), kategori yang memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu kategori Pertanian sebesar 1,12% diikuti oleh kategori Perdagangan sebesar



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

0,98% serta kategori Konstruksi sebesar 0,70%.

2) **Pertumbuhan Triwulan IV-2024 terhadap Triwulan IV-2023 (y-on-y)**

Pada triwulan IV-2024, ekonomi Gorontalo mengalami pertumbuhan sebesar 4,44% (y-on-y). Lapangan usaha kategori Konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,34% diikuti kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 6,74% serta kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,77%. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo triwulan IV-2024 (y-on-y) yaitu kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,00% diikuti oleh kategori Konstruksi sebesar 0,82%, serta kategori Perdagangan Besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor sebesar 0,58%.

3) **Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2024 terhadap Triwulan III-2024 (q-to-q)**

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2024 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh sebesar 0,91%. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar kategori. Tiga kategori yang memiliki akselerasi tertinggi adalah kategori Akomodasi dan Makan Minum yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 3,13%, pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,01%, dan kategori Jasa Pendidikan sebesar 2,92%.

b. **PDRB Menurut Pengeluaran**

1) **Pertumbuhan Kumulatif Triwulan IV-2024 (c-to-c)**

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kumulatif triwulan IV-2024 terhadap kumulatif triwulan IV-2023 (c-to-c) terjadi pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 9,24%, diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,69%, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,10%.

Struktur PDRB Gorontalo menurut Pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Gorontalo sebesar 62,07%. Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 28,52%, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 27,30%, serta Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 17,35%. Sedangkan Kontribusi Komponen Perubahan Inventori dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) relatif kecil, masing-masing sebesar 1,33% dan 0,79%. Di sisi lain, Komponen Impor Barang dan Jasa (sebagai faktor pengurang di dalam struktur PDRB) berkontribusi sekitar 37,37%.

Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2024, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 2,51%, diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 2,13%. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo dari komponen lainnya sebesar -0,51%.

2) **Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2024 terhadap Triwulan IV-2023 (y-on-y)**

Pada triwulan IV-2024 Ekonomi Gorontalo mengalami pertumbuhan sebesar 4,44% dibandingkan triwulan IV-2023 (y-on-y). Tiga Komponen yang memiliki nilai pertumbuhan tertinggi antara lain Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 11,65%, diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga *Non-Profit* Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,57%, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,20%.

3) **Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2024 terhadap Triwulan III-2024 (q-to-q)**

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2024 terhadap triwulan III-2024 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 0,91%. Pertumbuhan yang terjadi pada triwulan ini disebabkan oleh ekspansi komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 33,46%, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,42% dan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 0,94%.

2.1.2 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah 0,004 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 1 Gini Ratio Provinsi Gorontalo

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (poin)
1	Tingkat Provinsi	0,423	0,417	0,414	Turun 0,003
2	Tingkat Nasional	0,381	0,388	0,373	Turun 0,015



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sumber Dokumen: BPS

Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Gorontalo yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,414. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,004 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2023 sebesar 0,417 dan lebih tinggi 0,041 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Nasional.

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

- Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and healthy life*) Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age*)
- Pengetahuan (*knowledge*) Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu:
 - Harapan Lama Sekolah (HLS)
 - Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
- Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)
Dimensi ini dicerminkan oleh PDRB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Sesuai dengan standar UNDP, Indeks Pembangunan Manusia tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Realisasi pencapaian IPM Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah 0,76 poin dengan kategori, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Provinsi	70,62	71,25	72,01	Naik 0,76
2	Tingkat Nasional	73,77	74,39	75,02	Naik 0,63

Sumber Dokumen: BPS

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo terus mengalami kemajuan. IPM Gorontalo meningkat dari 70,62 pada Tahun 2022 menjadi 72,01 pada tahun 2024 atau dalam kategori “tinggi”. Komponen-komponen yang mempengaruhi perhitungan IPM di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 3 Indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo Tahun
2023 - 2024**

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Umur Panjang dan Hidup Sehat		
	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	70,50	70,73
2	Pengetahuan		
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,16	13,17
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,10	8,29
3	Standar Layak Hidup		
	Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	11,069	11,539
	IPM	71,25	72,01

Sumber Dokumen: BPS

2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Selama kurun waktu Tahun 2024 - Tahun 2022 perekonomian Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan rata-rata 4,32%. Pada periode Tahun 2022 – Tahun 2023 pertumbuhan perekonomian Provinsi Gorontalo tumbuh sebesar 4,50% dan pada kurun waktu Tahun 2023 - Tahun 2024 pertumbuhan perekonomian Provinsi Gorontalo sebesar 4,13%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kota Gorontalo menempati urutan pertama dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Gorontalo sedangkan skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo menempati urutan 27 dari laju pertumbuhan Provinsi lain di wilayah Indonesia.

2.2 Inflasi Daerah

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Gorontalo dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **Inflasi Ringan** (*Creeping Inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*),



kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyperinflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Laju inflasi tahun kalender Provinsi Gorontalo yang dihitung di wilayah Kota Gorontalo pada Desember 2024 (*y-on-y*) sebesar minus 0,79%, turun dibandingkan kondisi Desember 2023 (*y-on-y*) sebesar 3,88%.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Tingkat Inflasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sebesar minus 0,79% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Inflasi Provinsi Gorontalo

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	5,15	3,88	-0,79	Turun 4,67
2	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	1,57	Turun 1,04

Sumber Dokumen: BPS

Tingkat inflasi di Provinsi Gorontalo Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar minus 0,79%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2023 adalah sebesar 3,88% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2023. Dengan demikian inflasi Provinsi Gorontalo masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional 2024 yang sebesar 1,57%.

Bulan Desember 2024 Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK), dari 107,45 di Bulan Desember 2023 menjadi 106,60 di Bulan Desember 2024, perubahan ini menyebabkan inflasi/kenaikan indeks sebesar minus 0,79%.

Laju inflasi tahun kalender sebesar 2,78% dan laju inflasi “year on year” (Desember 2024 terhadap Desember 2023) sebesar 4,67%. Inflasi inti Bulan Desember 2024 di Kota Gorontalo sebesar minus 1,1%. IHK merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Mulai Januari 2024, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2022=100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2022=100) dibandingkan IHK lama (2018=100), khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh BPS selama tahun 2022, berisi informasi tentang paket komoditas serta nilai konsumsi setiap komoditas dari suatu kabupaten atau kota yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. SBH 2022 merupakan SBH ketiga belas yang dilaksanakan oleh BPS sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1953.

SBH 2022 dilaksanakan di 150 jenis pasar kabupaten/kota, yang terdiri dari 38 ibukota provinsi dan 112 kabupaten/kota besar lainnya mencakup perwakilan wilayah



Urban dan Rural. Dari 112 kabupaten/kota tersebut, 90 kabupaten/kota lama merupakan kelanjutan dari SBH 2018 dan 60 kabupaten baru tersebar di seluruh provinsi diantaranya Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Rembang. SBH 2022 diselenggarakan dalam rangka memperbarui tahun dasar dalam penyusunan inflasi pada level konsumen agar dapat memotret perubahan pola konsumsi masyarakat, perkembangan jenis barang dan jasa yang beredar, serta perubahan dan dinamika jenis pasar. Perubahan-perubahan tersebut akan tercermin dari nilai konsumsi setiap komoditas yang dikonsumsi masyarakat. Nilai konsumsi ini komoditas ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan inflasi di level kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Jumlah paket komoditas nasional hasil SBH 2022 naik menjadi 847 komoditas dari hasil SBH 2018 sebelumnya yakni 835 komoditas. Paket komoditas terbanyak ada di Jakarta yaitu 479 komoditas barang dan jasa, dan kota dengan jumlah paket komoditas paling sedikit sebanyak 177 komoditas di Kabupaten Muara. Paket komoditas di Provinsi Gorontalo sejumlah 343 komoditas, Kota Gorontalo sebanyak 327 paket komoditas barang dan jasa serta Kabupaten Gorontalo sebanyak 237 paket komoditas yang merupakan wilayah cakupan IHK baru.

Pada bulan Desember 2024 harga berbagai komoditas di Kota Gorontalo secara umum menunjukkan adanya penurunan harga. Hal ini ditandai dengan penurunan IHK dari 106,24 pada Desember 2023 menjadi 105,07 pada Desember 2024 atau terjadi inflasi sebesar minus 1,1%. Laju inflasi tahun kalender 2023 sebesar 0,28% dan inflasi “*year on year*” (Desember 2024 terhadap Desember 2023) sebesar minus 1,1%.

Dari 343 jenis barang dan jasa yang mengalami perubahan harga untuk Kota Gorontalo di Bulan Desember 2024, 165 jenis barang dan jasa menunjukkan adanya kenaikan harga, 178 jenis barang dan jasa mengalami penurunan harga.

Inflasi Kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeks di tujuh kelompok pengeluaran dan penurunan pada empat kelompok pengeluaran. Tujuh kelompok pengeluaran tersebut yakni kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,16%; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,46%; kelompok kesehatan sebesar 2,52%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,63%, kelompok Pendidikan sebesar 0,55%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,18%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,39%. Sementara ada empat kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,06%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,95%; kelompok transportasi sebesar 1,41%; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 3,14%. Untuk komoditas utama penyumbang inflasi di Kota Gorontalo selama Desember 2023 sampai dengan Desember 2024 yakni kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,16%.

Pada Desember 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,81 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok transportasi sebesar 0,14 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,13 persen. Kelompok pengeluaran yang memberikan



andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,08 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,10 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,05 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,02 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,27 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,46 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y pada Desember 2024, antara lain: cabai rawit, tomat, ikan tuna, angkutan udara, telepon seluler, kangkung, sabun cair/cuci piring, ikan layang/ikan benggol, ikan cakalang/ikan sisik, susu bubuk untuk balita, daging ayam ras, pisang, ikan ekor kuning, bensin, sabun mandi, popok bayi sekali pakai/ diapers, pepaya, bayam, kacang panjang, batako, pipa, apel, cumi-cumi, jahe, kayu lapis, sabun detergen bubuk, sepatu pria, sikat gigi, cabai merah dan kentang. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, antara lain: emas perhiasan, bawang merah, sigaret kretek mesin (SKM), kue basah, nasi dengan lauk, tarif air minum pam, beras, ikan malalugis/ikan sorihi, bawang putih, sigaret putih mesin (SPM), ikan goreng, minyak goreng, tarif gunting rambut pria dan cat tembok.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Desember 2024, antara lain: ikan layang/ikan benggol, bawang merah, tomat, ikan malalugis/ ikan sorihi, kangkung, ikan cakalang/ikan sisik, cat tembok, udang basah, sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM). Sementara komoditas yang memberikan andil/ sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: cabai rawit, emas perhiasan, sabun detergen bubuk, jeruk nipis, dan terong.

Dalam hal pengendalian inflasi, beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo diantaranya:

- a. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi (*High Level Meeting*) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia, KPw Bank Indonesia, Satgas Pangan, Bulog, dan beberapa instansi terkait;
- b. Pemberian Subsidi Beras senilai Rp2.500 per kilogram sehingga yang tadinya harga di pasaran berkisar Rp17.000-18.000 hingga menjadi Rp14.500-15.500 untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok utama;
- c. Program Bazar Pangan Murah 2024 oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo berlokasi di Lapangan Taruna Remaja dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan;
- d. Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi di Kabupaten/Kota sebanyak 26 kali sejak Januari 2024;
- e. Penyaluran Bahan Pangan Beras oleh Perum Bulog Gorontalo sebanyak 3,8 Juta Ton;
- f. Penjualan Beras SPHP kepada Masyarakat dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp10.900 dengan ketersediaan beras di gudang Bulog Gorontalo sebesar 3.000 Ton;
- g. Penyaluran *Coolbox* dan *Motorcoolbox* Dinas Perikanan sebanyak 92 unit yang dilakukan dalam 2 tahap, dimana pada tahap 1 diberikan kepada 33 orang pelaku usaha sedangkan pada tahap 2 diberikan kepada 59 orang;
- h. Pelaksanaan Gelar Pasar Murah bersubsidi menjelang HBKN Natal dan tahun baru 2025 yang menyediakan 1.300 paket kebutuhan pokok. Setiap paket terdiri dari tujuh



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

komoditas pangan, yaitu beras, minyak goreng, gula pasir, telur, cabai, bawang merah, dan daging ayam, harga setiap paket hanya Rp95.000, sangat terjangkau dan jauh di bawah harga pasar;

- i. Sidak BBM dan LPG 3 kg di SPBU dan Pangkalan LPG 3 kg yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama TNI/POLRI dan Pertamina Gorontalo;
- j. Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Melalui Program Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) sebanyak 23.000 KPM; dan
- k. Penyediaan layanan angkutan perintis kepada daerah – daerah yang belum terlayani angkutan umum ke daerah sentra produksi.

Beberapa upaya lainnya juga dilakukan dalam hal pengendalian inflasi diantaranya:

- a. Mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan bergejolak, melalui pemantauan langsung seiring dengan risiko meningkatnya permintaan sesuai pola musiman;
- b. Mendorong keterjangkauan harga komoditas bahan pokok melalui pelaksanaan operasi pasar, gerakan pangan murah, pasar murah bersubsidi dengan bekerja sama dengan Perum Bulog;
- c. Mempercepat penyaluran bantuan langsung pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada keluarga penerima manfaat; dan
- d. Menjaga ekspektasi masyarakat untuk tidak melakukan konsumsi secara berlebihan melalui komunikasi yang efektif kepada masyarakat oleh TPID dalam bentuk imbauan belanja bijak.

2.3 Ketenagakerjaan, Kesejahteraan dan Kemiskinan

2.3.1 Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja Provinsi Gorontalo pada Agustus 2024 sebanyak 652.588 orang, naik 1.163 orang dibandingkan kondisi Agustus 2023. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun 0,84% poin dibanding Agustus 2023.

Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pengangguran naik 500 orang, sedangkan TPT naik 0,07 poin menjadi 3,13% pada Agustus 2024. Penduduk yang bekerja sebanyak 632.184 orang, naik 663 orang dibandingkan Agustus 2023. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Provinsi Gorontalo adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A) sebesar 30,18 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil-Sepeda Motor (G) sebesar 17,36 persen; serta Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan, dan Kegiatan Sosial lainnya (O,P, dan Q) sebesar 14,52 persen.

Dibandingkan Agustus 2023, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Informasi Komunikasi, Jasa Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan (J,K,L,M,N) sebesar 3,97 ribu orang; Konstruksi (F) sebesar 3,65 ribu orang; serta Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil-Sepeda Motor (G) sebesar 3,59 ribu orang. Sementara tiga lapangan usaha yang mengalami penurunan terbesar adalah



Pengangkutan dan Pergudangan (H) sebesar 5,02 ribu orang, Pertambangan, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, dan Pengadaan Air (B,C,D,E) sebesar 4,51 ribu orang serta Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan, dan Kegiatan Sosial lainnya (O, P, dan Q) sebesar 4,33 ribu orang.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Penganggur terbuka**, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Berdasarkan rilis BPS Provinsi Gorontalo, dibandingkan kondisi setahun yang lalu, jumlah angkatan kerja bertambah 1.163 orang di mana penduduk bekerja bertambah 663 orang sedangkan pengangguran bertambah 500 orang. Namun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2024 mengalami penurunan. TPAK pada Agustus 2024 tercatat sebesar 69,95% atau turun 0,84 poin dibandingkan kondisi Agustus 2023. TPAK perempuan 0,84 poin lebih rendah dibandingkan kondisi tahun lalu, yaitu menjadi 55,23%. Sedangkan TPAK laki-laki, seperti biasa sebagai *bread winner* (pencari nafkah utama), lebih tinggi dari TPAK perempuan, yaitu 84,50% atau turun 0,84 poin dibandingkan kondisi tahun lalu. TPT adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2023 sebesar 3,06%, kemudian naik menjadi 3,13% pada Agustus 2024. TPT di wilayah perkotaan turun (0,24 poin) menjadi 3,89%. Adapun TPT pedesaan juga mengalami kenaikan dengan besaran yang lebih kecil, yaitu 0,29 poin menjadi 2,43%. TPT perempuan mengalami kenaikan 0,44 poin apabila dibandingkan dengan keadaan setahun lalu. TPT perempuan pada Agustus 2024 mencapai 3,90%. Pada situasi seperti sekarang, perempuan diduga lebih memilih beraktivitas mengurus rumah tangga atau berkegiatan lain ketimbang masuk ke pasar kerja. Sedangkan TPT laki-laki mengalami penurunan 0,24 poin pada Agustus 2024 sehingga menjadi 2,63%. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah sebesar 3,13%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	2,58	3,06	3,13	Naik 0,07
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	4,91	Turun 0,41
3	Peringkat Nasional	2	6	10	Turun

Sumber Dokumen: BPS

TPT di Provinsi Gorontalo Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,13%, sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah sebesar 3,06% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2023. Dengan demikian TPT Provinsi Gorontalo masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 4,91% dan sebesar 5,32%.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kondisi ekonomi di Provinsi Gorontalo pada triwulan IV-2024 terhadap triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 0,91%. Struktur ekonomi Gorontalo tahun 2024 dari sisi produksi didominasi oleh Kategori Jasa Perusahaan sebesar 3,13%. Sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan kontribusi sebesar 33,46%.

Pertumbuhan yang terjadi pada triwulan ini disebabkan oleh ekspansi Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP) sebesar 33,46 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,42 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 0,94 persen.

2.3.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan seseorang secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Konsep tersebut mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* dari *The World Bank*. Seseorang dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin provinsi/kabupaten/kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 6 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Provinsi (%)	15,51	15,15	13,87	Turun 1,28
2	Nasional (%)	9,57	9,36	8,57	Turun 0,79
3	Peringkat Nasional	31	31	31	-

Sumber Dokumen: BPS

Persentase penduduk miskin Provinsi Gorontalo pada Tahun 2024 turun hingga menjadi 13.87% dan diharapkan pada tahun 2025 akan turun hingga angka 13%. Persentase penduduk miskin Provinsi Gorontalo masih di atas nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Indikator kemiskinan lainnya diukur berdasarkan Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahannya yang disajikan dalam bentuk Indeks yang



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

menunjukkan cukup berhasilnya kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal penurunan angka kemiskinan. Meningkatnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, menyebabkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan. Pada periode Maret 2023-Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar 2,879 turun 0,039 poin dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 2,918. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan Maret 2024 tercatat sebesar 0,776 naik 0,036 poin dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 0,740. Hal berbeda ditunjukkan pada periode Maret 2024-September 2024, dimana Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sama-sama mengalami penurunan. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan pada periode ini sebesar 0,582 poin menjadi 2,297 pada September 2024. Selanjutnya penurunan pada periode yang sama untuk Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,191 poin menjadi 0,585.

Tabel 7 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Gorontalo

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	2,85	2,92	2,88	Turun 0,04
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,56	1,53	1,36	Turun 0,17
3	Peringkat Nasional	30	30	31	Turun

Sumber Dokumen: BPS

Tabel 8 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Gorontalo

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,69	0,74	0,58	Turun 0,16
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,38	0,32	Turun 0,06
3	Peringkat Nasional	30	30	31	Turun

Sumber Dokumen: BPS

Upaya penurunan kemiskinan ini Provinsi Gorontalo terus dilakukan melalui strategi dan kebijakan yang fokus pada program penanggulangan kemiskinan lintas sektor, yaitu dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui:

- Perjanjian Kerjasama antara Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan Baznas nomor 800/Dinsos/2031/X/2023 tentang Dukungan Program Bantuan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk Kemiskinan Ekstrim;
- Pemberian bantuan sosial melalui program BLP3G (Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo) sejumlah 23.000 sasaran penerima manfaat di tahun 2024;
- Pemberian bantuan modal usaha baik usaha ekonomi produktif (UEP) sebanyak 1.463 KK maupun perempuan kepala keluarga (PEKKA) kepada 813 keluarga penerima manfaat (KPM);



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d Pemberian bantuan jaminan kesehatan (PBI) Pemerintah Provinsi dengan jumlah sasaran Kepesertaan JKN mencapai minimal 98% di tahun 2024;
- e Pembangunan Rumah sebanyak 30 unit rumah diantaranya 6 unit rumah korban bencana dan 24 unit rumah layak huni;
- f Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) 4,08 ton beras (Dinas Pangan);
- g Bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) sebanyak 1000 KK (Dinas Pangan);
- h Bantuan Sarana Pemasaran Program Sistem Logistik Ikan (bantuan motor ber-coolbox 173 unit), Pengadaan coolbox dan perlengkapannya Program Sistem Logistik Ikan (89 unit);
- i Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan listrik sejumlah 516 RTS;
- j Pemanfaatan data P3KE dalam rangka pensasaran percepatan penurunan kemiskinan ekstrim melalui upaya koordinasi serta menyusun program kegiatan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
- k Pembangunan database kemiskinan melalui tata kelola Gorontalo Satu Data dari desa sebagai tindak lanjut dari amanat Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia serta memastikan bahwa penerima bantuan merupakan pihak yang berhak menerima dengan melakukan optimalisasi verifikasi dan validasi data di lapangan;
- l Peningkatan kerjasama melalui kemitraan dengan dunia usaha dan perguruan tinggi; dan
- m Menetapkan OPD menjadi PIC per kecamatan.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo selama periode Maret 2024-September 2024 antara lain:

- a. Selama periode Maret 2024-September 2024, angka inflasi umum Provinsi Gorontalo tercatat cukup rendah sebesar 0,02 persen, meskipun lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional pada periode yang sama tercatat sebesar -0,19 persen (deflasi). Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada periode Maret 2024-September 2024 mengalami penurunan indeks harga sebesar 0,85 persen (deflasi);
- b. Nilai Tukar Petani (NTP) triwulan III-2024 (Juli – September) secara rata-rata sebesar 109,50, mengalami penurunan sebesar 0,79 persen dibanding triwulan I-2024 (Januari – Maret);
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo Agustus 2024 sebesar 3,13 persen, mengalami kenaikan dibandingkan Februari 2024 yang tercatat sebesar 3,05 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka di Pedesaan pada periode yang sama mengalami peningkatan dari 2,38 persen pada Februari 2024 menjadi 2,43 persen pada Agustus 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka di Perkotaan pada periode yang sama mengalami kenaikan dari 3,82 persen pada Februari 2024 menjadi 3,89 persen pada Agustus 2024;
- d. Setengah pengangguran Provinsi Gorontalo Agustus 2024 sebesar 8,49 persen, mengalami penurunan dibandingkan Februari 2024 yang tercatat sebesar 9,60 persen;
- e. Ekonomi Gorontalo triwulan III-2024 terhadap triwulan I-2024 tumbuh sebesar 4,90 persen. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki kontribusi sebesar 37,65 persen pada triwulan III-2024, mengalami pertumbuhan sebesar 8,21 persen terhadap triwulan I-2024; dan



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk desil 1 dan desil 2 pada September 2024 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 8,70 persen dan 7,02 persen dibandingkan Maret 2024. Kenaikan ini lebih tinggi daripada inflasi umum yang tercatat sebesar 0,02 persen.

2.3.4 Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana Pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat.

Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya: kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Gorontalo dititik beratkan pada:

- a. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan serta lain lain PAD yang sah. Arah pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- pendapatan baru (ekstensifikasi).
- b. Kebijakan belanja daerah Provinsi Gorontalo diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added), kebutuhan dana yang terkait pengendalian inflasi di daerah, penurunan stunting, peningkatan investasi dan penurunan kemiskinan ekstrim.
 - c. Pemerintah Provinsi Gorontalo pada Tahun Anggaran 2024 mengambil kebijakan menganggarkan pembiayaan daerah yaitu pada penerimaan pembiayaan telah memperkirakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya untuk mendanai kekurangan kebutuhan belanja baik belanja wajib mengikat maupun belanja yang menjadi kebutuhan SKPD lainnya. Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan yaitu berupa pembayaran pokok utang PEN Tahun 2021.

2.3.5 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional, kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM, potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD serta kemungkinan pada tahun 2024 sudah akan diterapkan ketentuan perhitungan opsen pajak..

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah dengan terus berupaya memperbaiki mekanisme perencanaan pendapatan daerah khususnya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah penting yang dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan menghitung potensinya secara sistematis dan rasional yang minimal mendekati angka riil, disamping itu asumsi penghitungan rencana pendapatan daerah dilakukan pula melalui pendekatan kondisi perkembangan sosial ekonomi Provinsi Gorontalo seperti laju inflasi, pertumbuhan PDRB, *income* perkapita dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam menutup kesenjangan fiskal.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 senantiasa terus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Penganggaran pajak daerah:



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (a) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (b) Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- (c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan pemungutan, menerapkan pelayanan pembayaran pajak melalui Samsat Link, membuka Warkop Samsat diluar jam kerja dan melakukan penghapusan pajak progresif serta menerapkan secara bertahap pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan berbasis teknologi informasi;
- (d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
- (e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang;
- (f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional;
- (g) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya.;
- (h) Pemerintah Provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan;
- (i) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (j) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dan jasa antara daerah, dan kegiatan ekspor/impor serta yang tidak sesuai dengan kebijakan strategis nasional (KSN) tertentu;

- (k) Apabila terdapat hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana diatas, wajib disetorkan ke kas negara;
- (l) Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategi nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (m) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/walikota/bupati dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penganggaran retribusi daerah:

- (a) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2024 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah;
- (b) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (c) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (d) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (e) Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan;
- (f) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
- (g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan;

- (h) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - (i) Perpindahan Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ke Retribusi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:
- (a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal;
 - (b) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - (1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.
- 4) Penganggaran Lain-lain PAD yang sah
- (a) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan, yang terdiri atas:
 - (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (3) Hasil kerja sama daerah;
 - (4) Jasa giro;
 - (5) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (6) Pendapatan bunga;
 - (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - (8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - (9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - (10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (11) Pendapatan denda pajak daerah; pendapatan denda retribusi daerah;
 - (12) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (13) Pendapatan dari pengembalian;
 - (14) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- (c) Mulai tahun anggaran 2024 untuk objek pendapatan BLUD sesuai ketentuan dianggarkan pada jenis retribusi daerah, objek retribusi jasa umum, rincian objek retribusi pelayanan kesehatan, dan sub rincian objek retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

b. Pendapatan Transfer

- 1) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- 2) Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan:
 - (a) Transfer pemerintah pusat terdiri atas objek:
 - (1) Dana perimbangan terdiri atas rincian objek:
 - i Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)
 - ii Dana Transfer Umum, Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)
 - iii Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam
 - iv Dana Transfer Umum, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum ditentukan penggunaannya dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditentukan penggunaannya.
 - v Dana Transfer Khusus
 - (2) Insentif Fiskal (IF)



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

(3) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang undang.

(b) Transfer Antar Daerah

(1) Pendapatan bagi hasil

- i Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.
- iii Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.
- iv Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Pendapatan bantuan keuangan

- i Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- ii Bantuan keuangan yang berasal dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, terdiri atas:
 - 1 Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - 2 Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- iii Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1 Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - 2 Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - 3 Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - 4 Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
- iv Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
- 2) Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:
 - a) Pendapatan Hibah
 - (1) Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.
 - (3) Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi SWDKLLJ masing-masing Provinsi digunakan:
 - (a) Biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan
 - (b) Biaya pengadaan stiker berpengalaman sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri dan sosialisasi.
 - (4) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
 - (6) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.

- (7) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.
- b) Dana Darurat
 - (1) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (1) Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.
 - (2) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Secara umum kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi disamping kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Dengan kondisi tersebut tentu saja diharapkan terus membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah. Namun perlu disadari bahwa dalam mengumpulkan pendapatan tidak harus dianggap terlalu mudah, karena tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat pemungut, termasuk para petugas pemungut maupun



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya.

Permasalahan di lapangan terkadang jauh berbeda dengan rencana yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut diatas berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, seperti koordinasi yang intensif dengan unit satuan kerja terkait, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya di dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti belum sepenuhnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maupun retribusi, sehingga membawa dampak terhadap realisasi pendapatan daerah yang kurang optimal.

Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan simulasi pada komponen pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Semester I Tahun 2024 dibanding semester I Tahun 2023 dan perubahan kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9 Laporan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2023 dibanding Semester I TA 2024

Uraian	Semester I 2023		Realisasi (%)	Semester I 2024		Realisasi (%)
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PENDAPATAN DAERAH	1.832.296.976.495,00	757.290.537.108,00	42,99	1,906,250,633,020.00	732.134.875.559,00	38,41
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	491.989.218.495,00	231.186.375.175,00	46,99	516,643,622,020.00	191,711,770,359.00	37.11
Pajak Daerah	429.888.172.626,00	208.401.161.152,00	48,48	437,626,291,107.00	189,037,593,924.00	43.20
Retribusi Daerah	7.185.681.722,00	367.336.500,00	5,11	49,196,518,472.00	488,475,200.00	0.99
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.456.586.737,00	0,00	0,00	10,219,035,031.00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang sah	49.458.777.410,00	22.417.877.523,00	45,33	19,601,777,410.00	2,185,701,235.00	11.15
Pendapatan Transfer	1.337.018.578.000,00	556.602.722.520,00	41,63	1,388,003,873,000.00	540,423,105,200.00	38.94
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.337.018.578.000,00	556.602.722.520,00	41,63	1,388,003,873,000.00	540,423,105,200.00	38.94
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan	3.289.180.000,00	0,00	0,00	1,603,138,000.00	0,00	0,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Semester I 2023		Realisasi (%)	Semester I 2024		Realisasi (%)
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Daerah yang Sah						
Pendapatan Hibah	1.289.180.000,00	0,00	0,00	1.103.138.000,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	2.000.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00

Tabel 10 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

URAIAN	APBD TA 2024	KUA TA 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Daerah	1,892,294,926,120.00	1,906,250,633,020.00	13,955,706,900.00	0.74
Pendapatan Asli Daerah	503,192,709,120.00	516,643,622,020.00	13,450,912,900.00	2.67
Pajak Daerah	437,626,291,107.00	437,626,291,107.00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	35,895,605,572.00	49,196,518,472.00	13,300,912,900.00	37.05
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10,219,035,031.00	10,219,035,031.00	0,00	0,00
Lain-Lain PAD yang Sah	19,451,777,410.00	19,601,777,410.00	150,000,000.00	0.77
Pendapatan Transfer	1,388,003,873,000.00	1,388,003,873,000.00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,380,320,991,000.00	1,380,320,991,000.00	0,00	0,00
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	18,660,996,000.00	18,660,996,000.00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1,006,766,241,000.00	1,006,766,241,000.00	0,00	0,00
DAK Fisik	354,893,754,000.00	354,893,754,000.00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	7,682,882,000.00	7,682,882,000.00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah	7,682,882,000.00	7,682,882,000.00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1,098,344,000.00	1,603,138,000.00	504,794,000.00	45.96
Pendapatan Hibah	598,344,000.00	1,103,138,000.00	504,794,000.00	84.37
Lain-Lain Pendapatan yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	500,000,000.00	500,000,000.00	0,00	0,00

Sumber Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Berdasarkan tabel diatas, beberapa catatan penting pada Perubahan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Target Pendapatan Daerah tahun 2024 dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp7.663.127.624,- (0,42%);
- b. Target PAD tahun 2024 dibandingkan dengan target PAD tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.559.362.624,- (1,74%) dari Rp491.989.218.495,- menjadi sebesar Rp500.548.581.119,-;
- c. Pada Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Transfer masih menggunakan asumsi perhitungan Tahun Anggaran 2023; dan
- d. Pada komponen Lain-lain pendapatan yang sah tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp896.235.000,- (27,25%) dari Rp3.289.180.000,- menjadi sebesar Rp2.392.945.000,-.

2.3.6 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

- a. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah; dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap;
- b. Penganggaran terpadu; berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan; dan
- c. Penganggaran berbasis kinerja; dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk pelayanan publik, kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dalam struktur APBD, anggaran belanja menempati posisi yang sentral karena rencana kerja yang telah disusun pada bab sebelumnya akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi berimbang karena adanya anggaran pembiayaan.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah. Rencana belanja daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi serta aspirasi masyarakat yang berkembang. Belanja daerah diprioritaskan bagi program/kegiatan pembangunan yang bersifat wajib dan mengikat, pengendalian inflasi, peningkatan investasi dan penurunan angka kemiskinan ekstrim.

Struktur belanja daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30%, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK);
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan menteri diberikan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.



Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas Usulan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran berjalan, dengan ketentuan:

- a) Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
- b) Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang:
 - (1) Merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada Tahun Anggaran berjalan;
 - (2) Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Persetujuan diajukan setelah Pemerintah Daerah melakukan validasi perhitungan pemberian tambahan penghasilan dengan memperhatikan tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- a) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran berjalan melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- b) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah bagi pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- c) Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

- d) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud;
 - (1) Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR);
 - (2) Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajiban dengan memedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Regional; dan
 - (3) Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Regional dan honorarium lainnya yang diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- e) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN; dan
- f) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukkan bagi ASN daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

- a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
 - (1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud;
 - (3) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (4) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak Lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas:
- (1) Penganggaran Jasa Kantor

Meliputi Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya; dan Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi
Meliputi Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain kepala desa



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dan perangkat desa serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah. Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan Iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan BPJS yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan.

Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
- (4) Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (5) Penganggaran ketersediaan layanan (availability payment) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU;
- (6) Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi: Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
- (7) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Belanja Pemeliharaan



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (1) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (2) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan:
- (1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Perjalanan Dinas tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran Oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya Oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi: biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; biaya paket *meeting (halfday/fullday/fullboard/residence)*; uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi: biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; biaya paket *meeting (halfday/fullday/fullboard/residence)*; uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; dan uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

(2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Regional.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:

- (1) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri memedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsom, khususnya



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

meliputi:

- (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya;
 - (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsom;
 - (5) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (6) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- e) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
- (1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, pemberian beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (3) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian, dan/atau Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

perundang-undangan.

Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

4) Belanja Subsidi

Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada:

- (1) Pemerintah Pusat;
- (2) Pemerintah Daerah lainnya;



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (3) Badan Usaha Milik Negara;
- (4) BUMD;
- (5) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- (6) Partai Politik.

Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- (1) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi.
- (2) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

- (1) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
- (2) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
- (3) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini.

Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

- (1) Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD; dan
- (2) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial



dikecualikan dari peraturan ini.

Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 memedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c), juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - a) Belanja modal tanah;
 - b) Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c) Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e) Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f) Belanja aset lainnya;

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi



atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:

- 1) Secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara Lain yang disepakati; atau
- 2) Dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah; dan
- 3) Penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan memedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:

- 1) Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non - alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- 2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing- masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya, dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota. Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:

- a) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- d) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- e) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan



daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Pendapatan pajak daerah pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) **Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a) Bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b) Bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c) Bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d) Bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi Lainnya; dan/atau
- e) Bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum yang terbagi atas Dana Bagi Hasil dan DAU, dan Dana Transfer Khusus, yang terbagi atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Ringkasan perubahan kebijakan belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11 Ringkasan Perubahan Kebijakan Belanja TA 2024

No	Uraian	APBD TA 2024	Perubahan KUA TA 2024	Bertambah / Berkurang	
		Jumlah (Rp)		(Rp)	%
5	BELANJA	1,972,605,147,763.00	2,060,221,144,589.00	87,615,996,826.00	4.44
5.1	BELANJA OPERASI	1,533,845,929,581.00	1,590,255,565,284.00	56,409,635,703.00	3.68
5.101	Belanja Pegawai	772,951,235,115.00	768,907,623,036.00	-4,043,612,079.00	-0.52
5.102	Belanja Barang dan Jasa	617,562,396,179.00	674,051,492,432.00	56,489,096,253.00	9.15
5.103	Belanja Bunga	6,349,012,047.00	6,349,012,047.00	0.00	0.00
5.105	Belanja Hibah	129,715,636,240.00	128,986,124,769.00	-729,511,471.00	-0.56
5.106	Belanja Bantuan Sosial	7,267,650,000.00	11,961,313,000.00	4,693,663,000.00	64.58
5.2	BELANJA MODAL	191,425,047,880.00	256,083,379,867.00	64,658,331,987.00	33.78
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4,741,312,400.00	2,741,312,400.00	-2,000,000,000.00	-42.18
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39,542,050,178.00	73,534,778,174.00	33,992,727,996.00	85.97
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76,248,345,202.00	95,208,228,204.00	18,959,883,002.00	24.87
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	70,609,699,100.00	76,653,264,141.00	6,043,565,041.00	8.56
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	233,641,000.00	7,895,796,948.00	7,662,155,948.00	3,279.46
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	41,673,877,482.00	5,496,906,618.00	-36,176,970,864.00	86.81
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	41,673,877,482.00	5,496,906,618.00	-36,176,970,864.00	86.81
5.4	BELANJA TRANSFER	205,660,292,820.00	208,385,292,820.00	2,725,000,000.00	1.33
5.4.01	Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab/Kota	205,410,292,820.00	205,410,292,820.00	0.00	0.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	250,000,000.00	2,975,000,000.00	2,975,000,000.00	1,090.00

Berdasarkan tabel tersebut maka kebijakan belanja Provinsi Gorontalo pada Perubahan KUA Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Pada Perubahan KUA TA. 2024, belanja operasi mengalami kenaikan sebesar Rp56.409.635.703,00 atau 3,68% yang semula pada APBD TA. 2024 sebesar



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Rp1.533.845.929.581,00 Rp1.590.255.565.284,00.;
- b. Belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp64.658.331.987,00 atau 33,78% yang semula pada APBD TA. 2024 sebesar Rp191.425.047.880,00 menjadi sebesar Rp256.083.379.867,00.;
 - c. Belanja modal pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp62.215.785.498,- (28,43%) menjadi Rp156.587.496.235,- dari tahun anggaran 2023 yang sebesar Rp218.803.281.733,-;
 - d. Belanja tidak terduga pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi Rp5.000.000.000,- dari tahun 2023 yang sebesar Rp37.000.000.000,- atau turun sebesar Rp32.000.000.000,- (86,49%);
 - e. Belanja tidak terduga, mengalami penurunan sebesar Rp36.176.970.864,00 atau 86,81% yang semula pada APBD TA. 2024 sebesar Rp41.673.877.482,00 menjadi sebesar Rp5.496.906.618,00. Kebijakan belanja tidak terduga direncanakan akan diarahkan/terutama untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan didalamnya ada sisa Pinjaman PEN 2021 yang harus disetorkan ke Kas PT. SMI sebesar Rp414.605.000,00; dan
 - f. Untuk belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota, di dalam Perubahan KUA TA. 2024 ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.725.000.000,00 atau 1,33%. Kenaikan ini terjadi pada komponen belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sebesar Rp2.725.000.000,00 sehingga untuk belanja transfer semula sebesar Rp205.660.292.820,00 menjadi Rp208.385.292.820,00 dari pagu yang ditetapkan pada APBD induk TA. 2024 sebesar Rp205.660.292.820,00.

2.3.7 Kebijakan Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat di satu sisi dan semakin terbatasnya jumlah pendapatan di sisi lain. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Silpa)

Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2024



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	2023		2024		%
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	PENDAPATAN	1.877.746.586.137,00	1.872.487.105.528,68	1.924.405.965.518	1.930.340.243.696	100,31
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	505.005.550.137,00	511.931.921.680,68	516.532.987.548	538.193.288.200	104,19
1.1.1	Pajak Daerah	434.888.172.626,00	432.906.096.022,00	437.626.291.107	457.233.185.366	104,48
1.1.2	Retribusi Daerah	6.689.330.011,00	4.232.976.524,00	49.085.884.000	54.310.658.591	110,64
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.969.310.090,00	11.012.325.878,00	10.219.035.031	11.580.368.337	113,32
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	52.458.777.410,00	63.780.523.256,68	19.601.777.410	15.069.075.906	76,88
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.369.451.816.000,00	1.350.262.842.740,00	1.406.269.839.970	1.385.451.449.664	98,52
1.2.1	DANA PERIMBANGA N	1.339.005.471.000,00	1.319.817.497.740,00	1.398.586.957.970	1.377.768.567.664	98,51
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / bagi hasil bukan pajak	20.860.281.000,00	23.449.484.007,00	20.476.158.970	24.972.779.787	121,96
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	973.834.635.000,00	979.869.891.000,00	1.022.379.872.000	1.022.379.872.000	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	165.500.063.000,00	140.281.348.223,00	167.802.393.000	144.159.157.866	85,91
1.2.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik	178.811.192.000,00	176.216.774.510,00	187.928.534.000	186.256.758.011	99,11
1.2.2	Dana Insentif Fiskal	30.445.345.000,00	30.445.345.000,00	7.682.882.000	7.682.882.000	100,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	3.289.180.000,00	10.292.341.108,00	1.603.138.000	6.695.505.832	417,65
1.3.1	Hibah	1.289.180.000,00	9.707.761.108,00	1.103.138.000	6.231.945.832	564,93
1.3.2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan	2.000.000.000,00	584.580.000,00	500.000.000	463.560.000	92,71
2	BELANJA DAN TRANSFER	2.070.355.912.675,00	1.900.595.987.883,66	2.078.376.477.087,00	1.983.441.271.724,61	95,43
2.1	BELANJA OPERASI	1.586.174.873.862,00	1.475.863.473.693,15	1.605.785.176.582,00	1.556.182.022.343,16	96,91
2.1.1	Belanja Pegawai	721.606.151.725,00	657.826.026.577,00	782.146.327.136,00	764.595.004.643,00	97,76
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	739.593.206.117,00	700.268.455.177,15	673.525.499.630,00	641.715.150.644,16	95,28
2.1.3	Bunga	7.188.622.874,00	7.093.341.745,00	6.349.012.047,00	6.439.282.345,00	101,42
2.1.4	Hibah	87.457.942.146,00	85.797.138.870,00	132.481.124.769,00	132.240.736.851,00	99,82
2.1.5	Bantuan Sosial	30.328.951.000,00	24.878.511.324,00	11.283.213.000,00	11.191.847.860,00	99,19
2.2	BELANJA MODAL	264.265.063.028,00	230.302.490.856,51	257.490.295.402,00	220.354.238.401,45	85,58
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	2023		2024		%
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Kenaikan
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	59.110.573.918,00	57.681.672.265,00	75.466.898.227,00	73.194.098.495,00	96,99
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	51.911.267.331,00	42.838.898.903,91	95.486.591.071,00	68.302.416.338,45	71,53
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	146.068.030.198,00	121.110.943.553,60	78.641.009.156,00	70.394.263.930,00	89,51
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.125.191.581,00	8.670.976.134,00	7.895.796.948,00	8.463.459.638,00	107,19
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	11.022.107.000,00	991.984.875,00	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53
2.3.1	Belanja Tak Terduga	11.022.107.000,00	991.984.875,00	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53
2.4	Belanja Transfer	208.893.868.785,00	193.438.038.459,00	209.604.098.485,00	202.203.513.267,00	96,47
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	206.948.868.785,00	191.718.038.459,00	206.629.098.485,00	199.603.513.267,00	96,60
	Belanja Bantuan Keuangan	1.945.000.000,00	1.720.000.000,00	2.975.000.000,00	2.600.000.000,00	87,39
	SURPLUS / DEFISIT	-192.609.326.538,00	(28.108.882.354,98)	(153.970.511.569,00)	(53.315.722.493,22)	34,63
3	PEMBIAYAAN	192.607.326.538,00	199.014.777.167,67	153.970.511.569,00	152.688.158.900,69	99,17
3.1	Penerimaan Pembiayaan	228.765.815.327,00	228.765.815.327,67	170.905.894.813,00	170.905.894.812,69	100,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	228.765.815.027,00	228.765.815.327,67	170.905.894.813,00	170.905.894.812,69	100,00
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	36.156.488.789,00	29.751.038.160,00	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	10.969.310.090,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	25.187.178.699,00	19.751.038.160,00	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57
	Pembiayaan Netto	192.609.326.538,00	199.014.777.167,00	153.970.511.569,00	152.688.158.900,69	99,17
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	170.905.894.812,69	0,00	99.372.436.407,47	0,00

2) Pencairan Dana Cadangan

Digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) Pemerintah Daerah Lain;
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) Masyarakat (obligasi daerah).

5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penerimaan Pembiayaan Lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun anggaran 2024 kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu menganggarkan SiLPA pada komponen penerimaan pembiayaan daerah yaitu sebesar Rp52.087.638.066,-.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

Didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Gorontalo mempunyai kewajiban sebesar Rp16.935.383.244,- untuk pembayaran cicilan pokok utang atas pinjaman PEN tahun 2021.

1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk tahun 2024 belum mengalokasikan penyertaan modal pada PT. Bank SulutGo mengingat tahun 2024 adalah tahun pelaksanaan PILKADA Serentak yang membutuhkan pendanaan yang cukup besar.

2) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan Lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah Lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. Kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo.

Secara umum capaian target dan realisasi APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No.	Uraian	Perubahan APBD	Jumlah Realisasi
1	Pendapatan	1.924.405.965.518,00	1.930.340.243.696,00
2	Belanja	1.605.785.176.582,00	1.556.182.022.343,16
3	Transfer	209.604.098.485,00	202.203.513.267,00
4	Surplus/(Defisit)	(153.970.511.569,00)	(53.101.028.028,00)
5	Penerimaan Pembiayaan	170.905.894.813,00	170.905.894.812,69
6	Pengeluaran Pembiayaan	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00
7	SiLPA	0,00	99.587.130.872,00

3.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Gorontalo tahun 2024 penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Amanah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Dokumen RPD disusun sebagai panduan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo sampai dengan ditetapkannya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dalam penyusunannya, RPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 yang selanjutnya diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD ini menjadi arahan bagi OPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2024 dalam mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai kontribusi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam penerapan kebijakan pembangunan, perencanaan pembangunan menengah Provinsi Gorontalo disusun dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 – 2026 yang telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023 – 2026 dengan visi sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 yaitu:

“Gorontalo Maju dan Mandiri”.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Visi tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu:

Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai provinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas.

Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumber daya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan Tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Gorontalo 2007-2025 tersebut, maka ditempuh 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang handal, adalah mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan termasuk pelayanan jasa;
- b. Mewujudkan Sumber daya Manusia Gorontalo yang Handal, adalah pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang meliputi peningkatan, perluasan, dan pemerataan akses Pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spiritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, sosial budaya, adat olahraga, politik, dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas; dan
- c. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah, adalah pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas pelayanan public, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah, pengembangan kapasitas manajemen pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, right sizing OTK dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan public, serta peningkatan penyebarluasan informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik.

RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menetapkan Visi; “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan menjabarkannya pencapaianannya ke dalam Misi berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

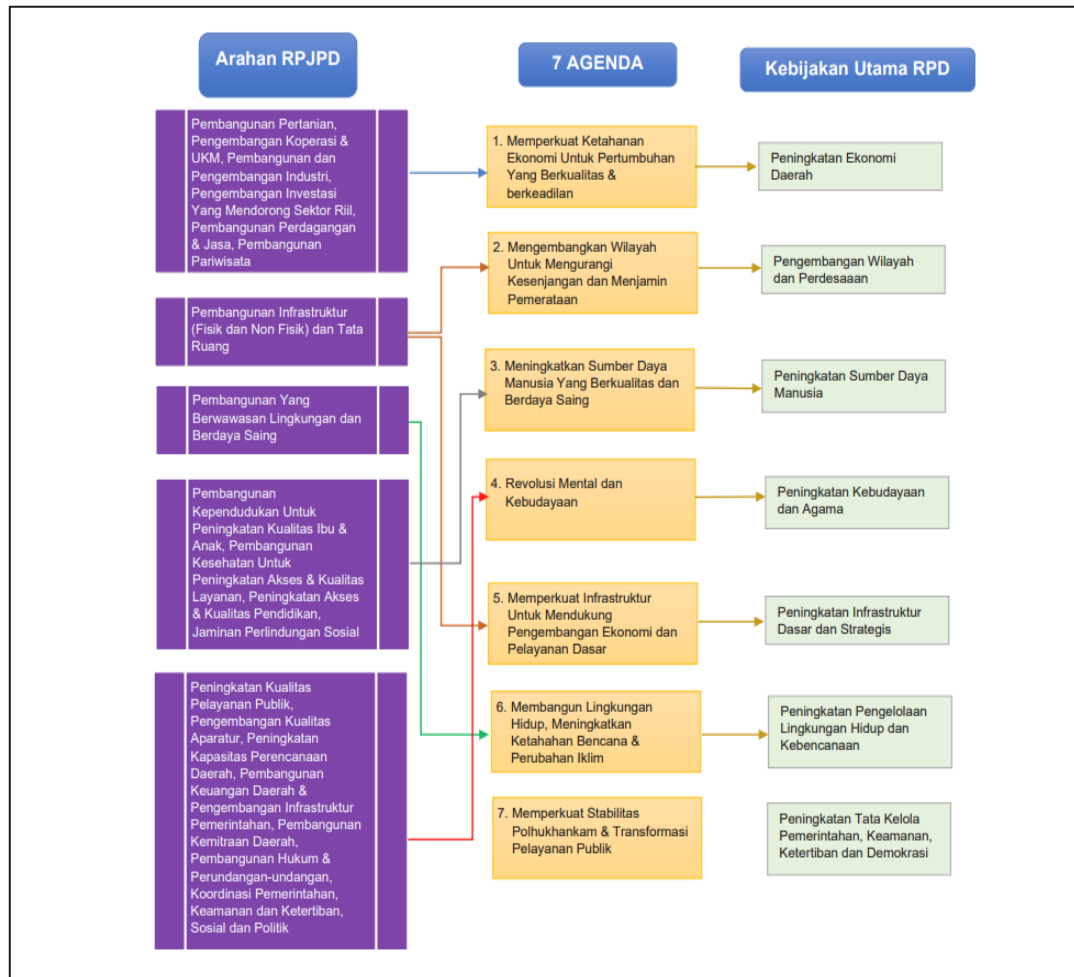
Untuk lebih mendetailkan arahan misi pembangunan tersebut, maka dikelompokkan penjabarannya melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, yaitu:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Keselarsan RPJPD, RPJMN dan RPD dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)



Gambar 1. Sinergi Arahan RPJPD, Agenda Pembangunan Nasional dan Kebijakan Utama RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026

3.2.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

a. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi

Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis adalah peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk. Di sisi lain, produksi pangan dipengaruhi oleh faktor perubahan iklim, perubahan cuaca yang tak menentu datangnya musim hujan dan kemarau yang susah diprediksi sehingga mengganggu musim tanam dan hasil produksi. Selain itu, serangan hama seperti wereng juga menyerang di berbagai tempat yang sangat merugikan banyak petani. Ketersediaan sarana prasarana produksi termasuk pengairan/irigasi, pengelolaan pasca panen yang belum maksimal, serta akses terhadap lahan yang terbatas.

Dari sisi produsen, produktivitas yang rendah dan fluktuasi harga menyebabkan daya beli petani (Nilai Tukar Petani) relatif rendah khususnya untuk subsektor perikanan baik perikanan tangkap dan budidaya. NTP dan NTUP belum mencerminkan kondisi ideal/tingkat kesejahteraan petani. Pada Tahun 2022, nilai NTP Provinsi Gorontalo berada pada angka 103,63 dan NTUP berada pada angka 105,95. Ukuran keberhasilan pembangunan



bidang ketahanan pangan dapat diukur dari sisi pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH). Data menunjukkan bahwa Skor PPH Konsumsi untuk tahun 2022 berada pada angka 74,3 mengalami penurunan sebesar 1,2 persen dari tahun 2021 yang berada pada angka 75,5.

Pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan juga menghadapi beberapa tantangan, diantaranya: (1) tingginya rumah tangga miskin di sektor perikanan dan kelautan, (2) produksi perikanan dan daya saing produk kelautan dan perikanan belum maksimal, (3) Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih dalam kategori rendah, (4) akses pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan belum maksimal karena keterbatasan SDM.

b. Transformasi struktural berjalan lambat

Transformasi struktural yang berjalan lambat juga ditunjukkan oleh permasalahan (1) nilai tambah produksi rendah karena keterbatasan skill, (2) ketersediaan bahan baku lebih kepada komoditi pertanian yang notabene lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan nasional, (3) tingginya biaya dalam rantai distribusi perdagangan baik antar pulau maupun ekspor impor. (4) Belum adanya perencanaan dan penetapan Kawasan pengembangan ekonomi/ master plan pengembangan ekonomi daerah, serta (5) daya dukung lingkungan. Struktur ekonomi Provinsi Gorontalo dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 2.735,48 Miliar Rupiah atau 37,99 persen.

c. Pembangunan Wilayah Untuk Pengurangan Kesenjangan

Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk menyelesaikan isu terkait ketimpangan antar wilayah. Tantangan pembangunan kewilayahan yaitu bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan antar wilayah kabupaten/kota melalui pengembangan potensi sumber daya masing-masing, meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Isu Strategis dan Permasalahan pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antar wilayah yang ditandai dengan:

- 1) Ketimpangan antar Wilayah
 - a) Masih tingginya angka kemiskinan pedesaan, Sept 2022 sebesar 24,52 %, sementara perkotaan sebesar 4,49%.
 - b) Masih adanya kesenjangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini pedesaan sebesar 0,395 dan perkotaan sebesar 0,406;
 - c) Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan pedesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.
- 2) Pengembangan dan Penguatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah/Kawasan
 - a) Pengembangan Kawasan strategis Provinsi belum optimal.
 - b) Konektivitas dari dan menuju pusat-pusat pertumbuhan yang rendah.
 - c) Pengembangan kawasan belum terpusat.
 - d) Belum masuk pada kawasan strategis Nasional untuk pengembangan wilayah Ekonomi Pariwisata maupun Industri.



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Daya Saing Daerah salah satunya terkait belum optimalnya kualitas dan akses pelayanan dasar yang ditandai dengan cakupan akses sanitasi layak sebesar 79,82 persen dan cakupan akses air minum layak sebesar 96,16 persen pada tahun 2022.
- 4) Pemanfaatan Ruang
 - a) Belum ditetapkannya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga akan berimplikasi pada kurang optimalnya pemanfaatan ruang
 - b) Belum adanya Roadmap pengembangan Kawasan
 - c) Belum adanya Roadmap pengembangan Kawasan

d. Sumber Daya Manusia

Tren IPM Provinsi Gorontalo selama 2 dekade ini mengalami peningkatan walaupun cenderung kecil. Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,81 persen menjadi 69,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, angka ini masih lebih rendah dari capaian rata-rata secara nasional yaitu 72,91 persen. APM rendah disebabkan Angka putus sekolah tinggi, pernikahan dini, angka pekerja pada usia sekolah, rendahnya kemampuan siswa dalam menyerap pembelajaran. Kualitas lulusan pendidikan vokasi belum optimal. Prevalensi stunting Provinsi Gorontalo sebesar 23,8% sesuai data SSGI dan masuk kategori tinggi.

e. Perlindungan Sosial

Secara umum perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan (Bappenas, 2014). Perlindungan sosial juga menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan pemenuhan target dalam *Sustainable Development Goals*/Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB). Hal ini menjadi isu strategis dalam SDGs/TPB sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan secara nasional dalam perlindungan sosial. Rincian terhadap isu ini dapat ditemukan pada tujuan 1.3 yaitu menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi Semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Berbagai kendala ditemukan pada pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial di antaranya adalah seringkali ditemukan di lapangan sasaran penerima manfaat belum tepat. Hal ini terkadang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Walaupun pemerintah telah menyediakan sistem terkait data sasaran, namun ketidakakuratan data dan kelengkapan berkas dapat menjadikan data yang ada menjadi kurang valid. Selain itu kendala pelayanan di lapangan juga sering dikeluhkan oleh masyarakat selain jenis bantuan yang belum sesuai harapan.

Perbedaan pemahaman terkait standar operasional prosedur mekanisme penyaluran dan pengadaan jenis bantuan dapat menyebabkan pelayanan menjadi tidak maksimal. Sesuai data pada Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 2021 Provinsi Gorontalo, alokasi anggaran untuk program bantuan sosial dan jaminan sosial pada tahun 2020 sebanyak Rp93.417.356.659 atau sebesar 5,06%. Permasalahan



keterbatasan finansial daerah menjadikan alokasi ini belum significant. Selain itu juga, peluang kerjasama dengan pihak yang memiliki pendanaan yang dapat mendukung program perlindungan sosial seperti badan usaha Negara dan swasta belum dirintis. Perlindungan sosial juga belum memihak sepenuhnya kepada kelompok khusus antara lain lansia dan penyandang disabilitas yang rentan miskin.

f. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda

Persentase jumlah penduduk usia 0-17 di Provinsi Gorontalo sebesar 32,9% (Susenas BPS 2019). Indeks perlindungan anak pada tahun 2021 baru mencapai angka 64,49. Data Susenas Maret 2020, menyebutkan persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun mencapai 14,37 persen. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 13,16 persen, bahkan angka ini mencapai di atas angka nasional. Upaya pemenuhan hak anak, perempuan dan pemuda masih perlu ditingkatkan. Selain itu peningkatan kualitas juga harus menjadi perhatian, karena sesuai data Sensus Penduduk 2020, penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Provinsi Gorontalo sebesar 71,26. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

g. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah persoalan multidimensi. Tidak hanya disebabkan oleh satu faktor akan tetapi berbagai unsur kemiskinan menjadi masalah kompleks. Secara nasional, angka kemiskinan provinsi Gorontalo termasuk di 5 provinsi besar persentasenya. Meskipun demikian, angka kemiskinan di Gorontalo terus mengalami penurunan walaupun agak melambat. Sehingga, pengentasan kemiskinan masih tetap menjadi pekerjaan besar yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh positif pada beberapa tahun ini bahkan diatas rata-rata nasional kecuali pada saat Pandemi Covid 19. Namun belum memberikan pengaruh yang signifikan atas angka kemiskinan.

Pengentasan Kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan di Provinsi Gorontalo. Bahkan pada agenda 2030 TPB/SDGs, kemiskinan menjadi tujuan pertama. Secara tren, persentase angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo menunjukkan penurunan, meskipun masih belum terlalu signifikan. Dapat dilihat pada data BPS, dalam kurun waktu 4 tahun sejak 2019 persentase kemiskinan mengalami fluktuasi pada kisaran angka 15 persen, pada bulan september 2022 berada pada angka 15,51 persen, masih berada di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 10,14 persen. Kemiskinan menjadi permasalahan yang perlu dituntaskan bersama-sama karena dipengaruhi oleh banyak faktor dan multi dimensi. Sehingga diperlukan sinergi program dan anggaran semua pihak untuk memastikan masyarakat miskin mampu menikmati kehidupan yang berkualitas. Namun, keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) masih belum optimal dalam mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di OPD terkait dan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Pada isu terkait kemiskinan pula, pemerintah pusat telah menetapkan target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0 (nol) persen pada tahun 2024, hal ini tentunya menjadi perhatian sampai ke level pemerintah daerah termasuk provinsi Gorontalo yang secara nasional masih termasuk 5 (lima) besar kemiskinan nasional. Kemiskinan ekstrem di Provinsi Gorontalo berada pada angka 4,28 persen pada tahun 2022, di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 2,00 persen.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Angka ini merupakan bagian dari persentase kemiskinan di Provinsi Gorontalo, jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk miskin yang jika dihitung adalah sebanyak 51 ribu jiwa dari total penduduk miskin di Provinsi Gorontalo yang berjumlah 187,35 ribu jiwa. Kondisi ini menjadi penting sebagai bahan perumusan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, efisien dan sinergis terhadap penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 melalui program yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

h. Belum optimalnya Pelestarian Warisan Budaya

Gorontalo merupakan salah satu Provinsi yang kental dengan budaya. Kebudayaan Gorontalo dapat ditemui dalam berbagai aktivitas masyarakat Gorontalo, khususnya dalam kegiatan kemasyarakatan seperti pernikahan, khitanan, penerimaan tamu daerah, dan aktivitas lainnya. Kebudayaan juga merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah. Untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan dan memiliki tata kelola yang efektif dan efisien. Kebudayaan sebagai salah satu urusan pemerintahan daerah yang masuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar perlu mendapatkan perhatian besar khususnya dalam rangka melestarikan dan memajukan kebudayaan.

RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, kebudayaan menjadi salah satu arah kebijakan yang diamanahkan berupa Pembangunan keagamaan utk peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan & pengamalan nilai & ajaran agama, Budaya dan adat istiadat. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Gorontalo berada pada urutan ke- 24 dari 34 provinsi di level nasional. IPK Provinsi Gorontalo berada pada angka 49,86, sementara untuk nasional berada pada angka 53,74.

Pada dimensi warisan budaya, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat bahwa terdapat 345 catatan karya budaya tak benda (WBTB) yang tercatat dalam data budaya Kemendikbud RI, dari jumlah tersebut 31 WBTB telah ditetapkan, artinya sebesar 8,9 persen dari total WBTB terdaftar telah ditetapkan.

Sementara itu untuk warisan budaya benda (WBB), data Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo Kemendikbud menunjukkan bahwa terdapat 84 cagar budaya yang telah terdaftar di Provinsi Gorontalo yang tersebar di 4 Kabupaten dan 1 Kota. Dari jumlah tersebut, 6 cagar budaya telah ditetapkan dengan Peraturan dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI atau sebesar tujuh,1 persen yang telah ditetapkan. Perhatian pada WBTB dan WTB ini relevan dengan prioritas provinsi Gorontalo yang saat ini mendorong penetapan Gorontalo menjadi salah satu Provinsi yang memiliki Geopark Nasional. Hal ini dikarenakan warisan budaya menjadi salah satu bagian dari komponen geopark yaitu *cultural diversity*.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survei nasional yang mengukur tingkat kerukunan umat masyarakat dalam beragama di Indonesia. Tiga dimensi Indeks KUB mencakup toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) pada tahun 2021 Gorontalo termasuk dalam kluster pulau sulawesi dengan capaian 68,74 hasil ini menurun dibandingkan pencapaian pada Tahun 2019 sebesar 73,83. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Agama beberapa indikator berpengaruh



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pelaksanaannya di pulau sulawesi.

i. Rendahnya Budaya Literasi

Dalam era teknologi seperti sekarang ini, konteks tradisi intelektual suatu masyarakat bisa dikatakan berbudaya literasi ketika masyarakat tersebut sudah memanfaatkan informasi yang mereka dapat untuk melakukan komunikasi sosial dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa literasi merupakan suatu tahap perilaku sosial yaitu kemampuan individu untuk membaca, menginterpretasikan, dan menganalisa informasi dan pengetahuan yang mereka dapat untuk melahirkan kesejahteraan hidup (peradaban unggul).

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019, Nilai Budaya Literasi Provinsi Gorontalo berada pada angka 51,68. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yang berada pada angka 55,03.

Selanjutnya, data hasil kajian Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia Tahun 2022, provinsi Gorontalo berada pada angka 58,72. Hal yang tidak kalah pentingnya terkait literasi yang relevan juga dengan budaya daerah adalah pelestarian bahasa daerah Gorontalo sebagai bahasa masyarakat Gorontalo yang sering berjalannya waktu semakin terkikis dan berkurang penggunaannya di tengah masyarakat Gorontalo khususnya generasi muda.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2021 Provinsi Gorontalo adalah sebesar 22.53. Total perpustakaan di provinsi ini adalah sebanyak 2276, dengan yang terbanyak adalah Perpustakaan Sekolah/Madrasah berjumlah 1314 perpustakaan. Sementara itu, ada 16,7% perpustakaan yang dipersepsi ber-SNP dengan persentase yang tertinggi dari Perpustakaan Perguruan Tinggi. Total jumlah koleksi buku yang terdapat pada perpustakaan-perpustakaan di Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 152068. Koleksi buku Ilmu Pengetahuan Sosial adalah yang terbanyak, yaitu sejumlah 23334 buku, sedangkan koleksi yang paling banyak dipinjam di tahun 2020 adalah koleksi buku Geografi dan Sejarah sejumlah 24074 buku.

Seluruh perpustakaan umum daerah di wilayah Provinsi Gorontalo memiliki koleksi berjenis Buku, Bahan Grafika, Rekaman Suara (Kaset, CD, Audio) dan Koran. Jenis lain yang juga banyak dimiliki oleh perpustakaan-perpustakaan umum daerah di provinsi ini adalah Majalah (85,7%), Gambar Hidup & Audio Visual (71,4%) dan E-Book dan Lainnya (71,4%).

Tenaga perpustakaan di Provinsi Gorontalo berjumlah 595 orang, di mana sebagian besar merupakan Pustakawan SK Fungsional. Jumlah pustakawan yang memiliki SK Fungsional adalah sebanyak 439 orang, sedangkan pustakawan dengan kualifikasi ilmu perpustakaan sebanyak 40 orang. Di perpustakaan umum daerah, 59,7% tenaga perpustakaan tersebut memiliki latar belakang jenjang pendidikan S1.

Jumlah anggota perpustakaan yang terdaftar di Provinsi Gorontalo sebanyak 169.657 orang, dengan rata-rata kunjungan 511 orang/hari. Kebanyakan anggota perpustakaan berusia < 18 tahun sebanyak 54,5%, dengan pekerjaan sebagai Pelajar/Mahasiswa (75,6%). Berdasarkan capaian diatas secara umum Provinsi Gorontalo secara keseluruhan menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan data IPLM 2019 (9,83) dan IPLM 2020 (10,91) meskipun demikian beberapa aspek yang perlu ditingkatkan ke depan diantaranya: Pengembangan standar Perpustakaan daerah dan umum menuju SNP,



peningkatan koleksi buku, peningkatan kemudahan akses terhadap bahan bacaan, peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga perpustakaan, penguatan digitalisasi perpustakaan, dan kolaborasi antara pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung terlaksananya ekosistem literasi yang lebih merata dan berkelanjutan.

j. Belum Mantapnya Infrastruktur Ekonomi dan Strategis Provinsi

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas – ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Berdasarkan data capaian Kondisi mantap jalan Provinsi pada tahun 2022 kondisi mantap jalan provinsi berada pada angka 60,05%. Sedangkan untuk Proporsi Panjang Jaringan Jalan Provinsi dalam kondisi baik (Km) pada tahun 2022 berada pada angka 233,75 km (50,05%).

Berbagai penyebab dari kondisi di atas antara lain kualitas jalan ruas kewenangan Provinsi yang tidak maksimal dimana untuk beberapa ruas hanya dalam hitungan bulan, jalan yang baru dibangun dan yang sudah direhab terdapat kerusakan disebabkan faktor teknis seperti kondisi geologis tempat ruas jalan tersebut berada dan kurang optimalnya pengawasan dan pembatasan kendaraan yang over supply melintas di ruas jalan tersebut. Dengan adanya ruas jalan yang mengalami kerusakan maka akan menambah cost distribusi (kendaraan yang melintas cepat rusak dan butuh perbaikan) dan penambahan lama waktu barang sampai ke konsumen. Tantangan selanjutnya adalah pada masa pandemi menyebabkan terjadinya refocusing dan realokasi anggaran, kegiatan – kegiatan fisik yang membutuhkan pendanaan besar sering kali dijadikan kegiatan yang dimasukkan untuk ditunda pekerjaan atau tidak dibiayai dulu pada tahun berjalan untuk mendapatkan kuota pagu yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipotong pembiayaannya dan dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Di sisi pertanian, produksi Padi pada tahun 2022 di Provinsi Gorontalo sebesar 249.709 ton. Angka tersebut seharusnya bisa lebih tinggi, mengingat pada beberapa wilayah waktu tanam hanya satu kali dalam setahun. Jika bisa dioptimalkan, maka potensi 1,5 kali dari produksi sekarang bisa tercapai dengan pemanfaatan teknologi pertanian, pemakaian bibit yang tepat, pemanfaatan pupuk yang tepat guna dan dukungan irigasi pertanian sebagai core major usaha padi sawah.

k. Depleksi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo masih cenderung rendah, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pencemaran air sungai; penurunan kualitas udara; kerusakan danau limboto berupa penyusutan dan penurunan kualitas air danau; kerusakan mangrove dan terumbu karang; dan jumlah sampah yang cenderung meningkat dari aktivitas masyarakat.

Dari Total 245.000 Ha Lahan di DAS Limboto- Bolango Bone, 140.487 Ha termasuk dalam kategori agak kritis, kritis dan sangat kritis. Hal ini diindikasikan menjadi penyebab meningkatnya sedimentasi baik di sungai maupun di Danau Limboto. Dalam waktu 6 tahun (2013-2018) terjadi alih fungsi lahan hutan sebesar 2.100 Ha di Wilayah DAS Limboto dan Bone, menjadi Kawasan pemukiman, pertanian, semak belukar, dll. Perubahan lahan ini berkontribusi terhadap peningkatan koef pengaliran dan Indeks Erosi



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanah. Sempadan sungai belum efektif sebab pembangunan wilayah pemukiman masih dilaksanakan di wilayah sempadan sungai dan tanpa menerapkan konsep waterfront city. Hal ini menyebabkan tingginya kerawanan banjir di Kota Gorontalo, dimana 57% masyarakat tinggal di Kawasan rawan banjir di Pusat Kota Gorontalo (Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Banjir Provinsi Gorontalo, Bappenas RI Desember 2021) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Gorontalo Tahun 2022 berada pada poin 79,79. Adapun indikator yang menjadi dasar perhitungan dari IKLH, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Adapun beberapa Respons yang harus dilakukan terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo antara lain: Penyusunan Dokumen perencanaan berbasis KLHS, Membangun koordinasi dengan instansi terkait Pembangunan sarana sanitasi (Jamban, SPAL) secara bertahap, Memperketat proses perizinan berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), Penguatan kapasitas masyarakat terkait lingkungan hidup, Rehabilitasi hutan dan lahan dengan Target Provinsi 1000 ha/tahun dan BP - DAS tahun 2020 2.500 ha, Pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial: pengembangan gula semut, jamur tiram, pembuatan *hand sanitizer*, Pengelolaan DAS dan rehabilitasi, dan Pengembangan pertanian berbasis konservasi.

Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup sampah juga masih menjadi permasalahan dalam Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo, hal ini dibuktikan dengan Timbulan sampah 623,55 ton/hr atau 227.577,28 ton/thn dan 65% Limbah B3 belum terkelola dengan maksimal (Sumber: DLHK Provinsi Gorontalo). Adapun target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Kebijakan Strategi Daerah) sampai dengan tahun 2024 diharapkan mencapai 28 % (70.095,050 Ton/Tahun).

Sementara kerusakan hutan juga menjadi perhatian yang serius dalam penanganannya hingga tahun 2020 luas lahan kritis dalam kawasan sebesar 140.446 Ha sementara di luar kawasan sebesar 191.852 Ha sehingga total lahan kritis 332.298 Ha. Kerusakan terbesar berada di wilayah Kabupaten Gorontalo dengan luas 100.463 Ha.

I. Tingginya Risiko Bencana

Provinsi Gorontalo tercatat memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi, dengan sebagian besar di antaranya merupakan bencana hidrometeorologis yang terkait dengan iklim dan dinamika perubahannya. Bencana-bencana tersebut antara lain puting beliung, banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan serta cuaca ekstrim.

Melalui penerapan kerangka kebijakan untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) dan meningkatkan ketahanan (resilience) yang menjadi titik simpul konvergensi adaptasi perubahan iklim (API) dan pengurangan risiko bencana (PRB). Luas wilayah provinsi Gorontalo adalah 12.435,00 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.202.631 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 170 jiwa/km² (BPS, 2020). Bentuk bentang alam dan permukaan tanah di wilayah ini sebagian besar adalah perbukitan, oleh karenanya Gorontalo memiliki banyak gunung dengan ketinggian yang beragam. Selain itu kondisi tektonik wilayah ini juga dilintasi oleh Sesar Gorontalo yang melewati Kota Gorontalo.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kondisi geologi demikian menjadikan Provinsi Gorontalo sangat rawan terhadap bencana gempa bumi dan tanah longsor. Pada tahun 2022 Indeks Risiko Bencana Provinsi Gorontalo berada pada angka 120,61.

Berdasarkan dari data yang dihimpun dari DIBI BNPB selama periode 5 tahun terakhir provinsi Gorontalo telah mengalami sebanyak 71 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021 Provinsi Gorontalo memiliki indeks risiko sedang dengan nilai indeks 120,61(sedang).

m. Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pembangunan Rendah Karbon

Emisi RAD-GRK Provinsi Gorontalo berasal dari 3 (tiga) bidang yaitu:

- 1) Berbasis Lahan;
- 2) Berbasis Energi; dan
- 3) Pengelolaan Limbah.

Hasil proyeksi Business as Usual (BAU) Provinsi Gorontalo tahun 2020 tanpa intervensi aksi mitigasi, bidang berbasis lahan masih menempati porsi penyumbang emisi GRK terbesar sebanyak 95,8%. Sedangkan bidang berbasis energi dan limbah secara berturut-turut menyumbang 3,8% dan 0,9% dari total BAU 2020 di Provinsi Gorontalo.

n. Belum optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Belum meratanya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Capaian RB Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 mencapai 69,61 sehingga perlu didorong terus pelaksanaannya hingga maksimal. Sementara itu, kesalahan dan kelalaian dalam proses administrasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa juga masih terjadi, hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa PNSD yang bermasalah hukum dan berproses hingga ke pengadilan.

Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis. Pertama, terkait dengan profesionalitas PNSD, penerapan sistem merit belum optimal dilaksanakan serta rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan PNSD.

Kedua, dari aspek tata laksana, perlu didorong penerapan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur TIK, maupun layanan.

Ketiga, dari sisi akuntabilitas, Pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh predikat “B” atau baik untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja mulai terbangun dengan baik, khususnya dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah, namun kedepan perlu terus dioptimalkan keterpaduan sistem dan melanjutkan money follow program sehingga perencanaan dan penganggaran lebih berorientasi pada hasil yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Mengingat kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain kenaikan belanja pegawai, belanja bunga pinjaman daerah, belanja untuk Pilkada Tahun 2024 dan Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, perlu sistem manajemen kinerja kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan andal serta implementasi sistem integritas.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keempat, dari sisi peningkatan pendapatan daerah perlu dijadikan perhatian utama pada tahun 2024, hal ini dikarenakan berdasarkan data Badan Keuangan Provinsi Gorontalo APBD Provinsi Gorontalo masih sangat tergantung dengan pendapatan transfer, sementara itu pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dari pendapatan transfer tahun 2018-2022 rata-rata minus 1,30%, bahkan pada tahun 2022 mengalami penurunan minus 8,53% dibanding tahun 2021. Kondisi ini menuntut Pemerintah Provinsi untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah untuk dapat dimanfaatkan lebih besar menopang pendanaan program pembangunan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan daerah.

o. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan penguatan konsolidasi demokrasi

Rendahnya Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat, Kejahatan terhadap nyawa, fisik, kesusilaan, dan masih relatif tinggi. Secara khusus kejahatan terhadap perempuan dan anak juga menjadi perhatian setiap negara, dan juga menjadi komitmen global dalam pencapaian sasaran TPB. Oleh karena itu, perempuan dan anak korban kekerasan memerlukan penanganan khusus. Selama tahun 2020 kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo telah menyelesaikan 2.199 kasus kejahatan konvensional dari 3.485 kasus yang dilaporkan dibanding tahun 2019 mengalami penurunan 61 kasus. Kasus tertinggi adalah kasus penganiayaan 989 kasus, pencurian biasa 398 kasus, penipuan 234 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 182 kasus dan penggelapan sebanyak 165 kasus.

Sarana Penyebaran Paham Radikal Semakin Beragam, meluasnya penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan teroris dilakukan melalui media sosial, sekolah, dan lembaga pemasyarakatan. Segmen perekrutan semakin beragam, tidak hanya mencakup pria dewasa, tetapi juga perempuan dan anak-anak. Selain itu penegakan peraturan daerah masih lemah, dibuktikan dengan belum adanya laporan penindakan terhadap penegakan peraturan daerah

Dari sisi demokrasi, Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi, masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan. masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat. capaian indeks demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Gorontalo tahun 2021 mencapai 77,01. Angka ini masuk kategori sedang.

p. Dukungan Terhadap Isu Strategis Nasional di Provinsi Gorontalo

Presiden RI kepada seluruh kepala daerah pada Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Tahun 2023 menyampaikan arahan kepada seluruh peserta rapat khususnya kepala daerah antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi dengan memantau langsung harga di lapangan dan agar berhati-hati dalam menentukan tarif misalnya tarif angkutan dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- 2) Penurunan kemiskinan ekstrim sampai target 0% pada tahun 2024
- 3) Fokus pada penurunan stunting



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 4) Perhatikan hal-hal terkait investasi khususnya terkait perizinan agar dapat dipercepat
- 5) Penggunaan APBD untuk dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri
- 6) Kabupaten/Kota harus mulai mendesain daerahnya dengan baik sehingga memiliki diferensiasi dan memaksimalkan potensi daerah
- 7) Jaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024
- 8) Jamin kebebasan beragama, jangan sampai konstitusi kalah dengan kesepakatan.

3.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

a. Tema dan Unsur Tema RKPD Tahun 2024

Berdasarkan kebijakan utama pembangunan Gorontalo dalam RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun berjalan dan isu strategis pembangunan daerah, maka ditetapkan tema dan unsur tema pembangunan untuk tahun 2024 adalah:

“Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang berwawasan lingkungan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Infrastruktur Dasar dan Strategis, serta Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Daerah”

Mengacu pada fokus-fokus pembangunan yang tertuang dalam RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan memperhatikan RPJMN 2020-2024 serta menelaah rumusan isu-isu strategis daerah, serta tema RKPD Tahun 2024 maka kebijakan utama/prioritas pembangunan provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah:

- 1) Peningkatan Ekonomi Daerah
Pembangunan ekonomi akan dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai potensi yaitu pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan mendorong peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan meminimalisir bencana.
- 2) Pengembangan Wilayah dan Pedesaan
Pembangunan wilayah dan pedesaan akan difokuskan dengan mengkoordinasikan seluruh seluruh *stakeholders* pembangunan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah yang belum berkembang dan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata.
- 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia
Pembangunan sumber daya manusia dititikberatkan pada peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, pelaksanaan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, juga mendorong upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- 4) Peningkatan Kebudayaan dan Agama
Pembangunan kebudayaan dan agama akan didorong melalui peningkatan pelestarian kebudayaan dan budaya literasi serta meningkatkan pemahaman dan kerukunan beragama.
- 5) Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis



Pembangunan infrastruktur dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur layanan dasar, pembangunan konektivitas transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

- 6) Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana diarahkan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- 7) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi
Pembangunannya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik berkualitas, percepatan reformasi birokrasi serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Perumusan Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan menengah daerah yang dirumuskan dan menjadi pedoman untuk dilaksanakan agar pembangunan lebih terarah, efektif dan efisien dalam perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan. Berdasarkan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026, sebagaimana tema yang telah ditetapkan untuk tahun 2024, maka sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 14 Tema, Unsur Tema dan Sasaran Pembangunan Gorontalo Tahun 2024

Tema	Unsur Tema	No	Sasaran
Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang berwawasan lingkungan didukung oleh peningkatan kualitas SDM, Infrastruktur Dasar dan Strategis, serta Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Daerah	Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang berwawasan lingkungan	1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
		2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian
		3	Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa
		4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		5	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim
	Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	6	Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan
		7	Meningkatnya derajat kesehatan
		8	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
		9	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama
		10	Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat
		11	Meningkatnya budaya literasi masyarakat
	Infrastruktur Dasar dan Strategis	12	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tema	Unsur Tema	No	Sasaran
	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Daerah	13	Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah
		14	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Adapun uraian strategi dan arah kebijakan sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

1) Sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Strategi yang ditetapkan adalah meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan. Arah Kebijakan yang dilakukan adalah:

- Peningkatan penganekaragaman pangan dan optimalisasi Toko Tani Indonesia;
- Peningkatan sarana prasarana pembibitan ternak, revitalisasi rumah potong hewan, penyediaan pakan ternak yang berkualitas untuk ternak ruminansia dan non-ruminansia, *holding ground*;
- Peningkatan sarana prasarana untuk perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan dan balai benih ikan/udang;
- Integrasi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan peternakan dan perikanan;
- Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pangan;
- Peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan teknologi Pertanian dan Perikanan serta modernisasi pasca panen;
- Peningkatan tata kelola sistem pertanian dan pangan;
- Penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan di kawasan konservasi;
- Pemanfaatan teknologi terasering dan pemilihan komoditi pada pertanian lahan miring di atas 15% dengan memperhatikan kesesuaian lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan

2) Sasaran meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian

Strategi yang ditetapkan adalah peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, peningkatan nilai tambah tenaga kerja, Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- Mendorong investasi melalui promosi, peningkatan layanan perizinan dan membangun kemitraan;
- Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi industri, pengendalian dan pengawasan terhadap limbah industri;



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c) Peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan dan hubungan industrial;
- d) Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha koperasi, IKM dan UKM;
- e) Digitalisasi promosi dan pemasaran;
- f) Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan berskala kecil;
- g) Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia;
- h) Perluasan kemitraan dan kerjasama internasional, Pameran dan misi dagang untuk mendorong ekspor;
- i) Kerjasama antar daerah dalam memenuhi bahan baku industri;
- j) Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasar;
- k) Peningkatan pengelolaan destinasi wisata di kawasan geopark dan kawasan strategis pariwisata Provinsi Gorontalo (Benteng Otanaha, Lombongo, Botubarani, Iluta, Bubuhu/Bongo, Bolihutuo, Minanga, Torosiaje);
- l) Pengembangan industri pariwisata halal;
- m) Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- n) Peningkatan pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral non logam dan batuan dalam rangka peningkatan penanaman modal daerah; dan
- o) Menyiapkan perencanaan konservasi Cekungan Air Tanah (CAT) dan Nilai Perolehan Air (NPA) tanah serta melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah.

3) Sasaran Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa

Strategi yang ditetapkan adalah mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a) Revitalisasi lembaga ekonomi desa;
- b) Kerjasama antar desa dan antar lembaga ekonomi desa;
- c) Peningkatan sarana prasarana ekonomi desa;
- d) Peningkatan infrastruktur ekonomi desa;
- e) Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga berdasarkan potensi desa;
- f) Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam penguatan tata kelola data Desa;
- g) Pengembangan dan Fasilitasi Kawasan Transmigrasi;
- h) Pembinaan Dinas PMD Kab/Kota dalam memperkuat kapasitas dalam pengendalian infrastruktur pedesaan; dan
- i) Revitalisasi peran Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Pedesaan Provinsi Gorontalo (TKPKP-Go).

4) Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Strategi yang ditetapkan adalah peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan izin lingkungan / persetujuan lingkungan, SLO dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup;
- c) Peningkatan SDM Lingkungan Hidup dan kehutanan serta pemberdayaan masyarakat kehutanan;
- d) Pembangunan Rendah Karbon;
- e) Rehabilitasi hutan dan lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan;
- f) Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);

5) Sasaran Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim

Strategi yang ditetapkan adalah peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian risiko bencana. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian risiko bencana;
- b) Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.
- c) Strategi Pembangunan Rendah Karbon
- d) Arah kebijakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:
- e) Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Energi Terbarukan;
- f) Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- g) Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian ramah lingkungan;
- h) Peningkatan koordinasi dan advokasi penerapan modifikasi proses dan teknologi serta manajemen limbah industri;
- i) Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin angkutan dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

6) Sasaran Meningkatnya mutu dan kualitas layanan Pendidikan

Strategi yang ditetapkan adalah peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan serta kurikulum yang adaptif. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional;
- b) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- c) Meningkatkan kualitas kurikulum;
- d) Mengembangkan Kerjasama Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha;
- e) Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis entrepreneurship;
- f) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data pendidikan;
- g) Peningkatan koordinasi dan advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM Pendidikan.

7) Sasaran Meningkatnya derajat Kesehatan

Strategi yang ditetapkan adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan RSUD Ainun Habibie dan Labkesda;
- b) Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan pada fasilitas kesehatan provinsi;
- c) Peningkatan kualitas tata kelola layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi;
- d) Peningkatan pengelolaan rujukan dan rujuk balik di fasilitas kesehatan;
- e) Pengembangan promosi dan pemasaran Labkesda;
- f) Peningkatan layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP);
- g) Peningkatan koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam percepatan penanganan stunting;
- h) Peningkatan koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM Kesehatan untuk penurunan AKI AKB;
- i) Digitalisasi layanan kesehatan; dan
- j) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

8) Sasaran Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat

Strategi yang ditetapkan adalah perlindungan sosial bagi masyarakat. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a) Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial;
- b) Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- c) Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti;
- d) Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu;
- e) Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial; dan
- f) Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan ibu hamil.

9) Sasaran Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda

Strategi yang ditetapkan adalah meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktivitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a) Meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- b) Meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan;
- c) Menjamin keamanan perempuan dan anak dari kekerasan dan pelecehan seksual;
- d) Mengembangkan potensi dan minat pemuda;
- e) Menumbuhkan jiwa wirausaha muda.

10) Sasaran meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama

Strategi yang ditetapkan adalah meningkatkan pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan.



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Arah kebijakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a) Revitalisasi, pemanfaatan, aktualisasi, cagar, objek, nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo;
- b) Pengembangan, perlindungan hak dan pengelolaan kebudayaan;
- c) Peningkatan sarana prasarana pusat pembinaan mental spiritual;
- d) Pengembangan nilai-nilai keagamaan khususnya islam sebagai akar budaya daerah; dan
- e) Peningkatan kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

11) Sasaran Meningkatnya budaya literasi masyarakat

Strategi yang ditetapkan adalah meningkatkan budaya literasi, bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a) Peningkatan peran perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah sebagai sarana sosialisasi dan penguatan literasi peserta didik dan masyarakat;
- b) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra daerah;
- c) Pengembangan teknologi informasi sebagai corong informasi literasi masyarakat yang mudah diakses dan diperoleh masyarakat; dan
- d) Penguatan institusi sosial penggerak, penggiat dan pemerhati literasi sebagai mitra pemerintah dalam penguatan literasi masyarakat.

12) Sasaran memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Strategi yang ditetapkan adalah meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur fisik dan non fisik kewenangan provinsi. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a) Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar;
- b) Peningkatan pengelolaan dan penanganan sampah;
- c) Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian risiko bencana;
- d) Peningkatan sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum lainnya;
- e) Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang;
- f) Mengurangi Backlog;
- a) Peningkatan pengelolaan penanganan kawasan kumuh kewenangan Provinsi;
- b) Peningkatan konektivitas pelayanan transportasi;
- c) Peningkatan keselamatan lalu lintas; dan
- d) Menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas.

Strategi yang ditetapkan adalah meningkatkan Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan E-Government. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
- b) Transformasi digital dalam peningkatan pelayanan pemerintahan;



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c) Pengelolaan media komunikasi publik, membangun kemitraan, meningkatkan tata Kelola informasi dan komunikasi;
- d) Peningkatan pemanfaatan digitalisasi untuk tata kelola penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang terbuka dan terintegrasi.

13) Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Strategi yang ditetapkan adalah percepatan reformasi birokrasi. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a) Penguatan manajemen institusi pemerintah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, penerapan standar internasional dalam mutu layanan publik, tata kelola pemanfaatan TIK;
- b) Proses bisnis organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan;
- c) Transformasi digital dalam penerapan SPBE secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu;
- d) Penerapan manajemen talenta ASN, dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai prioritas pembangunan, pengembangan pola karir struktural dan fungsional, pelaksanaan talent pool JPT, implementasi Human Capital Development Plan (HCDP) dan pengembangan budaya kerja berakhlak;
- e) Penguatan kebijakan kesejahteraan ASN dalam bentuk kebijakan insentif untuk ASN tingkat risiko pekerjaan tinggi, dan bertalenta (high performance);
- f) Perluasan implementasi sistem integritas, melalui penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan pengembangan dan implementasi sistem integritas ASN;
- g) Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui penyempurnaan kebijakan dan implementasi manajemen risiko, penguatan implementasi SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h) Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- i) Pemanfaatan TIK untuk penguatan penerapan e-services dan Sistem Informasi Pelayanan Publik;
- j) Penerapan replikasi inovasi pelayanan publik;
- k) Akselerasi model/desain inovasi pelayanan publik;
- l) Penataan produk hukum daerah;
- m) Peningkatan kapasitas tata laksana: perencanaan dan anggaran, keuangan, dan aset, pengadaan barang jasa, pengendalian, pengelolaan data sektoral, kearsipan, riset, inovasi, fasilitasi kesra pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta pelayanan pimpinan;
- n) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan kompeten didukung oleh manajemen ASN berbasis sistem merit;
- o) Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan, pengawasan dan pengelolaan



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi; dan

p) Dukungan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

14) Meningkatkan stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah

Strategi yang ditetapkan adalah peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pemantapan demokrasi. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- Pencegahan kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan dan disabilitas;
- Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga kepolisian dan TNI;
- Meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan kesetaraan, keterwakilan, partisipasi etnis;
- Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila;
- Pendidikan politik dan pemilu secara konsisten;
- Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
- Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang baik.

c. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program yang berhubungan dengan kepentingan public dan memiliki daya ungkit dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam rangka pencapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, Provinsi Gorontalo menetapkan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 15 Program Prioritas Provinsi Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab
Tujuan: Peningkatan ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat		
Sasaran: Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
5	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Pangan
7	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan
8	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan
9	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pangan
10	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
11	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
12	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
14	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda)	Dinas Kelautan dan Perikanan
15	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta)	UPTD-PPI Tilamuta
16	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau)	UPTD-Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Laut dan Payau)
17	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma)	UPTD-PPI Gentuma
Sasaran: Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja dan Daya Saing Perekonomian		
1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab
2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (UPTD BP2MDPP)	UPTD-BP2MDPP
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
4	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
7	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Diskumperindag
8	Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	Diskumperindag
9	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Diskumperindag
10	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskumperindag
11	Program Pengembangan UMKM	Diskumperindag
12	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Diskumperindag
13	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Diskumperindag
14	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Diskumperindag
15	Program Perizinan dan Pendaftaran Usaha	Diskumperindag
16	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Diskumperindag
17	Program Pengembangan Ekspor	Diskumperindag
18	Program Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
19	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	UPTD Balai Pemantapan Sertifikasi Mutu Barang
20	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
21	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
22	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
23	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
24	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
25	Program Hubungan Industrial	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
26	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
27	Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi (UPT-BLK)
28	Program Pengelolaan Aspek Gegeologian	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
29	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
Sasaran: Meningkatkan daya saing dan kemandirian desa		
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
4	Program Penataan Desa	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
5	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
6	Program Pencatatan Sipil	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
7	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
8	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
9	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
Sasaran: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan Penataan Ruang
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PU dan Penataan Ruang
3	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PU dan Penataan Ruang
4	Program Pengembangan Permukiman	Dinas PU dan Penataan Ruang
5	Program Penataan Bangunan	Dinas PU dan Penataan Ruang
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PU dan Penataan Ruang
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan Penataan Ruang
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Dinas PU dan Penataan Ruang
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
10	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Dinas PU dan Penataan Ruang
11	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dinas PU dan Penataan Ruang
12	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PU dan Penataan Ruang
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan	UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab
14	Program Pembangunan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	UPT TPA Talumelito
15	Program Pengelolaan Persampahan	UPT TPA Talumelito
16	Program Kawasan Permukiman	Dinas PRKP
17	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
18	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
19	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
20	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
21	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo dan Statistik
22	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo dan Statistik
23	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Dinas Kominfo dan Statistik
Sasaran: Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat		
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, PP dan PA
2	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, PP dan PA
3	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial, PP dan PA
4	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, PP dan PA
5	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial, PP dan PA
6	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial, PP dan PA
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Sosial, PP dan PA
8	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Sosial, PP dan PA
9	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, PP dan PA
10	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Sosial, PP dan PA
11	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Sosial, PP dan PA
12	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial, PP dan PA
Tujuan: Peningkatan Sumber Daya Manusia		
Sasaran: Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan		
1	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
4	Program Pendidikan Kurikulum	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Sasaran: Meningkatnya Derajat Kesehatan		
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Program Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Dinas Kesehatan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Kesehatan
5	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSUD dr. Ainun Habibie
Sasaran: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda		
1	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Sosial, PP dan PA
2	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Sosial, PP dan PA
3	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, PP dan PA
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Sosial, PP dan PA
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Sosial, PP dan PA
6	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial, PP dan PA
Sasaran: Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Dan Agama		
1	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kesbangpol
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
Sasaran: Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat		
1	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan, Kebudayaan,



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab
		Pemuda dan Olahraga
2	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Tujuan: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas LH dan Kehutanan
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH dan Kehutanan
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas LH dan Kehutanan
4	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas LH dan Kehutanan
5	Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas LH dan Kehutanan
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas LH dan Kehutanan
7	Program Pengelolaan Hutan	Dinas LH dan Kehutanan
8	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Dinas LH dan Kehutanan
9	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Dinas LH dan Kehutanan
10	Program Pengelolaan DAS	
Sasaran: Meningkatnya Ketahanan terhadap Dampak Bencana dan Bahaya Iklim		
1	Program Pengembangan Perumahan	Dinas PRKP
2	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
Tujuan: Terwujudnya Good and Clean Government		
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		
1	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Badan Diklat
2	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah
5	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan Daerah
6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPPEDA
7	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPPEDA
8	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BAPPPEDA
9	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
10	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
11	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan
12	Program Perekonomian dan Pembangunan	Biro Pembangunan dan Ekonomi
13	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Biro Pembangunan dan Ekonomi
14	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
15	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
16	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Kesra
17	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Pemerintahan dan Kesra
18	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
19	Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi	Sekretariat DPRD
20	Program Pelayanan Penghubung	Biro Penghubung
21	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Dinas Kominfo dan Statistik
Sasaran: Meningkatnya Stabilitas Keamanan Dan Penguatan Demokrasi Daerah		
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Kesbangpol
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesbangpol
4	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
5	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran

Selanjutnya, dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga melaksanakan penelaahan program



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

prioritas daerah terhadap prioritas nasional Tahun 2024, Adapun tujuannya agar dapat tergambarkan dukungan program prioritas Provinsi Gorontalo terhadap pembangunan nasional. Sebagaimana Rancangan Awal RKP Tahun 2024 ditetapkan bahwa Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan yaitu:

- 1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
- 3) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- 4) Penguatan Daya Saing Usaha;
- 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
- 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Selanjutnya untuk prioritas nasional Tahun 2024 dicantumkan sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan kebijakan dan prioritas pembangunan pada Rancangan Awal RKP Tahun 2024, dilaksanakan penyelarasan program prioritas Rancangan Awal RKP Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan Prioritas RKP Tahun 2024 sebagaimana table di bawah ini:

Tabel 16 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Rancangan Awal RKP dan Rancangan Awal RKP Provinsi Gorontalo Tahun 2024 beserta dukungan Program Prioritas Tahun 2024

No	Prioritas RKP	Prioritas RKP	Program Prioritas Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2024
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 5. Program Penyuluhan Pertanian 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 7. Program Penanganan Kerawanan Pangan 8. Program Pengawasan Keamanan Pangan 9. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 10. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 11. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 12. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil 13. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Prioritas RKP	Prioritas RKPD	Program Prioritas Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2024
			14. Program Pengolahan dan Pemasaran 15. Hasil Perikanan (UPTD BP2MDPP) 16. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 17. Program Pemasaran Pariwisata 18. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 19. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 20. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 21. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 22. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 23. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 24. Program Pengembangan UMKM 25. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 26. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 27. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 28. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 29. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 30. Program Pengembangan Ekspor 31. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 32. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 33. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal 34. Program Promosi Penanaman Modal 35. Program Pelayanan Penanaman Modal 36. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 37. Program Penempatan Tenaga Kerja 38. Program Hubungan Industrial 39. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 40. Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 41. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 42. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan Wilayah dan Pedesaan	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa 3. Program Penataan Desa 4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 5. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	1. Program pendidik dan tenaga kependidikan 2. Program pengelolaan Pendidikan 3. Program pengendalian perizinan Pendidikan 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia kesehatan 5. Program Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan dan Makanan Minuman 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 7. Program Pengendalian Penduduk 8. Program Pembinaan Keluarga Berencana 9. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 11. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 12. Program Pemberdayaan Sosial 13. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 14. Program Rehabilitasi Sosial 15. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 16. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 17. Program Perlindungan Khusus Anak 18. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 19. Program Peningkatan Kualitas keluarga 20. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 21. Program Perlindungan Perempuan 22. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 23. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 24. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 25. Program Pembinaan Perpustakaan
4	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kebudayaan dan Agama	1. Program Pendidikan Kurikulum Muatan Lokal 2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 3. Program Pengembangan Kebudayaan 4. Program Pengembangan Kesenian Tradisional



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Prioritas RKP	Prioritas RKPD	Program Prioritas Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2024
			5. Program Pengelolaan Permuseuman 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 7. Program Kesejahteraan Rakyat 8. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Program Penyelenggaraan Jalan 3. Program Penataan Bangunan Gedung 4. Program Pengembangan Permukiman 5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah 9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 10. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan 11. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 12. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 13. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 14. Program Kawasan Permukiman 15. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 16. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 17. Program Pengelolaan Pelayaran 18. Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik 19. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 20. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	1. Program Penanganan Bencana 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 4. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 7. Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 9. Program Pengelolaan Hutan 10. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 11. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 12. Program Pengelolaan DAS 13. Program Pengembangan Perumahan 14. Program Penanggulangan Bencana 15. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum 5. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 7. Program pengembangan Sumberdaya Manusia 8. Program Kepegawaian Daerah 9. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 11. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 12. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 13. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 14. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 15. Program Penyelenggaraan Pengawasan 16. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 17. Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa 18. Program perekonomian dan Pembangunan 19. Program kebijakan administrasi Pembangunan



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Prioritas RKP	Prioritas RKPD	Program Prioritas Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2024
			20. Program Penataan Organisasi 21. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum 22. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 23. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 24. Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi 25. Program Pelayanan Penghubung 26. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 27. Program Pengelolaan Arsip 28. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

3.3 Mandatory Spending

Mandatory Spending merupakan pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagai amanat undang-undang. Sesuai peraturan perundang-undangan, diatur pengelolaan keuangan daerah berupa *Mandatory Spending* yang wajib dialokasikan dengan besaran persentase tertentu. Tujuan *Mandatory Spending* diantaranya untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka dalam penjabaran APBD dan APBD Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2024, ketiga komponen *Mandatory Spending* telah sesuai dan melampaui dari besaran alokasi yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Alokasi Mandatory Spending dalam APBD Induk dan APBD Perubahan Tahun 2024

No	Mandatory Spending	APBD Induk 2024		Perubahan APBD 2024	
		Anggaran	% terhadap APBD	Anggaran	% terhadap APBD-P
1	Pendidikan	561.237.835.967,00	28.45	590.619.399.277,00	28,64
2	Kesehatan	264.658.781.569,00	17.34	309.608.697.153,00	19,34
3	Infrastruktur	345.826.993.865,00	19,57	429.441.151.967,00	23,18

Sumber: Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Evaluasi APBD dan APBD-P 2024

Keterangan:

- Mandatory Spending* Bidang Pendidikan, baik pada APBD Induk maupun perubahan dialokasikan diatas 20% dari Total APBD Provinsi Gorontalo;
- Dibidang Kesehatan, dalam APBD Induk dialokasikan sebesar 17,34 persen, dan APBD Perubahan sebesar 19,34% dari Total APBD diluar Gaji; dan
- Bidang Infrastruktur dialokasikan sebesar 19,57 % dari total APBD Induk, dan pada APBD Perubahan sebesar 23,18 % dari total APBD.

Bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memenuhi *mandatory spending* alokasi anggaran infrastruktur sebagaimana diamanatkan, karena beberapa kegiatan penting yang perlu dan wajib dialokasikan tahun 2024 antara lain Hibah KPU sebesar 34 Miliar dan Bawaslu sebesar 9,6 Miliar dengan total anggaran hibah untuk Penyelenggaraan Pemilu mencapai 43,6 miliar, sementara itu alokasi DAK Fisik setiap tahun cenderung menurun. Oleh karenanya hal ini menjadi perhatian dalam pengalokasian anggaran khususnya dalam pemenuhan *mandatory spending* minimal 40% untuk infrastruktur pelayanan publik sebagaimana amanat pasal 147 UU 1 2022 HKPD Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 2022.

3.3.1 Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp561.237.835.967,00 atau 28,45% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang APBD Tahun Anggaran 2024 bertambah Rp29.381.563.310,00 menjadi Rp590.619.399.277,00 atau 28,64% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Provinsi Gorontalo. Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk belanja pada urusan bidang pendidikan Rp542.166.955.575,00 atau 91,80% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam:

- 1) Belanja Operasi Rp480.677.984.234,00 atau 81,39% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan yang terdiri dari belanja pegawai Rp360.970.250.019 atau 61,12% serta belanja barang dan jasa Rp119.707.734.215,00 atau 20,27% dari total belanja operasi; dan
- 2) Belanja Modal Rp61.488.971.341,00 atau 10,41% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.

3.3.2 Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp264.658.781.569,00 atau 17,34% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang APBD Tahun Anggaran 2024 bertambah Rp44.949.915.584,00 menjadi Rp309.608.697.153,00 atau 19,34% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Provinsi Gorontalo. Alokasi anggaran kesehatan pada urusan bidang kesehatan Rp283.243.974.840,00 atau 91,48% dari total anggaran kesehatan, yang antara lain diuraikan dalam:

- a. Belanja Operasi Rp198.063.625.926,00 atau 63,97% dari total anggaran untuk fungsi kesehatan yang terdiri dari belanja pegawai Rp43.428.213.496 atau 14,03%, belanja barang dan jasa Rp151.785.412.430,00 atau 49,02% dan belanja hibah Rp2.850.000.000 atau 0,92% dari total belanja operasi; dan
- b. Belanja Modal Rp85.180.348.914,00 atau 27,51% dari total anggaran untuk fungsi kesehatan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

3.3.3 Alokasi Anggaran Infrastruktur

Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah alokasi anggaran untuk Infrastruktur dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp345.826.993.865,00 atau 19,57% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang APBD Tahun Anggaran 2024 bertambah Rp83.614.158.102,00 menjadi Rp429.441.151.967,00 atau 23,18% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Perubahan APBD Tahun 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo harus mengupayakan pengalokasian anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo harus menyesuaikan porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang kurangnya 40% (empat puluh persen) sampai dengan Tahun Anggaran



2027.

3.4 *Stunting*

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. *Stunting* pada anak memang harus menjadi perhatian dan diwaspadai. Kondisi ini dapat menandakan bahwa nutrisi anak tidak terpenuhi dengan baik. Jika dibiarkan tanpa penanganan, *stunting* bisa menimbulkan dampak jangka panjang kepada anak. Anak tidak hanya mengalami hambatan pertumbuhan fisik, tapi nutrisi yang tidak mencukupi juga mempengaruhi kekuatan daya tahan tubuh hingga perkembangan otak anak. Semoga kedepannya pemerintah Provinsi Gorontalo bisa memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak terutama dari segi pemenuhan gizi agar bisa menekan perkembangan angka *stunting* di daerah. *Stunting* terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Penanganan kasus gizi buruk dan *stunting*, selain intervensi spesifik oleh sektor kesehatan melalui pemberian makanan tambahan dan vitamin, pemantauan tumbuh kembang, tata laksana gizi buruk dan promosi kesehatan, juga dibutuhkan integrasi penanganan oleh sektor diluar kesehatan dengan intervensi sensitive melalui peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, dan lain lain.

Percepatan penurunan *stunting* merupakan salah satu fokus pemerintah pusat dan juga daerah. Hal ini sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) 2030 serta *Global Nutrition Target 2025*. Pada target 2.2 TPB/SDGs disebutkan menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi. Sedangkan pada RPJMN ditetapkan penurunan *stunting* sampai dengan 14% pada tahun 2024. Sementara di Provinsi Gorontalo prevalensi *stunting* sesuai data Susenas dan SSGBI masih 29,00%. Sehingga prevalensi *stunting* memang masih menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dari berbagai pihak.

Pemerintah Provinsi Gorontalo meluncurkan program inovatif bernama “Bele Mo’o Sehati” yang bertujuan untuk mengatasi masalah *stunting* atau tengkes. Program ini diharapkan dapat menjadi layanan terpadu (one-stop service) bagi anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan. Program Bele Mo’o Sehati menawarkan berbagai layanan dalam satu tempat, seperti pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan tambahan, serta edukasi bagi orang tua. Tujuannya adalah untuk memberikan penanganan yang komprehensif bagi anak-anak yang mengalami *stunting*.

Upaya menekan pertumbuhan angka *stunting* di Kota Gorontalo telah dilaksanakan program kegiatan diantaranya bantuan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) *Stunting*, dalam bentuk pemberian beberapa bahan pangan untuk anak *stunting* antara lain: beras Nutrizink, telur ayam, kacang hijau dan susu untuk anak balita. Penerima bantuan berjumlah 174 anak dari seluruh puskesmas yang ada di Kota Gorontalo, dengan rincian



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dumbo Raya 31 anak, Duingi 13 anak, Hulonthalangi 21 anak, Kota Tengah 20 anak, Kota Timur 24 anak, Kota Utara 15 anak, Kota Selatan 22 anak, Kota Barat 10 anak, dan Pilolodaa sebanyak 18 anak.

3.5 Strategi Pencapaian

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan tahun 2024, maka upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan maksimal sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan publik yang ditawarkan ke masyarakat;
- b. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD;
- c. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada pemerintah pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga beroleh dana perimbangan yang memadai;
- d. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi;
- e. Memberikan keringanan bagi wajib pajak melalui pemberian insentif pembebasan BBN-KB dan denda pajak;
- f. Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik;
- g. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI;
- h. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak yang dapat di sharing dengan daerah seperti PPh, BPHTB, PBB sehingga bagian bagi hasil pajak daerah akan lebih tinggi;
- i. Memberikan dukungan dana yang lebih memadai dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah khususnya pungutan pajak dan retribusi daerah, berupa pemberian biaya operasional dan insentif;
- j. Peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain peningkatan peran pemerintah daerah dalam bidang perizinan;
- k. Melakukan kerjasama dengan investor dengan tujuan diperoleh multiplayer kearah peningkatan pendapatan masyarakat sebagai objek dan subjek pendapatan daerah;
- l. Mengkaji ulang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif; dan
- m. Melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem pelayanan satu atap untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan daerah.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalan potensi dan penyuluhan kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju



terpenuhinya kepuasan pelayanan publik. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan TA 2024 diarahkan pada upaya sebagai berikut:

- a. Penggalan potensi pendapatan daerah melalui penyusunan database potensi daerah;
- b. Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif;
- c. Peningkatan kualitas aparatur yang mengelola pendapatan daerah;
- d. Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerja sama antar SKPD penghasil;
- e. Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
- f. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban;
- g. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai SIPAMOR; dan
- h. Pemantapan kelembagaan, dengan cara:
 - 1) Mengintensifkan pendapatan dari pajak maupun retribusi melalui peningkatan manajemen pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
 - 2) Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan kepada pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus untuk perikanan, pertanian dan perhubungan selain infrastruktur;
 - 3) Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan potensi daerah; dan
 - 4) Menjaga dan mengembangkan perekonomian daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

3.6 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain:

- a. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan time schedule dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal;
- b. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo; dan
- c. Masih kurangnya pemahaman penerima bantuan sosial dan hibah dalam memenuhi kewajibannya sebagai penerima hibah yaitu menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah kepada Gubernur melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo telah diberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam pelaporan keuangan ini, entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo secara keseluruhan, yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD. Sedangkan entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang mempunyai berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban APBD di SKPD selaku pengguna anggaran dan pengguna barang. Pada tahun 2024 terdapat 36 SKPD sebagai entitas akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 berdasarkan asumsi bahwa:

- a. Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan organisasi yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai entitas pelaporan.
- b. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan.
- c. Setiap kejadian atau transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dinilai dengan satuan uang, berdasarkan asumsi keterukuran dalam satuan mata uang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyajikan saldo Akun-akun tahun 2024 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya.



Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3 Kebijakan Akuntansi

Laporan Realisasi APBD disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau dikeluarkan dari RKUD.

Penyajian Pendapatan dalam Laporan Operasional dan Beban dalam Laporan Operasional diakui berdasarkan basis akrual yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari RKUD.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari RKUD.

Penyusunan dan penyajian LKPD Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

Khusus untuk kebijakan akuntansi yang terkait dengan Akuntansi Persediaan, Akuntansi Aset Tetap dan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah dan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD adalah:

4.3.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada RKUD. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan-LRA. Untuk pengembalian atas kelebihan pengakuan pendapatan-LRA, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan-LRA dalam periode berjalan.

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran RKUD yang mengurangi Saldo Anggaran



Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan. Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja. Untuk pengembalian atas kelebihan pengakuan belanja, dilakukan dengan pembetulan pada akun belanja dalam periode berjalan.

4.3.3 Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain.

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

- 1) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- 2) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- 2) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah (SK Perhitungan bagi hasil dari PPKD/BUD) yang bersangkutan kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Gorontalo.

4.3.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada RKUD serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



4.3.5 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih (ekuitas) dalam periode tahun yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui saat timbulnya hak dan/atau pada saat kas diterima pada RKUD. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LO disajikan sesuai dengan jenis.

Transaksi pendapatan dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi, jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.6 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengurangi kekayaan bersih (ekuitas), yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diukur dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, atau menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset, dan saat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi, jika nilainya tidak diketahui.

4.3.7 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada



tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Dan Piutang dicatat sebesar Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).

Umur Piutang Pajak/Retribusi dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut:

- 1) Umur Piutang < 1 tahun persentase penyisihan Piutang adalah 0,5%;
- 2) Umur Piutang 1 s/d 3 tahun persentase penyisihan Piutang adalah 10%;
- 3) Umur Piutang > 3 s/d 5 tahun persentase penyisihan Piutang adalah 50%; dan
- 4) Umur Piutang > 5 tahun persentase penyisihan Piutang adalah 100%.

Umur Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut:

- 1) Umur Piutang < 1 tahun persentase penyisihan Piutang adalah 0,5%;
- 2) Umur Piutang 1 s/d 2 tahun persentase penyisihan Piutang adalah 10%;
- 3) Umur Piutang > 2 s/d 3 tahun persentase penyisihan Piutang adalah 50%; dan
- 4) Umur Piutang > 3 tahun persentase penyisihan Piutang adalah 100%.

Umur Piutang Bukan Pajak dan Bukan Retribusi dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut:

- 1) Umur Piutang belum lunas s/d tanggal jatuh tempo, persentase penyisihan Piutang adalah 0,5%;
- 2) Umur Piutang telah melewati jatuh tempo s/d 1 tahun persentase penyisihan Piutang adalah 10%;
- 3) Umur Piutang > 1 s/d 2 tahun persentase penyisihan Piutang adalah 50%; dan
- 4) Umur Piutang > 2 tahun persentase penyisihan Piutang adalah 100%.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- 1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- 3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- 1) Metode perpetual untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan dengan operasional utama di SKPD, sifatnya continues dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti obat-obatan, bahan kimia, pupuk, bibit tanaman, bibit ternak, Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- 2) Metode periodik untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, penggunaannya sulit diidentifikasi seperti bahan pakai habis antara lain alat tulis kantor, alat listrik dan elektronik, materai, peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Dengan metode ini pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah dan nilai persediaan akhir diketahui dengan melakukan penghitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode.

Untuk Laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dilakukan reklasifikasi dan penyesuaian struktur Persediaan dan Beban Persediaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodefikasi Barang Milik Daerah. Klasifikasi Persediaan berubah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 18 Klasifikasi Persediaan

Objek	Rincian Objek
Barang Pakai Habis	1. Bahan
	2. Suku Cadang
	3. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
	4. Obat-obatan
	5. Persediaan untuk dijual /diserahkan
Barang Tak Habis Pakai	6. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
	7. Natura dan Pakan
	8. Persediaan Penelitian
	9. Persediaan Dalam Proses
Barang Bekas Dipakai	1. Komponen
	2. Pipa
	1. Komponen Bekas dan Pipa Bekas

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2024 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak masuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan daerah, pemerintah daerah, pihak ketiga lainnya dan Investasi Non Permanen Dana Bergulir.

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

- 1) Jatuh tempo pada periode 1 s/d 2 tahun persentase penyisihan adalah 0,5%;
- 2) Jatuh tempo pada periode 2 s/d 3 tahun persentase penyisihan adalah 10%;
- 3) Jatuh tempo pada periode 3 s/d 4 tahun persentase penyisihan adalah 50%; dan
- 4) Jatuh tempo pada periode > 5 tahun persentase penyisihan adalah 100%.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

Penilaian investasi diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam



bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Kebijakan terhadap Penilaian Investasi Permanen di Provinsi Gorontalo menggunakan metode ekuitas.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada Neraca PPKD per 31 Desember 2024 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan aset tetap peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Pengeluaran untuk per satuan aset tetap gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai maksimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dilakukan reklasifikasi dan penyesuaian struktur Aset Tetap, Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah. Hal tersebut telah dinyatakan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Terdapat perubahan klasifikasi untuk barang-barang tertentu sebagai contoh:

- 1) Rambu jalan dan rambu jembatan sebelumnya masuk dalam klasifikasi Gedung dan bangunan kini masuk dalam klasifikasi Peralatan Mesin;
- 2) Alat-alat olahraga (bola voli, bola tenis, golf) yang sebelumnya masuk klasifikasi Aset tetap lain berubah menjadi klasifikasi Peralatan mesin.

Ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap mengalami perubahan terkait Penambahan Masa Manfaat aset tetap akibat adanya pengeluaran minimum kapitalisasi aset tetap setelah perolehan sebagaimana tabel berikut ini:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODIFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1		Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat Besar Apung	7
1	3	2	1	3	Alat Bantu	5
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	8
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5
1	3	2	2	3	Alat Angkutan Apung Bermotor	5
1	3	2	2	4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	5
1	3	2	2	5	Alat Angkutan Bermotor Udara	10
1	3	2	3		Alat Bengkel Dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	5
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	2	7		Alat Kedokteran Dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	5
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5
1	3	2	8	3	Alat Peraga/Praktek Sekolah	5
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	5
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	5
1	3	2	8	6	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	5
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	5
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	5
1	3	2	9		Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	5
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	5
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	5
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	5
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
1	3	2	13	1	Sumur	10
1	3	2	13	2	Produksi	10
1	3	2	13	3	Pengolahan Dan Pemurnian	10
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	10



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODIFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	3	Alat Sar	2
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1	3	2	18		Rambu - Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	3
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	50
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	25
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	25
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	25
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	25
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	25
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	5
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30

1) Kapitalisasi Aset Tetap

Pengakuan Kapitalisasi Aset Tetap

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap:

- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - (2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- e) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi dan jaringan serta Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, koleksi perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, hewan, dan tanaman.

Tabel 19 Penambahan Masa Manfaat Karena Adanya *Overhaul* dan Renovasi Terhadap Aset Tetap

NO	URAIAN		MASA MANFAAT	RENOVASI / OVERHAUL				KET
			(Tahun)	< 20%	≥20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%	
A	Peralatan Mesin							
1	Alat Besar	Alat Besar Darat	10	0	1	3	5	
		Alat Besar Apung	7	0	1	2	4	
		Alat Bantu	5	0	1	2	3	
2	Alat Angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	8	0	1	2	3	
		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5	0	1	2	3	
		Alat Angkutan Apung Bermotor	5	0	1	2	3	
		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	5	0	1	2	3	
		Alat Angkutan Bermotor Udara	10	0	1	3	5	
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	10	0	1	3	5	
		Alat Bengkel Tak Bermesin	5	0	0	0	0	
		Alat Ukur	5	0	0	0	0	
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan	4	0	0	0	0	
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor	5	0	0	0	0	
		Alat Rumah Tangga	5	0	0	0	0	
		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	0	0	0	0	
6	Alat Studio, Komunikasi Dan	Alat Studio	5	0	0	0	0	
		Alat Komunikasi	5	0	0	0	0	



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN		MASA MANFAAT	RENOVASI / OVERHAUL				KET
			(Tahun)	< 20%	≥20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%	
	Pemancar	Peralatan Pemancar	5	0	0	0	0	
		Peralatan Komunikasi Navigasi	5	0	0	0	0	
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Alat Kedokteran	5	0	0	0	0	
		Alat Kesehatan Umum	5	0	0	0	0	
8	Alat Laboratorium	Unit Alat Laboratorium	5	0	0	0	0	
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5	0	0	0	0	
		Alat Peraga/Praktek Sekolah	5	0	0	0	0	
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	5	0	0	0	0	
		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	5	0	0	0	0	
		<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	5	0	0	0	0	
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5	0	0	0	0	
		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	5	0	0	0	0	
		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	5	0	0	0	0	
9	Alat Persenjataan	Senjata Api	10	0	1	3	5	
		Persenjataan Non Senjata Api	5	0	0	0	0	
		Senjata Sinar	5	0	0	0	0	
		Alat Khusus Kepolisian	5	0	0	0	0	
10	Komputer	Komputer Unit	5	0	0	0	0	
		Peralatan Komputer	5	0	0	0	0	
11	Alat Eksplorasi	Alat Eksplorasi Topografi	5	0	1	2	3	
		Alat Eksplorasi Geofisika	10	0	2	4	5	
12	Alat Pengeboran	Alat Pengeboran Mesin	10	0	2	4	5	



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN		MASA MANFAAT	RENOVASI / OVERHAUL				KET
			(Tahun)	< 20%	≥20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%	
		Alat Pengeboran Non Mesin	10	0	0	1	2	
13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	Sumur	10	0	0	1	2	
		Produksi	10	0	0	1	2	
		Pengolahan Dan Pemurnian	10	0	3	5	7	
14	Alat Bantu Eksplorasi	Alat Bantu Eksplorasi	10	0	2	4	5	
		Alat Bantu Produksi	10	0	2	4	5	
15	Alat Keselamatan Kerja	Alat Deteksi	5	0	0	0	0	
		Alat Pelindung	5	0	0	0	0	
		Alat Sar	2	0	0	0	0	
		Alat Kerja Penerbangan	10	0	0	0	0	
16	Alat Peraga	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5	0	0	0	0	
17	Peralatan Proses/Produksi	Unit Peralatan Proses/Produksi	5	0	0	0	0	
18	Rambu - Rambu	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5	0	0	0	0	
		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	0	0	0	0	
		Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5	0	0	0	0	
19	Peralatan Olah Raga	Peralatan Olah Raga	3	0	0	0	0	
B	Gedung dan Bangunan							
1	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25	0	5	10	15	
		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25	0	5	10	15	
		Bangunan Menara	25	0	5	10	15	
2	Monumen	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	25	0	5	10	15	
3	Bangunan Menara	Bangunan Menara Perambuan	25	0	5	10	15	
4	Tugu Titik	Tugu/Tanda Batas	25	0	5	10	15	



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN		MASA MANFAAT	RENOVASI / OVERHAUL				KET
			(Tahun)	< 20%	≥20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%	
	Kontrol/Pasti							
C	Jalan, Irigasi dan Jaringan							
1	Jalan dan Jembatan	Jalan	5	0	1	3	5	
		Jembatan	50	0	0	0	0	
2	Bangunan Air	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25	0	5	10	15	
		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25	0	5	10	15	
		Bangunan Menara	25	0	5	10	15	
		Bangunan Air Irigasi	50	0	2	5	10	
		Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	0	2	5	10	
		Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	50	0	2	5	10	
		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10	0	2	3	5	
		Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	25	0	2	4	8	
		Bangunan Air Bersih/Air Baku	25	0	2	4	8	
		Bangunan Air Kotor	25	0	2	4	8	
3	Instalasi	Instalasi Air Bersih / Air Baku	25	0	2	4	8	
		Instalasi Air Kotor	25	0	2	4	8	
		Instalasi Pengolahan Sampah	10	0	2	3	5	
		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	0	2	3	5	
		Instalasi Pembangkit Listrik	40	0	2	5	10	
		Instalasi Gardu Listrik	40	0	2	5	10	
		Instalasi Pertahanan	30	0	2	4	8	
		Instalasi Gas	30	0	2	4	8	



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	MASA MANFAAT	RENOVASI / OVERHAUL				KET	
		(Tahun)	< 20%	≥20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%		
		Instalasi Pengaman	20	0	2	3	5	
		Instalasi Lain	5	0	1	1	3	
4	Jaringan	Jaringan Air Minum	30	0	2	4	8	
		Jaringan Listrik	40	0	2	5	10	
		Jaringan Telepon	20	0	2	3	5	
		Jaringan Gas	30	0	2	4	8	

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemda sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaan merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi



Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, dan aset pemerintah daerah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS), di samping yang dialihkan.

4.3.8 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar untuk jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

c. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa



masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

4.3.9 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

a. Selisih Kurs

Menurut SAP, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

b. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi

1) Koreksi Kesalahan

- a) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- b) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - (1) Kesalahan yang tidak berulang;
 - (2) Kesalahan yang berulang dan sistemik;
- c) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - (1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - (2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
- d) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- e) Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

- f) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- g) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- h) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- i) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- j) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- k) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- l) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- m) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- n) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- o) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan
- p) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan
- q) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- r) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4 Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo telah diberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Laporan keuangan ini disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71 Tahun 2010), terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini disertai lampiran-lampiran berbentuk daftar sebagai referensi terhadap pos-pos laporan keuangan utama maupun catatan atas laporan keuangan.

Pelaporan keuangan ini disusun secara *double entries* atas seluruh pendapatan/penerimaan dan belanja/pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran.

4.5.1 Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi) selama satu periode akuntansi. Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasi dan fungsi disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan pada bagian Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.

4.5.2 Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
- e. Lain-lain;
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.3 Kebijakan Akuntansi atas Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2024.

Klasifikasi aset meliputi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan. Aset non lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Klasifikasi kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Klasifikasi ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar (termasuk SiLPA), ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

4.5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional;
- c. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
- d. Pos luar biasa, bila ada; dan
- e. Surplus/defisit-LO.

4.5.5 Kebijakan Akuntansi atas Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan, yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran. Penyajian laporan arus kas menggunakan metode langsung, yaitu mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

4.5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - 1) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
- c. Ekuitas akhir.



BAB V

PENJELASAN AKUN - AKUN LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah konsolidasi dari laporan keuangan SKPD/BLUD sebagai entitas akuntansi. Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Seluruh angka anggaran dalam penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran di bawah ini adalah angka-angka APBD setelah Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2024.

5.1 Rincian dan Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan- LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

5.1.1. Pendapatan – LRA	2024	2023
	Rp1.930.340.243.696,23	Rp1.872.487.105.528,68

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Anggaran pendapatan TA 2024 sebesar Rp1.924.405.965.518,00 sebagaimana tertuang dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024, dan Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo TA 2024. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp1.930.340.243.696,23 atau 100,31% dari anggaran yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

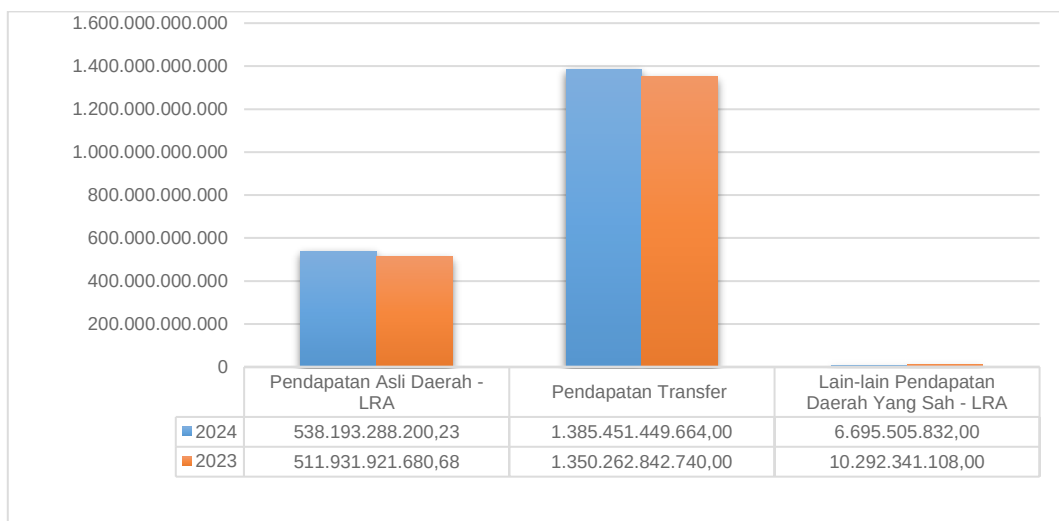
Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Asli Daerah - LRA	516.532.987.548,00	538.193.288.200,23	104,19	511.931.921.680,68
Pendapatan Transfer	1.406.269.839.970,00	1.385.451.449.664,00	98,52	1.350.262.842.740,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA	1.603.138.000,00	6.695.505.832,00	417,65	10.292.341.108,00
Jumlah	1.924.405.965.518,00	1.930.340.243.696,23	100,31	1.872.487.105.528,68

Penerimaan Pendapatan TA 2024 apabila dibandingkan dengan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp57.853.138.167,55 atau 3,09%, kenaikan tersebut dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,13% dan Pendapatan Transfer sebesar 2,61%, namun demikian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar 34,95%.

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
Pendapatan Asli Daerah - LRA	538.193.288.200,23	511.931.921.680,68	5,13	26.261.366.519,55
Pendapatan Transfer	1.385.451.449.664,00	1.350.262.842.740,00	2,61	35.188.606.924,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA	6.695.505.832,00	10.292.341.108,00	-34,95	-3.596.835.276,00
Jumlah	1.930.340.243.696,23	1.872.487.105.528,68	3,09	57.853.138.167,55

Grafik 1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan 2023



5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

2024

2023

538.193.288.200,23

511.931.921.680,68

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh langsung oleh Pemerintah daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri dan digunakan



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang terdiri dari Pajak daerah, retribusi, hasil kekayaan daerah dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi Penerimaan PAD TA 2024 sebesar Rp538.193.288.200,23 atau 104,19% dari target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD-P TA 2024 sebesar Rp516.532.987.548,00. Pencapaian realisasi Penerimaan PAD berasal dari pelampauan atas target Pendapatan Pajak Daerah sebesar 104,48% Pendapatan Retribusi sebesar 110,64% Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dengan realisasi sebesar 113,32% yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal.

Tabel 20 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Pajak Daerah	437.626.291.107,00	457.233.185.366,00	104,48	432.906.096.022,00
Pendapatan Retribusi Daerah	49.085.884.000,00	54.310.658.591,00	110,64	4.232.976.524,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.219.035.031,00	11.580.368.337,00	113,32	11.012.325.878,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19.601.777.410,00	15.069.075.906,23	76,88	63.780.523.256,68
Jumlah	516.532.987.548,00	538.193.288.200,23	104,19	511.931.921.680,68

Penerimaan PAD TA 2024 apabila dibandingkan dengan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp26.261.366.519,55 atau 5,13%. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan Pendapatan Pajak Daerah sebesar 5,62%, Kenaikan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5,16% dan Kenaikan Retribusi Daerah sebesar 1.183,04% disebabkan oleh perubahan nomenklatur pendapatan BLUD yang semula dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menjadi pendapatan Retribusi Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
Pendapatan Pajak Daerah	457.233.185.366,00	432.906.096.022,00	5,62	24.327.089.344,00
Pendapatan Retribusi Daerah	54.310.658.591,00	4.232.976.524,00	1.183,04	50.077.682.067,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.580.368.337,00	11.012.325.878,00	5,16	568.042.459,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang	15.069.075.906,23	63.780.523.256,68	(76,37)	(48.711.447.350,45)
Jumlah	538.193.288.200,23	511.931.921.680,68	5,13	26.261.366.519,55

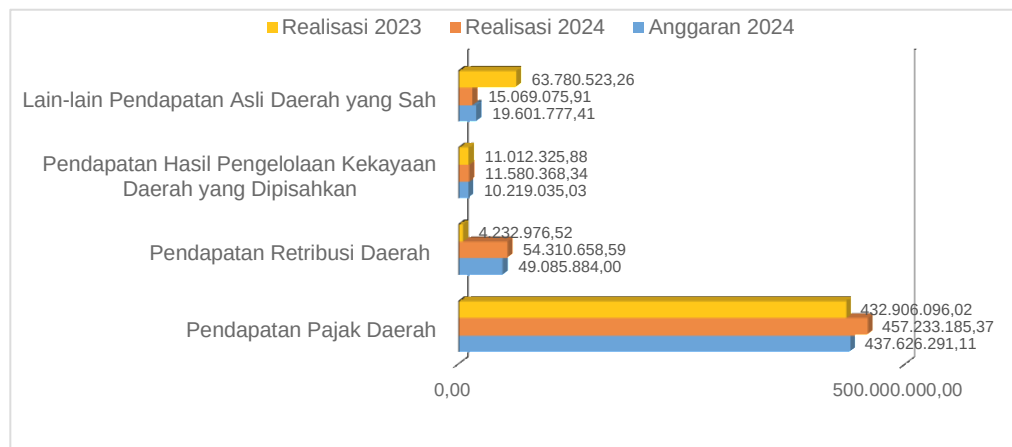
5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

2024	2023
457.233.185.366,00	432.906.096.022,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Grafik 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023



Menurut Ketentuan Umum pada Bab 1 Pasal 1 point 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk TA 2024 sebesar Rp457.233.185.366,00 atau 104,48% dari anggaran sebesar Rp437.626.291.107,00 dan untuk TA 2023 sebesar Rp432.906.096.022,00 dengan objek pendapatan pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 21 Tabel Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Pajak Kendaraan Bermotor	126.769.436.557,00	147.267.347.662,00	116,17	133.786.845.075,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	119.439.094.715,00	113.408.639.305,00	94,95	112.032.844.226,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	91.018.442.069,00	100.997.569.265,00	110,96	96.470.314.759,00
Pajak Air Permukaan	223.492.231,00	224.487.221,00	100,45	149.942.801,00
Pajak Rokok	100.175.825.535,00	95.335.141.913,00	95,17	90.466.149.161,00
Jumlah	437.626.291.107,00	457.233.185.366,00	104,48	432.906.096.022,00

Dari realisasi penerimaan bruto Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp457.233.185.366,00, realisasi penerimaan neto setelah dikurangi insentif pemungutan pajak daerah adalah sebesar Rp449.121.066.083,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Penerimaan Bruto	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Penerimaan Netto
Pajak Kendaraan Bermotor	147.267.347.662,00	3.241.839.706,00	144.025.507.956,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	113.408.639.305,00	2.957.364.630,00	110.451.274.675,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	100.997.569.265,00	1.912.914.947,00	99.084.654.318,00
Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	224.487.221,00	0,00	224.487.221,00
Pajak Rokok	95.335.141.913,00	0,00	95.335.141.913,00
Jumlah	457.233.185.366,00	8.112.119.283,00	449.121.066.083,00

Pendapatan Pajak Daerah mengalami peningkatan dibandingkan TA 2023 sebesar Rp24.327.089.344,00 atau 5,62%. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan realisasi penerimaan pada Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 10,08%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 1,23%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 4,69%, Pajak Air Permukaan sebesar 49,72%, dan Pajak Rokok sebesar 5,38% dari target yang telah ditetapkan pada Perubahan APBD TA 2024. Peningkatan nilai pendapatan pajak daerah disebabkan kepatuhan pembayaran pajak oleh WP.

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
Pajak Kendaraan Bermotor	147.267.347.662,00	133.786.845.075,00	10,08	13.480.502.587,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	113.408.639.305,00	112.032.844.226,00	1,23	1.375.795.079,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	100.997.569.265,00	96.470.314.759,00	4,69	4.527.254.506,00
Pajak Air Permukaan	224.487.221,00	149.942.801,00	49,72	74.544.420,00
Pajak Rokok	95.335.141.913,00	90.466.149.161,00	5,38	4.868.992.752,00
Jumlah	457.233.185.366,00	432.906.096.022,00	5,62	24.327.089.344,00

5.1.1.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor

2024

2023

147.267.347.662,00

133.786.845.075,00

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 1 point 19 adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor untuk TA 2024 sebesar Rp147.267.347.662,00 atau 116.17% dari anggaran sebesar Rp126.769.436.557,00 dan untuk TA 2023 sebesar Rp133.786.845.075,00 dengan objek pendapatan pajak daerah sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 22 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.137.042.138,00	1.002.380.383,00	88,16	772.882.645,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	6.221.655.605,00	5.599.331.369,00	90,00	5.198.346.759,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	33.981.995.374,00	62.750.644.906,00	184,66	57.274.608.061,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	5.541.943,00	120.500,00	2,17	0,00
PKB-Mobil Bus-Bus	304.760.118,00	193.687.527,00	63,55	175.944.880,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	26.247.326.683,00	21.536.182.158,00	82,05	19.791.800.937,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	11.491.427.434,00	9.077.543.604,00	78,99	9.359.649.727,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.562.588.872,00	2.162.817.506,00	60,71	2.419.646.750,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	255.625.717,00	231.688.908,00	90,64	219.402.073,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	43.468.541.173,00	44.627.830.856,00	102,67	38.499.815.633,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	90.931.500,00	84.727.945,00	93,18	71.782.860,00
PKB-Mobil Roda Tiga	2.000.000,00	392.000,00	19,60	2.964.750,00
Jumlah	126.769.436.557,00	147.267.347.662,00	116,17	133.786.845.075,00

Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan dibandingkan TA 2023 sebesar Rp13.480.502.587,00 atau 10,08%. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan realisasi penerimaan pada PKB-Mobil Bus-Microbus sebesar 100%, PKB-Mobil Penumpang-Sedan sebesar 29,69%, PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga sebesar 18,03%, PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebesar 15,92%, dan PKB-Mobil Penumpang-Minibus sebesar 9,56% dari target yang telah ditetapkan pada Perubahan APBD TA 2024. Peningkatan nilai pendapatan pajak daerah disebabkan kepatuhan pembayaran pajak oleh WP.

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.002.380.383,00	772.882.645,00	29,69	229.497.738,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	5.599.331.369,00	5.198.346.759,00	7,71	400.984.610,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	62.750.644.906,00	57.274.608.061,00	9,56	5.476.036.845,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	120.500,00	0,00	100,00	120.500,00
PKB-Mobil Bus-Bus	193.687.527,00	175.944.880,00	10,08	17.742.647,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	21.536.182.158,00	19.791.800.937,00	8,81	1.744.381.221,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	9.077.543.604,00	9.359.649.727,00	-3,01	-282.106.123,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	2.162.817.506,00	2.419.646.750,00	-10,61	-256.829.244,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	231.688.908,00	219.402.073,00	5,60	12.286.835,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	44.627.830.856,00	38.499.815.633,00	15,92	6.128.015.223,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	84.727.945,00	71.782.860,00	18,03	12.945.085,00
PKB-Mobil Roda Tiga	392.000,00	2.964.750,00	-86,78	-2.572.750,00
Jumlah	147.267.347.662,00	133.786.845.075,00	10,08	13.480.502.587,00

5.1.1.1.1.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2024	2023
113.408.639.305,00	112.032.844.226,00

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pasal 1 point 20 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk TA 2024 sebesar Rp113.408.639.305,00 atau 94,95% dari anggaran sebesar Rp119.439.094.715,00 dan untuk TA 2023 sebesar Rp112.032.844.226,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	180.279.337,00	369.125.000,00	204,75	113.084.200,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	10.090.380.273,00	3.504.468.750,00	34,73	2.960.555.276,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	37.301.224.843,00	36.867.068.770,00	98,84	35.319.678.270,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	500.000,00	0,00	0,00	0,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	139.353.553,00	215.237.500,00	154,45	158.184.550,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	13.073.879.223,00	14.443.585.890,00	110,48	15.781.845.500,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	4.687.918.125,00	1.440.413.820,00	30,73	2.155.577.920,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1.012.813.299,00	1.293.100.000,00	127,67	3.599.321.840,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	181.574.180,00	245.375.000,00	135,14	42.750.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	52.293.171.882,00	54.730.987.075,00	104,66	51.478.584.170,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	477.500.000,00	297.502.500,00	62,30	418.300.000,00
BBNKB-Mobil Roda Tiga	500.000,00	1.775.000,00	355,00	4.962.500,00
Jumlah	119.439.094.715,00	113.408.639.305,00	94,95	112.032.844.226,00

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami peningkatan dibandingkan TA 2023 sebesar Rp1.375.795.079,00 atau 1,23%. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan realisasi penerimaan pada BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van sebesar 473,98%, BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan sebesar 226,42%, BBNKB-Mobil Bus-Bus sebesar 36,07%, BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep sebesar 18,37%, BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebesar 6,32%, dan BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus sebesar 4,38% dari target yang telah ditetapkan pada Perubahan APBD TA 2024. Peningkatan nilai pendapatan pajak daerah disebabkan kepatuhan pembayaran pajak oleh WP. Pada TA i2024 terdapat pula penurunan secara signifikan baik dari persentase maupun nilai keuangan yang diterima yaitu Penerimaan Pajak BBNKB yaitu BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebesar 64,07% dan BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck sebesar 33,18 % dan BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 8,48%.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	369.125.000,00	113.084.200,00	226,42	256.040.800,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	3.504.468.750,00	2.960.555.276,00	18,37	543.913.474,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	36.867.068.770,00	35.319.678.270,00	4,38	1.547.390.500,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	0,00	0,00	0,00	0,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	215.237.500,00	158.184.550,00	36,07	57.052.950,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	14.443.585.890,00	15.781.845.500,00	-8,48	-1.338.259.610,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	1.440.413.820,00	2.155.577.920,00	-33,18	-715.164.100,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1.293.100.000,00	3.599.321.840,00	-64,07	-2.306.221.840,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	245.375.000,00	42.750.000,00	473,98	202.625.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	54.730.987.075,00	51.478.584.170,00	6,32	3.252.402.905,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	297.502.500,00	418.300.000,00	-28,88	-120.797.500,00
BBNKB-Mobil Roda Tiga	1.775.000,00	4.962.500,00	-64,23	-3.187.500,00
Jumlah	113.408.639.305,00	112.032.844.226,00	1,23	1.375.795.079,00

5.1.1.1.1.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2024	2023
100.997.569.265,00	96.470.314.759,00

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 1 point 29 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk TA 2024 sebesar Rp100.997.569.265,00 atau 110,96% dari anggaran sebesar Rp91.018.442.069,00 dan untuk TA 2023 sebesar Rp96.470.314.759,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	500.000,00	0,00	0,00	0,00
PBBKB-Bahan Bakar Solar	500.000,00	0,00	0,00	0,00
PBBKB-Bahan Bakar Gas	500.000,00	0,00	0,00	0,00
PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	91.016.942.069,00	100.997.569.265,00	110,96	96.470.314.759,00
Jumlah	91.018.442.069,00	100.997.569.265,00	110,96	96.470.314.759,00

Dasar pengenaan PBBKB merupakan nilai jual bahan bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mengalami peningkatan dibandingkan TA 2023 sebesar Rp4.527.254.506,00 atau 4,69%. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan realisasi penerimaan pada PBBKB-Bahan Bakar Lainnya sebesar 4,69%, yaitu pendapatan pajak atas penggunaan



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bahan bakar kendaraan bermotor selain bensin, solar, dan gas.

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	0,00	0,00	0,00	0,00
PBBKB-Bahan Bakar Solar	0,00	0,00	0,00	0,00
PBBKB-Bahan Bakar Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	100.997.569.265,00	96.470.314.759,00	4,69	4.527.254.506,00
Jumlah	100.997.569.265,00	96.470.314.759,00	4,69	4.527.254.506,00

5.1.1.1.1.4	Pajak Air Permukaan	2024	2023
		224.487.221,00	149.942.801,00

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 1 point 38 Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dasar pengenaan PAP merupakan nilai perolehan Air Permukaan yaitu hasil perkalian antara harga dasar dengan bobot Air Permukaan. Realisasi Pajak Air Permukaan untuk TA 2024 sebesar Rp224.487.221,00 atau 100,45% dari anggaran sebesar Rp223.492.231,00 dan untuk TA 2023 sebesar Rp149.942.801,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Pajak Air Permukaan	223.492.231,00	224.487.221,00	100,45	149.942.801,00
Jumlah	223.492.231,00	224.487.221,00	100,45	149.942.801,00

Pajak Air Permukaan mengalami peningkatan dibandingkan TA 2023 sebesar Rp74.544.420 atau 49,72%. Peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak Air Permukaan yaitu Perusahaan Daerah Air Minum, PT. PG Gorontalo dan PT Sumber Energi Lestari PLTM Taludaa.

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
Pajak Air Permukaan	224.487.221,00	149.942.801,00	49,72	74.544.420,00
Jumlah	224.487.221,00	149.942.801,00	49,72	74.544.420,00

5.1.1.1.1.5	Pajak Rokok	2024	2023
		95.335.141.913,00	90.466.149.161,00

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 1 point 40 Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Realisasi Pajak Rokok untuk TA 2024 sebesar Rp95.335.141.913,00 atau



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

95,17% dari anggaran sebesar Rp100.175.825.535,00 dan untuk TA 2023 sebesar Rp90.466.149.161,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Pajak Rokok	100.175.825.535,00	95.335.141.913,00	95,17	90.466.149.161,00
Jumlah	100.175.825.535,00	95.335.141.913,00	95,17	90.466.149.161,00

Pajak Rokok mengalami peningkatan dibandingkan TA 2023 sebesar Rp4.868.992.752,00 atau 5,38%. Dasar pengenaan Pajak Rokok berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, Dan Penyetoran Pajak Rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok.

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
Pajak Rokok	95.335.141.913,00	90.466.149.161,00	5,38	4.868.992.752,00
Jumlah	95.335.141.913,00	90.466.149.161,00	5,38	4.868.992.752,00

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	2024	2023
	54.310.658.591,00	4.232.976.524,00

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berupa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp54.310.658.591,00 atau 110,64% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp49.085.884.000,00 dengan rincian jenis retribusi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Retribusi Jasa Umum	46.148.924.000,00	52.950.824.152,00	114,74	2.564.050.000,00
Retribusi Jasa Usaha	2.936.960.000,00	1.359.834.439,00	46,30	1.668.926.524,00
Jumlah	49.085.884.000,00	54.310.658.591,00	110,64	4.232.976.524,00

Tercapainya target Pendapatan Retribusi Daerah disebabkan adanya pelampauan realisasi objek Retribusi Jasa Umum sebesar 114,74%. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 menunjukkan adanya peningkatan realisasi penerimaan sebesar Rp50.077.682.067,00 atau 1.183,04%. Hal tersebut karena peningkatan Retribusi Jasa Umum sebesar 1.965,12% yang disebabkan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr Hasri Ainun Habibie sebesar 7.479,96% pada



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TA 2023 dicatat pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan pada TA 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dikelompokkan sebagai Retribusi Jasa Umum, dengan rincian pada tabel berikut:

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
Retribusi Jasa Umum	52.950.824.152,00	2.564.050.000,00	1.965,12	50.386.774.152,00
Retribusi Jasa Usaha	1.359.834.439,00	1.668.926.524,00	100,00	(309.092.085,00)
Jumlah	54.310.658.591,00	4.232.976.524,00	1.183,04	50.077.682.067,00

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

2024	2023
52.950.824.152,00	2.564.050.000,00

Retribusi Jasa Umum sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2024 sebesar Rp52.950.824.152,00 atau 114,74% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp46.148.924.000,00 dengan rincian jenis retribusi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	46.098.924.000,00	51.142.155.344,00	110,94	674.702.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	50.000.000,00	1.808.668.808,00	3.617,34	0,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	1.889.348.000,00
Jumlah	46.148.924.000,00	52.950.824.152,00	114,74	2.564.050.000,00

Realisasi Retribusi Jasa Umum bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 menunjukkan adanya peningkatan realisasi penerimaan sebesar Rp50.386.774.152,00 atau 1.965,12%. Hal tersebut disebabkan karena Pendapatan BLUD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie TA 2024 dikelompokkan sebagai Retribusi Pelayanan Kesehatan dan pada TA 2023 dikelompokkan sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Demikian pula dengan pendapatan atas pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir sampah Talumelito, pada TA 2023 dikelompokkan pada Lain-lain PAD yang Sah-Hasil Kerjasama Daerah, dan pada TA 2024 dikelompokkan sebagai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Namun demikian penurunan penerimaan terjadi pada Retribusi Pelayanan Pendidikan sebesar 100,00%, karena sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Retribusi Pelayanan Pendidikan sudah tidak masuk sebagai kelompok Retribusi Jasa Umum pada Pemerintah Daerah dengan rincian pada tabel berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
Retribusi Pelayanan Kesehatan	51.142.155.344,00	674.702.000,00	7.479,96	50.467.453.344,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.808.668.808,00	0,00	100,00	1.808.668.808,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	1.889.348.000,00	(100,00)	(1.889.348.000,00)
Jumlah	52.950.824.152,00	2.564.050.000,00	1.965,12	50.386.774.152,00

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

2024	2023
1.359.834.439,00	1.668.926.524,00

Retribusi Jasa Usaha sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2024 sebesar Rp1.359.834.439,00 atau 46,30% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp2.936.960.000,00 dengan rincian jenis retribusi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	920.000.000,00	515.012.063,00	55,98	509.593.374,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	616.960.000,00	343.091.350,00	55,61	400.147.150,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	950.000.000,00	283.967.000,00	29,89	759.186.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	57.000.000,00	31.811.350,00	55,81	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	393.000.000,00	185.952.676,00	47,32	0,00
Jumlah	2.936.960.000,00	1.359.834.439,00	46,30	1.668.926.524,00

Realisasi Retribusi Jasa Usaha bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 menunjukkan adanya penurunan realisasi penerimaan sebesar Rp309.092.085,00 atau 18,52%. Hal tersebut disebabkan karena penurunan penerimaan terjadi pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebesar 14,26% dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 62,60% dengan rincian pada tabel berikut:

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	515.012.063,00	509.593.374,00	1,06	5.418.689,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	343.091.350,00	400.147.150,00	(14,26)	(57.055.800,00)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	283.967.000,00	759.186.000,00	(62,60)	(475.219.000,00)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	31.811.350,00	0,00	100,00	31.811.350,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	185.952.676,00	0,00	100,00	185.952.676,00
Jumlah	1.359.834.439,00	1.668.926.524,00	(18,52)	(309.092.085,00)



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2024	2023
	11.580.368.337,00	11.012.325.878,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang meliputi bagian laba atas penyertaan modal BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan swasta. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa bagian laba/dividen atas penyertaan modal pemerintah daerah untuk TA 2024 sebesar Rp11.580.368.337,00 atau 113,32% dari anggaran sebesar Rp10.219.035.031,00 dan untuk TA 2023 sebesar Rp11.012.325.878,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Bagian Laba atas penyertaan Modal pada Bank SulutGo	10.219.035.031,00	11.580.368.337,00	113,32	11.012.325.878,00
Jumlah	10.219.035.031,00	11.580.368.337,00	113,32	11.012.325.878,00

Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan penyertaan modal pada PT. Bank SulutGo dan memperoleh bagian laba (dividen) pada TA 2024 sebesar Rp11.580.368.337,00 berupa dividen tunai sesuai Akta RUPS Nomor 01 Tahun 2024. Penerimaan dividen tunai tersebut merupakan pembagian dividen berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank SulutGo atas kinerja Tahun 2024, sesuai surat PT Bank SulutGo Nomor 082/A/AKT/DIR/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Posisi Modal Disetor Setelah RUPS 5 Februari 2024.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah	2024	2023
	15.069.075.906,23	63.780.523.256,68

Lain-Lain PAD yang Sah digunakan untuk pendapatan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan lain-lain. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar Rp15.069.075.906,23 atau 76,88% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp19.601.777.410,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 lebih kecil dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp49.498.514.350,45 atau turun 76,88%. Rincian realisasi Lain-Lain PAD yang Sah sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 23 Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	787.067.000,00	100,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	499.250.044,00	249,63	370.421.084,00
Hasil Kerja Sama Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	2.012.548.943,00
Jasa Giro	6.750.000.000,00	1.762.371.257,00	26,11	2.969.255.235,20
Pendapatan Bunga	5.077.777.410,00	3.504.794.630,00	69,02	5.794.880.704,80
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.000.000.000,00	3.497.486.209,23	349,75	4.429.427.948,68
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000,00	0,00	0,00	77.976.269,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.464.000.000,00	5.018.106.766,00	203,66	1.488.643.469,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	4.058.000.000,00	0,00	0,00	944.311.869,00
Pendapatan dari BLUD	0,00	0,00	0,00	45.693.057.734,00
Remunerasi	0,00	0,00	100,00	0,00
Jumlah	19.601.777.410,00	15.069.075.906,23	76,88	63.780.523.256,68

Penurunan realisasi Lain-lain PAD yang Sah disebabkan adanya pengelompokan Pendapatan dari BLUD TA 2024 dicatat sebagai Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan, tidak adanya realisasi Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan, Hasil Kerjasama Daerah dan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan sebesar 100,00%, Pendapatan Jasa Giro sebesar 40,65%, Pendapatan Bunga sebesar 39,52%, dan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah 21,04%.

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	787.067.000,00	0,00	100,00	787.067.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	499.250.044,00	370.421.084,00	34,78	128.828.960,00
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	2.012.548.943,00	(100,00)	(2.012.548.943,00)
Jasa Giro	1.762.371.257,00	2.969.255.235,20	(40,65)	(1.206.883.978,20)
Pendapatan Bunga	3.504.794.630,00	5.794.880.704,80	(39,52)	(2.290.086.074,80)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.497.486.209,23	4.429.427.948,68	(21,04)	(931.941.739,45)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	77.976.269,00	(100,00)	(77.976.269,00)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.018.106.766,00	1.488.643.469,00	237,09	3.529.463.297,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	944.311.869,00	(100,00)	(944.311.869,00)
Pendapatan dari BLUD	0,00	45.693.057.734,00	(100,00)	(45.693.057.734,00)
Remunerasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	15.069.075.906,23	63.780.523.256,68	(76,37)	(48.711.447.350,45)

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

2024	2023
787.067.000,00	0,00

Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Ini termasuk penjualan aset



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

yang telah dihapus, seperti penjualan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya. Hasil penjualan ini tidak termasuk dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan TA 2024 sebesar Rp787.067.000,00. dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	787.067.000,00	100,00	0,00
Jumlah	0,00	787.067.000,00	100,00	0,00

Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan berasal dari penerimaan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain yaitu hasil lelang atas penjualan kapal milik Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh KPKNL Pontianak.

5.1.1.1.4.2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

2024	2023
499.250.044,00	370.421.084,00

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah meliputi hasil sewa BMD, hasil kerjasama pemanfaatan BMD. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp499.250.044,00 atau 249,63% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp200.000.000,00 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Hasil Sewa BMD	50.000.000,00	336.014.300,00	672,03	370.421.084,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	150.000.000,00	163.235.744,00	108,82	0,00
Jumlah	200.000.000,00	499.250.044,00	249,63	370.421.084,00

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 menunjukkan adanya kenaikan realisasi penerimaan sebesar Rp128.828.960,00 atau 34,78%. Hal tersebut disebabkan karena adanya Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD yang berasal dari Setoran Pendapatan Pabrik Es pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan rincian pada tabel berikut:

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
Hasil Sewa BMD	336.014.300,00	370.421.084,00	(9,29)	(34.406.784,00)
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	163.235.744,00	0,00	100,00	163.235.744,00
Jumlah	499.250.044,00	370.421.084,00	34,78	128.828.960,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.1.4.3 Hasil Kerja Sama Daerah

2024	2023
0,00	2.012.548.943,00

Hasil Kerja Sama Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi Hasil Kerjasama Daerah dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp50.000.000,00. Dibandingkan dengan TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp2.012.548.943,00 yang berasal setoran penerimaan TPA Talumelito yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sudah dikelompokkan menjadi Retribusi Jasa Umum - Retribusi Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah. Rincian realisasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Hasil Kerja Sama Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	2.012.548.943,00
Jumlah	50.000.000,00	0,00	0,00	2.012.548.943,00

5.1.1.1.4.4 Jasa Giro

2024	2023
1.762.371.257,00	2.969.255.235,20

Jasa Giro merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai imbal hasil atau suku bunga yang diterima nasabah pemilik rekening giro oleh bank. Realisasi Jasa Giro TA 2024 sebesar Rp1.762.371.257,00 atau 26,11% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp6.750.000.000,00 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	1.762.181.971,00	35,24	2.967.321.910,20
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.650.000.000,00	189.286,00	0,01	1.933.325,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.750.000.000,00	1.762.371.257,00	26,11	2.969.255.235,20

Realisasi penerimaan Jasa Giro TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menunjukkan adanya penurunan realisasi penerimaan sebesar Rp1.206.883.978,20 atau 40,65%. Hal tersebut disebabkan karena turunnya penerimaan Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar 40,61% dan Jasa Giro pada Kas di Bendahara 90,21% dengan rincian pada tabel berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.762.181.971,00	2.967.321.910,20	(40,61)	(1.205.139.939,20)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	189.286,00	1.933.325,00	(90,21)	(1.744.039,00)
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.762.371.257,00	2.969.255.235,20	(40,65)	(1.206.883.978,20)

5.1.1.1.4.5 Pendapatan Bunga

2024	2023
3.504.794.630,00	5.794.880.704,80

Pendapatan Bunga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh Pemda dari simpanan dana di bank dalam bentuk deposito atau investasi jangka pendek. Realisasi Pendapatan Bunga TA 2024 sebesar Rp3.504.794.630,00 atau 69,02% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp5.077.777.410,00 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.077.777.410,00	3.504.794.630,00	69,02	5.794.880.704,80
Jumlah	5.077.777.410,00	3.504.794.630,00	69,02	5.794.880.704,80

Realisasi penerimaan Pendapatan Bunga TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menunjukkan adanya penurunan realisasi penerimaan sebesar Rp2.290.086.074,80 atau 39,52%. Hal tersebut disebabkan karena turunnya Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah dengan rincian pada tabel berikut:

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.504.794.630,00	5.794.880.704,80	(39,52)	(2.290.086.074,80)
Jumlah	3.504.794.630,00	5.794.880.704,80	(39,52)	(2.290.086.074,80)

5.1.1.1.4.6 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

2024	2023
3.497.486.209,23	4.429.427.948,68

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah proses pengembalian uang atau aset yang hilang atau rusak karena tindakan melanggar hukum atau kelalaian oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, bertujuan untuk memulihkan kekayaan pemerintah daerah yang mengalami kerugian. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2024 sebesar Rp3.497.486.209,23 atau 349,75% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan rincian realisasi sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri	500.000.000,00	3.497.486.209,23	699,50	4.419.427.948,68
Jumlah	1.000.000.000,00	3.497.486.209,23	349,75	4.429.427.948,68

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menunjukkan adanya penurunan realisasi penerimaan sebesar Rp931.941.739,45 atau 21,04%. Hal tersebut disebabkan karena turunnya penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar 20,86% dan tidak adanya realisasi penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dengan rincian pada tabel berikut:

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	10.000.000,00	(100,00)	(10.000.000,00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.497.486.209,23	4.419.427.948,68	(20,86)	(921.941.739,45)
Jumlah	3.497.486.209,23	4.429.427.948,68	(21,04)	(931.941.739,45)

5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2024	2023
	0,00	77.976.269,00

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp1.000.000,00. Dibandingkan dengan TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp77.976.269,00 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000,00	0,00	0,00	77.976.269,00
Jumlah	1.000.000,00	0,00	0,00	77.976.269,00

5.1.1.1.4.8 Pendapatan Denda Pajak Daerah	2024	2023
	5.018.106.766,00	1.488.643.469,00

Pendapatan Denda Pajak Daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah akibat keterlambatan atau tidak tepat waktu pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak yang merupakan sanksi administratif yang dikenakan sebagai konsekuensi dari tidak dipatuhinya kewajiban membayar pajak tepat waktu. Realisasi Pendapatan denda pajak



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

daerah TA 2024 sebesar Rp5.018.106.766 atau 203,66% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp2.464.000.000,00. Pelampauan realisasi disebabkan karena adanya pelampauan realisasi Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 262,17 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.788.000.000,00	4.687.598.356,00	262,17	1.255.561.869,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	676.000.000,00	330.508.410,00	48,89	233.081.600,00
Jumlah	2.464.000.000,00	5.018.106.766,00	203,66	1.488.643.469,00

Realisasi penerimaan atas Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menunjukkan adanya kenaikan realisasi penerimaan sebesar Rp3.529.463.297,00 atau 237,09%. Hal tersebut disebabkan karena kenaikan penerimaan Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 273,35% dengan rincian pada tabel berikut:

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.687.598.356,00	1.255.561.869,00	273,35	3.432.036.487,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	330.508.410,00	233.081.600,00	41,80	97.426.810,00
Jumlah	5.018.106.766,00	1.488.643.469,00	237,09	3.529.463.297,00

5.1.1.1.4.9 Pendapatan Denda Retribusi Daerah

2024

0,00

2023

0,00

Pendapatan Denda Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari sanksi berupa bunga atau denda karena keterlambatan pembayaran retribusi daerah. Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi Pendapatan Denda atas Retribusi Daerah dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA.2024 sebesar Rp1.000.000,00. Demikian pula dengan TA 2023 tidak terdapat realisasi dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian	2024	2023
	0,00	944.311.869,00

Penerimaan atas Pendapatan dari Pengembalian merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti pendapatan yang diperoleh dari pengembalian kelebihan pembayaran, seperti kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, atau kelebihan pembayaran perjalanan dinas. Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi Pendapatan dari Pengembalian dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp4.058.000.000,00 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	908.094.369,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	40.000.000,00	0,00	0,00	36.217.500,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.018.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.058.000.000,00	0,00	0,00	944.311.869,00

Realisasi Penerimaan atas Pendapatan dari Pengembalian TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menunjukkan adanya penurunan realisasi penerimaan sebesar Rp944.311.869,00 atau 100%. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas TA 2024 dengan rincian pada tabel berikut:

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	908.094.369,00	(100,00)	(908.094.369,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	36.217.500,00	(100,00)	(36.217.500,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	944.311.869,00	(100,00)	(944.311.869,00)

5.1.1.1.4.11 Pendapatan BLUD	2024	2023
	0,00	45.693.057.734,00

Pendapatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) berasal dari berbagai sumber, utama dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Tahun Anggaran 2024 Pendapatan BLUD berasal dari Pendapatan BLUD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie telah dikelompokkan sebagai Retribusi Jasa Umum - Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan nilai realisasi Rp50.401.807.344,00 dan pada TA 2023 dikelompokkan sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp45.693.057.734,00. Pengelompokan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dikelompokkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	45.693.057.734,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	45.693.057.734,00

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

2024	2023
1.385.451.449.664,00	1.350.262.842.740,00

Realisasi Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat baik peruntukannya sudah ditentukan maupun bebas digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 sebesar Rp1.385.451.449.664 atau 98,52% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp1.406.269.839.970,00. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 lebih besar dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp35.188.606.924,00 atau naik 2,61% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.398.586.957.970,00	1.377.768.567.664,00	98,51	1.319.817.497.740,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00	30.445.345.000,00
Insentif Fiskal	7.682.882.000,00	7.682.882.000,00	100,00	0,00
Jumlah	1.406.269.839.970,00	1.385.451.449.664,00	98,52	1.350.262.842.740,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

2024	2023
1.377.768.567.664,00	1.319.817.497.740,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp1.377.768.567.664,00 atau 98,51% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 yaitu sebesar Rp1.398.586.957.970,00. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:



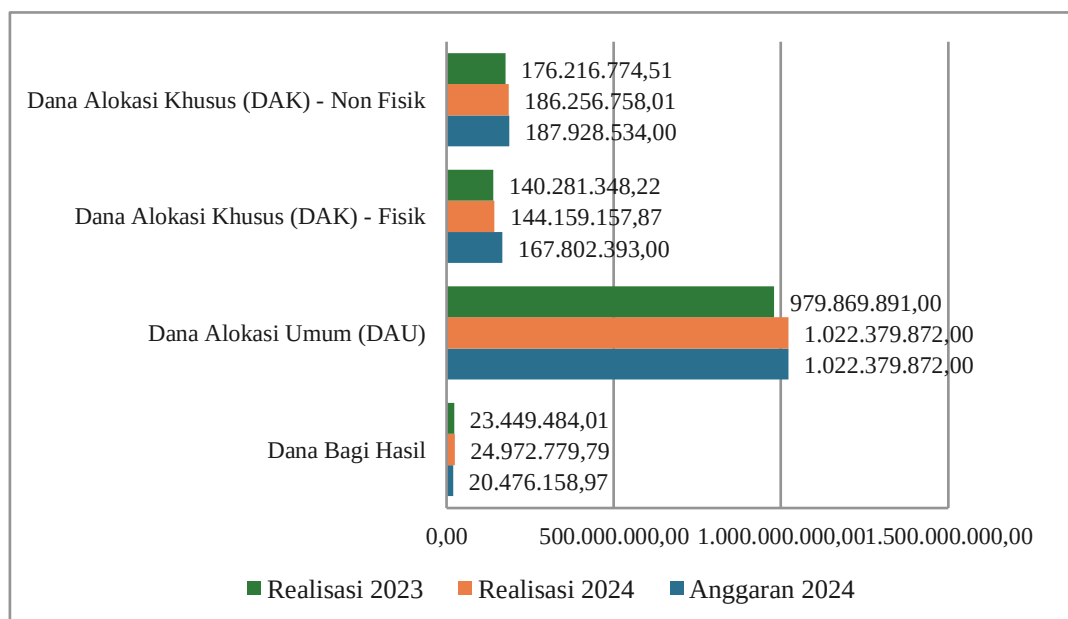
Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Dana Bagi Hasil	20.476.158.970,00	24.972.779.787,00	121,96	23.449.484.007,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.022.379.872.000,00	1.022.379.872.000,00	100,00	979.869.891.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	167.802.393.000,00	144.159.157.866,00	85,91	140.281.348.223,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik	187.928.534.000,00	186.256.758.011,00	99,11	176.216.774.510,00
Jumlah	1.398.586.957.970,00	1.377.768.567.664,00	98,51	1.319.817.497.740,00

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menunjukkan adanya kenaikan realisasi penerimaan sebesar Rp57.972.390.627,00 atau 4,39%. Hal tersebut disebabkan karena Kenaikan Dana Bagi Hasil sebesar 6,50%, Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar 5,70%, Dana Alokasi Umum

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
Dana Bagi Hasil	24.972.779.787,00	23.449.484.007,00	6,50	1.523.295.780,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.022.379.872.000,00	979.869.891.000,00	4,34	42.509.981.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	144.159.157.866,00	140.281.348.223,00	2,76	3.877.809.643,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik	186.256.758.011,00	176.216.774.510,00	5,70	10.039.983.501,00
Jumlah	1.377.768.567.664,00	1.319.817.497.740,00	4,39	57.951.069.924,00

Grafik 3 Perbandingan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan Tahun 2024 dan 2023





Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

2024	2023
24.972.779.787,00	23.449.484.007,00

Realisasi Transfer Dana Bagi Hasil TA 2024 adalah sebesar Rp24.972.779.787,00 atau 121,96% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 yaitu sebesar Rp20.476.158.970,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 25 Realisasi Transfer Dana Bagi Hasil Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Dana Bagi Hasil Pajak	16.486.229.000,00	20.258.287.787,00	122,88	19.979.330.007,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.989.929.970,00	4.714.492.000,00	118,16	3.470.154.000,00
Jumlah	20.476.158.970,00	24.972.779.787,00	121,96	23.449.484.007,00

Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menunjukkan adanya peningkatan realisasi penerimaan sebesar Rp1.523.295.78000 atau 6,50% yang disebabkan oleh peningkatan realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp1.244.338.000,00 dibandingkan dengan tahun 2023.

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
Dana Bagi Hasil Pajak	20.258.287.787,00	19.979.330.007,00	0,00	278.957.780,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.714.492.000,00	3.470.154.000,00	0,00	1.244.338.000,00
Jumlah	24.972.779.787,00	23.449.484.007,00	6,50	1.523.295.780,00

5.1.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Rp 20.258.287.787,00

Realisasi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp20.258.287.787,00 atau 122,88% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 yaitu sebesar Rp16.486.229.000,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.399.651.000,00	2.199.263.000,00	157,13	1.415.510.000,00
DBH PPh Pasal 21	15.086.001.000,00	17.451.897.587,00	115,68	17.340.769.687,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	607.113.200,00	100,00	1.223.017.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	577.000,00	14.000,00	2,43	33.320,00
Jumlah	16.486.229.000,00	20.258.287.787,00	122,88	19.979.330.007,00

Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menunjukkan adanya peningkatan realisasi penerimaan sebesar



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp278.957.780,00 atau 1,40%. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan atas Bagi Hasil dari Pajak Bumi Bangunan 55,37% dan DBH PPh Pasal 21 sebesar 0,64%, namun demikian terjadi penurunan realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar 50,36% dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 57,98%, dengan rincian pada tabel berikut:

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.199.263.000,00	1.415.510.000,00	55,37	783.753.000,00
DBH PPh Pasal 21	17.451.897.587,00	17.340.769.687,00	0,64	111.127.900,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	607.113.200,00	1.223.017.000,00	(50,36)	(615.903.800,00)
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	14.000,00	33.320,00	(57,98)	(19.320,00)
Jumlah	20.258.287.787,00	19.979.330.007,00	1,40	278.957.780,00

5.1.1.2.1.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam **Rp 4.714.492.000,00**

Realisasi Transfer Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2024 sebesar Rp4.714.492.000,00 atau 118% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 yaitu sebesar Rp3.989.929.970,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	153.997.000,00	221.033.000,00	143,53	110.448.800,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	90.367.200,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	31.136.000,00	412.643.000,00	1.325,29	2.221.632.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	1.755.988.000,00	0,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	2.048.808.970,00	2.324.828.000,00	113,47	1.047.706.000,00
DBH Sawit	0,00	1.755.988.000,00	100,00	0,00
Jumlah	3.989.929.970,00	4.714.492.000,00	118,16	3.470.154.000,00

Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp1.244.338.000,00 atau 35,86%. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan atas DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent sebesar 100,00% DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) sebesar 121,90%, dan DBH Sawit sebesar 100,00%. Namun terdapat penurunan DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty sebesar 100,00% dan



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar 81,43%.

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	221.033.000,00	110.448.800,00	100,12	110.584.200,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	90.367.200,00	(100,00)	(90.367.200,00)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	412.643.000,00	2.221.632.000,00	(81,43)	(1.808.989.000,00)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	0,00	0,00	0,00	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	2.324.828.000,00	1.047.706.000,00	121,90	1.277.122.000,00
DBH Sawit	1.755.988.000,00	0,00	100,00	1.755.988.000,00
Jumlah	4.714.492.000,00	3.470.154.000,00	35,86	1.244.338.000,00

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

2024	2023
1.022.379.872.000,00	979.869.891.000,00

Realisasi Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 sebesar Rp1.022.379.872,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 yaitu sebesar Rp1.022.379.872.000,00. Realisasi DAU TA 2024 lebih besar sebesar Rp42.509.981.000,00 atau naik 4,34% dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.022.379.872.000,00	1.022.379.872.000,00	100,00	979.869.891.000,00
Jumlah	1.022.379.872.000,00	1.022.379.872.000,00	100,00	979.869.891.000,00

Realisasi Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 sebesar Rp1.022.379.872,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Dana Alokasi Umum (DAU)	850.100.923.000,00	850.163.916.967,00	100,01	979.869.891.000,00
Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	519.984.000,00	456.990.033,00	87,89	0,00
Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	126.049.532.000,00	126.049.532.000,00	100,00	0,00
Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	21.570.965.000,00	21.570.965.000,00	100,00	0,00
Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	24.138.468.000,00	24.138.468.000,00	100,00	0,00
Jumlah	1.022.379.872.000,00	1.022.379.872.000,00	100,00	979.869.891.000,00

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus - Fisik

2024	2023
144.159.157.866,00	140.281.348.223,00

Realisasi Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2024 sebesar Rp144.159.157.866,00 atau 85,91% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD-P TA 2024 yaitu sebesar Rp167.802.393.000,00. Hal ini berarti realisasi DAK Fisik



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TA 2024 lebih besar sebesar Rp3.877.809.643,00 atau naik 2,76% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Realisasi DAK adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
DAK Fisik-Bidang Pendidikan	33.286.606.000,00	30.675.892.135,00	92,16	52.185.003.597,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan	76.268.133.000,00	60.534.414.321,00	79,37	0,00
DAK Fisik- Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.706.764.000,00	3.674.786.681,00	99,14	7.937.823.936,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	10.079.501.000,00	9.990.177.697,00	99,11	10.014.699.871,00
DAK Fisik-Bidang Jalan	29.037.850.000,00	28.923.698.630,00	99,61	50.788.646.900,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	15.423.539.000,00	10.360.188.402,00	67,17	19.355.173.919,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan- Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	167.802.393.000,00	144.159.157.866,00	85,91	140.281.348.223,00

Realisasi pendapatan DAK-Fisik bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menunjukkan adanya kenaikan realisasi pendapatan sebesar 2,76%. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan atas pendapatan DAK-Fisik untuk DAK Fisik-Bidang Kesehatan sebesar 100,00%, namun terdapat penurunan DAK Fisik-Bidang Pendidikan sebesar 41,22%, DAK Fisik- Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan sebesar 53,71%, DAK Fisik-Bidang Jalan sebesar 43,05%, dan DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan sebesar 46,47%.

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
DAK Fisik-Bidang Pendidikan	30.675.892.135,00	52.185.003.597,00	(41,22)	(21.509.111.462,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan	60.534.414.321,00	0,00	100,00	60.534.414.321,00
DAK Fisik- Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.674.786.681,00	7.937.823.936,00	(53,71)	(4.263.037.255,00)
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	9.990.177.697,00	10.014.699.871,00	(0,24)	(24.522.174,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan	28.923.698.630,00	50.788.646.900,00	(43,05)	(21.864.948.270,00)
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	10.360.188.402,00	19.355.173.919,00	(46,47)	(8.994.985.517,00)
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan-Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	144.159.157.866,00	140.281.348.223,00	2,76	3.877.809.643,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

2024	2023
186.256.758.011,00	176.216.774.510,00

Realisasi Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2024 sebesar Rp186.256.758.011,00 atau 99,11% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan dari APBD-P TA 2024 yaitu sebesar Rp187.928.534.000,00. Hal ini berarti realisasi DAK TA 2024 lebih besar Rp10.039.983.501,00 atau 5,70% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Kenaikan nilai realisasi DAK Non Fisik diantaranya disebabkan naiknya DAK Non Fisik-TPG PNSD, DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD, DAK Non Fisik-TKG PNSD, dan DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
DAK Non Fisik - BOS	84.262.690.000,00	83.663.987.346,00	99,29	85.407.163.462,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	91.603.199.000,00	91.603.199.000,00	100,00	79.378.947.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.245.424.000,00	2.245.424.000,00	100,00	2.655.976.234,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	154.757.000,00	154.756.456,00	100,00	164.573.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.800.000.000,00	1.636.583.074,00	90,92	1.691.013.608,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.503.067.000,00	2.639.542.773,00	75,35	3.748.440.665,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	2.675.525.000,00	2.650.714.065,00	99,07	1.984.249.995,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.683.872.000,00	1.662.551.297,00	98,73	894.694.204,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	291.716.342,00
Jumlah	187.928.534.000,00	186.256.758.011,00	99,11	176.216.774.510,00

Realisasi pendapatan DAK-Non Fisik bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menunjukkan adanya kenaikan realisasi pendapatan sebesar 5,70%. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan atas pendapatan DAK-Non Fisik untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar 15,40%, DAK Non Fisik-PK2UKM 33,59% dan DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 85,82% namun terdapat penurunan secara signifikan DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 100%, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 29,58% dan DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 15,46%.

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
DAK Non Fisik - BOS	83.663.987.346,00	85.407.163.462,00	(2,04)	(1.743.176.116,00)
DAK Non Fisik-TPG PNSD	91.603.199.000,00	79.378.947.000,00	15,40	12.224.252.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.245.424.000,00	2.655.976.234,00	(15,46)	(410.552.234,00)
DAK Non Fisik-TKG PNSD	154.756.456,00	164.573.000,00	(5,96)	(9.816.544,00)
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.636.583.074,00	1.691.013.608,00	(3,22)	(54.430.534,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.639.542.773,00	3.748.440.665,00	(29,58)	(1.108.897.892,00)
DAK Non Fisik-PK2UKM	2.650.714.065,00	1.984.249.995,00	33,59	666.464.070,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.662.551.297,00	894.694.204,00	85,82	767.857.093,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	291.716.342,00	(100,00)	(291.716.342,00)
Jumlah	186.256.758.011,00	176.216.774.510,00	5,70	10.039.983.501,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	2024	2023
	7.682.882.000,00	30.445.345.000,00

5.1.1.2.2.1. Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Dana Insentif Fiskal adalah Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal. Kategori Kesejahteraan Masyarakat adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di Tahun berjalan meliputi kategori penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah.

Dana Insentif Fiskal Tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp7.682.882.000,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Dana Insentif Fiskal (DIF)	7.682.882.000,00	7.682.882.000,00	100,00	30.445.345.000,00
Jumlah	7.682.882.000,00	7.682.882.000,00	100,00	30.445.345.000,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Dana Insentif Fiskal (DIF) yang diberikan pemerintah pusat untuk TA 2024 sebesar Rp7.682.882.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp7.682.882.000,00 dan untuk TA 2023 sebesar Rp30.445.345.000,00. DIF bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menunjukkan adanya penurunan realisasi penerimaan sebesar Rp22.762.463.000 atau 74,77% disebabkan karena Provinsi Gorontalo hanya mendapatkan alokasi DIF kategori inflasi periode 1 dan 3.

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2024	2023
	6.695.505.832,00	3.762.174.739,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk TA 2024 sebesar Rp6.695.505.832,00 atau 417,65% dari anggaran sebesar Rp1.603.138.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 26 Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Hibah	1.103.138.000,00	6.231.945.832,00	564,93	9.707.761.108,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000,00	463.560.000,00	92,71	584.580.000,00
Jumlah	1.603.138.000,00	6.695.505.832,00	417,65	3.762.174.739,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

2024	2023
6.231.945.832,00	9.707.761.108,00

Realisasi pendapatan hibah untuk TA 2024 merupakan Pendapatan Hibah dari Kementerian/Badan/Lembaga/Organisasi Swasta sebesar Rp6.695.505.832,00 yaitu:

Uraian	Nilai
Pendapatan Hibah dari Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI)	915.839.452,00
Dana CSR Bank Sulut Tahun 2024	0,00
Pendapatan Hibah berupa Sumbangan Pihak Ketiga	0,00
Bantuan uang pada SMK Negeri dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	5.316.106.380,00
Jumlah	6.231.945.832,00

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

2024	2023
463.560.000,00	584.580.000,00

Realisasi pendapatan lainnya untuk TA 2024 merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp463.560.000,00 yaitu:

Uraian	Nilai
Pendapatan Lainnya dari PT Jasa Raharja	309.040.000,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	154.520.000,00
Jumlah	463.560.000,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan TA 2023, Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.933.331.093,00,00 atau 77,96% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp6.695.505.832,00. Kenaikan ini disebabkan adanya penerimaan hibah bantuan uang pada SMK Negeri dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sejumlah Rp5.399.400.000,00 dan Sisa Bantuan



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemerintah Pusat TA 2024 kepada SMK sebesar Rp463.560.000,00.

5.1.2	Belanja - LRA	2024	2023
		1.781.237.758.457,61	1.707.157.949.424,66

Belanja didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Realisasi Belanja Daerah TA 2024 sebesar Rp1.781.237.758.457,61 atau 95,32% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp1.868.772.378.602,00. Belanja Daerah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp74.079.809.032,95 atau 4,34% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.707.157.949.424,66. Realisasi Belanja Daerah menurut klasifikasi Belanja sebagai berikut:

Klasifikasi Belanja menurut Jenis

a. Klasifikasi Belanja dan Transfer menurut Organisasi

Tabel 27 Realisasi Belanja Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Operasi	1.605.785.176.582,00	1.556.182.022.343,16	96,91	1.475.863.473.693,15
2	Belanja Modal	257.490.295.402,00	220.354.238.401,45	85,58	230.302.490.856,51
3	Belanja Tak Terduga	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53	991.984.875,00
	Jumlah	1.868.772.378.602,00	1.781.237.758.457,61	95,32	1.707.157.949.424,66

Realisasi Belanja Daerah TA 2024 menurut Jenis Belanja terbesar adalah pada Belanja Operasi sebesar Rp1.475.863.473.693,15 atau 93,05% dari total belanja daerah sebesar Rp1.707.157.949.424,66.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Klasifikasi Belanja dan Transfer menurut Organisasi

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	561.203.081.351,00	552.128.500.665,00	98,38	499.472.088.461,60
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	41.417.771.672,00	41.153.215.286,00	99,36	23.743.469.726,00
3	Dinas Kesehatan	127.516.190.473,00	119.359.854.964,00	93,60	92.861.488.358,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibie	169.959.070.667,00	137.063.833.293,00	80,65	90.638.304.544,53
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	148.090.689.682,00	138.126.722.201,00	93,27	193.592.466.123,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	98.201.025.272,00	97.853.955.392,00	99,65	62.407.152.392,00
7	Dinas Sosial	26.592.018.017,00	25.511.853.450,00	95,94	36.153.257.944,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.814.117.841,00	7.749.165.852,00	99,17	7.173.127.188,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.117.754.427,00	9.921.284.881,00	98,06	11.361.396.345,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	12.188.019.824,00	12.037.615.911,00	98,77	11.758.738.321,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan	35.346.696.116,00	35.116.875.253,00	99,35	36.468.304.186,91
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.015.596.632,00	12.825.543.383,00	98,54	13.907.239.234,00
13	Dinas Perhubungan	15.756.883.780,00	15.056.856.361,00	95,56	12.005.073.539,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	16.610.608.464,00	16.439.436.527,00	98,97	19.691.148.910,00
15	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	41.063.393.248,00	40.817.064.768,00	99,40	50.143.137.080,00
16	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	16.961.645.743,00	16.633.188.181,00	98,06	16.012.201.881,00
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9.930.199.349,00	9.719.802.849,00	97,88	9.702.513.708,00
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.025.902.522,00	9.907.450.785,00	98,82	9.693.442.058,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	38.749.776.000,00	37.668.631.716,00	97,21	42.998.439.673,62
20	Dinas Pariwisata	12.688.655.464,00	12.410.166.521,00	97,81	15.960.946.003,00
21	Dinas Pertanian	68.554.327.744,00	67.050.289.941,00	97,81	69.579.828.246,00
22	Sekretariat Daerah	105.981.571.183,00	98.701.435.301,00	93,13	114.199.336.520,00
23	Sekretariat DPRD	116.082.323.230,00	108.900.639.478,00	93,81	97.468.640.698,00
24	Badan Penghubung	9.406.267.605,00	8.808.478.710,00	93,64	8.654.289.688,00
25	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	12.088.677.615,00	11.785.438.679,00	97,49	12.432.234.047,00
26	Inspektorat Provinsi Gorontalo	23.103.771.324,00	22.700.375.885,00	98,25	20.289.713.883,00
27	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	18.353.322.175,00	17.986.248.127,00	98,00	19.504.338.376,00
28	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	303.429.246.726,00	288.469.092.387,00	95,07	275.756.429.676,00
29	Badan Kepegawaian	10.400.858.222,00	10.305.954.574,00	99,09	12.583.529.170,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.656.920.419,00	12.325.620.864,00	97,38	14.383.711.903,00
	Jumlah	2.093.306.382.787,00	1.994.534.592.185,00	95,28	1.900.595.987.883,66

Pada TA 2024 terdapat peleburan SKPD pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. SKPD. SKPD yang mengalami peleburan adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak menjadi Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi menjadi Dinas penanaman Modal dan PTSP.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer TA 2024 menurut Organisasi terbesar adalah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp552.128.500.665,00 atau 27,68% dari total Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp1.994.534.592.185,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menunjukkan adanya peningkatan realisasi Belanja



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp52.656.412.203,40 atau 10,54%.

Peningkatan nilai realisasi belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disebabkan terdapat peleburan organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5.1.2.1. Belanja Operasi	2024	2023
	1.556.182.022.343,16	1.475.863.473.693,15

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Provinsi Gorontalo yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp1.556.182.022.343,16 atau 96,91% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp1.605.785.176.582,00. Belanja Operasi TA 2024 lebih besar Rp80.318.548.650,01 atau 5,44% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.475.863.473.693,15. Realisasi Belanja Operasi sebagai berikut:

Tabel 28 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Pegawai	782.146.327.136,00	764.595.004.643,00	97,76	657.826.026.577,00	16,23
Belanja Barang dan Jasa	673.525.499.630,00	641.715.150.644,16	95,28	700.268.455.177,15	(8,36)
Belanja Bunga	6.349.012.047,00	6.439.282.345,00	101,42	7.093.341.745,00	(9,22)
Belanja Hibah	132.481.124.769,00	132.240.736.851,00	99,82	85.797.138.870,00	54,13
Bantuan Sosial	11.283.213.000,00	11.191.847.860,00	99,19	24.878.511.324,00	(55,01)
Jumlah	1.605.785.176.582,00	1.556.182.022.343,16	96,91	1.475.863.473.693,15	5,44

Kenaikan realisasi Belanja Operasi pada TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023 disebabkan karena adanya kenaikan Belanja Hibah sebesar Rp46.443.597.981,00 atau 54,13% dan Kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp106.768.978.066,00 atau 16,23%.

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
Belanja Pegawai	764.595.004.643,00	657.826.026.577,00	16,23	106.768.978.066,00
Belanja Barang dan Jasa	641.715.150.644,16	700.268.455.177,15	(8,36)	(58.553.304.532,99)
Belanja Bunga	6.439.282.345,00	7.093.341.745,00	(9,22)	(654.059.400,00)
Belanja Hibah	132.240.736.851,00	85.797.138.870,00	54,13	46.443.597.981,00
Bantuan Sosial	11.191.847.860,00	24.878.511.324,00	(55,01)	(13.686.663.464,00)
Jumlah	1.556.182.022.343,16	1.475.863.473.693,15	5,44	80.318.548.650,01

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	2024	2023
	764.595.004.643,00	657.826.026.577,00

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp764.595.004.643,00 atau 97,76% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp782.146.327.136,00. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

7Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Gaji dan Tunjangan ASN	461.293.925.150,00	448.637.439.116,00	97,26	388.757.960.090,00
Tambahan Penghasilan ASN	159.939.804.931,00	158.731.757.293,00	99,24	146.902.233.296,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	133.211.726.521,00	130.082.006.039,00	97,65	94.840.001.766,00
Gaji dan Tunjangan DPRD	26.056.244.168,00	25.865.922.867,00	99,27	25.732.222.449,00
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	193.026.366,00	0,00	0,00	285.033.240,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.451.600.000,00	1.277.879.328,00	88,03	1.308.575.736,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub Jumlah	782.146.327.136,00	764.595.004.643,00	97,76	657.826.026.577,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp106.768.978.066,00 atau 16,23%. Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023 terutama disebabkan karena kenaikan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp59.879.479.026,00 atau 15,40%. Karena adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
Gaji dan Tunjangan ASN	448.637.439.116,00	388.757.960.090,00	15,40	59.879.479.026,00
Tambahan Penghasilan ASN	158.731.757.293,00	146.902.233.296,00	8,05	11.829.523.997,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	130.082.006.039,00	94.840.001.766,00	37,16	35.242.004.273,00
Gaji dan Tunjangan DPRD	25.865.922.867,00	25.732.222.449,00	0,52	133.700.418,00
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	285.033.240,00	(100,00)	(285.033.240,00)
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.277.879.328,00	1.308.575.736,00	(2,35)	(30.696.408,00)
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah	764.595.004.643,00	657.826.026.577,00	16,23	106.768.978.066,00

A.1. Gaji dan Tunjangan ASN

Gaji dan tunjangan ASN (Aparatur Sipil Negara) terdiri dari gaji pokok dan berbagai tunjangan melekat. Gaji pokok ASN bervariasi berdasarkan golongan dan masa kerja, sementara tunjangan melekat meliputi tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan tunjangan lainnya. Realisasi Gaji dan Tunjangan TA 2024 sebesar



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp448.637.439.116,00 atau 97,26% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp461.293.925.150,00.

Realisasi Gaji dan Tunjangan TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp59.879.479.026,00 atau 15,40%. Rincian Gaji dan Tunjangan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Gaji Pokok ASN	349.242.403.138,80	343.212.541.132,00	98,27	294.289.056.838,00	16,62
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	32.378.995.544,00	31.022.665.736,00	95,81	26.945.903.591,00	15,13
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.907.376.218,00	5.600.987.548,00	94,81	6.202.845.000,00	(9,70)
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	19.318.948.306,00	18.643.035.000,00	96,50	20.229.866.234,00	(7,84)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.659.714.763,00	8.003.410.000,00	92,42	4.965.632.000,00	61,18
Belanja Tunjangan Beras ASN	18.790.660.864,00	17.850.878.220,00	95,00	16.593.160.260,00	7,58
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	614.048.678,34	474.755.365,00	77,32	684.728.945,00	(30,67)
Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.055.324,86	5.181.444,00	30,38	4.209.625,00	23,09
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	23.186.771.896,00	21.102.928.339,00	91,01	16.473.841.792,00	28,10
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	794.487.604,00	639.318.432,00	80,47	592.178.643,00	7,96
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.383.462.813,00	2.081.737.900,00	87,34	1.776.537.162,00	17,18
Sub Jumlah	461.293.925.150,00	448.637.439.116,00	97,26	388.757.960.090,00	15,40

A.2. Tambahan Penghasilan ASN

Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo termasuk yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 sebesar Rp158.731.757.293,00 atau 99,24% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp 159.939.804.931,00. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp11.829.523.997,00 atau 8,05% yang secara signifikan disebabkan kenaikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp9.423.227.325,00 atau 8,91%. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	39.577.520.478,00	39.340.394.217,00	99,40	37.396.699.438,00	5,20
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.378.769.329,15	4.133.818.341,00	94,41	3.677.000.000,00	12,42
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	90.187.120,00	80.970.672,00	89,78	75.187.120,00	7,69
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	115.893.328.003,85	115.176.574.063,00	99,38	105.753.346.738,00	8,91
Sub Jumlah	159.939.804.931,00	158.731.757.293,00	99,24	146.902.233.296,00	8,05



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A.3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo termasuk yang dipekerjakan/ diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo didasarkan pada beberapa faktor, pertimbangan objektif lainnya. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2024 sebesar Rp130.082.006.039,00 atau 97,65% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp133.211.726.521,00. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp35.242.004.273,00 atau 37,16%, secara signifikan disebabkan karena kenaikan Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar 44,61% atau Rp34.944.032.288,00. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak	8.944.405.600,00	8.112.119.283,00	90,69	7.763.473.466,00	4,49
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	113.279.423.819,00	113.271.188.688,00	99,99	78.327.156.400,00	44,61
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	165.517.500,00	165.517.500,00	100,00	114.971.900,00	43,96
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNS	2.546.850.234,00	1.714.250.000,00	67,31	2.494.650.000,00	(31,28)
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	367.000.000,00	357.291.200,00	97,35	0,00	100,00
Belanja Honorarium	5.118.529.368,00	4.730.639.368,00	92,42	4.408.000.000,00	7,32
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	2.790.000.000,00	1.731.000.000,00	62,04	1.731.750.000,00	(0,04)
Sub Jumlah	133.211.726.521,00	130.082.006.039,00	97,65	94.840.001.766,00	37,16

A.4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membayar gaji dan tunjangan bagi pimpinan serta anggota DPRD. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024 sebesar Rp25.865.922.867,00 atau 99,27% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp26.056.244.168,00. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp133.700.418,00 atau 0,52%. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024 adalah sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Uang Representasi DPRD	2.024.250.000,00	2.024.250.000,00	100,00	1.432.050.000,00	41,35
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	254.958.000,00	242.414.000,00	95,08	96.284.004,00	151,77
Belanja Tunjangan Beras DPRD	210.512.919,00	155.558.160,00	73,89	94.146.000,00	65,23
Belanja Uang Paket DPRD	143.430.000,00	122.250.000,00	85,23	122.715.000,00	(0,38)
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.310.241.500,00	2.303.899.000,00	99,73	2.079.735.000,00	10,78
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.860.000.000,00	4.842.000.000,00	99,63	4.851.000.000,00	(0,19)
Belanja Tunjangan Reses DPRD	810.000.000,00	810.000.000,00	100,00	1.215.000.000,00	(33,33)
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	300.243.412,00	279.969.562,00	93,25	164.000.004,00	70,71
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	2.062.477,00	39.545,00	1,92	289.444.081,00	(99,99)
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.760.545.860,00	7.705.542.600,00	99,29	7.707.848.360,00	(0,03)
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.380.000.000,00	7.380.000.000,00	100,00	7.680.000.000,00	(3,91)
Sub Jumlah	26.056.244.168,00	25.865.922.867,00	99,27	25.732.222.449,00	0,52

A.5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membayar gaji dan tunjangan KDH/WKDH. Pada TA 2024 tidak terdapat Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2024 dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp 193.026.366,00. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp285.033.240,00 atau 100%. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.576.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.999.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	89.556.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.039.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	25.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.965.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	181.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	181.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	285.033.240,00	(100,00)
Sub Jumlah	193.026.366,00	0,00	0,00	285.033.240,00	(100,00)

A.6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membayar Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2024 sebesar Rp1.277.879.328,00 atau 88,03% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp1.451.600.000,00. Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp30.696.408,00 atau 2,35%. Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	168.000.000,00	83,33	201.600.000,00	(16,67)
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.250.000.000,00	1.109.879.328,00	88,79	1.106.975.736,00	0,26
Sub Jumlah	1.451.600.000,00	1.277.879.328,00	88,03	1.308.575.736,00	(2,35)

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

2024	2023
641.715.150.644,16	700.268.455.177,15

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp641.715.150.644,16 atau 95,28% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp673.525.499.630,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 lebih kecil Rp58.553.304.532,99 atau 8,36% dari Realisasi TA 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Barang	136.019.787.123,00	129.372.276.614,00	95,11	165.873.917.204,02
Belanja Jasa	246.806.235.080,00	233.533.064.217,00	94,62	243.904.651.856,00
Belanja Pemeliharaan	25.211.518.796,00	23.676.035.473,53	93,91	30.476.679.378,48
Belanja Perjalanan Dinas	135.841.043.221,00	130.022.545.391,00	95,72	146.620.887.915,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.758.459.750,00	8.614.558.181,00	98,36	12.257.803.450,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	68.210.747.983,00	69.142.728.716,00	101,37	64.564.991.944,60
Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.677.707.677,00	47.353.942.051,63	89,89	36.569.523.429,05
Jumlah	673.525.499.630,00	641.715.150.644,16	95,28	700.268.455.177,15

Penurunan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 terhadap realisasi TA 2023 karena turunnya Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada pihak sebesar



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp3.643.245.269,00 atau 29,72%, Belanja Pemeliharaan sebesar Rp6.800.643.904,95 atau 22,31%, Belanja Bahan Habis Pakai sebesar Rp36.522.724.471,02 atau 22,02%, Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp16.598.342.524,00 atau 11,32% dan Belanja Jasa sebesar Rp10.371.587.639,00 atau 4,25%. Rincian kenaikan dan penurunan adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			%	Nilai
Belanja Barang	129.372.276.614,00	165.873.917.204,02	(22,01)	(36.501.640.590,02)
Belanja Jasa	233.533.064.217,00	243.904.651.856,00	(4,25)	(10.371.587.639,00)
Belanja Pemeliharaan	23.676.035.473,53	30.476.679.378,48	(22,31)	(6.800.643.904,95)
Belanja Perjalanan Dinas	130.022.545.391,00	146.620.887.915,00	(11,32)	(16.598.342.524,00)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.614.558.181,00	12.257.803.450,00	(29,72)	(3.643.245.269,00)
Belanja Barang dan Jasa BOS	69.142.728.716,00	64.564.991.944,60	7,09	4.577.736.771,40
Belanja Barang dan Jasa BLUD	47.353.942.051,63	36.569.523.429,05	0,00	10.784.418.622,58
Sub Jumlah	641.715.150.644,16	700.268.455.177,15	(8,36)	(58.553.304.532,99)

Belanja Jasa tahun 2024 diantaranya direalisasikan untuk belanja perolehan Aset Tetap seperti Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp6.421.612.909.00. Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi tersebut seharusnya dianggarkan dan direalisasikan dalam kelompok akun Belanja Modal dengan jenis belanja sesuai dengan jenis pekerjaan aset induknya. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

B.1. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang yang pakai habis dan barang tak habis pakai. Realisasi Belanja Barang TA 2024 sebesar Rp129.372.276.614,00 atau 95,11% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp136.019.787.123,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2024 lebih kecil Rp36.501.640.590,02 atau 22,01% dari Realisasi TA 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	%NT
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Bahan Pakai Habis	135.976.783.723,00	129.333.871.498,00	95,11	165.856.595.969,02	(22,02)
Belanja Barang Tak Habis Pakai	43.003.400,00	38.405.116,00	89,31	17.321.235,00	121,72
Jumlah	136.019.787.123,00	129.372.276.614,00	95,11	165.873.917.204,02	(22,01)

Penurunan realisasi Belanja Barang TA 2024 terhadap realisasi TA 2023 secara signifikan dipengaruhi oleh turunnya Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp13.629.780.253,00 atau 69,05%,



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp9.949.125.958,02 atau 19,81%, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp5.791.194.519,00 atau 23,27%, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp2.038.991.975,00 atau 34,63% dan Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp1.182.187.648,00 atau 9,03%.

B.2. Belanja Jasa

Belanja Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan jasa yang manfaatnya kurang dari 12 bulan dan digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintah. Realisasi Belanja Jasa TA 2024 sebesar Rp233.533.064.217,00 atau 94,62% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp246.806.235.080,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Jasa TA 2024 lebih kecil sebesar Rp10.371.587.639,00 atau 4,25% dari Realisasi TA 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Belanja Jasa

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	%N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Jasa Kantor	156.453.480.256,00	146.329.977.411,00	93,53	166.169.570.682,00	(11,94)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	61.102.901.992,00	59.906.700.044,00	98,04	48.362.209.709,00	23,87
Belanja Sewa Tanah	283.920.000,00	272.240.000,00	95,89	576.826.666,00	(52,80)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.864.417.001,00	16.073.935.593,00	95,31	12.603.443.130,00	27,54
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.197.890.000,00	2.068.547.200,00	94,12	2.363.614.701,00	(12,48)
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00	10.000.000,00	0,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	312.500.000,00	(98,88)
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.137.886.571,00	6.421.612.909,00	89,97	9.150.531.249,00	(29,82)
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	660.000.000,00	638.973.440,00	96,81	2.001.586.170,00	(68,08)
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	295.038.000,00	286.929.534,00	97,25	183.831.997,00	56,08
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	143.310.000,00	128.510.000,00	89,67	189.292.516,00	(32,11)
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.325.660.660,00	1.085.406.550,00	81,88	1.797.062.131,00	(39,60)
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	7.224.000,00	6.274.000,00	86,85	7.550.000,00	(16,90)
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	311.006.600,00	300.457.536,00	96,61	176.632.905,00	70,10
Jumlah	246.806.235.080,00	233.533.064.217,00	94,62	243.904.651.856,00	(4,25)

Penurunan realisasi Belanja Jasa TA 2024 terhadap realisasi TA 2023 secara signifikan dipengaruhi oleh turunnya Belanja Jasa Kantor sebesar Rp19.839.593.271,00 atau 11,94%, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp2.728.918.340,00 atau 29,82%, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp1.362.612.730,00 atau 68,08.

B.3. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan adalah Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024 sebesar Rp23.676.035.473,53 atau 93,91% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp25.211.518.796,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024 mengalami



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penurunan Rp6.800.643.904,95 atau 22,31% dari Realisasi TA 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	%N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Pemeliharaan Tanah	318.636.300,00	318.356.840,00	99,91	505.479.240,00	(37,02)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.249.223.473,00	6.180.848.093,00	85,26	6.458.921.257,00	(4,31)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.421.430.619,00	9.974.990.033,53	95,72	13.220.471.309,48	(24,55)
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.172.228.404,00	7.151.840.507,00	99,72	10.266.807.572,00	(30,34)
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00
Jumlah	25.211.518.796,00	23.676.035.473,53	93,91	30.476.679.378,48	(22,31)

Penurunan realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024 terhadap realisasi TA 2023 secara signifikan dipengaruhi oleh turunnya Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.245.481.275,95 atau 24,55% dan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp3.114.967.065,00 atau 30,34%.

B.4. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp130.022.545.391,00 atau 95,72% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp135.841.043.221,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 mengalami penurunan Rp16.598.342.524,00 atau 11,32% dari Realisasi TA 2023 sebesar Rp146.620.887.915,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	135.755.473.221,00	129.939.072.691,00	95,72	146.154.767.278,00	(11,09)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	85.570.000,00	83.472.700,00	97,55	466.120.637,00	(82,09)
Jumlah	135.841.043.221,00	130.022.545.391,00	95,72	146.620.887.915,00	(11,32)

B.5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat merupakan pengeluaran berupa uang atau jasa yang dialokasikan untuk diberikan kepada individu, kelompok, atau organisasi di luar pemerintahan. Realisasi Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat TA 2024 sebesar Rp8.614.558.181,00 atau 98,36% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp 8.758.459.750,00. Hal ini berarti realisasi Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat TA 2024 mengalami penurunan Rp3.643.245.269,00 atau 29,72% dari



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

realisasi TA 2023 sebesar Rp12.257.803.450,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.175.463.750,00	6.126.874.000,00	99,21	9.946.506.976,00	(38,40)
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.582.996.000,00	2.487.684.181,00	96,31	2.311.296.474,00	7,63
Jumlah	8.758.459.750,00	8.614.558.181,00	98,36	12.257.803.450,00	(29,72)

B.6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja Barang dan Jasa BOS merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2024 sebesar Rp69.142.728.716,00 atau 101,37% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp68.210.747.983,00 Hal ini berarti realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2024 mengalami kenaikan Rp4.577.736.771,40 atau 7,09% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp64.564.991.944,60.

B.7. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Hasri Ainun Habibie. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2024 sebesar Rp47.353.942.051,63 atau 89,89% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp52.677.707.677,00 Hal ini berarti realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2024 mengalami kenaikan Rp10.784.418.622,58 atau 29,49% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp36.569.523.429,05.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

2024	2023
6.439.282.345,00	7.093.341.745,00

Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Realisasi Belanja Bunga pada TA 2024 sebesar Rp6.439.282.345,00 atau 101,42% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp6.349.012.047,00, dengan uraian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	6.349.012.047,00	6.439.282.345,00	101,42	7.093.341.745,00	(9,22)
Jumlah	6.349.012.047,00	6.439.282.345,00	101,42	7.093.341.745,00	(9,22)

Realisasi Belanja Bunga TA 2024 merupakan Bunga atas pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi COVID-19 Tahun 2021 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2030, dengan akta perjanjian nomor 1 tanggal 1 Desember 2021 dan jangka waktu pinjaman selama 96 bulan serta bunga pinjaman sebesar 6,19%

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

2024	2023
132.240.736.851,00	85.797.138.870,00

Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Realisasi Belanja Hibah pada TA 2024 adalah sebesar Rp132.240.736.851,00 atau 99,82% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp132.481.124.769,00. Rincian realisasi Belanja Hibah antara lain sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	108.889.565.622,00	108.887.795.122,00	100,00	55.083.190.800,00	97,68
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.476.950.000,00	22.261.450.000,00	99,04	22.971.199.992,00	(3,09)
Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	6.670.615.000,00	(100,00)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.114.609.147,00	1.091.491.729,00	97,93	1.072.133.078,00	1,81
Jumlah	132.481.124.769,00	132.240.736.851,00	99,82	85.797.138.870,00	54,13

Kenaikan realisasi Belanja Hibah pada TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023 secara signifikan disebabkan karena adanya kenaikan Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp55.083.190.800,00 atau 97,68%, karena adanya hibah dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

2024	2023
11.191.847.860,00	24.878.511.324,00

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp11.191.847.860,00 atau 99,19% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp11.283.213.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 lebih kecil Rp13.686.663.464,00 atau 55,01% dari Realisasi TA 2023.

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00	88.261.574,00	(94,34)
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	7.868.163.000,00	7.807.738.560,00	99,23	19.546.500.000,00	(60,06)
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.295.650.000,00	1.292.109.300,00	99,73	1.585.749.750,00	(18,52)
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.099.400.000,00	2.087.000.000,00	99,41	3.658.000.000,00	(42,95)
Jumlah	11.283.213.000,00	11.191.847.860,00	99,19	24.878.511.324,00	(55,01)

5.1.2.2. Belanja Modal

2024	2023
220.354.238.401,45	230.302.490.856,51

Belanja Modal merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp220.354.238.401,45 atau 85,58% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp257.490.295.402,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2024 lebih besar Rp9.948.252.455,06 atau turun 4,32% dari realisasi belanja TA 2023. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian realisasi Belanja Modal TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.466.898.227,00	73.194.098.495,00	96,99	57.681.672.265,00	26,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.486.591.071,00	68.302.416.338,45	71,53	42.838.898.903,91	59,44
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.641.009.156,00	70.394.263.930,00	89,51	121.110.943.553,60	(41,88)
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	7.895.796.948,00	8.463.459.638,00	107,19	8.670.976.134,00	(2,39)
Belanja Modal Aset lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	257.490.295.402,00	220.354.238.401,45	85,58	230.302.490.856,51	(4,32)

Peningkatan atas Belanja Modal disebabkan karena naiknya Belanja Peralatan Mesin sebesar 96,99%, Belanja Modal Gedung Bangunan sebesar 71,53%, dan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar 89,51%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 107,19% serta tidak adanya Belanja Modal Tanah dan Belanja Modal Aset Lainnya di TA 2024.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	2024	2023
	0,00	0,00

Pada TA 2024 dan TA 2023 tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Tanah maupun anggaran pada APBD-P TA 2024 dan TA 2023.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2024	2023
	73.194.098.495,00	57.681.672.265,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap peralatan dan mesin yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp73.194.098.495,00 atau 96,99% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp75.466.898.227,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 lebih besar Rp15.512.426.230,00 atau 26,89%. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Alat Besar	5.288.454.220,00	5.229.426.100,00	98,88	57.586.000,00	8981,07
Belanja Modal Alat Angkutan	7.275.352.961,00	7.108.827.446,00	97,71	10.498.167.946,00	(32,29)
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	516.120.000,00	512.931.500,00	99,38	353.882.999,00	44,94
Belanja Modal Alat Pertanian	4.473.180.800,00	4.447.991.324,00	99,44	1.763.692.192,00	152,20
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.611.500.874,00	7.848.734.017,00	103,12	8.760.646.101,00	(10,41)
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasaran	1.953.152.670,00	1.962.608.009,00	100,48	1.566.613.353,00	25,28
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.496.657.450,00	13.243.745.270,00	98,13	6.892.887.504,00	92,14
Belanja Modal Alat Laboratorium	14.321.144.000,00	14.701.653.080,00	102,66	10.962.419.200,00	34,11
Belanja Modal Komputer	3.601.201.909,00	3.426.701.313,00	95,15	15.163.732.174,00	(77,40)
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	31.827.000,00	31.825.000,00	99,99	110.760.995,00	(71,27)
Belanja Modal Alat Peraga	41.200.000,00	45.308.000,00	109,97	54.020.000,00	(16,13)
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	25.000.000,00	18.100.000,00	72,40	0,00	100,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	187.402.913,00	186.807.680,00	99,68	1.318.771.351,00	(85,83)
Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.000.000,00	14.900.000,00	99,33	178.492.450,00	(91,65)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.123.286.098,00	9.985.100.321,00	109,45	0,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.506.417.332,00	4.429.439.435,00	0,00	0,00	100,00
Jumlah	75.466.898.227,00	73.194.098.495,00	96,99	57.681.672.265,00	26,89

B.1. Belanja Modal Alat Besar

Belanja Modal Alat Besar merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap Alat Besar Darat dan Belanja Modal Alat Bantu. Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2024 sebesar Rp5.229.426.100,00 atau 98,88% dari jumlah yang dianggarkan dalam



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp5.288.454.220,00. Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2023 lebih besar Rp5.171.840.100,00 atau 8981,07%. Rincian realisasi Belanja Modal Alat Besar adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Alat Besar Darat	200.000.000,00	199.500.000,00	99,75	0,00	100,00
Belanja Modal Alat Bantu	5.088.454.220,00	5.029.926.100,00	98,85	57.586.000,00	8634,63
Jumlah	5.288.454.220,00	5.229.426.100,00	98,88	57.586.000,00	8981,07

Peningkatan atas Belanja Modal Alat Besar disebabkan karena naiknya Belanja Modal Alat Bantu-Belanja Modal Electric Generating Set sebesar Rp1.955.400.000,00, dan Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor sebesar Rp3.011.500.000,00.

B.2. Belanja Modal Alat Angkutan

Belanja Modal Alat Angkutan merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap Alat Angkutan Darat Bermotor dan Alat Angkutan Apung Bermotor. Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2024 sebesar Rp7.108.827.446,00 atau 97,71% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp 7.275.352.961,00. Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami penurunan Rp3.389.340.500,00 atau 32,29%. Rincian realisasi Belanja Modal Alat Angkutan adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.677.112.961,00	5.540.248.924,00	97,59	7.558.620.000,00	(26,70)
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.598.240.000,00	1.568.578.522,00	98,14	2.939.547.946,00	(46,64)
Jumlah	7.275.352.961,00	7.108.827.446,00	97,71	10.498.167.946,00	(32,29)

Penurunan atas Belanja Modal Alat Angkutan secara signifikan disebabkan karena turunnya Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp1.760.200.000,00, dan Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebesar Rp2.939.547.946,00.

B.3. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap Alat Bengkel Bermesin dan Alat Ukur. Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2024 sebesar Rp512.931.500,00 atau 99,38% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp516.120.000,00. Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami kenaikan Rp159.048.501,00 atau 44,94%,. Rincian realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur adalah sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	510.700.000,00	507.631.500,00	99,40	323.632.999,00	56,85
Belanja Modal Alat Ukur	5.420.000,00	5.300.000,00	97,79	30.250.000,00	(82,48)
Jumlah	516.120.000,00	512.931.500,00	99,38	353.882.999,00	44,94

B.4. Belanja Modal Alat Pertanian

Belanja Modal Alat Pertanian merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap Alat Pengolahan Pertanian. Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2024 sebesar Rp4.447.991.324,00 atau 99,44% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp4.473.180.800,00. Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami kenaikan Rp2.684.299.132,00 atau 152,20%,. Hal tersebut secara signifikan disebabkan adanya kenaikan Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman sebesar Rp1.989.580.908,00 dan Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian sebesar Rp612.299.000,00 Rincian realisasi Belanja Modal Alat Pertanian adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Alat Pengolahan	4.473.180.800,00	4.447.991.324,00	99,44	1.763.692.192,00	152,20
Jumlah	4.473.180.800,00	4.447.991.324,00	99,44	1.763.692.192,00	152,20

B.5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap Alat Kantor dan Rumah Tangga. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah TA 2024 sebesar Rp7.848.734.017,00 atau 103,12 % dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp7.611.500.874,00. Pelampauan realisasi tersebut disebabkan adanya Pengadaan Peralatan Mesin pada SMK yang bersumber dari Hibah uang Bantuan Pemerintah Pusat pada SMK Negeri dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami penurunan Rp911.912.084,00 atau 10,41%,. Rincian realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Alat Kantor	2.527.694.024,00	2.789.199.837,00	110,35	2.319.713.514,00	20,24
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.486.236.700,00	4.469.413.193,00	99,62	5.396.256.027,00	(17,18)
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	597.570.150,00	590.120.987,00	98,75	1.044.676.560,00	(43,51)
Jumlah	7.611.500.874,00	7.848.734.017,00	103,12	8.760.646.101,00	(10,41)

B.6. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2024 sebesar Rp1.962.608.009,00 atau 100,48% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp1.953.152.670,00. Pelampauan realisasi tersebut disebabkan adanya Pengadaan



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Peralatan Mesin pada SMK yang bersumber dari Hibah uang Bantuan Pemerintah Pusat pada SMK Negeri dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami kenaikan Rp395.994.656,00 atau 25,28%,. Rincian realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Alat Studio	1.792.957.670,00	1.808.220.000,00	100,85	619.567.353,00	191,85
Belanja Modal Alat Komunikasi	160.195.000,00	154.388.009,00	96,38	947.046.000,00	(83,70)
Jumlah	1.953.152.670,00	1.962.608.009,00	100,48	1.566.613.353,00	25,28

B.7. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap Alat Kedokteran dan Kesehatan. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2024 sebesar Rp13.243.745.270,00 atau 98,13% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp13.496.657.450,00. Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami kenaikan Rp6.350.857.766,00 atau 92,14%,. Kenaikan tersebut disebabkan adanya Belanja Modal Alat Kedokteran Spesialis dan Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya pada RSUD dr Hasri Ainun Habibie. Rincian realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Alat Kedokteran	10.811.949.510,00	10.626.446.270,00	98,28	5.940.313.800,00	78,89
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.684.707.940,00	2.617.299.000,00	97,49	952.573.704,00	174,76
Jumlah	13.496.657.450,00	13.243.745.270,00	98,13	6.892.887.504,00	92,14

B.8. Belanja Modal Alat Laboratorium

Belanja Modal Alat Laboratorium merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap Alat Laboratorium. Belanja Modal Alat Laboratorium TA 2024 sebesar Rp14.701.653.080,00 atau 102,66% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp14.321.144.000,00. Pelampauan realisasi tersebut disebabkan adanya Pengadaan Peralatan Mesin-Alat Peraga Praktek Sekolah pada SMK yang bersumber dari Hibah uang Bantuan Pemerintah Pusat pada SMK Negeri dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami kenaikan Rp3.739.233.880,00 atau 34,11%,. Kenaikan tersebut disebabkan adanya Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah pada SMK. Rincian realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium adalah sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.218.326.234,00	1.850.129.178,00	83,40	3.029.943.450,00	(38,94)
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	12.102.817.766,00	12.851.523.902,00	106,19	7.892.821.000,00	62,83
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	39.654.750,00	(100,00)
Jumlah	14.321.144.000,00	14.701.653.080,00	102,66	10.962.419.200,00	34,11

B.9. Belanja Modal Komputer

Belanja Modal Komputer merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap Komputer Unit dan Peralatan Komputer. Belanja Modal Komputer TA 2024 sebesar Rp3.426.701.313,00 atau 95,15% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp3.601.201.909,00. Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami penurunan Rp11.737.030.861,00 atau 77,40,11%,. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan anggaran dan realisasi Belanja Modal Komputer Unit. Rincian realisasi Belanja Modal Komputer adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Komputer Unit	3.069.671.909,00	2.908.325.324,00	94,74	14.011.730.018,00	(79,24)
Belanja Modal Peralatan Komputer	531.530.000,00	518.375.989,00	97,53	1.152.002.156,00	(55,00)
Jumlah	3.601.201.909,00	3.426.701.313,00	95,15	15.163.732.174,00	(77,40)

B.10. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap Alat Deteksi, Alat Pelindung dan Alat SAR. Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2024 sebesar Rp31.825.000,00 atau 95,15% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp31.827.000,00. Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami penurunan Rp78.935.995,00 atau 71,27%,. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Deteksi dan Belanja Modal Alat Pelindung. Rincian realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Alat Deteksi	0,00	0,00	0,00	9.879.000,00	(100,00)
Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	69.159.967,00	(100,00)
Belanja Modal Alat SAR	31.827.000,00	31.825.000,00	99,99	31.722.028,00	0,32
Jumlah	31.827.000,00	31.825.000,00	99,99	110.760.995,00	(71,27)

B.11. Belanja Modal Alat Peraga

Belanja Modal Alat Peraga merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan. Realisasi Belanja Modal Alat Peraga TA 2024 sebesar Rp45.308.000,00 atau 109,97% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp41.200.000,00. Pelampauan realisasi tersebut



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

disebabkan adanya Pengadaan Peralatan Mesin-Alat Peraga Praktek Sekolah pada SMK yang bersumber dari Hibah uang Bantuan Pemerintah Pusat pada SMK Negeri dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Realisasi Belanja Modal Alat Peraga TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami penurunan Rp8.712.000,00 atau 16,13%. Rincian realisasi Belanja Modal Alat Peraga adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	41.200.000,00	45.308.000,00	0,00	54.020.000,00	(16,13)
Jumlah	41.200.000,00	45.308.000,00	109,97	54.020.000,00	(16,13)

B.12. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi

Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap Unit Peralatan Proses/Produksi. Realisasi Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi TA 2024 sebesar Rp18.100.000,00 atau 72,40% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp25.000.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami kenaikan Rp18.100.000,00 atau 100,00%. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	25.000.000,00	18.100.000,00	72,40	0,00	100,00
Jumlah	25.000.000,00	18.100.000,00	72,40	0,00	100,00

B.13. Belanja Modal Rambu-Rambu

Belanja Modal Rambu-Rambu merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap Rambu-Rambu Lalu Lintas. Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu TA 2024 sebesar Rp186.807.680,00 atau 99,68% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp187.402.913,00. Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami penurunan Rp1.131.963.671,00 atau 85,83%. Rincian realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	187.402.913,00	186.807.680,00	99,68	1.318.771.351,00	(85,83)
Jumlah	187.402.913,00	186.807.680,00	99,68	1.318.771.351,00	(85,83)

B.14. Belanja Modal Peralatan Olahraga

Belanja Modal Peralatan Olahraga merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap Peralatan Olahraga dan permainan. Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga TA 2024 sebesar Rp14.900.000,00 atau 99,68% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp15.000.000,00. Realisasi Belanja



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Modal Peralatan Olahraga TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami penurunan Rp163.592.450,00 atau 91,65%. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.000.000,00	14.900.000,00	99,33	178.492.450,00	(91,65)
Jumlah	15.000.000,00	14.900.000,00	99,33	178.492.450,00	(91,65)

2.15. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOS. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2024 sebesar Rp9.985.100.321,00 atau 109,45% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp9.123.286.098,00. Pelampauan realisasi tersebut disebabkan adanya Pengadaan Peralatan Mesin yang bersumber dari Sisa Dana BOS TA 2023 dan Pendapatan TGR BOS. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami kenaikan Rp9.982.100.321 atau 100%. Hal tersebut disebabkan karena pada TA 2023 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dikelompokkan pada masing-masing rekening Belanja Modal Peralatan Mesin sesuai dengan Objek dan Sub Rinci Objek masing-masing belanja modal yang berkenaan, dan pada TA 2024 dan pada TA 2024 dikelompokkan pada Objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.123.286.098,00	9.985.100.321,00	109,45	0,00	100,00
Jumlah	9.123.286.098,00	9.985.100.321,00	109,45	0,00	#DIV/0!

2.16. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana BLUD. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2024 sebesar Rp 4.429.439.435,00 atau 59,01% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp7.506.417.332.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami kenaikan Rp4.429.439.435,00 atau 100%. Hal tersebut disebabkan karena pada TA 2023 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dikelompokkan pada masing-masing rekening Belanja Modal Peralatan Mesin sesuai dengan Objek dan Sub Rinci Objek masing-masing belanja modal yang berkenaan, dan pada TA 2024 dikelompokkan pada Objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2024. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.506.417.332,00	4.429.439.435,00	59,01	0,00	100,00
Jumlah	7.506.417.332,00	4.429.439.435,00	59,01	0,00	100,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2024	2023
	68.302.416.338,45	42.838.898.903,91

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap gedung dan bangunan yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp68.302.416.338,45 atau 71,53% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp95.486.591.071,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 lebih besar Rp25.463.517.434,54 atau 59,44%. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Bangunan Gedung	89.553.652.069,00	62.915.416.398,45	70,25	39.486.957.685,00	59,33
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.532.939.002,00	5.042.548.940,00	91,14	3.351.941.218,91	50,44
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	344.451.000,00	86,11	0,00	100,00
Jumlah	95.486.591.071,00	68.302.416.338,45	71,53	42.838.898.903,91	59,44

3.1. Belanja Modal Bangunan Gedung

Belanja Modal Bangunan Gedung merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Gedung Tempat Tinggal. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2024 sebesar Rp62.915.416.398,45 atau 70,25% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp89.553.652.069,00. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 lebih besar Rp23.428.458.713,45 atau 59,33%. Hal tersebut secara signifikan disebabkan Belanja Modal Bangunan Kesehatan pada RSUD Hasri Ainun Habibie sebesar Rp18.623.454.672,97, Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara pada Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perhubungan sebesar Rp4.867.278.606,48. Rincian realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	89.544.752.069,00	62.906.516.398,45	70,25	39.018.851.220,00	61,22
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	19.285.000.000,00	16.193.569.942,00	83,97	3.159.228.387,00	412,58
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	39.248.790.550,00	18.623.454.672,97	47,45	4.994.435,00	372784,11
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80	149.150.000,00	(66,54)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	22.634.067.027,00	20.528.652.724,00	90,70	31.507.832.079,00	(34,85)
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	365.749.503,00	364.549.003,00	99,67	26.674.516,00	1266,66
Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	14.976.000,00	(100,00)
Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	5.671.954.389,00	4.867.278.606,48	85,81	702.850.577,00	592,51
Belanja Modal Bangunan Terbuka	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	199.792.238,00	(75,00)
Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00	0,00	0,00	662.749.529,00	(100,00)
Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	300.000.000,00	299.840.000,00	99,95	901.508.706,00	(66,74)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.205.565.600,00	1.204.237.500,00	99,89	793.615.200,00	51,74
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	224.873.121,00	(100,00)
Belanja Modal Bangunan Parkir	160.000.000,00	159.900.000,00	99,94	170.829.432,00	(6,40)
Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik	358.625.000,00	350.358.950,00	97,70	99.888.000,00	250,75
Belanja Modal Taman	125.000.000,00	124.925.000,00	99,94	399.889.000,00	(68,76)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	90.000.000,00	89.900.000,00	99,89	0,00	100,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00	468.106.465,00	(98,10)
Belanja Modal Asrama	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00	468.106.465,00	(98,10)
Jumlah	89.553.652.069,00	62.915.416.398,45	70,25	39.486.957.685,00	59,33

3.2. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap Pilar/Tugu/Tanda Lainnya, Pagar dan Tugu/Tanda Batas Lainnya. Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2024 sebesar Rp5.042.548.940,00 atau 91,14% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp5.532.939.002,00. Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 lebih besar Rp1.690.607.721,09 atau 50,44%. Hal tersebut secara signifikan disebabkan Belanja Modal Pagar Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.576.793.277,09. Rincian realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	5.532.939.002,00	5.042.548.940,00	91,14	3.351.941.218,91	50,44
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	375.000.000,00	274.943.300,00	73,32	16.983.000,00	1518,93
Belanja Modal Pagar	4.997.939.002,00	4.607.764.640,00	92,19	3.030.971.362,91	52,02
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	160.000.000,00	159.841.000,00	99,90	303.986.856,00	(47,42)
Jumlah	5.532.939.002,00	5.042.548.940,00	91,14	3.351.941.218,91	50,44



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Dana BLUD. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD TA 2024 sebesar Rp344.451.000,00 atau 59,01% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp400.000.000,00. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan . Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami kenaikan Rp344.451.000,00 atau 100%. Hal tersebut disebabkan karena pada TA 2023 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dikelompokkan pada masing-masing rekening Belanja Modal Gedung dan Bangunan sesuai dengan Objek dan Sub Rinci Objek masing-masing belanja modal yang berkenaan, dan pada TA 2024 dikelompokkan pada Objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	344.451.000,00	86,11	0,00	100,00
Jumlah	400.000.000,00	344.451.000,00	86,11	0,00	100,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

2024	2023
70.394.263.930,00	121.110.943.553,60

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp70.394.263.930,00 atau 89,51% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp78.641.009.156,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp50.716.679.623,60 atau 41,88%. Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	48.852.448.293,00	46.870.369.161,00	95,94	87.699.355.621,00	(46,56)
Belanja Modal Bangunan Air	26.123.694.863,00	20.141.344.769,00	77,10	33.284.295.752,60	(39,49)
Belanja Modal Instalasi	3.664.866.000,00	3.382.550.000,00	92,30	15.000.000,00	22450,33
Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	112.292.180,00	(100,00)
Jumlah	78.641.009.156,00	70.394.263.930,00	89,51	121.110.943.553,60	(41,88)

3.1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Belanja Modal Jalan dan Jembatan merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap jalan dan jembatan. Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2024 sebesar



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp46.870.369.161,00 atau 95,94% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp48.852.448.293,00. Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 lebih kecil Rp40.828.986.460,00 atau 46,56%. Hal tersebut secara signifikan disebabkan turunnya Belanja Modal Jalan Provinsi sebesar Rp27.462.798.387,00 dan Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi sebesar Rp7.354.951.363,00. Rincian realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Jalan	47.885.101.958,00	46.003.022.826,00	96,07	79.382.119.743,00	(42,05)
Belanja Modal Jalan Provinsi	35.101.612.250,00	33.567.066.433,00	95,63	61.029.864.820,00	(45,00)
Belanja Modal Jalan Desa	570.000.000,00	567.786.348,00	99,61	1.480.880.800,00	(61,66)
Belanja Modal Jalan Khusus	2.341.638.500,00	2.307.005.731,00	98,52	0,00	100,00
Belanja Modal Jalan Lainnya	9.871.851.208,00	9.561.164.314,00	96,85	16.871.374.123,00	(43,33)
Belanja Modal Jembatan	967.346.335,00	867.346.335,00	89,66	8.317.235.878,00	(89,57)
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	967.346.335,00	867.346.335,00	0,00	8.222.297.698,00	(89,45)
Belanja Modal Jembatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	94.938.180,00	(100,00)
Jumlah	48.852.448.293,00	46.870.369.161,00	95,94	87.699.355.621,00	(46,56)

3.2. Belanja Modal Bangunan Air

Belanja Modal Bangunan Air merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap bangunan yang berkaitan dengan pengelolaan air. Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2024 sebesar Rp20.141.344.769,00 atau 95,94% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp26.123.694.863,00. Realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 lebih kecil Rp13.142.950.983,60 atau 39,49%. Hal tersebut secara signifikan disebabkan turunnya Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp10.163.650.463,00 dan Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebesar Rp5.338.358.069,60. Rincian realisasi Belanja Modal Bangunan Air adalah sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	16.043.521.350,00	10.282.954.752,00	64,09	20.446.605.215,00	(49,71)
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	16.043.521.350,00	10.282.954.752,00	64,09	20.446.605.215,00	(49,71)
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggul	7.395.236.207,00	7.387.485.401,00	99,90	5.486.774.902,00	34,64
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulang	7.395.236.207,00	7.387.485.401,00	99,90	5.486.774.902,00	34,64
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	639.000.000,00	634.308.050,00	99,27	175.961.000,00	260,48
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	175.961.000,00	(100,00)
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	639.000.000,00	634.308.050,00	99,27	0,00	100,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.045.937.306,00	1.836.596.566,00	89,77	7.174.954.635,60	(74,40)
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	0,00	0,00	207.411.000,00	(100,00)
Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	70.850.000,00	70.849.600,00	100,00	0,00	100,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	0,00	0,00	0,00	4.641.523.417,60	(100,00)
Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.975.087.306,00	1.765.746.966,00	89,40	2.326.020.218,00	(24,09)
Jumlah	26.123.694.863,00	20.141.344.769,00	77,10	33.284.295.752,60	(39,49)

3.3. Belanja Modal Instalasi

Belanja Modal Instalasi merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap bangunan yang berkaitan dengan instalasi air dan pengolahan sampah. Realisasi Belanja Modal Instalasi TA 2024 sebesar Rp3.382.550.000,00 atau 92,30% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp3.664.866.000,00. Realisasi Belanja Modal Instalasi TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 lebih besar Rp3.367.550.000,00 atau 22.450,33%. Hal tersebut secara signifikan disebabkan adanya Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebesar Rp3.200.000.000,00 pada RSUD dr. Hasri Ainun Habibie. Rincian realisasi Belanja Modal Instalasi adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.577.800.000,00	3.299.900.000,00	92,23	15.000.000,00	21899,33
Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.477.800.000,00	3.200.000.000,00	92,01	15.000.000,00	21233,33
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	87.066.000,00	82.650.000,00	94,93	0,00	100,00
Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	87.066.000,00	82.650.000,00	94,93	0,00	100,00
Jumlah	3.664.866.000,00	3.382.550.000,00	92,30	15.000.000,00	22450,33

3.4. Belanja Modal Jaringan

Belanja Modal Jaringan merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap bangunan yang berkaitan dengan Jaringan Listrik. Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 lebih besar Rp112.292.180,00. Rincian realisasi Belanja Modal Jaringan adalah sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	112.292.180,00	(100,00)
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	112.292.180,00	(100,00)
Jumlah	0,00	0,00	0,00	112.292.180,00	(100,00)

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

2024	2023
8.463.459.638,00	8.670.976.134,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap Bahan Perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Tetap Lainnya BOS, yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp8.463.459.638,00 atau 107,19% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp7.895.796.948,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp8.463.459.638,00 melampaui sebesar Rp568.908.690,00 dari anggaran sebesar Rp7.569.110.948,00 yang merupakan realisasi menggunakan sumber dana BOS tahun 2023. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa pengadaan buku oleh sekolah, dan adanya penerimaan bantuan pemerintah pusat untuk SMK Negeri di Provinsi Gorontalo. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 lebih kecil Rp207.516.496,00 atau 2,39%. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	136.686.000,00	135.490.000,00	99,13	242.042.006,00	(44,02)
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	29.939.000,00	(100,00)
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95	0,00	100,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	8.398.995.128,00	(100,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.659.110.948,00	8.228.019.638,00	107,43	0,00	100,00
Jumlah	7.895.796.948,00	8.463.459.638,00	107,19	8.670.976.134,00	(2,39)

5.1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Belanja Modal Bahan Perpustakaan merupakan pengeluaran kas untuk perolehan Bahan Perpustakaan Tercetak dan Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro. Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2024 sebesar Rp 135.490.000,00 atau 99,13% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp136.686.000,00. Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 lebih kecil Rp106.552.006,00 atau 44,02%. Hal tersebut secara signifikan disebabkan turunnya Belanja Modal Buku Umum. Rincian realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan adalah sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	69.628.000,00	68.500.000,00	98,38	233.092.908,00	(70,61)
Belanja Modal Buku Umum	69.628.000,00	68.500.000,00	98,38	233.092.908,00	(70,61)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	67.058.000,00	66.990.000,00	99,90	8.949.098,00	648,57
Belanja Modal Audio Visual	67.058.000,00	66.990.000,00	99,90	8.949.098,00	648,57
Jumlah	136.686.000,00	135.490.000,00	99,13	242.042.006,00	(44,02)

5.2. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga merupakan pengeluaran kas untuk perolehan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga. TA 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp29.939.000,00.

5.3. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi

Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi merupakan pengeluaran kas yang dilakukan untuk perbaikan atau pemeliharaan aset tetap yang meningkatkan masa manfaat, kapasitas, kualitas, atau volume aset tersebut. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi TA 2024 sebesar Rp 99.950.000,00 atau 99,95% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp100.000.000,00 dan TA 2023 tidak terdapat anggaran dan realisasi. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95	0,00	100,00
Jumlah	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95	0,00	100,00

5.4. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud merupakan pengeluaran kas untuk perolehan Software dan Aset Tidak Berwujud Lainnya. TA 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp8.398.995.128,00

5.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS merupakan pengeluaran kas untuk perolehan Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari dana BOS. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS TA 2024 sebesar Rp8.228.019.638,00 atau 107,43% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp7.659.110.948,00 dan TA 2023 tidak terdapat anggaran dan realisasi. Pelampauan realisasi Rp568.908.690,00 disebabkan adanya belanja Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari Sisa Dana BOS TA 2023 dan Pendapatan TGR BOS.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

2024	2023
4.701.497.713,00	991.984.875,00

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 sebesar Rp4.701.497.713,00 atau 85,53% dari anggaran Rp5.496.906.618,00 dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 lebih besar Rp3.079.512.838,00 atau 373,95% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.113 Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Tak Terduga	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53	991.984.875,00	373,95
Jumlah	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53	991.984.875,00	373,95

Belanja Tak Terduga diantaranya direalisasikan untuk Pencairan Bonus Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Peraih Medali pada PON XII 2024 di Aceh dan Medan serta PEPARNAS 2024 senilai Rp2.912.500.000,00 dan Pengamanan Kunjungan Kerja Presiden RI ke Provinsi Gorontalo senilai Rp960.000.000,00.

5.1.3 Transfer

2024	2023
202.203.513.267,00	193.438.038.459,00

Transfer didefinisikan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan. Transfer dirinci atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Realisasi Transfer Daerah TA 2024 sebesar Rp202.203.513.267,00 atau 96,47% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp209.604.098.485,00. Transfer Daerah TA 2024 lebih besar Rp8.765.474.808,00 atau 4,53% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp193.438.038.459,00. Realisasi Transfer Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.114 Realisasi Transfer Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Bagi Hasil Pajak	206.629.098.485,00	199.603.513.267,00	96,60	191.718.038.459,00	4,11
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.975.000.000,00	2.600.000.000,00	87,39	1.720.000.000,00	51,16
Jumlah	209.604.098.485,00	202.203.513.267,00	96,47	193.438.038.459,00	4,53

5.1.3.1. Bagi Hasil Pajak

2024	2023
199.603.513.267,00	191.718.038.459,00

Bagi Hasil Pajak merupakan pengeluaran atau belanja yang bersumber dari dana bagi hasil pajak (DBH Pajak) yang dialokasikan kepada daerah. Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp199.603.513.267,00 atau 96,60% dari jumlah yang dianggarkan dalam



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp206.629.098.485,00.

Tabel 5.115 Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	206.629.098.485,00	199.603.513.267,00	96,60	191.718.038.459,00	4,11
Jumlah	206.629.098.485,00	199.603.513.267,00	96,60	191.718.038.459,00	4,11

Transfer Bagi Hasil Pajak TA 2024 merupakan Transfer Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Realisasi transfer bagi hasil pajak mengalami peningkatan sebesar Rp7.885.474.808,00 atau 4,11% dari realisasi TA 2023.

5.1.3.1.1 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	2024	2023
	199.603.513.267,00	191.718.038.459,00

Bagi Hasil Pajak merupakan pengeluaran atau belanja yang bersumber dari dana bagi hasil pajak (DBH Pajak) yang dialokasikan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota. Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp199.603.513.267,00 atau 96,60% dari anggaran Rp206.629.098.485,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.116 Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022	% N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	154.940.416.815,00	154.825.155.276,00	99,93	157.745.778.886,00	(1,85)
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	51.688.681.670,00	44.778.357.991,00	86,63	33.972.259.573,00	31,81
Jumlah	206.629.098.485,00	199.603.513.267,00	96,60	191.718.038.459,00	4,11

Jumlah Transfer Bagi Hasil Pajak TA 2024 merupakan Transfer Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Realisasi transfer bagi hasil pajak mengalami peningkatan sebesar Rp7.885.474.808,00 atau 4,11% dari realisasi TA 2023. Peningkatan transfer bagi hasil pajak dan pengalokasian kepada Kabupaten/Kota menyesuaikan dengan realisasi pencapaian Pajak Daerah di masing-masing wilayah.

5.1.3.2. Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2024	2023
	2.600.000.000,00	1.720.000.000,00

Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan pengeluaran atau Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2024 sebesar Rp199.603.513.267,00 atau 96,60% dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp206.629.098.485,00.

Tabel 5.117 Realisasi Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	%N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2.925.000.000,00	2.600.000.000,00	88,89	1.210.000.000,00	114,88
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	510.000.000,00	(100,00)
Jumlah	2.975.000.000,00	2.600.000.000,00	87,39	1.720.000.000,00	51,16

Transfer Bantuan Keuangan untuk TA 2024 antara lain direalisasikan untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango senilai Rp2.500.000.000,00 dan Pembayaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo senilai Rp100.000.000,00.

5.1.4 Surplus/(Defisit)	2024	2023
	(53.101.028.028,38)	(28.108.882.354,98)

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah serta Transfer TA 2024 maka defisit Anggaran TA 2024 sebesar Rp53.101.028.028,38 atau 34,49% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD-P TA 2024 sebesar Rp153.970.511.569,00. Perhitungan Defisit Anggaran sebagai berikut:

Tabel 5.118 Realisasi Surplus/Defisit Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	%N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Pendapatan	1.924.405.965.518,00	1.930.340.243.696,23	100,31	1.872.487.105.528,68	3,09
Belanja	1.868.772.378.602,00	1.781.237.758.457,61	95,32	1.707.157.949.424,66	4,34
Transfer	209.604.098.485,00	202.203.513.267,00	96,47	193.438.038.459,00	4,53
Jumlah	(153.970.511.569,00)	(53.101.028.028,38)	34,49	(28.108.882.354,98)	88,91

5.1.5 Pembiayaan	2024	2023
	152.688.158.900,69	199.014.777.167,67

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Realisasi Pembiayaan (Netto) TA 2024 sebesar Rp152.688.158.900,69 atau 99,17% dari jumlah yang ditetapkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp153.970.511.569,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.119 Realisasi Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	%N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Penerimaan Pembiayaan	170.905.894.813,00	170.905.894.812,69	100,00	228.765.815.327,67	(25,29)
Pengeluaran Pembiayaan	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57	29.751.038.160,00	(38,77)
Jumlah	153.970.511.569,00	152.688.158.900,69	99,17	199.014.777.167,67	(23,28)

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

2024

2023

152.688.158.900,69

199.014.777.167,67

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana Cadangan. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp170.905.894.812,69 atau 100,00% dari jumlah yang ditetapkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp100.000.000,00, bersumber dari Penggunaan SiLPA TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.120 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	%N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	69.622.263.343,00	(100,00)
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	64.398.120.001,00	(100,00)
Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD y	0,00	0,00	0,00	5.224.143.342,00	(100,00)
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Da	501.721.917,40	501.721.917,40	100,00	0,00	100,00
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan	501.721.917,40	501.721.917,40	100,00	0,00	100,00
Penghematan Belanja	153.833.000.058,15	153.833.000.057,84	100,00	143.396.195.775,67	7,28
Penghematan Belanja-Belanja Operasi	11.248.720.865,21	11.248.720.865,21	100,00	76.257.512.714,67	(85,25)
Penghematan Belanja-Belanja Modal	132.329.157.067,94	132.329.157.067,63	100,00	66.901.497.652,00	97,80
Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	10.030.122.125,00	10.030.122.125,00	100,00	0,00	100,00
Sisa Belanja Transfer	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	237.185.409,00	(5,14)
Sisa Belanja Lainnya	16.571.172.837,45	16.571.172.837,45	100,00	15.747.356.209,00	5,23
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	15.085.201.009,45	15.085.201.009,45	100,00	14.090.678.958,00	7,06
Sisa Dana BOS	1.485.971.828,00	1.485.971.828,00	100,00	1.656.677.251,00	(10,30)
Jumlah	170.905.894.813,00	170.905.894.812,69	100,00	228.765.815.327,67	(25,29)

5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

2024

2023

18.217.735.912,00

29.751.038.160,00

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, Pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp18.217.735.912,00 atau 107,57% dari jumlah yang ditetapkan dalam Anggaran Perubahan dari APBD-P TA 2024 sebesar Rp16.935.383.244,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.121 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	%N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Mili	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	(100,00)
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	(100,00)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Temp	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57	19.751.038.160,00	(7,76)
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57	19.751.038.160,00	(7,76)
Jumlah	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57	29.751.038.160,00	(38,77)

5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

2024	2023
99.587.130.872,31	170.905.894.812,69

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp53.101.028.028,38 dan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp152.688.158.900,69 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat SiLPA Rp99.587.130.872,31 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.122 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	%N/T
	Anggaran	Realisasi	%		
Surplus/(Defisit)	(153.970.511.569,00)	(53.101.028.028,38)	34,49	(28.108.882.354,98)	88,91
Pembiayaan Netto	153.970.511.569,00	152.688.158.900,69	99,17	199.014.777.167,67	(23,28)
Jumlah	0,00	99.587.130.872,31	100,00	170.905.894.812,69	(41,73)

SiLPA TA 2024 sebesar Rp98.587.130.870,31 apabila dibandingkan dengan TA 2023 lebih kecil Rp71.318.763.940,38 atau 41.73% dari SiLPA TA 2023 sebesar Rp170.905.894.812,69. SiLPA TA 2024 sebesar Rp99.587.130.872,31 terdiri atas:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.123 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Pendapatan Asli Daerah	44.195.775.128,47
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	757.843.673,09
Dana Alokasi Umum:	-
DAU BG	-
DAU SG (Pendidikan, Kesehatan & PU)	15.133.573.190,00
DAU PPPK	62.993.967,00
DAU Tambahan Gaji Guru 13 dan 14	113.320.900,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	10.923.617.664,53
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	3.298.048.169,00
Dana Insentif Fiskal	540.629.955,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah (Dana CSR Tahun 2022)	-
Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	421.707.806,00
Dana TDF-TKD Non Anggaran	9.234.898.296,00
BLUD RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie	13.359.175.866,82
Sisa kas di Bendahara BOSP	1.428.549.160,00
Kas Lainnya - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Tahun 2023	1.010.779,00
Kas Lainnya - Sisa Bantuan SMK-PK	109.032.705,40
Utang PFK	6.953.612,00
Jumlah	99.587.130.872,31



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.2 Rincian Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL selama periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024. SAL awal 1 Januari 2024 sebesar Rp170.905.894.812,69, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp98.587.130.872,31

5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL Rp 170,905,894,812.69

SAL adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. SAL awal per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp170.905.894.812,69 yang merupakan SAL Fisik per 31 Desember 2023. SAL Awal meliputi Kas di BUD, Kas Dana BOSP, Kas BLUD, Kas Lainnya dan Utang PFK. Rincian SAL Awal adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian SAL Awal

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di BUD	153,839,933,323.84	213,144,082,755.17
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
Kas Dana BOSP	1,544,780,419.00	1,656,677,251.00
Kas di BLUD	15,085,201,009.45	14,090,678,958.50
Kas Lainnya	501,721,917.40	1,070,779.00
Utang PFK	(65,741,857.00)	(126,694,416.00)
Saldo Kas dikurangi PFK pada Neraca	170,905,894,812.69	228,765,815,327.67

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Rp 170.905.894.812,69 Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun Lalu yang telah digunakan pada tahun berjalan, yaitu SiLPA TA 2023 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp170.905.894.812,69.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Rp 99,587,130,872.31 Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp99.587.130.872,31 dan TA 2023 sebesar Rp170.905.894.812,69 dapat diuraikan sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/Defisit Anggaran	(53,101,028,028.38)	(28,108,882,354.98)
Pembiayaan Netto	152,688,158,900.69	199,014,777,167.67
SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan	99,587,130,872.31	170,905,894,812.69

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya **Rp0.00**

Pada TA 2024 dan 2023 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

5.2.5. Lain-Lain **Rp0.00**

Pada TA 2024 dan 2023 tidak ada transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL.

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir **Rp99,587,130,872.31**

Berdasarkan SAL Awal, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, SiLPA tahun berjalan dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat SAL Rp98.587.130.872,31 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	170,905,894,812.69	228,765,815,327.67
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	170,905,894,812.69	228,765,815,327.67
SiLPA	99,587,130,872.31	170,905,894,812.69
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0.00	0.00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	99,587,130,872.31	170,905,894,812.69

Tabel 37 Rincian Saldo Akhir Kas

Uraian	Per 31 Desember 2024
Kas di Kas Daerah	84.696.315.973,09
Kas di Bendahara Pengeluaran	84,696,315,973.09
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00
Kas di BLUD	13,359,175,866.82
Kas Dana BOSP	1,428,549,160.00
Kas Lainnya	110,043,484.40
Utang Pihak Ketiga	(6,953,612.00)
Saldo Kas dikurangi Utang PFK	99.587.130.872,31
SAL	99,587,130,872.31
Selisih	0.00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3 Rincian Dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2024 dan perbandingannya

Tabel 38 Akun Neraca

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Lancar	167.815.203.522,42	Rp214.041.775.773,84
Investasi Jangka Panjang	84.600.798.820,77	84.868.463.498,63
Aset Tetap	2.093.303.473.494,77	2.176.149.977.213,39
Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset Lainnya	35.705.260.479,04	Rp39.757.431.640,38
Properti Investasi	9.002.925.786,80	Rp10.644.292.986,00
Jumlah Aset	2.390.427.662.103,82	2.525.461.941.112,24
Kewajiban Jangka Pendek	78.561.091.128,74	65.538.078.650,25
Kewajiban Jangka Panjang	76.080.313.808,00	91.733.344.384,00
Jumlah Kewajiban	154.641.404.936,74	157.271.423.034,25
Ekuitas	2.235.786.257.167,08	2.368.190.518.077,99
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.390.427.662.103,82	2.525.461.941.112,24

5.3.1 Aset

Total Aset Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dan 2023 terdiri atas Aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1 Aset Lancar

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp167.513.110.107,42 dan Rp214.041.775.773,84 dengan penjelasan dan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp84.696.315.973,09	Rp153.839.933.323,84

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp84.696.315.973,09 mengalami penurunan sebesar Rp69.143.617.350,75 atau 44,95% dari saldo tahun 2023 sebesar Rp153.839.933.323,84. Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah direkonsiliasi antara saldo buku dengan saldo rekening bank, yang terdiri dari:

Tabel 39 Daftar Rekening Pemerintah Provinsi Gorontalo

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Bank SulutGo Cabang Gorontalo Nomor Rekening 301110000111	84.696.315.973,09	153.839.933.323,84
2	Rekening Penerimaan Pemerintah Provinsi Gorontalo	0,00	0,00
	Jumlah	84.696.315.973,09	153.839.933.323,84



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas yang berasal dari uang persediaan yang masih tersisa di akhir Tahun Anggaran yang dikelola secara tunai maupun non tunai, rekening bendahara pengeluaran sesuai Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 160/29/IV/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Giro Penerimaan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Rekening Giro Bendahara Pengeluaran dan Rekening Giro Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada PT. Bank SulutGo Cabang Gorontalo. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah nihil.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp0,00

Rekening bendahara penerimaan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 160/29/IV/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Giro Penerimaan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Rekening Giro Bendahara Pengeluaran dan Rekening Giro Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada PT Bank SulutGo Cabang Gorontalo. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah nihil.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp13.359.175.866,82	Rp15.085.201.009,45

RSUD dr. Hasri Ainun Habibie adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Provinsi Gorontalo yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 448/11/III/2018 Tahun 2018. Kas di BLUD merupakan saldo kas BLUD yang masih tersisa di akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.359.175.866,82 mengalami penurunan sebesar Rp1.726.025.142,63 atau 11,44% dari saldo tahun 2023 sebesar Rp15.085.201.009,45. Kas tersebut merupakan Kas yang dikelola oleh BLUD yang tidak wajib disetor kembali ke Kas Daerah.

Rincian saldo Kas di BLUD adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian saldo Kas di BLUD

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Bank SulutGO Cabang Gorontalo Nomor Rekening 003.01.12.0000345	13.359.167.985,82	15.085.197.309,45
2	Bank SulutGO Cabang Gorontalo Nomor Rekening 003.01.12.0000356	7.881,00	3.700,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	0,00	-
	Jumlah	13.359.175.866,82	15.085.201.009,45



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1.5 Kas Dana BOSP

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp1.428.549.160,00

Rp1.544.780.419,00

Kas Dana BOSP merupakan saldo kas yang berada di bawah pengelolaan Bendahara Dana BOSP yang masih tersisa di akhir Tahun Anggaran 2023 yang dikelola secara Non Tunai sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Nomor 420/DIKBUDPORA/1488.F/BOS/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Edaran Implementasi Transaksi Non Tunai Dana BOS SMA/SMK/SLB se-Provinsi Gorontalo. Saldo Kas di Bendahara Dana BOSP Tahun 2024 sebesar Rp1.428.549.160,00 mengalami penurunan sebesar Rp116.231.259,00 atau 7,52% dari saldo Tahun 2023 sebesar Rp1.544.780.419,00. Dana BOSP yang diterima oleh bendahara SMA, SMK, SLB Negeri di Provinsi Gorontalo berasal dari Pemerintah Pusat tanpa melalui Kas Daerah dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing Bendahara Dana BOSP.

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Saldo Kas Dana BOSP

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	SMA/SMK/SLB Kota Gorontalo	373.713.049,00	429.420.379,00
2.	SMA/SMK/SLB Kabupaten Gorontalo	531.961.205,00	372.295.705,00
3.	SMA/SMK/SLB Kabupaten Boalemo	144.921.122,00	89.161.119,00
4.	SMA/SMK/SLB Kabupaten Pohuwato	54.992.564,00	151.717.787,00
5.	SMA/SMK/SLB Kabupaten Bone Bolango	47.885.808,00	385.667.248,00
6.	SMA/SMK/SLB Kabupaten Gorontalo Utara	275.075.412,00	116.518.181,00
	Jumlah	1.428.549.160,00	1.544.780.419,00

5.3.1.1.6 Kas Lainnya

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp110.043.484,40

Rp501.721.917,40

Kas pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum Negara/Daerah meliputi saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Tahun 2023 terdapat pendapatan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD. Pendapatan dan belanja tersebut pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Bantuan Uang dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kepada 12 SMKN di lingkungan Provinsi Gorontalo sebesar Rp5.349.400.000,00 dan 1 SMK Swasta sebesar Rp.50.000.000,00. Bantuan dalam bentuk uang ditransfer ke rekening sekolah yang dibuka khusus untuk menerima bantuan program di atas. Hingga 31 Desember 2024 realisasi belanja atas bantuan tersebut sebesar Rp5.207.754.813,00, realisasi belanja atas bantuan 2023 Rp.500.000.000,00, Sisa Bantuan Pemerintah Pusat TA 2024 kepada SMK yang disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp83.293.620, sehingga terdapat sisa bantuan sebesar Rp109.032.705,40.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Selain itu, terdapat sisa dana berupa sumbangan/bantuan keuangan dari masyarakat dan organisasi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Gorontalo (sumber data dari BPBD Provinsi Gorontalo) sebesar Rp1.010.779,00 yang masih berada pada rekening Tim Satgas COVID di tempatkan di Bank Muamalat atas nama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Saldo Kas Lainnya Per 31 Desember 2024 terdiri dari:

Sumbangan/bantuan keuangan dari masyarakat dan organisasi dalam rangka penanganan pandemi	Rp1.010.779,00
Sisa Bantuan Uang dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi (Kemendikbudristek) kepada SMKN	Rp109.032.705,40
Jumlah	Rp110.043.484,40

5.3.1.1.7 Setara Kas

31 Desember 2024
Rp0,00

31 Desember 2023
Rp0,00

Setara kas terdiri atas simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan. Saldo Setara Kas Per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah nihil

5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2024
Rp34.933.037.245,04

31 Desember 2023
Rp34.096.555.899,04

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2024 dan 2023, atas penetapan Piutang Pajak Daerah pada tahun yang bersangkutan dan tahun sebelumnya yang belum diterima di Kas Daerah sebagai Pendapatan Pajak Daerah, terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	25.144.059.267,04	25.285.823.601,04
2	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	9.200.318.793,00	8.222.073.113,00
3	Piutang Pajak Air Permukaan (PAP)	588.659.185,00	588.659.185,00
	Jumlah	34.933.037.245,04	34.096.555.899,04

Piutang PKB sebesar Rp25.144.059.267,04 adalah total piutang pajak kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Tagihan Pajak namun belum dilunasi oleh wajib pajaknya.

Piutang PBBKB sebesar Rp9.200.318.793,00 adalah total piutang pajak bahan bakar kendaraan bermotor bulan Desember Tahun 2024 yang belum dibayarkan oleh PT Pertamina Patra Niaga, PT Elnusa Petrofin dan PT. AKR Corporindo

Piutang PAP sebesar Rp588.659.185,00 adalah total piutang pajak air permukaan bulan Desember Tahun 2024 yang belum dibayarkan oleh PT Pabrik Gula Tolangohula, PT Sumber Energi Lestari dan PDAM Kabupaten/Kota se Provinsi



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Gorontalo.

5.3.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2024 Rp5.316.427.193,00	31 Desember 2023 Rp5.316.427.193,00

Jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	230.466.542,00	230.466.542,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan	17.000.000,00	17.000.000,00
3	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	699.126,00	699.126,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.068.261.525,00	5.068.261.525,00
	Jumlah	5.316.427.193,00	5.316.427.193,00

5.3.1.1.10 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	31 Desember 2024 Rp0,00	31 Desember 2023 Rp0,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.11 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2024 Rp16.891.595.996,95	31 Desember 2023 Rp15.362.861.290,50

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2024 dan 2023, terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Piutang TGR terhadap PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	5.812.878.311,12	5.838.878.311,12
2.	Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak	267.387.427,00	267.387.427,00
3.	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	23.498.240,00	23.498.240,00
4.	Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji PNSD	57.913.299,59	57.913.300,00
5.	Piutang Bunga dan Denda PT GFM	284.000.000,00	284.000.000,00
6.	Piutang RSUD Hasri Ainun Habibie - BLUD	10.445.547.602,86	8.890.812.896,00
7.	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	371.116,38	371.116,38
	Jumlah	16.891.595.996,95	15.362.861.290,50



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1.12 Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	31 Desember 2024 Rp8.191.138.816,00	31 Desember 2023 Rp1.950.426.816,00

Jumlah tersebut merupakan saldo 31 Desember 2024 dan 2023, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Bagi Hasil Pajak	8.177.218.816,00	1.936.506.816,00
Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00
Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-DAK Non Fisik	13.920.000,00	13.920.000,00
Jumlah	8.191.138.816,00	1.950.426.816,00

5.3.1.1.13 Piutang Lainnya	31 Desember 2024 Rp3.891.151.848,14	31 Desember 2023 Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo 31 Desember 2024 dan 2023, terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa pelaksanaan pembangunan gedung bangunan RSUD HAH	3.891.151.848,14	0,00
	Jumlah	3.891.151.848,14	0,00

Nilai saldo di atas merupakan sisa uang muka yang belum dikembalikan sebesar Rp3.891.151.848,14 atas pembangunan gedung rawat inap yang dilakukan oleh RSUD dr. HAH. PT BSG telah mencairkan Jaminan uang muka tersebut sebesar Rp3.891.155.348,00 pada tanggal 14 Maret 2025.

5.3.1.1.14 Penyisihan Piutang	31 Desember 2024 (Rp37.322.874.565,51)	31 Desember 2023 (Rp37.117.190.761,83)

No	Uraian	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Bersih
1	Piutang Pajak Daerah	34.933.037.245,04	(25.599.427.959,96)	9.333.609.285,08
2	Piutang Retribusi Daerah	5.316.427.193,00	(5.223.720.511,96)	92.706.681,04
3	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	16.891.595.996,95	(6.485.806.093,59)	10.405.789.903,36
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	8.191.138.816,00	(13.920.000,00)	8.177.218.816,00
	Jumlah	65.332.199.251,11	(37.322.874.565,51)	28.009.324.685,48

5.3.1.1.14.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Bersih
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	25.144.059.267,04	(25.144.059.267,00)	0,04
2	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	9.200.318.793,00	(46.001.593,96)	9.154.317.199,04



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Bersih
3	Pajak Air Permukaan (PAP)	588.659.185,00	(409.367.099,00)	179.292.086,00
	Jumlah	34.933.037.245,04	(25.599.427.959,96)	9.333.609.285,08

Atas nilai piutang yang disajikan dalam LKPD telah dilakukan penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung berdasarkan kualitas umur piutang sebagaimana terlampir

5.3.1.1.14.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No	Uraian	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Bersih
1	Piutang Retribusi Penggunaan Fasilitas TPA	230.466.542,00	(155.458.986,96)	75.007.555,04
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
3	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	699.126,00	0,00	699.126,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.068.261.525,00	(5.068.261.525,00)	-
	Jumlah	5.316.427.193,00	(5.223.720.511,96)	92.706.681,04

Atas nilai piutang yang disajikan dalam LKPD telah dilakukan penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung berdasarkan kualitas umur piutang terlampir

5.3.1.1.14.3 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No	Uraian	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Bersih
1	Piutang TGR terhadap PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	5.812.878.311,12	(5.648.576.368,00)	164.301.943,12
2	Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak	267.387.427,00	(267.387.427,00)	0,00
3	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	23.498.240,00	(23.498.240,00)	0,00
4	Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji PNSD	57.913.299,59	(57.913.300,00)	(0,41)
5	Piutang Bunga dan Denda PT GFM	284.000.000,00	(284.000.000,00)	0,00
6	Piutang RSUD Hasri Ainun Habibie - BLUD	10.445.547.602,86	(204.430.758,59)	10.241.116.844,27
7	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	371.116,38	0,00	371.116,38
	Jumlah	16.891.595.996,95	(6.485.806.093,59)	10.405.789.903,36

Atas nilai piutang yang disajikan dalam LKPD telah dilakukan penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung berdasarkan kualitas umur piutang sebagaimana terlampir

5.3.1.1.14.4 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No	Uraian	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Bersih
1	Piutang Bagi Hasil Pajak	8.177.218.816,00	0,00	8.177.218.816,00
2	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Dana Transfer DAK Non Fisik	13.920.000,00	(13.920.000,00)	0,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Jumlah	8.191.138.816,00	(13.920.000,00)	8.177.218.816,00

Atas nilai piutang yang disajikan dalam LKPD telah dilakukan penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung berdasarkan kualitas umur piutang sebagaimana terlampir

5.3.1.1.15 Beban Dibayar Dimuka **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
 Rp12.311.139.863,00 **Rp371.966.954,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023, atas pembayaran sewa untuk masa sewa 12 (dua belas) bulan hingga akhir tahun, terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Belanja Dibayar Dimuka - Kendaraan Dinas Operasional (KDO)	188.428.295,00	177.655.727,00
2.	Belanja Dibayar Dimuka - Gedung Kantor/Rumah Dinas/Mess Pegawai	35.498.241,00	71.340.307,00
3.	Belanja Dibayar Dimuka - Asuransi Barang Milik Daerah	121.782.538,00	122.970.920,00
4.	Belanja Dibayar Dimuka - Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	2.000.000,00	0,00
5.	Sisa Dana Hibah terkait Pilkada kepada KPU Provinsi Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo yang belum disetor ke Kas Daerah	11.963.430.789,00	0,00
	Jumlah	12.311.139.863,00	371.966.954,00

5.3.1.1.16 Persediaan **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
 Rp24.009.502.641,49 **Rp23.089.091.713,44**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.009.502.641,49 dan Tahun 2023 sebesar Rp23.089.091.713,44

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Bahan	938.756.200,80	1.218.684.365,65
2.	Suku Cadang	2.204.719.882,52	2.675.191.442,31
3.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	799.096.864,93	903.812.362,88
4.	Obat-obatan	13.101.233.342,54	9.728.548.353,60
5.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	6.788.707.043,00	8.511.538.051,00
6.	Natura dan Pakan	176.306.307,70	51.317.138,00
7.	Persediaan dalam Proses	25.000,00	0,00
8.	Barang Tak Habis Pakai	658.000,00	0,00
	Jumlah	24.009.502.641,49	23.089.091.713,44

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Tahun 2024 diantaranya merupakan Bantuan Obat dari Kementerian Kesehatan, Tanah Lapas Perempuan yang akan diserahkan namun belum melalui mekanisme BAST dan Lampu Penerangan Jalan Umum yang Belum diserahkan.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

5.3.1.2.1 Investasi Nonpermanen

Tidak Terdapat Investasi Nonpermanen untuk Tahun 2024 dan 2023

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Desember 2024 Rp84.600.798.820,77	31 Desember 2023 Rp84.868.463.498,63

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2024 dan 2023 atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	PT Gorontalo Fitrah Mandiri		
	Saldo Investasi Tahun Sebelumnya	44.912.500.000,00	44.912.500.000,00
	Penambahan Nilai Investasi Tahun Berjalan	0,00	0,00
	Saldo Penyertaan Modal pada PT GFM	44.912.500.000,00	44.912.500.000,00
	Akumulasi Penurunan Nilai Investasi s.d Tahun Lalu	(38.220.216.515,37)	(30.222.495.222,49)
	Nilai kerugian investasi pada PT GFM tahun berjalan	(267.664.677,86)	(7.708.953.321,57)
	Akumulasi kerugian setelah koreksi	(38.487.881.193,23)	(37.931.448.544,06)
	Penurunan Nilai Investasi Tahun Berjalan	0,00	(288.767.971,31)
	Akumulasi Penurunan Nilai Investasi	(38.487.881.193,23)	(38.220.216.515,37)
	Nilai Investasi pada PT GFM	6.424.618.806,77	6.692.283.484,63
2.	PT Bank Sulut		
	Saldo Investasi Tahun Sebelumnya	78.176.180.014,00	68.176.180.014,00
	Penambahan Saham Hibah dari Pemkab Gorut 100 Lbr @ Rp100.000,-	0,00	0,00
	Penambahan Nilai Investasi Tahun Berjalan	0,00	10.000.000.000,00
	Bagian Dividen Saham Tahun Berjalan	0,00	0,00
	Saldo Penyertaan Modal pada PT Bank Sulut	78.176.180.014,00	78.176.180.014,00
	Total Penyertaan Modal	84.600.798.820,77	84.868.463.498,63

Nilai Penyertaan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada PT Gorontalo Fitrah Mandiri (GFM) hingga akhir tahun 2014 senilai Rp44.912,500,000,00 atau sebesar 99,99% dari keseluruhan modal PT GFM sebesar Rp44.915.000.000,00. Sampai dengan saat penyusunan LKPD Pemprov Gorontalo Tahun 2023, PT GFM hanya menyampaikan laporan keuangan 2024 yang belum diaudit oleh akuntan publik. Laporan keuangan audited PT GFM terakhir diterbitkan di tahun 2023 atas tahun buku 2022. Berdasarkan laporan keuangan tersebut serta hasil rapat TAPD dgn direksi PT GFM, Direksi PT GFM menyatakan bahwa perusahaan sudah tidak beroperasi, karena seluruh karyawan telah di PHK.

Tidak terdapat penambahan atas Investasi Pemerintah Provinsi Gorontalo pada PT Bank Sulut pada Tahun 2024 sehingga total investasi sampai tahun 2024 tetap sebesar Rp78.176.180.014.000,00.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.3 ASET

Saldo Aset Tetap Pemerintah Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.093.303.473.494,77 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.176.149.977.211,47 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Aset Tetap			
		Saldo per 31 Des 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Des 2024
1	Tanah	378.558.233.660,30	5.726.063.187,00	143.192.000,00	384.141.104.847,30
2	Peralatan dan Mesin	810.729.044.002,92	91.344.342.322,00	14.769.947.601,26	887.303.438.723,66
3	Gedung dan Bangunan	1.063.163.484.634,85	85.952.440.313,34	69.815.910.513,89	1.079.300.014.434,30
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.931.972.967.759,31	122.895.977.850,96	14.412.915.245,94	2.040.456.030.364,33
5	Aset Tetap Lainnya	92.064.554.210,22	26.274.527.783,51	49.892.854.892,22	113.258.257.474,22
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	57.646.960.635,14	36.814.215.175,38	49.775.045.778,87	44.568.320.918,30
7	Akumulasi Penyusutan	(2.157.985.267.689,35)	(537.960.632.783,50)	(240.219.207.208,51)	(2.455.726.693.264,34)
	Jumlah	2.176.149.977.213,39	(168.953.066.151,31)	(86.103.562.435,69)	2.093.303.473.494,77

Rincian masing-masing Aset Tetap dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.3.1 Tanah

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp384.141.104.847,30	Rp378.558.233.660,30

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp384.141.104.847,30 dan Tahun 2023 sebesar Rp378.558.233.660,30 merupakan nilai tanah yang dimiliki oleh Pemerintah

Organisasi Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	54.870.000,00	54.870.000,00
Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	2.470.877.769,00	2.108.239.964,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.057.015.000,00	1.057.015.000,00
Badan Penghubung	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	0,00	0,00
Biro Umum	19.269.489.937,15	19.269.489.937,15
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	466.456.400,00	466.456.400,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.776.377.725,00	1.776.377.725,00
Dukcapil dan PMD	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	8.042.202.000,00	8.042.202.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	0,00	0,00
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	1.681.001.733,00	1.681.001.733,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.762.762.021,00	817.204.021,00
Dinas Pariwisata	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan	281.302.784.985,15	281.302.784.985,15



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Organisasi Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00
Kawasan Permukiman		
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
Dinas Pemuda Dan Olahraga	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	0,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	57.698.156.752,00	55.373.635.741,00
Dinas Perhubungan	2.034.554.370,00	140.000.000,00
Dinas Pertanian	3.997.946.255,00	3.942.346.254,00
Dinas Sosial	339.732.000,00	339.732.000,00
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	75.000.000,00	75.000.000,00
Inspektorat	611.877.900,00	611.877.900,00
RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00
Jumlah	384.141.104.847,30	378.558.233.660,30

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp384.141.104.847,30 apabila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp378.558.233.660,30 terdapat kenaikan sebesar Rp5.582.871.185,70 atau 1.47% dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Penambahan:	OPD	Nilai
- Penetapan Status SK 366/29/IX/2024	Dikbud	2.467.713.011,00
- Mutasi dari Dikbud SK 479/29/XII/2024	BKPG	143.192.000,00
- Hibah dari Pemda Gorut SK 424/29/XI/2024	BKPG	219.445.805,00
- Penetapan Status SK 477/29/XII/2024	DLHK	945.558.000,00
- Hibah Kementerian SK 129/29/IV/2024	Pertanian	1,00
- Hibah Kementerian SK 129/29/IV/2025	Pertanian	55.600.000,00
- Hibah dari Pemda Gorut SK 213/29/VI/2024	Perhubungan	1.894.554.370,00
Jumlah		5.726.063.187,00
Pengurangan:	OPD	Nilai
- Mutasi ke BKPG SK 479/29/XII/2024	DIKBUD	143.192.000,00
Jumlah		143.192.000,00
Jumlah Peningkatan / (Penurunan)		5.582.871.187,00

Aset Tetap Tanah yang disewakan kepada PT. Harim Farmsco Indonesia berlokasi di Jalan Raya Trans Sulawesi Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dengan nilai aset sebesar Rp473.000.000,00 sebagaimana Dokumen Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan PT Harim Farmsco Indonesia dengan Nomor 655/PEMKESRA/PK/XI/2021 dan Nomor 0081/NPS-HFI/XI/2021 Tanggal 1 November 2021 dengan masa perjanjian 5 Tahun. Aset Tetap Tanah tersebut telah direklasifikasi ke akun yang sesuai, yaitu Properti Investasi Tanah.

Terdapat dua persil tanah yang digunakan pihak lain yang termasuk ke dalam Properti Investasi, yaitu PT Pertamina Petra Niaga Makassar senilai Rp255.000.000,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dan PT Harim senilai Rp425.062.500,00.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp887.303.438.723,66 **Rp810.729.044.002,92**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp887.303.438.723,66 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp810.729.044.002,92 merupakan Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan Pengguna Barang adalah SKPD sebagai berikut:

Organisasi Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Badan Kepegawaian Daerah	4.285.283.467,00	4.166.083.467,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.207.388.325,00	3.987.992.425,00
Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	26.333.645.513,50	25660348313,50
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.670.172.165,00	23.623.722.165,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.099.846.277,00	7.768.549.277,00
Badan Penghubung	4.792.442.825,00	4.495.417.825,00
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	10.466.748.347,00	10.083.225.347,00
Biro Hukum	2.093.529.337,00	1.933.363.337,00
Biro Organisasi	3.821.724.098,00	3.692.315.371,00
Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	3.687.352.184,00	3.615.927.184,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.589.652.699,00	2.534.902.699,00
Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	3.606.522.950,00	3.541.622.950,00
Biro Umum	48.170.969.954,00	48.400.224.110,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.843.466.792,00	2.780.066.792,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	31.800.907.947,00	28.088.801.717,00
Dukcapil dan PMD	4.469.607.144,00	4.253.589.564,00
Dinas Kesehatan	23.097.749.983,00	21.464.755.656,00
Dinas Ketahanan Pangan	3.862.824.422,00	3.129.594.422,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	25.349.566.595,00	25.249.628.795,00
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	11.248.273.244,04	11.248.273.244,04
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.785.460.235,00	16.632.683.235,00
Dinas Pariwisata	5.034.907.991,00	4.834.891.195,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	33.249.358.139,50	32.806.482.639,50
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.327.040.954,00	2.033.540.954,00
Dinas Pemuda Dan Olahraga	2.208.369.733,00	2.143.181.233,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4.934.422.925,00	4.834.735.925,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	293.852.660.598,07	270.474.681.077,33
Dinas Perhubungan	19.578.390.057,00	19.522.162.053,00
Dinas Pertanian	71.190.638.943,00	67.521.046.675,00
Dinas Sosial	4.570.622.970,00	4.160.399.970,00
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	3.237.799.700,00	3.145.049.700,00
Inspektorat	5.683.956.427,00	4.948.056.427,00
RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	126.899.103.876,35	92.307.399.145,35
Satuan Polisi Pamong Praja	4.232.115.148,20	4.158.678.148,20
Sekretariat Daerah	18.330.678.051,00	18.120.617.838,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Organisasi Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Sekretariat DPRD	23.690.238.707,00	23.367.033.127,00
Jumlah	887.303.438.723,66	810.729.044.002,92

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp887.303.438.723,66 apabila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp810.729.044.002,92 terdapat penambahan sebesar Rp76.574.394.720,74 atau 9,35% dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Penambahan:	OPD	Nilai
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin		73.194.098.495
- Reklasifikasi Surat 900/DIKBUD/6287/SEK/XII/2024	DIKBUD	53.000.000,00
- Koreksi SPB BOS Reguler Surat Nomor 000.2.3.2/BKPG-ASET/0011/III/2025	DIKBUD	6.551.085.284,00
- Hibah NPHD No. BKL-YAMAHA/NO.01/XII/2024	DIKBUD	18.000.000,00
- Hibah SK 356/29/IX/2024	BPBD	26.500.000,00
- Mutasi dari Dinas Pertanian SK 24/29/I/2024	BPSDM	1.331.297.000,00
- Hibah SK 30/29/I/2024	PANGAN	135.750.000,00
- Hibah SK 343/29/VIII/2024	P3A	243.200.000,00
- Reklasifikasi Surat 500.6/DISTAN-SEK/211/PBB/II/2025	PERTANIAN	62.419.568,00
- Reklasifikasi Surat No. 31/DLHK-SEK/XII/2024	DLHK	8.750.000,00
- Reklasifikasi Surat 800/RSUD-HAH/4834/XII/2024	RS. AINUN	8.478.250.000,00
- Reklasifikasi Surat 800/RSUD-HAH/4837/XII/2024	RS. AINUN	384.320.125,00
- Reklasifikasi Surat 800/RSUD-HAH/4832/XII/2024	RS. AINUN	57.886.900,00
- Reklasifikasi Surat 800/RSUD-HAH/4827/XII/2024	RS. AINUN	1.135.000,00
- Reklasifikasi Surat 800/RSUD-HAH/4827/XII/2024	RS. AINUN	3.246.750,00
- Reklasifikasi Sura 165/Set.DPRD/1787/XII/2024	DPRD	9.000.000,00
- PAJE#004 Hibah CSR BSG	BKPG	286.297.200,00
- PAJE#015 Hibah CSR dari PT. Gratia Jaya Mulia	RS. AINUN	494.860.000,00
- PRJE#002 Jasa BOSP SMK 2 Gorut	DIKBUD	5.246.000,00
Jumlah		91.344.342.322,00
Pengurangan:		
- Penghapusan SK 509/6/XII/2024	BIRO UMUM	645.875.000,00
- Reklasifikasi Surat 940/UMUM/ 225 /II/2025	BIRO UMUM	26.550.000,00
- Barang extracomptable surat 000.2.3.2/BKPG-ASET/008/III/2025	BIRO UMUM	16.466.550,00
- Reklasifikasi surat 523/DKP/1681/A/XII/2024	PERIKANAN	188.934.429,00
- Barang ekstrakomptabel surat 000.2.3.2/BKPG-ASET/008/III/2025	PERIKANAN	2.287.390,00
- Reklasifikasi surat 000.2.3.1/DKPS-PMD/1091/XI/2024	DUKCAPIL	972.840,00
- Reklasifikasi surat 000.02.3.1/DKPS-PMD/04/I/2025	DUKCAPIL	428.400,00
- Penghapusan SK 67/21/II/2023	DLHK	19.444.000,00
- Barang ekstrakomptabel surat 000.2.3.2/BKPG-ASET/008/III/2025	DLHK	3.000.000,00
- Reklasifikasi 556/DISPAR-DEST/342/II/2024	PARIWISATA	59.900.000,00
- Barang ekstrakomptabel surat 000.2.3.2/BKPG-ASET/008/III/2025	PU	41.475.000,00
- Reklasifikasi surat 030/PUPR-PKP/676 /II/2025	PU	150.000,00
- Koreksi SPB BOS Reguler Surat Nomor 000.2.3.2/BKPG-ASET/0011/III/2025	DIKBUD	6.319.971.053,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penambahan:	OPD	Nilai
- Penyesuaian Surat 900/DIKBUD/1150/SEK/III/ 2025 LAMPIRAN BOS PM	DIKBUD	2.318.723.184,50
- Reklasifikasi 900/DIKBUD/1310/SEK/ III / 2025	DIKBUD	40.000.000,00
- Barang Ekstrakomptabel surat 000.2.3.2/BKPG-ASET/008/III/2025	DIKBUD	861.752.178,84
- Penghapusan SK 414/18/X/2024	DIKBUD	859.320.198,00
- Reklasifikasi Surat 900/Dishub-sek/1650/XII/2024	PERHUBUNGAN	86.379.676,00
- Mutasi ke BPSDM SK 24/29/I/2024	PERTANIAN	1.331.297.000,00
- Reklasifikasi surat 500.6/DISTAN-SEK/211/PBB/II/2025	PERTANIAN	13.646.500,00
- Reklasifikasi surat 001/DINSOS/SEKR/1831/XII/2024	DINSOS	10.342.400,00
- Reklasifikasi surat 001/DINSOS/SEKR/096/I/2025	DINSOS	635.000,00
- Barang ekstrakomptabel surat 000.2.3.2/BKPG-ASET/008/III/2025	DINSOS	8.000.000,00
- Barang ekstrakomptabel 800/RSUD-HAH/ 224 /I/2025	RS. AINUN	26.693.800,00
- Reklasifikasi surat 800/SPPP/1567/XII/2024	SATPOL PP	1.232.000,00
- Barang ekstrakomptabel 000.2.3.2/BKPG-ASET/008/III/2025	SATPOL PP	1.275.000,00
- Penghapusan SK 416/29/X/2024	DPRD	1.885.196.000,00
Jumlah		14.769.947.599,34
Jumlah Peningkatan / (Penurunan)		76.574.394.722,66

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024
Rp1.079.303.014.434,30

31 Desember 2023
Rp1.063.163.484.634,85

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.079.303.014.434,30 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.063.163.484.634,85 merupakan aset tetap gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan pengguna barang adalah SKPD sebagai berikut:

Organisasi Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Badan Kepegawaian Daerah	4.353.919.500,00	4.353.919.500,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.332.084.000,00	1.332.084.000,00
Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	23.619.496.020,00	22.204.373.656,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.970.862.917,00	3.970.862.917,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.665.021.244,00	13.929.039.628,00
Badan Penghubung	1.570.544.260,00	1.385.844.260,00
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	9.967.757.000,00	9.967.757.000,00
Biro Hukum	159.640.500,00	159.640.500,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	4.653.787.827,00	4.653.787.827,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	1.818.256.268,00	1.818.256.268,00
Biro Umum	88.678.144.319,06	86.594.290.864,06
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.042.976.663,00	5.042.976.663,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	55.952.590.803,85	53.402.139.003,85
Dukcapil dan PMD	4.452.783.000,00	4.452.783.000,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Organisasi Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dinas Kesehatan	14.941.064.883,00	14.941.064.883,00
Dinas Ketahanan Pangan	40.000.000,00	40.000.000,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	2.358.752.843,00	2.358.752.843,00
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	14.922.372.481,18	14.922.372.481,18
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.641.474.456,44	9.947.619.573,44
Dinas Pariwisata	15.652.775.230,65	15.239.075.230,65
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	60.036.553.593,00	62.727.897.095,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
Dinas Pemuda Dan Olahraga	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	769.452.000,00	769.452.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	466.078.961.773,46	457.271.761.183,01
Dinas Perhubungan	18.269.394.229,80	18.269.394.230,15
Dinas Pertanian	54.448.058.324,40	60.776.072.831,40
Dinas Sosial	8.818.332.538,00	8.818.332.538,00
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	1.159.364.000,00	1.159.364.000,00
Inspektorat	6.912.490.425,00	6.912.490.425,00
RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	144.336.789.316,64	143.505.536.216,64
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	2.339.048.600,00	2.339.048.600,00
Sekretariat DPRD	30.340.265.417,47,00	29.897.495.417,47
Jumlah	1.079.303.014.434,30	1.063.163.484.634,85

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.079.303.014.434,30 apabila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.063.163.484.634,85 terdapat kenaikan sebesar Rp16.139.529.799,45 atau 1.52% dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Penambahan:	OPD	Nilai
- Belanja Modal Gedung Bangunan		68.302.416.338,00
- Mutasi SK NO. 479/29/XII/2024 TGL. 04 Desember 2024	BKPG	1.415.122.364,00
- Mutasi SK NO. 24/29/I/2024 TGL 9 JANUARI 2024	BPSDM	8.745.981.616,00
- Koreksi Surat NO. 000.2.3.2/BKPG-Aset/002/II/2025 TGL. 04 Februari 2025	PENGHUBUNG	184.700.000,00
- Koreksi Surat NO. 000.2.3.2/BKPG-Aset/002/II/2025 TGL. 04 Februari 2025	B. UMUM	2.083.853.455,00
- Reklasifikasi Surat NO. 900/DIKBUD/797/SEK/II/2024 TGL. 12 Februari 2025	DIKBUD	539.655.474,34
- Reklasifikasi NO. 900/DIKBUD/796/SEK/II/2024 TGL. 12 Feruari 2025	DIKBUD	996.893.745,00
- Penetapan Status SK NO 366/29/IX/2024 TGL 14 September 2024	DIKBUD	2,00
- Fisik_100% Keu_95% Surat NO. 400/DIKBUD/7614/SEK/XII/2024	DIKBUD	329.638.184,00
- Reklasifikasi Surat NO. 900/DIKBUD/7616/SEK/XII/2024 TGL. 31 DES 2024	DIKBUD	530.891.558,00
- Koreksi Surat NO. 000.2.3.2/BKPG-Aset/002/II/2025 TGL. 04 Februari 2025	PERTANIAN	399.734.000,00
- Reklasifikasi Surat NO. 500.6/DISTAN-	PERTANIAN	1.534.857.677,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SEK/344/PB/III/2025 TGL 05 Maret 2025		
- Koreksi Dari Ekstrakomptabel Surat NO. 000.2.3.2/BKPG-Aset/002/II/2025	RS. AINUN	7.900.000,00
- Reklasifikasi Surat NO. 800/RSUD-HAH/4839/XII/2024 TGL. 31/12/2024	RS. AINUN	199.800.000,00
- Reklasifikasi FISIK 100% KEUANGAN 95% TAHUN 2024	RS. AINUN	9.970.000,00
- Pengakuan Utang 800/RSUD-HAH/068/I/2024 TGL. 06 JAN 2024	RS. AINUN	18.129.000,00
- Mutasi NO. 000.2.3.2/BKPG-Aset/002/II/2025 TGL. 04 Februari 2025	SET. DPRD	442.770.000,00
- PAJE#015 BANGUNAN KESEHATAN	RS. AINUN	119.460.000,00
- PRJE#006 PAGAR	DIKBUD	47.000.000,00
- PRJE#008 PAGAR	DIKBUD	43.666.900,00
Jumlah		85.952.440.313,34
Pengurangan:	OPD	Nilai
- Barang ekstrakomptabel Surat NO. 000.2.3.2/BKPG-ASET/008/III/2025	BPSDM	10.000.000,00
- Reklasifikasi Surat No 523/DKP/1681/A/XII/2024	KELAUTAN	47.323.900,00
- Reklasifikasi Surat NO. 523/DKP/028/A/I/2025 TGL. 08 Januari 2025	KELAUTAN	141.512.950,00
- Barang ekstrakomptabel NO. 000.2.3.2/BKPG-ASET/008/III/2025	KELAUTAN	74.944.500,00
- Reklasifikasi Surat 523/DKP/1684/A/XII/2024.	KELAUTAN	53.865.103,00
- Reklasifikasi Surat No. 800/dikes/220/XII/2024	DIKES	43.109.342,00
- Pengakuan Uang Muka Surat NO. 800/Dikes/015/I/2025 TGL. 09 Januari 2025	DIKES	6.358.294.536,00
- Pengakuan Uang Muka	DIKES	1.886.264.352,00
- Penghapusan Hibah SK. NO. 477/29/XII/2024 TGL 31 Desember 2024	DLHK	306.145.117,00
- Reklasifikasi Surat NO. 556/Dispar-Sek/81/II/2025 TGL. 07 Februari 2025	PARIWISATA	49.950.000,00
- Koreksi Surat NO. 000.2.3.2/BKPG-Aset/002/II/2025 TGL. 04 Februari 2025	PUPR	3.111.057.455,00
- Reklasifikasi Surat NO. 030/PUPR-PKP/676/II/2025 TGL. 20 Februari 2025	PUPR	7.127.830.260,00
- Reklasifikasi Surat NO. 900/DIKBUD/796/SEK/II/2024 TGL. 12 Februari 2025	DIKBUD	151.586.004,00
- Mutasi SK NO. 479/29/XII/2024 TGL. 04 Desember 2024	DIKBUD	1.415.122.364,00
- Reklasifikasi NO. 900/DIKBUD/7615/SEK/XII/2024 TGL. 31 Desember 2024	DIKBUD	860.910.002,00
- Penyesuaian Utang Belanja NO. 400/DIKBUD/7617/SEK/XII/2024	DIKBUD	553.142.586,00
- Penyesuaian Utang Belanja NO. 900/DIKBUD/797/SEK/II/2025	DIKBUD	143.976.240,00
- Penghapusan SK NO. 414/18/X/2024 TGL 21 Oktober 2024	DIKBUD	2.497.328.000,00
- Mutasi SK NOMOR 24/29/I/2024 Tgl 9 Januari 2024	BPSDM	8.735.981.616,00
- Reklasifikasi Surat NO. 500.6/DISTAN-SEK/211/PBB/II/2025	PERTANIAN	6.364.568,00
- Utang Retensi Surat NO. 800/RSUD-HAH/3463/X/2024	RS. AINUN	9.990.550,00
- Reklasifikasi Surat NO. 800/RUD-HAH/4834/XII/2024 TGL 31/12/2024	RS. AINUN	8.478.250.000,00
- Reklasifikasi Surat NO. 00/RSUD-HAH/4832/XII/2024 TGL. 31/12/2024	RS. AINUN	57.886.900,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Reklasifikasi Keu 38,34% Fisik 34,8%	RS. AINUN	4.757.581.658,97
- Pengakuan Uang Muka	RS. AINUN	5.188.202.464,00
- Pengakuan Uang Muka	PERHUBUNGAN	3.852.582.606,48
PAJE#018 Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	KELAUTAN	221.627.500,00
- PAJE#024 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	DIKBUD	349.634.542,89
- PAJE#041 BANGUNAN GEDUNG KANTOR	DIKBUD	7.953.003.099,00
- PAJE#041 BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	DIKBUD	495.503.500,00
- PAJE#041 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	DIKBUD	2.444.595.934,00
- PAJE#041 BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	DIKBUD	19.850.000,00
- PAJE#041 BANGUNAN FASILITAS UMUM	DIKBUD	1.790.093.864,00
- PAJE#041 RUMAH NEGARA GOLONGAN 3	DIKBUD	477.374.000,00
- PAJE#041 TUGU	DIKBUD	142.025.000,00
Jumlah		69.812.910.514,34
Jumlah Peningkatan/(Penurunan)		16.139.529.799,00

Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang disewakan kepada PT Aleve Global berlokasi di Kecamatan Isimu Kabupaten Gorontalo dengan nilai aset sebesar Rp2.553.000.000,00 sebagaimana Dokumen Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan PT Aleve Global dengan Nomor 088/AG/SK/XII/2022 dan Nomor 523/DKP/1794/F/BA/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022 dengan masa perjanjian 5 Tahun. Aset Tetap tersebut telah direklasifikasi ke Properti Investasi Gedung Bangunan

Selain itu, terdapat Gedung dan Bangunan yang dipinjam pakai kepada pihak eksternal, yaitu:

- Gedung dan Bangunan pada Biro Umum sebesar Rp861.283.560,00 tahun perolehan 2010 yang dipinjam pakai kepada LLDIKTI Wilayah XVI dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo.
- Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga sebesar Rp541.550.000,00 tahun perolehan 2010 yang dipinjam pakai kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
- Gedung dan Bangunan pada Dinas Pertanian sebesar Rp1.175.882.200,00 tahun perolehan 2003 yang dipinjam pakai kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Gorontalo

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2024
Rp2.040.456.030.364,33

31 Desember 2023
Rp1.931.972.967.759,31

Saldo Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.040.456.030.364,33 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.931.972.967.759,31 merupakan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan pengguna barang adalah SKPD sebagai berikut:

Organisasi Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Badan Kepegawaian Daerah	48.700.000,00	48.700.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	53.070.090,00	53.070.090,00
Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	2.013.227.959,00	2.013.227.959,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Organisasi Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.702.891.898,00	3.702.891.898,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.895.345.811,00	2.597.665.500,00
Badan Penghubung	135.346.000,00	135.346.000,00
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	957.642.880,00	957.642.880,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5.000.000,00	5.000.000,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	149.674.872,00	149.674.872,00
Biro Umum	9.712.548.120,45	9.712.548.120,45
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	59.727.500,00	59.727.500,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	48.287.824.660,86	45.384.536.814,86
Dukcapil dan PMD	193.274.000,00	193.274.000,00
Dinas Kesehatan	1.019.509.505,00	1.882.174.505,00
Dinas Ketahanan Pangan	7.500.000,00	0,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	79.931.000,00	79.931.000,00
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	1.421.506.600,00	1.421.506.600,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.713.340.545,39	4.582.227.635,39
Dinas Pariwisata	1.011.955.197,00	962.005.197,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.881.722.589.839,63	1.779.401.640.800,61
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
Dinas Pemuda Dan Olahraga	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	96.000.000,00	96.000.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.345.706.355,00	16.891.173.289,00
Dinas Perhubungan	8.702.815.482,00	8.702.815.482,00
Dinas Pertanian	7.399.596.855,00	7.966.885.422,00
Dinas Sosial	199.900.000,00	199.900.000,00
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	33.577.546.387,00	33.577.546.387,00
Inspektorat	56.000.000,00	56.000.000,00
RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	9.285.543.932,00	4.537.540.932,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	86.997.000,00	86.997.000,00
Sekretariat DPRD	6.515.317.875,00	6.515.317.875,00
Jumlah	2.040.456.030.364,33	1.931.972.967.759,31

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.040.456.030.364,33 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.931.972.967.759,31 terdapat peningkatan sebesar Rp108.483.062.605,02 atau 5,62% dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Penambahan:			
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			70.394.263.930,00
- Mutasi Nomor SK 24/29/I/2024	BPSDM		1.297.680.311,00
- Fisik 100% Keuangan 95% Surat No.	DIKES		4.350.000,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

800/DIKES/7627/XII/2024		
- Reklasifikasi Surat No. 556/Dispar-Sek/81/II/2025	DIKES	49.950.000,00
- Penetapan Status SK. 386/29/IX/2024	PUPRPKP	3,00
- Reklasifikasi Jalan Labanu- Tolongio Surat 030/PUPR-PKP/676/II/2025	PUPRPKP	29.821.069.642,11
- Reklasifikasi Jalan Provinsi (Buti-Karangetan) Surat 030/PUPR-PKP/676/II/2025	PUPRPKP	4.832.389.365,00
- Reklasifikasi (Tebilo-Pilolodaa-Iluta) Surat 030/PUPR-PKP/676/II/2025	PUPRPKP	12.353.748.140,00
- Reklasifikasi Beban Jasa Desain Rekayasa Surat 030/PUPR-PKP/676/II/2025	PUPRPKP	1.275.025.990,00
- Fisik 100% Surat 030/PUPR-PKP/676/II/2025	PUPRPKP	1.248.802.702,85
- Reklasifikasi Surat 900/DIKBUD/796/SEK/II/2024	DIKBUD	29.532.373,00
- Reklasifikasi Surat 500.6/DISTAN-SEK/344/PB/III/2025	DISTAN	430.591.744,00
- Mutasi Surat No. 000.2.3.2/BKPG-Aset/002/II/2025	RS. AINUN	949.665.000,00
- Reklasifikasi Surat 1231004/AINUN-RBA/2024	RS. AINUN	208.908.650,00
Jumlah		122.895.977.850,96
Pengurangan:		
- Reklas Surat 523/DKP/1681/A/XII/2024	DKP	45.581.085,00
- Reklas ke Persediaan Surat No. 523/DKP/028/A/I/2025	DKP	55.794.450,00
- Mutasi Surat No. 000.2.3.2/BKPG-Aset/002/II/2025	DIKES	949.665.000,00
- Penghapusan BMD SK No. 436/21/XII/2024	DLHK	1.515.796.000,00
- Penghapusan BMD SK No. 435/21/XII/2022	DLHK	353.091.090,00
- Reklasifikasi (Hunggaluwa-Dehuwalolo) Surat 030/PUPR-PKP/676/II/2025	PUPRPKP	8.168.961.655,00
- Reklasifikasi Surat 030/PUPR-PKP/676/II/2025	PUPRPKP	653.198.683,00
- Utang Retensi Surat 030/PUPR-PKP/676/II/2025	PUPRPKP	929.144.903,00
- Reklasifikasi Surat 900/DIKBUD/7616/SEK/XII/2024	DIKBUD	40.872.386,00
- Mutasi SK Nomor 24/29/I/2024	DISTAN	1.297.680.311,00
- Penyelesaian Utang Surat 1126002/JB/AINUN-RBA/2024	RS. AINUN	9.938.298,00
- Kelebihan pembayaran atas Paket Pekerjaan Belanja Modal JIJ	PUPRPKP	393.191.384,94
Jumlah		14.412.915.245,94
Jumlah Peningkatan/(Penurunan)		108.483.062.605,02

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp113.258.257.474,22 **Rp92.064.554.210,22**

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp113.258.257.474,22 dan Tahun 2023 sebesar Rp92.064.554.210,22 merupakan aset tetap lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan pengguna barang adalah SKPD sebagai berikut:

Organisasi Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
- Badan Kepegawaian Daerah	533.504.000,00	533.504.000,00
- Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
- Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	0,00	0,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	195.210.400,00	195.210.400,00
- Badan Penghubung	19.250.000,00	19.250.000,00
- Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	41.450.000,00	41.450.000,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Biro Hukum	88.710.000,00	88.710.000,00
- Biro Organisasi	0,00	0,00
- Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
- Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
- Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	0,00	0,00
- Biro Umum	272.360.000,00	272.360.000,00
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.419.491.302,00	1.419.491.302,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	5.621.812.500,00	5.400.185.000,00
- Dukcapil dan PMD	330.715.000,00	330.715.000,00
- Dinas Kesehatan	0,00	0,00
- Dinas Ketahanan Pangan	30.541.075,00	30.541.075,00
- Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	36.963.734,00	36.963.734,00
- Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	99.979.712,00	99.979.712,00
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.497.722.382,00	5.497.722.382,00
- Dinas Pariwisata	106.414.660,00	6.464.660,00
- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.970.518.627,00	1.970.518.627,00
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
- Dinas Pemuda Dan Olahraga	0,00	0,00
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	0,00
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	89.530.726.321,00	68.658.600.557,49
- Dinas Perhubungan	556.842.000,00	556.842.000,00
Dinas Pertanian	4.106.638.741,22	4.106.638.740,73
Dinas Sosial	1.066.449.970,00	1.066.449.970,00
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	0,00	0,00
Inspektorat	7.490.700,00	7.490.700,00
RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	37.196.000,00	37.196.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	109.087.500,00	109.087.500,00
Sekretariat Daerah	324.177.500,00	324.177.500,00
Sekretariat DPRD	905.005.350,00	905.005.350,00
Jumlah	113.258.257.474,22	92.064.554.210,22

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp113.258.257.474,22 apabila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp92.064.554.210,22 terdapat kenaikan sebesar Rp21.193.703.264,00 atau 8,31% dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Penambahan:			
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	PERTANIAN	4.990.000,00
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	DPRD	9.000.000,00
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	PERPUSTAKAAN	68.500.000,00
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	PARIWISATA	99.950.000,00
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	DIKBUD OPD	53.000.000,00
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	DIKBUD DANA BOS	8.220.019.637,51
-	Koreksi Saldo Awal	DIKBUD	157.264.449,00
-	Hibah dari Yamaha	DIKBUD	8.000.000,00
-	Koreksi SPB	DIKBUD	4.097.730.800,00
-	Reklas dari PM	DIKBUD	12.000.000,00
-	Pencatatan Aset Tetap Bangunan Gedung yg Belum diserahkan	Dinas Kelautan dan	221.627.500,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	ke Aset Tetap dalam Renovasi Tahun 2024 (Paje#018)	Perikanan	
-	Aset Tetap Dalam Renovasi (PAJE#041)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.322.445.397,00
	Jumlah		26.274.527.783,51
Pengurangan:			
-	Reklasifikasi Surat 000.3/ARPUS/832/XII/2024	PERPUSTAKAAN	68.500.000,00
-	Reklasifikasi Surat 500.6/DISTAN-SEK/211/PBB/II/2025	PERTANIAN	4.990.000,00
-	Reklasifikasi Surat 165/Set.DPRD/1787/XII/2024	DPRD	9.000.000,00
-	Koreksi SPB	DIKBUD	4.388.716.310,00
-	Penghapusan Rusak Berat	DIKBUD	552.741.282,00
-	Reklas ke barjas BOS	DIKBUD	3.876.928,00
-	Reklas ke PM	DIKBUD	53.000.000,00
	Jumlah		5.080.824.520,00
	Jumlah Peningkatan / (Penurunan)		21.193.703.263,51

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2024
Rp44.568.320.918,30

31 Desember 2023
Rp57.646.960.635,14

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.568.320.918,30 dan Tahun 2023 sebesar Rp57.646.960.635,14 merupakan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan pengguna barang adalah SKPD sebagai berikut:

Organisasi Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
Badan Penghubung	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	0,00	0,00
Biro Umum	0,00	0,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	59.985.000,00	59.985.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.687.063.715,00	1.489.756.315,70
Dukcapil dan PMD	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	8.566.358.738,00	321.799.850,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	0,00	0,00
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00
Dinas Pariwisata	0,00	0,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Organisasi Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.794.854.250,37	53.415.294.954,10
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
Dinas Pemuda Dan Olahraga	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	0,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	581.175.356,00	2.261.700.815,34
Dinas Perhubungan	3.852.582.606,48	0,00
Dinas Pertanian	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	0,00	98.423.700,00
Inspektorat	0,00	0,00
RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	9.026.301.251,76	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00
Jumlah	44.568.320.918,30	57.646.960.635,14

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.568.320.918,30 apabila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp57.646.960.635,14 terdapat penurunan sebesar Rp13.078.639.716,84 atau sebesar 22,69% dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Penambahan		
- Reklasifikasi surat 030/PUPR-PKP/676/II/2025	PU	15.296.791.915,00
- Reklasifikasi jasa desain rekayasa surat 030/PUPR-PKP/676/II/2025	PU	195.502.080,00
- Reklasifikasi surat 523/DKP/028/A/I/2025	PERIKANAN	197.307.400,00
- Reklasifikasi surat 800/Dikes/015/I/2025	DIKES	8.244.558.888,00
- Reklasifikasi surat 032/Dishub/34/I/2025	PERHUBUNGAN	3.852.582.606,00
- Reklasifikasi surat 800/RSUD-HAH/142/I/2025	RSUD. AINUN	9.027.472.286,38
Jumlah		36.814.215.175,38
Pengurangan:		
- Reklas ke jasa perencanaan surat 560/DTK ESDM/194/III/2025	NAKERTRANS	98.423.700,00
- Reklasifikasi surat 030/PUPR-PKP/676/II/2025	PU	47.994.925.584,91
- Reklasifikasi surat 900/DIKBUD/797/SEK/II/2024	DIKBUD	539.655.474,34
- Reklasifikasi surat 900/DIKBUD/796/SEK/II/2024	DIKBUD	1.140.869.985,00
- Penyesuaian nilai KDP Progress pembangunan Gedung Bangunan RSUD HAH	RSUD. AINUN	1.171.034,62
- PAJE#032 Kantor BKPG	PU	112.414.837,27
- PAJE#025 Kelebihan pembayaran atas Paket Pekerjaan Belanja Modal JIJ	PU	5.390.059,63
Jumlah		49.892.850.675,77
Jumlah Peningkatan / (Penurunan)		(13.078.635.500,39)

Nilai Konstruksi Dalam Pekerjaan di Dinas PUPR sebesar Rp20.794.854.250,37 diantaranya berupa KDP atas pekerjaan Bangunan Gedung Kantor Badan Keuangan



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Provinsi Gorontalo. Juga terdapat nilai konstruksi dalam pekerjaan pada RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie sebesar Rp9.026.301.251,76 berupa Bangunan Gedung Kesehatan, pada Dinas Kesehatan Sebesar Rp8.566.358.738,00 yaitu Bangunan Gedung Kantor Laboratorium Kesehatan Daerah dan Dinas Perhubungan Sebesar Rp3.852.582.606,48.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp2.455.726.693.267,34)	31 Desember 2023 (Rp2.157.985.267.689,35)

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Penyusutan dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Disamping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk mengalokasikan beban penyusutan yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan. Akumulasi penyusutan dan Nilai Buku setiap jenis aset tetap per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Uraian	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
- Aset Tetap Tanah	384.141.104.847,30	0,00	384.141.104.847,30
- Aset Tetap Peralatan dan mesin	887.303.438.723,66	(676.250.267.800,31)	211.053.170.923,35
- Aset Tetap Gedung dan bangunan	1.079.303.014.434,30	(442.534.044.140,07)	636.768.970.294,23
- Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	2.040.456.030.364,33	(1.333.725.067.272,29)	706.730.963.092,04
- Aset Tetap Lainnya	113.258.257.474,22	(3.217.314.054,67)	110.040.943.419,55
- Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.568.320.918,30	0,00	44.568.320.918,30
Jumlah	4.549.030.166.762,11	(2.455.726.693.267,34)	2.093.303.473.494,77

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Pemilihan metode garis lurus dimaksudkan untuk mempermudah dalam perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, karena penyusutan aset tetap pada pemerintah daerah dimaksudkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya.

Pada Tahun 2024 Pemprov Gorontalo telah melakukan penyesuaian masa manfaat sesuai Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Penyesuaian masa manfaat aset tersebut berpengaruh pada penyajian nilai beban dan akumulasi penyusutan. Adapun selisih nilai Akumulasi Penyusutan pada masing-masing jenis aset sebesar Rp259.462.789.314,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Rp4.452.505.932,24).
2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp9.567.313.882,30).
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan jaringan (Rp27.347.007.666,71).



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp500.536.903,33

Atas selisih nilai tersebut, telah dilakukan koreksi akumulasi penyusutan yang berdampak pada koreksi ekuitas sebesar Rp40.866.290.577,92

Penambahan:		
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	ATPM	(79.925.569.790,00)
- Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	ATPM	(53.176.968.633,30)
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	ATGB	(43.684.328.921,00)
- Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	ATGB	(18.338.123.969,46)
- Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan jaringan	AT JIJ	(135.394.844.165,00)
- Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan jaringan	AT JIJ	(55.332.765.421,50)
- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	ATL	(458.046.438,00)
- PAJE#036 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	AKP-PM	(822.818.224,00)
- PAJE#014 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2001 s/d 2023	AKP-GB	(13.209.230,04)
- PAJE#015 Penyesuaian Hibah CSR PT. Gratia Jaya Mulia	AKP-GB	(344.715,01)
- PAJE#016 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2001 s/d 2023	AKP-GB	(132.385.051,49)
- PAJE#018 Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	AKP-GB	(4.432.550,00)
- PAJE#019 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2001 s/d 2023	AKP-GB	(8.878.842,81)
- PAJE#020 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2001 s/d 2023	AKP-GB	(7.382.835,49)
- PAJE#023 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2001 s/d 2023	AKP-GB	(147.600.978,40)
- PAJE#024 Penyesuaian Kurang Volume Ruang Laboratorium Bahasa	AKP-GB	(330.977,39)
- PAJE#025 Penyesuaian Kurang Volume Ruang Laboratorium Fisika	AKP-GB	(142.296,42)
- PAJE#026 Penyesuaian Kurang Volume Ruang Laboratorium Kimia	AKP-GB	(231.613,53)
- PAJE#027 Penyesuaian Kurang Volume Pembangunan Kembali SMAN 1 Boliyohuto	AKP-GB	(58.278,72)
- PAJE#028 Penyesuaian Kurang Volume Ruang OSIS	AKP-GB	(162.532,63)
- PAJE#029 Penyesuaian Kurang Volume Ruang Laboratorium Biologi	AKP-GB	(81.184,23)
- PAJE#030 Penyesuaian Kurang Volume Ruang Kelas Baru (RKB)	AKP-GB	(114.451,16)
- PAJE#031 Penyesuaian Kurang Volume Ruang Laboratorium Bahasa	AKP-GB	(73.415,34)
- PAJE#036 Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke Properti Investasi	AKP-GB	(768.773.261,20)
- PAJE#038 Penyesuaian Kurang Volume Pembangunan Kembali SMAN 4 Gorontalo	AKP-GB	(197.698,02)
- PAJE#041 Penyesuaian Pencatatan Politeknik Gorontalo dan 3 (tiga) Sekolah Dasar	AKP-GB	(533.143.271,00)
- PAJE#023 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2001 s/d 2024	AKP-JIJ	(149.118.609.991,03)
- PAJE#036 Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke Properti Investasi	AKP-JIJ	(49.775.714,00)
Jumlah		(537.919.394.450,17)
Pengurangan:		
- Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	ATPM	(48.724.462.701,06)
- Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	ATGB	(8.770.810.087,16)
- Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan jaringan	ATJIJ	(27.985.757.754,79)
- Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	ATL	(500.536.903,33)
- PAJE#004 Penyesuaian Hibah CSR PT. Bank SulutGo	AKP-PM	(14.314.860,00)
- PRJE#002 Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BOSP ke ATPM	AKP-PM	(874.333,33)
- PAJE#014 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2001 s/d 2023	AKP-GB	(715.063,00)



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- PAJE#015 Penyesuaian Hibah CSR PT. Gratia Jaya Mulia	AKP-PM	(41.238.333,33)
- PAJE#016 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2001 s/d 2023	AKP-GB	(78.849.650,00)
- PAJE#020 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2001 s/d 2023	AKP-GB	(7.135.372,51)
- PAJE#021 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2001 s/d 2023	AKP-GB	(288.264.943,60)
- PAJE#022 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2001 s/d 2023	AKP-GB	(487.374.735,96)
- PAJE#023 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2001 s/d 2024	AKP-GB	(691.141.639,81)
- PRJE#006 Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BOSP ke ATGB SMAN 9 Gorut	AKP-GB	(1.566.666,67)
- PRJE#008 Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BOSP ke ATGB SMAN 1 Tilamuta	AKP-GB	(291.112,67)
- PAJE#023 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2001 s/d 2024	AKP-JIJ	(146.877.280.292,06)
- PAJE#018 Penyesuaian Pencatatan AT Bangunan Gedung yang belum diserahkan	AKP-ATL	(4.432.550,00)
- PAJE#041 Penyesuaian Pencatatan Politeknik Gorontalo dan 3 (tiga) Sekolah Dasar	AKP-ATL	(533.143.271,00)
- PAJE#025 Kelebihan pembayaran atas Paket Pekerjaan Belanja Modal JIJ	AKP-JIJ	5.537.889,84
Jumlah		(235.002.652.380,44)

5.3.1.4.1 DANA CADANGAN

Tidak terdapat dana cadangan untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2023

5.3.1.5 ASET LAINNYA

5.3.1.5.1 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp860.635.042,46	Rp0,00

Saldo TGR adalah tagihan TGR yang waktu jatuh temponya diatas 1 tahun dan telah didukung oleh surat pengakuan utang berupa SKTJM. Saldo sebesar Rp860.635.042,46 berasal dari kelebihan pembayaran paket pekerjaan belanja modal berdasarkan perbandingan jumlah pembayaran dan volume pekerjaan yang diterima oleh Pemprov Gorontalo berdasarkan pemeriksaan fisik oleh BPK.

5.3.1.5.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp120.923.233,33	Rp120.923.233,33

Gedung Belle Li Mbui yang dibangun berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor 181/HUKUM/20/2008 dan Nomor 24/HKM-PK/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 menyatakan bahwa Belle Li Mbui dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kota Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan KSO dengan jangka waktu 20 tahun.

Gedung Belle Li Mbui disusutkan dengan akumulasi penyisihan per 31 Desember 2024 sebesar Rp120.923.233,33 dan nilai buku sebesar Rp0,.

	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Bersih
- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	120.923.233,33	(120.923.233,33)	0,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.5.3 Aset Tak Berwujud **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp10.508.900.992,00 **Rp10.508.900.992,00**

Saldo harga perolehan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.508.900.992,00 yang nilainya sama apabila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp10.508.900.992,00 karena tidak terdapat belanja maupun mutasi/reklasifikasi di tahun 2024:

Penambahan:	
- Aset tidak berwujud lainnya	-
Jumlah	-
Penambahan:	
- Aset tidak berwujud lainnya	-
Jumlah	-
	-

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.508.900.992,00 diamortisasi sehingga diketahui nilai bukunya, dengan rincian sebagai berikut:

Organisasi Perangkat Daerah	Harga Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	166.575.449,00	163.715.089,80	2.860.359,20
Dinas Kesehatan	236.850.000,00	236.850.000,00	0,00
RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie	17.996.000,00	17.996.000,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	546.898.700,00	546.898.700,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.977.000,00	9.977.000,00	0,00
Dinas Pangan	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	415.758.300,00	415.758.300,00	0,00
Dinas Pemberdayaan dan Desa, Dukcapil	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Dinas Perhubungan	205.195.000,00	205.195.000,00	0,00
Dinas Koperasi UMKM	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi	47.490.000,00	47.490.000,00	0,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
Dinas Pertanian	189.450.000,00	189.450.000,00	0,00
Pimpinan Setda	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
Biro Pemerintahan dan Kesra	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00
Biro Pengendalian Pembangunan	962.917.600,00	962.917.600,00	0,00
Biro Umum	352.165.000,00	352.165.000,00	0,00
Dinas Komunikasi Dan Informatika	34.879.000,00	34.879.000,00	0,00
Sekretariat DPRD	187.896.400,00	99.158.560,00	88.737.840,00
Inspektorat Provinsi Gorontalo	344.770.000,00	330.770.000,00	14.000.000,00
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	1.187.931.000,00	1.187.931.000,00	0,00
Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	4.477.061.043,00	4.183.839.243,00	293.221.800,00
Badan Kepegawaian Daerah	684.845.000,00	674.885.000,00	9.960.000,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Organisasi Perangkat Daerah	Harga Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
Badan Pendidikan dan Pelatihan	36.000.000,00	28.800.000,00	7.200.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	4.495.500,00	1.798.200,00	2.697.300,00
Jumlah	10.508.900.992,00	10.090.223.692,80	418.677.299,20

5.3.1.5.4 Aset Lain-lain

31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp99.772.863.439,73 Rp100.793.212.373,73

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp99.772.863.439,73 dan Tahun 2023 sebesar Rp100.793.212.373,73 merupakan aset lain-lain yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan pengguna barang adalah SKPD sebagai berikut

Organisasi Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	19.499.345.603,49	19.957.128.629,49
Dinas Kesehatan	1.764.155.276,00	1.764.155.276,00
RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie	2.907.948.894,00	2.907.948.894,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.064.897.703,50	13.019.050.903,50
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	707.888.600,00	707.888.600,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	680.028.913,00	680.028.913,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.827.955.759,00	1.827.955.759,00
Dinas Pangan	779.096.820,00	779.096.820,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7.763.478.138,00	7.763.478.138,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dukcapil	691.800.720,00	691.800.720,00
Dinas Perhubungan	5.552.719.394,00	5.552.719.394,00
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	881.712.648,74	881.712.648,74
Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi	3.474.150.826,00	3.474.150.826,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	394.438.842,00	394.438.842,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	13.408.604.009,00	13.408.604.009,00
Dinas Pariwisata	357.968.600,00	357.968.600,00
Dinas Pertanian	7.000.352.845,00	7.000.352.845,00
Biro Pemerintahan dan Kesra	157.120.800,00	157.120.800,00
Biro Hukum dan Organisasi	293.077.750,00	362.037.658,00
Biro Pengendalian Pembangunan Ekonomi	1.569.007.300,00	1.569.007.300,00
Biro Umum	2.594.413.400,00	2.594.413.400,00
Sekretariat DPRD	3.582.413.191,00	4.076.019.191,00
Satpol PP Linmas	824.423.898,00	824.423.898,00
Inspektorat	411.992.746,00	411.992.746,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.795.143.966,00	1.795.143.966,00
Badan Keuangan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	3.017.798.985,00	3.017.798.985,00
Badan Kepegawaian	769.772.400,00	769.772.400,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.974.743.740,00	1.974.743.740,00
Pimpinan Setda	432.605.000,00	432.605.000,00
Biro Pengadaan	28.661.000,00	28.661.000,00
Badan Pendidikan dan Pelatihan	489.330.802,00	489.330.802,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Organisasi Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Badan Penghubung	1.075.814.870,00	1.075.814.870,00
Jumlah	99.772.863.439,73	100.793.212.373,73

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp99.772.863.439,73 apabila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp100.793.212.373,73 terdapat penurunan sebesar Rp1.020.348.934,00 atau 1,01% dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Penambahan:		
Jumlah		-
Pengeluaran:		
- Penghapusan SK NO. 414/18/X/2024	DIKBUD	457.783.026,00
- Penjualan BMD SK NO. 416/29/X/2024	Set. DPRD	493.606.000,00
- Penghapusan SK NO. 508/29/XII/2024	Biro Hukum	68.959.908,00
Jumlah		1.020.348.934,00

Aset Lain-lain diantaranya terdiri dari aset dalam kondisi rusak berat yang tidak ditemukan keberadaannya, Penghapusan Aset Lain-lain yaitu terdapat pada 3 (tiga) SKPD diantaranya Penghapusan akibat Kebakaran (kondisi kahar) SMA Negeri 4 Gorontalo pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat DPRD Penghapusan karena Penjualan BMD Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan kepada mantan Pimpinan Anggota DPRD, Biro Hukum Penghapusan karena Pemusnahan Aset Rusak Berat, dengan total Nilai Penghapusan sebesar Rp1.020.348.934,00.

5.3.1.5.4.1 Akumulasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Penyusutan Aset	(Rp65.467.838.535,68)	(Rp65.961.444.535,68)
Lain-lain		

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Disamping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk mengalokasikan beban penyusutan yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Terhadap saldo aset lainnya di dalam neraca Pemerintah Provinsi Gorontalo telah dilakukan penyusutan agar dapat diketahui nilai buku dari setiap jenis aset. Akumulasi penyusutan dan Nilai Buku setiap jenis aset lainnya per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Uraian	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
- Aset Lainnya - Peralatan dan mesin rusak berat	99.772.863.439,73	(65.467.838.535,68)	34.305.024.904,05
Jumlah	99.772.863.439,73	(65.467.838.535,68)	34.305.024.904,05



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.5.5 Dana Transfer Treasury	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Deposit Facility (TDF)	Rp0,00	Rp4.173.559.000,00

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan Saldo pada Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) dengan Nomor rekening 519000656980 an. Rek Lain BI TDF TKD Provinsi Gorontalo sesuai Surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor S-41/WPB.29/2024 tanggal 18 Januari 2024 hal Penyampaian Informasi Realisasi Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil ke Rekening TDF dan RKUD Tahun Anggaran 2023.

Uraian	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Bersih
- Dana Transfer TDF	-	0,00	-

5.3.1.6 PROPERTI INVESTASI

Kementerian Dalam Negeri telah mengatur Properti Investasi dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/7571/Keuda Tanggal 5 April 2024 perihal Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Keuangan Daerah terkait Aset Konsesi Jasa, Properti Investasi, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara, Penyisihan dan Beban Penyisihan Dana Bergulir, Surplus/Defisit Non Operasional, Beban Dibayar Dimuka atas Asuransi Barang Milik Daerah dan Jasa Internet, Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh yang terutang atas Belanja Pemerintah Daerah, Belanja Uang Hari Meugang untuk Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh serta Pungutan Bagi Wisatawan Asing dan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat untuk Provinsi Bali.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/7571/Keuda Tanggal 5 April 2024 klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Properti Investasi telah diklasifikasikan menjadi Properti Investasi Tanah, Properti Investasi Gedung dan Bangunan, Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan.

5.3.1.6.1 Properti Investasi Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp680.062.500,00	Rp680.062.500,00

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki Aset Tetap Tanah yang memenuhi definisi pengakuan sebagai Properti Investasi sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 17 tahun 2021 tentang Properti Investasi yang menyatakan bahwa Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Tetap Tanah yang disewakan kepada PT. Harim Farmsco Indonesia berlokasi di Jalan Raya Trans Sulawesi Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dengan nilai aset sebesar Rp425.062.500 sebagaimana Dokumen Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan PT Harim Farmsco Indonesia dengan Nomor 655/PEMKESRA/PK/XI/2021 dan Nomor 0081/NPS-HFI/XI/2021 Tanggal 1 November



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2021 dengan masa perjanjian 5 Tahun.

Aset Tetap Tanah dimanfaatkan oleh PT Pertamina Petra Niaga Makassar sejak Tahun 1986 dengan nilai aset Rp255.000.000,00. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pimpinan PT Pertamina Petra Niaga Makassar melalui surat Pj Gubernur Gorontalo Nomor 028/DLHK-SEK/1169/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang di antaranya mengajukan perjanjian sewa senilai Rp4.589.173.000,00 per lima tahun. Atas surat pemberitahuan tersebut, PT Pertamina Petra Niaga Makassar belum menyepakati biaya sewa.

5.3.1.6.2 Properti Investasi

Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp32.173.987.284,00

Rp32.173.987.284,00

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki Aset Gedung dan Bangunan yang memenuhi definisi pengakuan sebagai Properti Investasi sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 17 tahun 2021 tentang Properti Investasi yang menyatakan bahwa Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang disewakan kepada PT Aleve Global berlokasi di Kecamatan Isimu Kabupaten Gorontalo dengan nilai sewa sebesar Rp2.553.000.000,00 sebagaimana Dokumen Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan PT Aleve Global dengan Nomor 088/AG/SK/XII/2022 dan Nomor 523/DKP/1794/F/BA/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022 dengan masa perjanjian 5 Tahun.

Nilai Aset Tetap yang direklasifikasi ke Properti Investasi Gedung Bangunan sebesar Rp32.173.987.284,00 sebagaimana dokumen pada Bidang Aset. Reklasifikasi ke Properti Investasi Gedung Bangunan berasal dari Aset Tetap Gedung Bangunan Rp19.219.331.500,00, Aset Tetap Peralatan Mesin Rp10.986.446.284,00 dan Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan senilai Rp1.968.209.500,00. Penggabungan Aset Tetap tersebut ke Properti Investasi Gedung dan Bangunan disebabkan karena berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/7571/Keuda Tanggal 5 April 2024, klasifikasi Properti Investasi hanya terdiri dari Properti Investasi Tanah, Properti Investasi Gedung dan Bangunan, Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Penyusutan dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Disamping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk mengalokasikan beban penyusutan yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan nilai akumulasi berdasarkan



reklasifikasi dari akumulasi penyusutan masing- masing aset tetap.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/7571/Keuda Tanggal 5 April 2024 klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Akumulasi Penyusutan Properti Investasi hanya diklasifikasikan menjadi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan. Berdasarkan hal tersebut maka Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung Bangunan direklasifikasikan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Akumulasi penyusutan dan Nilai Buku setiap jenis aset tetap per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Uraian	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	10.986.446.284,00	(8.435.483.703,00)	2.550.962.581,00
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	19.219.331.500,00	(15.063.062.320,20)	4.156.269.179,80
- Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	1.968.209.500,00	(352.577.974,00)	1.615.631.240,00
Jumlah	32.173.987.284,00	(23.851.123.997,20)	8.322.863.286,00

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebagai pengurang nilai aset tetap. Pemilihan metode garis lurus dimaksudkan untuk mempermudah dalam perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, karena penyusutan aset tetap pada pemerintah daerah dimaksudkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya.

5.3.1.6.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi untuk TA 2024 dan 2023.

5.3.2 KEWAJIBAN

5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Penjelasan pos-pos kewajiban didasarkan pada jenis kewajiban.

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp6.953.612,00	Rp65.741.857,00

Utang PFK per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 terdiri dari utang PFK pada BUD dan Utang PFK pada Bendahara Dana BOS SMA/SMK/SLB sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Utang PFK pada Bendahara Umum Daerah		
PPh Ps 21	0,00	49.875,00
PPh Ps 22	0,00	0,00
PPh Ps 23	0,00	0,00
PPh Ps 4 (2)	0,00	6.255.773,00
Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Askes	0,00	0,00
PPN	6.953.612,00	627.618,00
Taperum	0,00	0,00
Iuran Wajib Pegawai (IWP)	0,00	0,00
Sub Total	6.953.612,00	6.933.266,00
Utang PFK pada Bendahara BOS		
Pajak yang belum disetor Bendahara Dana BOS	0,00	58.808.591,00
Sub Total	-	58.808.591,00
Utang PFK Lainnya		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Sub Total	0,00	0,00
Jumlah	6.953.612,00	65.741.857,00

5.3.2.1.2 Utang Pinjaman

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp0,00	Rp1.282.352.668,00

Utang pinjaman per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.282.352.668,00 merupakan pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi COVID-19 TA 2020 yang jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2023, dengan akta perjanjian nomor 12 tanggal 19 November 2020 dan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan serta bunga pinjaman sebesar 0,00%.

5.3.2.1.3 Utang Bunga

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp496.486.731,00	Rp586.757.029,00

Utang Bunga per 31 Desember 2024 sebesar Rp496.486.731,00 merupakan utang bunga pinjaman bulan Desember 2024 atas pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi COVID-19 Tahun 2021 dengan akta perjanjian nomor 1 tanggal 1 Desember 2021 dan jangka waktu pinjaman selama 96 bulan serta bunga pinjaman sebesar 6,19%.

5.3.2.1.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp16.935.383.244,00	Rp18.346.665.181,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.935.383.244,00 merupakan pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi COVID-19 Tahun 2021 yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024, dengan akta perjanjian nomor 1 tanggal 1 Desember 2021 dan jangka waktu pinjaman selama 96 bulan serta bunga pinjaman sebesar 6,19%.

5.3.2.1.5 Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp189.200.000,00	Rp283.800.000,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp189.200.000,00 merupakan Penerimaan atas Sewa BMD dari PT Harim Farmsco Indonesia Tahun 2022 s.d. 2025 yang diterima Tahun 2024.

5.3.2.1.6 Utang Belanja

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp57.899.390.918,74	Rp42.336.649.749,55

Jumlah tersebut merupakan Saldo Per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.899.390.918,74 dan Tahun 2023 sebesar Rp42.336.649.749,55 dengan rincian:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
- Utang Belanja Pegawai	2.088.098.401,00	8.242.325.491,00
- Utang Belanja Barang dan Jasa	7.892.255.693,34	14.938.187.646,55
- Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.431.514.625,66	0,00
- Utang Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	2.572.361.326,74	0,00
- Utang Belanja Transfer	41.915.160.872,00	19.156.136.612,00
Jumlah	57.899.390.918,74	42.336.649.749,55

- Utang belanja pegawai sebesar Rp2.088.098.401,00 adalah Utang Belanja Gaji PNS, Pembulatan Gaji, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Fungsional PNS dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang akan dibayarkan Tahun 2025.
- Utang belanja barang dan jasa sebesar Rp7.892.255.693,34 adalah utang beban barang dan jasa Tahun 2024 yang akan dibayarkan Tahun 2025 diantaranya Utang Belanja Tagihan Listrik, Utang Belanja Jasa Konsultasi dan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- Utang belanja modal sebesar Rp3.431.514.625,66 adalah utang belanja pengadaan Aset tetap/Retensi 5% yang progres fisiknya 100% dan Keuangannya 95% yang akan dibayarkan Tahun 2025, Selain itu, utang belanja sebesar Rp2.971.668.976,52 merupakan kewajiban dari RSUD dr. HAH untuk melunasi pembayaran sisa progres pekerjaan atas pembangunan gedung rawat inap.
- Utang belanja modal jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.572.361.326,74 adalah utang belanja pengadaan Aset tetap/Retensi 5% yang progres fisiknya 100% dan Keuangannya 95% yang akan dibayarkan Tahun 2025.
- Utang Belanja Transfer merupakan utang belanja bagi hasil pajak ke Kabupaten dan Kota Triwulan IV TA.2024 yang dibayarkan TA 2025

5.3.2.1.7 Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp3.033.676.623,00	Rp 2.636.112.165,70

Jumlah tersebut merupakan Saldo Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.033.676.623,00 dengan rincian:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
-	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah	4.936.623,00	4.936.623,00
	Utang Pengadaan Aset Tetap	0,00	2.631.175.542,70
-	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	11.000,00	0,00
-	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	2.040.836.000,00	0,00
-	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sawit	987.893.000,00	0,00
	Jumlah	3.033.676.623,00	2.636.112.165,70

Utang Jangka Pendek Lainnya berupa utang kelebihan pembayaran hasil kerja sama daerah (belle Li Mbui) atas usul koreksi BPK Tahun 2020, kelebihan Pembayaran DBH DR dan DBH Sawit sampai dengan TA 2023, Kelebihan Pembayaran DBH CHT sampai dengan TA 2023.

5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

5.3.2.2.1 Utang Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp76.080.313.808,00	Rp91.733.344.384,00

Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp76.080.313.808,00 merupakan sisa pinjaman PEN Tahun 2021 dengan akta perjanjian nomor 1 tanggal 1 Desember 2021 dan jangka waktu pinjaman selama 96 bulan serta bunga pinjaman sebesar 6,19%.

-	Pinjaman PEN	76.080.313.808,00	91.733.344.384,00

Kewajiban Kontinjensi

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menghibahkan Lahan seluas 811.472,25 M2 atau 81,15 Ha dengan nilai perolehan sebesar Rp21.620.326.700,00 kepada Kementerian Perhubungan RI cq. Dirjen Perhubungan Udara, sesuai NPHD Nomor 702/HKM-ORG/PK/VIII/2017 dan HK.201/1/22/DRJU.KEU-2017 serta BAST Nomor 703/HKM-ORG/BA/VIII/2017 dan BA.505 Tahun 2017 tanggal 4 Agustus 2017. Tanah tersebut dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak tahun 2007 s/d tahun 2016 menggunakan APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang digunakan sebagai Kawasan Bandara Djalaludin Gorontalo.

Tahun 2020 terdapat gugatan dari Sdr. PM yang mengaku sebagai ahli waris atas lahan seluas 7.448 M2, yang terletak di Kawasan Bandara Djalaludin. Yang kemudian digugat melalui pengadilan negeri sampai ke MA dan dimenangkan oleh Penggugat. Dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3009K/Pdt/2023 tanggal 13 November 2023, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kementerian Perhubungan RI Cq. Ditjen Perhubungan Udara cq. Perhubungan Udara Provinsi Gorontalo dituntut untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 per hari apabila lalai dalam memenuhi isi putusan perkara; membayar kerugian material berdasarkan perhitungan Tim Pembebasan Tanah dan



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

membayar biaya perkara sejumlah Rp3.280.000,00. Sampai dengan penyusunan LKPD Audited TA 2023, nilai Materiil belum diketahui karena masih harus menunggu perhitungan tim penilai untuk mengetahui persentase pembayaran oleh para tergugat yaitu Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kementerian Perhubungan RI Cq. Ditjen Perhubungan Udara cq. Perhubungan Udara Provinsi Gorontalo.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Ekuitas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp2.235.786.257.167,06	Rp2.368.190.518.077,99

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.235.786.257.167,06 dan Rp2.368.190.518.077,99. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4 Rincian Dan Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit LO.

KEGIATAN OPERASIONAL

5.4.1 Pendapatan -LO

2024	2023
2.001.542.165.313,09	1.915.310.405.907,42

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.001.542.165.313,09 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.915.310.405.907,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1 Realisasi Pendapatan - LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah	540.640.551.373,09	513.217.563.278,42	27.422.988.094,67	5,34
Pendapatan Transfer	1.379.780.627.664,00	1.353.343.760.053,00	26.436.867.611,00	1,95
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	81.120.986.276,00	48.749.082.576,00	32.371.903.700,00	66,41
Jumlah	2.001.542.165.313,09	1.915.310.405.907,42	86.231.759.405,67	4,50

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.001.542.165.313,09 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp540.640.551.373,09 Pendapatan Transfer sebesar Rp1.379.780.627.664,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp81.120.986.276,00. Nilai Pendapatan-LO mengalami kenaikan sebesar Rp86.231.759.405,67 atau 4,50% dibanding TA 2023 sebesar Rp1.915.310.405.907,42.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

2024	2023
540.640.551.373,09	513.217.563.278,42

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan, retribusi, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Untuk Tahun Anggaran 2024 PAD adalah sebesar Rp540.640.551.373,09. Nilai pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp27.422.988.094,55 atau 5,34% dibanding TA 2023 sebesar Rp513.217.563.278,42 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.4.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan Pajak Daerah - LO	458.079.825.082,00	431.985.426.310,00	26.094.398.772,00	6,04
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	54.561.129.425,00	4.333.088.112,00	50.228.041.313,00	1.159,17
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	11.580.368.337,00	11.012.325.878,00	568.042.459,00	5,16
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.419.228.529,09	65.886.722.978,42	(49.467.494.449,33)	(75,08)
Jumlah	540.640.551.373,09	513.217.563.278,42	27.422.988.094,67	5,34

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp458.079.825.082,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.094.398.772,00 atau 6,04% dari Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp431.985.426.310,00.

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - 2024 2023
LO 458.079.825.082,00 431.985.426.310,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp458.079.825.082,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.094.398.772,00 atau 6,04% dari Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp431.985.426.310,00. Kenaikan nilai Pendapatan Pajak Daerah disebabkan karena naiknya Pajak Kendaraan Bermotor 9,17%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO 2,71%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO 6,09% dan Pajak Air Permukaan - LO 107,59%, Pajak Rokok - LO 5,38%. Peningkatan nilai pendapatan pajak daerah disebabkan kepatuhan pembayaran pajak oleh WP.

Tabel 5.4.3 Tabel Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	145.474.990.458,00	133.258.930.527,00	12.216.059.931,00	9,17
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	115.069.390.545,00	112.032.844.226,00	3.036.546.319,00	2,71
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	101.975.814.945,00	96.119.363.696,00	5.856.451.249,00	6,09
Pajak Air Permukaan - LO	224.487.221,00	108.138.700,00	116.348.521,00	107,59
Pajak Rokok - LO	95.335.141.913,00	90.466.149.161,00	4.868.992.752,00	5,38
Jumlah	458.079.825.082,00	431.985.426.310,00	26.094.398.772,00	6,04

Dari realisasi penerimaan bruto Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp458.079.825.082,00 realisasi penerimaan neto setelah dikurangi Beban insentif pemungutan pajak daerah adalah sebesar Rp450.492.233.187,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Penerimaan Bruto - LO	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Penerimaan Netto - LO
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	145.474.990.458,00	3.241.839.706,00	142.233.150.752,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	115.069.390.545,00	2.957.364.630,00	112.112.025.915,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	101.975.814.945,00	1.388.387.559,00	100.587.427.386,00
Pajak Air Permukaan - LO	224.487.221,00	-	224.487.221,00
Pajak Rokok - LO	95.335.141.913,00	-	95.335.141.913,00
Jumlah	458.079.825.082,00	7.587.591.895,00	450.492.233.187,00

1.1 Pajak Kendaraan Bermotor – LO

Pajak Kendaraan Bermotor - LO mengalami peningkatan dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.854.129.921,00 atau 10,40%. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan realisasi penerimaan pada PKB-Mobil Bus-Microbus - LO sebesar 100%, PKB-Mobil Penumpang-Sedan – LO sebesar 28,98%, PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga – LO sebesar 18,95%, PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebesar - LO 16,54%, dan PKB-Mobil Penumpang-Minibus - LO sebesar 9,75% dari target yang telah ditetapkan pada Perubahan APBD TA 2024. Peningkatan nilai pendapatan pajak daerah disebabkan kepatuhan pembayaran pajak oleh WP.

Tabel 5.4.4 Kenaikan dan Penurunan PKB - LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	999.891.683,00	775.239.395,00	224.652.288,00	28,98
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	5.593.062.869,00	5.206.962.799,00	386.100.070,00	7,42
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	62.471.128.846,00	57.202.471.011,00	5.477.739.085,00	9,58
PKB-Mobil Bus-Microbus-LO	120.500,00	-	120.500,00	100
PKB-Mobil Bus-Bus-LO	192.689.427,00	175.569.280,00	17.120.147,00	9,75
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	21.076.389.878,00	19.710.025.413,00	1.812.665.475,00	9,2
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	9.031.347.784,00	9.294.460.507,00	(230.737.723,00)	-2,48
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	2.123.225.416,00	2.337.985.980,00	(186.635.564,00)	-7,98
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	231.688.908,00	219.402.073,00	12.286.835,00	5,6
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	43.686.508.425,00	38.267.187.638,00	6.330.758.517,00	16,54
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	68.544.722,00	66.661.681,00	12.633.041,00	18,95
PKB-Mobil Roda Tiga-LO	392.000,00	2.964.750,00	(2.572.750,00)	-86,78
Jumlah	145.474.990.458,00	133.258.930.527,00	13.854.129.921,00	10,40

1.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO mengalami peningkatan dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.036.546.319,00 atau 2,71%. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan realisasi penerimaan pada BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO sebesar 473,98%, BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO sebesar 226,42%,



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO sebesar 473,98%, BBNKB-Mobil Bus-Bus - LO sebesar 36,07%, BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep sebesar-LO 18,37%, BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO sebesar 8,13%, dan BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO sebesar 4,97% dari target yang telah ditetapkan pada Perubahan APBD TA 2024. Peningkatan nilai pendapatan pajak daerah disebabkan kepatuhan pembayaran pajak oleh WP. Pada TA 2024 terdapat pula penurunan secara signifikan baik dari prosentase maupun nilai keuangan yang diterima yaitu Penerimaan Pajak BBNKB yaitu BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO sebesar 63,29% dan BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO sebesar 31,68% dan BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO 5,65%.

Tabel 5.4.5 Kenaikan dan Penurunan BBNKB-LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO	369.125.000,00	113.084.200,00	256.040.800,00	226,42
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	3.504.468.750,00	2.960.555.276,00	543.913.474,00	18,37
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	37.076.150.020,00	35.319.678.270,00	1.756.471.750,00	4,97
BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO	215.237.500,00	158.184.550,00	57.052.950,00	36,07
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	14.889.886.900,00	15.781.845.500,00	(891.958.600,00)	(5,65)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	1.472.788.820,00	2.155.577.920,00	(682.789.100,00)	(31,68)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	1.321.225.000,00	3.599.321.840,00	(2.278.096.840,00)	(63,29)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	245.375.000,00	42.750.000,00	202.625.000,00	473,98
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	55.665.106.055,00	51.478.584.170,00	4.186.521.885,00	8,13
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	308.252.500,00	418.300.000,00	(110.047.500,00)	(26,31)
BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO	1.775.000,00	4.962.500,00	(3.187.500,00)	(64,23)
Jumlah	115.069.390.545,00	112.032.844.226,00	3.036.546.319,00	2,71

1.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO

Dasar pengenaan PBBKB-LO merupakan nilai jual bahan bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO (PBBKB) mengalami peningkatan dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.856.451.249,00 atau 6,09%. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan realisasi penerimaan pada PBBKB-Bahan Bakar Lainnya-LO sebesar 6,09%, yaitu pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor selain bensin, solar, dan gas.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.4.6 Kenaikan dan Penurunan PBBKB-LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO	101.975.814.945,00	96.119.363.696,00	5.856.451.249,00	6,09
Jumlah	101.975.814.945,00	96.119.363.696,00	5.856.451.249,00	6,09

1.4 Pajak Air Permukaan - LO

Pajak Air Permukaan - LO mengalami peningkatan dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp116.348.521,00 atau 107,59%. Peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak Air Permukaan yaitu Perusahaan Daerah Air Minum, PT. PG Gorontalo dan PT Sumber Energi Lestari PLTM Taludaa.

Tabel 5.4.7 Kenaikan dan Penurunan Pajak Air Permukaan-LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pajak Air Permukaan-LO	224.487.221,00	108.138.700,00	116.348.521,00	107,59
Jumlah	224.487.221,00	108.138.700,00	116.348.521,00	107,59

1.5 Pajak Rokok - LO

Pajak Rokok mengalami peningkatan dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.868.992.752,00 atau 5,38%. Dasar pengenaan Pajak Rokok berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, Dan Penyetoran Pajak Rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok.

Tabel 5.4.8 Kenaikan dan Penurunan Pajak Rokok-LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pajak Rokok-LO	95.335.141.913,00	90.466.149.161,00	4.868.992.752,00	5,38
Jumlah	95.335.141.913,00	90.466.149.161,00	4.868.992.752,00	5,38

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO	2024	2023
	54.561.129.425,00	4.333.088.112,00

Retribusi Daerah-LO merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berupa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Pendapatan Retribusi Daerah-LO untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp54.561.129.425,00 mengalami kenaikan sebesar Rp50.228.041.313,00 atau 1,159% dari Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp4.333.088.112,00. Peningkatan Retribusi Daerah dari BLUD sebesar karena Pendapatan dari BLUD TA 2024 dicatat sebagai Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang pada tahun sebelumnya masih tercatat pada Pendapatan Asli Daerah yg Sah.

Tabel 5.4.9 Kenaikan dan Penurunan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Retribusi Jasa Umum-LO	53.201.294.986,00	2.663.462.462,00	50.537.832.524,00	1.897,45
Retribusi Jasa Usaha-LO	1.359.834.439,00	1.669.625.650,00	(309.791.211,00)	(18,55)
Jumlah	54.561.129.425,00	4.333.088.112,00	50.228.041.313,00	1.159,17

2.1 Retribusi Jasa Umum - LO

Realisasi Retribusi Jasa Umum-LO bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 menunjukkan adanya peningkatan realisasi penerimaan sebesar Rp50.537.832.524,00 atau 1.897,45%. Hal tersebut disebabkan karena Pendapatan BLUD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie TA 2024 dikelompokkan sebagai Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO dan pada TA 2023 dikelompokkan sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO. Demikian pula dengan pendapatan atas pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir sampah Talumelito, pada TA 2023 dikelompokkan pada Lain-lain PAD yang Sah-Hasil Kerjasama Daerah-LO, dan pada TA 2024 dikelompokkan sebagai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO. Namun demikian penurunan penerimaan terjadi pada Retribusi Pelayanan Pendidikan sebesar 100,00%, karena sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Retribusi Pelayanan Pendidikan sudah tidak masuk sebagai kelompok Retribusi Jasa Umum pada Pemerintah Daerah dengan rincian pada tabel berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.4.10 Realisasi Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	51.392.626.178,00	674.702.000,00	50.717.924.178,00	7.517,09
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	1.808.668.808,00	82.412.462,00	1.726.256.346,00	2.094,65
Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	-	1.906.348.000,00	(1.906.348.000,00)	(100,00)
Jumlah	53.201.294.986,00	2.663.462.462,00	50.537.832.524,00	1.897,45

2.2 Retribusi Jasa Usaha - LO

Realisasi Retribusi Jasa Usaha bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 menunjukkan adanya penurunan realisasi penerimaan sebesar Rp309.791.211,00 atau 18,55%. Hal tersebut disebabkan karena penurunan penerimaan terjadi pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar 14,26% dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 62,60% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.4.11 Realisasi Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	515.012.063,00	510.292.500,00	4.719.563,00	0,92
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	343.091.350,00	400.147.150,00	(57.055.800,00)	(14,26)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	283.967.000,00	759.186.000,00	(475.219.000,00)	(62,60)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	31.811.350,00	-	31.811.350,00	100,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	185.952.676,00	-	185.952.676,00	100,00
Jumlah	1.359.834.439,00	1.669.625.650,00	(309.791.211,00)	(18,55)

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	2024	2023
	11.580.368.377,00	11.012.325.878,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba/dividen atas penyertaan modal pemerintah daerah periode Tahun 2024 pada PT Bank SulutGo sebesar Rp11.580.368.377,00 mengalami peningkatan sebesar Rp568.042.459,00 atau 5,16% dari pendapatan untuk Tahun 2023 sebesar Rp11.012.325.878,00.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.4.12 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan – LO 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	11.580.368.337,00	11.012.325.878,00	568.042.459,00	5,16
Jumlah	11.580.368.337,00	11.012.325.878,00	568.042.459,00	5,16

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah - LO

2024	2023
16.419.228.528,00	65.886.722.978,42

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.419.228.528,00 merupakan PAD yang tidak termasuk dalam penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD - LO yang Sah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp49.467.494.450,00 atau 77,01% dari pendapatan TA 2023 sebesar Rp65.886.722.978,42. Penurunan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO dari BLUD sebesar 100,00% karena Pendapatan dari BLUD TA 2024 dicatat sebagai Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO, tidak adanya realisasi Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan-LO, Hasil Kerjasama Daerah-LO dan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan-LO sebesar 100,00%, Pendapatan Jasa Giro-LO sebesar 40,65%, Pendapatan Bunga-LO sebesar 39,52%, dan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah-LO sebesar 21,63%.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.4.13 Kenaikan dan Penurunan Lain-lain PAD yang SAH – LO
Tahun 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	787.067.000,00	-	787.067.000,00	100,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	593.850.044,00	465.021.084,00	128.828.960,00	27,70
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	-	2.012.548.943,00	(2.012.548.943,00)	(100,00)
Jasa Giro-LO	1.762.371.257,00	2.969.255.235,00	(1.206.883.978,00)	(40,65)
Pendapatan Bunga-LO	3.504.794.630,00	5.794.623.690,00	(2.289.829.060,00)	(39,52)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	3.471.486.209,00	4.429.427.949,00	(957.941.740,00)	(21,63)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	-	77.976.269,00	(77.976.269,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	4.995.425.516,00	1.488.643.469,00	3.506.782.047,00	235,57
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	1.297.050.615,00	-	1.297.050.615,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	-	944.311.869,00	(944.311.869,00)	(100,00)
Pendapatan dari BLUD-LO	7.183.257,00	47.704.914.470,00	(47.697.731.213,00)	(99,98)
Jumlah	16.419.228.528,00	65.886.722.978,00	(49.467.494.450,00)	(75,08)

4.1 Hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO

Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan - LO merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah - LO. Ini termasuk penjualan aset yang telah dihapus, seperti penjualan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya. Hasil penjualan ini tidak termasuk dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp787.067.000,00. dengan rincian realisasi sebagai berikut:

**Tabel 5.4.14 Kenaikan dan Penurunan Hasil penjualan BMD yang
Tidak Dipisahkan - LO Tahun 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-LO	787.067.000,00	-	787.067.000,00	100,00
Jumlah	787.067.000,00	-	787.067.000,00	100,00

Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan berasal dari penerimaan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain yaitu hasil lelang atas penjualan kapal milik



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh KPKNL Pontianak.

4.2 Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 menunjukkan adanya kenaikan realisasi penerimaan sebesar Rp128.828.960,00 atau 27,70%. Hal tersebut disebabkan karena adanya Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.4.15 Kenaikan dan Penurunan Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Hasil Sewa BMD-LO	430.614.300,00	465.021.084,00	(34.406.784,00)	(7,40)
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	163.235.744,00	-	163.235.744,00	100,00
Jumlah	593.850.044,00	465.021.084,00	128.828.960,00	27,70

4.3. Hasil Kerja Sama Daerah - LO

Hasil Kerja Sama Daerah - LO merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi Hasil Kerjasama Daerah – LO. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi sebesar Rp2.012.548.943,00 yang berasal setoran penerimaan TPA Talumelito yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sudah dikelompokkan menjadi Retribusi Jasa Umum - Retribusi Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.4.16 Kenaikan dan Penurunan Hasil Kerja Sama Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	-	2.012.548.943,00	(2.012.548.943,00)	-100
Jumlah	-	2.012.548.943,00	(2.012.548.943,00)	(100,00)

4.4 Jasa Giro - LO

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 menunjukkan adanya penurunan realisasi penerimaan sebesar Rp1.206.883.978,20 atau 40,65%. Hal tersebut disebabkan karena turunnya penerimaan Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar 40,61% dan Jasa Giro pada Kas di Bendahara 90,21% dengan rincian pada tabel berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.4.17 Kenaikan dan Penurunan Jasa Giro – LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.762.181.971,00	2.967.321.910,00	(1.205.139.939,00)	(40,61)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	189.286,00	1.933.325,00	(1.744.039,00)	(90,21)
Jumlah	1.762.371.257,00	2.969.255.235,00	(1.206.883.978,00)	(40,65)

4.5 Pendapatan Bunga - LO

Realisasi penerimaan Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2024 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 menunjukkan adanya penurunan realisasi penerimaan sebesar Rp2.289.829.060,00 atau 39,52%. Hal tersebut disebabkan karena turunnya Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.4.18 Kenaikan dan Penurunan Pendapatan Bunga – LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	3.504.794.630,00	5.794.623.690,00	(2.289.829.060,00)	-39,52
Jumlah	3.504.794.630,00	5.794.623.690,00	(2.289.829.060,00)	(39,52)

4.6 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 menunjukkan adanya penurunan realisasi penerimaan sebesar Rp957.941.739,00 atau 21,04%.

Hal tersebut disebabkan karena turunnya penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar 20,86% dan tidak adanya realisasi penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dengan rincian pada tabel berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.4.19 Kenaikan dan Penurunan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian
Keuangan Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	3.471.486.209,00	4.419.427.949,00	(947.941.739,00)	(21,45)
Jumlah	3.471.486.209,00	4.429.427.949,00	(957.941.739,00)	(21,63)

4.7 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi sebesar Rp77.976.269,00 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

**Tabel 5.4.20 Kenaikan dan Penurunan Pendapatan Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan-LO Tahun 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	-	77.976.269,00	(77.976.269,00)	(100,00)
Jumlah	-	77.976.269,00	(77.976.269,00)	(100,00)

4.8 Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO

Realisasi penerimaan atas Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2024 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 menunjukkan adanya kenaikan realisasi penerimaan sebesar Rp3.506.782.047,00 atau 235,57%. Hal tersebut disebabkan karena kenaikan penerimaan Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO sebesar 270,94% dan Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO sebesar 45,04% dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5.4.21 Kenaikan dan Penurunan Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO
Tahun 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	4.657.372.426,00	1.255.561.869,00	3.401.810.557,00	270,94
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	338.053.090,00	233.081.600,00	104.971.490,00	45,04
Jumlah	4.995.425.516,00	1.488.643.469,00	3.506.782.047,00	235,57

4.9 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO

Realisasi Penerimaan atas Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO Tahun Anggaran 2024 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 menunjukkan adanya kenaikan realisasi penerimaan sebesar Rp1.297.050.615 atau 100%. Hal tersebut disebabkan karena adanya Pendapatan dari Pengakuan Klaim Jaminan Pelaksanaan Paket Pekerjaan Bangunan Gedung RSUD dr. Hasri Ainun Habibi Tahun 2024 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.4.22 Kenaikan dan Penurunan Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	1.297.050.615,00	0,00	(77.976.269,00)	(100,00)
Jumlah	1.297.050.615,00	0,00	(77.976.269,00)	(100,00)

4.10 Pendapatan Dari Pengembalian - LO

Tidak terdapat Realisasi Penerimaan atas Pendapatan dari Pengembalian-LO Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp944.311.869,00 atau 100%. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO serta Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO TA 2024 dengan rincian pada tabel berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.4.23 Kenaikan dan Penurunan Pendapatan Dari Pengembalian – LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	-	908.094.369,00	(908.094.369,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	-	36.217.500,00	(36.217.500,00)	(100,00)
Jumlah	-	944.311.869,00	(944.311.869,00)	(100,00)

4.11 Pendapatan Dari BLUD - LO

Realisasi Pendapatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) - LO berasal dari berbagai sumber, utama dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Pada Tahun Anggaran 2024 Pendapatan BLUD-LO berasal dari Pendapatan BLUD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie telah dikelompokkan sebagai Retribusi Jasa Umum-LO - Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO dengan nilai realisasi Rp7.183.257,00 dan pada Tahun Anggaran 2023 dikelompokkan sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp 47.704.914.470,00. Pengelompokan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dikelompokkan sebagai Retribusi Jasa Umum dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.4.24 Kenaikan dan Penurunan Pendapatan Dari BLUD – LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan dari BLUD-LO	-	47.704.914.470,00	(47.704.914.470,00)	-100
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	7.183.257,00	-	7.183.257,00	100
Jumlah	7.183.257,00	47.704.914.470,00	(47.697.731.213,00)	(99,98)

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO

2024	2023
1.379.780.627.664,00	1.353.343.760.053,00

Pendapatan Transfer - LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya yang



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Untuk Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp1.379.780.627.664,00. Nilai pendapatan ini naik sebesar Rp26.436.867.611,00 atau 1,95% dibanding Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.353.343.760.053,00. Pendapatan Transfer TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.25 Kenaikan dan Penurunan Pendapatan Transfer – LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO	1.372.097.745.664,00	1.322.898.415.053,00	49.199.330.611,00	3,72
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO	-	30.445.345.000,00	(30.445.345.000,00)	(100,00)
Insentif Fiskal-LO	7.682.882.000,00	-	7.682.882.000,00	100,00
Jumlah	1.379.780.627.664,00	1.353.343.760.053,00	26.436.867.611,00	1,95

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat -	2024	2023
Dana Perimbangan-LO	1.372.097.745.664,00	1.322.898.415.053,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan-LO Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.372.097.745.664,00. Nilai pendapatan ini naik sebesar Rp49.199.330.611,00 atau 3,72% dibanding Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.322.898.415.053,00, Kenaikan secara signifikan disebabkan karena naiknya Dana Alokasi Umum sebesar 4,34%, DAK Fisik-LO sebesar 2,76% dan DAK Non Fisik sebesar 5,70%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan-LO TA 2024 dan TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.26 Kenaikan dan Penurunan Dana Perimbangan – LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	19.301.957.787,00	26.530.401.320,00	(7.228.443.533,00)	(27,25)
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.022.379.872.000,00	979.869.891.000,00	42.509.981.000,00	4,34
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	144.159.157.866,00	140.281.348.223,00	3.877.809.643,00	2,76
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	186.256.758.011,00	176.216.774.510,00	10.039.983.501,00	5,70
Jumlah	1.372.097.745.664,00	1.322.898.415.053,00	49.199.330.611,00	3,72

5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil-LO	2024	2023
	19.301.957.787,00	26.530.401.320,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 menunjukkan adanya penurunan realisasi penerimaan sebesar Rp7.228.443.533,00 atau 27,25% yang disebabkan oleh penurunan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak-LO sebesar 22,63% dan peningkatan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 46,35% dibandingkan dengan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.27 Kenaikan dan Penurunan Dana Bagi Hasil – LO Tahun 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Dana Bagi Hasil Pajak	16.533.257.787,00	21.369.460.207,00	(4.836.202.420,00)	(22,63)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.768.700.000,00	5.160.941.113,00	(2.392.241.113,00)	(46,35)
Jumlah	19.301.957.787,00	26.530.401.320,00	(7.228.443.533,00)	(27,25)

5.4.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak-LO	2024	2023
	16.533.257.787,00	21.114.455.320,00

Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 menunjukkan adanya penurunan realisasi penerimaan sebesar Rp4.581.197.533,00 atau 21,70%. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan atas Bagi Hasil dari Pajak DBH PPh Pasal 21-LO sebesar 17,31%, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO sebesar 54,45% dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 100%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.4.28 Kenaikan dan Penurunan Dana Bagi Hasil Pajak – LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
DBH PBB-LO	1.399.651.000,00	2.247.876.461,00	(848.225.461,00)	(37,73)
DBH PPh Pasal 21-LO	14.560.891.587,00	17.609.116.539,00	(3.048.224.952,00)	(17,31)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	572.715.200,00	1.257.415.000,00	(684.699.800,00)	(54,45)
DBH CHT-LO	-	47.320,00	(47.320,00)	(100,00)
Jumlah	16.533.257.787,00	21.114.455.320,00	(4.581.197.533,00)	(21,70)

5.4.1.2.1.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	2024	2023
	2.768.700.000,00	5.415.946.000,00

Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO Tahun Anggaran 2024 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp2.647.246.000,00 atau 48,88%. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan secara signifikan atas DBH Sumber Daya Alam (SDA) Batubara-Royalty sebesar 100%, Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar 98,80%, dan DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) sebesar 67,48%, dengan rincian pada tabel berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.4.29 Kenaikan dan Penurunan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	153.997.000,00	177.484.800,00	(23.487.800,00)	(13,23)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	-	90.367.200,00	(90.367.200,00)	(100,00)
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	31.136.000,00	2.603.139.000,00	(2.572.003.000,00)	(98,80)
DBH SDA Kehutanan-DR-LO	827.579.000,00	2.544.955.000,00	(1.717.376.000,00)	(67,48)
DBH Sawit-LO	1.755.988.000,00	-	1.755.988.000,00	100,00
Jumlah	2.768.700.000,00	5.415.946.000,00	(2.647.246.000,00)	(48,88)

5.4.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum - LO	2024	2023
	1.022.379.872.000,00	979.869.891.000,00

Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.022.379.872.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp42.509.981.000 atau 4,34% dari DAU Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp979.869.891.000,00. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan realisasi penyaluran DAU Penggajian Formasi PPPK, DAU Bidang Pendidikan, DAU Bidang Kesehatan sebesar, dan DAU Bidang Pekerjaan Umum sebesar 100,00%. Namun demikian terjadi penurunan atas realisasi penyaluran Dana Alokasi UMUM sebesar 13,24%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.4.30 Kenaikan dan Penurunan Dana Alokasi Umum/DAU Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Dana Alokasi Umum-LO	850.163.916.967,00	979.869.891.000,00	(129.705.974.033,00)	(13,24)
DAU Penggajian Formasi PPPK-LO	456.990.033,00	-	456.990.033,00	100,00
DAU Bidang Pendidikan-LO	126.049.532.000,00	-	126.049.532.000,00	100,00
DAU Bidang Kesehatan-LO	21.570.965.000,00	-	21.570.965.000,00	100,00
DAU Bidang Pekerjaan Umum-LO	24.138.468.000,00	-	24.138.468.000,00	100,00
Jumlah	1.022.379.872.000,00	979.869.891.000,00	42.509.981.000,00	4,34

5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	2024	2023
	144.159.157.866,00	140.281.348.223,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp144.159.157.866,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.877.809.643,00 atau 2,76%



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dari DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp140.281.348.223,00. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan realisasi penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan sebesar 100,00%. Namun demikian terjadi penurunan realisasi penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler-Perpustakaan Daerah Sebesar 100,00%, DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMA Sebesar 60,42%, DAK Fisik Bidang Pendidikan Penugasan SMK Sebesar 23,90%, DAK Fisik Bidang Pertanian sebesar 53,71%, DAK Fisik Bidang Irigasi Penugasan Sebesar 46,47% dan DAK Fisik Bidang Jalan Sebesar 43,05%. Dengan rincian pada 236able berikut:

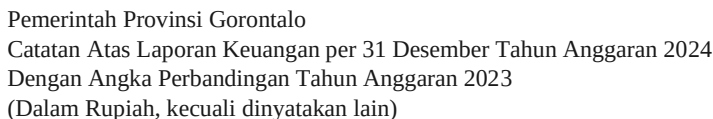
**Tabel 5.4.31 Kenaikan dan Penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Tahun 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	9.540.285.092,00	24.106.664.789,00	(14.566.379.697,00)	(60,42)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO	21.135.607.043,00	27.773.480.808,00	(6.637.873.765,00)	(23,90)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	-	304.858.000,00	(304.858.000,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan -LO	60.534.414.321,00	-	60.534.414.321,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-LO	3.674.786.681,00	7.937.823.936,00	(4.263.037.255,00)	(53,71)
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-LO	9.990.177.697,00	10.014.699.871,00	(24.522.174,00)	(0,24)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-LO	28.923.698.630,00	50.788.646.900,00	(21.864.948.270,00)	(43,05)
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	10.360.188.402,00	19.355.173.919,00	(8.994.985.517,00)	(46,47)
Jumlah	144.159.157.866,00	140.281.348.223,00	3.877.809.643,00	2,76

5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus	2024	2023
(DAK) Non Fisik-LO	186.256.758.011,00	176.216.774.510,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 186.256.758.011,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 10.039.983.501,00 atau 5,70% dari DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp176.216.774.510,00. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan realisasi penyaluran DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal-LO Sebesar 85,82%, DAK Non Fisik-PK2UKM-LO Sebesar 33,59% dan DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO Sebesar 15,40%. Namun demikian terjadi penurunan realisasi penyaluran DAK NonFisik-Dana Pelayanan P3A-LO Sebesar 100,00%, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-BOK-LO sebesar 29,58%, DAK Non Fisik-BOP Museum-LO sebesar 3,22%, DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO sebesar 5,96%, DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO sebesar 15,46%, DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO sebesar 21,37% dan DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO sebesar 1,24%, dengan rincian sebagai berikut:



(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	80.991.487.346,00	82.008.413.462,00	(1.016.926.116,00)	(1,24)
DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	2.672.500.000,00	3.398.750.000,00	(726.250.000,00)	(21,37)
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	91.603.199.000,00	79.378.947.000,00	12.224.252.000,00	15,40
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	2.245.424.000,00	2.655.976.234,00	(410.552.234,00)	(15,46)
DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	154.756.456,00	164.573.000,00	(9.816.544,00)	(5,96)
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	1.636.583.074,00	1.691.013.608,00	(54.430.534,00)	(3,22)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	2.639.542.773,00	3.748.440.665,00	(1.108.897.892,00)	(29,58)
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	2.650.714.065,00	1.984.249.995,00	666.464.070,00	33,59
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	1.662.551.297,00	894.694.204,00	767.857.093,00	85,82
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	-	291.716.342,00	(291.716.342,00)	(100,00)
Jumlah	186.256.758.011,00	176.216.774.510,00	10.039.983.501,00	5,70

5.4.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO	2024	2023
		7.682.882.000,00	30.445.345.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.682.882.000,00 merupakan Dana Insentif Fiskal yang diberikan pemerintah pusat untuk Tahun Anggaran 2024. Nilai pendapatan ini turun sebesar Rp22.762.463.000,00 atau 74,77% dibanding Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.445.345.000,00. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan realisasi Dana Insentif Fiskal (DIF)-LO sebesar 100,00%. Namun demikian terjadi penurunan realisasi Dana Insentif Daerah (DID)-LO 100,0%. Dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	-	30.445.345.000,00	(30.445.345.000,00)	(100,00)
Dana Insentif Fiskal (DIF)-LO	7.682.882.000,00	-	7.682.882.000,00	100,00
Jumlah	7.682.882.000,00	30.445.345.000,00	(22.762.463.000,00)	(74,77)



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	2024	2023
	81.120.986.276,00	48.749.082.576,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya, yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Untuk Tahun Anggaran 2024, Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah sebesar Rp81.120.986.276,00. Nilai pendapatan ini naik sebesar Rp32.371.903.700,00 atau 66,41% dibanding TA 2023 sebesar Rp48.749.082.576,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.34 Kenaikan dan Penurunan Lain-lain PAD yang SAH – LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan Hibah-LO	80.657.426.276,00	48.164.502.576,00	32.492.923.700,00	67,46
Pendapatan Lainnya-LO	463.560.000,00	584.580.000,00	(121.020.000,00)	(20,70)
Jumlah	81.120.986.276,00	48.749.082.576,00	32.371.903.700,00	66,41

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO	2024	2023
	80.657.426.276,00	48.164.502.576,00

Pendapatan hibah - LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp80.657.426.276,00 merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah (baik pusat maupun daerah) dan/atau dari pihak lain baik dalam bentuk uang, barang, jasa, atau surat berharga. Nilai pendapatan ini naik sebesar Rp32.492.923.700,00 atau 67,46% dibanding Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 48.164.502.576,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.35 Kenaikan dan Penurunan Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	77.624.458.901,00	46.009.482.576,00	31.614.976.325,00	68,71
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	2.114.000.175,00	-	2.114.000.175,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	18.000.000,00	-	18.000.000,00	100,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	900.967.200,00	2.155.020.000,00	(1.254.052.800,00)	(58,19)
Jumlah	80.657.426.276,00	48.164.502.576,00	32.492.923.700,00	67,46

5.4.1.3.1.1 Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	2024	2023
	77.624.458.901,00	46.009.482.576,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp77.624.458.901,00. Nilai pendapatan ini naik sebesar Rp 31.614.976.325,00 atau 68,71% dibanding Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.009.482.576,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.36 Kenaikan dan Penurunan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Hibah dari Kementerian P3A	243.200.000,00	-	243.200.000,00	100,00
Hibah Barang dari Kementerian Kesehatan	71.067.213.068,00	15.669.078.968,00	55.398.134.100,00	353,55
Hibah Program (READSI)	915.839.452,00	1.234.701.108,00	(318.861.656,00)	(25,83)
Hibah Barang dari Badan Bencana RI	26.500.000,00	-	26.500.000,00	100,00
Hibah Barang dari Kementerian Perhubungan	-	7.100.000.000,00	(7.100.000.000,00)	(100,00)
Hibah Barang dari Kementerian Pekerjaan Umum	-	15.687.662.500,00	(15.687.662.500,00)	(100,00)
Hibah dari Kementerian Pendidikan	5.316.106.380,00	6.318.040.000,00	(1.001.933.620,00)	(15,86)
Hibah dari Kementerian Pertanian	55.600.001,00	-	55.600.001,00	100,00
Jumlah	77.624.458.901,00	46.009.482.576,00	31.614.976.325,00	68,71

5.4.1.3.1.2 Hibah dari Pemerintah	2024	2023
Daerah - LO	2.114.000.175,00	0,00

Pendapatan hibah dari Pemerintah Daerah-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp77.624.458.901,00. Nilai pendapatan ini naik sebesar Rp2.114.000.175,00 atau 100,00% dibanding Tahun Anggaran 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.37 Kenaikan dan Penurunan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Hibah Tanah dari Pemda Kab. Gorontalo	1.894.554.370,00	-	1.894.554.370,00	100,00
Hibah Tanah dari Pemda Kab. Gorontalo Utara	219.445.805,00	-	219.445.805,00	100,00
Jumlah	2.114.000.175,00	-	2.114.000.175,00	100,00

5.4.1.3.1.3 Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi - LO	2024	2023
	18.000.000,00	0,00

Untuk Tahun Anggaran 2024, Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi - LO adalah sebesar Rp18.000.000,00. Nilai pendapatan ini naik sebesar 100,00% dibanding Tahun Anggaran 2023. Dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.4.38 Kenaikan dan Penurunan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi – LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Hibah dari PT. HASRAT ABADI	18.000.000,00	-	18.000.000,00	100,00
Jumlah	18.000.000,00	-	18.000.000,00	100,00

5.4.1.3.1.4 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO

2024	2023
900.967.200,00	2.155.020.000,00

Untuk Tahun Anggaran 2024, Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO adalah sebesar Rp900.967.200,00. Nilai pendapatan ini turun sebesar 58,19% dibanding Tahun Anggaran 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.39 Kenaikan dan Penurunan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
CSR dari PT. Bank SulutGO berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin	286.297.200,00	2.155.020.000,00	(1.868.722.800,00)	-100
CSR dari PT. Gratia Jaya Mulia berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Bangunan Gedung	614.670.000,00	-	614.670.000,00	10,48
Jumlah	900.967.200,00	2.155.020.000,00	(1.254.052.800,00)	(58,19)

5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya - LO

2024	2023
463.560.000,00	584.580.000,00

Realisasi Pendapatan Lainnya-LO untuk Tahun Anggaran 2024 merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp463.560.000,00 adalah pendapatan dari PT. Jasa Raharja atas Kontribusi Biaya Operasional Kantor Bersama Samsat Se Provinsi Gorontalo. Nilai pendapatan ini turun sebesar Rp2.114.000.175,00 atau 100,00% dibanding Tahun Anggaran 2023. Dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.4.40 Kenaikan dan Penurunan Pendapatan Lainnya –
LO Tahun 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah-LO	-	165.000.000,00	(165.000.000,00)	-100
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN-LO	463.560.000,00	419.580.000,00	43.980.000,00	10,48
Jumlah	463.560.000,00	584.580.000,00	(121.020.000,00)	(20,70)

5.4.2 BEBAN

2024	2023
2.085.068.300.328,98	1.968.400.143.919,91

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp2.085.068.300.328,98. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp116.668.156.409,07 atau 5,93% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.968.400.143.919,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.41 Realisasi Beban Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Pegawai	758.440.777.553,00	670.746.579.580,00	87.694.197.973,00	13,07
Beban Persediaan	202.633.341.866,79	192.789.322.746,75	9.844.019.120,04	5,11
Beban Jasa	348.316.292.234,92	360.358.291.578,98	(12.041.999.344,06)	-3,34
Beban Pemeliharaan	21.845.530.047,73	29.507.738.764,22	(7.662.208.716,49)	-25,97
Beban Perjalanan Dinas	131.038.004.554,00	148.300.243.111,00	(17.262.238.557,00)	-11,64
Beban Bunga	6.349.012.047,00	7.188.622.874,00	(839.610.827,00)	-11,68
Beban Hibah	120.277.306.062,00	106.289.323.327,00	13.987.982.735,00	13,16
Beban Bantuan Sosial	11.191.847.860,00	24.878.511.324,00	(13.686.663.464,00)	-55,01
Beban Penyusutan dan Amortisasi	259.726.661.703,71	223.566.627.995,55	36.160.033.708,16	16,17
Beban Penyisihan Piutang	288.988.872,83	359.600.687,41	(70.611.814,58)	-19,64
Beban Lain-Lain	-	-	-	0,00
Beban Transfer	224.960.537.527,00	204.415.281.931,00	20.545.255.596,00	10,05
JUMLAH	2.085.068.300.328,98	1.968.400.143.919,91	116.668.156.409,07	5,93



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4.2.1 Beban Pegawai

2024	2023
758.440.777.553,00	670.746.579.580,00

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp758.440.777.553,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp87.694.197.973,00 atau 13,07% dari Beban Pegawai TA 2023 sebesar Rp670.746.579.580,00. Kenaikan Beban Pegawai secara signifikan disebabkan pada Beban Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp53.616.832.634,00 atau 13,59% dibandingkan TA 2023, Beban Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp13.869.139.072,00 atau 9,45% dibandingkan TA 2023 dan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp20.694.432.497,00 atau 20,32% dibandingkan TA 2023.

Tabel 5.4.42 Realisasi Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	448.273.408.414,00	394.656.575.780,00	53.616.832.634,00	13,59
Beban Tambahan Penghasilan ASN	160.651.685.293,00	146.782.546.221,00	13.869.139.072,00	9,45
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	122.523.970.151,00	101.829.537.654,00	20.694.432.497,00	20,32
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	25.713.834.367,00	25.884.310.949,00	(170.476.582,00)	(0,66)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	285.033.240,00	(285.033.240,00)	(100,00)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.277.879.328,00	1.308.575.736,00	(30.696.408,00)	(2,35)
Jumlah	758.440.777.553,00	670.746.579.580,00	87.694.197.973,00	13,07

5.4.2.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN

2024	2023
448.273.408.414,00	394.656.575.780,00

Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp448.273.408.414,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp53.616.832.634,00 atau 13,59% dari Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp394.656.575.780,00. Beban Gaji dan Tunjangan ASN terbagi atas 2 (dua) akun atau rekening Beban yaitu Beban Gaji dan Tunjangan PNS dan Beban Gaji dan Tunjangan PPPK. Kenaikan Beban Gaji dan Tunjangan ASN secara signifikan disebabkan pada Beban Gaji Pokok PPPK sebesar Rp32.760.365.700,00 atau 127,57% dibandingkan TA 2023, Beban Beban Gaji Pokok PNS sebesar Rp16.040.566.898,00 atau 5,98% dibandingkan TA 2023. Namun demikian terjadi penurunan realisasi pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp3.177.680.974,00 atau 14,09% dibandingkan TA 2023, Beban Tunjangan Fungsional PPPK sebesar Rp1.268.730.000,00 atau 74,80% dibandingkan TA 2023.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.43 Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Gaji Pokok PNS	284.460.246.809,00	268.419.679.911,00	16.040.566.898,00	5,98
Beban Gaji Pokok PPPK	58.440.392.800,00	25.680.027.100,00	32.760.365.700,00	127,57
Beban Tunjangan Keluarga PNS	26.414.674.500,00	24.996.292.807,00	1.418.381.693,00	5,67
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	4.569.341.474,00	1.982.229.186,00	2.587.112.288,00	130,52
Beban Tunjangan Jabatan PNS	5.600.987.548,00	6.187.005.000,00	(586.017.452,00)	(9,47)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	18.212.189.000,00	18.521.690.234,00	(309.501.234,00)	(1,67)
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	427.490.000,00	1.696.220.000,00	(1.268.730.000,00)	(74,80)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.852.850.000,00	4.970.687.000,00	(117.837.000,00)	(2,37)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.145.370.000,00	-	3.145.370.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	14.618.187.814,00	15.081.906.146,00	(463.718.332,00)	(3,07)
Beban Tunjangan Beras PPPK	3.227.831.820,00	1.516.112.700,00	1.711.719.120,00	112,90
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	474.728.913,00	684.511.874,00	(209.782.961,00)	(30,65)
Beban Pembulatan Gaji PNS	3.926.038,00	3.966.293,00	(40.255,00)	(1,01)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.207.027,00	326.270,00	880.757,00	269,95
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.369.524.480,00	22.547.205.454,00	(3.177.680.974,00)	(14,09)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.733.403.859,00	-	1.733.403.859,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	539.194.068,00	592.178.643,00	(52.984.575,00)	(8,95)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	100.124.364,00	-	100.124.364,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.781.377.454,00	1.776.537.162,00	4.840.292,00	0,27
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	300.360.446,00	-	300.360.446,00	100,00
Jumlah	448.273.408.414,00	394.656.575.780,00	53.616.832.634,00	13,59

5.4.2.1.2 Beban Tambahan

Penghasilan ASN

2024

160.651.685.293,00

2023

146.782.546.221,00

Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp160.651.685.293,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp13.869.139.072,00 atau 9,45% dari Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 146.782.546.221,00. Beban Tambahan Penghasilan ASN terbagi atas 2 (dua) akun atau rekening yaitu Beban Tambahan Penghasilan PNS dan Beban Tambahan Penghasilan PPPK. Kenaikan Beban Tambahan Penghasilan ASN secara signifikan disebabkan pada Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp5.963.978.700,00 atau 5,77% dibandingkan TA 2023, Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK sebesar Rp3.581.268.700,00 atau 161,26% dibandingkan TA 2023 dan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp1.941.361.779,00 atau 5,19% dibandingkan TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.4.44 Realisasi Beban Tambahan Penghasilan ASN
Tahun 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	39.340.394.217,00	37.399.032.438,00	1.941.361.779,00	5,19
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.133.818.341,00	3.677.000.000,00	456.818.341,00	12,42
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	80.970.672,00	75.187.120,00	5.783.552,00	7,69
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	115.176.574.063,00	103.410.517.263,00	11.766.056.800,00	11,38
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.919.928.000,00	2.220.809.400,00	(300.881.400,00)	(13,55)
Jumlah	160.651.685.293,00	146.782.546.221,00	13.869.139.072,00	9,45

5.4.2.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2024	2023
	122.523.970.151,00	101.829.537.654,00

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp122.523.970.151,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp20.694.432.497,00 atau 20,32% dari Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp101.829.537.654,00. Kenaikan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN secara signifikan disebabkan pada Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp20.877.015.288,00 atau 24,46% dibandingkan TA 2023. Namun demikian juga terjadi penurunan pada Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.139.238.299,00 atau 45,07% dibandingkan TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.4.45 Realisasi Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	3.241.839.706,00	3.107.292.484,00	134.547.222,00	4,33
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.957.364.630,00	2.653.082.512,00	304.282.118,00	11,47
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.388.387.559,00	2.527.625.858,00	(1.139.238.299,00)	(45,07)
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	106.237.680.188,00	85.360.664.900,00	20.877.015.288,00	24,46
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	165.517.500,00	114.971.900,00	50.545.600,00	43,96
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.714.250.000,00	1.926.150.000,00	(211.900.000,00)	(11,00)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	357.291.200,00	-	357.291.200,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.707.279.368,00	4.408.000.000,00	299.279.368,00	6,79
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	23.360.000,00	-	23.360.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.731.000.000,00	1.731.750.000,00	(750.000,00)	(0,04)
Jumlah	122.523.970.151,00	101.829.537.654,00	20.694.432.497,00	20,32

5.4.2.1.4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

2024	2023
25.713.834.367,00	25.884.310.949,00

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp25.713.834.367,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp170.476.582,00 atau 0,66% dari Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.884.310.949,00. Penurunan Beban Gaji dan Tunjangan DPRD secara signifikan disebabkan pada Beban Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp405.000.000,00 atau 33,33% dibandingkan TA 2023, Beban Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp300.000.000,00 atau 3,91% dibandingkan TA 2023. Namun demikian juga terdapat kenaikan pada Beban Uang Representasi DPRD sebesar Rp592.200.000,00 atau 41,35% dibandingkan TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.4.46 Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan DPRD
Tahun 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Uang Representasi DPRD	2.024.250.000,00	1.432.050.000,00	592.200.000,00	41,35
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	148.634.000,00	190.064.004,00	(41.430.004,00)	(21,80)
Beban Tunjangan Beras DPRD	97.260.060,00	152.444.100,00	(55.184.040,00)	(36,20)
Beban Uang Paket DPRD	122.250.000,00	122.715.000,00	(465.000,00)	(0,38)
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	2.303.899.000,00	2.079.735.000,00	224.164.000,00	10,78
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.842.000.000,00	4.851.000.000,00	(9.000.000,00)	(0,19)
Beban Tunjangan Reses DPRD	810.000.000,00	1.215.000.000,00	(405.000.000,00)	(33,33)
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	279.969.562,00	164.000.004,00	115.969.558,00	70,71
Beban Pembulatan Gaji DPRD	29.145,00	289.454.481,00	(289.425.336,00)	(99,99)
Beban Jaminan Kesehatan DPRD	123.942.600,00	123.648.360,00	294.240,00	0,24
Beban Tunjangan Perumahan DPRD	7.581.600.000,00	7.584.200.000,00	(2.600.000,00)	(0,03)
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	7.380.000.000,00	7.680.000.000,00	(300.000.000,00)	(3,91)
Jumlah	25.713.834.367,00	25.884.310.949,00	(170.476.582,00)	(0,66)

**5.4.2.1.5 Beban Gaji dan Tunjangan
KDH/WKDH**

2024
0,00

2023
285.033.240,00

Pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat saldo atas Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH karena Penjabat Gubernur Gorontalo adalah Pegawai Pusat yang Gaji dan Tunjangannya dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat. Dibandingkan dengan TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp285.033.240,00, dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.4.47 Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	-	95.011.080,00	(95.011.080,00)	(100,00)
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	95.011.080,00	(95.011.080,00)	(100,00)
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	95.011.080,00	(95.011.080,00)	(100,00)
Jumlah	-	285.033.240,00	(285.033.240,00)	(100,00)

5.4.2.1.6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

2024	2023
1.277.879.328,00	1.308.575.736,00

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.277.879.328,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp30.696.408,00 atau 2,35% dari dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.308.575.736,00. Penurunan Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH pada Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp33.600.000,00 atau 16,67% dibandingkan TA 2023. Namun demikian juga terdapat kenaikan pada Beban Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp2.903.592,00 atau 0,26% dibandingkan TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.48 Realisasi Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	168.000.000,00	201.600.000,00	(33.600.000,00)	(16,67)
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	1.109.879.328,00	1.106.975.736,00	2.903.592,00	0,26
Jumlah	1.277.879.328,00	1.308.575.736,00	(30.696.408,00)	(2,35)

5.4.2.2 Beban Persediaan

2024	2023
202.633.341.866,79	192.789.322.746,75

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp202.633.341.866,79 mengalami kenaikan sebesar Rp9.844.019.120,04 atau 5,11% dari Beban Persediaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp192.789.322.746,75. Kenaikan Beban Persediaan secara signifikan disebabkan pada Beban Barang Pakai Habis sebesar Rp9.121.682.650,33 atau 4,74% bila dibandingkan TA 2023, Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp724.408.247,76 atau 220,15% dibandingkan TA 2023, Kenaikan Beban Aset



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi disebabkan karena adanya perubahan nilai kapitalisasi atas Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan SAPD. Namun demikian juga terdapat penurunan pada Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp2.071.778,00 atau 5,12% dibandingkan TA 2023. Dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.49 Realisasi Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Barang Pakai Habis	201.541.470.528,00	192.419.787.877,70	9.121.682.650,30	4,74
Beban Barang Tak Habis Pakai	38.405.116,00	40.476.894,00	(2.071.778,00)	(5,12)
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.053.466.222,76	329.057.975,00	724.408.247,76	220,15
Jumlah	202.633.341.866,76	192.789.322.746,70	9.844.019.120,06	5,11

5.4.2.2.1 Beban Barang Pakai Habis

2024	2023
201.541.470.528,03	192.419.787.877,70

Beban Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp201.541.470.528,03 atau mengalami kenaikan sebesar Rp9.121.682.650,33 atau 4,74% dari Beban Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp192.419.787.877,70. Kenaikan Beban Barang Pakai Habis secara signifikan disebabkan pada Beban Persediaan Obat sebesar Rp47.314.161.966,89 atau 239,31% bila dibandingkan TA 2023, Beban Persediaan Suku Cadang sebesar Rp 4.913.513.003,60 atau 270,41% dibandingkan TA 2023. Namun demikian juga terdapat penurunan pada Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis sebesar Rp30.343.642.269,15 atau 38,67% dibandingkan TA 2023, Beban Persediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp7.722.172.929,00 atau 16,44% dibandingkan TA 2023, Beban Persediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor sebesar Rp4.385.384.214,86 atau 23,73% dibandingkan TA 2023. Dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.50 Realisasi Beban Barang Pakai Habis Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Persediaan Bahan	20.778.141.650,40	21.331.188.645,55	(553.046.995,15)	(2,59)
Beban Persediaan Suku Cadang	6.730.545.500,10	1.817.032.496,50	4.913.513.003,60	270,41
Beban Persediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor	14.093.979.419,03	18.479.363.633,89	(4.385.384.214,86)	(23,73)
Beban Persediaan Obat	67.085.177.837,50	19.771.015.870,61	47.314.161.966,89	239,31
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	48.119.038.543,00	78.462.680.812,15	(30.343.642.269,15)	(38,67)
Beban Persediaan Penelitian	1.472.184.538,00	2.199.322.790,00	(727.138.252,00)	(33,06)
Beban Persediaan Makanan dan Minuman	39.255.229.723,00	46.977.402.652,00	(7.722.172.929,00)	(16,44)
Beban Persediaan Pakaian	4.007.173.317,00	3.381.780.977,00	625.392.340,00	18,49
Jumlah	201.541.470.528,03	192.419.787.877,70	9.121.682.650,33	4,74



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4.2.2.2 Beban Barang Tak Habis Pakai	2024	2023
	38.405.116,00	40.476.894,00

Beban Barang Tak Pakai Habis Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp38.405.116,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.071.778,00 atau 5,12% dari Beban Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp40.476.894,00. Penurunan Beban Barang Tak Pakai Habis secara signifikan disebabkan pada Beban Komponen-Komponen Peralatan sebesar 100% karena pada Tahun 2024 tidak terdapat saldo bila dibandingkan TA 2023. Namun demikian terdapat kenaikan pada Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) sebesar Rp 18.759.881,00 atau 108,31% dibandingkan TA 2023, Beban Pipa-Pipa Lainnya sebesar 100,00% dibandingkan TA 2023. Dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.51 Realisasi Beban Barang Tak Pakai Habis Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Komponen-Komponen Peralatan	-	23.155.659,00	(23.155.659,00)	(100,00)
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	36.081.116,00	17.321.235,00	18.759.881,00	108,31
Beban Pipa-Pipa Lainnya	2.324.000,00	-	2.324.000,00	100,00
Jumlah	38.405.116,00	40.476.894,00	(2.071.778,00)	(5,12)

5.4.2.2.3 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2024	2023
	1.053.466.222,76	329.057.975,00

Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.053.466.222,76 atau mengalami kenaikan sebesar Rp724.408.247,76 atau 220,15% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp329.057.975,00. Kenaikan Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi disebabkan karena adanya perubahan nilai kapitalisasi atas Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan SAPD. Kenaikan dimaksud pada Beban Peralatan dan Mesin sebesar Rp646.867.945,76 atau 205,96% dibandingkan TA 2023, Beban Gedung dan Bangunan sebesar Rp77.540.302,00 atau 517,76% dibandingkan TA 2023. Dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.52 Realisasi Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Peralatan dan Mesin yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	960.949.920,76	314.081.975,00	646.867.945,76	205,96
Beban Gedung dan Bangunan yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	92.516.302,00	14.976.000,00	77.540.302,00	517,76
Jumlah	1.053.466.222,76	329.057.975,00	724.408.247,76	220,15



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4.2.3 Beban Jasa

2024	2023
348.316.292.234,92	360.358.291.578,98

Beban Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp348.316.292.234,92 mengalami penurunan sebesar Rp12.041.999.343,06 atau 3,34% dari Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp360.358.291.578,98. Penurunan Beban Jasa secara signifikan disebabkan pada Beban Jasa Kantor sebesar Rp20.050.129.051,00 atau 12,07% bila dibandingkan TA 2023, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp3.643.245.269,00 atau 29,72% bila dibandingkan TA 2023, Beban Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp2.998.335.590,00 atau 5,39% dibandingkan TA 2023, Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp1.362.612.730,00 atau 68,08% dibandingkan TA 2023. Namun demikian terdapat kenaikan pada Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp6.437.556.702,00 atau 10,28% dibandingkan TA 2023, Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp4.870.863.010,00 atau 11,89% dibandingkan TA 2023, Beban Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.484.128.669,00 atau 27,64% dibandingkan TA 2023, Beban Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp2.630.167.935,00 atau 103,65% dibandingkan TA 2023. Dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.53 Realisasi Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Jasa Kantor	146.066.415.367,00	166.116.544.418,00	(20.050.129.051,00)	(12,07)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	52.633.958.926,00	55.632.294.516,00	(2.998.335.590,00)	(5,39)
Beban Sewa Tanah	272.240.000,00	576.826.666,00	(304.586.666,00)	(52,80)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	16.088.163.024,00	12.604.034.355,00	3.484.128.669,00	27,64
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.094.314.267,00	2.412.828.691,00	(318.514.424,00)	(13,20)
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	72.000.000,00	312.500.000,00	(240.500.000,00)	(76,96)
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	300.457.536,00	176.632.905,00	123.824.631,00	70,10
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	5.167.816.400,00	2.537.648.465,00	2.630.167.935,00	103,65
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	638.973.440,00	2.001.586.170,00	(1.362.612.730,00)	(68,08)
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	286.929.534,00	183.831.997,00	103.097.537,00	56,08
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	128.510.000,00	189.292.516,00	(60.782.516,00)	(32,11)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.085.406.550,00	1.797.062.131,00	(711.655.581,00)	(39,60)
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	6.274.000,00	7.550.000,00	(1.276.000,00)	(16,90)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.614.558.181,00	12.257.803.450,00	(3.643.245.269,00)	(29,72)
Beban Barang dan Jasa BOS	69.030.008.672,00	62.592.451.970,00	6.437.556.702,00	10,28
Beban Barang dan Jasa BLUD	45.820.266.337,00	40.949.403.327,00	4.870.863.010,00	11,89
Jumlah	348.316.292.234,00	360.358.291.577,00	(12.041.999.343,00)	(3,34)



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

2024	2023
21.845.530.047,73	29.507.738.764,22

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp21.845.530.047,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.662.208.717,00 atau 25,97% dari Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.507.738.764,00. Penurunan Beban Pemeliharaan secara signifikan disebabkan pada Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp3.646.987.251,00 atau 33,77% bila dibandingkan TA 2023, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.562.020.102,00 atau 30,43% bila dibandingkan TA 2023. Dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.54 Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Pemeliharaan Tanah	318.356.840,00	515.462.540,00	(197.105.700,00)	(38,24)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.180.848.093,00	6.461.943.757,00	(281.095.664,00)	(4,35)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.144.484.607,73	11.706.504.709,00	(3.562.020.101,27)	(30,43)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.151.840.507,00	10.798.827.758,00	(3.646.987.251,00)	(33,77)
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
Jumlah	21.845.530.047,73	29.507.738.764,00	(7.662.208.716,27)	(25,97)

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

2024	2023
131.038.004.554,00	148.300.243.111,00

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp131.038.004.554,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.262.238.557,00 atau 11,64% dari Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp148.300.243.111,00. Penurunan Beban Perjalanan Dinas secara signifikan disebabkan pada Beban Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp15.215.471.580,00 atau 10,95% bila dibandingkan TA 2023, Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp1.466.681.340,00 atau 20,57% bila dibandingkan TA 2023. Dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.55 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	123.729.747.854,00	138.945.219.434,00	(15.215.471.580,00)	(10,95)
Beban Perjalanan Dinas Tetap	1.561.812.300,00	1.759.250.000,00	(197.437.700,00)	(11,22)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.662.971.700,00	7.129.653.040,00	(1.466.681.340,00)	(20,57)
Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	83.472.700,00	466.120.637,00	(382.647.937,00)	(82,09)
Jumlah	131.038.004.554,00	148.300.243.111,00	(17.262.238.557,00)	(11,64)



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4.2.6 Beban Bunga

2024	2023
6.349.012.047,00	7.188.622.874,00

Beban Bunga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.349.012.047,00 mengalami penurunan sebesar Rp839.610.827,00 atau 11,68% dari Beban Bunga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.188.622.874,00. Penurunan Beban Bunga pada Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Pendek sebesar Rp744.688.792,00 atau 11,29% bila dibandingkan TA 2023, Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah sebesar Rp94.922.035,00 atau 16,05% bila dibandingkan TA 2023. Dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.56 Realisasi Beban Bunga Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN - Jangka Pendek	5.852.525.316,00	6.597.214.108,00	(744.688.792,00)	(11,29)
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN - Jangka Menengah	496.486.731,00	591.408.766,00	(94.922.035,00)	(16,05)
Jumlah	6.349.012.047,00	7.188.622.874,00	(839.610.827,00)	(11,68)

5.4.2.7 Beban Hibah

2024	2023
120.277.306.062,00	106.289.323.327,00

Beban Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp120.277.306.062,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.987.982.735,00 atau 13,16% dari Beban Hibah TA 2023 sebesar Rp106.289.323.327,00. Peningkatan Beban Hibah secara signifikan pada Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp43.312.822.533,00 atau 80,79% bila dibandingkan Tahun Anggaran 2023, Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp2.973.250.008,00 atau 33,06% bila dibandingkan TA 2023. Namun demikian terdapat penurunan pada Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp4.141.000.000,00 atau 36,96% dibandingkan TA 2023, serta tidak terdapat saldo pada Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat, Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan Beban Hibah Barang kepada BUMN pada TA 2024. Dengan Rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.4.57 Realisasi Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	96.924.364.333,00	53.611.541.800,00	43.312.822.533,00	80,79
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0	13.371.380.613,00	(13.371.380.613,00)	(100,00)
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	8.521.897.844,00	(8.521.897.844,00)	(100,00)
Beban Hibah Barang kepada BUMN	0	70.555.000,00	(70.555.000,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.967.450.000,00	8.994.199.992,00	2.973.250.008,00	33,06
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.180.000.000,00	1.647.000.000,00	(467.000.000,00)	(28,35)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.064.000.000,00	11.205.000.000,00	(4.141.000.000,00)	(36,96)
Beban Hibah kepada Koperasi	600.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.450.000.000,00	825.000.000,00	625.000.000,00	75,76
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0	6.670.615.000,00	(6.670.615.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.091.491.729,00	1.072.133.078,00	19.358.651,00	1,81
Jumlah	120.277.306.062,00	106.289.323.327,00	13.987.982.735,00	13,16

5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial

2024	2023
11.191.847.860,00	24.878.511.324,00

Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.191.847.860,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.686.663.464,00 atau 55,01% dari Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp24.878.511.324,00. Penurunan Beban Bantuan Sosial secara signifikan pada Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp6.608.220.000,00 atau 56,65% bila dibandingkan TA 2023, Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp5.130.541.440,00 atau 65,10% bila dibandingkan TA 2023. Dengan Rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.4.58 Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	-	78.261.574,00	(78.261.574,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.750.958.560,00	7.881.500.000,00	(5.130.541.440,00)	(65,10)
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.056.780.000,00	11.665.000.000,00	(6.608.220.000,00)	(56,65)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	765.500.000,00	1.058.000.000,00	(292.500.000,00)	(27,65)
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	526.609.300,00	527.749.750,00	(1.140.450,00)	(0,22)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.087.000.000,00	3.658.000.000,00	(1.571.000.000,00)	(42,95)
Jumlah	11.191.847.860,00	24.878.511.324,00	(13.686.663.464,00)	(55,01)

5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang

2024

288.988.872,83

2023

359.600.687,41

Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp288.988.872,83 mengalami penurunan sebesar Rp70.611.814,58 atau 19,64% dari Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp359.600.687,41. Penurunan Beban Penyisihan Piutang karena tidak terdapat saldo pada Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dan Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Namun demikian terdapat kenaikan pada Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan sebesar Rp181.562.177,85 atau 228,84% bila dibandingkan dengan TA 2023. Dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.59 Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	-	(4.086.608,15)	4.086.608,15	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin	4.891.228,40	-	4.891.228,40	100,00
Beban Penyisihan Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya	-	(1.754.755,32)	1.754.755,32	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	260.900.956,69	79.338.778,84	181.562.177,85	228,84
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	-	233.737.822,35	(233.737.822,35)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	(31.327.775,00)	31.327.775,00	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	7.829.183,88	-	7.829.183,88	100,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	4.591.559,18	-	4.591.559,18	100,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	-	83.693.224,69	(83.693.224,69)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	11.085.145,50	-	11.085.145,50	100,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	(309.200,82)	-	(309.200,82)	100,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi	2024	2023
	259.726.661.703,71	223.566.627.995,55

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp259.726.661.703,71 dan mengalami kenaikan sebesar Rp36.160.033.708,16 atau 16,17% dari Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp223.566.627.995,55. Kenaikan secara signifikan pada Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp38.057.454.704,27 atau 39,12%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.60 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	79.159.529.093,24	83.149.641.190,37	-3.990.112.097,13	-4,80
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	42378108320	42.415.384.343,40	(37.276.022,98)	(0,09)
Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	135.339.530.562,05	97.282.075.857,78	38.057.454.704,27	39,12
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	995622259	505.750.824,00	489.871.435,00	96,86
Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	1.641.367.199,20	0,00	1.641.367.199,20	100,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	212.504.269,80	213.775.780,00	(1.271.510,20)	(0,59)
Jumlah	259.726.661.703,71	223.566.627.995,55	36.160.033.708,16	16,17

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Pemilihan metode garis lurus dimaksudkan untuk mempermudah dalam perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, karena penyusutan aset tetap pada pemerintah daerah dimaksudkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya.

Pada Tahun 2024 Pemprov telah melakukan penyesuaian masa manfaat sesuai Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Penyesuaian masa manfaat aset tersebut berpengaruh pada penyajian nilai beban dan akumulasi penyusutan. Adapun pencatatan Nilai Beban Penyusutan telah disesuaikan dengan nilai Beban Penyusutan pada aplikasi e-BMD Laporan Beban Penyusutan Tahun 2024 dengan nilai total sebesar Rp 259.732.191.729,69.

5.4.2.12 Beban Transfer	2024	2023
	224.960.537.527,00	204.415.281.931,00

Beban Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp224.960.537.527,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.545.255.596,00 atau 10,05 % dari Beban Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp204.415.281.931,00. Penurunan Beban Transfer disebabkan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyesuaikan dengan realisasi pencapaian Pajak Daerah di wilayah masing-masing yang mengalami penurunan



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

atas realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.61 Realisasi Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	175.500.539.088,00	164.994.650.008,00	10.505.889.080,00	6,37
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	46.859.998.439,00	37.700.631.923,00	9.159.366.516,00	24,29
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2.600.000.000,00	1.210.000.000,00	1.390.000.000,00	114,88
Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	-	510.000.000,00	(510.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	224.960.537.527,00	204.415.281.931,00	20.545.255.596,00	10,05

Surplus/Defisit Dari Operasi

2024	2023
(83.526.135.015,89)	(53.089.738.012,49)

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp83.526.135.015,89, diperoleh dari Pendapatan-LO sebesar Rp2.001.542.165.313,09 dikurangi Beban-LO sebesar Rp2.085.068.300.328,98. Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp30.436.397.003,40 atau 57,33% dari Defisit TA 2023 sebesar Rp53.089.738.012,49.

5.4.3.1 Surplus/(Defisit) Non Operasi

2024	2023
(267.664.677,86)	(8.750.257.867,12)

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat Defisit Non Operasional sebesar Rp267.664.677,86 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.750.257.867,12 merupakan nilai kerugian investasi pada PT GFM. Nilai kerugian tersebut berdasarkan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Gorontalo Fitrah Mandiri TA 2023 dan Laporan Keuangan Unaudited TA 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.62 Realisasi Surplus/(Defisit) Non Operasi Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	267.664.677,86	8.750.257.867,12	(8.482.593.189,26)	(96,94)
Jumlah	267.664.677,86	8.750.257.867,12	(8.482.593.189,26)	(96,94)

5.4.4 POS LUAR BIASA

2024	2023
(4.701.497.713,00)	(991.984.875,00)

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.701.497.713,00 dan Tahun Anggaran 2023



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar Rp991.984.875,00. Peningkatan Nilai Beban Luar Biasa disebabkan karena Kebijakan pada Belanja Tidak Terduga yang digunakan Dalam Rangka Kunjungan Kerja Presiden RI ke Provinsi Gorontalo, Penanganan Bencana Alam di Wilayah Provinsi Gorontalo, Pemberian Bonus kepada Atlet dan Pelatih peraih Medali pada PON XII Aceh dan Medan Tahun 2024.

5.4.5 SURPLUS/DEFISIT LO

2024	2023
<u>(88.495.297.406,75)</u>	<u>(62.831.980.754,61)</u>

Defisit Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp(88.495.297.406,75) dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp62.831.980.754,61.



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.5 Rincian Dan Penjelasan Komponen Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada

5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Operasi

2024	2023
166,466,143,373.07	201,823,187,417.53

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp166.466.143.373,07 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas yang terdiri dari:

Uraian	2024	2023
Arus Masuk Kas	1.929.553.176.696,23	1.872.116.684.444,68
Arus Keluar Kas	1.763.087.033.323,16	1.670.293.497.027,15
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	166.466.143.373,07	201.823.187.417,53

5.5.1.1. Arus Masuk Kas

Rp1.929.553.176.696,23

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp1.929.553.176.696,23 dan untuk periode yang sama pada TA 2023 sebesar Rp1.872.116.684.444,68 yang terdiri dari:

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Pajak Daerah	457.233.185.366,00	432.906.096.022,00	24.327.089.344,00	5,62
Pendapatan Retribusi	54.310.658.591,00	4.232.976.524,00	50.077.682.067,00	1.183,04
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.580.368.337,00	11.012.325.878,00	568.042.459,00	5,16
Lain-lain PAD yang sah	14.282.008.906,23	63.410.102.172,68	(49.128.093.266,45)	(77,48)
Dana Bagi Hasil Pajak	24.972.779.787,00	19.979.330.007,00	4.993.449.780,00	24,99
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	3.470.154.000,00	(3.470.154.000,00)	(100,00)
Dana Alokasi Umum	1.022.379.872.000,00	979.869.891.000,00	42.509.981.000,00	4,34
Dana Alokasi Khusus	330.415.915.877,00	316.498.122.733,00	13.917.793.144,00	4,40
Dana Insentif Fiskal	7.682.882.000,00	30.445.345.000,00	(22.762.463.000,00)	(74,77)
Pendapatan Hibah	6.231.945.832,00	9.707.761.108,00	(3.475.815.276,00)	(35,80)
Pendapatan Lainnya	463.560.000,00	584.580.000,00	(121.020.000,00)	(20,70)
Arus Masuk Kas	1.929.553.176.696,23	1.872.116.684.444,68	57.436.492.251,55	3,07

Total Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 sebesar Rp1.929.553.176.696,23 berbeda dengan realisasi Pendapatan pada LRA TA 2023 yang disajikan sebesar Rp1.872.116.684.444,68 atau terdapat perbedaan sebesar Rp57.436.492.251,55 yang



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

disebabkan Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan LRA tidak disajikan dalam arus kas masuk dari Aktivitas Operasi melainkan disajikan pada Aktivitas Investasi pada LAK.

5.5.1.2. Arus Keluar Kas

	2024	2023
	1,763,087,033,323.16	1,670,293,497,027.15

Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp1.763.087.033.323,16 dan untuk periode yang sama pada TA 2023 sebesar Rp1.670.293.497.027,15 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
Belanja Pegawai	764.595.004.643,00	657.826.026.577,00	106.768.978.066,00	16,23
Belanja Barang dan Jasa	641.715.150.644,16	700.268.455.177,15	(58.553.304.532,99)	(8,36)
Bunga Pinjaman	6.439.282.345,00	7.093.341.745,00	(654.059.400,00)	(9,22)
Hibah	132.240.736.851,00	85.797.138.870,00	46.443.597.981,00	54,13
Bantuan Sosial	11.191.847.860,00	24.878.511.324,00	(13.686.663.464,00)	(55,01)
Belanja Tak Terduga	4.701.497.713,00	991.984.875,00	3.709.512.838,00	373,95
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	199.603.513.267,00	191.718.038.459,00	7.885.474.808,00	4,11
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	2.600.000.000,00	1.720.000.000,00	880.000.000,00	51,16
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Arus Keluar Kas	1.763.087.033.323,16	1.670.293.497.027,15	92.793.536.296,01	5,56

5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

	2024	2023
	(219.567.171.401,45)	(239.932.069.772,51)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp219.567.171.401,45 dan untuk periode yang sama pada TA 2023 sebesar Rp239.932.069.772,51 dengan rincian sebagai berikut:

5.5.2.1. Arus Masuk Kas

Rp787.067.000,00

Total Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp787.067.000,00 dan untuk periode yang sama pada TA 2023 sebesar Rp370.421.084,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	787.067.000,00	370.421.084,00	416.645.916,00	112,48
Hasil Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Arus Masuk Kas	787.067.000,00	370.421.084,00	416.645.916,00	112,48

5.5.2.2. Arus Keluar Kas

Rp220.354.238.401,45

Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp220.354.238.401,45 dan untuk periode yang sama pada TA 2023 sebesar Rp240.302.490.856,51 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Belanja Tanah	0	0	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	73,194,098,495.00	57,681,672,265.00	15,512,426,230.00	26.89
Belanja Gedung dan Bangunan	68,302,416,338.45	42,838,898,903.91	25,463,517,434.54	59.44
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	70,394,263,930.00	121,110,943,553.60	(50,716,679,623.60)	(41.88)
Belanja Aset Tetap Lainnya	8,463,459,638.00	8,670,976,134.00	(207,516,496.00)	(2.39)
Belanja Aset Lainnya	0	0	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	10,000,000,000.00	(10,000,000,000.00)	(100.00)
Jumlah	220,354,238,401.45	240,302,490,856.51	(19,948,252,455.06)	(8.30)

5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

2024	2023
(18,217,735,912.00)	(19,751,038,160.00)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp18.217.735.912,00) dan untuk periode yang sama pada TA 2023 sebesar (Rp19.751.038.160,00) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas	0	0
Arus Keluar Kas	18,217,735,912.00	19,751,038,160.00
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	-18,217,735,912.00	-19,751,038,160.00

5.5.3.1. Arus Masuk Kas

Rp0,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Total Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah nihil

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pencairan Dana Cadangan	0	0
Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat	0	0
Jumlah	0	0

5.5.3.2. Arus Keluar Kas Rp18.217.735.912,00

Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp18.217.735.912 dan untuk periode yang sama pada TA 2022 sebesar Rp19.751.038.160,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pembentukan Dana Cadangan	0	0
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18,217,735,912.00	19,751,038,160.00
Jumlah	18,217,735,912.00	19,751,038,160.00

5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	2024	2023
	(51,854,979.00)	(60,952,559.00)

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris periode 1 Januari s.d.31 Desember 2024 adalah sebesar Rp51,854,979,00 dan untuk periode yang sama pada TA 2023 adalah sebesar Rp60.952.559,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2024	2023
Arus Masuk Kas	69.558.535.031,00	136.199.554.129,07
Arus Keluar Kas	69.610.390.010,00	136.260.506.688,07
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	(51.854.979,00)	(60.952.559,00)

5.5.4.1 Arus Masuk Kas	2024	2023
	69,558,535,031.00	136,199,554,129.07

Total Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp69,558,535,031.00 dan untuk periode yang sama pada TA 2023 sebesar Rp136.199.554.129,07 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	67.576.156.562,00	95.071.924.005,07	(27.495.767.443,07)	(28,92)
Penerimaan PFK Dana BOSP TA 2024	1.982.378.469,00	65.741.857,00	1.916.636.612,00	2.915,40
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran	0,00	41.061.888.267,00	(41.061.888.267,00)	(100,00)
Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	69.558.535.031,00	136.199.554.129,07	(66.641.019.098,07)	(48,93)

5.5.4.2 Arus Keluar Kas

2024

2023

69,610,390,010.00

136,260,506,688.07

Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp69.610.390.010,00 dan untuk periode yang sama pada TA 2023 sebesar Rp136.260.506.688,07 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	67.569.223.296,00	95.071.924.005,07	(27.502.700.709,07)	(28,93)
Pengeluaran PFK TA 2024	2.041.166.714,00	126.694.416,00	1.914.472.298,00	1.511,09
Pemberian Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran	0,00	41.061.888.267,00	(41.061.888.267,00)	(100,00)
Kiriman Uang Keluar	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	69.610.390.010,00	136.260.506.688,07	(66.650.116.678,07)	(48,91)

5.5.5. Kenaikan/(Penurunan Kas)

2024

2023

-71,370,618,919.38

-57,920,873,073.98

Penurunan kas selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2024 sebesar - 71,370,618,919.38 dan untuk periode yang sama pada TA 2023 sebesar Rp57.920.873.073,98 yang berasal dari:

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	166.466.143.373,07	201.823.187.417,53	(35.357.044.044,46)	(17,52)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(219.567.171.401,45)	(239.932.069.772,51)	20.364.898.371,06	(8,49)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(18.217.735.912,00)	(19.751.038.160,00)	1.533.302.248,00	(7,76)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(51.854.979,00)	(60.952.559,00)	9.097.580,00	0,00
Jumlah	(71.370.618.919,38)	(57.920.873.073,98)	(13.449.745.845,40)	23,22

5.5.6 Saldo Awal Kas

2024

2023

170,971,636,669.69

235,848,844,060.04



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo awal Kas per 1 Januari 2024 sebesar Rp170.971.636.669,69 sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp235.848.844.060,04.

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo Awal Kas	170.971.636.669,69	235.848.844.060,04	(64.877.207.390,35)	(27,51)
Jumlah	170.971.636.669,69	235.848.844.060,04	(64.877.207.390,35)	(27,51)

5.5.7. Saldo Akhir Kas	2024	2023
	99,601,017,750.31	170,971,636,669.69

Saldo Akhir Kas merupakan gabungan Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran termasuk Kas Dana BOSP, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp99.594.084.484,49 sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp170.971.636.669,69 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas di Kas Daerah	84.696.315.973,09	153.839.933.323,84	-69.143.617.350,75	-44,95
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	13.359.175.866,82	15.085.201.009,45	-1.726.025.142,63	-11,44
Kas Dana BOSP	1.428.549.160,00	1.544.780.419,00	-116.231.259,00	-7,52
Kas Lainnya	110.043.484,40	501.721.917,40	-391.678.433,00	-78,07
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	99.594.084.484,31	170.971.636.669,69	-71.377.552.185,38	-41,75



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp2.368.190.518.077,99	Rp2.511.279.322.055,31

Nilai ekuitas awal pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.368.190.518.077,99 dan Rp2.511.279.322.055,31 yang merupakan nilai ekuitas akhir pada Neraca Tahun 2024 dan 2023.

5.6.2. Surplus/Defisit LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp88.495.297.406,75)	(Rp62.831.980.754, 60)

Surplus/Defisit LO merupakan penambahan/pengurangan ekuitas yang bersumber dari Saldo Surplus/Defisit LO pada akhir periode pelaporan. Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp62.831.980.754,60 dan pada 31 Desember 2024 Defisit sebesar Rp88.495.297.406,75. Defisit LO merupakan penjumlahan antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Rincian Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan dalam Laporan Operasional.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Ekuitas	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp43.908.963.504,18)	(Rp80.256.823.222,71)

5.6.3.1 Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	Rp	4.805.062.949,15
Penambahan:	Rp	7.843.606.929,15
Jurnal Penyesuaian atas pengakuan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Ganda dan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai penetapan piutang	Rp	105.631.929,15
Kekurangan Pembayaran DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam TA 2023	Rp	7.737.975.000,00
Pengurangan:	Rp	3.038.543.980,00
Jurnal Penyesuaian atas pengakuan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Ganda dan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai penetapan piutang	Rp.	9.803.980,00
Kekurangan Pembayaran DBH Cukau Hasil Tembakau dan DBH Dana Reboisasi dan DBH Sawit TA 2023	Rp.	3.028.740.000,00
5.6.3.2 Koreksi Ekuitas – Investasi	Rp	-
Tidak terdapat koreksi ekuitas atas Nilai Investasi		



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penambahan:	Rp	-
Pengurangan:	Rp	-
5.6.3.3 Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	Rp	(47.098.459.749,78)
Penambahan:	Rp	35.644.681.849,48
Reklasifikasi dari Aset Ekstrakomptabel	Rp.	957.565.000,00
Koreksi atas Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp.	3.111.057.455,00
Reklasifikasi ATPM Ke Aset Lain-lain	Rp	413.718.600,57
Reklasifikasi AT KDP Ke AT GB	Rp	20.690.735,33
Penambahan Perolehan ATPM Dana Bos	Rp	157.264.449,00
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Akibat Perubahan Masa Manfaat Pada Aplikasi EBMD	Rp	14.287.460.754,70
Penetapan Status Pengguna BMD	Rp	14.923.979.943,00
Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Akibat Perubahan Masa Manfaat Pada Aplikasi eBMD Tahun 2024 (PAJE)	Rp	1.772.944.911,87
Pengurangan:	Rp	82.743.141.599,26
Koreksi atas Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp	4.060.722.455,00
Penyesuaian ATPM Perolehan Dana Bos Tahun 2023	Rp	1.745.333.185,50
Penyesuaian ATPM Perolehan Dana Hibah Tahun 2023	Rp	573.389.999,00
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Akibat Perubahan Masa Manfaat Pada Aplikasi EBMD	Rp	60.075.342.464,31
Mutasi Pengalihan Status BMD PM, GB, JIJ	Rp	11.364.958.927,00
Penghapusan BMD	Rp	2.909.311.115,00
Reklasifikasi AT KDP Ke AT JIJ	Rp	1.238.443.773,89
Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Akibat Perubahan Masa Manfaat Pada Aplikasi eBMD Tahun 2024 pada Dinas Pariwisata (PAJE)	Rp	288.264.943,60
Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Akibat Perubahan Masa Manfaat Pada Aplikasi eBMD Tahun 2024 pada RSUD dr. Hasri Ainun Habibie (PAJE)	Rp	487.374.735,96
5.6.3.4 Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	(Rp	526.742.934,00)
Penambahan: Aset Rusak Berat	-Rp	526.742.934,00
Penghapusan ATPM, ATGB ATL karena rusak berat akibat kebakaran/keadaan kahar dan Aset Lainnya atas Sensus BMD sesuai SK No. 414/18/X/2024 tgl 21 Oktober 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-Rp	457.783.026,00
Penghapusan karena pemusnahan BMD yang sudah tercatat pada Aset Lain-Lain pada Biro Hukum sesuai SK no. 508/29/XII/2024 tgl 24 Des 2024	-Rp	68.959.908,00



Pemerintah Provinsi Gorontalo
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengurangan:	Rp	-
5.6.3.4 Koreksi Ekuitas - Kewajiban	Rp	(1.088.823.769,55)
Penambahan:	Rp	149.620.004,34
Reklasifikasi AT KDP ke ATGB Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rp	20.690.735,34
Jurnal Penyesuaian atas Selisih Kelebihan Pengakuan Utang PEN Tahun 2020 sebesar Rp128.929.269,00 (Rp1.411.281.937,00 -Rp1.282.352.668,00) (PAJE)	Rp	128.929.269,00
Pengurangan:	Rp	1.238.443.773,89
Reklasifikasi AT KDP ke AT JIJ Jalan Provinsi Pekerjaan Jalan Labanu - Tolongio	Rp	1.238.443.773,89
5.6.3.4 Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	-
Tidak terdapat koreksi ekuitas lainnya		
Penambahan:	Rp	-
Pengurangan:	Rp	-



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum

Provinsi Gorontalo merupakan daerah/provinsi pemekaran dari Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo dimana pada awal terbentuknya Provinsi Gorontalo baru memiliki 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo. Seiring dengan perkembangan daerah dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka di Provinsi Gorontalo kemudian terbentuk 2 kabupaten baru yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003. Akhirnya pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2007 disahkan pembentukan satu kabupaten lagi yaitu Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian hingga saat ini Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota.

Wilayah Gorontalo terletak di antara 0°19' – 1°15' Lintang Utara dan 121°23' - 123°43' Bujur Timur. Dari posisi tersebut wilayah ini berbatasan langsung dengan dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini.

Luas wilayah Provinsi Gorontalo 12.215,44 km², jika dibandingkan dengan Wilayah Indonesia luas Provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen. Saat ini, Provinsi Gorontalo memiliki 6 (enam) wilayah pemerintahan yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari Kota Gorontalo dengan luas wilayah 66,25 km², Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.207,58 km², Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 2.517,36 km², Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.244,31 km², Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.889,04 km² dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 1.676,15 km². Dari keenam wilayah ini Kabupaten Pohuwato memiliki luas wilayah terbesar diikuti oleh Kabupaten Boalemo, sedangkan Kota Gorontalo memiliki luas wilayah terkecil sebesar 0,54% dari total luas wilayah Gorontalo. Di dalam pengembangan wilayah sampai dengan tahun 2018 direncanakan Provinsi Gorontalo akan memiliki 8 Kabupaten dan 2 kota.

Tabel 42 Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota

No.	Wilayah	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Sumber Data
1	Kabupaten Gorontalo	2.207,58	18,07	UU No. 29 Thn 1959, UU No. 50 Thn 1999, UU No. 06 Thn 2003 dan UU No. 11 Thn 2007
2	Kabupaten Boalemo	2.517,36	20,61	UU No. 50 Thn 1999 dan UU No. 06 Thn 2003
3	Kabupaten Pohuwato	4.244,31	34,75	UU No. 06 Thn 2003
4	Kabupaten Bone Bolango	1.889,04	15,46	UU No. 06 Thn 2003



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Wilayah	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Sumber Data
5	Kabupaten Gorontalo Utara	1.676,15	13,72	UU No. 11 Thn 2007
6	Kota Gorontalo	66,25	0,54	UU No. 29 Thn 1959 dan UU No. 22 Thn 1999
7	Provinsi Gorontalo	12.215,44	100,00	UU No. 38 Thn 2000

Sumber: Bappeda Provinsi Gorontalo, 2012 (Hasil Olahan), Dirjen PUM Kemendagri

6.2 Sifat Operasi Dan Kegiatan Pokok

Sifat operasi dan kegiatan pokok Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak terlepas dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut diamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi melaksanakan Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk provinsi merupakan urusan yang berskala provinsi meliputi:

- Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- Penanganan bidang kesehatan
- Penyelenggaraan pendidikan;
- Penanggulangan masalah sosial;
- Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- Pengendalian lingkungan hidup;
- Pelayanan pertanahan;
- Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- Penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan;
- Pelayanan administrasi penanaman modal;
- Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan urusan pemerintahan Provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

6.3 Ketentuan Perundang-Undangan Yang Melandasi Kegiatan Operasional

Landasan utama penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kegiatan operasional tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah diubah dengan



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Disamping itu adanya beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah, yang menjadi dasar pijakan Pemerintah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

6.4 Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 6 April 2022.

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas, Terdiri Atas:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - 2) Dinas Pemuda dan Olahraga dengan tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - 3) Dinas Kesehatan dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan dan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - 6) Dinas Sosial dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 8) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - 9) Dinas Kelautan dan Perikanan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 10) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - 11) Dinas Pangan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
 - 12) Dinas Pariwisata dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 - 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 14) Dinas Pertanian dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - 15) Dinas perhubungan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - 16) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - 18) Dinas Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, energi sumber daya mineral dan transmigrasi;
 - 19) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
- e. Badan, terdiri atas:
- 1) Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - 2) Badan Keuangan dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
 - 3) Badan Kepegawaian dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - 4) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya manusia;
 - 5) Badan Penghubung yang melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat; dan
 - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud kesungguhan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk membenahi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak lain bertujuan untuk menyajikan seluruh transaksi keuangan secara wajar dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk Tahun Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan *fairness* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo.

GUBERNUR GORONTALO,



GUSNAR ISMAIL

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1		Piutang Pajak Daerah	34,096,555,899.04			34,933,037,245.04
	Badan Keuangan	- Piutang PKB	25,285,823,601.04	0.00	141,764,334	25,144,059,267.04
	Badan Keuangan	- Piutang PBBKB	8,222,073,113.00	978,245,680	0.00	9,200,318,793.00
	Badan Keuangan	- Piutang PAP	588,659,185.00	0.00	0.00	588,659,185.00
2		Piutang Retribusi Daerah	5,316,427,193.00			5,316,427,193.00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan PKP	- Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	230,466,542.00	0.00	0.00	230,466,542.00
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	699,126.00	0.00	0.00	699,126.00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	- Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5,068,261,525.00	0.00	0.00	5,068,261,525.00
3		Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	15,362,861,290.50			16,891,595,997.35
	Badan Keuangan	- Piutang TGR terhadap PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	5,838,878,311.12	0.00	26,000,000.00	5,812,878,311.12
	Badan Keuangan	- Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak	267,387,427.00	0.00	0.00	267,387,427.00
	Badan Keuangan	- Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	23,498,240.00	0.00	0.00	23,498,240.00
	RSUD. Hasri Ainun Habibie	- Piutang RSUD Hasri Ainun Habibie - BLUD	8,890,812,896.00	257,684,091.00	0.00	9,148,496,987.00
	Badan Keuangan	- Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji PNSD	57,913,300.00	0.00	0.00	57,913,300.00
	Badan Keuangan	- Piutang Bunga dan Denda PT. GFM	284,000,000.00	0.00	0.00	284,000,000.00
	Badan Keuangan	- Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	371,116.38	0.00	0.00	371,116.38
	RSUD. Hasri Ainun Habibie	- Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0.00	1,297,050,615.85	0.00	1,297,050,615.85
	RSUD. Hasri Ainun Habibie	- Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0.00	0.00	0.00	-
4		Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1,950,426,816.00			8,191,138,816.00
	Badan Keuangan	- Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-DAK Non Fisik	13,920,000.00	0.00	0.00	13,920,000.00
	Badan Keuangan	- Piutang Bagi Hasil Pajak	1,936,506,816.00	7,737,975,000.00	1,497,263,000.00	8,177,218,816.00

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	25,144,059,267.00	- 25,144,059,267.00	0.00
2	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	9,200,318,793.00	- 46,001,593.96	9,154,317,199.04
3	Piutang Pajak Air Permukaan	588,659,185.00	- 409,367,099.00	179,292,086.00
4	Piutang Retribusi Jasa Umum	247,466,542.00	- 155,458,986.96	92,007,555.04
5	Piutang Retribusi Jasa Usaha	5,068,960,651.00	- 5,068,261,525.00	699,126.00
6	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	23,498,240.00	- 23,498,240.00	0.00
7	Piutang Jasa Giro	371,116.38	- 371,116.38	0.00
8	Piutang Pendapatan Bunga	284,000,000.00	- 284,000,000.00	0.00
9	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5,812,878,311.12	- 5,812,878,311.12	0.00
10	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	267,387,427.00	- 267,387,427.00	0.00
11	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1,297,050,615.86	-	1,297,050,615.86
12	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	57,913,299.59	- 57,913,299.59	0.00
13	Piutang Pendapatan BLUD	9,148,496,987.00	- 199,839,199.41	8,948,657,787.59
14	Piutang Dana Transfer Umum-DBH	8,177,218,816.00	-	8,177,218,816.00
15	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Reguler	13,920,000.00	- 13,920,000.00	0.00
16	Uang Muka	3,891,151,848.14	3,891,151,848.14	7,782,303,696.28

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	Jumlah Dana Bergulir	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	Jumlah Piutang Bersih
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Tahun Penyerta-an Modal	Nama Badan/Lembaga /Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah disertakan s/d Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal Yang Telah disertakan s/d Akhir Tahun ini	Sisa Modal yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (investasi) Tahun ini	Jumlah Modal (investasi) yg diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (investasi) yg disertakan s/d tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10=6-9	11	12	13
1	2002	PT.Gorontalo Fitrah	Perda No.35	Saham	44.912.500.000,00	44.912.500.000,00	0,00	44.912.500.000,00	0,00	(38.220.216.515,37)	0,00	6.692.283.484,63
2	2012	PT. Bank Sulut-Go	Perda No.1	Saham	78.176.180.014,00	78.176.180.014,00	0,00	78.176.180.014,00	0,00	0,00	0,00	78.176.180.014,00
Jumlah					123.088.680.014,00	123.088.680.014,00	0,00	123.088.680.014,00	0,00	(38.220.216.515,37)	0,00	84.868.463.498,63

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Badan Kepegawaian Daerah	4.798.300.283,67	154.356.250,00	500.373.037,67	4.452.283.496,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5.979.865.389,23)	8.778.010.752,4	411.870.887,64	2.386.274.475,49
3	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	24.300.335.395,16	2.495.799.292,0	4.348.642.927,08	22.447.491.760,12
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.524.887.789,27	1.885.978.577,16	2.818.776.213,40	5.592.090.153,03
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.458.554.361,07	11.386.983.219,80	7.984.319.467,08	15.861.218.113,79
6	Badan Penghubung	1.434.881.491,01	481.725.000,00	464.394.451,42	1.452.212.039,59
7	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.029.108.968,29	392.401.842,81	1.133.820.001,00	8.287.690.810,10
8	Biro Hukum	507.563.388,41	160.166.000,00	160.921.301,59	506.808.086,82
9	Biro Organisasi	455.802.573,50	129.408.727,00	168.184.988,33	417.026.312,17
10	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3.955.904.215,93	71.425.000,00	477.088.638,33	3.550.240.577,60
11	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	385.117.143,26	54.750.000	180.421.019,80	259.446.123,46
12	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	826.936.306,00	77.400.000	177.334.403,80	727.001.902,20
13	Biro Umum	69.150.089.738,54	5.353.988.757	10.281.222.326,64	64.222.856.169,15
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.888.148.857,77	131.900.000,00	2.241.199.275,42	4.778.849.582,35
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	77.741.854.284,44	13.681.057.231	24.478.411.150,38	66.944.500.365,55
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.951.360.164,59	283.558.152,44	475.990.525,50	4.758.927.791,53
17	Dinas Kesehatan	24.715.938.979,17	19.991.703.014,00	12.854.022.252,63	31.853.619.740,54
18	Dinas Ketahanan Pangan	472.601.772,94	740.730.000,00	285.565.245,70	927.766.527,24
19	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	9.261.141.231,23	99.937.800	2.719.360.528,00	6.641.718.503,23
20	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	14.604.159.523,23	0,00	1.633.930.484,61	12.970.229.038,62

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.900.440.592,09	3.762.739.510	3.963.682.660,28	18.699.497.442,30
22	Dinas Pariwisata	12.833.113.597,48	1.092.293.812	1.799.362.859,81	12.126.044.549,34
23	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.059.379.888.574,22	311.446.936.459	412.110.275.451,73	958.716.549.581,47
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	154.040.686,98	293.500.000,00	293.219.247,73	154.321.439,25
25	Dinas Pemuda dan Olahraga	427.273.208,83	65.188.500	126.091.821,60	366.369.887,23
26	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.507.575.725,17	99.687.000	324.949.249,66	1.282.313.475,51
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	524.269.129.542,00	137.351.948.326,84	128.888.350.465,05	532.732.727.403,79
28	Dinas Perhubungan	23.635.564.055,58	9.874.484.056	7.874.820.941,17	25.635.227.170,37
29	Dinas Pertanian	72.076.686.805,13	13.890.440.336,29	24.205.022.003,46	61.762.105.137,96
30	Dinas Sosial	7.091.815.290,50	429.200.400	836.433.043,43	6.684.582.647,07
31	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	23.619.288.221,29	2.222.559.065,62	2.829.283.070,12	23.012.564.216,79
32	Inspektorat	6.103.865.132,20	735.900.000,0	748.663.106,81	6.091.102.025,39
33	RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	139.596.511.731,05	69.365.467.791,63	40.380.373.118,65	168.581.606.404,03
34	Satuan Polisi Pamong Praja	1.014.385.020,17	75.944.000,00	270.874.404,36	819.454.615,81
35	Sekretariat Daerah	3.446.841.110,90	210.060.213,00	931.913.313,10	2.724.988.010,80
36	Sekretariat DPRD	15.610.736.841,55	4.545.367.580,00	5.280.336.502,47	14.875.767.919,08
	TOTAL	2.176.149.977.213,39	621.812.996.666,83	704.659.500.385,45	2.093.303.473.494,77

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
 DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2023	Mutasi		Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	378.558.233.660,30	5.726.063.187,00	143.192.000,00	384.141.104.847,30
2	Peralatan dan Mesin	810.729.044.002,92	91.344.342.322,00	14.769.947.601,26	887.303.438.723,66
3	Gedung dan bangunan	1.063.163.484.634,85	92.788.217.178,79	76.648.687.379,34	1.079.303.014.434,30
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.931.972.967.759,31	131.269.786.434,96	22.786.723.829,94	2.040.456.030.364,33
5	Aset Tetap Lainnya	92.064.554.210,22	26.274.527.784,00	5.080.824.520,00	113.258.257.474,22
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	57.646.960.635,14	36.814.215.175,86	49.892.854.892,70	44.568.320.918,30
7	Akumulasi Penyusutan	(2.157.985.267.689,35)	237.595.844.584,22	535.337.270.162,21	(2.455.726.693.267,34)

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2024

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	59.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.985.000,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.489.756.315,69	0,00	141.512.950,00	55.794.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.063.715,69
3	Dinas Kesehatan	321.799.850,00	0,00	8.244.558.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.566.358.738,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	53.415.294.954,11	0,00	7.127.830.260,00	8.364.463.735,00	0,00	5.390.059,63	112.419.055,00	47.994.925.584,11	0,00	0,00	20.794.854.250,37
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.261.700.815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.525.459,34	0,00	0,00	0,00	581.175.356,00
6	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	3.852.582.606,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852.582.606,48
7	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	98.423.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.423.700,00	-
8	RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	0,00	0,00	9.027.472.286,38	0,00	0,00	0,00	1.171.034,62	0,00	0,00	0,00	9.026.301.251,76
JUMLAH		57.646.960.635,14	0,00	28.393.956.990,86	8.420.258.185,00	0,00	5.390.059,63	1.794.115.548,96	47.994.925.584,11	0,00	98.423.700,00	44.568.320.918,30

Keterangan :
*) Diisi dengan nama pemerintah daerah

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.231.155.154,65	349.634.542,89	458.498.115,80	7.122.291.581,74
2	Dinas Kesehatan	180.800.183,00	0,00	0,00	180.800.183,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Hasri Ainun Habibiie	2.750.322.222,68	0,00	3.599.200,00	2.746.723.022,68
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.199.590.464,50	511.000.499,57	0,00	4.710.590.964,07
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	(344.833.404,00)	0,00	0,00	(344.833.404,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	410.642.205,00	0,00	0,00	410.642.205,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	255.021.317,00	0,00	0,00	255.021.317,00
8	Dinas Pangan	136.529.950,00	0,00	0,00	136.529.950,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.375.620.292,00	0,00	0,00	2.375.620.292,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	517.865.719,34	0,00	0,00	517.865.719,34
11	Dinas Perhubungan	715.805.687,00	0,00	0,00	715.805.687,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	21.873.866,00	0,00	0,00	21.873.866,00
13	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	604.263.000,74	0,00	0,00	604.263.000,74
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.719.376.416,00	0,00	0,00	1.719.376.416,00
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.596.400,00	0,00	899.100,00	2.697.300,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(43.793.161,00)	0,00	0,00	(43.793.161,00)
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.060.713.051,00	0,00	0,00	6.060.713.051,00
18	Dinas Pariwisata	211.216.416,14	0,00	0,00	211.216.416,14
19	Dinas Pertanian	1.358.440.386,00	0,00	0,00	1.358.440.386,00
20	Pimpinan Setda	(295.252.176,00)	0,00	0,00	(295.252.176,00)

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
21	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	56.089.333,00	0,00	0,00	56.089.333,00
22	Biro Hukum	282.574.192,00	0,00	68.959.908,00	213.614.284,00
23	Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi	1.270.165.533,00	0,00	0,00	1.270.165.533,00
24	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	13.701.484,00	0,00	0,00	13.701.484,00
25	Biro Umum	980.046.908,33	0,00	0,00	980.046.908,33
26	Sekretariat DPRD	470.544.679,00	493.606.000,00	523.185.280,00	440.965.399,00
27	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	797.851.371,00	0,00	0,00	797.851.371,00
28	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	6.848.393.584,00	0,00	4.327.110.600,00	2.521.282.984,00
29	Badan Kepegawaian	251.134.167,00	0,00	9.960.000,00	241.174.167,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.850.000,00	0,00	7.200.000,00	15.650.000,00
31	Badan Penghubung	488.195.865,00	0,00	0,00	488.195.865,00
32	Inspektorat	(92.573.365,00)	0,00	7.000.000,00	(99.573.365,00)
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	299.503.899,00	0,00	0,00	299.503.899,00

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer Dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Saldo Dana Yang Belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
 DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
 PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	65.741.857,00	69.551.601.765,00	69.610.390.010,00	6.953.612,00
2	Utang Bunga	586.757.029,00	496.486.731,00	586.757.029,00	496.486.731,00
3	Utang Pinjaman	1.282.352.668,00	0,00	1.282.352.668,00	-
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	18.346.665.181,00	16.935.383.244,00	18.346.665.181,00	16.935.383.244,00
5	Pendapatan Yang Diterima Dimuka	283.800.000,00	189.200.000,00	283.800.000,00	189.200.000,00
6	Utang Belanja	44.967.825.292,00	56.745.135.147,22	43.813.569.520,73	57.899.390.918,49
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.936.623,00	3.028.740.000,00	0,00	3.033.676.623,00

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	91.733.344.384,00	1.282.352.668,00	16.935.383.244,00	76.080.313.808,00

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	BUMD/ Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19=17x18
1	PT.Gorontalo Fitrah Mandiri	Perda No.35 Tahun 2002	Saham	2.137.668.026,00	10.792.154.020,00	0,00	12.929.822.046,00	4.125.855.602,00	1.126.262.022,00	5.252.117.624,00	44.915.000.000,00	0,00	44.912.500.000,00	0,00	(37.237.295.578,00)	7.677.704.422,00	99,99	7.676.936.651,56
2	PT. Bank Sulut-Go	Perda No.1 Tahun 2012	Saham	4.435.941.526.421,00	637.137.582.536,00	123.294.358.799	5.196.373.467.756,00	16.993.758.950.303,00	2.084.821.060.905,00	19.078.580.011.208,00	1.327.117.600.000,00	26.917.157.260,00	78.176.180.014,00	462.409.758.974,00	224.120.099.570,00	2.040.564.615.804,00	5,89	120.203.022.501,77
Jumlah				4.438.079.194.447	647.929.736.556	123.294.358.799	5.209.303.289.802	16.997.884.805.905	2.085.947.322.927	19.083.832.128.832	1.372.032.600.000	26.917.157.260	123.088.680.014	462.409.758.974	186.882.803.992	2.048.242.320.226	106	127.879.959.153

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	BUMD/ Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan diluar usaha	Beban diluar usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PT.Gorontalo Fitrah Mandiri	Perda No.35 Tahun 2002	Saham	35.000.000,00	322.296.851,00	(287.296.851,00)	0,00	1.500.000,00	(288.796.851,00)
2	PT. Bank Sulut-Go	Perda No.1 Tahun 2012	Saham	1.515.839.390.821,00	1.140.804.604.834,00	375.034.785.987,00	0,00	152.719.345.898,00	222.315.440.089,00
Jumlah				1.515.874.390.821,00	1.141.126.901.685,00	374.747.489.136,00	0,00	152.720.845.898,00	222.026.643.238,00



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI
DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	805.083.259.646,00	783.217.013.220,26	226.424.714.903,00	190.505.107.501,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	494.666.686.847,00	486.057.129.075,00	61.488.971.341,00	61.244.272.933,00	0	0,00	0	0,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	197.479.355.926,00	187.038.920.400,26	85.180.348.914,00	57.769.285.633,97	0	0,00	0	0,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	60.912.579.883,00	59.548.418.879,00	78.523.552.178,00	70.398.668.187,00	0	0,00	0	0,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.888.029.401,00	3.879.062.256,00	570.000.000,00	567.786.348,00	0	0,00	0	0,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN M	22.110.488.042,00	21.610.829.560,00	95.944.000,00	95.894.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	26.026.119.547,00	25.082.653.050,00	565.898.470,00	429.200.400,00	0	0,00	0	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	204.396.730.435,00	201.830.926.793,90	6.350.737.589,00	5.727.724.906,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	15.682.982.743,00	15.370.426.082,00	92.957.500,00	92.750.000,00	0	0,00	0	0,00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.762.752.891,00	7.698.865.852,00	51.364.950,00	50.300.000,00	0	0,00	0	0,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	11.581.719.824,00	11.432.635.911,00	606.300.000,00	604.980.000,00	0	0,00	0	0,00
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	4.196.528.220,00	3.732.786.531,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	27.510.755.174,00	27.337.926.510,00	106.412.124,00	103.738.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.493.499.792,00	8.341.004.734,00	191.462.600,00	190.332.580,00	0	0,00	0	0,00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.301.845.740,00	4.267.119.829,00	28.788.500,00	27.086.240,00	0	0,00	0	0,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	150.970.000,00	149.058.218,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	11.160.625.165,00	11.061.666.074,90	4.596.258.615,00	3.995.190.286,48	0	0,00	0	0,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.870.218.614,00	15.709.117.779,00	100.000.000,00	99.937.800,00	0	0,00	0	0,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	31.200.339.016,00	31.055.710.021,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.830.369.549,00	9.620.115.849,00	99.829.800,00	99.687.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	41.347.771.672,00	41.088.026.786,00	70.000.000,00	65.188.500,00	0	0,00	0	0,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	518.299.850,00	508.655.343,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	122.090.000,00	121.725.605,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.777.101.163,00	4.560.534.884,00	270.322.000,00	266.634.500,00	0	0,00	0	0,00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	9.377.418.322,00	9.279.990.000,00	137.041.500,00	131.900.000,00	0	0,00	0	0,00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	511.442.700,00	495.560.785,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	119.510.844.998,00	116.898.623.654,00	18.994.883.360,00	18.620.613.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	28.199.172.810,00	27.454.485.599,00	10.285.283.790,00	9.997.717.183,00	0	0,00	0	0,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	11.860.997.464,00	11.586.649.725,00	827.658.000,00	823.516.796,00	0	0,00	0	0,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	62.763.035.944,00	61.313.643.741,00	5.791.291.800,00	5.736.646.200,00	0	0,00	0	0,00
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	5.638.879.048,00	5.612.477.743,00	2.090.649.770,00	2.062.733.000,00	0	0,00	0	0,00
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	811.445.500,00	804.820.449,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7.720.000.982,00	7.622.759.003,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.143.053.250,00	2.138.595.744,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	374.260.000,00	365.191.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	218.576.095.363,00	204.832.787.616,00	3.487.799.050,00	3.358.748.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	104.753.669.333,00	98.140.549.718,00	1.227.901.850,00	1.150.347.334,00	0	0,00	0	0,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	113.822.426.030,00	106.692.237.898,00	2.259.897.200,00	2.208.401.580,00	0	0,00	0	0,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	137.890.459.544,00	129.803.635.682,00	1.255.150.500,00	1.186.748.000,00	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	209.604.098.485,00	202.203.513.267,00
5.01	PERENCANAAN	17.103.591.491,00	16.790.479.755,00	416.995.500,00	383.523.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	KEUANGAN	87.912.321.623,00	81.177.081.407,00	415.920.000,00	387.000.000,00	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	209.604.098.485,00	202.203.513.267,00
5.03	KEPEGAWAIAN	10.280.578.222,00	10.186.754.574,00	120.280.000,00	119.200.000,00	0	0,00	0	0,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	12.656.920.419,00	12.325.620.864,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	832.735.184,00	812.245.372,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	9.104.312.605,00	8.511.453.710,00	301.955.000,00	297.025.000,00	0	0,00	0	0,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	22.346.735.324,00	21.964.475.885,00	757.036.000,00	735.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.346.735.324,00	21.964.475.885,00	757.036.000,00	735.900.000,00	0	0,00	0	0,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	97.981.051.272,00	97.634.559.492,00	219.974.000,00	219.395.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	97.981.051.272,00	97.634.559.492,00	219.974.000,00	219.395.900,00	0	0,00	0	0,00
	Jumlah	1.605.785.176.582,00	1.556.182.022.343,16	257.490.295.402,00	220.354.238.401,45	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	209.604.098.485,00	202.203.513.267,00

2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA MANDATORY SPENDING

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING - BIDANG PENDIDIKAN TA 2024

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN			REALISASI		
		JUMLAH (RP)		PERSENTASE (%)	JUMLAH (RP)		PERSENTASE (%)
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:		556.155.658.188,00	91,99%		547.301.402.008,00	98,41%
	1) Belanja Operasi:	494.666.686.847,00		81,82%	486.057.129.075,00		98,26%
	a. belanja pegawai;	374.958.952.632,00		62,02%	367.680.745.697,00		98,06%
	b. belanja barang dan jasa;	119.707.734.215,00		19,80%	118.376.383.378,00		98,89%
	c. belanja hibah;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;	61.488.971.341,00		10,17%	61.244.272.933,00		99,60%
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:		5.047.423.163,00	0,83%		4.827.169.384,00	95,64%
	1) Belanja Operasi:	4.777.101.163,00		0,79%	4.560.534.884,00		95,47%
	a. belanja barang dan jasa;	4.777.101.163,00		0,79%	4.560.534.884,00		95,47%
	b. belanja hibah;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	c. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;	270.322.000,00		0,04%	266.634.500,00		98,64%
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:		2.686.730.539,00	0,44%		2.159.234.834,00	80,37%
	1) Belanja Operasi:	2.549.689.039,00		0,42%	2.027.334.834,00		79,51%
	a. belanja barang dan jasa;	2.549.689.039,00		0,42%	2.027.334.834,00		79,51%
	b. belanja hibah;	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	c. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;	137.041.500,00		0,02%	131.900.000,00		96,25%

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN			REALISASI		
		JUMLAH (RP)		PERSENTASE (%)	JUMLAH (RP)		PERSENTASE (%)
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:		36.382.200.000,00	6,02%		36.165.634.893,00	99,40%
	1) Belanja Operasi:	36.312.200.000,00		6,01%	36.100.446.393,00		99,42%
	a. belanja barang dan jasa;	7.757.200.000,00		1,28%	7.585.446.393,00		97,79%
	b. belanja hibah;	28.555.000.000,00		4,72%	28.515.000.000,00		99,86%
	c. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;	70.000.000,00		0,01%	65.188.500,00		93,13%
	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan						
	e. Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang		4.336.090.000,00	0,72%		4.335.430.000,00	99,98%
	menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:						
	1) Belanja Transfer:	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	Belanja bantuan keuangan	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	Sub kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian						
	2) Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.246.780.000,00		0,70%	4.246.120.000,00		99,98%
	Belanja Beasiswa Masyarakat	4.246.780.000,00		0,70%	4.246.120.000,00		99,98%
	3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN pada Badan Kepegawaian Daerah	89.310.000,00		0,01%	89.310.000,00		100,00%
	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	89.310.000,00		0,01%	89.310.000,00		100,00%
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	604.608.101.890,00			594.788.871.119,00		
3.	Total Belanja Daerah	2.078.376.477.087,00			1.983.441.271.724,61		
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	29,09%			29,99%		

2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA MANDATORY SPENDING

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN MANDATORY SPENDING-BIDANG KESEHATAN TA 2024

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN			REALISASI		
		JUMLAH (RP)		PERSENTASE (%)	JUMLAH (RP)		PERSENTASE (%)
1.	a. Urusan bidang Kesehatan:		282.810.674.840,00	91,47%		244.808.206.034,23	86,56%
	1) Belanja Operasi:	197.630.325.926,00		63,92%	187.038.920.400,26		94,64%
	a. belanja pegawai;	42.994.913.496,00		13,91%	42.137.478.425,00		98,01%
	b. belanja barang dan jasa;	151.785.412.430,00		49,09%	142.051.441.975,26		93,59%
	c. belanja hibah;	2.850.000.000,00		0,92%	2.850.000.000,00		100,00%
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;	85.180.348.914,00		27,55%	57.769.285.633,97		67,82%
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		26.364.722.313,00	8,53%		23.823.984.671,00	90,36%
	1) Belanja Transfer:	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	Belanja bantuan keuangan...	0,00			0,00		0,00%
	2) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Badan Keuangan	26.364.722.313,00		8,53%	23.823.984.671,00		90,36%
	a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	23.186.771.896,00			21.102.928.339,00		
	b. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	794.487.604,00			639.318.432,00		
	c. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.383.462.813,00			2.081.737.900,00		
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	309.175.397.153,00			268.632.190.705,23		
3.	Total Belanja Daerah	2.078.376.477.087,00			1.983.441.271.724,61		
4.	Gaji ASN	461.293.925.150,00			448.637.439.116,00		
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.617.082.551.937,00			1.534.803.832.608,61		
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	19,12			17,50		

2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA MANDATORY SPENDING

ALOKASI ANGGARAN BELANJA INFRASTRUKTUR
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN MANDATORY SPENDING-BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK TA 2024

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD-P	REALISASI
1	Total Belanja Daerah	2.078.376.477.087,00	1.983.441.271.724,61
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		
	a) belanja bagi hasil	206.629.098.485,00	199.603.513.267,00
	b) bantuan keuangan	2.975.000.000,00	2.600.000.000,00
2	Jumlah (a+b)	209.604.098.485,00	202.203.513.267,00
3	Jumlah Dana Trasfer Umum yang diperhitungkan	1.868.772.378.602,00	1.781.237.758.457,61
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	747.508.951.440,80	712.495.103.383,04

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD-P	REALISASI
a	Belanja Modal	257.490.295.402,00	220.354.238.401,45
	1) Tanah	0,00	0,00
	2) Peralatan dan Mesin	75.466.898.227,00	73.194.098.495,00
	3) Bangunan dan Gedung	95.486.591.071,00	68.302.416.338,45
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	78.641.009.156,00	70.394.263.930,00
	5) Aset tetap lainnya	7.895.796.948,00	8.463.459.638,00
	6) Aset lainnya	0,00	0,00
b	Belanja pemeliharaan	25.211.518.796,00	23.676.035.473,53
c	Belanja Hibah	132.481.124.769	132.240.736.851
d	Belanja Bantuan Sosial	11.283.213.000	11.191.847.860
e	Belanja Bantuan Keuangan	2.975.000.000	2.600.000.000
	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	429.441.151.967,00	390.062.858.585,98
	Presentase Belanja Insfrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	22,98%	21,90%

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
A	SPM Bidang Pendidikan			
1	Pendidikan Menengah	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 2. Pengelolaan Pendidikan Khusus 3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	14.962.705.084,00 6.612.940.306,00 27.880.531.342,00	14.104.593.979,00 6.483.535.633,00 28.071.726.263,00
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan			49.456.176.732,00	48.659.855.875,00
B	SPM Bidang Kesehatan			
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	991.895.350,00	971.319.219,00
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	484.229.800,00	468.350.000,00
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan			1.476.125.150,00	1.439.669.219,00
C	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.107.910.700,00	1.006.168.220,00
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	667.695.450,00	632.137.717,00
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			1.775.606.150,00	1.638.305.937,00

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
D	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	97.732.050,00	97.354.780,00
		2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	401.712.350,00	396.711.147,00
		3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	467.556.200,00	466.894.420,00
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			967.000.600,00	960.960.347,00
E	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	189.355.128,00	172.798.365,00
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			189.355.128,00	172.798.365,00
F	SPM Bidang Sosial			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Pant	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	589.668.800,00	370.858.678,00
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Pant	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	1.094.369.700,00	1.087.609.329,00
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Pant	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant	1.282.103.220,00	1.128.066.538,00
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.087.432.140,00	1.210.414.563,00
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Sosial			4.053.573.860,00	3.796.949.108,00



PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUBRINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.924.405.965.518,00	1.930.340.243.696,23	100,31	1.872.487.105.528,68
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	516.532.987.548,00	538.193.288.200,23	104,19	511.931.921.680,68
4.1.01	Pajak Daerah	437.626.291.107,00	457.233.185.366,00	104,48	432.906.096.022,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	126.769.436.557,00	147.267.347.662,00	116,17	133.786.845.075,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.137.042.138,00	1.002.380.383,00	88,16	772.882.645,00
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	1.056.220.915,00	929.546.476,00	88,01	728.661.915,00
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	500.000,00	701.590,00	140,32	0,00
4.1.01.01.01.0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	49.251.271,00	35.508.690,00	72,10	25.658.390,00
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	31.069.952,00	36.623.627,00	117,87	18.562.340,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	6.221.655.605,00	5.599.331.369,00	90,00	5.198.346.759,00
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	6.040.454.943,00	5.402.381.465,00	89,44	5.000.939.009,00
4.1.01.01.02.0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.02.0003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	85.334.350,00	129.546.927,00	151,81	129.646.260,00
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	95.366.312,00	67.402.977,00	70,68	67.761.490,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	33.981.995.374,00	62.750.644.906,00	184,66	57.274.608.061,00
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	32.332.811.650,00	61.604.395.187,00	190,53	56.272.195.017,00
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	251.891.240,00	103.928.695,00	41,26	98.904.560,00
4.1.01.01.03.0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	699.646.241,00	722.204.483,00	103,22	642.671.330,00
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	697.646.243,00	320.116.541,00	45,89	260.837.154,00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	5.541.943,00	120.500,00	2,17	0,00
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	1.483.442,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	1.243.645,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.04.0003	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	1.507.426,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	1.307.430,00	120.500,00	9,22	0,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	304.760.118,00	193.687.527,00	63,55	175.944.880,00
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	191.901.622,00	85.184.789,00	44,39	89.791.245,00
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	31.243.644,00	29.423.850,00	94,18	33.481.730,00
4.1.01.01.05.0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	45.307.426,00	47.768.868,00	105,43	32.402.865,00
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	36.307.426,00	31.310.020,00	86,24	20.269.040,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	26.247.326.683,00	21.536.182.158,00	82,05	19.791.800.937,00
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	25.728.756.564,00	21.076.506.252,00	81,92	19.410.881.345,00
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	134.127.280,00	109.071.482,00	81,32	112.310.534,00
4.1.01.01.06.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	178.417.950,00	256.272.966,00	143,64	176.824.488,00
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	206.024.889,00	94.331.458,00	45,79	91.784.570,00
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	11.491.427.434,00	9.077.543.604,00	78,99	9.359.649.727,00
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	10.189.273.281,00	7.398.048.077,00	72,61	7.889.435.980,00
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	1.207.280.878,00	1.596.618.739,00	132,25	1.385.347.547,00
4.1.01.01.07.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	62.432.135,00	51.167.246,00	81,96	58.733.530,00
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	32.441.140,00	31.709.542,00	97,74	26.132.670,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.562.588.872,00	2.162.817.506,00	60,71	2.419.646.750,00
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	2.931.901.630,00	1.519.670.227,00	51,83	1.755.162.440,00
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	579.605.864,00	606.930.744,00	104,71	621.147.700,00
4.1.01.01.08.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	35.140.255,00	18.890.370,00	53,76	23.415.470,00
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	15.941.123,00	17.326.165,00	108,69	19.921.140,00
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	255.625.717,00	231.688.908,00	90,64	219.402.073,00
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	252.513.235,00	227.830.028,00	90,22	216.904.683,00
4.1.01.01.09.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	500.000,00	354.330,00	70,87	354.330,00
4.1.01.01.09.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	1.966.241,00	2.522.800,00	128,31	1.199.100,00
4.1.01.01.09.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	646.241,00	981.750,00	151,92	943.960,00
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	43.468.541.173,00	44.627.830.856,00	102,67	38.499.815.633,00
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	43.140.454.685,00	44.379.864.259,00	102,87	38.246.035.628,00
4.1.01.01.10.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	500.000,00	0,00	0,00	177.000,00
4.1.01.01.10.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	187.725.225,00	173.431.231,00	92,39	181.242.675,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	139.861.263,00	74.535.366,00	53,29	72.360.330,00
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	90.931.500,00	84.727.945,00	93,18	71.782.860,00
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	79.856.000,00	74.869.745,00	93,76	61.538.210,00
4.1.01.01.11.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	500.000,00	0,00	0,00	82.000,00
4.1.01.01.11.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	8.789.000,00	5.035.850,00	57,30	6.317.050,00
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	1.786.500,00	4.822.350,00	269,93	3.845.600,00
4.1.01.01.14	PKB-Mobil Roda Tiga	2.000.000,00	392.000,00	19,60	2.964.750,00
4.1.01.01.14.0001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	500.000,00	282.000,00	56,40	2.386.500,00
4.1.01.01.14.0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	500.000,00	0,00	0,00	82.000,00
4.1.01.01.14.0003	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat	500.000,00	110.000,00	22,00	496.250,00
4.1.01.01.14.0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	119.439.094.715,00	113.408.639.305,00	94,95	112.032.844.226,00
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	180.279.337,00	369.125.000,00	204,75	113.084.200,00
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	180.279.337,00	369.125.000,00	204,75	113.084.200,00
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	10.090.380.273,00	3.504.468.750,00	34,73	2.960.555.276,00
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	10.090.380.273,00	3.504.468.750,00	34,73	2.960.555.276,00
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	37.301.224.843,00	36.867.068.770,00	98,84	35.319.678.270,00
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	37.301.224.843,00	36.867.068.770,00	98,84	35.319.678.270,00
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	139.353.553,00	215.237.500,00	154,45	158.184.550,00
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	139.353.553,00	215.237.500,00	154,45	158.184.550,00
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	13.073.879.223,00	14.443.585.890,00	110,48	15.781.845.500,00
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	13.073.879.223,00	14.443.585.890,00	110,48	15.781.845.500,00
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	4.687.918.125,00	1.440.413.820,00	30,73	2.155.577.920,00
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	4.687.918.125,00	1.440.413.820,00	30,73	2.155.577.920,00
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1.012.813.299,00	1.293.100.000,00	127,67	3.599.321.840,00
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1.012.813.299,00	1.293.100.000,00	127,67	3.599.321.840,00
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	181.574.180,00	245.375.000,00	135,14	42.750.000,00
4.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	181.574.180,00	245.375.000,00	135,14	42.750.000,00
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	52.293.171.882,00	54.730.987.075,00	104,66	51.478.584.170,00
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	52.293.171.882,00	54.730.987.075,00	104,66	51.478.584.170,00
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	477.500.000,00	297.502.500,00	62,30	418.300.000,00
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	477.500.000,00	297.502.500,00	62,30	418.300.000,00
4.1.01.02.14	BBNKB-Mobil Roda Tiga	500.000,00	1.775.000,00	355,00	4.962.500,00
4.1.01.02.14.0001	BBNKB-Mobil Roda Tiga	500.000,00	1.775.000,00	355,00	4.962.500,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	91.018.442.069,00	100.997.569.265,00	110,96	96.470.314.759,00
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.03	PBBKB-Bahan Bakar Gas	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.03.0001	PBBKB Bahan Bakar Gas	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.04	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	91.016.942.069,00	100.997.569.265,00	110,97	96.470.314.759,00
4.1.01.03.04.0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	91.016.942.069,00	100.997.569.265,00	110,97	96.470.314.759,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	223.492.231,00	224.487.221,00	100,45	149.942.801,00
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	223.492.231,00	224.487.221,00	100,45	149.942.801,00
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	223.492.231,00	224.487.221,00	100,45	149.942.801,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	100.175.825.535,00	95.335.141.913,00	95,17	90.466.149.161,00
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	100.175.825.535,00	95.335.141.913,00	95,17	90.466.149.161,00
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	100.175.825.535,00	95.335.141.913,00	95,17	90.466.149.161,00
4.1.02	Retribusi Daerah	49.085.884.000,00	54.310.658.591,00	110,64	4.232.976.524,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	46.148.924.000,00	52.950.824.152,00	114,74	2.564.050.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	46.098.924.000,00	51.142.155.344,00	110,94	674.702.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	45.498.924.000,00	50.401.807.344,00	110,78	0,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	600.000.000,00	740.348.000,00	123,39	674.702.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	50.000.000,00	1.808.668.808,00	3.617,34	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	50.000.000,00	1.808.668.808,00	3.617,34	0,00
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	1.889.348.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.02.01.12.0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0,00	0,00	0,00	1.889.348.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.936.960.000,00	1.359.834.439,00	46,30	1.668.926.524,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	920.000.000,00	515.012.063,00	55,98	509.593.374,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	20.000.000,00	51.163.063,00	255,82	32.450.874,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	600.000.000,00	463.849.000,00	77,31	477.142.500,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	616.960.000,00	343.091.350,00	55,61	400.147.150,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	616.960.000,00	343.091.350,00	55,61	400.147.150,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	950.000.000,00	283.967.000,00	29,89	759.186.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	150.000.000,00	61.595.000,00	41,06	308.594.000,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	300.000.000,00	105.252.000,00	35,08	380.332.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	500.000.000,00	117.120.000,00	23,42	70.260.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	57.000.000,00	31.811.350,00	55,81	0,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	57.000.000,00	31.811.350,00	55,81	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	393.000.000,00	185.952.676,00	47,32	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	393.000.000,00	185.952.676,00	47,32	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.219.035.031,00	11.580.368.337,00	113,32	11.012.325.878,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	10.219.035.031,00	11.580.368.337,00	113,32	11.012.325.878,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	10.219.035.031,00	11.580.368.337,00	113,32	11.012.325.878,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	10.219.035.031,00	11.580.368.337,00	113,32	11.012.325.878,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.601.777.410,00	15.069.075.906,23	76,88	63.780.523.256,68
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	787.067.000,00	0,00	0,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	787.067.000,00	0,00	0,00
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	787.067.000,00	0,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	499.250.044,00	249,63	370.421.084,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	50.000.000,00	336.014.300,00	672,03	370.421.084,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	50.000.000,00	336.014.300,00	672,03	370.421.084,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	150.000.000,00	163.235.744,00	108,82	0,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	150.000.000,00	163.235.744,00	108,82	0,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	2.012.548.943,00
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	2.012.548.943,00
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	2.012.548.943,00
4.1.04.05	Jasa Giro	6.750.000.000,00	1.762.371.257,00	26,11	2.969.255.235,20
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	1.762.181.971,00	35,24	2.967.321.910,20
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	1.762.181.971,00	35,24	2.967.321.910,20
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.650.000.000,00	189.286,00	0,01	1.933.325,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.650.000.000,00	189.286,00	0,01	1.933.325,00
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.077.777.410,00	3.504.794.630,00	69,02	5.794.880.704,80
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.077.777.410,00	3.504.794.630,00	69,02	5.794.880.704,80
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.077.777.410,00	3.504.794.630,00	69,02	5.794.880.704,80
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.000.000.000,00	3.497.486.209,23	349,75	4.429.427.948,68
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000,00	3.497.486.209,23	699,50	4.419.427.948,68
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000,00	3.497.486.209,23	699,50	4.419.427.948,68
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000,00	0,00	0,00	77.976.269,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000,00	0,00	0,00	77.976.269,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000,00	0,00	0,00	77.976.269,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.464.000.000,00	5.018.106.766,00	203,66	1.488.643.469,00
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.788.000.000,00	4.687.598.356,00	262,17	1.255.561.869,00
4.1.04.12.01.0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	10.000.000,00	21.695.100,00	216,95	7.738.520,00
4.1.04.12.01.0016	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0017	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	5.000.000,00	404.460,00	8,09	14.240,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.04.12.01.0018	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	4.500.000,00	0,00	0,00	134.780,00
4.1.04.12.01.0019	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	70.000.000,00	162.675.440,00	232,39	40.751.163,00
4.1.04.12.01.0020	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0021	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	500.000,00	1.059.560,00	211,91	804.520,00
4.1.04.12.01.0022	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	5.000.000,00	62.160,00	1,24	0,00
4.1.04.12.01.0023	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	300.000.000,00	1.835.186.719,00	611,73	504.161.351,00
4.1.04.12.01.0024	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	75.000.000,00	615.080,00	0,82	753.790,00
4.1.04.12.01.0025	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	50.000.000,00	1.938.430,00	3,88	13.020,00
4.1.04.12.01.0026	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	75.000.000,00	96.810,00	0,13	3.550.420,00
4.1.04.12.01.0027	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	20.000.000,00	0,00	0,00	1.031.180,00
4.1.04.12.01.0028	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	10.000.000,00	0,00	0,00	445.330,00
4.1.04.12.01.0029	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0030	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0031	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	20.000.000,00	5.012.200,00	25,06	291.094,00
4.1.04.12.01.0032	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	10.000.000,00	1.037.290,00	10,37	196.280,00
4.1.04.12.01.0033	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	10.000.000,00	2.065.310,00	20,65	231.110,00
4.1.04.12.01.0034	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	10.000.000,00	68.630,00	0,69	184.920,00
4.1.04.12.01.0035	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	150.000.000,00	698.308.465,00	465,54	193.834.884,00
4.1.04.12.01.0036	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	50.000.000,00	807.810,00	1,62	151.820,00
4.1.04.12.01.0037	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	50.000.000,00	244.700,00	0,49	0,00
4.1.04.12.01.0038	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	50.000.000,00	24.410,00	0,05	2.910.860,00
4.1.04.12.01.0039	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	82.500.000,00	330.940.340,00	401,14	94.185.330,00
4.1.04.12.01.0040	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	70.000.000,00	32.976.680,00	47,11	12.099.860,00
4.1.04.12.01.0041	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	50.000.000,00	1.314.670,00	2,63	0,00
4.1.04.12.01.0042	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	50.000.000,00	336.890,00	0,67	2.451.340,00
4.1.04.12.01.0043	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	0,00	0,00	0,00	16.343.560,00
4.1.04.12.01.0044	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	7.500.000,00	49.037.700,00	653,84	1.523.030,00
4.1.04.12.01.0045	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	7.500.000,00	818.830,00	10,92	2.921.260,00
4.1.04.12.01.0046	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	7.500.000,00	0,00	0,00	9.567.514,00
4.1.04.12.01.0047	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	2.000.000,00	3.497.390,00	174,87	1.550.634,00
4.1.04.12.01.0048	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	1.000.000,00	7.090,00	0,71	0,00
4.1.04.12.01.0049	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	1.000.000,00	0,00	0,00	14.322,00
4.1.04.12.01.0050	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0051	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	350.000.000,00	1.532.859.332,00	437,96	354.302.172,00
4.1.04.12.01.0052	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0053	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	50.000.000,00	572.150,00	1,14	77.390,00
4.1.04.12.01.0054	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	50.000.000,00	314.750,00	0,63	2.128.715,00
4.1.04.12.01.0055	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	500.000,00	3.374.460,00	674,89	1.148.110,00
4.1.04.12.01.0056	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0057	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	500.000,00	245.500,00	49,10	0,00
4.1.04.12.01.0058	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	500.000,00	0,00	0,00	35.710,00
4.1.04.12.01.0067	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	150.000,00	0,00	0,00	13.640,00
4.1.04.12.01.0068	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0069	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0070	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	676.000.000,00	330.508.410,00	48,89	233.081.600,00
4.1.04.12.02.0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	15.000.000,00	1.120.000,00	7,47	8.320.000,00
4.1.04.12.02.0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	15.000.000,00	14.250.000,00	95,00	2.969.690,00
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	300.000.000,00	83.346.420,00	27,78	78.223.840,00
4.1.04.12.02.0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.02.0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	5.000.000,00	0,00	0,00	43.460,00
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	10.000.000,00	25.442.620,00	254,43	6.736.400,00
4.1.04.12.02.0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	10.000.000,00	2.298.500,00	22,99	7.570.770,00
4.1.04.12.02.0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.000.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
4.1.04.12.02.0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	500.000,00	0,00	0,00	280.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	300.000.000,00	200.041.370,00	66,68	118.830.440,00
4.1.04.12.02.0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	10.000.000,00	3.965.500,00	39,66	436.000,00
4.1.04.12.02.0014	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga	500.000,00	44.000,00	8,80	171.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.01.0019	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	4.058.000.000,00	0,00	0,00	944.311.869,00
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	908.094.369,00
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	908.094.369,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	40.000.000,00	0,00	0,00	36.217.500,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.127.000,00
4.1.04.15.04.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Tetap	5.000.000,00	0,00	0,00	19.690.500,00
4.1.04.15.04.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00
4.1.04.15.04.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.04.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.000.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.018.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	900.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PPPK	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PPPK	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	45.693.057.734,00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	45.693.057.734,00
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	45.693.057.734,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	516.532.987.548,00	538.193.288.200,23	104,19	511.931.921.680,68
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.406.269.839.970,00	1.385.451.449.664,00	98,52	1.350.262.842.740,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.406.269.839.970,00	1.385.451.449.664,00	98,52	1.350.262.842.740,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	30.445.345.000,00
4.2.01.02.01	DID	0,00	0,00	0,00	30.445.345.000,00
4.2.01.02.01.0001	DID	0,00	0,00	0,00	30.445.345.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.398.586.957.970,00	1.377.768.567.664,00	98,51	1.319.817.497.740,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	20.476.158.970,00	24.972.779.787,00	121,96	23.449.484.007,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.399.651.000,00	2.199.263.000,00	157,13	1.415.510.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	15.086.001.000,00	17.451.897.587,00	115,68	17.340.769.687,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	607.113.200,00	0,00	1.223.017.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	577.000,00	14.000,00	2,43	33.320,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	153.997.000,00	221.033.000,00	143,53	110.448.800,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	90.367.200,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	31.136.000,00	412.643.000,00	1.325,29	2.221.632.000,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	1.755.988.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	2.048.808.970,00	2.324.828.000,00	113,47	1.047.706.000,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	0,00	1.755.988.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.022.379.872.000,00	1.022.379.872.000,00	100,00	979.869.891.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	850.100.923.000,00	850.163.916.967,00	100,01	979.869.891.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	519.984.000,00	456.990.033,00	87,89	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	126.049.532.000,00	126.049.532.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	21.570.965.000,00	21.570.965.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	24.138.468.000,00	24.138.468.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	167.802.393.000,00	144.159.157.866,00	85,91	140.281.348.223,00
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	10.318.839.000,00	9.540.285.092,00	92,46	24.106.664.789,00
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	22.967.767.000,00	21.135.607.043,00	92,02	27.773.480.808,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	304.858.000,00
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	76.268.133.000,00	60.534.414.321,00	79,37	0,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.706.764.000,00	3.674.786.681,00	99,14	7.937.823.936,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	10.079.501.000,00	9.990.177.697,00	99,11	10.014.699.871,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	29.037.850.000,00	28.923.698.630,00	99,61	50.788.646.900,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	15.423.539.000,00	10.360.188.402,00	67,17	19.355.173.919,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	187.928.534.000,00	186.256.758.011,00	99,11	176.216.774.510,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	81.590.190.000,00	80.991.487.346,00	99,27	82.008.413.462,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.672.500.000,00	2.672.500.000,00	100,00	3.398.750.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	91.603.199.000,00	91.603.199.000,00	100,00	79.378.947.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.245.424.000,00	2.245.424.000,00	100,00	2.655.976.234,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	154.757.000,00	154.756.456,00	100,00	164.573.000,00
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.800.000.000,00	1.636.583.074,00	90,92	1.691.013.608,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.503.067.000,00	2.639.542.773,00	75,35	3.748.440.665,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.675.525.000,00	2.650.714.065,00	99,07	1.984.249.995,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.683.872.000,00	1.662.551.297,00	98,73	894.694.204,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	291.716.342,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.398.586.957.970,00	1.377.768.567.664,00	98,51	1.319.817.497.740,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.682.882.000,00	7.682.882.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	7.682.882.000,00	7.682.882.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	7.682.882.000,00	7.682.882.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.682.882.000,00	7.682.882.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.406.269.839.970,00	1.385.451.449.664,00	98,52	1.350.262.842.740,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.603.138.000,00	6.695.505.832,00	417,65	10.292.341.108,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.103.138.000,00	6.231.945.832,00	564,93	9.707.761.108,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.103.138.000,00	6.231.945.832,00	564,93	7.552.741.108,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.103.138.000,00	6.231.945.832,00	564,93	7.552.741.108,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.103.138.000,00	6.231.945.832,00	564,93	7.552.741.108,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00	2.155.020.000,00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00	2.155.020.000,00
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00	2.155.020.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000,00	463.560.000,00	92,71	584.580.000,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	500.000.000,00	463.560.000,00	92,71	584.580.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	500.000.000,00	463.560.000,00	92,71	584.580.000,00
4.3.03.01.02.0001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00
4.3.03.01.02.0003	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN	500.000.000,00	463.560.000,00	92,71	419.580.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.603.138.000,00	6.695.505.832,00	417,65	10.292.341.108,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.924.405.965.518,00	1.930.340.243.696,23	100,31	1.872.487.105.528,68
5	BELANJA DAERAH	2.078.376.477.087,00	1.983.441.271.724,61	95,43	1.900.595.987.883,66
5.1	BELANJA OPERASI	1.605.785.176.582,00	1.556.182.022.343,16	96,91	1.475.863.473.693,15
5.1.01	Belanja Pegawai	782.146.327.136,00	764.595.004.643,00	97,76	657.826.026.577,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	461.293.925.150,00	448.637.439.116,00	97,26	388.757.960.090,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	349.242.403.138,80	343.212.541.132,00	98,27	294.289.056.838,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	289.272.074.898,80	284.740.157.732,00	98,43	268.641.020.338,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	59.970.328.240,00	58.472.383.400,00	97,50	25.648.036.500,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	32.378.995.544,00	31.022.665.736,00	95,81	26.945.903.591,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	27.231.508.981,00	26.451.146.630,00	97,13	24.965.852.037,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.147.486.563,00	4.571.519.106,00	88,81	1.980.051.554,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.907.376.218,00	5.600.987.548,00	94,81	6.202.845.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.907.376.218,00	5.600.987.548,00	94,81	6.202.845.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	19.318.948.306,00	18.643.035.000,00	96,50	20.229.866.234,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.866.446.538,00	18.209.875.000,00	96,52	18.539.316.234,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	452.501.768,00	433.160.000,00	95,73	1.690.550.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.659.714.763,00	8.003.410.000,00	92,42	4.965.632.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.129.217.237,00	4.858.040.000,00	94,71	4.965.632.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.530.497.526,00	3.145.370.000,00	89,09	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	18.790.660.864,00	17.850.878.220,00	95,00	16.593.160.260,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.171.063.904,00	14.621.235.900,00	96,38	15.078.858.060,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.619.596.960,00	3.229.642.320,00	89,23	1.514.302.200,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	614.048.678,34	474.755.365,00	77,32	684.728.945,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	614.048.678,34	474.755.365,00	77,32	684.728.945,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.055.324,86	5.181.444,00	30,38	4.209.625,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.518.187,86	3.973.799,00	25,61	3.883.591,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.537.137,00	1.207.645,00	78,56	326.034,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	23.186.771.896,00	21.102.928.339,00	91,01	16.473.841.792,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	21.436.198.688,00	19.369.524.480,00	90,36	16.473.841.792,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.750.573.208,00	1.733.403.859,00	99,02	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	794.487.604,00	639.318.432,00	80,47	592.178.643,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	693.885.541,00	539.194.068,00	77,71	592.178.643,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	100.602.063,00	100.124.364,00	99,53	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.383.462.813,00	2.081.737.900,00	87,34	1.776.537.162,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.062.656.623,00	1.781.377.454,00	86,36	1.776.537.162,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	320.806.190,00	300.360.446,00	93,63	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	159.939.804.931,00	158.731.757.293,00	99,24	146.902.233.296,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	39.577.520.478,00	39.340.394.217,00	99,40	37.396.699.438,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	39.577.520.478,00	39.340.394.217,00	99,40	37.396.699.438,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.378.769.329,15	4.133.818.341,00	94,41	3.677.000.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.378.769.329,15	4.133.818.341,00	94,41	3.677.000.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	90.187.120,00	80.970.672,00	89,78	75.187.120,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	90.187.120,00	80.970.672,00	89,78	75.187.120,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	115.893.328.003,85	115.176.574.063,00	99,38	105.753.346.738,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	109.666.488.006,85	109.374.495.963,00	99,73	103.532.537.338,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	6.226.839.997,00	5.802.078.100,00	93,18	2.220.809.400,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	133.211.726.521,00	130.082.006.039,00	97,65	94.840.001.766,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	8.944.405.600,00	8.112.119.283,00	90,69	7.763.473.466,00
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	3.245.300.329,00	3.241.839.706,00	99,89	3.107.292.484,00
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.062.784.686,00	2.957.364.630,00	96,56	2.653.082.512,00
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.629.615.818,00	1.912.914.947,00	72,75	2.003.098.470,00
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	6.704.767,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	113.279.423.819,00	113.271.188.688,00	99,99	78.327.156.400,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	113.279.423.819,00	113.271.188.688,00	99,99	78.327.156.400,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	165.517.500,00	165.517.500,00	100,00	114.971.900,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	165.517.500,00	165.517.500,00	100,00	114.971.900,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.546.850.234,00	1.714.250.000,00	67,31	2.494.650.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.546.850.234,00	1.714.250.000,00	67,31	2.494.650.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	367.000.000,00	357.291.200,00	97,35	0,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	367.000.000,00	357.291.200,00	97,35	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.118.529.368,00	4.730.639.368,00	92,42	4.408.000.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.093.529.368,00	4.707.279.368,00	92,42	4.408.000.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	25.000.000,00	23.360.000,00	93,44	0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	2.790.000.000,00	1.731.000.000,00	62,04	1.731.750.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.790.000.000,00	1.731.000.000,00	62,04	1.731.750.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.056.244.168,00	25.865.922.867,00	99,27	25.732.222.449,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	2.024.250.000,00	2.024.250.000,00	100,00	1.432.050.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	2.024.250.000,00	2.024.250.000,00	100,00	1.432.050.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	254.958.000,00	242.414.000,00	95,08	96.284.004,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	254.958.000,00	242.414.000,00	95,08	96.284.004,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	210.512.919,00	155.558.160,00	73,89	94.146.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	210.512.919,00	155.558.160,00	73,89	94.146.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	143.430.000,00	122.250.000,00	85,23	122.715.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	143.430.000,00	122.250.000,00	85,23	122.715.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.310.241.500,00	2.303.899.000,00	99,73	2.079.735.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.310.241.500,00	2.303.899.000,00	99,73	2.079.735.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.860.000.000,00	4.842.000.000,00	99,63	4.851.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.860.000.000,00	4.842.000.000,00	99,63	4.851.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	810.000.000,00	810.000.000,00	100,00	1.215.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	810.000.000,00	810.000.000,00	100,00	1.215.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	300.243.412,00	279.969.562,00	93,25	164.000.004,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	300.243.412,00	279.969.562,00	93,25	164.000.004,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	2.062.477,00	39.545,00	1,92	289.444.081,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	2.062.477,00	39.545,00	1,92	289.444.081,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.760.545.860,00	7.705.542.600,00	99,29	7.707.848.360,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	153.979.980,00	123.942.600,00	80,49	123.648.360,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.629.340,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.536.540,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	7.598.400.000,00	7.581.600.000,00	99,78	7.584.200.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.380.000.000,00	7.380.000.000,00	100,00	7.680.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.380.000.000,00	7.380.000.000,00	100,00	7.680.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	193.026.366,00	0,00	0,00	285.033.240,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.576.806,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.576.806,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.999.994,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.999.994,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	89.556.866,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	89.556.866,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.039.234,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.039.234,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	25.191,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	25.191,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.965.347,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.965.347,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	181.464,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	181.464,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	181.464,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	181.464,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	285.033.240,00
5.1.01.05.10.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	95.011.080,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.05.10.0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	95.011.080,00
5.1.01.05.10.0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	95.011.080,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.451.600.000,00	1.277.879.328,00	88,03	1.308.575.736,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	168.000.000,00	83,33	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	168.000.000,00	83,33	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.250.000.000,00	1.109.879.328,00	88,79	1.106.975.736,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.250.000.000,00	1.109.879.328,00	88,79	1.106.975.736,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	673.525.499.630,00	641.715.150.644,16	95,28	700.268.455.177,15
5.1.02.01	Belanja Barang	136.019.787.123,00	129.372.276.614,00	95,11	165.873.917.204,02
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	135.976.783.723,00	129.333.871.498,00	95,11	165.856.595.969,02
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.518.516.063,00	1.300.855.876,00	85,67	1.521.352.507,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	821.591.250,00	813.404.968,00	99,00	1.007.599.077,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.086.621.557,00	11.904.007.005,00	90,96	13.086.194.653,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	30.705.400,00	30.560.600,00	99,53	188.747.300,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.583.373.800,00	4.528.259.951,00	98,80	3.749.240.022,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	104.415.000,00	101.680.480,00	97,38	85.546.850,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	76.911.471,00	71.531.177,00	93,00	33.733.200,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	214.500.000,00	214.100.000,00	99,81	213.302.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.593.408.722,00	1.415.441.790,00	88,83	1.675.712.181,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	849.026.725,00	798.540.333,00	94,05	1.109.117.280,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	772.052.917,00	770.199.323,00	99,76	387.198.986,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	745.720,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	292.562.500,00	291.870.000,00	99,76	450.557.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	7.721.000,00	7.700.000,00	99,73	9.243.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	10.000.000,00	9.899.350,00	98,99	13.800.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.256.762.030,00	2.192.604.345,00	97,16	2.690.612.308,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.497.827.329,00	1.390.145.695,00	92,81	1.720.047.379,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.156.862.015,00	3.849.193.341,00	92,60	5.888.185.316,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	799.428.709,00	768.307.005,00	96,11	869.760.050,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	25.187.800,00	20.496.749,00	81,38	59.403.794,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.700.853.863,00	1.617.394.834,00	95,09	1.761.385.528,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	683.026.904,00	636.501.575,00	93,19	715.160.246,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	883.565.820,00	789.138.345,00	89,31	1.000.736.935,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	78.857.500,00	78.054.827,00	98,98	613.658.852,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	314.427.400,00	314.197.700,00	99,93	381.205.900,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.516.485.826,00	1.225.978.571,00	80,84	1.218.780.274,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	827.976.643,00	793.709.580,00	95,86	913.744.422,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	81.460.200,00	73.212.898,00	89,88	1.589.506.718,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.587.943.868,00	2.518.985.712,00	97,34	932.085.865,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	40.884.717.950,00	40.278.389.710,00	98,52	50.227.515.668,02
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	7.294.929.609,00	6.109.501.650,00	83,75	19.739.281.903,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.916.250,00	1.907.200,00	99,53	0,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.570.156.300,00	1.533.182.200,00	97,65	1.919.465.951,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	4.696.800,00	4.695.900,00	99,98	80.122.439,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.216.670.202,00	10.830.723.588,00	96,56	9.775.127.074,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.783.097.691,00	6.407.505.021,00	94,46	7.366.694.725,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	2.324.910.000,00	2.324.649.310,00	99,99	3.359.688.095,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	950.018.176,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	490.870.000,00	242.532.199,00	49,41	271.449.426,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.958.059.000,00	19.095.639.373,00	95,68	24.886.833.892,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	21.200.000,00	19.960.000,00	94,15	31.800.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.123.550.000,00	1.112.580.000,00	99,02	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	23.320.000,00	23.100.000,00	99,06	302.100.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	53.000.000,00	52.800.000,00	99,62	37.050.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	620.300.014,00	589.011.000,00	94,96	442.225.145,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	111.450.000,00	110.244.000,00	98,92	478.634.080,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	35.200.000,00	34.800.000,00	98,86	205.589.210,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	85.500.000,00	85.500.000,00	100,00	45.881.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	0,00	0,00	0,00	91.250.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	5.000.000,00	4.675.000,00	93,50	98.899.834,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	5.500.000,00	5.450.000,00	99,09	3.800.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	817.600.000,00	806.119.800,00	98,60	883.382.158,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	237.500.000,00	237.233.900,00	99,89	30.400.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	754.821.875,00	751.182.617,00	99,52	541.569.700,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	180.000.000,00	146.517.000,00	81,40	202.199.850,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	43.003.400,00	38.405.116,00	89,31	17.321.235,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	37.300.000,00	36.081.116,00	96,73	17.321.235,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	5.703.400,00	2.324.000,00	40,75	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	246.806.235.080,00	233.533.064.217,00	94,62	243.904.651.856,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	156.453.480.256,00	146.329.977.411,00	93,53	166.169.570.682,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.799.119.970,00	7.891.952.250,00	89,69	10.547.715.150,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.377.860.000,00	1.934.167.000,00	81,34	2.214.370.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	311.000.000,00	243.200.000,00	78,20	276.770.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	567.200.000,00	536.750.000,00	94,63	953.600.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	12.000.000,00	6.980.000,00	58,17	6.600.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	17.352.762,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	630.000.000,00	605.600.000,00	96,13	603.700.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	21.309.000.000,00	20.751.140.859,00	97,38	33.208.103.418,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	14.102.580.000,00	12.525.353.804,00	88,82	12.866.925.588,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	92.568.000,00	92.471.697,00	99,90	379.450.963,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.992.260.000,00	1.815.655.000,00	91,14	1.732.998.500,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.645.600.000,00	3.558.230.000,00	97,60	3.597.040.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	369.600.000,00	363.200.000,00	98,27	271.500.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.547.625.750,00	1.497.825.000,00	96,78	1.293.390.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	4.794.476.000,00	4.707.781.300,00	98,19	5.100.812.900,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	80.000.000,00	79.910.000,00	99,89	71.970.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	29.800.000,00	29.500.000,00	98,99	37.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.987.862.000,00	8.189.753.340,00	91,12	8.531.702.832,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.342.890.000,00	1.320.195.000,00	98,31	1.434.870.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	37.923.518.000,00	35.995.973.547,00	94,92	35.052.075.025,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.279.693.000,00	6.740.457.401,00	92,59	7.068.490.350,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.550.804.000,00	8.511.165.036,00	99,54	8.105.265.646,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.218.779.000,00	6.125.524.216,00	98,50	5.398.458.528,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	83.424.000,00	83.424.000,00	100,00	104.280.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	348.400.000,00	343.712.478,00	98,65	322.839.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	43.200.000,00	43.200.000,00	100,00	45.600.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	150.000.000,00	148.300.000,00	98,87	11.999.215,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	147.287.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	357.700.000,00	329.950.000,00	92,24	195.444.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	29.750.000,00	24.480.000,00	82,29	34.500.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	26.600.000,00	25.000.000,00	93,98	133.680.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	273.356.715,00	214.046.200,00	78,30	133.755.682,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	177.917.559,00	176.521.682,00	99,22	389.334.879,00
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	309.725.000,00	307.660.201,00	99,33	592.039.380,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	915.206.500,00	913.468.850,00	99,81	3.541.382.081,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	81.908.000,00	81.908.000,00	100,00	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	24.205.900,00	23.476.900,00	96,99	32.422.775,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	4.300.000,00	4.000.000,00	93,02	51.946.480,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	12.800.000,00	11.212.000,00	87,59	88.586.150,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	152.578.278,00	152.574.894,00	100,00	216.047.994,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.798.882.000,00	3.680.540.665,00	96,88	4.908.832.684,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	366.812.964,00	253.424.044,00	69,09	291.537.121,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.331.386.117,00	1.008.247.841,00	75,73	1.369.463.984,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	12.801.053.249,00	11.400.830.040,00	89,06	10.996.139.905,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	72.100.000,00	57.370.000,00	79,57	111.129.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.686.054.185,00	2.609.557.174,00	97,15	2.824.346.652,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	90.480.000,00	72.244.990,00	79,85	119.773.095,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	32.299.689,00	32.271.000,00	99,91	0,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	46.285.000,00	46.091.605,00	99,58	64.568.525,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	892.569.380,00	587.454.397,00	65,82	616.101.671,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	3.574.200,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	325.000.000,00	129.225.000,00	39,76	0,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	2.597.547,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	61.102.901.992,00	59.906.700.044,00	98,04	48.362.209.709,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	18.625.112.000,00	18.575.640.800,00	99,73	14.382.128.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	37.733.150.000,00	36.911.322.407,00	97,82	28.884.042.593,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.244.976.000,00	3.179.290.693,00	97,98	2.310.726.407,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	32.400.000,00	2.470.020,00	7,62	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	384.827.968,00	343.855.686,00	89,35	378.791.576,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	356.836.024,00	335.085.453,00	93,90	338.728.389,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	415.600.000,00	408.519.199,00	98,30	488.086.569,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	310.000.000,00	150.515.786,00	48,55	1.579.706.175,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	283.920.000,00	272.240.000,00	95,89	576.826.666,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	252.420.000,00	252.340.000,00	99,97	548.326.666,00
5.1.02.02.03.0005	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	8.500.000,00	6.000.000,00	70,59	0,00
5.1.02.02.03.0014	Belanja Sewa Tanah Pertanian	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	23.000.000,00	13.900.000,00	60,43	0,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.864.417.001,00	16.073.935.593,00	95,31	12.603.443.130,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	75.246.572,00
5.1.02.02.04.0031	Belanja Sewa Peralatan Selam	850.000,00	850.000,00	100,00	1.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00	64.150.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.587.972.001,00	3.120.732.120,00	86,98	2.308.736.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.000.000,00	4.750.000,00	95,00	33.700.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	20.000.000,00	4.000.000,00	20,00	8.000.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.231.100.000,00	1.230.556.000,00	99,96	1.380.901.158,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	4.000.000,00	3.500.000,00	87,50	8.360.000,00
5.1.02.02.04.0057	Belanja Sewa Kapal Terbang	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	100,00	6.003.309.900,00
5.1.02.02.04.0062	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00	0,00	12.190.000,00
5.1.02.02.04.0116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.400.000,00	2.000.000,00	83,33	1.750.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.454.345.000,00	2.198.922.973,00	89,59	2.391.994.500,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	15.000.000,00	13.500.000,00	90,00	17.625.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	60.000.000,00	44.500.000,00	74,17	8.500.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	500.000,00
5.1.02.02.04.0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	155.000.000,00	132.904.500,00	85,74	97.350.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	42.000.000,00	36.870.000,00	87,79	45.730.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	69.500.000,00	66.000.000,00	94,96	9.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	58.750.000,00	56.350.000,00	95,91	64.400.000,00
5.1.02.02.04.0459	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	67.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.197.890.000,00	2.068.547.200,00	94,12	2.363.614.701,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	787.650.000,00	785.112.000,00	99,68	640.562.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	35.100.000,00	35.000.000,00	99,72	32.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	210.750.000,00	203.610.000,00	96,61	287.125.451,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	65.000.000,00	60.000.000,00	92,31	0,00
5.1.02.02.05.0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	283.090.000,00	221.024.400,00	78,08	436.165.400,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	7.000.000,00	6.000.000,00	85,71	60.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	461.300.000,00	417.850.800,00	90,58	310.138.850,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	348.000.000,00	339.950.000,00	97,69	0,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	597.123.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00	10.000.000,00
5.1.02.02.06.0103	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.02.06.0130	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	312.500.000,00
5.1.02.02.07.0017	Belanja Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	12.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.137.886.571,00	6.421.612.909,00	89,97	9.150.531.249,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	100.000.000,00	99.790.000,00	99,79	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	938.798.206,00	863.249.227,00	91,95	871.408.760,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	627.500.000,00	626.873.980,00	99,90	1.412.258.775,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	300.000.000,00	299.695.000,00	99,90	949.134.410,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.729.000.000,00	2.452.764.140,00	89,88	3.730.590.590,00
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	0,00	0,00	0,00	98.423.700,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	800.000.000,00	758.629.500,00	94,83	434.968.485,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	15.000.000,00	14.957.250,00	99,72	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	466.600.865,00	165.394.000,00	35,45	427.945.200,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	243.987.500,00	239.509.192,00	98,16	397.013.815,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	887.000.000,00	870.800.620,00	98,17	377.839.387,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	30.000.000,00	29.950.000,00	99,83	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	36.934.500,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	188.322.600,00
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	0,00	0,00	0,00	225.691.027,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	660.000.000,00	638.973.440,00	96,81	2.001.586.170,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	185.000.000,00	184.722.000,00	99,85	470.238.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	150.000.000,00	129.870.000,00	86,58	0,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	155.000.000,00	154.987.000,00	99,99	816.674.000,00
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	0,00	0,00	499.726.850,00
5.1.02.02.09.0017	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95	114.947.320,00
5.1.02.02.09.0018	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataa-an	10.000.000,00	9.500.000,00	95,00	100.000.000,00
5.1.02.02.09.0022	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataa-an	60.000.000,00	59.944.440,00	99,91	0,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	295.038.000,00	286.929.534,00	97,25	183.831.997,00
5.1.02.02.10.0003	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	75.235.800,00	75.019.350,00	99,71	67.632.300,00
5.1.02.02.10.0006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	23.643.000,00	15.762.000,00	66,67	13.791.750,00
5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	196.159.200,00	196.148.184,00	99,99	102.407.947,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	143.310.000,00	128.510.000,00	89,67	189.292.516,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	56.000.000,00	41.200.000,00	73,57	50.482.516,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	57.310.000,00	57.310.000,00	100,00	63.810.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	75.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.325.660.660,00	1.085.406.550,00	81,88	1.797.062.131,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	43.320.000,00	36.300.000,00	83,80	96.321.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.250.697.660,00	1.049.106.550,00	83,88	1.564.636.131,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	31.643.000,00	0,00	0,00	136.105.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	7.224.000,00	6.274.000,00	86,85	7.550.000,00
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.224.000,00	6.274.000,00	86,85	7.550.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	311.006.600,00	300.457.536,00	96,61	176.632.905,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	266.906.600,00	266.752.319,00	99,94	145.871.741,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	44.100.000,00	33.705.217,00	76,43	30.761.164,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	25.211.518.796,00	23.676.035.473,53	93,91	30.476.679.378,48
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	318.636.300,00	318.356.840,00	99,91	505.479.240,00
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	93.636.300,00	93.495.500,00	99,85	118.511.240,00
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00	286.968.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	100.000.000,00
5.1.02.03.01.0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	200.000.000,00	199.861.340,00	99,93	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.249.223.473,00	6.180.848.093,00	85,26	6.458.921.257,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	42.500.000,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	75.000.000,00	53.912.342,00	71,88	0,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	92.000.000,00	68.433.892,00	74,38	0,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	64.389.500,00	64.190.993,00	99,69	35.567.579,00
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	21.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	31.400.000,00	27.565.313,00	87,79	55.965.174,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Lainnya	106.000.000,00	101.493.717,00	95,75	85.839.763,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	900.000.000,00	792.330.212,00	88,04	737.856.154,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.732.974.124,00	2.304.112.471,00	84,31	2.065.993.278,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	42.000.000,00	25.868.981,00	61,59	20.053.130,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	765.500.000,00	613.251.785,00	80,11	591.610.672,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	42.500.000,00	33.429.445,00	78,66	53.025.951,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	10.500.000,00	10.450.000,00	99,52	12.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	555.664.000,00	474.441.801,00	85,38	758.622.738,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	13.400.000,00	8.856.000,00	66,09	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	68.843.216,00	61.469.560,00	89,29	144.007.045,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	691.175.340,00	612.547.446,00	88,62	710.460.759,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.820.000,00	22.079.659,00	96,76	22.861.007,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	72.643.720,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	53.488.983,00	25.250.000,00	47,21	0,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	35.000.000,00	26.995.000,00	77,13	0,00
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	63.750.000,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	12.538.500,00
5.1.02.03.02.0250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	187.900.000,00	182.850.500,00	97,31	161.258.200,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	11.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	479.394.000,00	421.236.562,00	87,87	508.372.422,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	121.774.310,00	93.150.675,00	76,49	117.559.986,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.500.000,00	8.306.739,00	97,73	8.230.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	30.349.378,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	100.000.000,00	99.625.000,00	99,63	102.355.801,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.421.430.619,00	9.974.990.033,53	95,72	13.220.471.309,48
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.065.736.789,00	6.999.477.799,04	99,06	9.674.654.565,48
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	52.000.000,00	51.910.000,00	99,83	174.931.100,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	562.800.000,00	546.690.642,49	97,14	0,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.741.455.980,00	1.626.468.327,00	93,40	1.627.187.219,00
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	30.000.000,00	29.975.000,00	99,92	75.000.000,00
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	30.000.000,00	29.975.000,00	99,92	0,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	9.997.850,00	9.997.850,00	100,00	9.999.400,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	94.442.000,00	91.796.000,00	97,20	37.400.000,00
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	200.000.000,00	83.389.329,00	41,69	870.604.039,00
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	580.000.000,00	455.410.086,00	78,52	555.902.986,00
5.1.02.03.03.0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80	99.830.000,00
5.1.02.03.03.0060	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	4.998.000,00	0,00	0,00	94.962.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.172.228.404,00	7.151.840.507,00	99,72	10.266.807.572,00
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	1.826.614.161,00	1.825.765.000,00	99,95	3.673.095.800,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.000.000.000,00	991.947.072,00	99,19	3.006.790.460,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.227.614.243,00	4.216.530.040,00	99,74	3.426.768.992,00
5.1.02.03.04.0067	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	50.000.000,00	49.839.000,00	99,68	0,00
5.1.02.03.04.0078	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	0,00	0,00	0,00	24.798.500,00
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	50.000.000,00	49.961.100,00	99,92	0,00
5.1.02.03.04.0105	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	0,00	0,00	0,00	2.055.100,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	18.000.000,00	17.798.295,00	98,88	108.298.720,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	135.841.043.221,00	130.022.545.391,00	95,72	146.620.887.915,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	135.755.473.221,00	129.939.072.691,00	95,72	146.154.767.278,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	128.460.115.721,00	122.714.288.691,00	95,53	137.266.324.238,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.579.600.000,00	1.561.812.300,00	98,87	1.759.250.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.715.757.500,00	5.662.971.700,00	99,08	7.129.193.040,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	85.570.000,00	83.472.700,00	97,55	466.120.637,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa—Luar Negeri	85.570.000,00	83.472.700,00	97,55	466.120.637,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.758.459.750,00	8.614.558.181,00	98,36	12.257.803.450,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.175.463.750,00	6.126.874.000,00	99,21	9.946.506.976,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	970.150.000,00	930.104.000,00	95,87	765.766.976,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	207.500.000,00	201.000.000,00	96,87	437.990.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	4.762.780.000,00	4.760.770.000,00	99,96	8.680.800.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	235.033.750,00	235.000.000,00	99,99	0,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	61.950.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.582.996.000,00	2.487.684.181,00	96,31	2.311.296.474,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.582.996.000,00	2.487.684.181,00	96,31	2.091.296.474,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.210.747.983,00	69.142.728.716,00	101,37	64.564.991.944,60
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.210.747.983,00	69.142.728.716,00	101,37	64.564.991.944,60
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.210.747.983,00	69.142.728.716,00	101,37	64.564.991.944,60
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.677.707.677,00	47.353.942.051,63	89,89	36.569.523.429,05
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.677.707.677,00	47.353.942.051,63	89,89	36.569.523.429,05
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.677.707.677,00	47.353.942.051,63	89,89	36.569.523.429,05
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.012.047,00	6.439.282.345,00	101,42	7.093.341.745,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	6.349.012.047,00	6.439.282.345,00	101,42	7.093.341.745,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.03.04.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-jangka Pendek	6.349.012.047,00	6.439.282.345,00	101,42	7.093.341.745,00
5.1.03.04.01.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-jangka Pendek	6.349.012.047,00	6.439.282.345,00	101,42	7.093.341.745,00
5.1.05	Belanja Hibah	132.481.124.769,00	132.240.736.851,00	99,82	85.797.138.870,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	108.889.565.622,00	108.887.795.122,00	100,00	55.083.190.800,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	108.889.565.622,00	108.887.795.122,00	100,00	55.083.190.800,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	108.889.565.622,00	108.887.795.122,00	100,00	55.083.190.800,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.476.950.000,00	22.261.450.000,00	99,04	22.971.199.992,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.115.000.000,00	11.967.450.000,00	98,78	8.994.199.992,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.115.000.000,00	11.967.450.000,00	98,78	8.949.283.992,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	44.916.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	100,00	1.647.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	100,00	1.647.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.131.950.000,00	7.064.000.000,00	99,05	11.205.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.131.950.000,00	7.064.000.000,00	99,05	11.205.000.000,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	300.000.000,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	300.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	100,00	825.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	100,00	825.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	6.670.615.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	0,00	0,00	6.670.615.000,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	0,00	0,00	6.670.615.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.114.609.147,00	1.091.491.729,00	97,93	1.072.133.078,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.114.609.147,00	1.091.491.729,00	97,93	1.072.133.078,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.114.609.147,00	1.091.491.729,00	97,93	1.072.133.078,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.283.213.000,00	11.191.847.860,00	99,19	24.878.511.324,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00	88.261.574,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00	10.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00	10.000.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	78.261.574,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	78.261.574,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	7.868.163.000,00	7.807.738.560,00	99,23	19.546.500.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.750.962.000,00	2.750.958.560,00	100,00	7.881.500.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.750.962.000,00	2.750.958.560,00	100,00	7.881.500.000,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.117.201.000,00	5.056.780.000,00	98,82	11.665.000.000,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.117.201.000,00	5.056.780.000,00	98,82	11.665.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.295.650.000,00	1.292.109.300,00	99,73	1.585.749.750,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	765.500.000,00	765.500.000,00	100,00	1.058.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	765.500.000,00	765.500.000,00	100,00	1.058.000.000,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	530.150.000,00	526.609.300,00	99,33	527.749.750,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	530.150.000,00	526.609.300,00	99,33	527.749.750,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.099.400.000,00	2.087.000.000,00	99,41	3.658.000.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.099.400.000,00	2.087.000.000,00	99,41	3.658.000.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.099.400.000,00	2.087.000.000,00	99,41	3.658.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.605.785.176.582,00	1.556.182.022.343,16	96,91	1.475.863.473.693,15
5.2	BELANJA MODAL	257.490.295.402,00	220.354.238.401,45	85,58	230.302.490.856,51
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.466.898.227,00	73.194.098.495,00	96,99	57.681.672.265,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	5.288.454.220,00	5.229.426.100,00	98,88	57.586.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	200.000.000,00	199.500.000,00	99,75	0,00
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Tractor	200.000.000,00	199.500.000,00	99,75	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	5.088.454.220,00	5.029.926.100,00	98,85	57.586.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	1.995.500.000,00	1.984.000.000,00	99,42	28.600.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	33.614.300,00	23.703.500,00	70,52	28.986.000,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	3.015.000.000,00	3.011.500.000,00	99,88	0,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	44.339.920,00	10.722.600,00	24,18	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	7.275.352.961,00	7.108.827.446,00	97,71	10.498.167.946,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.677.112.961,00	5.540.248.924,00	97,59	7.558.620.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.806.702.000,00	1.736.200.000,00	96,10	2.559.840.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.407.500.000,00	1.362.400.000,00	96,80	3.122.600.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	659.612.000,00	659.000.000,00	99,91	1.572.400.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	763.298.961,00	747.818.924,00	97,97	303.780.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	90.000.000,00	84.830.000,00	94,26	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	950.000.000,00	950.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.598.240.000,00	1.568.578.522,00	98,14	2.939.547.946,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	2.939.547.946,00
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	1.598.240.000,00	1.568.578.522,00	98,14	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	516.120.000,00	512.931.500,00	99,38	353.882.999,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	510.700.000,00	507.631.500,00	99,40	323.632.999,00
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0,00	0,00	0,00	120.199.999,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00	203.433.000,00
5.2.02.03.01.0009	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	400.000.000,00	399.371.500,00	99,84	0,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	110.700.000,00	108.260.000,00	97,80	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	5.420.000,00	5.300.000,00	97,79	30.250.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	5.420.000,00	5.300.000,00	97,79	11.100.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.450.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	4.473.180.800,00	4.447.991.324,00	99,44	1.763.692.192,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	4.473.180.800,00	4.447.991.324,00	99,44	1.763.692.192,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	3.371.505.000,00	3.348.454.900,00	99,32	1.358.873.992,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	612.675.800,00	612.299.000,00	99,94	0,00
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	265.000.000,00	263.280.000,00	99,35	0,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	224.000.000,00	223.957.424,00	99,98	0,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00	404.818.200,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.611.500.874,00	7.848.734.017,00	103,12	8.760.646.101,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.527.694.024,00	2.789.199.837,00	110,35	2.319.713.514,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	65.599.999,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.267.124,00	6.260.000,00	99,89	175.214.750,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.521.426.900,00	2.782.939.837,00	110,37	2.078.898.765,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.486.236.700,00	4.469.413.193,00	99,62	5.396.256.027,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.326.628.700,00	2.349.781.750,00	101,00	2.364.459.769,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	7.582.000,00	7.312.500,00	96,45	33.154.010,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.114.655.700,00	1.114.854.400,00	100,02	1.176.508.592,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	23.920.400,00	19.755.400,00	82,59	11.429.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.008.299.900,00	972.709.143,00	96,47	1.781.961.656,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.150.000,00	5.000.000,00	97,09	28.743.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	597.570.150,00	590.120.987,00	98,75	1.044.676.560,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	169.234.000,00	164.199.460,00	97,03	417.606.459,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	47.518.650,00	43.781.000,00	92,13	173.858.280,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	219.588.000,00	221.178.800,00	100,72	176.597.799,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	63.087.500,00	62.905.000,00	99,71	82.410.293,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	20.226.000,00	20.208.727,00	99,91	0,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	62.466.000,00	62.413.000,00	99,92	72.207.500,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	15.450.000,00	15.435.000,00	99,90	121.996.229,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.953.152.670,00	1.962.608.009,00	100,48	1.566.613.353,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.792.957.670,00	1.808.220.000,00	100,85	619.567.353,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	165.907.850,00	160.885.000,00	96,97	144.983.706,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.590.757.500,00	1.612.835.000,00	101,39	199.654.350,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	6.335.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	36.292.320,00	34.500.000,00	95,06	268.594.297,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	160.195.000,00	154.388.009,00	96,38	947.046.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	94.275.000,00	90.388.009,00	95,88	164.647.000,00
5.2.02.06.02.0006	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	0,00	0,00	0,00	2.399.000,00
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	65.920.000,00	64.000.000,00	97,09	780.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.496.657.450,00	13.243.745.270,00	98,13	6.892.887.504,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.811.949.510,00	10.626.446.270,00	98,28	5.940.313.800,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.698.000,00	0,00	0,00	36.204.366,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	2.912.078.000,00	2.898.174.000,00	99,52	0,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	305.272.000,00	287.270.000,00	94,10	310.271.000,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	200.750.000,00	198.000.000,00	98,63	0,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	5.349.329.260,00	5.295.500.000,00	98,99	0,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00	4.601.432.000,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	2.000.000.000,00	1.905.982.943,00	95,30	0,00
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	0,00	0,00	0,00	992.406.434,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	42.822.250,00	41.519.327,00	96,96	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.684.707.940,00	2.617.299.000,00	97,49	952.573.704,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.684.707.940,00	2.617.299.000,00	97,49	952.573.704,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	14.321.144.000,00	14.701.653.080,00	102,66	10.962.419.200,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.218.326.234,00	1.850.129.178,00	83,40	3.029.943.450,00
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	2.218.326.234,00	1.850.129.178,00	83,40	64.333.000,00
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.870.610.450,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	12.102.817.766,00	12.851.523.902,00	106,19	7.892.821.000,00
5.2.02.08.03.0006	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	0,00	0,00	0,00	1.887.820.000,00
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	100.000.000,00	99.796.500,00	99,80	0,00
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	11.700.000.000,00	11.645.088.200,00	99,53	6.005.001.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	21.218.000,00	21.000.000,00	98,97	0,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	281.599.766,00	1.085.639.202,00	385,53	0,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	39.654.750,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	39.654.750,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.601.201.909,00	3.426.701.313,00	95,15	15.163.732.174,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.069.671.909,00	2.908.325.324,00	94,74	14.011.730.018,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	57.325.000,00	41.134.500,00	71,76	263.136.500,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.880.619.909,00	1.793.544.339,00	95,37	12.603.118.050,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.131.727.000,00	1.073.646.485,00	94,87	1.145.475.468,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	531.530.000,00	518.375.989,00	97,53	1.152.002.156,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	28.640.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	169.871.000,00	163.891.498,00	96,48	734.223.205,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	852.000,00	852.000,00	100,00	218.973.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	360.807.000,00	353.632.491,00	98,01	170.165.951,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	31.827.000,00	31.825.000,00	99,99	110.760.995,00
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	0,00	0,00	0,00	9.879.000,00
5.2.02.15.01.0002	Belanja Modal Suara	0,00	0,00	0,00	9.879.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	69.159.967,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	10.499.976,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	58.659.991,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	31.827.000,00	31.825.000,00	99,99	31.722.028,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	31.827.000,00	31.825.000,00	99,99	31.722.028,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	41.200.000,00	45.308.000,00	109,97	54.020.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	41.200.000,00	45.308.000,00	109,97	54.020.000,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	4.120.000,00
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	41.200.000,00	45.308.000,00	109,97	49.900.000,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	25.000.000,00	18.100.000,00	72,40	0,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	25.000.000,00	18.100.000,00	72,40	0,00
5.2.02.17.01.0024	Belanja Modal Mechanical Process	25.000.000,00	18.100.000,00	72,40	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	187.402.913,00	186.807.680,00	99,68	1.318.771.351,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	187.402.913,00	186.807.680,00	99,68	1.318.771.351,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	187.402.913,00	186.807.680,00	99,68	1.318.771.351,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.000.000,00	14.900.000,00	99,33	178.492.450,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.000.000,00	14.900.000,00	99,33	178.492.450,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	15.000.000,00	14.900.000,00	99,33	0,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	178.492.450,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.123.286.098,00	9.985.100.321,00	109,45	0,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.123.286.098,00	9.985.100.321,00	109,45	0,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.123.286.098,00	9.985.100.321,00	109,45	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.506.417.332,00	4.429.439.435,00	59,01	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.506.417.332,00	4.429.439.435,00	59,01	0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.506.417.332,00	4.429.439.435,00	59,01	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.486.591.071,00	68.302.416.338,45	71,53	42.838.898.903,91
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	89.553.652.069,00	62.915.416.398,45	70,25	39.486.957.685,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	89.544.752.069,00	62.906.516.398,45	70,25	39.018.851.220,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	19.285.000.000,00	16.193.569.942,00	83,97	3.159.228.387,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	39.248.790.550,00	18.623.454.672,97	47,45	4.994.435,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80	149.150.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	22.634.067.027,00	20.528.652.724,00	90,70	31.507.832.079,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	365.749.503,00	364.549.003,00	99,67	26.674.516,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	14.976.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	5.671.954.389,00	4.867.278.606,48	85,81	702.850.577,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	199.792.238,00
5.2.03.01.01.0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00	0,00	0,00	662.749.529,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	300.000.000,00	299.840.000,00	99,95	901.508.706,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.205.565.600,00	1.204.237.500,00	99,89	793.615.200,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	224.873.121,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	160.000.000,00	159.900.000,00	99,94	170.829.432,00
5.2.03.01.01.0034	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik	358.625.000,00	350.358.950,00	97,70	99.888.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	125.000.000,00	124.925.000,00	99,94	399.889.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	90.000.000,00	89.900.000,00	99,89	0,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00	468.106.465,00
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00	468.106.465,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.532.939.002,00	5.042.548.940,00	91,14	3.351.941.218,91
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	5.532.939.002,00	5.042.548.940,00	91,14	3.351.941.218,91
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	375.000.000,00	274.943.300,00	73,32	16.983.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	4.997.939.002,00	4.607.764.640,00	92,19	3.030.971.362,91
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	160.000.000,00	159.841.000,00	99,90	303.986.856,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	344.451.000,00	86,11	0,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	344.451.000,00	86,11	0,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	344.451.000,00	86,11	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.641.009.156,00	70.394.263.930,00	89,51	121.110.943.553,60
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	48.852.448.293,00	46.870.369.161,00	95,94	87.699.355.621,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	47.885.101.958,00	46.003.022.826,00	96,07	79.382.119.743,00
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	35.101.612.250,00	33.567.066.433,00	95,63	61.029.864.820,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	570.000.000,00	567.786.348,00	99,61	1.480.880.800,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	2.341.638.500,00	2.307.005.731,00	98,52	0,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	9.871.851.208,00	9.561.164.314,00	96,85	16.871.374.123,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	967.346.335,00	867.346.335,00	89,66	8.317.235.878,00
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	967.346.335,00	867.346.335,00	89,66	8.222.297.698,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	94.938.180,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	26.123.694.863,00	20.141.344.769,00	77,10	33.284.295.752,60
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	16.043.521.350,00	10.282.954.752,00	64,09	20.446.605.215,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	16.043.521.350,00	10.282.954.752,00	64,09	20.446.605.215,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	7.395.236.207,00	7.387.485.401,00	99,90	5.486.774.902,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	7.395.236.207,00	7.387.485.401,00	99,90	5.486.774.902,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	639.000.000,00	634.308.050,00	99,27	175.961.000,00
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	175.961.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	639.000.000,00	634.308.050,00	99,27	0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.045.937.306,00	1.836.596.566,00	89,77	7.174.954.635,60

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	0,00	0,00	207.411.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	70.850.000,00	70.849.600,00	100,00	0,00
5.2.04.02.07.0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	0,00	0,00	0,00	4.641.523.417,60
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.975.087.306,00	1.765.746.966,00	89,40	2.326.020.218,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	3.664.866.000,00	3.382.550.000,00	92,30	15.000.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.577.800.000,00	3.299.900.000,00	92,23	15.000.000,00
5.2.04.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	0,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.477.800.000,00	3.200.000.000,00	92,01	15.000.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	87.066.000,00	82.650.000,00	94,93	0,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	87.066.000,00	82.650.000,00	94,93	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	112.292.180,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	112.292.180,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	112.292.180,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.895.796.948,00	8.463.459.638,00	107,19	8.670.976.134,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	136.686.000,00	135.490.000,00	99,13	242.042.006,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	69.628.000,00	68.500.000,00	98,38	233.092.908,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	69.628.000,00	68.500.000,00	98,38	233.092.908,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	67.058.000,00	66.990.000,00	99,90	8.949.098,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	67.058.000,00	66.990.000,00	99,90	8.949.098,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	29.939.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	29.939.000,00
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	29.939.000,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95	0,00
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95	0,00
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	8.398.995.128,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	8.398.995.128,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	232.089.900,00
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.166.905.228,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.659.110.948,00	8.228.019.638,00	107,43	0,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.659.110.948,00	8.228.019.638,00	107,43	0,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.659.110.948,00	8.228.019.638,00	107,43	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	257.490.295.402,00	220.354.238.401,45	85,58	230.302.490.856,51
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53	991.984.875,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53	991.984.875,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53	991.984.875,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53	991.984.875,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53	991.984.875,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53	991.984.875,00
5.4	BELANJA TRANSFER	209.604.098.485,00	202.203.513.267,00	96,47	193.438.038.459,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	206.629.098.485,00	199.603.513.267,00	96,60	191.718.038.459,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	206.629.098.485,00	199.603.513.267,00	96,60	191.718.038.459,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	154.940.416.815,00	154.825.155.276,00	99,93	157.745.778.886,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	154.940.416.815,00	154.825.155.276,00	99,93	157.745.778.886,00
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	51.688.681.670,00	44.778.357.991,00	86,63	33.972.259.573,00
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	51.688.681.670,00	44.778.357.991,00	86,63	33.972.259.573,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.975.000.000,00	2.600.000.000,00	87,39	1.720.000.000,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2.925.000.000,00	2.600.000.000,00	88,89	1.210.000.000,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2.925.000.000,00	2.600.000.000,00	88,89	1.210.000.000,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2.925.000.000,00	2.600.000.000,00	88,89	1.210.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	510.000.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	510.000.000,00
5.4.02.05.02.0002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	510.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	209.604.098.485,00	202.203.513.267,00	96,47	193.438.038.459,00
	JUMLAH BELANJA	2.078.376.477.087,00	1.983.441.271.724,61	95,43	1.900.595.987.883,66

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
	SURPLUS/DEFISIT	(153.970.511.569,00)	(53.101.028.028,38)	34,49	(28.108.882.354,98)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	153.970.511.569,00	152.688.158.900,69	99,17	199.014.777.167,67
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	170.905.894.813,00	170.905.894.812,69	100,00	228.765.815.327,67
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	170.905.894.813,00	170.905.894.812,69	100,00	228.765.815.327,67
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	69.622.263.343,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	64.398.120.001,00
6.1.01.01.01.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	0,00	0,00	17.457.796.195,00
6.1.01.01.01.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	0,00	0,00	22.349.905.729,00
6.1.01.01.01.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	0,00	0,00	14.218.671.395,00
6.1.01.01.01.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	10.371.746.682,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	5.224.143.342,00
6.1.01.01.04.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	3.252.670.877,00
6.1.01.01.04.0004	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	1.971.472.465,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	501.721.917,40	501.721.917,40	100,00	0,00
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	501.721.917,40	501.721.917,40	100,00	0,00
6.1.01.03.01.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	500.681.138,40	500.681.138,40	100,00	0,00
6.1.01.03.01.0005	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.040.779,00	1.040.779,00	100,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	153.833.000.058,15	153.833.000.057,84	100,00	143.396.195.775,67
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	11.248.720.865,21	11.248.720.865,21	100,00	76.257.512.714,67
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00	0,00	31.994.848.577,67
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	0,00	0,00	0,00	2.262.664.137,00
6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	673.421.651,00	673.421.651,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	97.295.035,00	97.295.035,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	122.997.310,00	122.997.310,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	0,00	0,00	0,00	22.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	2.539.432.835,21	2.539.432.835,21	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	1.665.930.880,00	1.665.930.880,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0015	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	95.281.129,00	95.281.129,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	617.661.025,00	617.661.025,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0028	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga	5.165.201.000,00	5.165.201.000,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0030	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	271.500.000,00	271.500.000,00	100,00	0,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	132.329.157.067,94	132.329.157.067,63	100,00	66.901.497.652,00
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	0,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00
6.1.01.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	11.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	597.804.634,00	597.804.634,00	100,00	1.200.000.000,00
6.1.01.05.02.0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	985.226.244,00	985.226.244,00	100,00	5.900.000.000,00
6.1.01.05.02.0009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	278.462.239,00	278.462.239,00	100,00	0,00
6.1.01.05.02.0010	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	8.583.288.655,00	8.583.288.655,00	100,00	19.601.497.652,00
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	489.079.772,09	489.079.772,09	100,00	0,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	14.198.519.736,00	14.198.519.736,00	100,00	26.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	107.172.180.884,00	107.172.180.884,00	100,00	0,00
6.1.01.05.02.0028	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	24.594.903,85	24.594.903,54	100,00	0,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	10.030.122.125,00	10.030.122.125,00	100,00	0,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	10.030.122.125,00	10.030.122.125,00	100,00	0,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	237.185.409,00
6.1.01.05.04.0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00	0,00	237.185.409,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
6.1.01.05.04.0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	16.571.172.837,45	16.571.172.837,45	100,00	15.747.356.209,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	15.085.201.009,45	15.085.201.009,45	100,00	14.090.678.958,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	15.085.201.009,45	15.085.201.009,45	100,00	14.090.678.958,00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	1.485.971.828,00	1.485.971.828,00	100,00	1.656.677.251,00
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	1.485.971.828,00	1.485.971.828,00	100,00	1.656.677.251,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	170.905.894.813,00	170.905.894.812,69	100,00	228.765.815.327,67
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57	29.751.038.160,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57	19.751.038.160,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57	19.751.038.160,00
6.2.03.04.01	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-jangka Pendek	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57	19.751.038.160,00
6.2.03.04.01.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-jangka Pendek	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57	19.751.038.160,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57	29.751.038.160,00
	PEMBIAYAAN NETTO	153.970.511.569,00	152.688.158.900,69	99,17	199.014.777.167,67
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	99.587.130.872,31	0,00	170.905.894.812,69

5. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

No	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Komitmen Belanja PDN (Rp)	Realisasi Belanja PDN (Rp)	Persentase Realisasi PDN (%)	Permasalahan dan Strategi Penyelesaian
I	BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL	545.836.981.615,00	542.465.639.585,00	32.624.415.284,00	6,01	
						1. Gagal tender pada beberapa paket pengadaan sehingga proses pengadaan memakan waktu lebih lama 2. Adanya reviu atas beberapa paket pada dokumen perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan sehingga proses perbaikan menjadi berkepanjangan; 3. Keterlambatan pada banyak tender sehingga terjadi penumpukan di satu periode tertentu sedangkan Pokja Pemilihan memiliki keterbatasan jumlah personil sehingga proses reviu/kualifikasi memerlukan waktu yang lama; 4. Proses sanggah oleh penyedia yang berkepanjangan 5. Kurangnya pemahaman PPK terkait implementasi P3DN dalam belanja modal, barang dan jasa 6. Kurangnya pemahaman panitia pengadaan terkait pentingnya TKDN dalam pengadaan 7. Tidak tersedianya PDN sebagai substitusi atas barang-barang impor tersebut
	Total	545.836.981.615,00	542.465.639.585,00	32.624.415.284,00	6,01	

6. REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO
REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TA 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)			55.153.325.034	52.728.759.224	95,60
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	1.508.830.300	1.506.033.360	99,81
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	238.995.150	238.467.933	99,78
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan	740.060.150	734.076.575	99,19
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	781.628.350	730.206.440	93,42
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.509.748.550	1.503.761.764	99,60
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.377.390.189	2.358.972.717	99,23
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.459.109.180	10.101.785.127	96,58
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.670.286.650	2.649.701.093	99,23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.088.053.681	17.539.771.719	96,97
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Organisasi	4.665.782.304	3.706.221.446	79,43
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Ketahanan Pangan	9.700.134.224	9.559.038.043	98,55
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Biro Organisasi	1.075.402.806	929.510.289	86,43
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	1.337.903.500	1.171.212.718	87,54
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan			4.330.634.240	4.294.206.069	99,16
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	986.274.790,00	979.414.415,00	99,30
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.344.359.450,00	3.314.791.654,00	99,12
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			176.267.333.755	169.417.211.609	96,11
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian Daerah	1.110.266.175	1.096.352.109	98,75
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	195.418.000	194.589.600	99,58
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial	1.801.075.135	1.791.395.615	99,46
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Kesehatan	91.360.000	89.552.218	98,02

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	85.234.879.300	80.717.273.166	94,70
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	1.087.432.140	1.016.931.963	93,52
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinas Sosial	128.602.000	119.102.510	92,61
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Kesehatan	59.610.000	59.506.000	99,83
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	356.432.000	338.968.741	95,10
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kesehatan	26.792.841.373	26.383.914.912	98,47
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Satuan Polisi Pamong Praja	6.460.642.532	6.262.904.740	96,94
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sekretariat DPRD	49.522.047.880	48.314.597.720	97,56
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	3.305.663.720	2.922.495.993	88,41
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	121.063.500	109.626.322	90,55
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			0	0	0,00
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			16.610.608.464	16.439.436.527	98,97
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	2.781.373.200	2.768.264.214	99,53
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	4.855.742.500	4.829.812.479	99,47
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	8.333.102.914	8.210.978.886	98,53
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	122.090.000	121.725.605	99,70
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	518.299.850	508.655.343	98,14
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			28.135.837.085	27.736.072.089	98,58
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	28.135.837.085	27.736.072.089	98,58
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			181.829.071.755	172.996.483.381	95,14
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Biro Hukum	2.247.257.850	1.989.967.140	88,55
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Badan Penghubung	1.415.253.654	1.370.627.066	96,85
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	139.788.750	139.677.891	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	113.892.500	113.780.200	99,90
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	328.931.250	325.890.717	99,08
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	9.854.145.106	9.815.341.187	99,61
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	5.810.149.480	5.340.744.859	91,92
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja	5.172.881.235	5.077.855.859	98,16
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	68.027.588.883	62.417.784.707	91,75
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Penghubung	7.991.013.951	7.437.851.644	93,08
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.102.349.892	7.951.988.506	98,14
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Inspektorat	19.012.602.424	18.665.765.911	98,18
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sekretariat DPRD	49.522.047.880	48.314.597.720	97,56
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	2.662.816.900	2.638.132.340	99,07
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	1.428.352.000	1.396.477.634	97,77

7. REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING TA 2023

No	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
	1	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.885.653.618	2.751.411.692	95,35
		Belanja Operasi	2.885.653.618	2.751.411.692	95,35
		Belanja Barang dan Jasa	2.885.653.618	2.751.411.692	95,35
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2.342.565.750	2.263.169.628	96,61
		Belanja Operasi	2.342.565.750	2.263.169.628	96,61
		Belanja Barang dan Jasa	2.342.565.750	2.263.169.628	96,61
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	112.589.100	110.639.880	98,27
		Belanja Operasi	112.589.100	110.639.880	98,27
		Belanja Barang dan Jasa	112.589.100	110.639.880	98,27
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00

No	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
	3	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	356.480.000	346.535.900	97,21
		Belanja Operasi	356.480.000	346.535.900	97,21
		Belanja Barang dan Jasa	356.480.000	346.535.900	97,21
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				
	1	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	356.432.000	338.968.741	95,10
		Belanja Operasi	356.432.000	338.968.741	95,10
		Belanja Barang dan Jasa	356.432.000	338.968.741	95,10
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
4	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				
	1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	131.482.000	130.769.500	99,46
		Belanja Operasi	131.482.000	130.769.500	99,46
		Belanja Barang dan Jasa	131.482.000	130.769.500	99,46
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00

No	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
5	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi				
	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	63.936.000	63.820.100	99,82
		Belanja Operasi	63.936.000	63.820.100	99,82
		Belanja Barang dan Jasa	63.936.000	63.820.100	99,82
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
6	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				
	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	14.348.100.000	12.758.763.804	88,92
		Belanja Operasi	14.348.100.000	12.758.763.804	88,92
		Belanja Barang dan Jasa	14.348.100.000	12.758.763.804	88,92
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
7	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	953.948.475	906.565.692	95,03
		Belanja Operasi	953.948.475	906.565.692	95,03
		Belanja Barang dan Jasa	953.948.475	906.565.692	95,03
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00

No	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
	2	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	153.962.225	99.602.528	64,69
		Belanja Operasi	153.962.225	99.602.528	64,69
		Belanja Barang dan Jasa	153.962.225	99.602.528	64,69
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
8	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional				
	1	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	102.093.450	95.140.741	93,19
		Belanja Operasi	102.093.450	95.140.741	93,19
		Belanja Barang dan Jasa	102.093.450	95.140.741	93,19
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
	2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	565.602.000	536.996.976	94,94
		Belanja Operasi	565.602.000	536.996.976	94,94
		Belanja Barang dan Jasa	565.602.000	536.996.976	94,94
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00

No	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
9	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	24.999.875	24.723.500	98,89
		Belanja Operasi	24.999.875	24.723.500	98,89
		Belanja Barang dan Jasa	24.999.875	24.723.500	98,89
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
10	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti				
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	60.042.000	55.982.728	93,24
		Belanja Operasi	60.042.000	55.982.728	93,24
		Belanja Barang dan Jasa	60.042.000	55.982.728	93,24
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
11	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				

No	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	429.165.700	428.585.356	99,86
		Belanja Operasi	429.165.700	428.585.356	99,86
		Belanja Barang dan Jasa	199.165.700	198.585.356	99,71
		Belanja Hibah	230.000.000	230.000.000	100,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
12	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti				
	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	339.522.000	335.961.448	98,95
		Belanja Operasi	339.522.000	335.961.448	98,95
		Belanja Barang dan Jasa	139.522.000	135.961.448	97,45
		Belanja Hibah	200.000.000	200.000.000	100,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
13	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi				
	1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	282.856.000	280.058.750	99,01
		Belanja Operasi	282.856.000	280.058.750	99,01
		Belanja Barang dan Jasa	282.856.000	280.058.750	99,01
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00

No	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	194.680.000	194.197.835	99,75
		Belanja Operasi	194.680.000	194.197.835	99,75
		Belanja Barang dan Jasa	194.680.000	194.197.835	99,75
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
14	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi				
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	66.754.300	66.513.360	99,64
		Belanja Operasi	66.754.300	66.513.360	99,64
		Belanja Barang dan Jasa	66.754.300	66.513.360	99,64
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
15	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
	1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	294.907.390	294.585.357	99,89
		Belanja Operasi	293.516.890	293.349.117	99,94
		Belanja Barang dan Jasa	293.516.890	293.349.117	99,94

No	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	1.390.500	1.236.240	88,91
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	1.390.500	1.236.240	88,91
16	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat				
	1	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.862.363.300	2.837.414.080	99,13
		Belanja Operasi	2.862.363.300	2.837.414.080	99,13
		Belanja Barang dan Jasa	2.862.363.300	2.837.414.080	99,13
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
17	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
	1	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	675.696.750	674.952.700	99,89
		Belanja Operasi	675.696.750	674.952.700	99,89
		Belanja Barang dan Jasa	75.696.750	74.952.700	99,02
		Belanja Hibah	600.000.000	600.000.000	100,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00

No	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
18	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				
	1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	195.966.000	190.460.328	97,19
		Belanja Operasi	195.966.000	190.460.328	97,19
		Belanja Barang dan Jasa	184.909.000	179.433.328	97,04
		Belanja Hibah	11.057.000	11.027.000	99,73
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
19	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.292.784.750	1.289.055.716	99,71
		Belanja Operasi	1.292.784.750	1.289.055.716	99,71
		Belanja Barang dan Jasa	992.784.750	989.055.716	99,62
		Belanja Hibah	300.000.000	300.000.000	100,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
20	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	167.439.800	155.595.508	92,93
		Belanja Operasi	167.439.800	155.595.508	92,93
		Belanja Barang dan Jasa	167.439.800	155.595.508	92,93
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00

No	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
21	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
	1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	173.236.200	172.510.964	99,58
		Belanja Operasi	173.236.200	172.510.964	99,58
		Belanja Barang dan Jasa	173.236.200	172.510.964	99,58
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
22	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
	1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	290.852.450	290.539.261	99,89
		Belanja Operasi	290.852.450	290.539.261	99,89
		Belanja Barang dan Jasa	290.852.450	290.539.261	99,89
		Belanja Hibah	-	-	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
		Belanja Modal	-	-	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
	Total Belanja Stunting		29.724.111.133	27.693.522.073	93,17

8. REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
A) PROVINSI

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TA 2024

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1,	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		52.538.652.345,00	51.785.897.393,00	98,57
	1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	557.277.000,00	555.302.600,00	99,65
		Belanja Operasi	557.277.000,00	555.302.600,00	99,65
		Belanja Barang dan Jasa	557.277.000,00	555.302.600,00	99,65
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	51.981.375.345,00	51.230.594.793,00	98,56
		Belanja Operasi	40.316.026.031,00	38.740.181.223,00	96,09
		Belanja Barang dan Jasa	40.316.026.031,00	38.740.181.223,00	96,09
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	11.665.349.314,00	12.490.413.570,00	107,07
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	5.726.117.814,00	6.099.056.332,00	106,51
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	5.939.231.500,00	6.391.357.238,00	107,61
2,	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		32.108.986.109,00	34.686.801.791,00	108,03
	1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	2.348.506.050,00	2.347.304.654,00	99,95
		Belanja Operasi	2.348.506.050,00	2.347.304.654,00	99,95
		Belanja Barang dan Jasa	2.348.506.050,00	2.347.304.654,00	99,95
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	29.760.480.059,00	32.339.497.137,00	108,67
		Belanja Operasi	25.084.696.432,00	27.088.903.049,00	107,99
		Belanja Barang dan Jasa	25.084.696.432,00	27.088.903.049,00	107,99
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	4.675.783.627,00	5.250.594.088,00	112,29
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	2.972.854.179,00	3.427.881.688,00	115,31
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	1.702.929.448,00	1.822.712.400,00	107,03
3,	Pengelolaan Pendidikan Khusus		6.482.976.815,00	6.193.602.086,00	95,54
	1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	2.229.948.000,00	2.228.661.810,00	99,94
		Belanja Operasi	2.229.948.000,00	2.228.661.810,00	99,94
		Belanja Barang dan Jasa	2.229.948.000,00	2.228.661.810,00	99,94
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	4.253.028.815,00	3.964.940.276,00	93,23
		Belanja Operasi	3.811.764.710,00	3.500.827.975,00	91,84
		Belanja Barang dan Jasa	3.811.764.710,00	3.500.827.975,00	91,84
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	441.264.105,00	464.112.301,00	105,18
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	424.314.105,00	458.162.301,00	107,98
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	16.950.000,00	5.950.000,00	35,10
4,	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		65.451.124.350,00	64.200.428.170,00	98,09
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	991.895.350,00	971.319.219,00	97,93

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Operasi	991.895.350,00	971.319.219,00	97,93
		Belanja Barang dan Jasa	991.895.350,00	971.319.219,00	97,93
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	484.229.800,00	468.350.000,00	96,72
		Belanja Operasi	484.229.800,00	468.350.000,00	96,72
		Belanja Barang dan Jasa	484.229.800,00	468.350.000,00	96,72
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
		Belanja Operasi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
		Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	4	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	61.609.319.200,00	60.395.093.401,00	98,03
		Belanja Operasi	61.501.755.700,00	60.287.718.401,00	98,03
		Belanja Barang dan Jasa	61.501.755.700,00	60.287.718.401,00	98,03
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	107.563.500,00	107.375.000,00	99,82
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	107.563.500,00	107.375.000,00	99,82
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	5	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2.215.680.000,00	2.215.665.550,00	100,00
		Belanja Operasi	2.215.680.000,00	2.215.665.550,00	100,00
		Belanja Barang dan Jasa	15.680.000,00	15.665.550,00	99,91
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	100,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
5,	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		9.856.751.061,00	9.794.344.631,00	99,37
	1	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	458.347.500,00	414.273.564,00	90,38
		Belanja Operasi	458.347.500,00	414.273.564,00	90,38
		Belanja Barang dan Jasa	458.347.500,00	414.273.564,00	90,38
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	2	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	10.000.000,00	0,00	0,00
		Belanja Operasi	10.000.000,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	0,00
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	3	Pembangunan Kanal Banjir	4.953.775.093,00	4.946.672.287,00	99,86
		Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Modal	4.953.775.093,00	4.946.672.287,00	99,86
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.953.775.093,00	4.946.672.287,00	99,86
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	4	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	4.434.628.468,00	4.433.398.780,00	99,97
		Belanja Operasi	4.434.628.468,00	4.433.398.780,00	99,97
		Belanja Barang dan Jasa	4.434.628.468,00	4.433.398.780,00	99,97
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		19.964.913.450,00	14.078.202.194,00	70,51
	1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	15.423.539.000,00	9.663.279.402,00	62,65
		Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	15.423.539.000,00	9.663.279.402,00	62,65
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.423.539.000,00	9.663.279.402,00	62,65
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	2	Rehabilitasi Bendung Irigasi	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50
		Belanja Operasi	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50
		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.957.973.450,00	3.833.168.796,00	96,85
		Belanja Operasi	3.537.991.100,00	3.413.393.446,00	96,48
		Belanja Barang dan Jasa	3.537.991.100,00	3.413.393.446,00	96,48
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	419.982.350,00	419.775.350,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	419.982.350,00	419.775.350,00	99,95
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	4	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	573.401.000,00	571.803.996,00	99,72
		Belanja Operasi	573.401.000,00	571.803.996,00	99,72
		Belanja Barang dan Jasa	573.401.000,00	571.803.996,00	99,72
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
7	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		153.962.225,00	99.602.528,00	64,69
	1	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	153.962.225,00	99.602.528,00	64,69
		Belanja Operasi	153.962.225,00	99.602.528,00	64,69
		Belanja Barang dan Jasa	153.962.225,00	99.602.528,00	64,69
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
8	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		94.541.000,00	94.190.084,00	99,63
	1	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	94.541.000,00	94.190.084,00	99,63
		Belanja Operasi	94.541.000,00	94.190.084,00	99,63
		Belanja Barang dan Jasa	94.541.000,00	94.190.084,00	99,63
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
9	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		189.999.425,00	189.448.574,00	99,71
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	24.999.875,00	24.723.500,00	98,89
		Belanja Operasi	24.999.875,00	24.723.500,00	98,89
		Belanja Barang dan Jasa	24.999.875,00	24.723.500,00	98,89
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	2	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	164.999.550,00	164.725.074,00	99,83
		Belanja Operasi	164.999.550,00	164.725.074,00	99,83
		Belanja Barang dan Jasa	164.999.550,00	164.725.074,00	99,83
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
10	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		125.000.000,00	124.712.500,00	99,77
	1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	125.000.000,00	124.712.500,00	99,77
		Belanja Operasi	125.000.000,00	124.712.500,00	99,77
		Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	124.712.500,00	99,77
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
11	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		1.690.476.860,00	1.683.499.021,00	99,59
	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	74.290.240,00	74.275.428,00	99,98
		Belanja Operasi	74.290.240,00	74.275.428,00	99,98
		Belanja Barang dan Jasa	74.290.240,00	74.275.428,00	99,98
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	556.419.986,00	549.974.208,00	98,84
		Belanja Operasi	556.419.986,00	549.974.208,00	98,84
		Belanja Barang dan Jasa	556.419.986,00	549.974.208,00	98,84
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.059.766.634,00	1.059.249.385,00	99,95
		Belanja Operasi	1.059.766.634,00	1.059.249.385,00	99,95
		Belanja Barang dan Jasa	314.266.634,00	313.749.385,00	99,84
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	745.500.000,00	745.500.000,00	100,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
12	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		589.668.800,00	370.858.678,00	62,89
	1	Penyediaan Permakanan	188.326.000,00	17.839.200,00	9,47
		Belanja Operasi	188.326.000,00	17.839.200,00	9,47
		Belanja Barang dan Jasa	188.326.000,00	17.839.200,00	9,47
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	2	Penyediaan Sandang	40.000.000,00	39.992.150,00	99,98
		Belanja Operasi	40.000.000,00	39.992.150,00	99,98
		Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.992.150,00	99,98
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	200.422.800,00	185.237.800,00	92,42
		Belanja Operasi	200.422.800,00	185.237.800,00	92,42
		Belanja Barang dan Jasa	200.422.800,00	185.237.800,00	92,42
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.000.000,00	0,00	0,00
		Belanja Operasi	2.000.000,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	0,00
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	5	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	98.878.000,00	71.806.800,00	72,62
		Belanja Operasi	98.878.000,00	71.806.800,00	72,62
		Belanja Barang dan Jasa	98.878.000,00	71.806.800,00	72,62
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	60.042.000,00	55.982.728,00	93,24
		Belanja Operasi	60.042.000,00	55.982.728,00	93,24
		Belanja Barang dan Jasa	60.042.000,00	55.982.728,00	93,24
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
13	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		813.826.800,00	792.776.225,00	97,41
	1	Penyediaan Permakanan	573.350.000,00	569.809.300,00	99,38
		Belanja Operasi	573.350.000,00	569.809.300,00	99,38
		Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	43.200.000,00	100,00
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	530.150.000,00	526.609.300,00	99,33
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	2	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	40.054.000,00	37.729.125,00	94,20
		Belanja Operasi	40.054.000,00	37.729.125,00	94,20
		Belanja Barang dan Jasa	40.054.000,00	37.729.125,00	94,20
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	200.422.800,00	185.237.800,00	92,42
		Belanja Operasi	200.422.800,00	185.237.800,00	92,42
		Belanja Barang dan Jasa	200.422.800,00	185.237.800,00	92,42
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
14	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		992.645.720,00	839.455.952,00	84,57
	1	Penyediaan Permakanan	300.000.000,00	224.692.999,00	74,90
		Belanja Operasi	300.000.000,00	224.692.999,00	74,90
		Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	224.692.999,00	74,90
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	2	Penyediaan Sandang	100.000.000,00	86.601.304,00	86,60
		Belanja Operasi	100.000.000,00	86.601.304,00	86,60
		Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	86.601.304,00	86,60
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	135.000.000,00	129.092.920,00	95,62

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Operasi	135.000.000,00	129.092.920,00	95,62
		Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	129.092.920,00	95,62
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	34.745.720,00	3.999.948,00	11,51
		Belanja Operasi	34.745.720,00	3.999.948,00	11,51
		Belanja Barang dan Jasa	34.745.720,00	3.999.948,00	11,51
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	302.460.000,00	294.473.130,00	97,36
		Belanja Operasi	302.460.000,00	294.473.130,00	97,36
		Belanja Barang dan Jasa	132.460.000,00	124.473.130,00	93,97
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
		Belanja Bantuan Sosial	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	6	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	19.540.000,00	17.992.900,00	92,08
		Belanja Operasi	19.540.000,00	17.992.900,00	92,08
		Belanja Barang dan Jasa	19.540.000,00	17.992.900,00	92,08
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	7	Pemulasaraan	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00
		Belanja Operasi	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00
		Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	80.900.000,00	77.602.751,00	95,92
		Belanja Operasi	80.900.000,00	77.602.751,00	95,92
		Belanja Barang dan Jasa	80.900.000,00	77.602.751,00	95,92
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
15	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		8.030.394.875,00	7.953.006.574,00	99,04
	1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.848.081.500,00	5.775.191.091,00	98,75
		Belanja Operasi	5.848.081.500,00	5.775.191.091,00	98,75
		Belanja Barang dan Jasa	730.880.500,00	718.411.091,00	98,29
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	5.117.201.000,00	5.056.780.000,00	98,82
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.034.899.375,00	2.030.474.113,00	99,78
		Belanja Operasi	2.034.899.375,00	2.030.474.113,00	99,78
		Belanja Barang dan Jasa	704.899.375,00	700.474.113,00	99,37
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Bantuan Sosial	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00	100,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	147.414.000,00	147.341.370,00	99,95
		Belanja Operasi	147.414.000,00	147.341.370,00	99,95
		Belanja Barang dan Jasa	30.452.000,00	30.382.810,00	99,77
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	116.962.000,00	116.958.560,00	100,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
16	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		1.087.432.140,00	1.016.931.963,00	93,52
	1	Penyediaan Permakanan	842.235.000,00	823.449.363,00	97,77
		Belanja Operasi	842.235.000,00	823.449.363,00	97,77
		Belanja Barang dan Jasa	842.235.000,00	823.449.363,00	97,77
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		Penyediaan Sandang	120.000.000,00	119.850.000,00	99,88
		Belanja Operasi	120.000.000,00	119.850.000,00	99,88
		Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	119.850.000,00	99,88
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	70.197.140,00	67.531.200,00	96,20

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Operasi	70.197.140,00	67.531.200,00	96,20
		Belanja Barang dan Jasa	70.197.140,00	67.531.200,00	96,20
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	25.000.000,00	6.101.400,00	24,41
		Belanja Operasi	25.000.000,00	6.101.400,00	24,41
		Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	6.101.400,00	24,41
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	30.000.000,00	0,00	0,00
		Belanja Operasi	30.000.000,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	0,00
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
17	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		372.220.000,00	365.638.540,00	98,23
	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	372.220.000,00	365.638.540,00	98,23
		Belanja Operasi	372.220.000,00	365.638.540,00	98,23
		Belanja Barang dan Jasa	372.220.000,00	365.638.540,00	98,23
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
18	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		417.576.276,00	407.885.953,00	97,68
	1	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	417.576.276,00	407.885.953,00	97,68
		Belanja Operasi	417.576.276,00	407.885.953,00	97,68
		Belanja Barang dan Jasa	417.576.276,00	407.885.953,00	97,68
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	#DIV/0!
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
19	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		177.750.000,00	177.079.281,00	99,62
	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	177.750.000,00	177.079.281,00	99,62
		Belanja Operasi	177.750.000,00	177.079.281,00	99,62
		Belanja Barang dan Jasa	177.750.000,00	177.079.281,00	99,62
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
20	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
		Belanja Operasi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
		Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
21	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		190.328.000,00	189.846.944,00	99,75
	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	190.328.000,00	189.846.944,00	99,75
		Belanja Operasi	190.328.000,00	189.846.944,00	99,75
		Belanja Barang dan Jasa	190.328.000,00	189.846.944,00	99,75
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
22	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		45.680.000,00	45.499.200,00	99,60
	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	45.680.000,00	45.499.200,00	99,60
		Belanja Operasi	45.680.000,00	45.499.200,00	99,60
		Belanja Barang dan Jasa	45.680.000,00	45.499.200,00	99,60
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
23	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		113.892.500,00	113.780.200,00	99,90
	1	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	113.892.500,00	113.780.200,00	99,90
		Belanja Operasi	113.892.500,00	113.780.200,00	99,90
		Belanja Barang dan Jasa	113.892.500,00	113.780.200,00	99,90
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
24	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		1.293.583.250,00	1.275.335.035,00	98,59
	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	158.400.000,00	157.908.000,00	99,69
		Belanja Operasi	158.400.000,00	157.908.000,00	99,69
		Belanja Barang dan Jasa	158.400.000,00	157.908.000,00	99,69
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	1.135.183.250,00	1.117.427.035,00	98,44
		Belanja Operasi	1.135.183.250,00	1.117.427.035,00	98,44
		Belanja Barang dan Jasa	1.135.183.250,00	1.117.427.035,00	98,44
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
25	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		1.185.120.000,00	1.180.566.500,00	99,62
	1	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.185.120.000,00	1.180.566.500,00	99,62
		Belanja Operasi	1.185.120.000,00	1.180.566.500,00	99,62
		Belanja Barang dan Jasa	1.185.120.000,00	1.180.566.500,00	99,62
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
26	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		3.878.168.000,00	3.840.842.340,00	99,04
	1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.878.168.000,00	3.840.842.340,00	99,04
		Belanja Operasi	3.878.168.000,00	3.840.842.340,00	99,04
		Belanja Barang dan Jasa	3.878.168.000,00	3.840.842.340,00	99,04
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
27	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		69.804.600,00	69.587.500,00	99,69
	1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	69.804.600,00	69.587.500,00	99,69
		Belanja Operasi	60.277.100,00	60.060.500,00	99,64
		Belanja Barang dan Jasa	60.277.100,00	60.060.500,00	99,64
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	9.527.500,00	9.527.000,00	99,99
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	9.527.500,00	9.527.000,00	99,99
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
28	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		2.307.585.589,00	2.226.510.896,00	96,49
	1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.718.732.289,00	1.700.909.217,00	98,96
		Belanja Operasi	532.866.689,00	515.264.693,00	96,70
		Belanja Barang dan Jasa	532.866.689,00	515.264.693,00	96,70
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Modal	1.185.865.600,00	1.185.644.524,00	99,98
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	708.565.600,00	708.388.400,00	99,97
		Belanja Peralatan dan Mesin	224.000.000,00	223.957.424,00	99,98
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	253.300.000,00	253.298.700,00	100,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	2	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	588.853.300,00	525.601.679,00	89,26
		Belanja Operasi	588.853.300,00	525.601.679,00	89,26
		Belanja Barang dan Jasa	588.853.300,00	525.601.679,00	89,26
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
29	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		430.424.500,00	429.958.679,00	99,89
	1	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	430.424.500,00	429.958.679,00	99,89
	0	Belanja Operasi	430.424.500,00	429.958.679,00	99,89
		Belanja Barang dan Jasa	430.424.500,00	429.958.679,00	99,89
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
30	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		1.635.122.000,00	1.421.751.372,00	86,95
	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	531.984.000,00	505.911.920,00	95,10
		Belanja Operasi	531.984.000,00	505.911.920,00	95,10
		Belanja Barang dan Jasa	531.984.000,00	505.911.920,00	95,10
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1.103.138.000,00	915.839.452,00	83,02
		Belanja Operasi	1.103.138.000,00	915.839.452,00	83,02
		Belanja Barang dan Jasa	1.103.138.000,00	915.839.452,00	83,02
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
31	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		29.040.000,00	28.160.000,00	96,97
	1	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	29.040.000,00	28.160.000,00	96,97
		Belanja Operasi	29.040.000,00	28.160.000,00	96,97
		Belanja Barang dan Jasa	29.040.000,00	28.160.000,00	96,97
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
32	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		341.580.400,00	336.233.683,00	98,43
	1	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	341.580.400,00	336.233.683,00	98,43
		Belanja Operasi	341.580.400,00	336.233.683,00	98,43
		Belanja Barang dan Jasa	341.580.400,00	336.233.683,00	98,43
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
33	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		135.360.000,00	135.110.860,00	99,82
	1	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	135.360.000,00	135.110.860,00	99,82
		Belanja Operasi	135.360.000,00	135.110.860,00	99,82
		Belanja Barang dan Jasa	135.360.000,00	135.110.860,00	99,82
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Total Belanja Kemiskinan Ekstrem		214.294.587.090,00	207.647.545.347,00	96,90

9. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI E-PURCHASING

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI E-PURCHASING TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui E- Purchasing (Rp)	Persentase (%)	Ket **)
1	Badan Kepegawaian Daerah	664.551.575,00	302.162.525,00	45,47%	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.682.391.675,00	1.240.647.900,00	73,74%	
3	Badan Keuangan	3.487.939.305,00	685.000.000,00	19,64%	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	906.304.575,00	0,00	0,00%	
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.606.436.175,00	0,00	0,00%	
6	Badan Penghubung	673.789.963,00	275.705.000,00	40,92%	
7	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.596.024.590,00	1.275.671.500,00	79,93%	
8	Biro Hukum	572.606.700,00	226.190.000,00	39,50%	
9	Biro Organisasi	547.511.907,00	52.240.000,00	9,54%	
10	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.317.079.303,00	0,00	0,00%	
11	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	359.113.700,00	52.500.000,00	14,62%	
12	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	576.113.825,00	170.138.000,00	29,53%	
13	Biro Umum	1.834.076.125,00	0,00	0,00%	
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	611.280.789,00	177.541.500,00	29,04%	
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.871.985.925,00	5.578.055.000,00	56,50%	
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.587.293.636,00	15.790.000,00	0,99%	
17	Dinas Kesehatan	6.448.661.960,00	1.455.468.650,00	22,57%	
18	Dinas Ketahanan Pangan	2.424.552.743,00	3.868.522.000,00	159,56%	
19	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	3.577.929.540,00	798.820.000,00	22,33%	

No	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui E- Purchasing (Rp)	Persentase (%)	Ket **)
20	Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan	16.628.610.350,00	12.049.000.000,00	72,46%	
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.586.391.927,00	18.398.664.000,00	401,16%	
22	Dinas Pariwisata	2.053.213.250,00	0,00	0,00%	
23	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.065.625.361,00	10.387.480.800,00	20,75%	
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	694.023.500,00	38.334.000,00	5,52%	
25	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.741.121.950,00	0,00	0,00%	
26	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	688.117.925,00	0,00	0,00%	
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.214.574.223,00	798.000.000,00	2,64%	
28	Dinas Perhubungan	1.481.834.775,00	1.061.589.000,00	71,64%	
29	Dinas Pertanian	12.787.794.525,00	9.093.036.000,00	71,11%	
30	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran	462.818.375,00	209.662.225,00	45,30%	
31	Dinas Sosial	7.910.986.914,00	5.119.861.350,00	64,72%	
32	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi	641.417.171,00	169.000.000,00	26,35%	
33	Inspektorat	2.016.284.513,00	0,00	0,00%	
34	Pimpinan Sekretariat Daerah	3.907.928.650,00	0,00	0,00%	
35	Rumah Sakit Umum Daerah dr Hasri Ainun Habibie	63.141.424.897,00	32.000.000,00	0,05%	
36	Sekretariat DPRD	10.545.040.716,00	112.892.000,00	1,07%	
37	Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP)	49.541.600,00	0,00	0,00%	
38	Laboratorium Kesehatan Daerah	2.393.386.000,00	700.672.000,00	29,28%	
39	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	2.786.817.000,00	1.393.717.800,00	50,01%	
40	UPTD Balai Perbibitan Ternak	1.008.360.675,00	201.500.000,00	19,98%	
41	UPTD Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas	53.599.725,00	0,00	0,00%	

No	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui E- Purchasing (Rp)	Persentase (%)	Ket **)
42	UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian	96.193.700,00	0,00	0,00%	
43	UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan	241.869.625,00	0,00	0,00%	
44	UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP)	3.266.200,00	0,00	0,00%	
45	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian	90.039.150,00	0,00	0,00%	
46	UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat	745.301.000,00	741.390.000,00	99,48%	
47	UPTD KPH Wilayah III Pohuwato	110.000.000,00	0,00	0,00%	
48	UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara	241.734.395,00	132.132.970,00	54,66%	
49	UPTD KPH Wilayah V Boalemo	33.231.900,00	0,00	0,00%	
50	UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo	1.088.316.447,00	941.640.000,00	86,52%	
51	UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo	155.063.066,00	0,00	0,00%	
52	UPTD Laboratorium Veteriner	574.496.550,00	479.234.000,00	83,42%	
53	UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma	782.208.250,00	0,00	0,00%	
54	UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPI Tenda)	1.479.861.004,00	0,00	0,00%	
55	UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta (PPI Tilamuta)	723.128.510,00	0,00	0,00%	
56	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo	234.723.100,00	0,00	0,00%	
57	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango	167.585.950,00	0,00	0,00%	
58	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo	259.584.850,00	0,00	0,00%	
59	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	256.540.300,00	0,00	0,00%	
60	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pohuwato	293.729.275,00	0,00	0,00%	
61	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kota Gorontalo	199.164.400,00	0,00	0,00%	

10. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) TA 2024

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) TA 2023

No.	SKPD	Belanja Barang dan Jasa			Belanja Modal			Keterangan
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	124.484.835.378,00	0,00	0,00	61.759.293.341,00	0,00	0,00	Belum ada realisasi karena belum tersedia menu KKPD pada SIPD Penatausahaan
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	7.757.200.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4	Dinas Kesehatan	75.870.683.010,00		0,00	13.013.038.500,00		0,00	
5	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibie	75.914.729.420,00	0,00	0,00	72.167.310.414,00	0,00	0,00	
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	39.990.872.435,00	0,00	0,00	79.093.552.178,00	0,00	0,00	
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.111.976.996,00	0,00	0,00	219.974.000,00	0,00	0,00	
11	Dinas Sosial	9.124.566.886,00	0,00	0,00	565.898.470,00	0,00	0,00	
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.601.526.121,00	0,00	0,00	51.364.950,00	0,00	0,00	
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.983.322.792,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
14	Dinas Ketahanan Pangan	4.161.980.600,00	0,00	0,00	606.300.000,00	0,00	0,00	
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.657.996.144,00	0,00	0,00	2.197.061.894,00	0,00	0,00	
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.964.109.015,00	0,00	0,00	220.251.100,00	0,00	0,00	
17	Dinas Perhubungan	4.776.899.375,00	0,00	0,00	4.596.258.615,00	0,00	0,00	
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	10.036.499.131,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
19	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	30.471.763.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	4.669.496.924,00	0,00	0,00	92.957.500,00	0,00	0,00	
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4.279.510.440,00	0,00	0,00	99.829.800,00	0,00	0,00	
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.549.689.039,00	0,00	0,00	137.041.500,00	0,00	0,00	
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.931.394.700,00	0,00	0,00	10.285.283.790,00	0,00	0,00	

No.	SKPD	Belanja Barang dan Jasa			Belanja Modal			Keterangan
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	
25	Dinas Pariwisata	5.591.718.000,00	0,00	0,00	827.658.000,00	0,00	0,00	
26	Dinas Pertanian	28.255.110.496,00	0,00	0,00	5.791.291.800,00	0,00	0,00	
27	Sekretariat Daerah	62.063.078.502,00	0,00	0,00	1.227.901.850,00	0,00	0,00	
28	Sekretariat DPRD	79.425.173.451,00	0,00	0,00	2.259.897.200,00	0,00	0,00	
29	Badan Penghubung	6.130.298.378,00	0,00	0,00	301.955.000,00	0,00	0,00	
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	7.350.455.858,00	0,00	0,00	75.944.000,00	0,00	0,00	
31	Inspektorat Provinsi Gorontalo	6.511.071.163,00	0,00	0,00	757.036.000,00	0,00	0,00	
32	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	8.319.642.840,00	0,00	0,00	416.995.500,00	0,00	0,00	
33	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	18.796.717.823,00	0,00	0,00	415.920.000,00	0,00	0,00	
34	Badan Kepegawaian	2.303.460.228,00	0,00	0,00	120.280.000,00	0,00	0,00	
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.439.721.453,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

11. REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA HIBAH UNTUK PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR YANG BERSUMBER DARI APBD

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA HIBAH UNTUK PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR YANG BERSUMBER DARI APBD TA 2024

NO	INSTANSI	ANGGARAN	REALISASI	JUMLAH TPS	KETERANGAN
1	KOMISI PEMILIHAN UMUM	90.523.000.000,00	87.452.047.060,00	2016	JUMLAH TPS TERSEBUT TERBAGI DI 5 (LIMA) KABUPATEN DAN 1 (SATU) KOTA
2	BADAN PENGAWAS PEMILU	24.126.132.000,00	18.432.000.034,00		
3	TNI	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
4	POLRI	7.398.386.885,00	7.096.293.470,00		

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL